



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah yang efektif dan efisien telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

b. bahwa peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan penyederhanaan birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ();

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output
9. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
10. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
11. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Prinsip Peta Proses Bisnis yaitu :

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;

- e. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- f. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- g. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyusunan Peta Proses Bisnis melalui 4 tahapan yaitu :

- a. tahap persiapan dan perencanaan yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;
- b. tahap pengembangan yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*;
- c. tahap penerapan/implementasi yaitu meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan peta proses bisnis, dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana; dan
- d. tahap pemantauan dan evaluasi yaitu memantau dan mengevaluasi relevansi dan efektivitas peta proses bisnis terhadap kinerja instansi pemerintah oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menggunakan jenis gambar peta dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Pasal 8

Peta Proses Bisnis menggunakan jenis gambar peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi peta proses bisnis pembangunan sistem pada Perangkat Daerah.
- (3) Peta Proses Bisnis Daerah disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (4) Peta Proses Bisnis Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah disusun oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana pada Perangkat Daerah.
- (3) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pada dokumen Peta Proses Bisnis dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Juni 2022


BUPATI TEGAL,

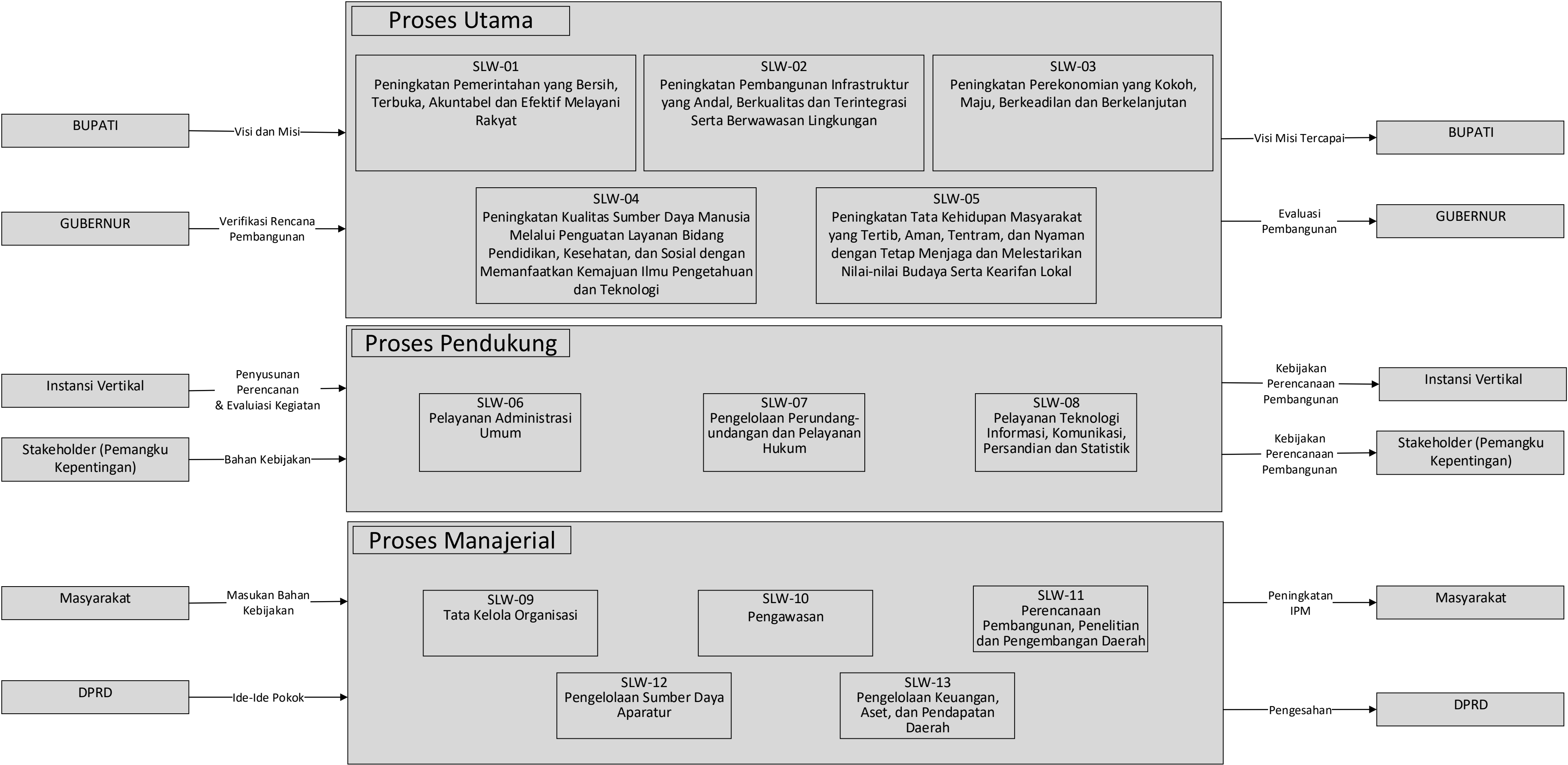
UMI AZIZAH

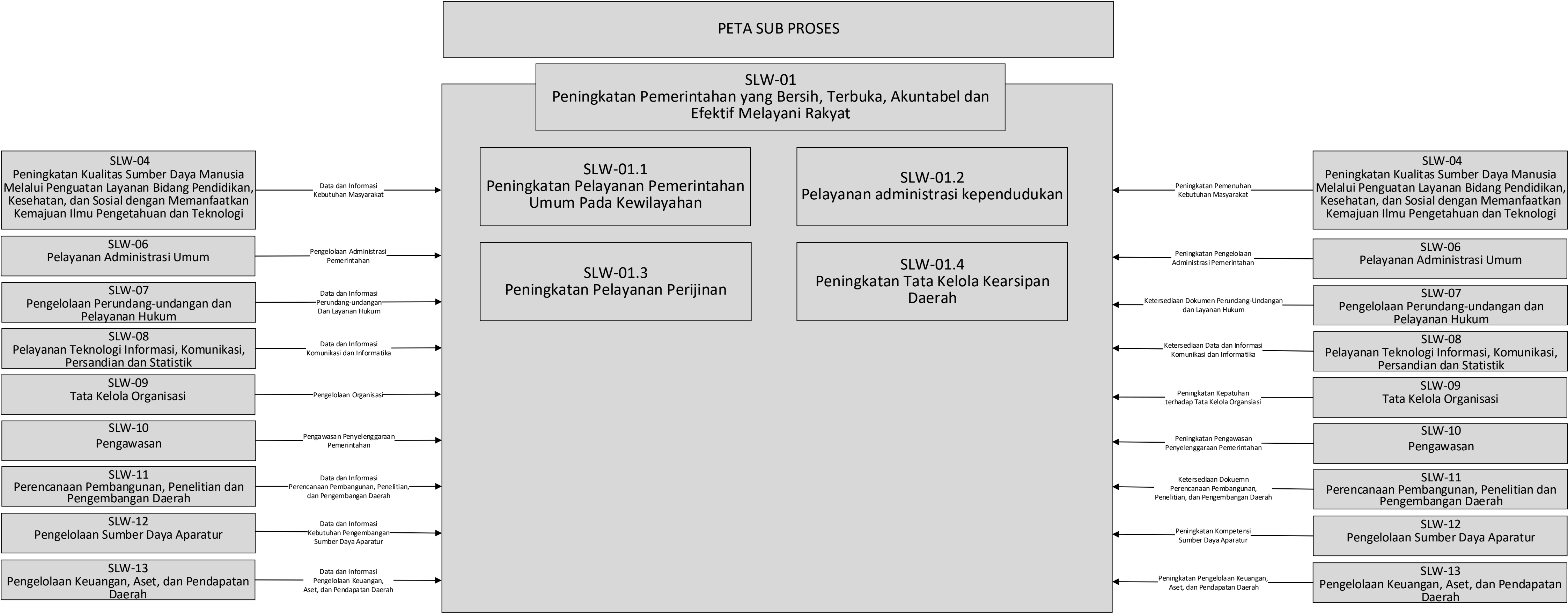
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 42





PETA RELASI

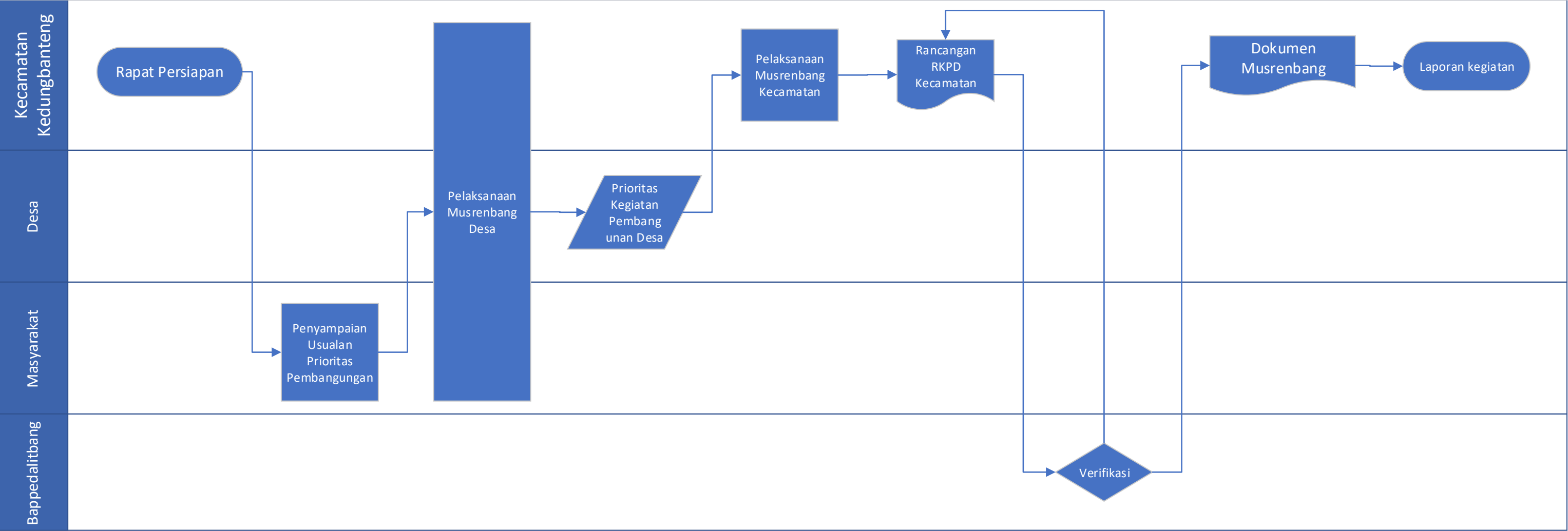
SLW-01.1

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Pada Kewilayahan

KECAMATAN

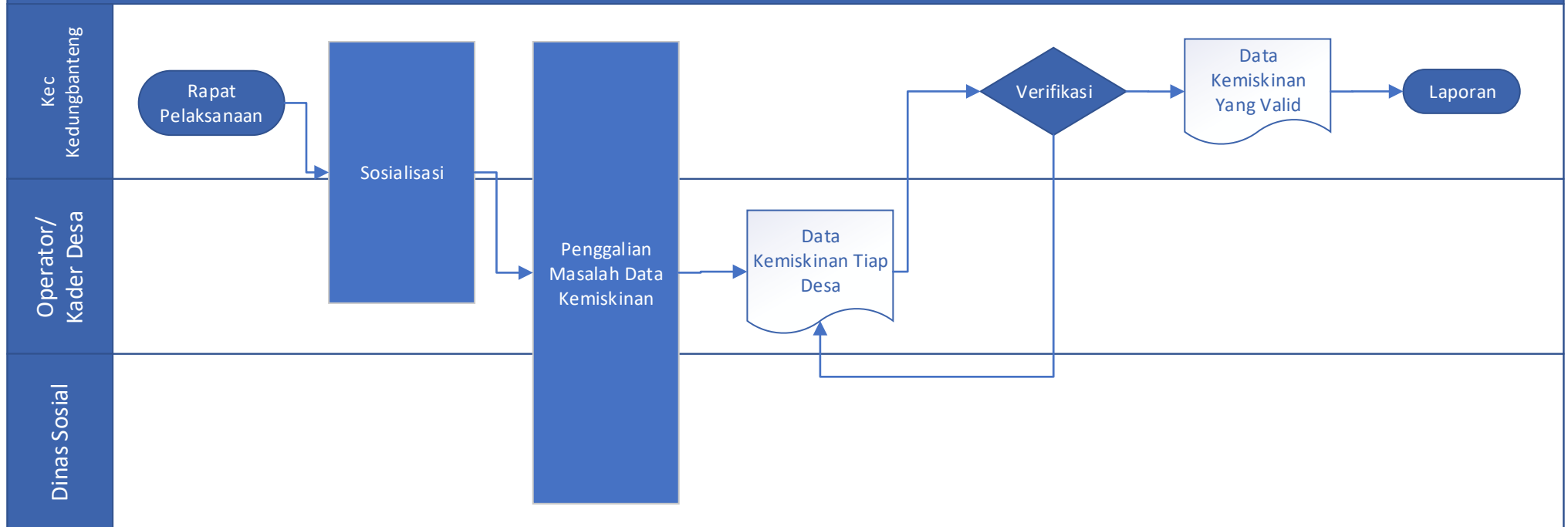
SEMUA PERANGKAT DAERAH

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



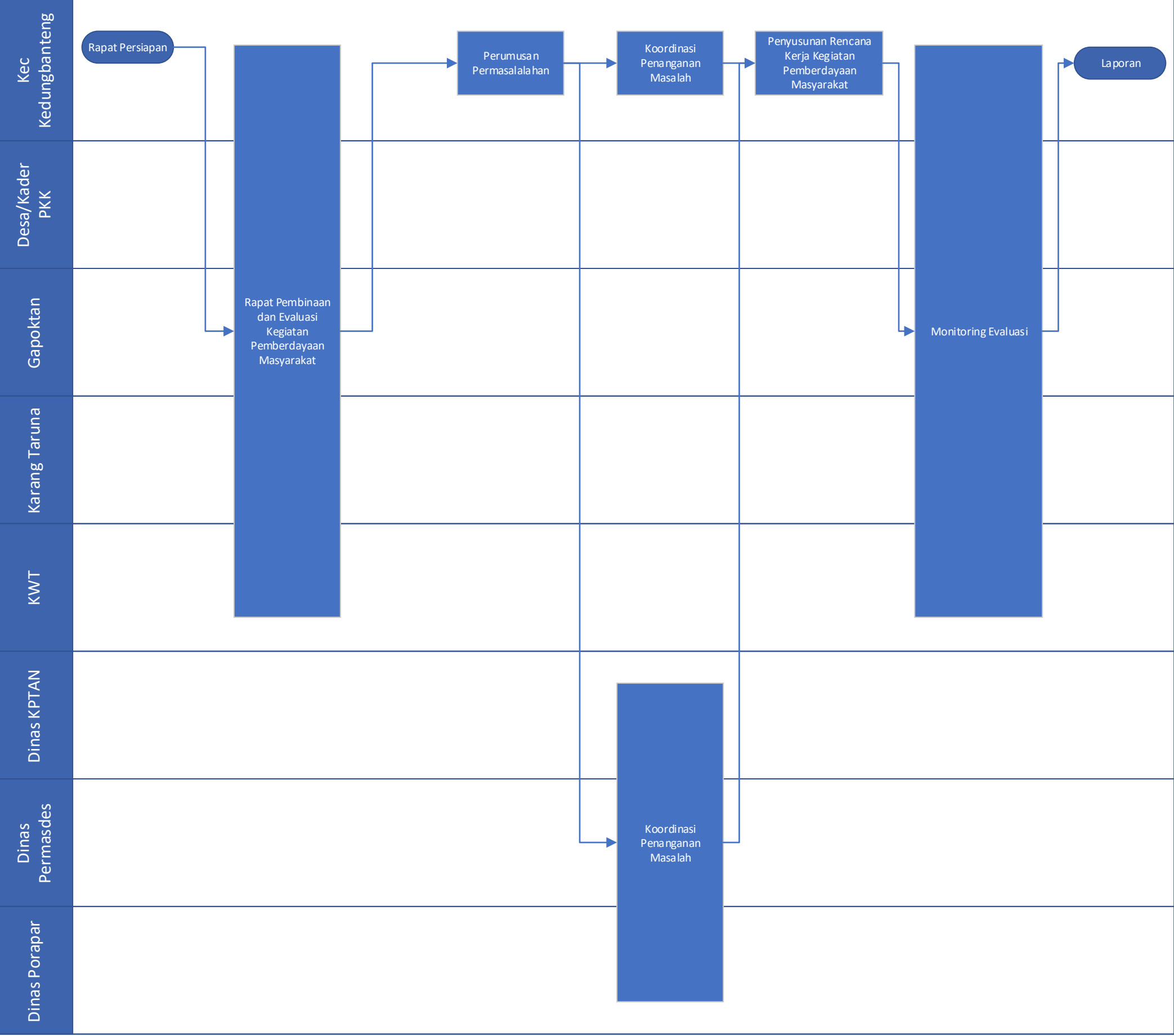
SLW-01.1 CFM 01.02

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

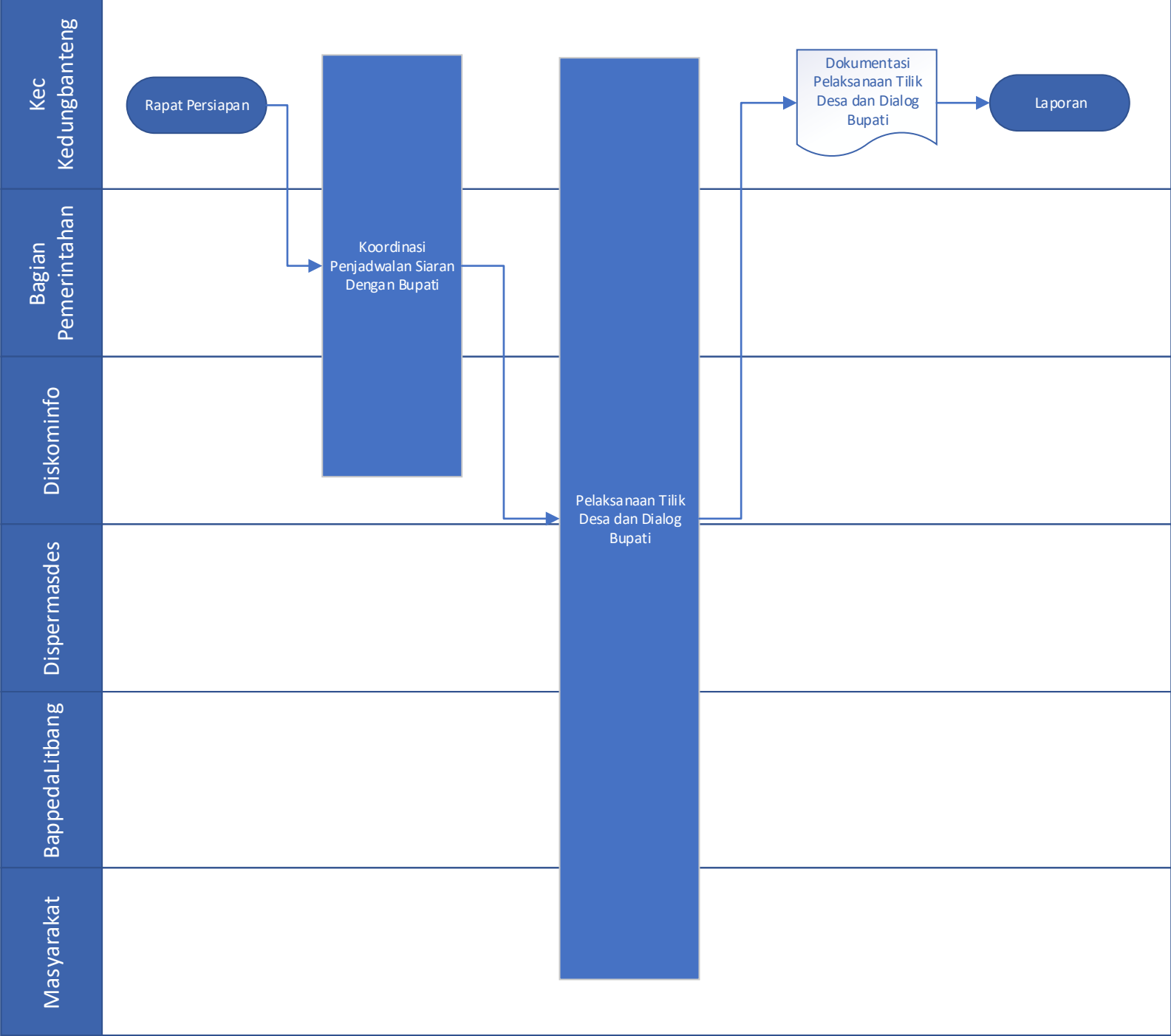


SLW-01.1 CFM 01.03

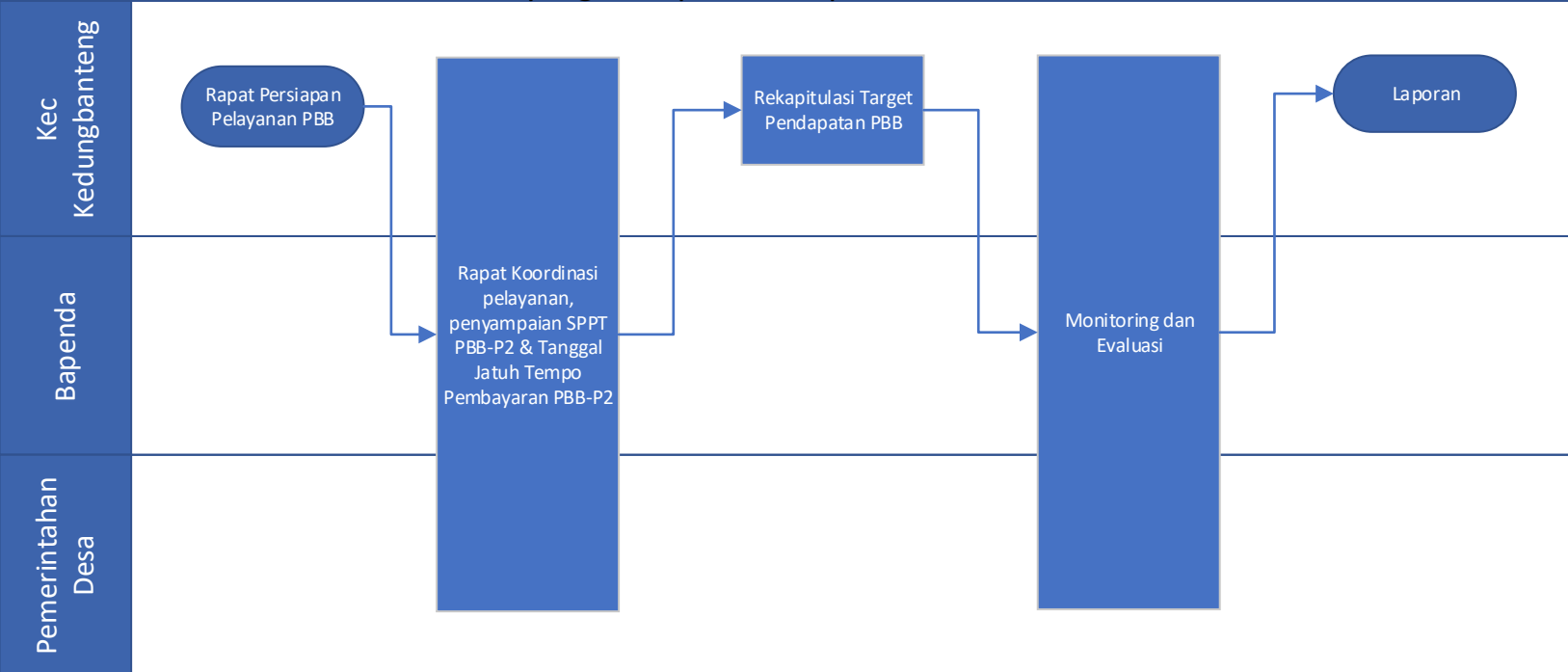
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



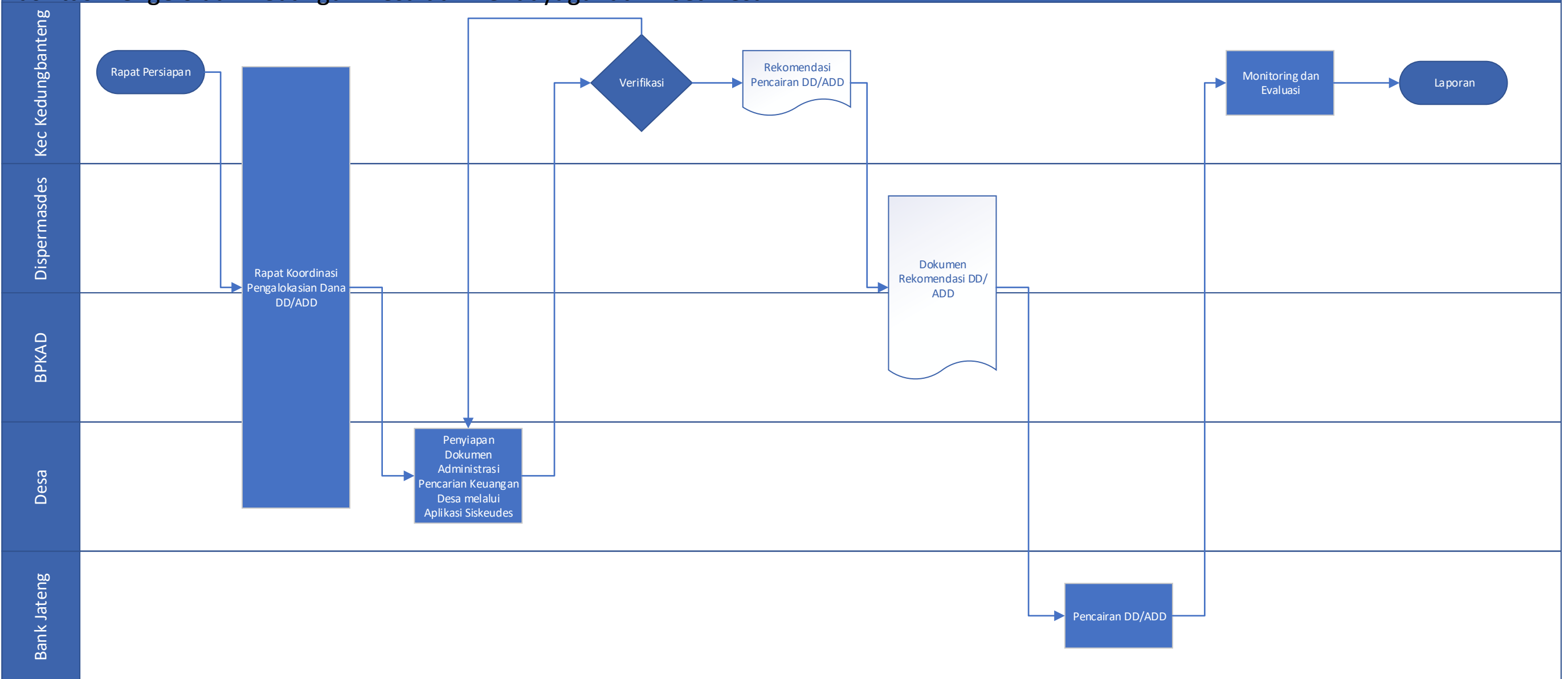
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



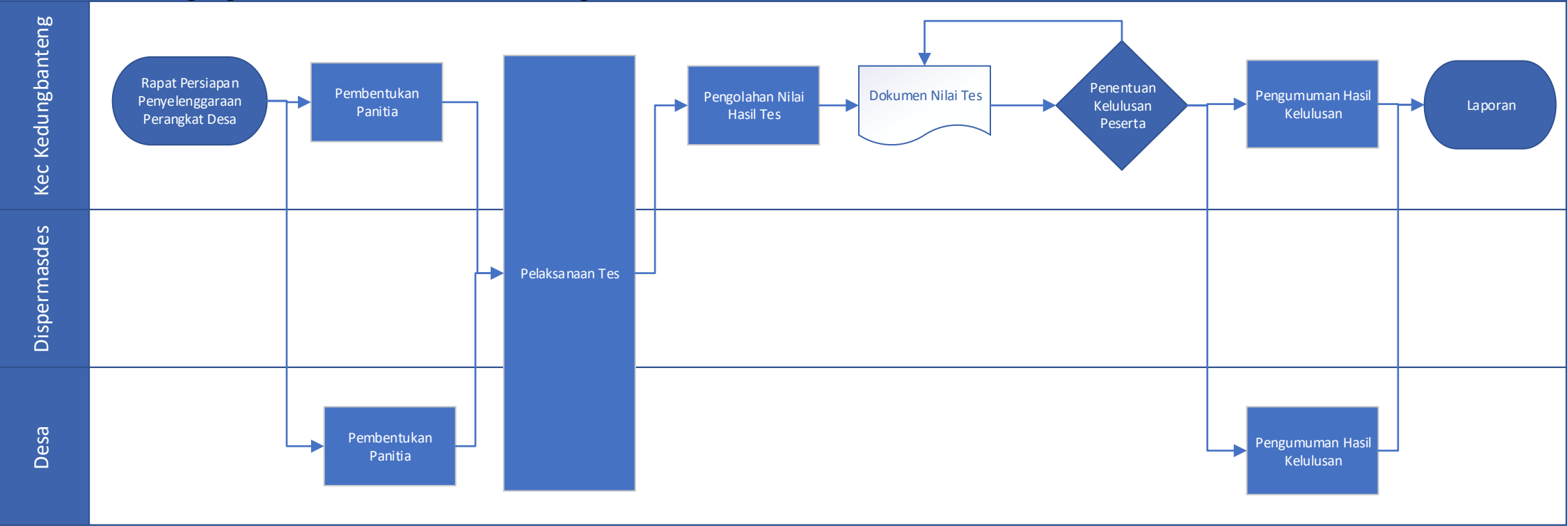
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat



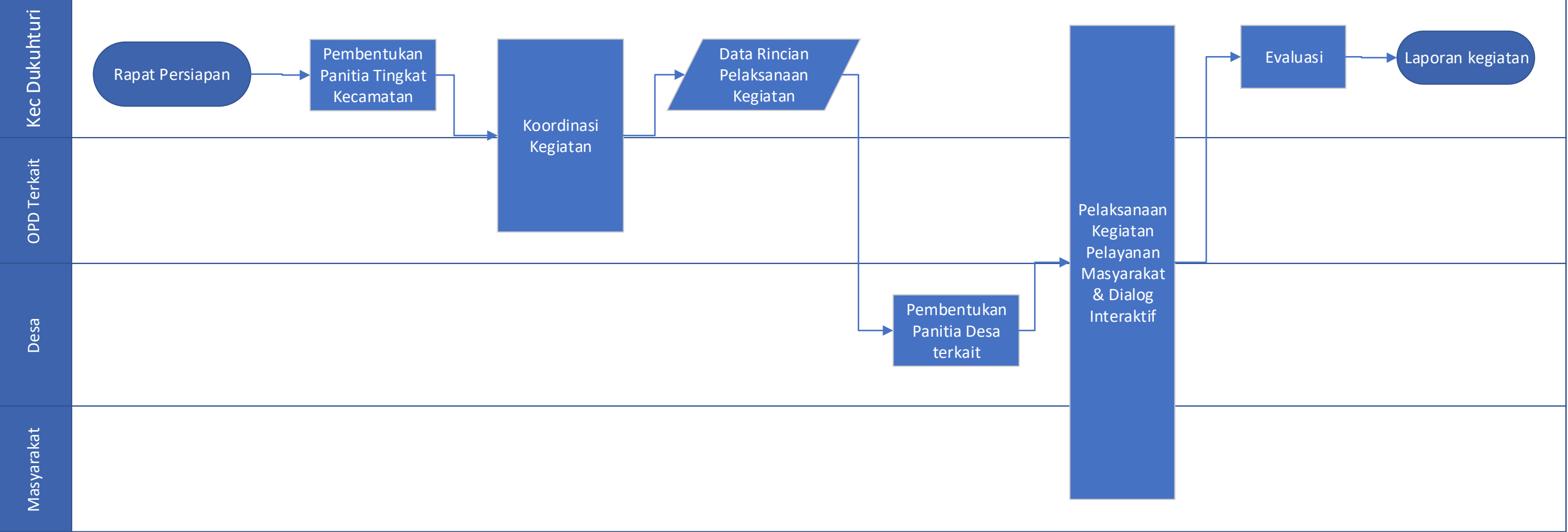
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa



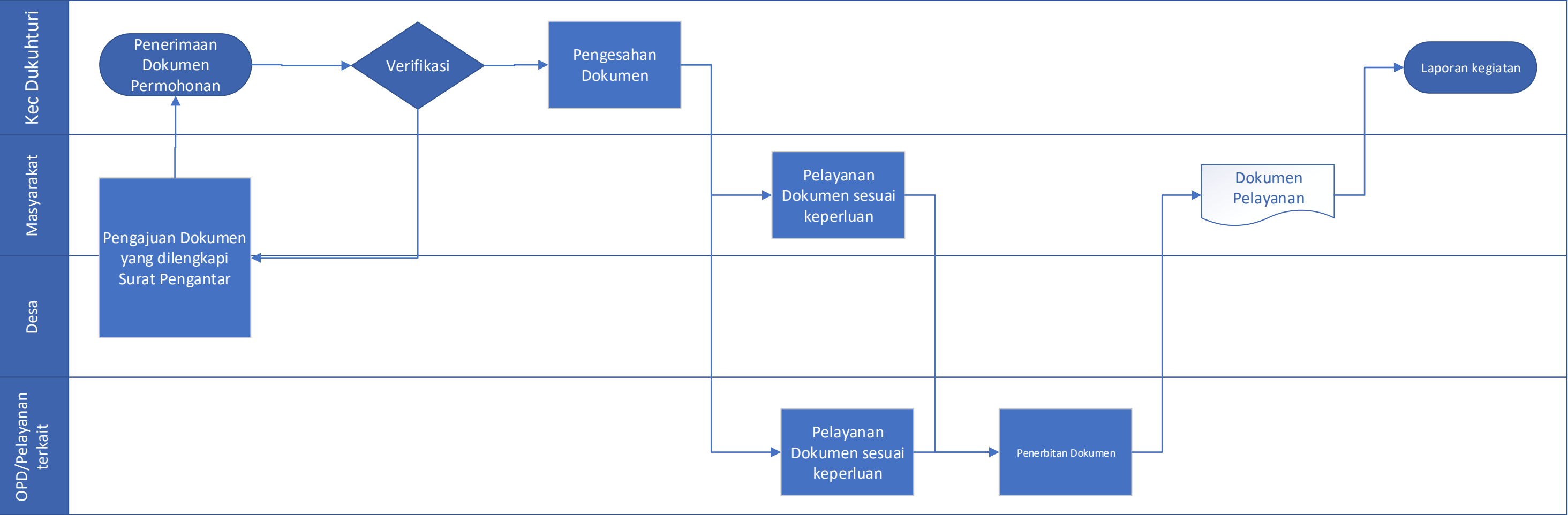
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa



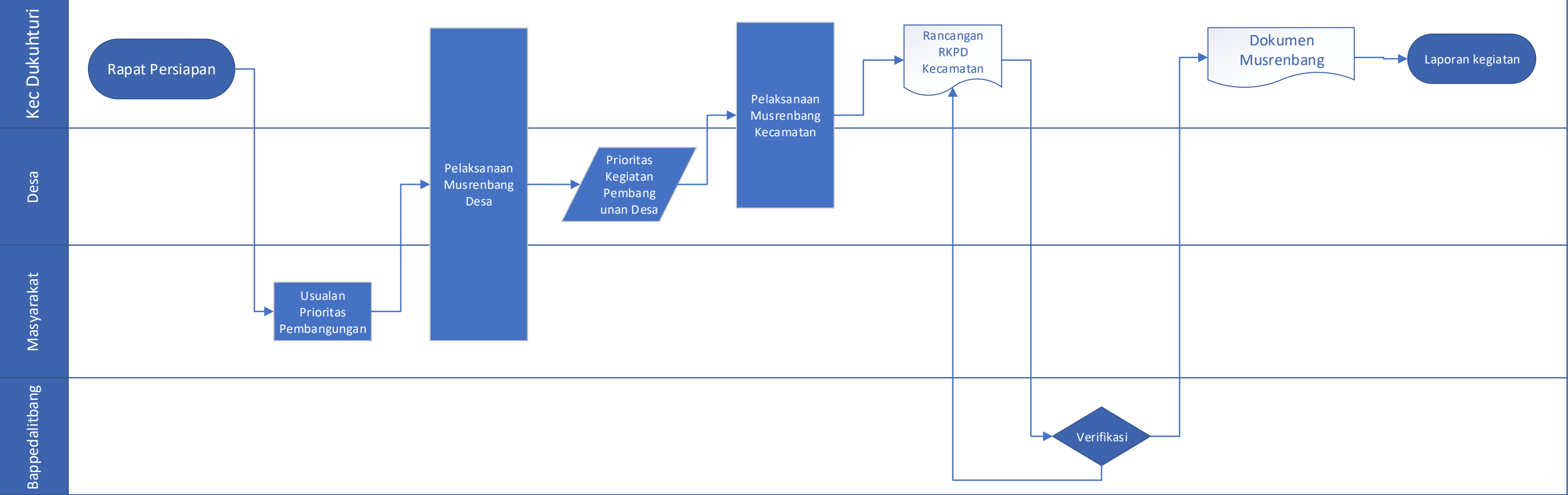
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Tilik Desa/Diseminasi)



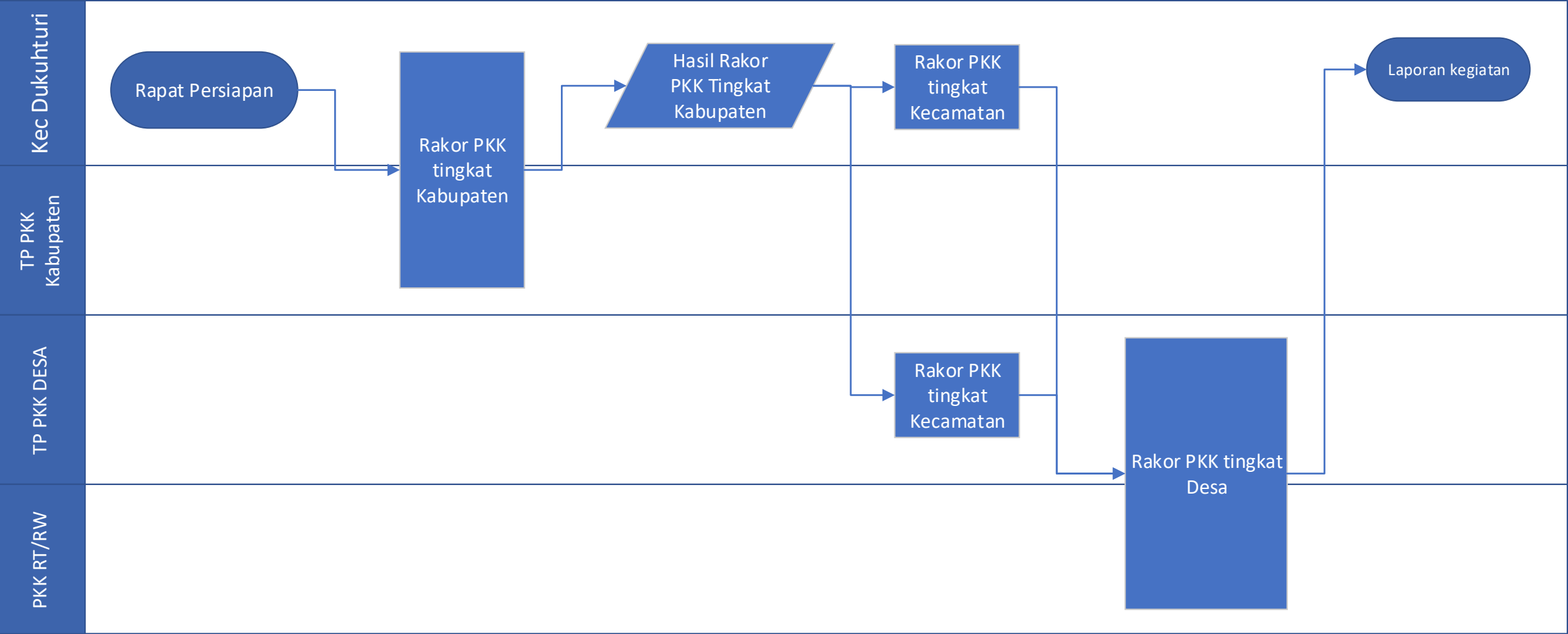
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (PATEN)



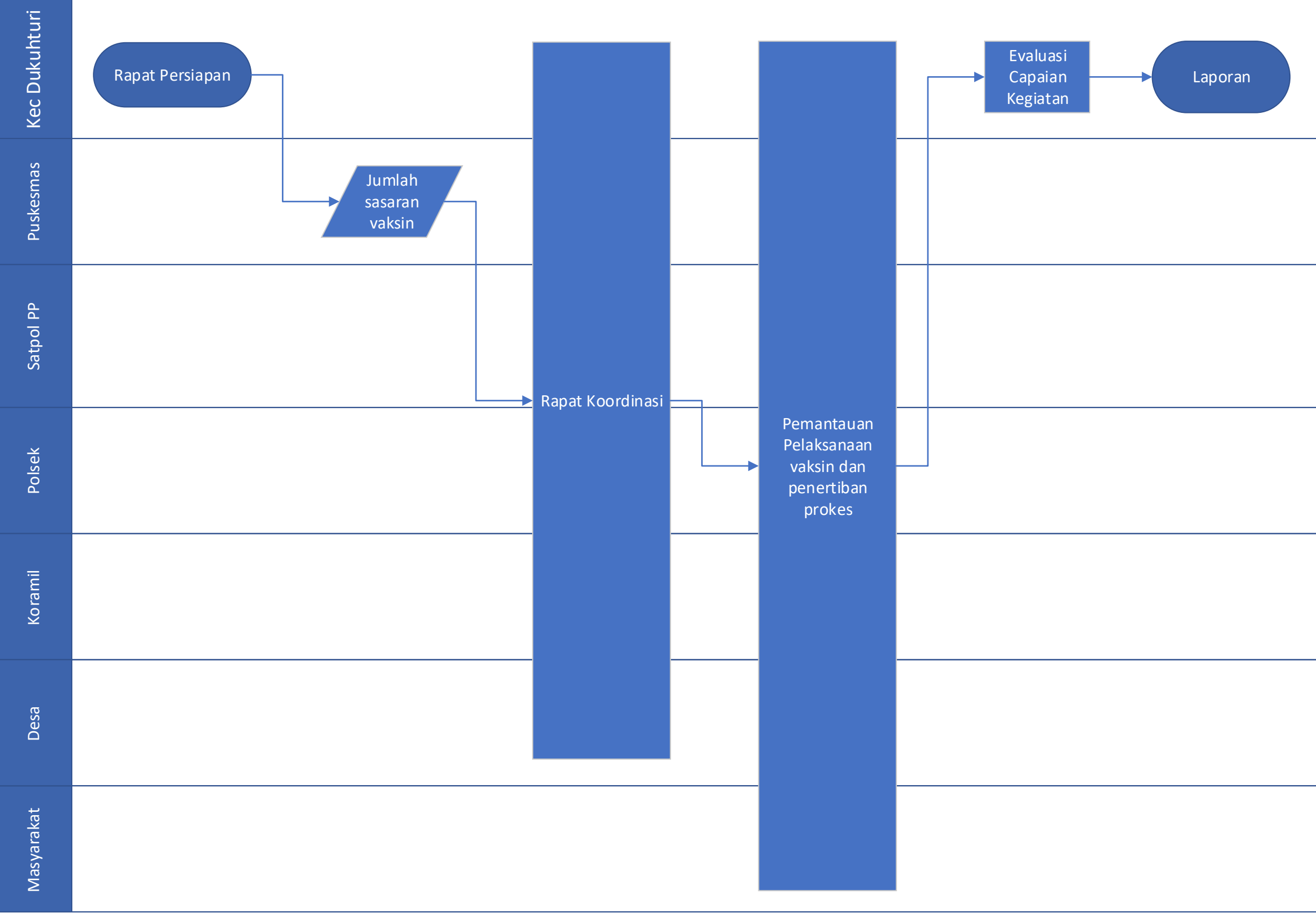
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK)

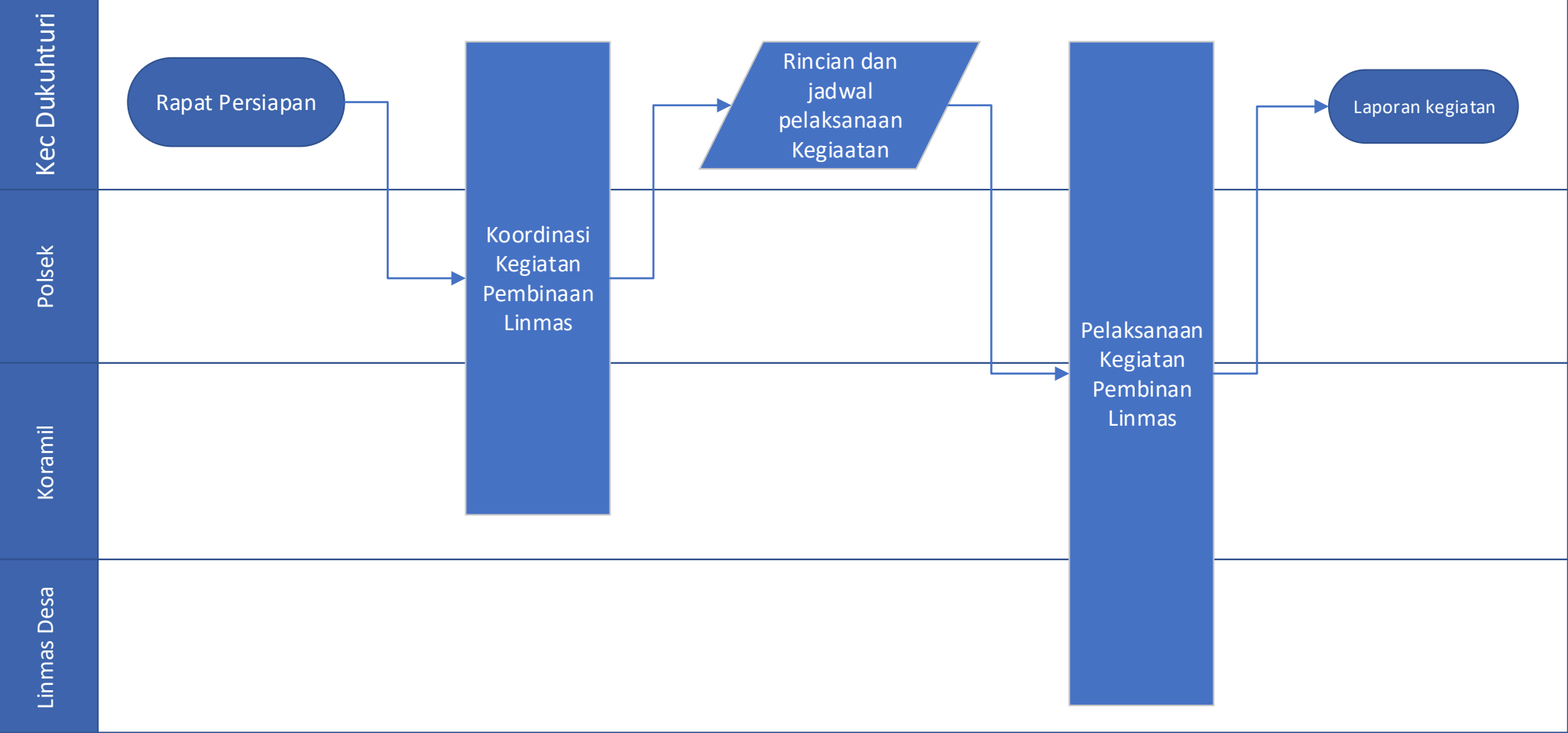


Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Rakor Covid 19)



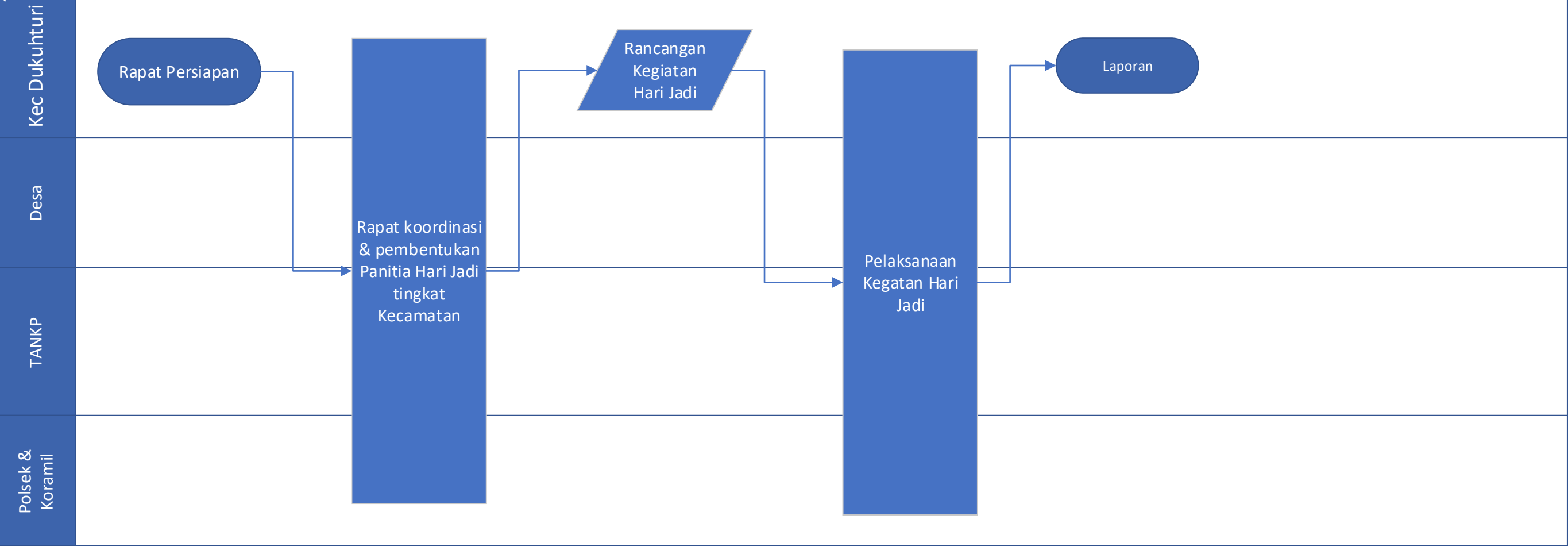
SLW-01.1 CFM 02.05.2

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Pembinaan Linmas)

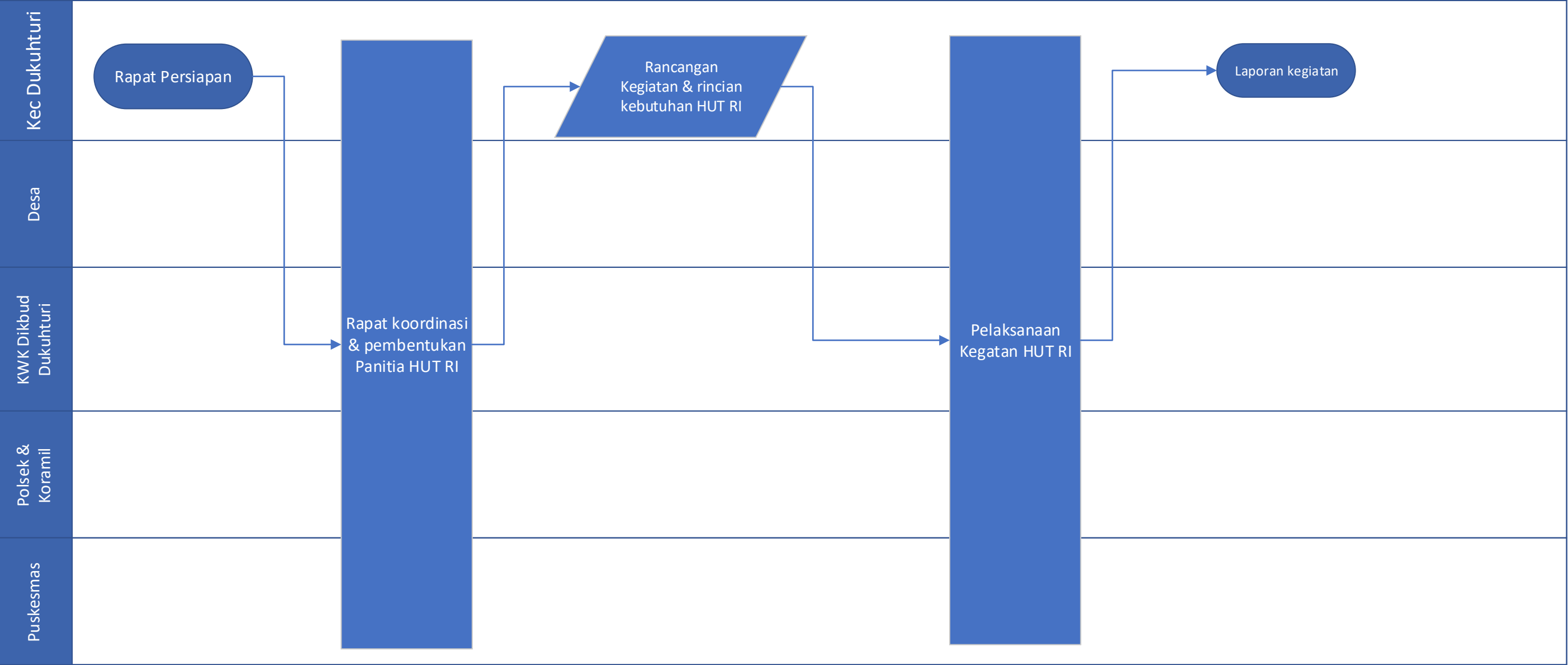


SLW-01.1 CFM 02.06.1

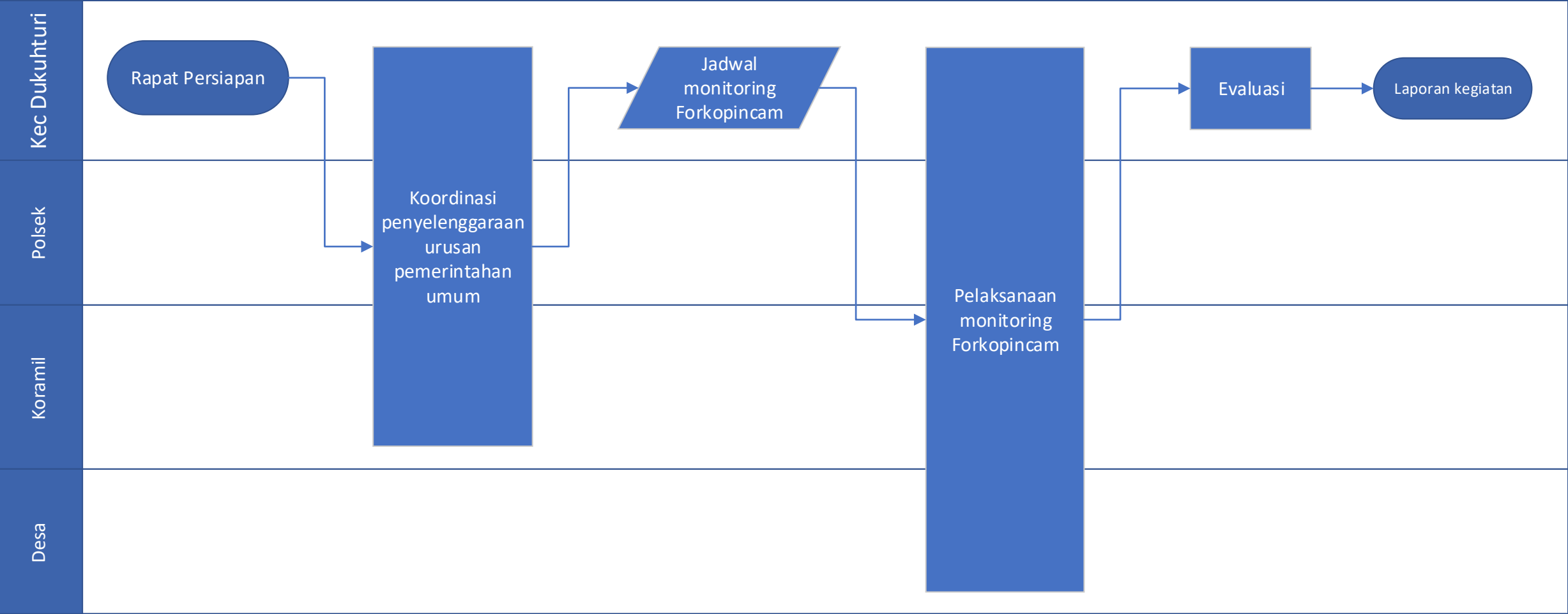
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hari Jadi)



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (HUT RI)



Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan



PETA RELASI



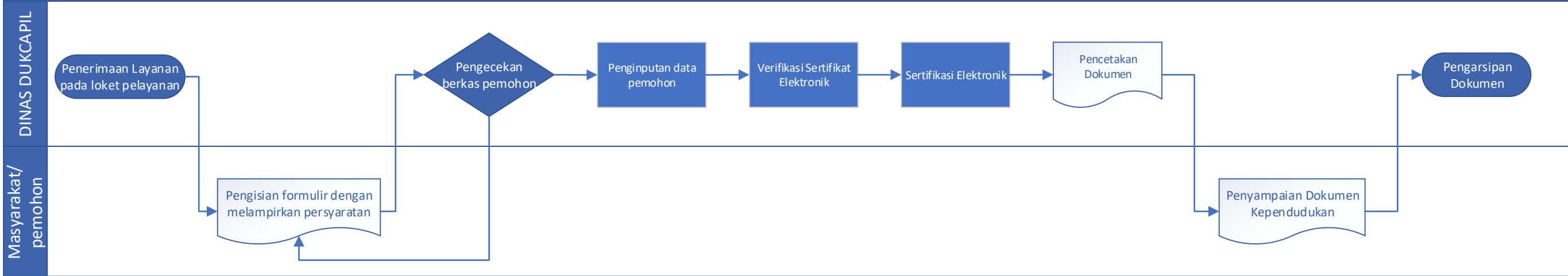
SLW-01.2
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DINAS DUKCAPIL

SELURUH PERANGKAT DAERAH

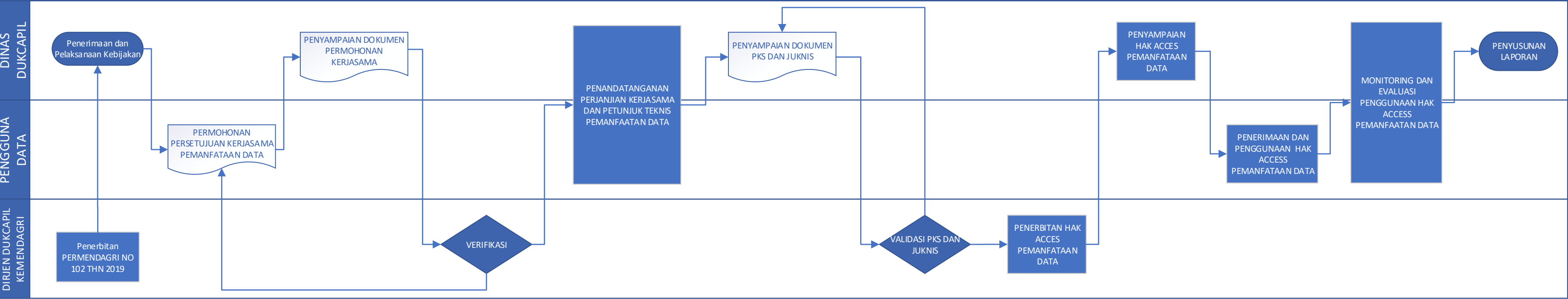
SLW-01.2 CFM 01

Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil



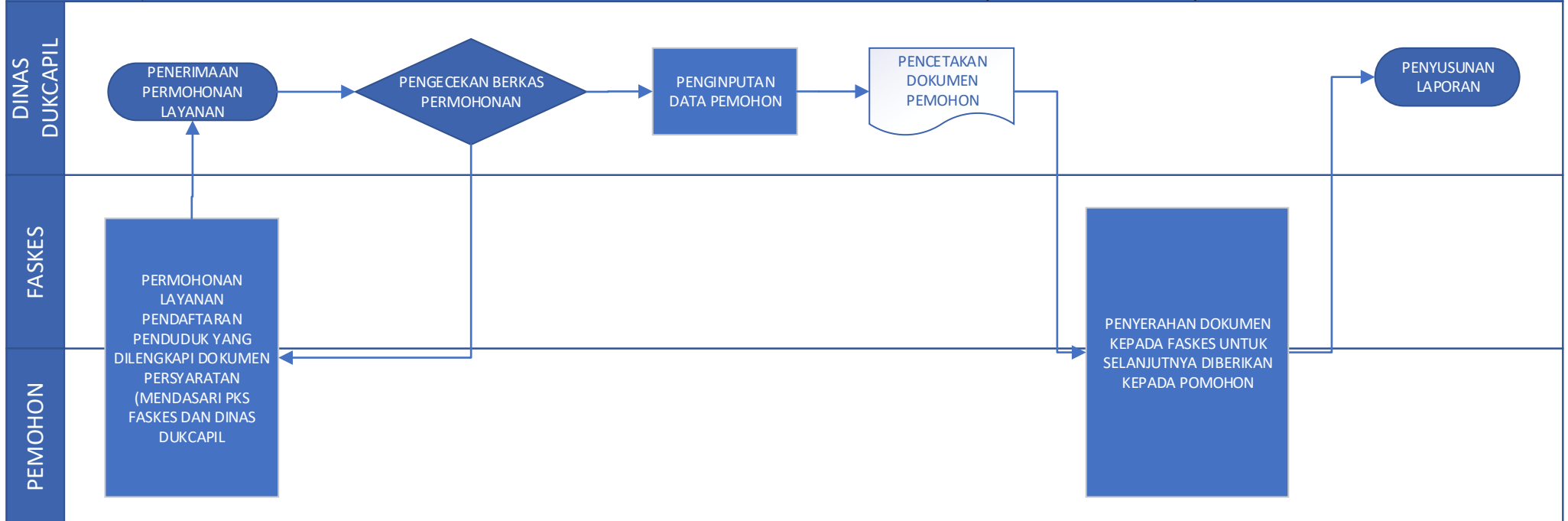
SLW-01.2 CFM 02

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan



SLW-01.2 CFM 03

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (PROGRAM LOAK)



SLW-01.2 CFM 04

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

DINAS DUKCAPIL

PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA WEBSITE

PENDOKUMENTASIAN
KEGIATAN PADA DINAS
DUKCAPIL

PENYUSUNAN
NASKAH BERITA
INFORMASI
KEGIATAN

PENGINPUTAN
NASKAH BERITA KE
WEBSITE

PENGEDITAN/
PENYUNTINGAN
NASKAH BERITA OLEH
EDITOR PENGELOLA
WEBSITE

PENAYANGAN
BERITA OLEH
ADMIN

EVALUASI
PENYAMPAIAN
BERITA PADA
WEBSITE
DISDUKCAPIL

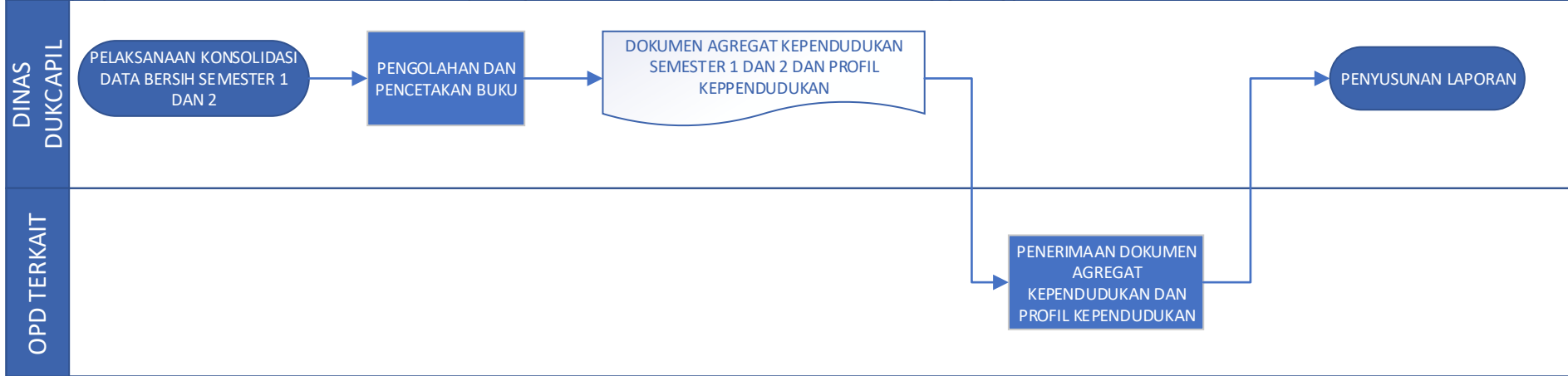
PENYUSUNAN LAPORAN

MASYARAKAT

AKSES BERITA PADA
WEBSITE
DISDUKCAPIL

SLW-01.2 CFM 05

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan



PETA RELASI

SLW-01.3
Peningkatan Pelayanan Perijinan

DPMPTSP

BAPPEDALITBANG

BPKAD

DINAS PERIKANAN

BKPSDM

DINAS KOMINFO

DINAS PERKIM

DINAS PORAPAR

DINAS PUPR

DINAS DIKBUD

DINAS LH

DINAS KESEHATAN

DINAS KOPERASI UKM
DAN PERDAGANGAN

BAG ORGANISASI

BAG HUKUM

BAG UPBJ

BAPPENDA

DINAS PRINTRANSNAKER

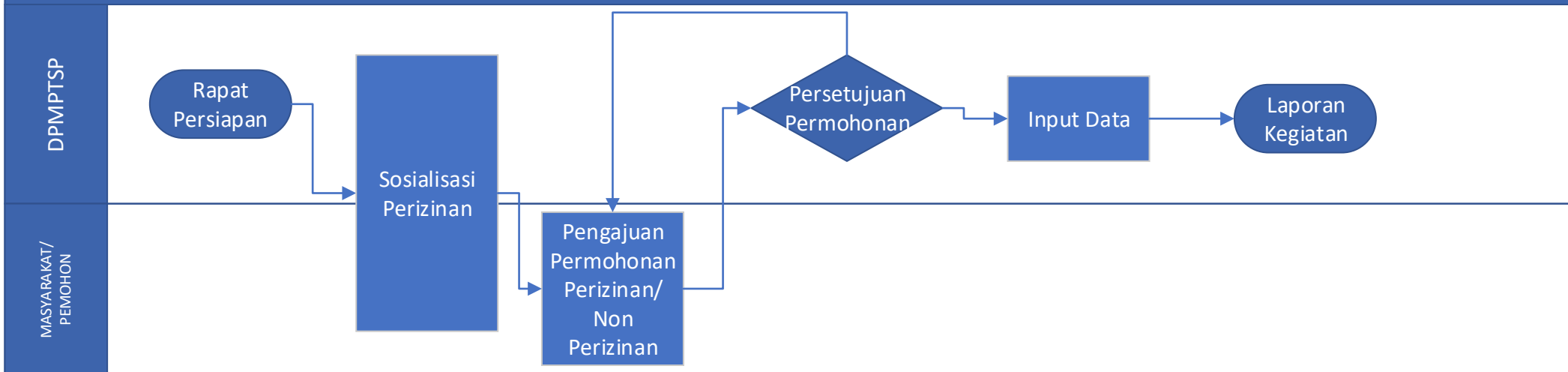
DINAS DUKCAPIL

DINAS KPTAN



SLW-01.3 CFM 01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



SLW-01.3 CFM 02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

DPMPTSP

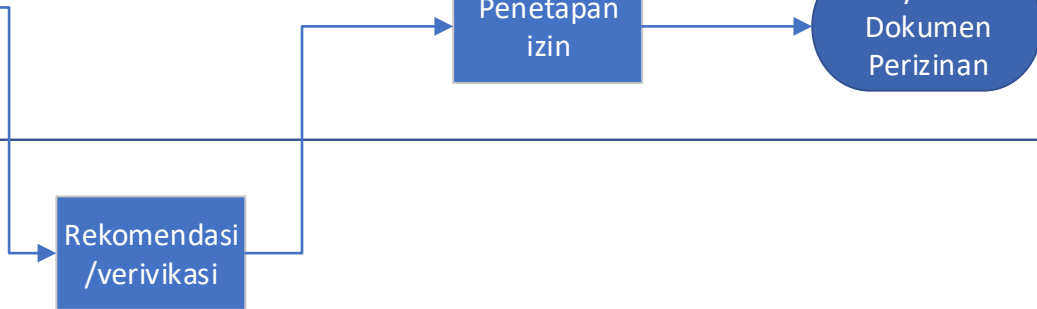
Penerimaan
Berkas
Perizinan

Penetapan
izin

Penyerahan
Dokumen
Perizinan

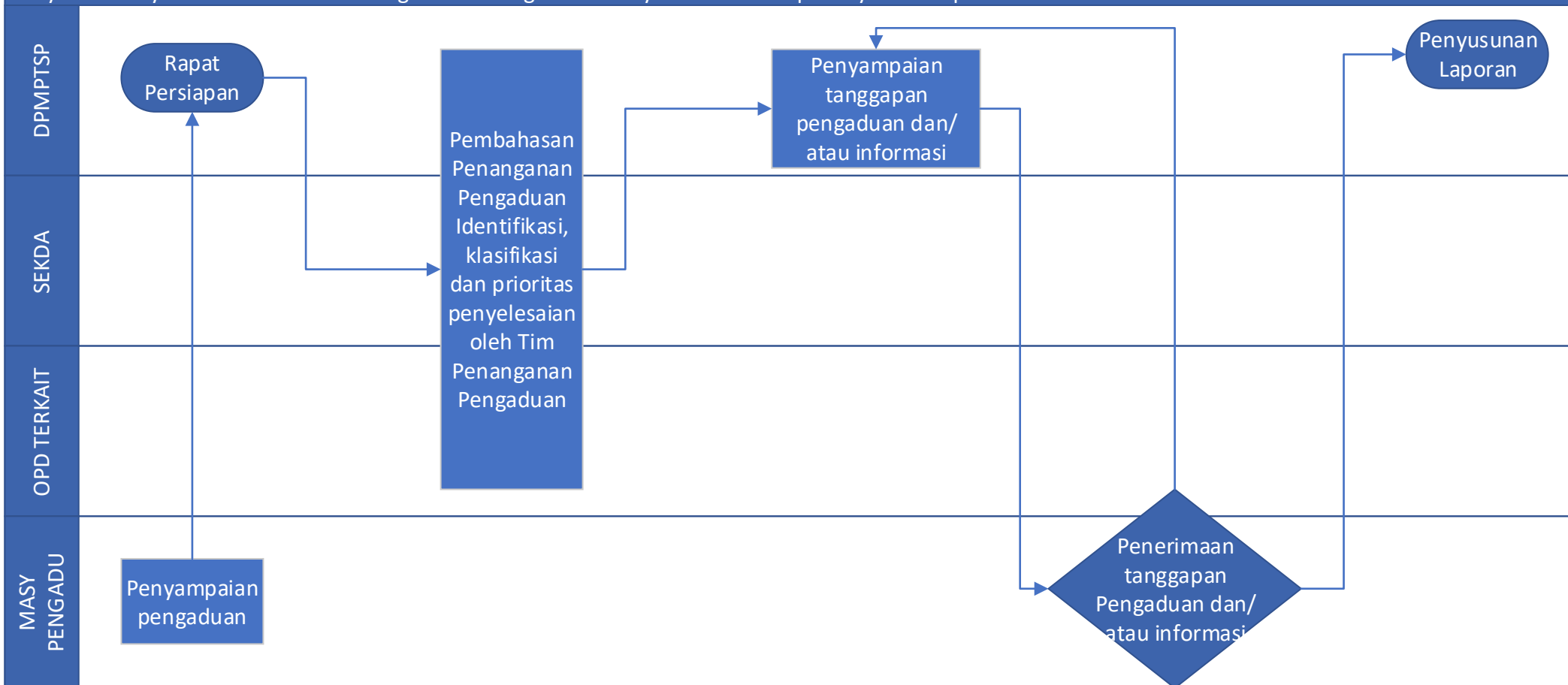
OPD TERKAIT

Rekomendasi
/verifikasi



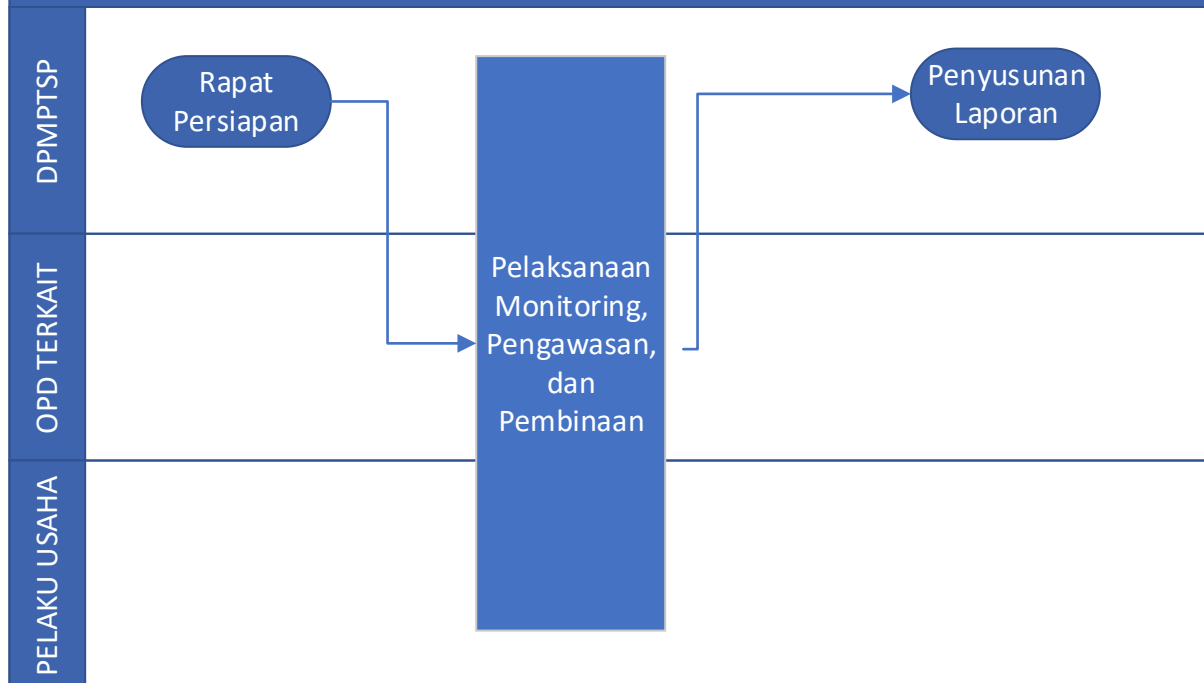
SLW-01.3 CFM 03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan



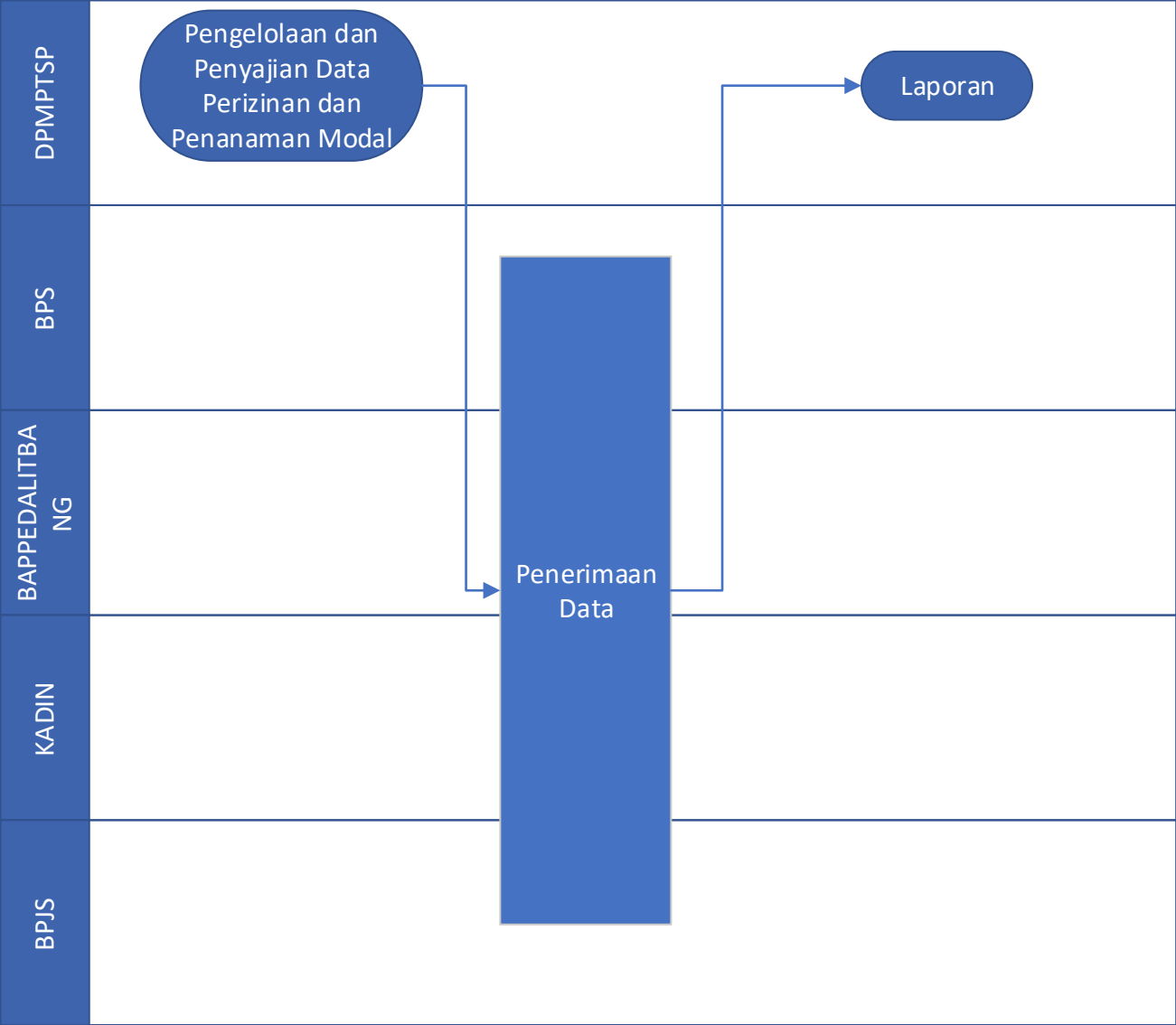
SLW-01.3 CFM 04

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal



SLW-01.3 CFM 05

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



PETA RELASI

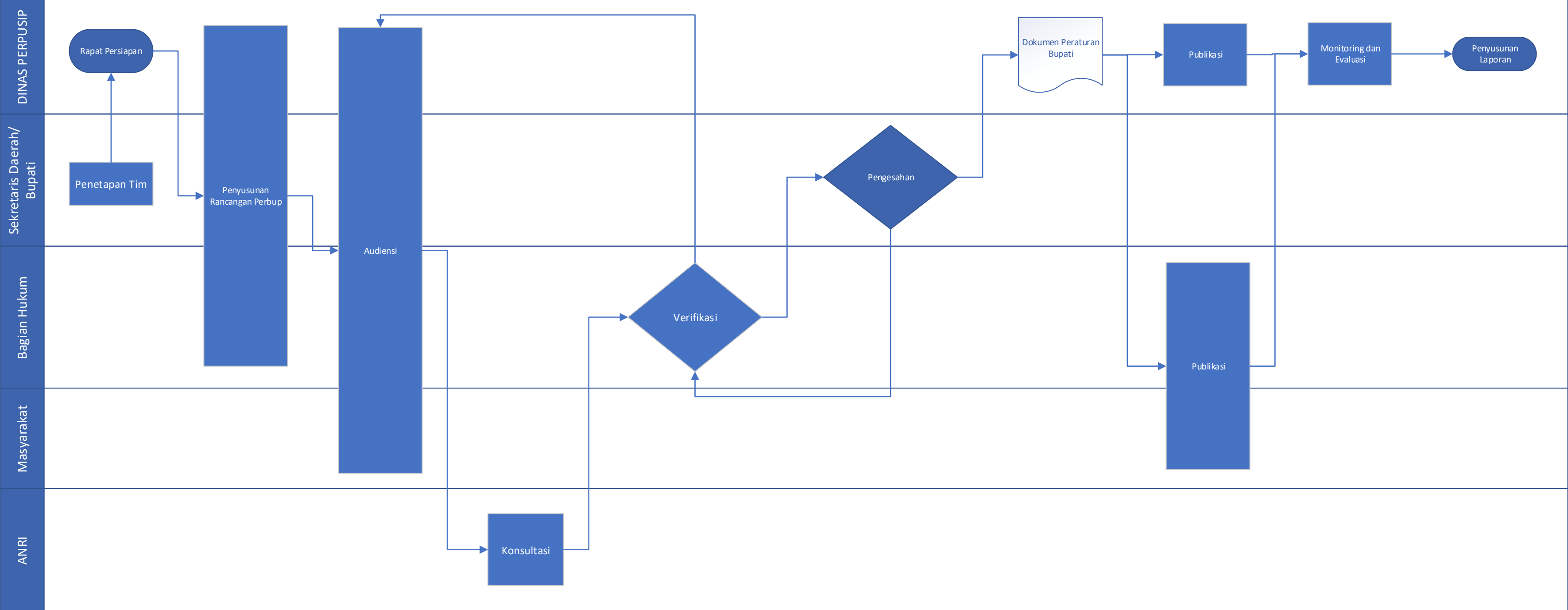
SLW-01.4

Peningkatan Tata Kelola Kearsipan Daerah

DINAS PERPUSIP

SELURUH PERANGKAT
DAERAH

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

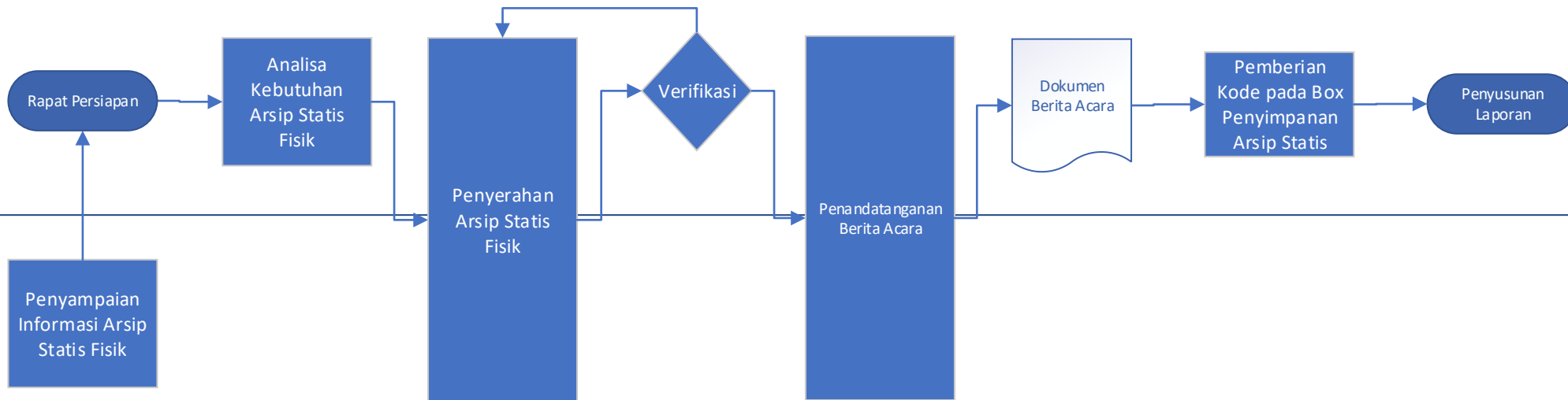


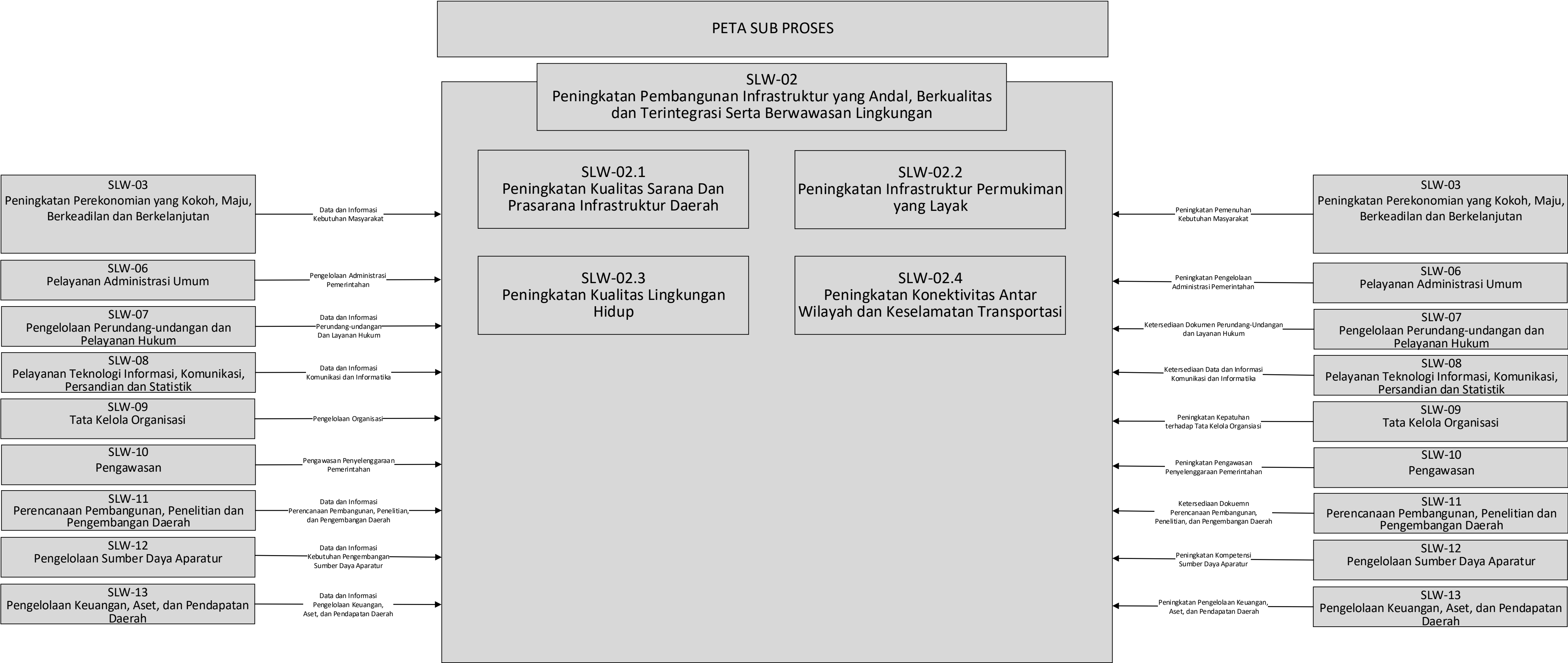
SLW-01.4 CFM 02

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Dinas Perpustakaan

Perangkat Daerah





PETA RELASI

SLW-02.1

Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah

Dinas PUPR

Dinas Perkim

DLH

Dinas
Perhubungan

BAPPEDA
LITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

Dinas PMPTSP

DINAS
KOMINFO

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN PBJ

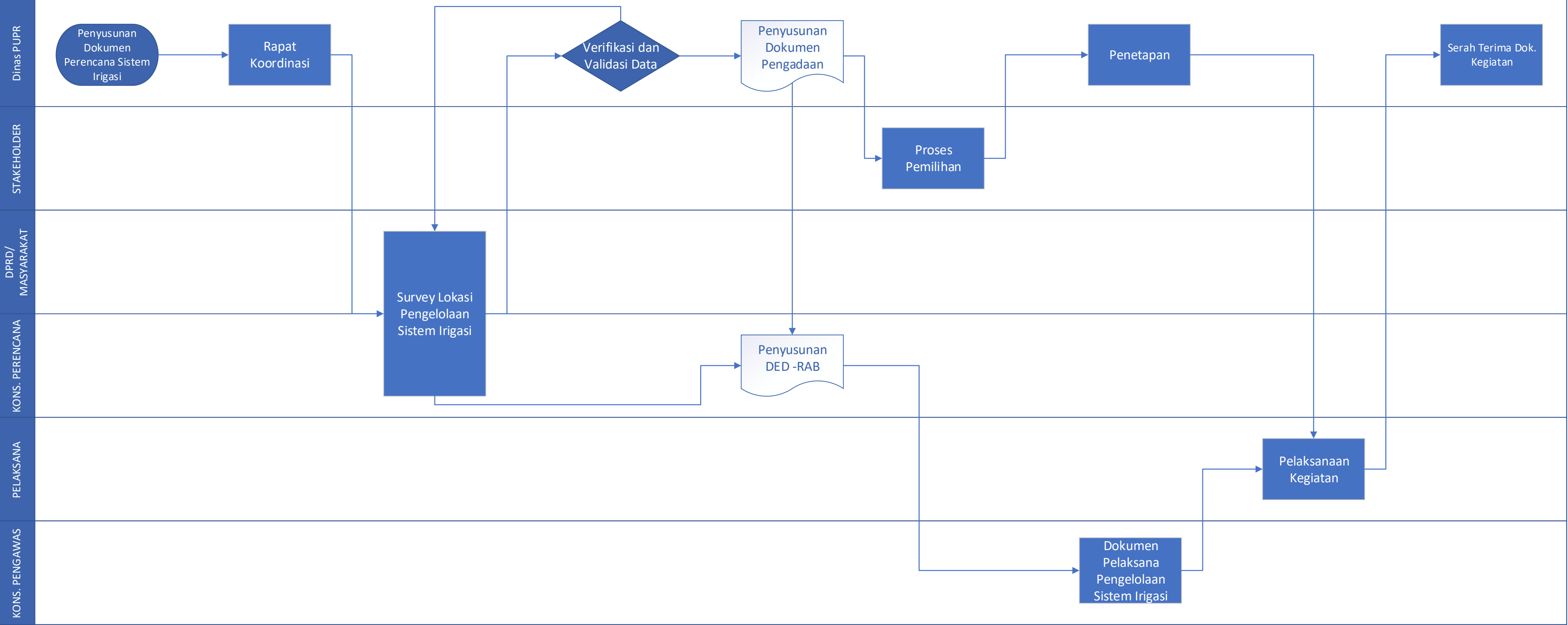
BAGIAN
ORGANISASI

BAPENDA

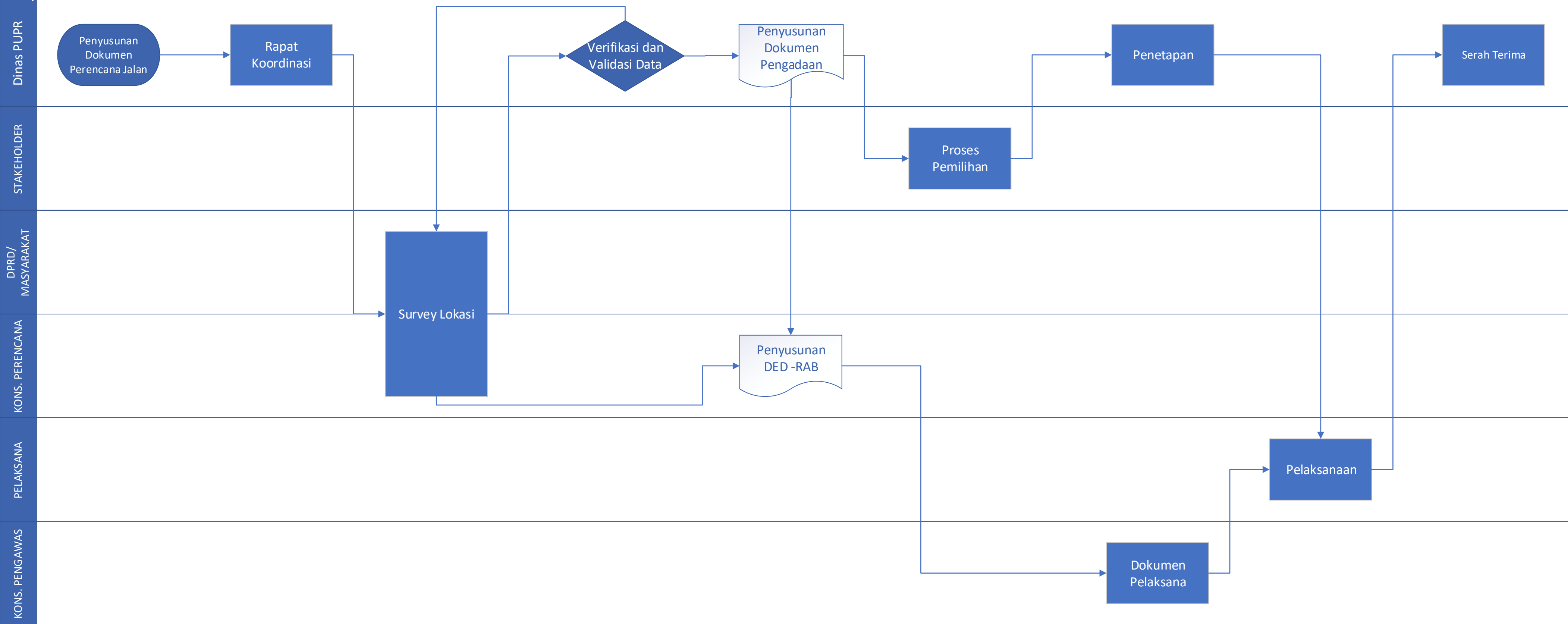
BPBD

SLW-02.1 CFM 01

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Hit dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

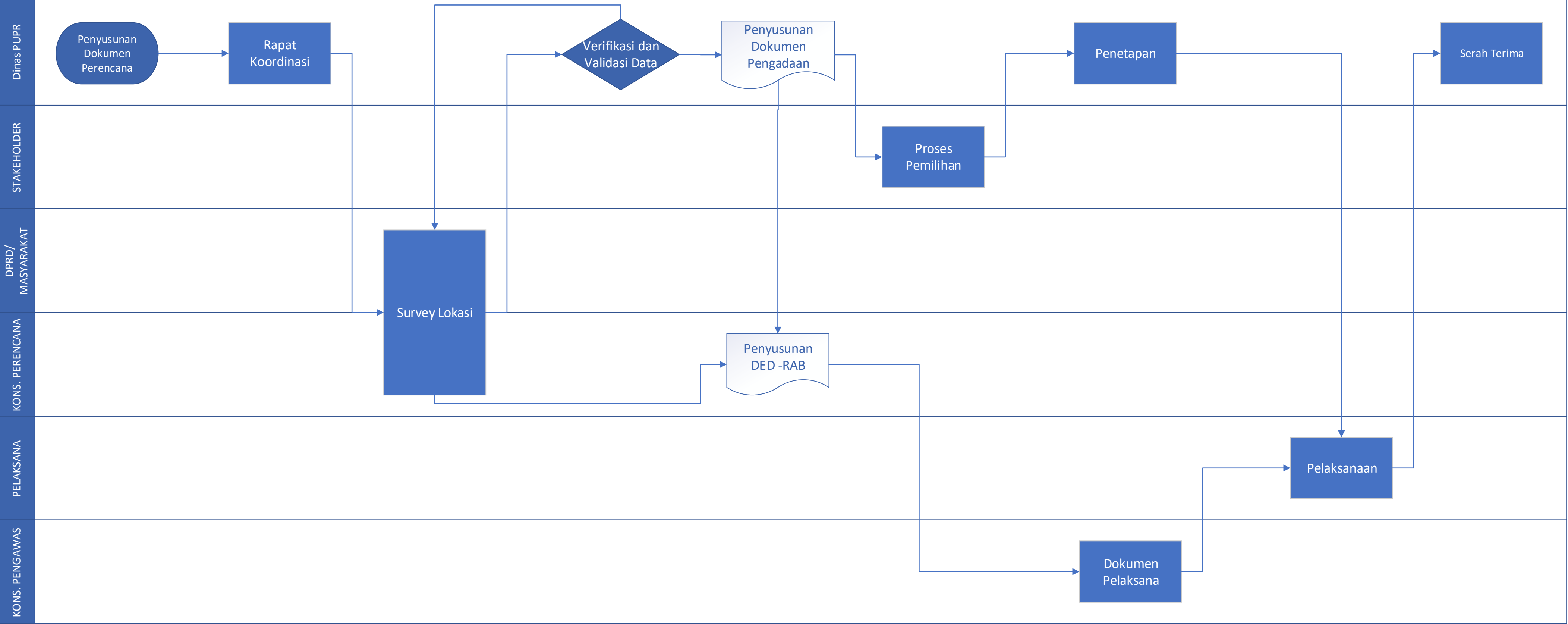


Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota



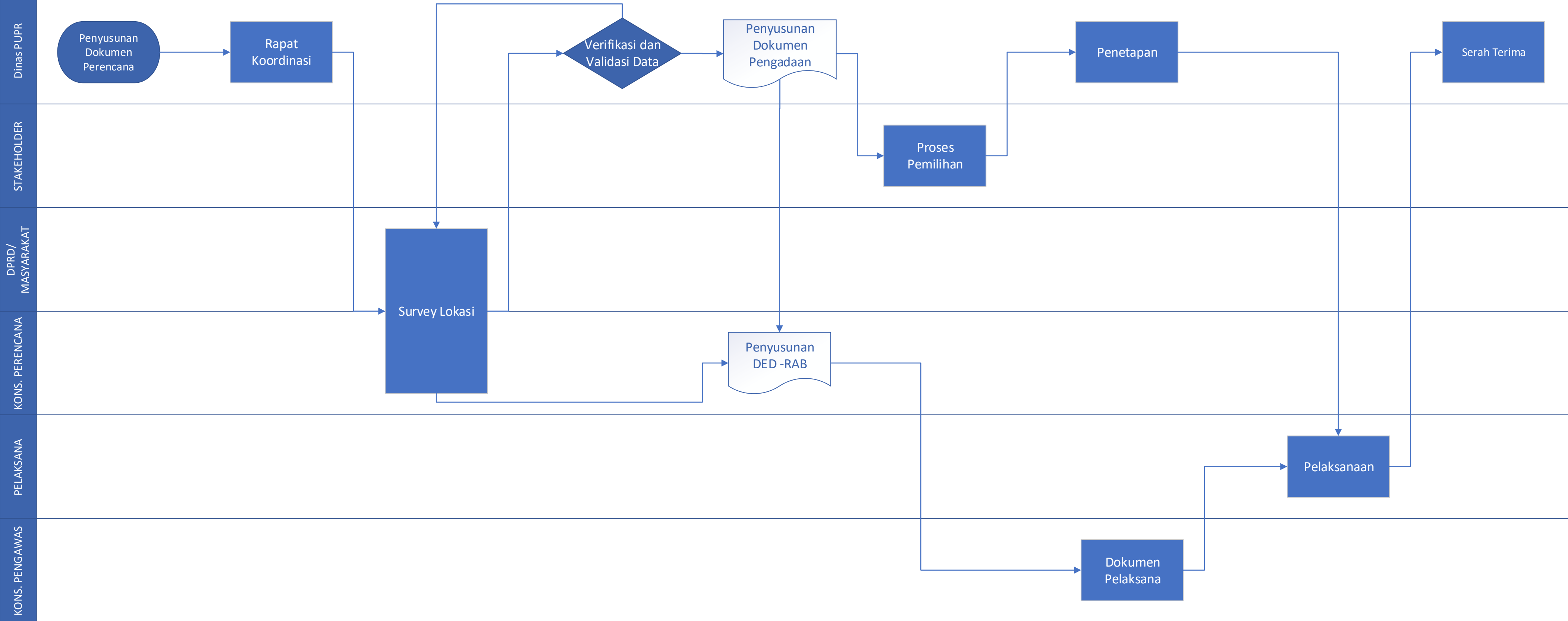
SLW-02.1 CFM 03

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota



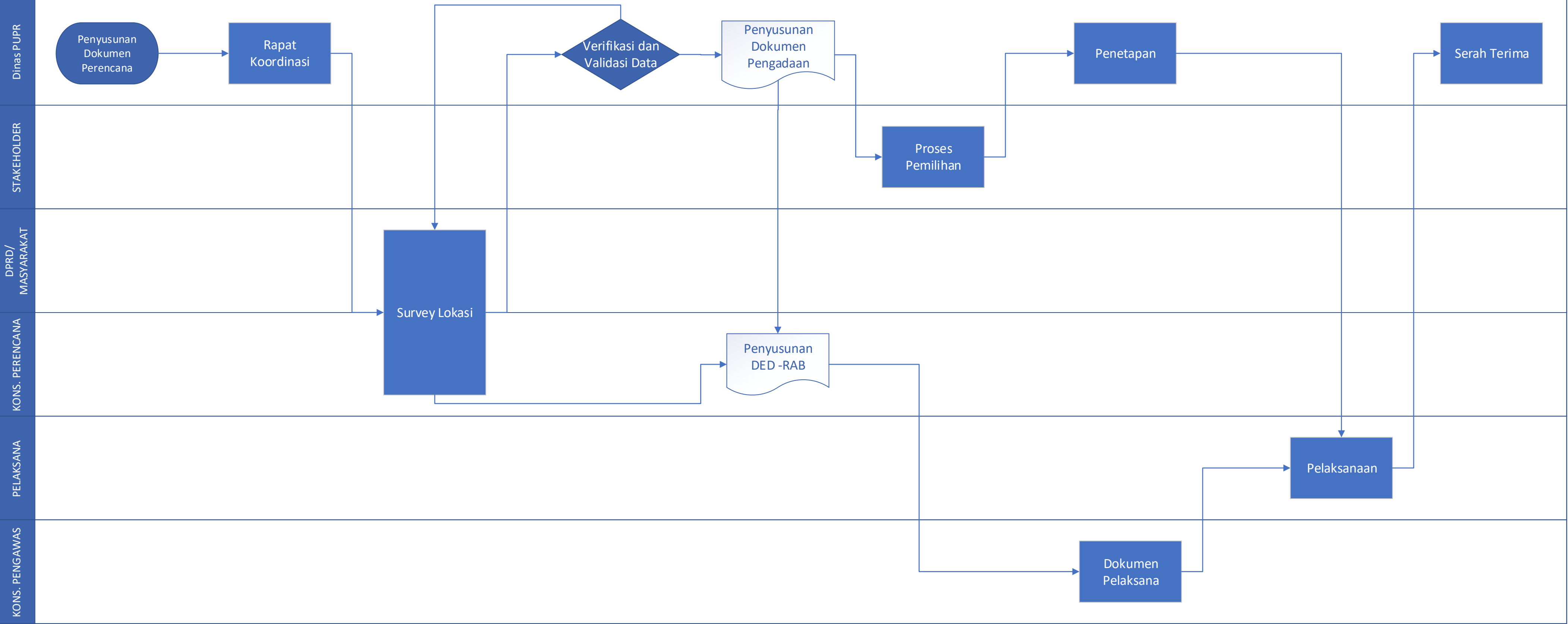
SLW-02.1 CFM 04

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



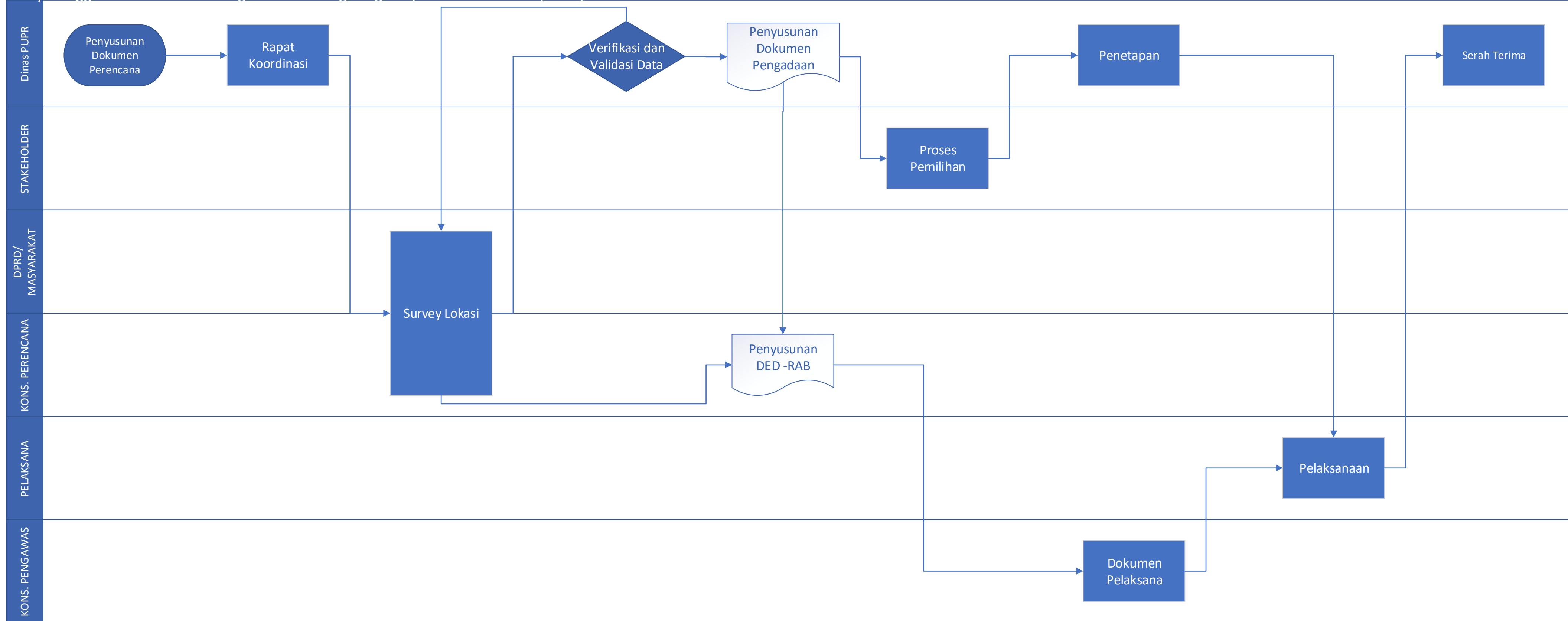
SLW-02.1 CFM 05

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung



SLW-02.01 CFM 06

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota



PETA RELASI

SLW-02.2

Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak

Dinas Perkim

DINAS PUPR

DLH

DISHUB

BAPPEDALITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

KOMINFO

BAG. HUKUM

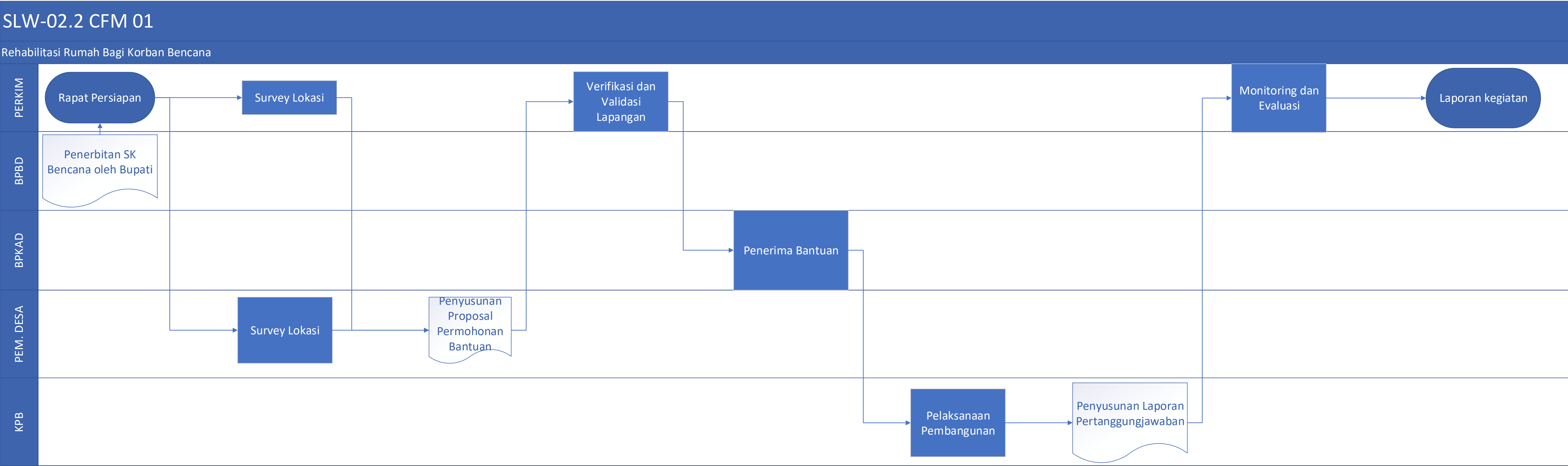
BAG.
ORGANISASI

BAG. ULP

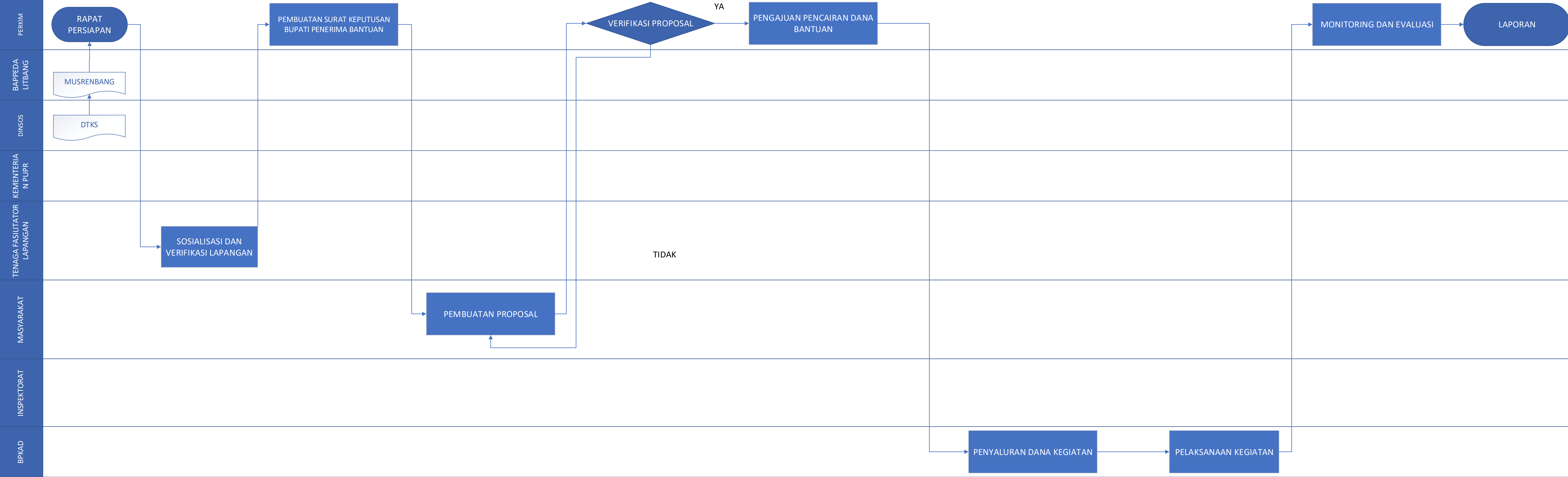
BPBD

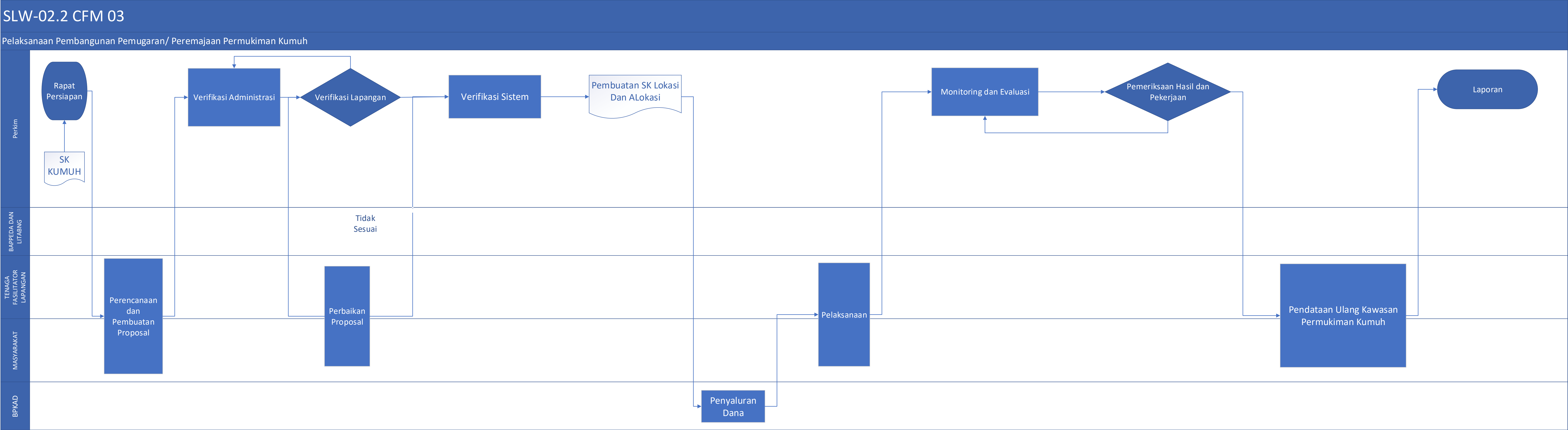
DPMPTSP

BAPENDA



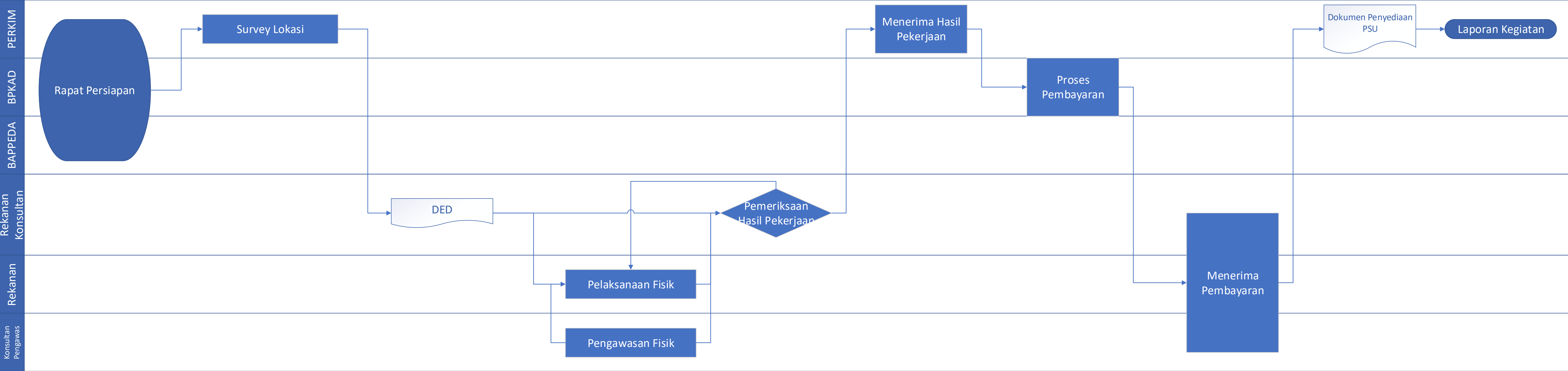
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

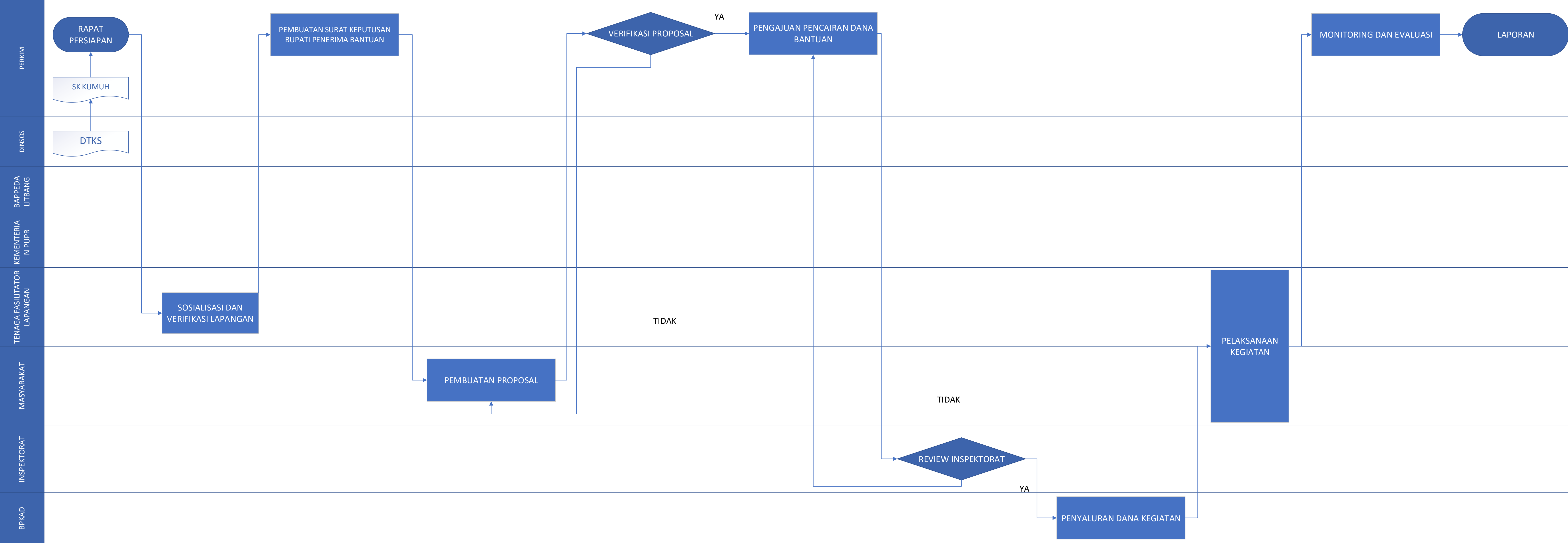




SLW-02.2 CFM 04

Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

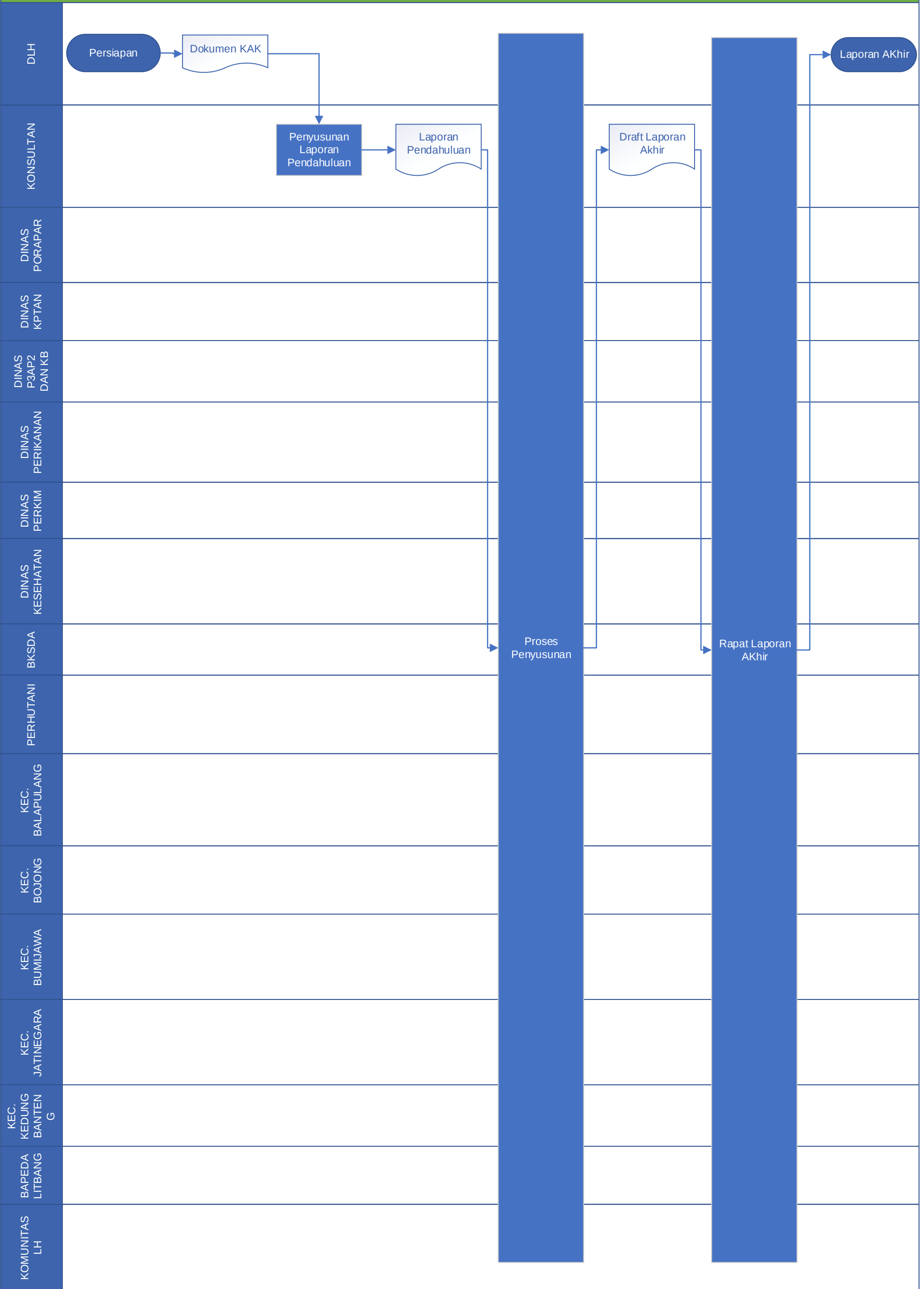


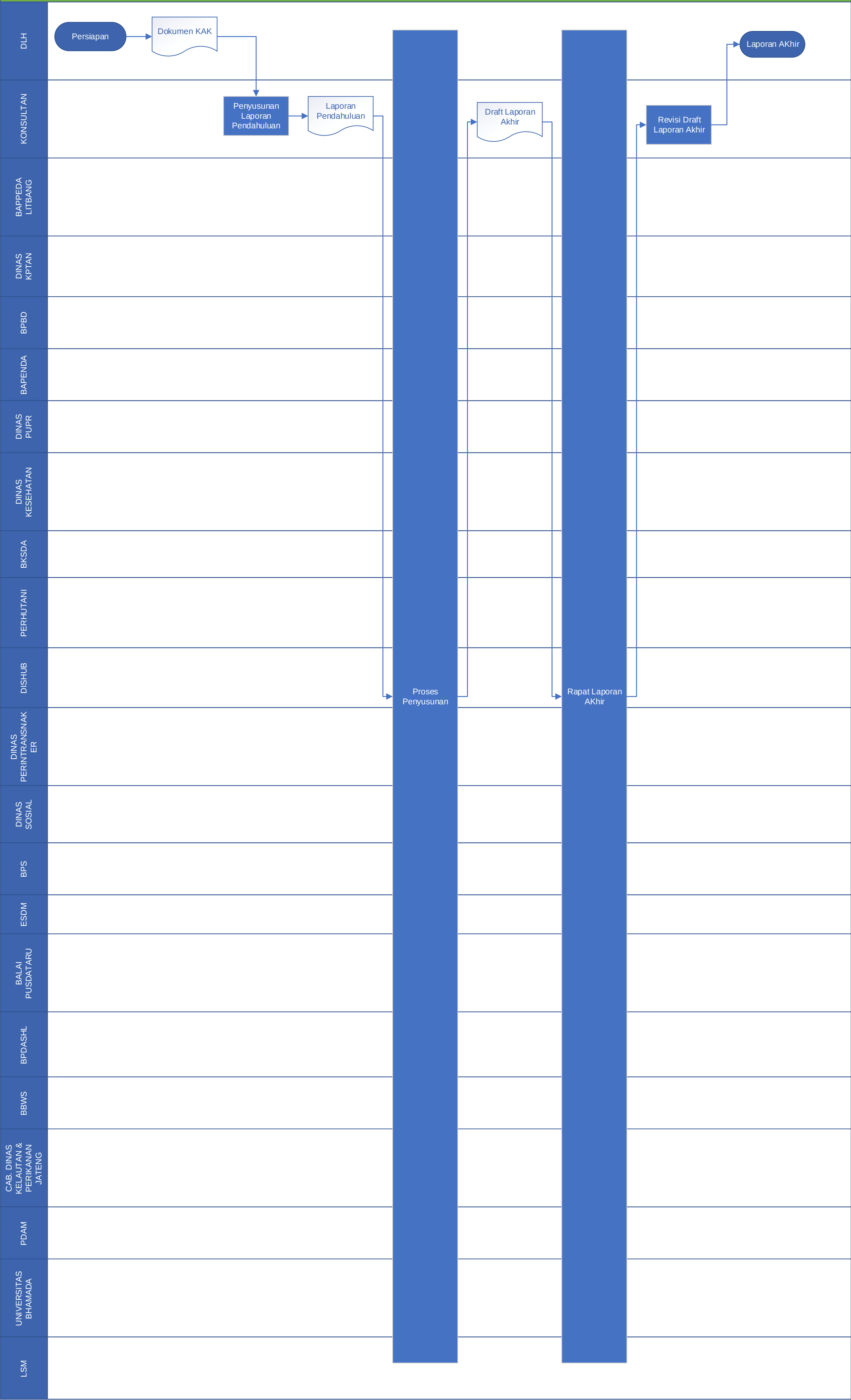


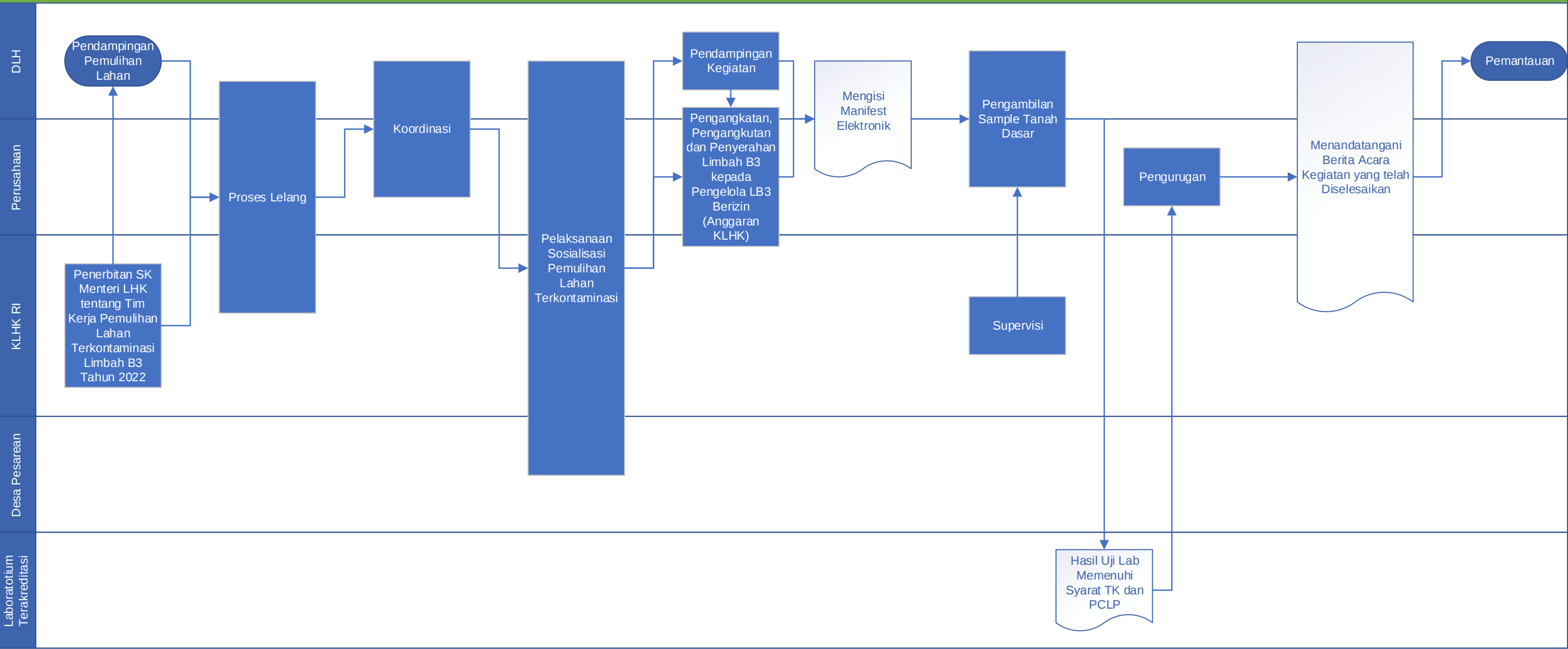
PETA RELASI

SLW-02.3 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

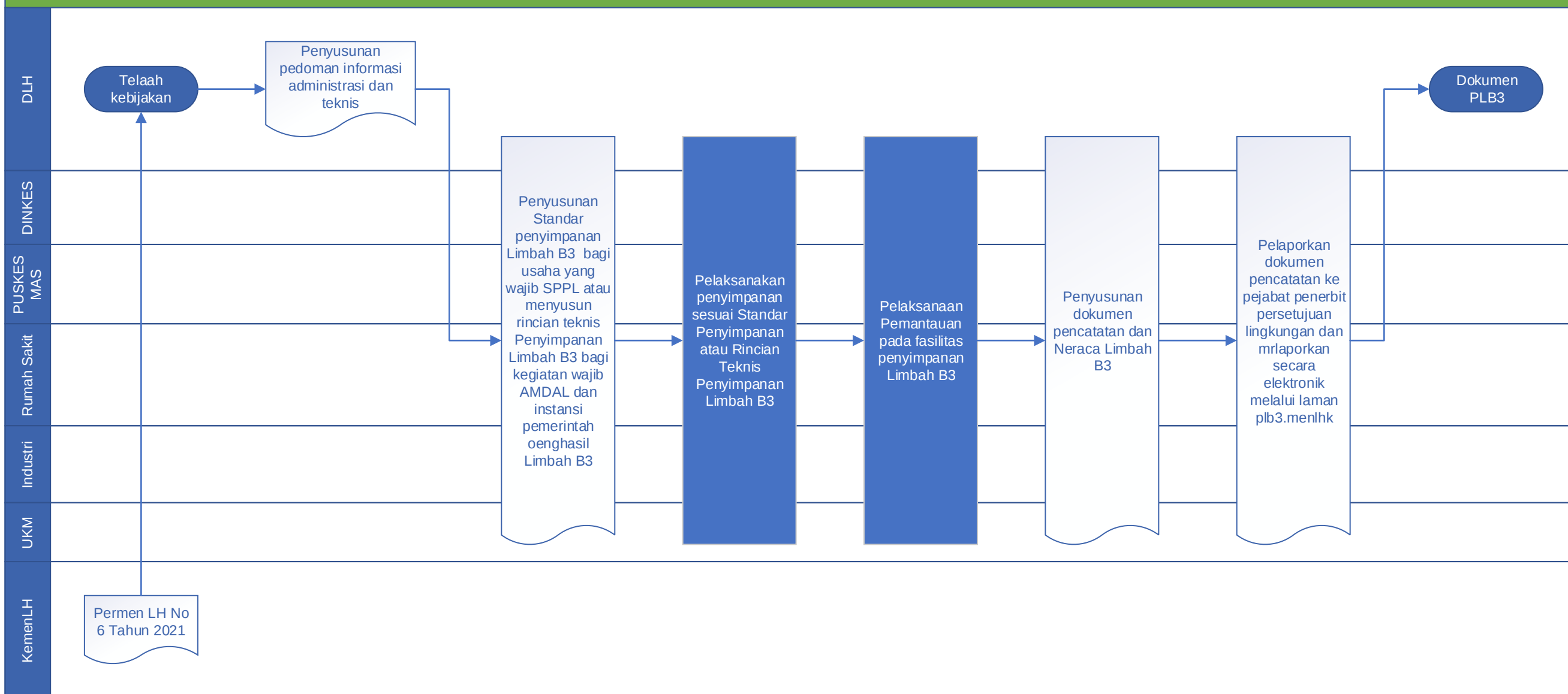


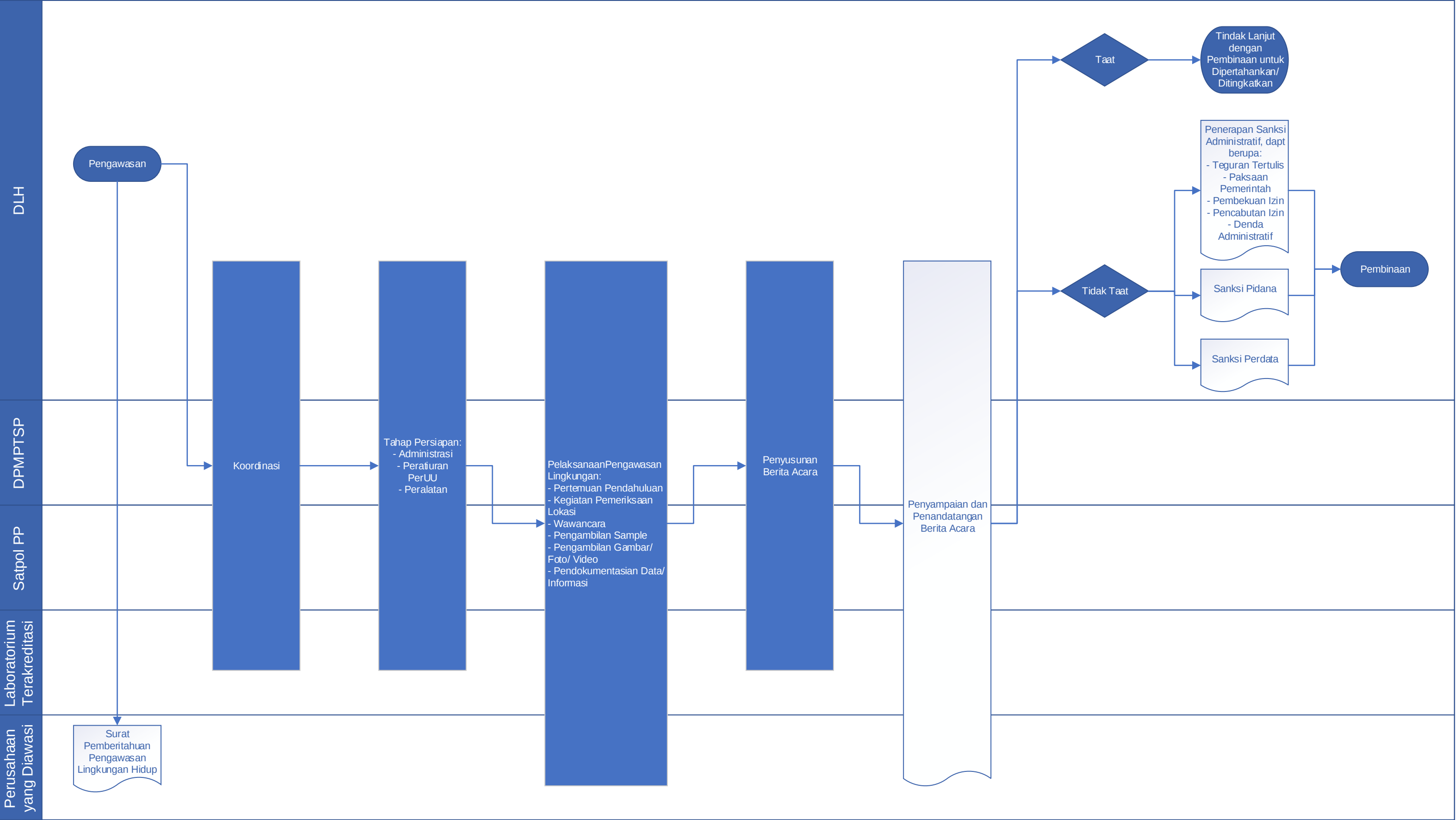




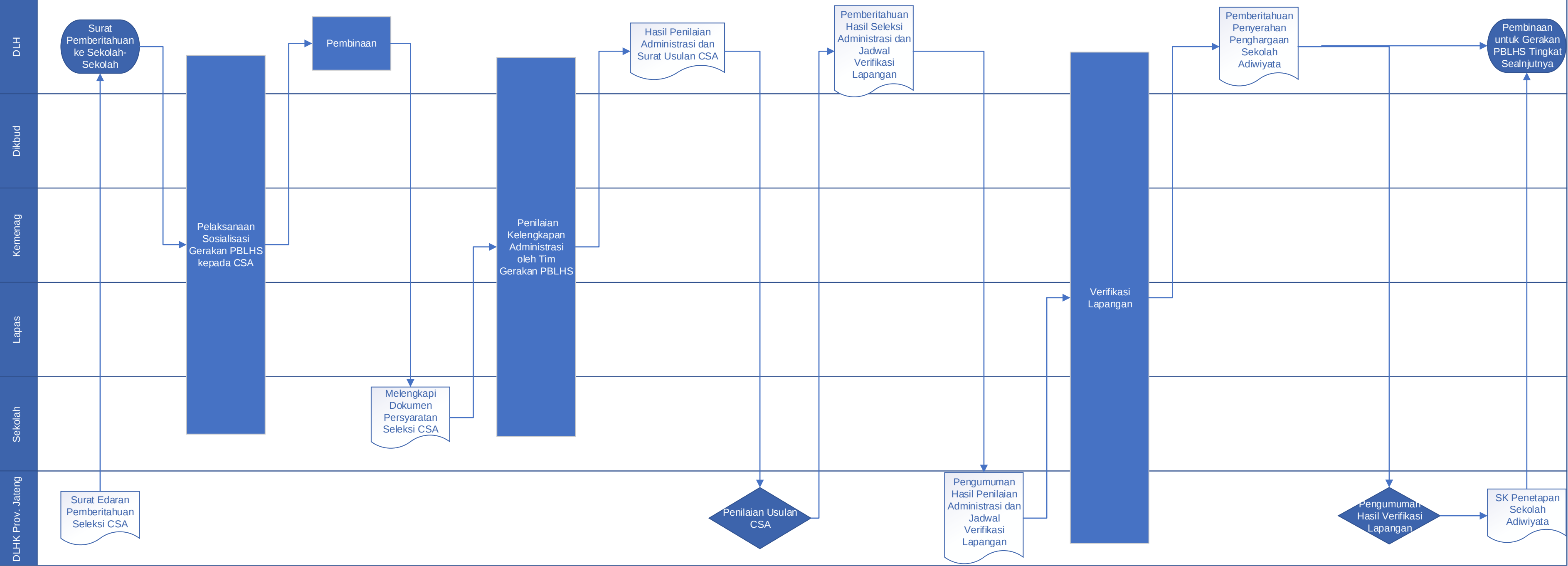


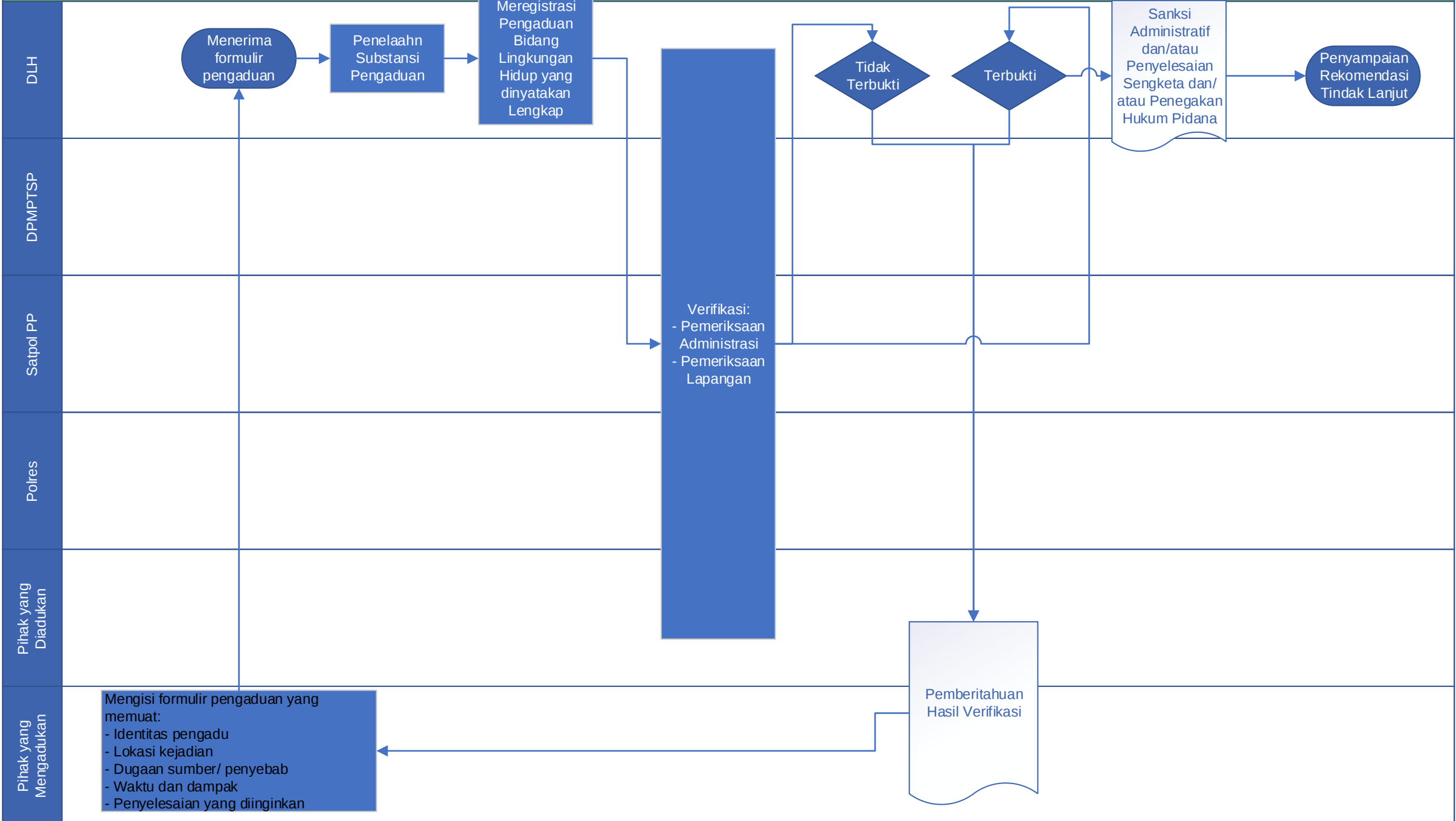
Fasilitasi Pemenuhan Kemitraan Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



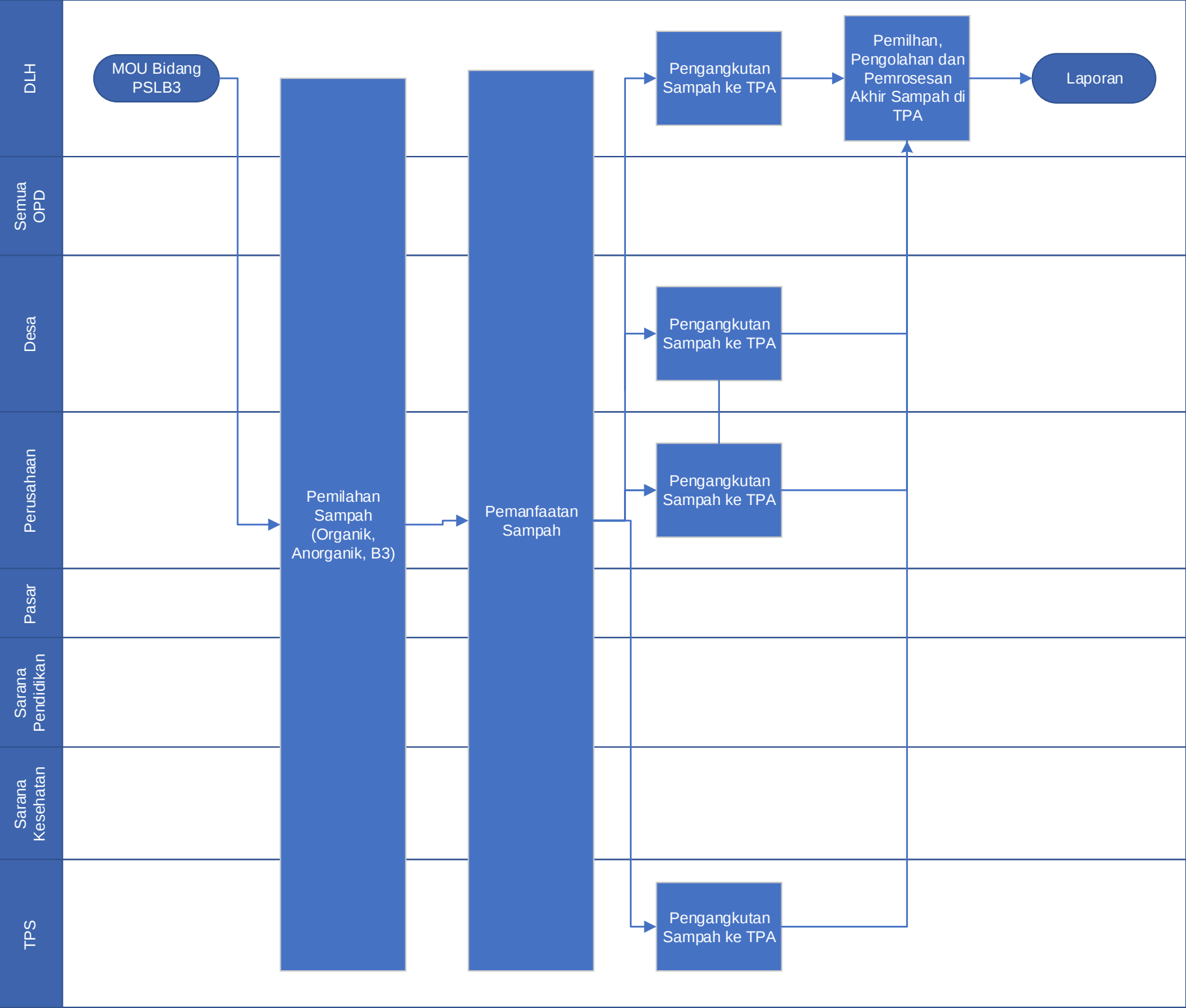


Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata)

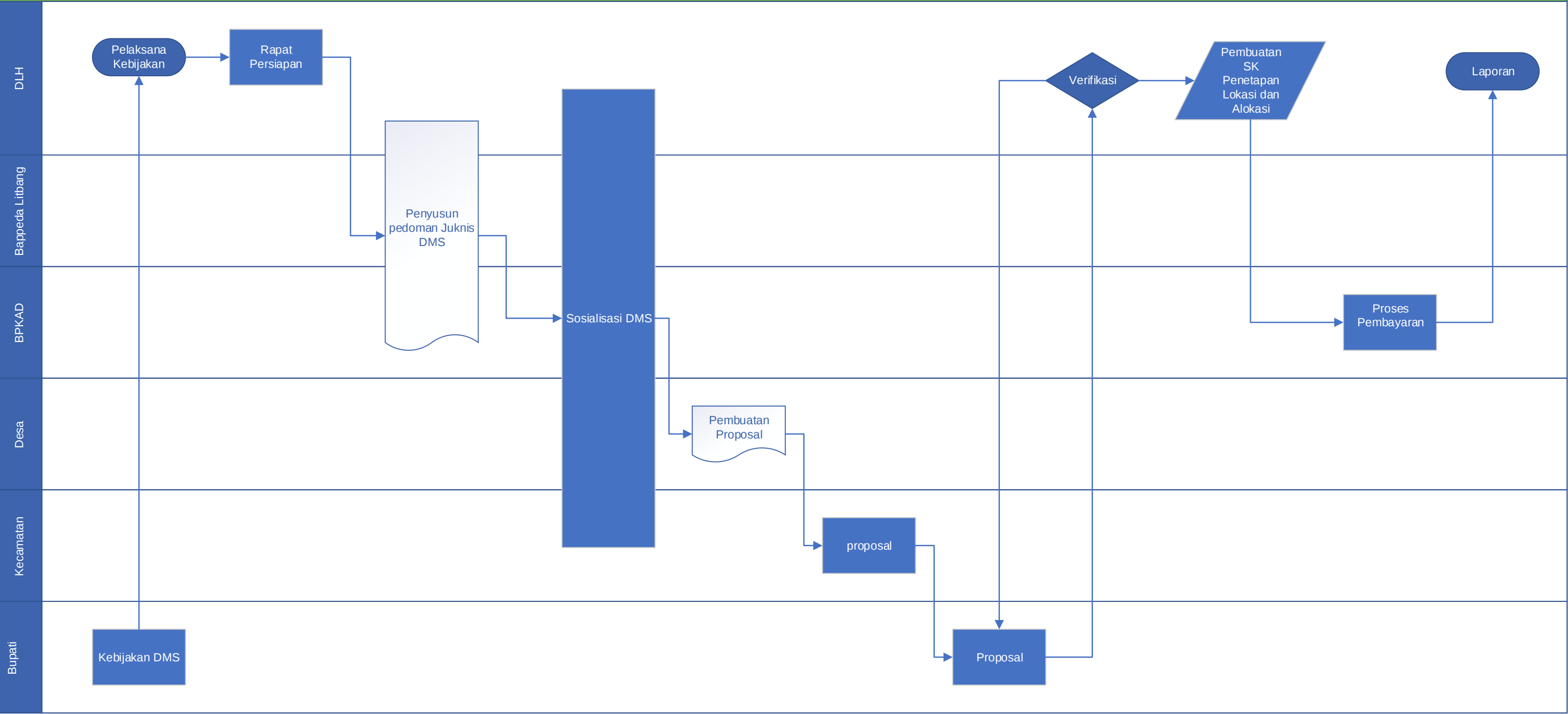




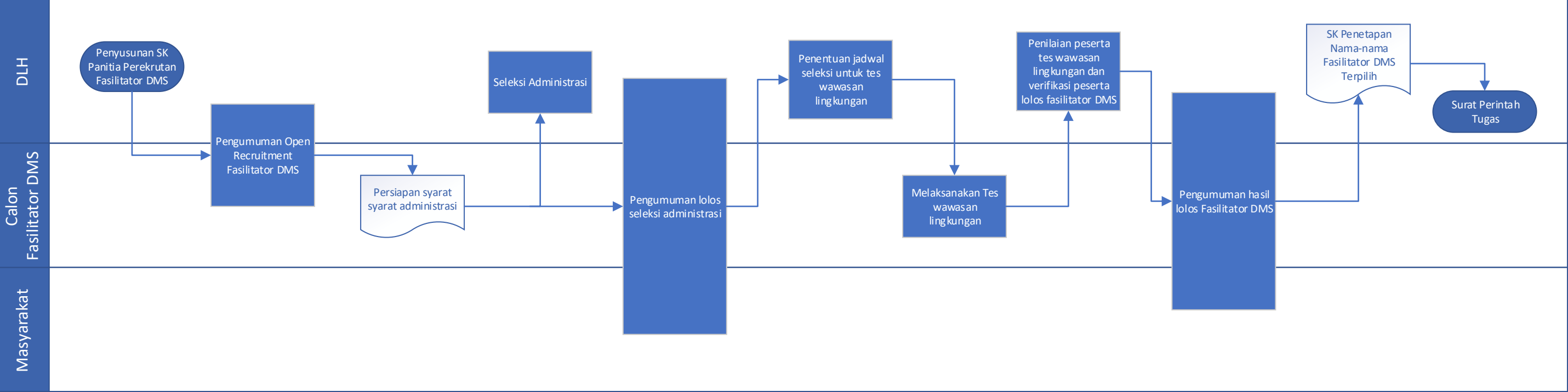
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DMS)



Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Perekrutan Fasilitator)



PETA RELASI

SLW-02.4

Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi

Dinas
Perhubungan

Dinas Perkim

DLH

Dinas PUPR

BAPPEDA
LITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

DINAS
KOMINFO

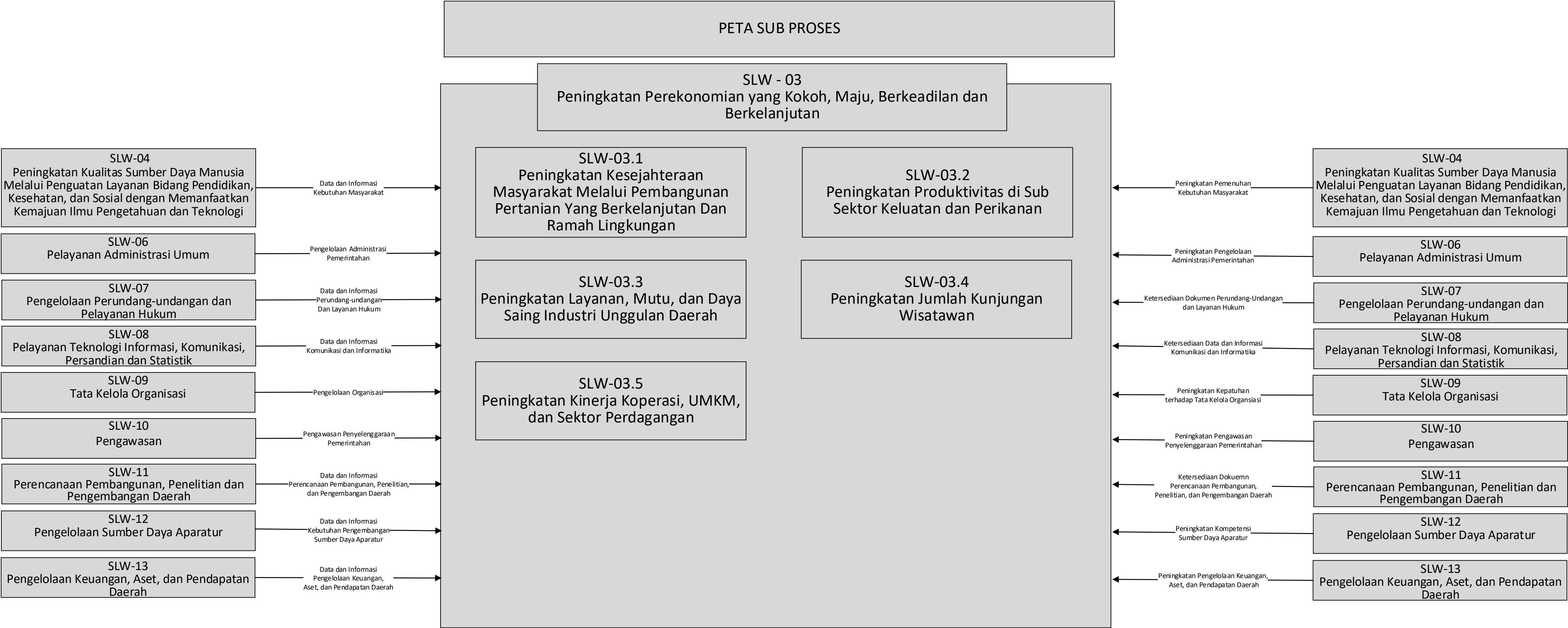
BAPENDA

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN PBJ

BAGIAN
ORGANISASI

BPBD



SLW-03.1

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan

DINAS KPTAN

DINAS
PERIKANAN

DLH

BAPPEDA
LITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

BKPSDM

BAPENDA

DINKES

DINAS KOP,
UKM, & DAG

DINAS
PORAPAR

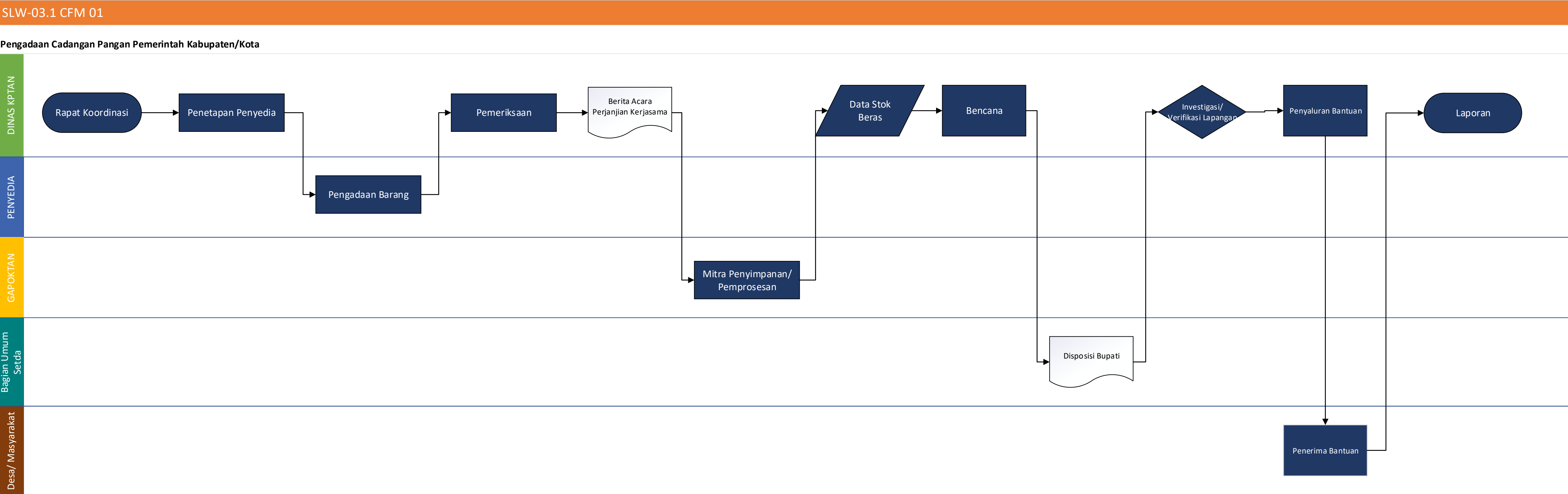
DINAS
KOMINFO

BAGIAN
PEMERINTAHAN
SETDA

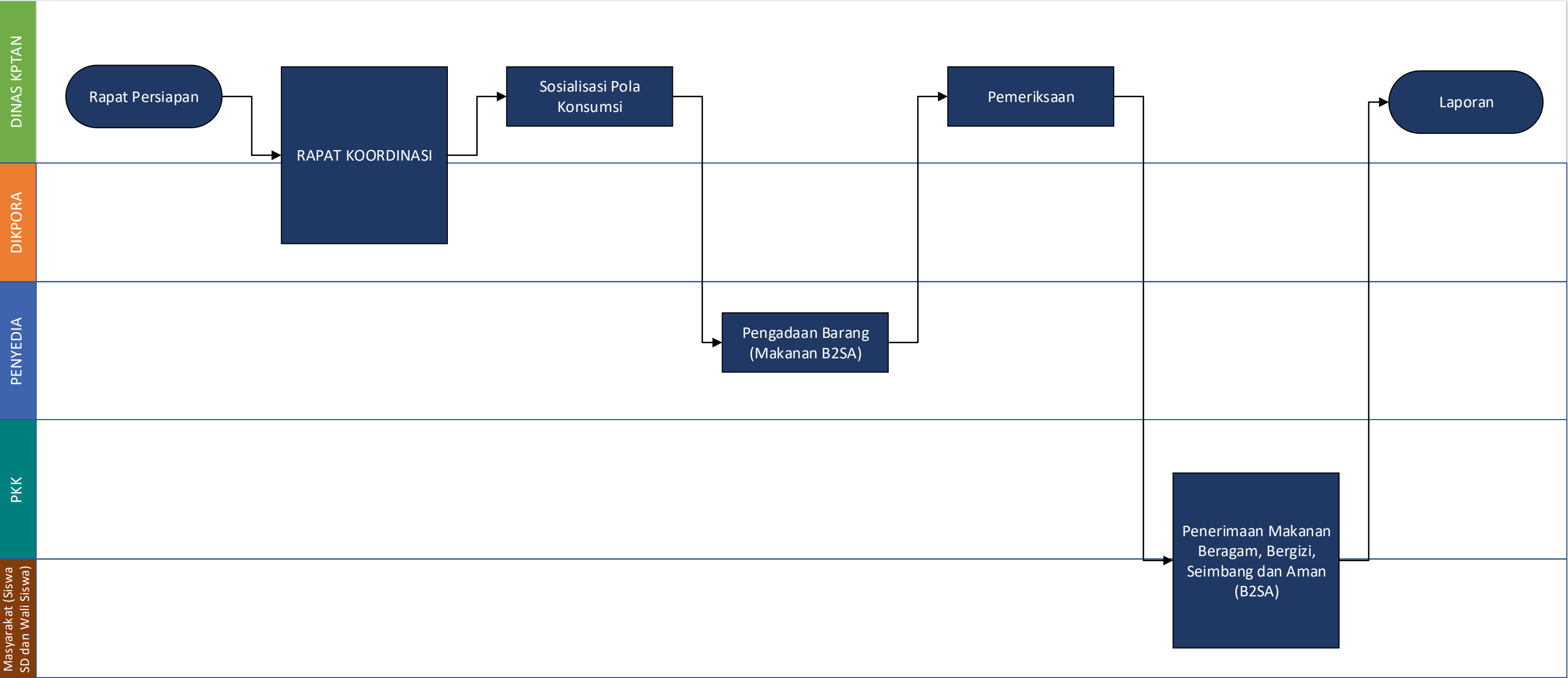
BAGIAN ORGANISASI
SETDA

BAGIAN HUKUM
SETDA

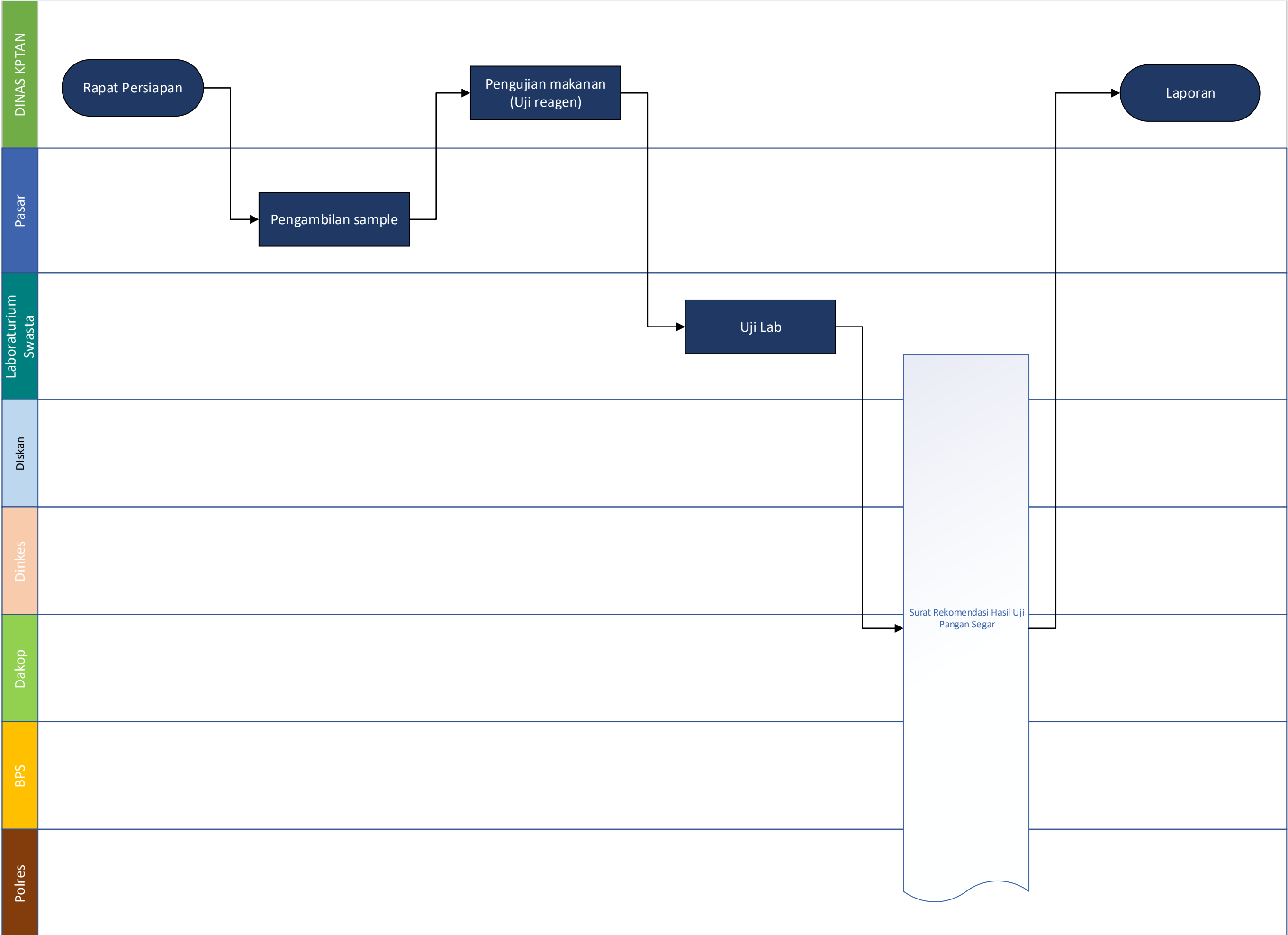
BAGIAN PELAYANAN
BARANG/ JASA



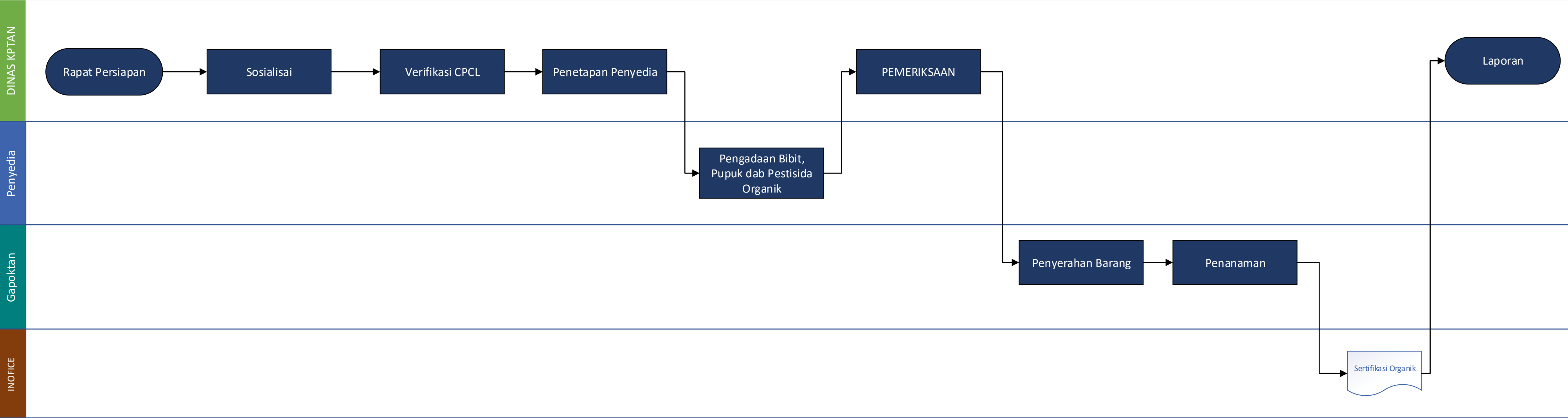
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



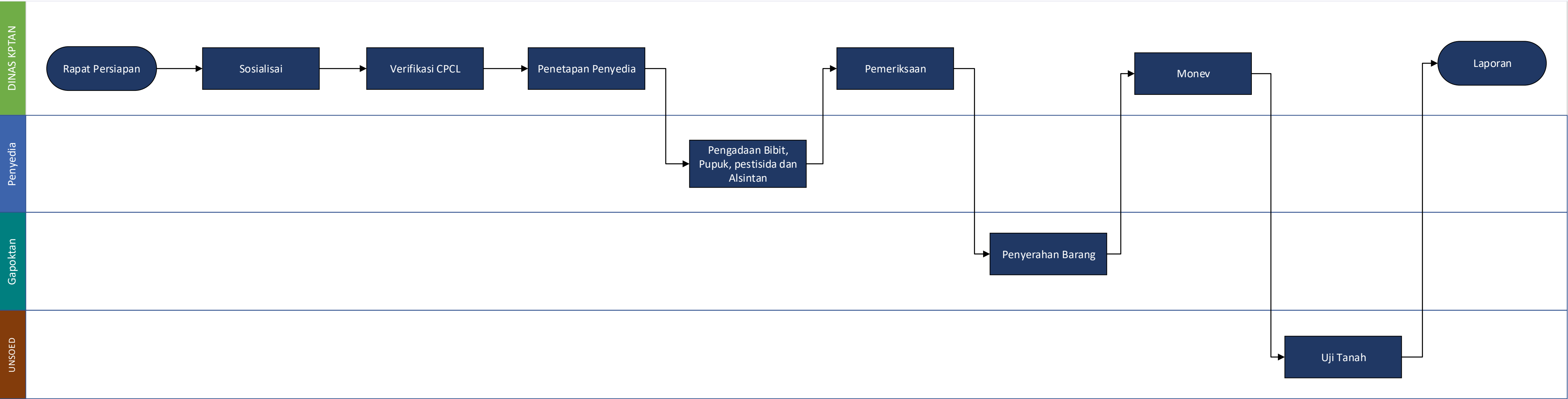
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



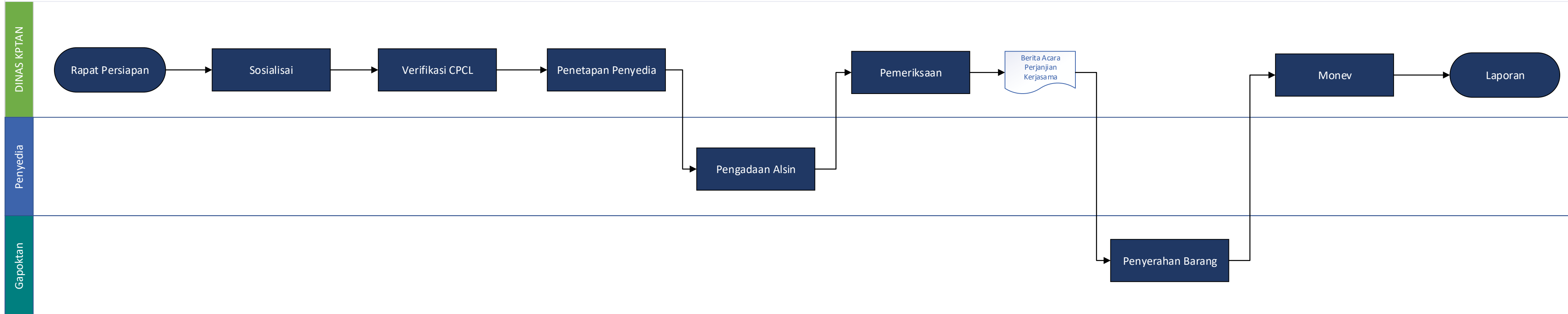
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi



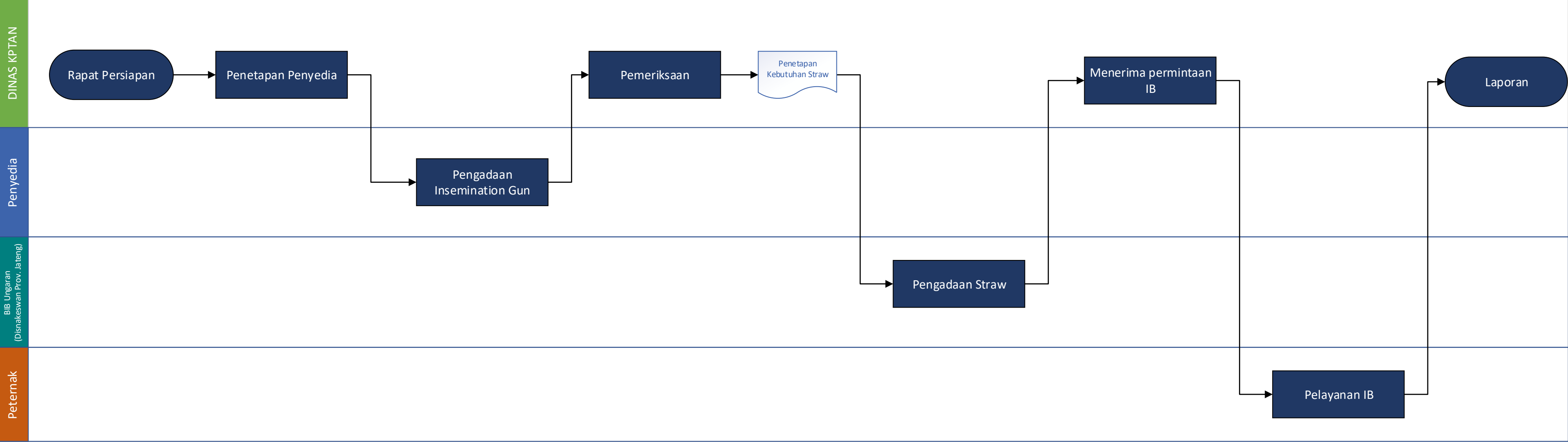
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi



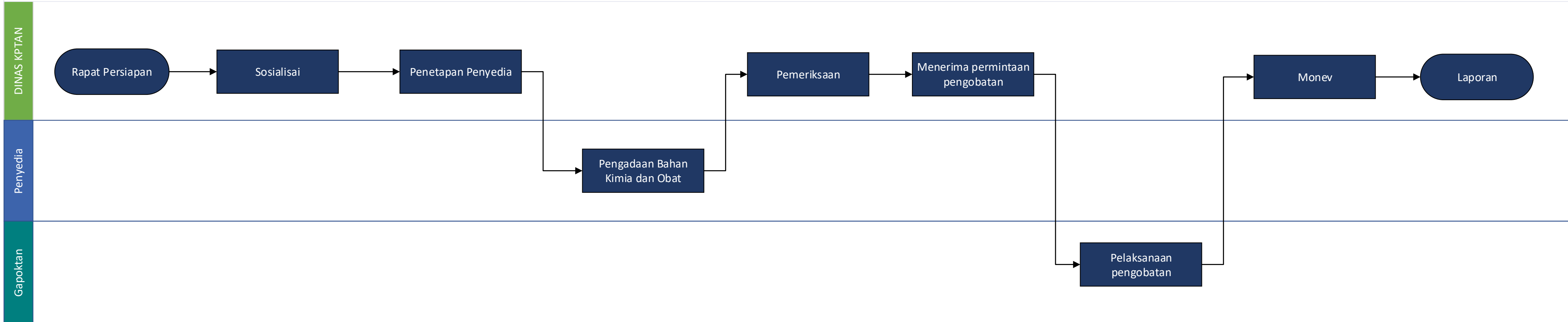
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian



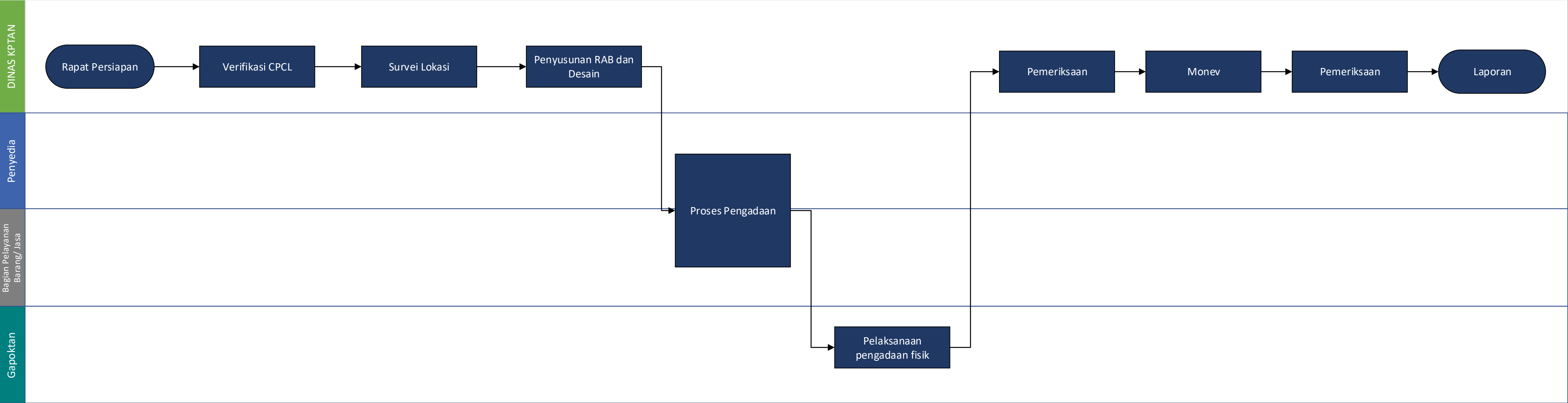
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman



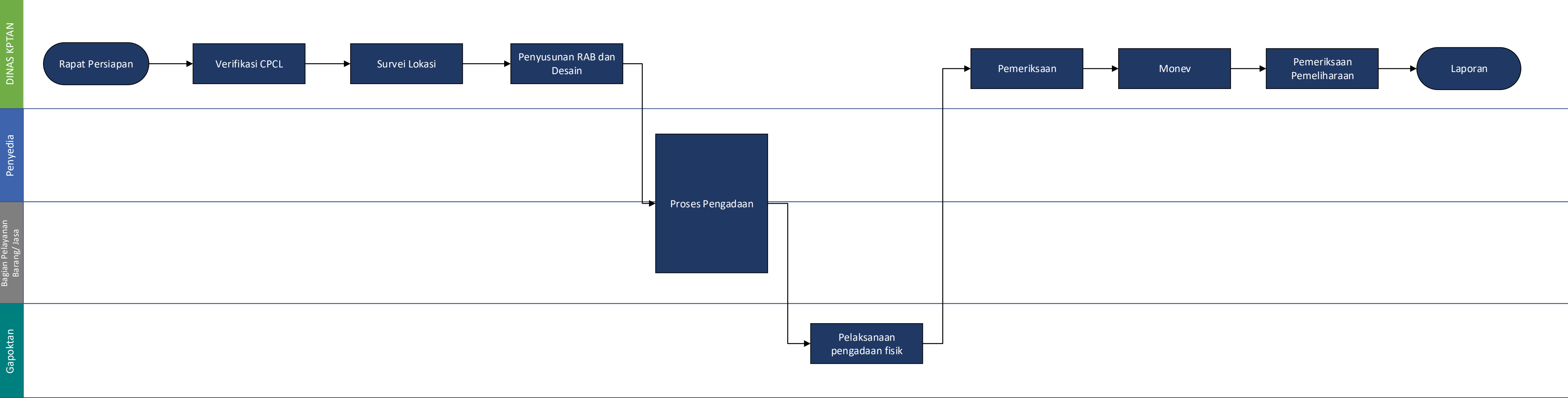
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya



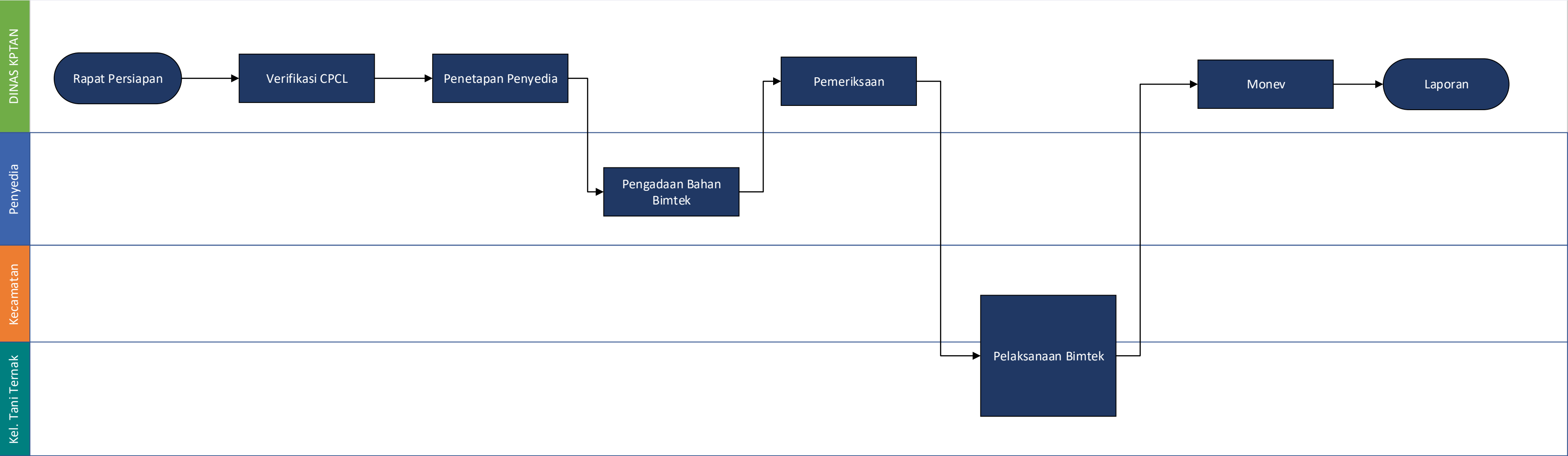
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

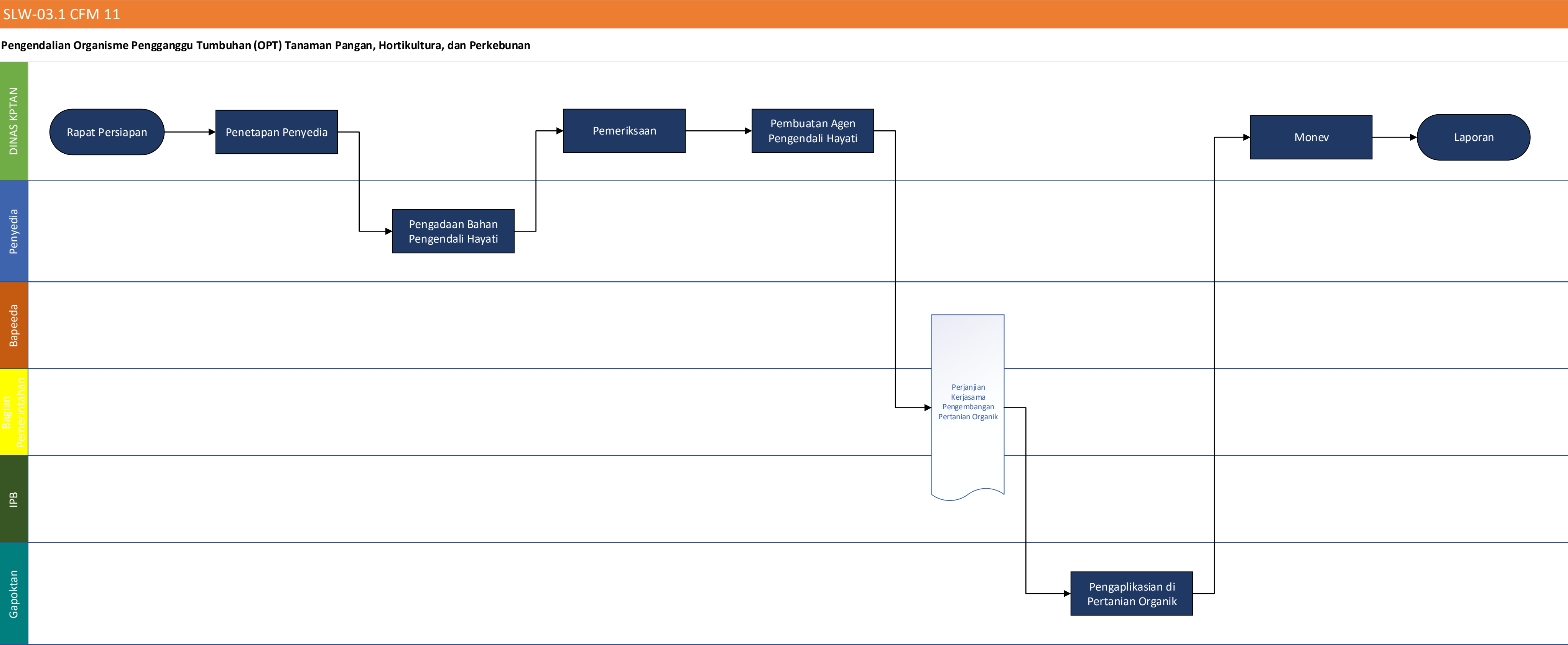


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

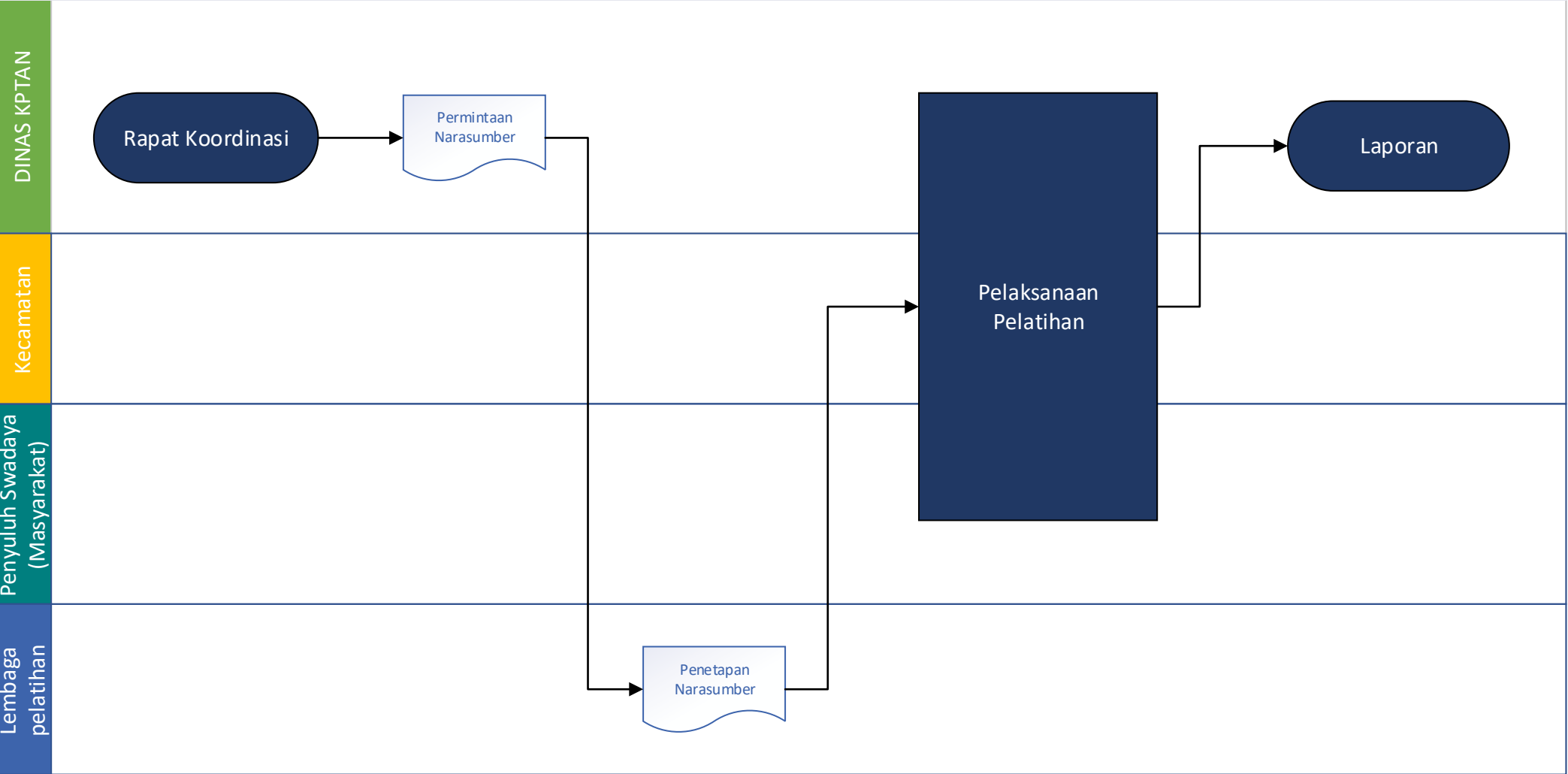


Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

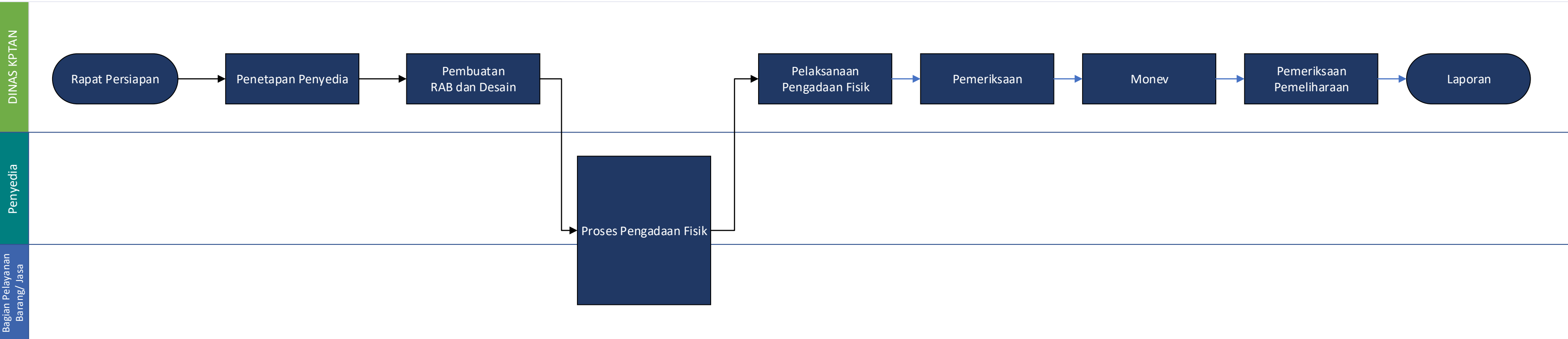




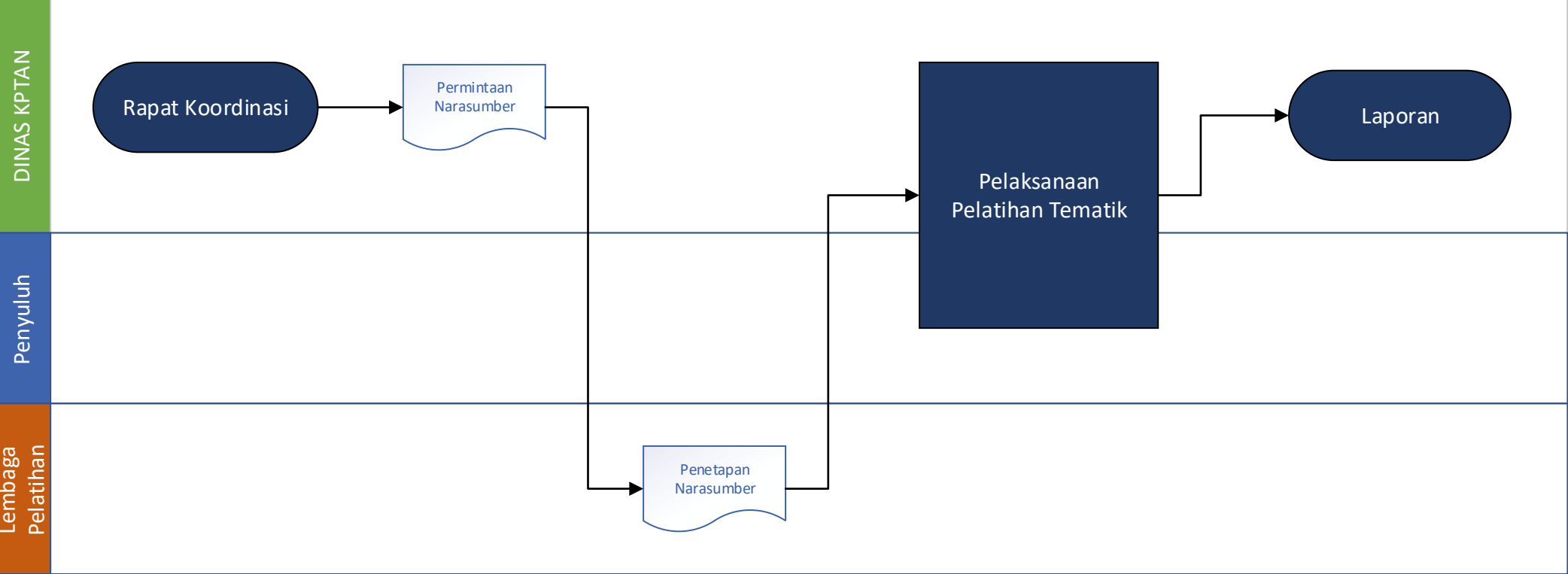
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa



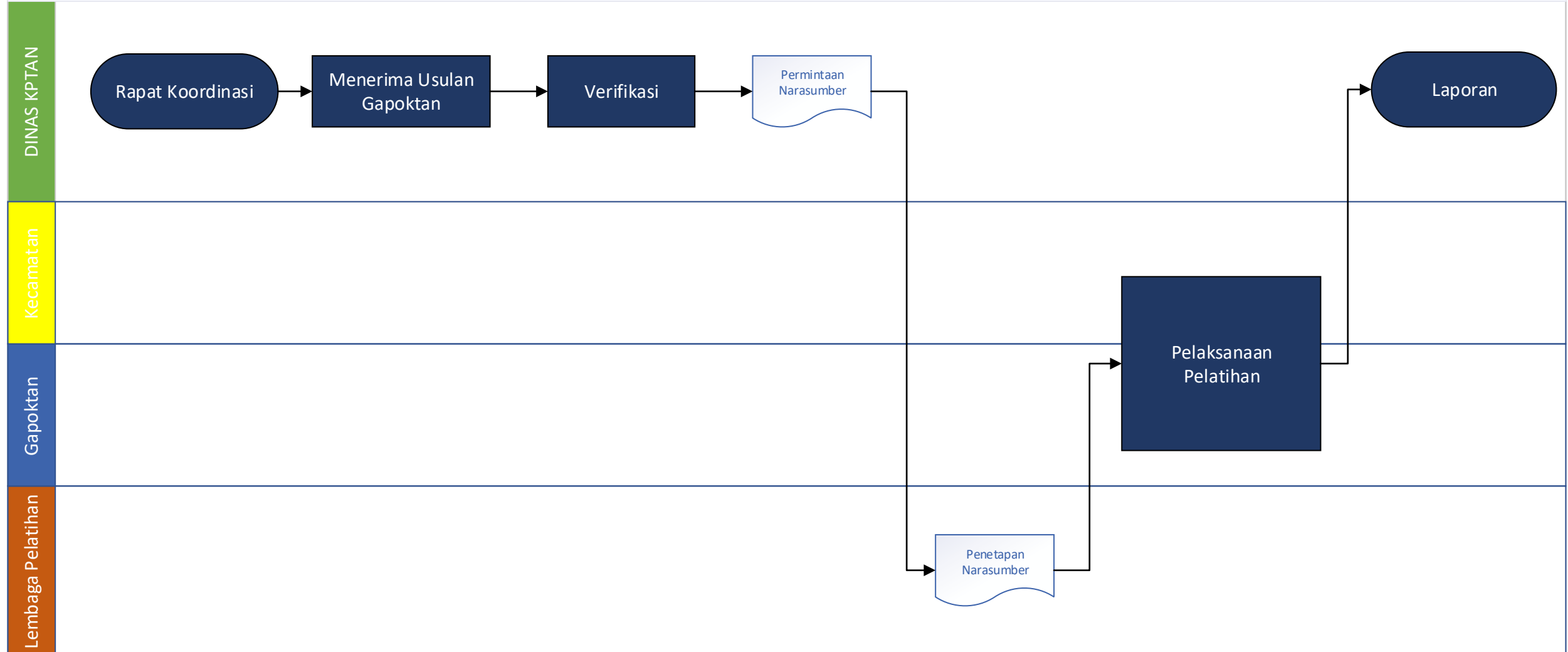
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian



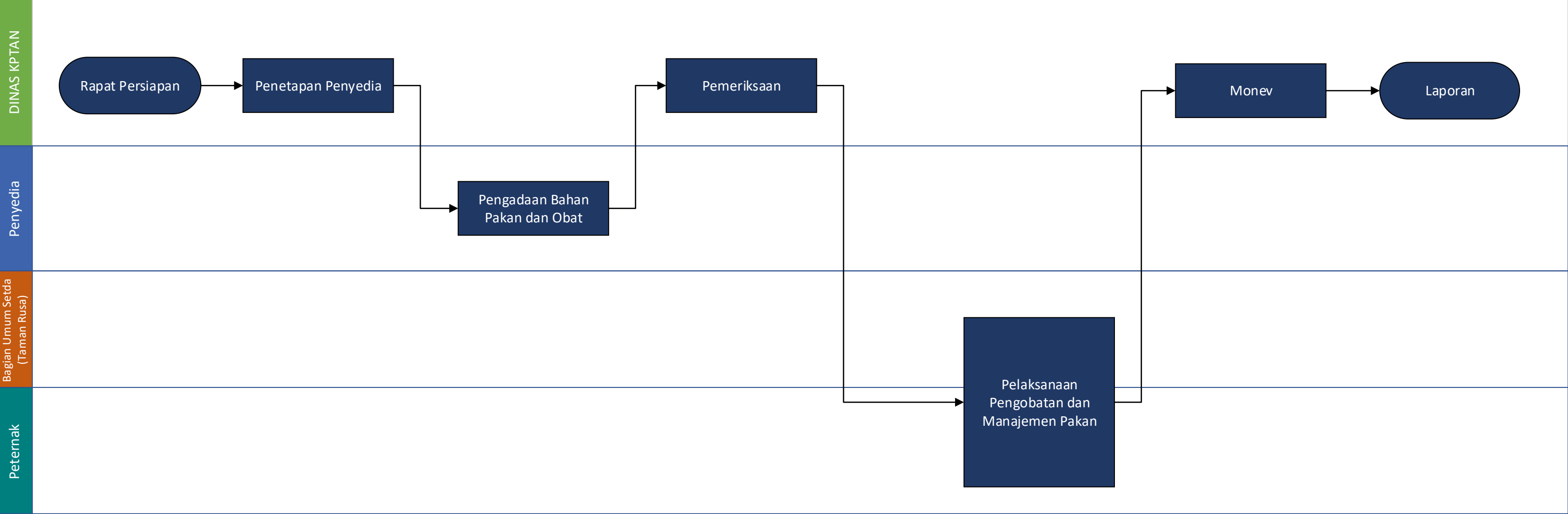
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian



Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis



PETA RELASI

SLW-03.2

Peningkatan Produktivitas di Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

DINAS PERIKANAN

DINAS KPTAN

DINAS LH

BAPPEDALITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUKUM

DINAS KOMINFO

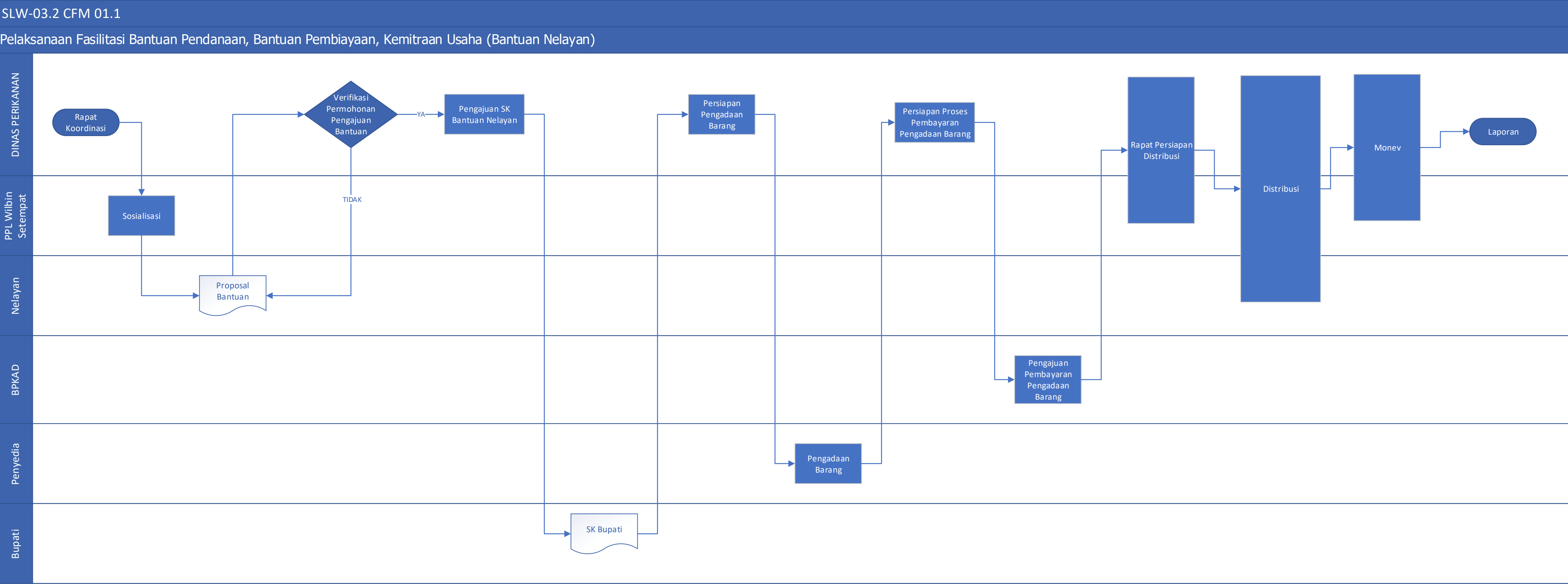
BAPENDA

BKPSDM

BPBJ

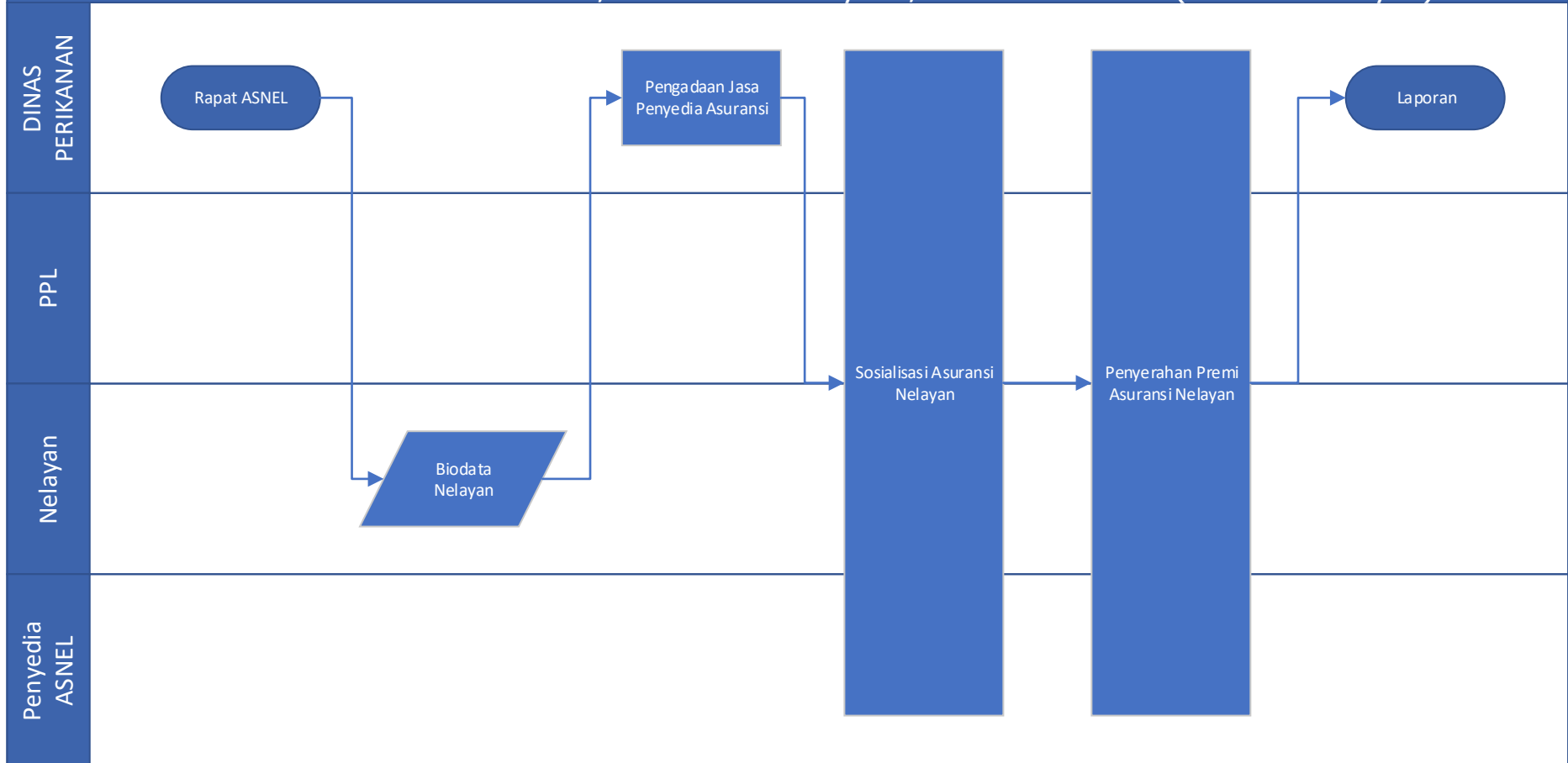
DINAS PMPTSP

DINAS DIKBUD



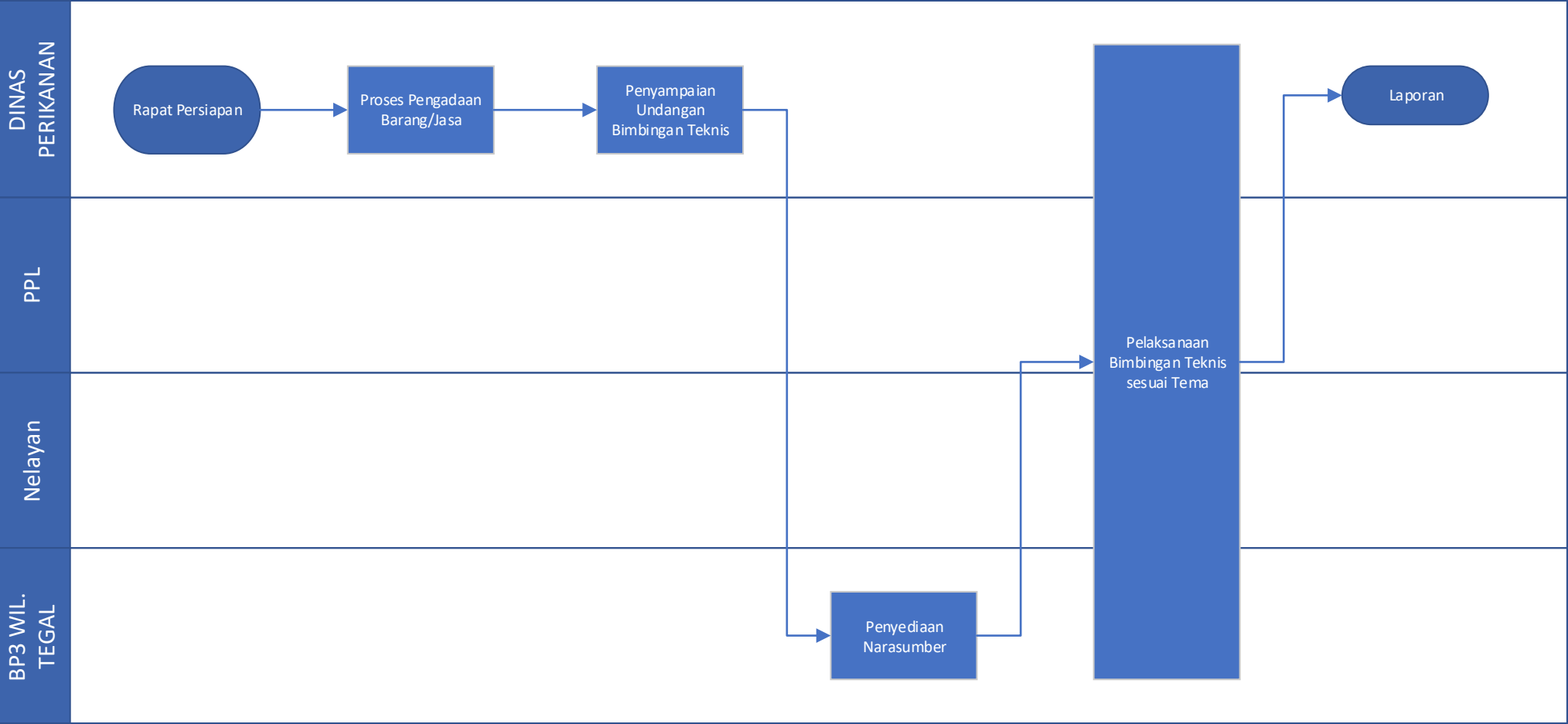
SLW-03.2 CFM 01.2

Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Asuransi Nelayan)



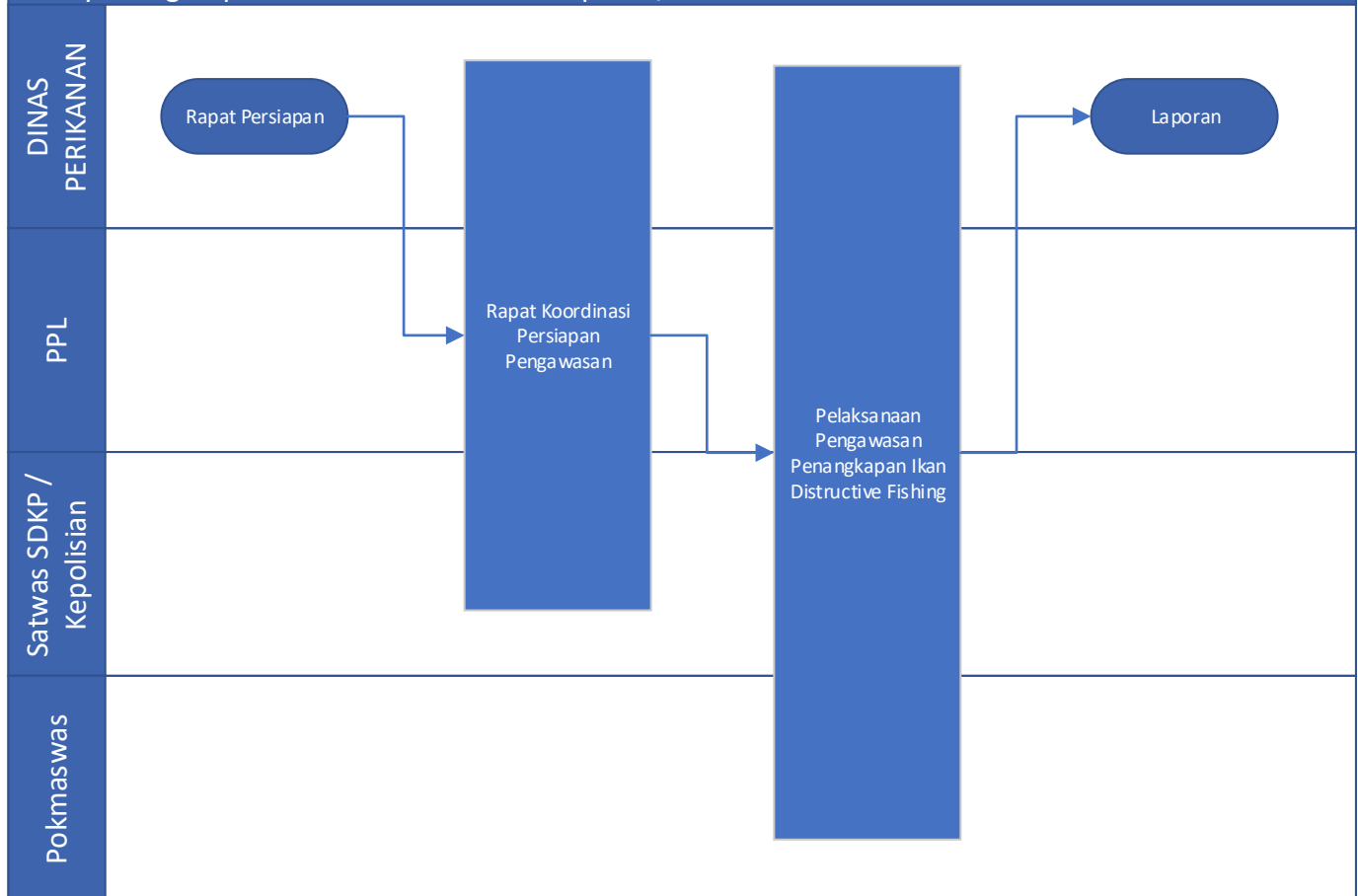
SLW-03.2 CFM 02

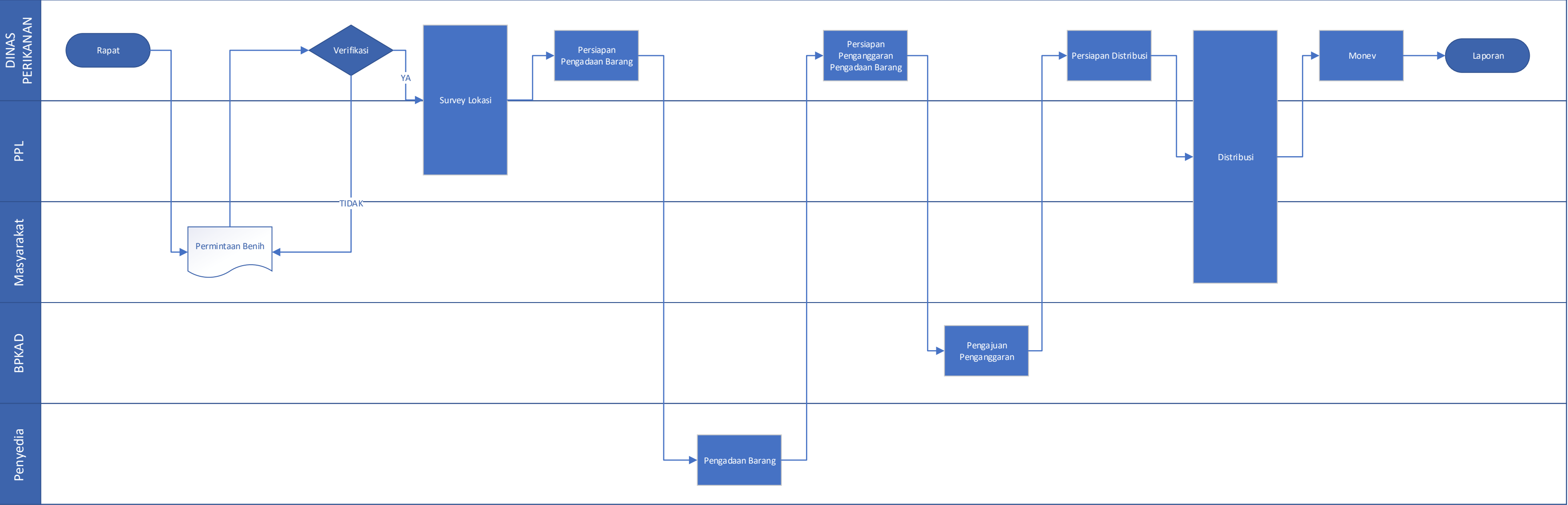
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

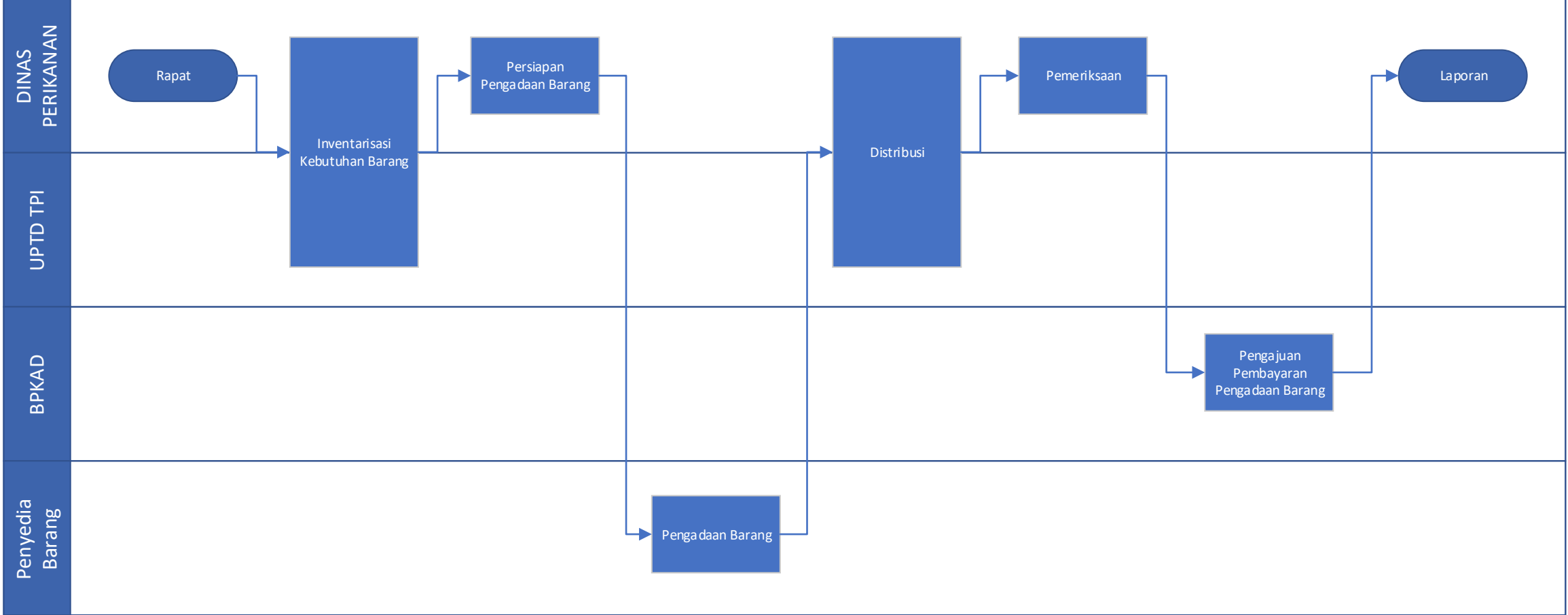


SLW-03.2 CFM 03.1

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

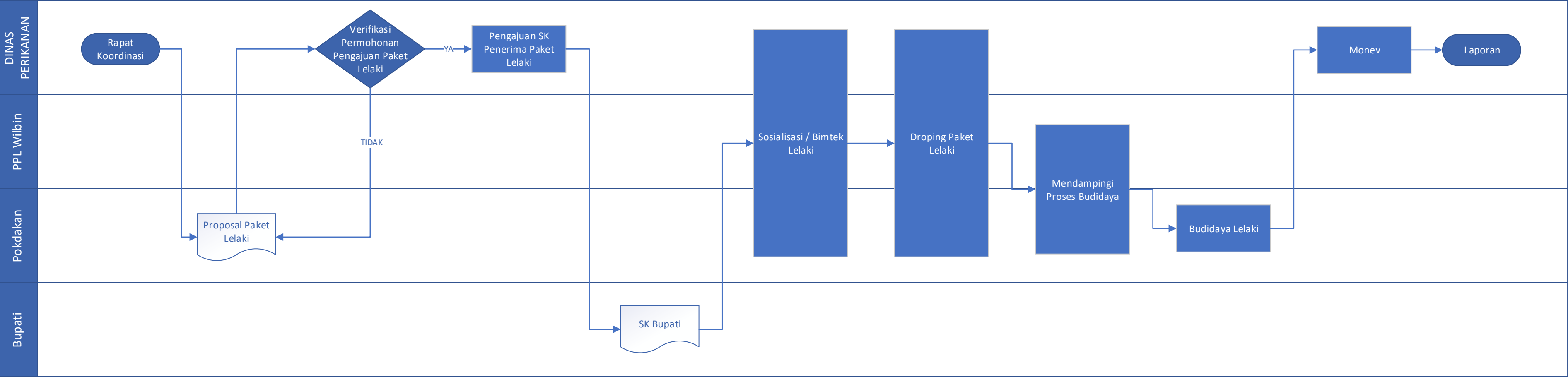






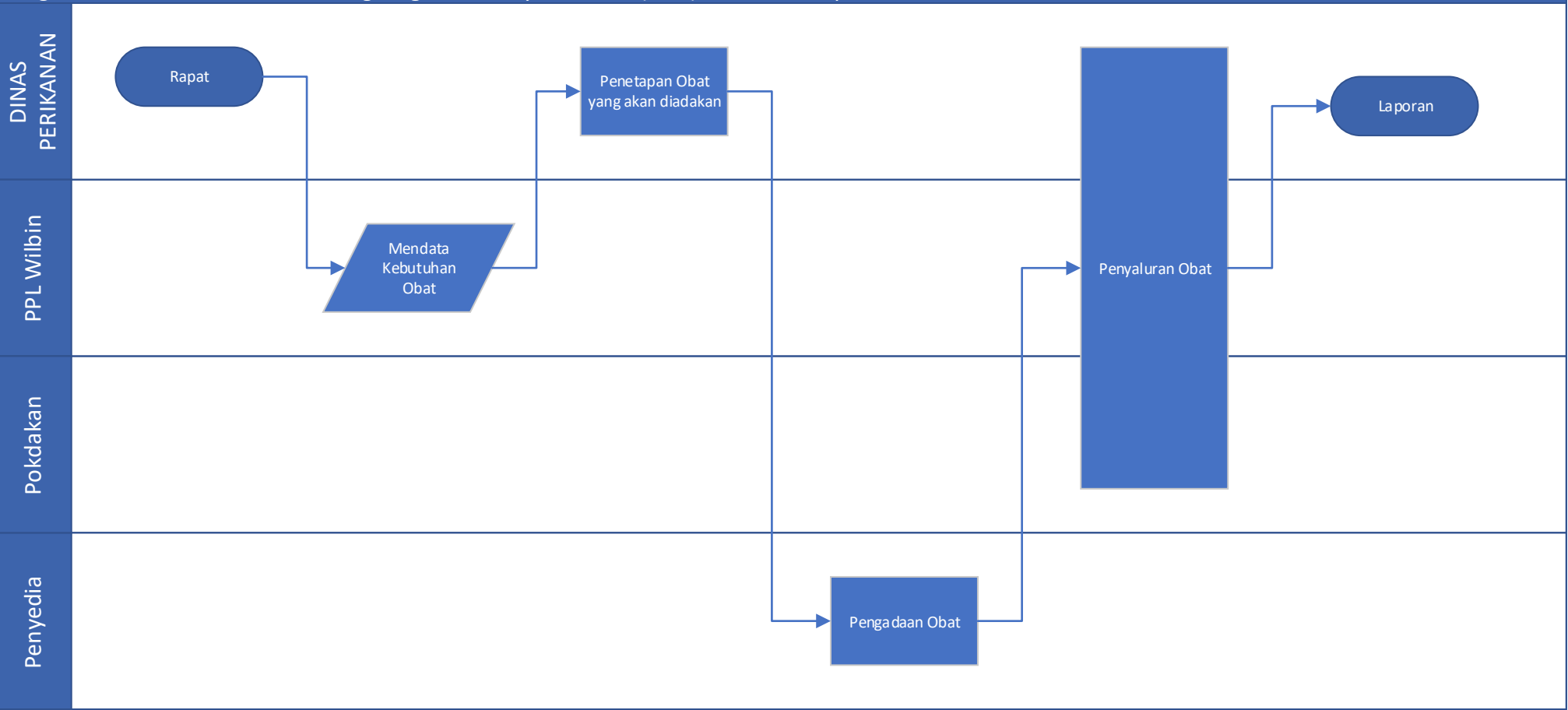
SLW-03.2 CFM 05

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat



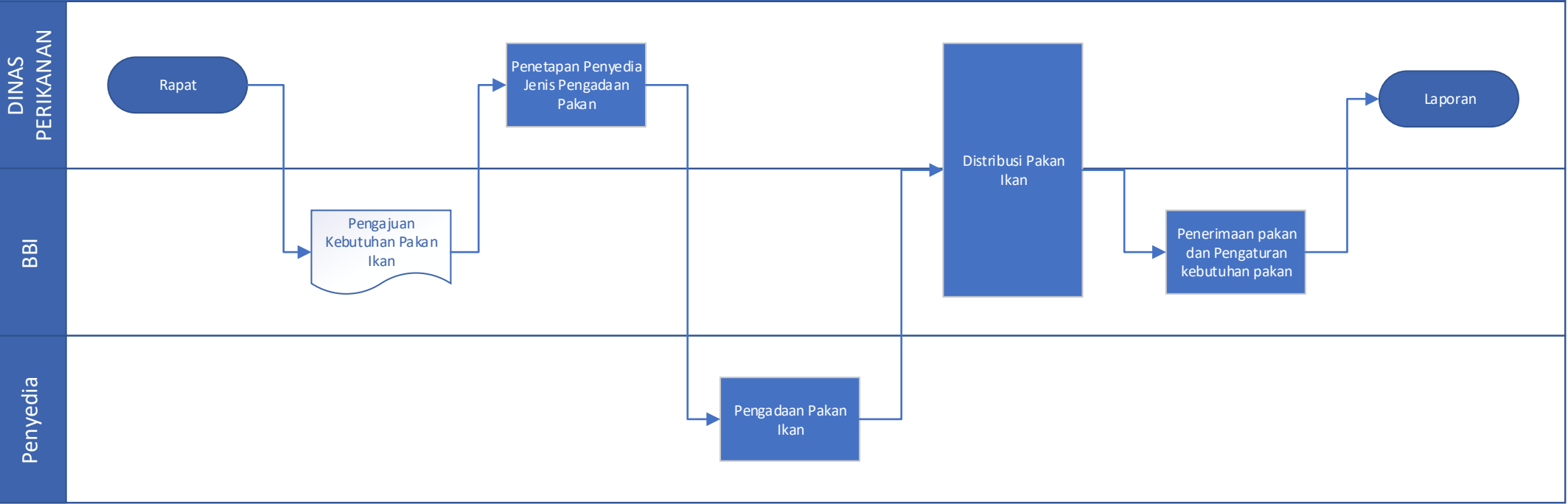
SLW-03.2 CFM 06

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



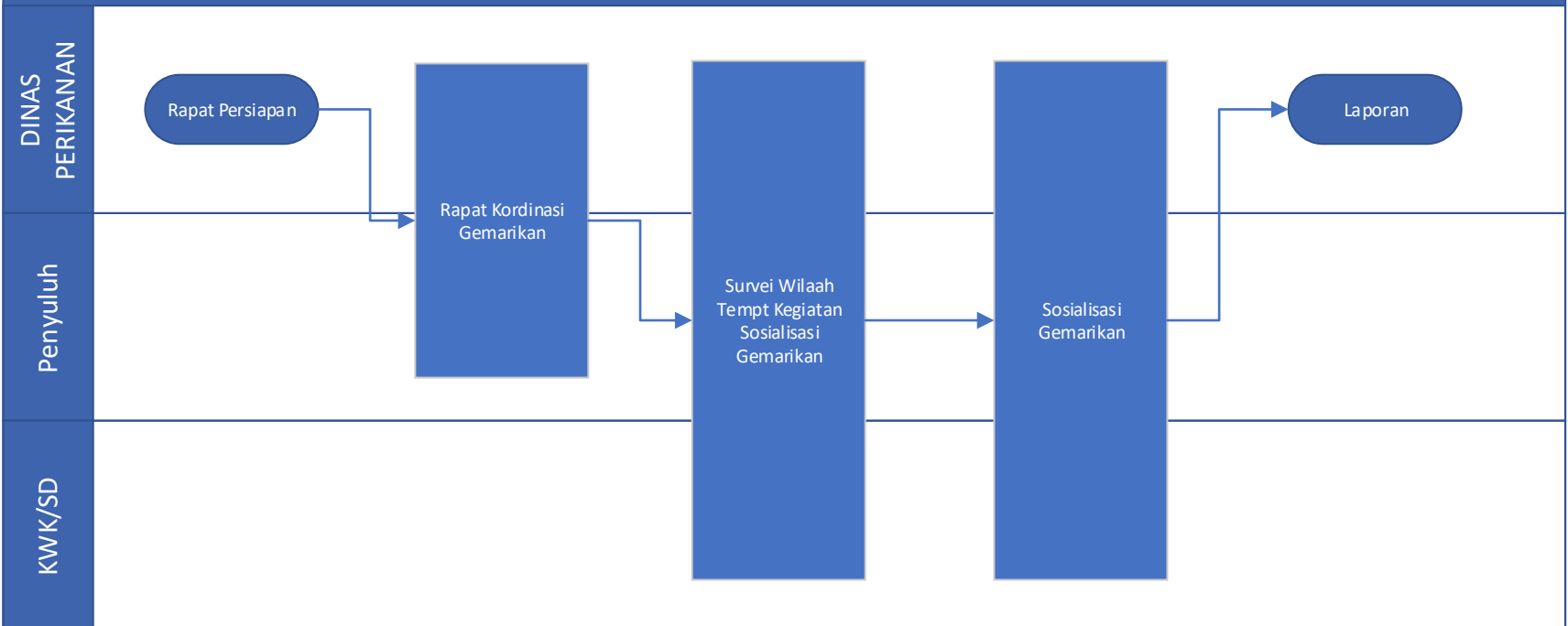
SLW-03.2 CFM 07

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



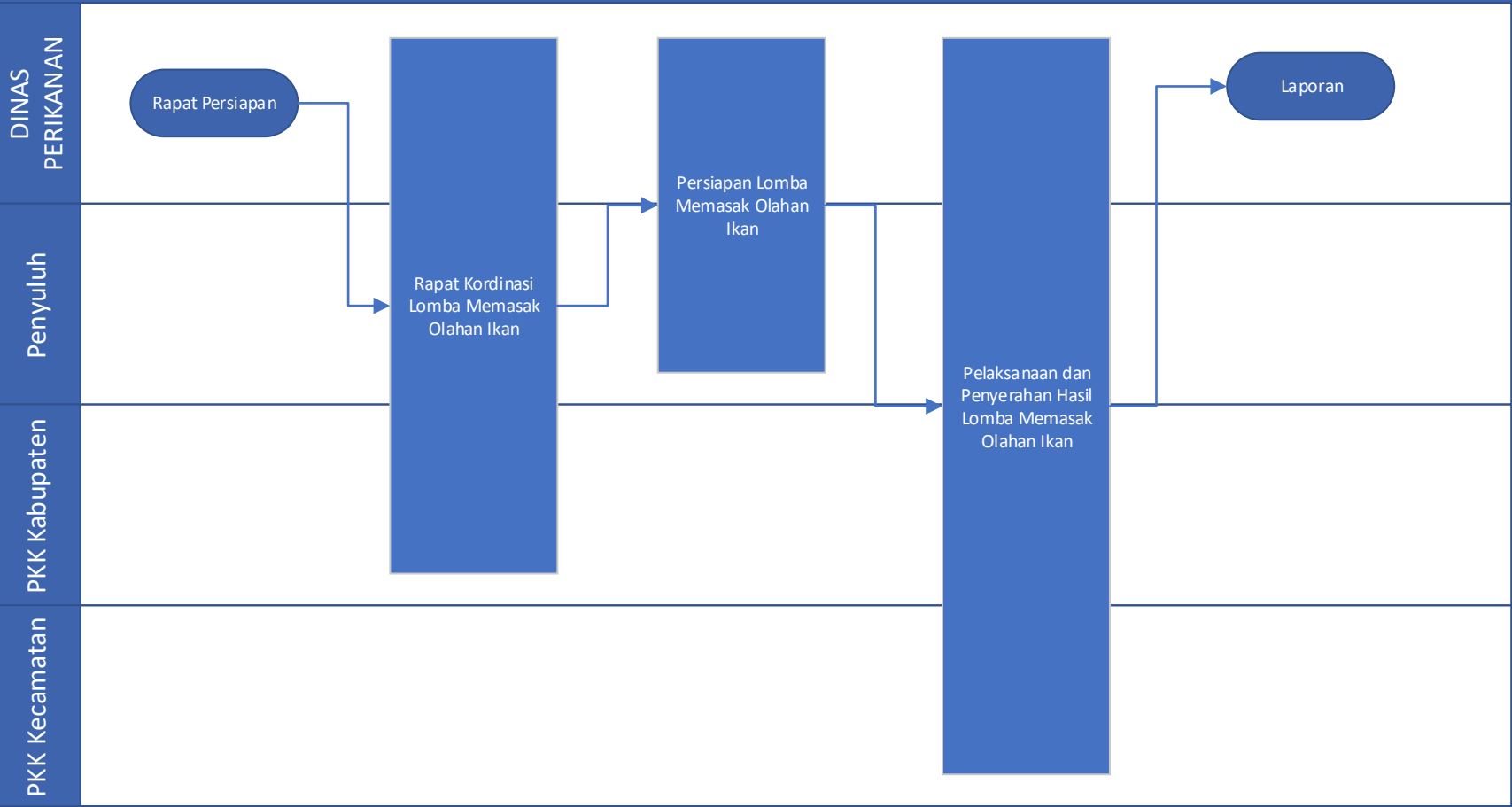
SLW-03.2 CFM 08.1

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

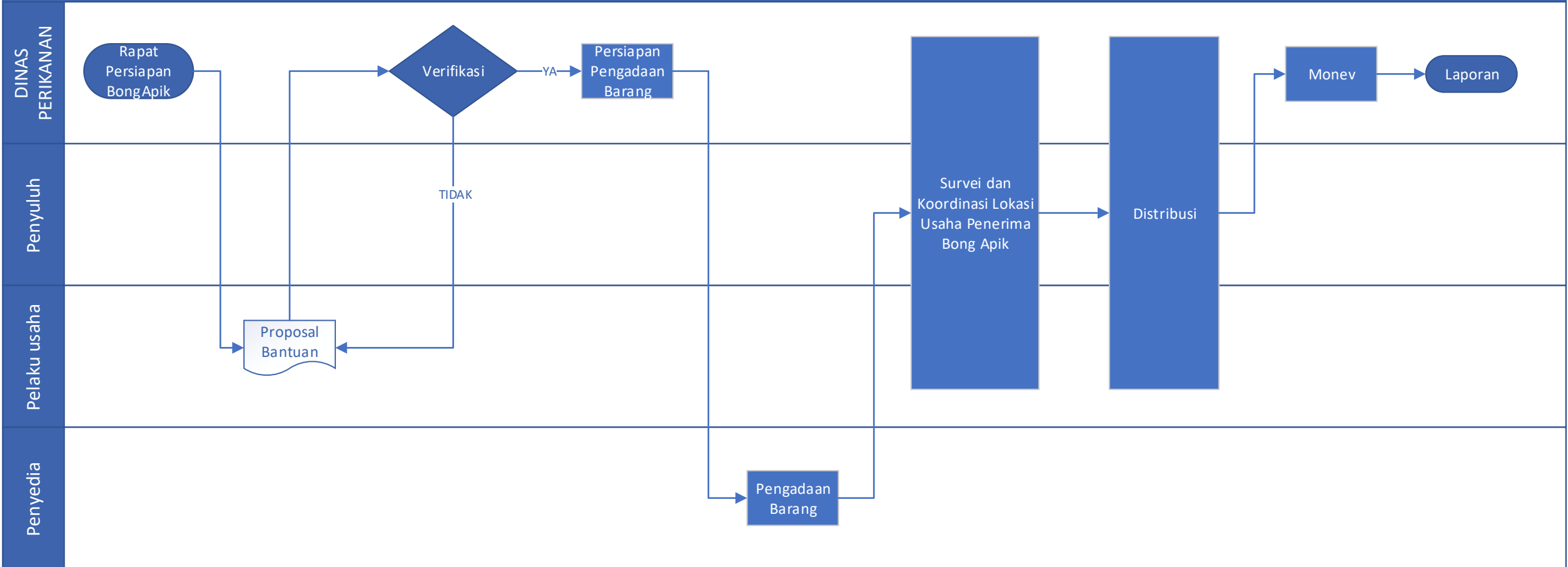


SLW-03.2 CFM 08.2

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil



Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil



PETA RELASI

SLW-03.3
Peningkatan Layanan, Mutu, dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah

DISPERINTRANSNAKER

INSPEKTORAT

BAPPEDA

BKPSDM

BPKAD

BAPPENDA

DISDAGKOPUKM

DPMPTSP

DINKES

SETWAN

BAGIAN EKBANG

BAGIAN HUKUM

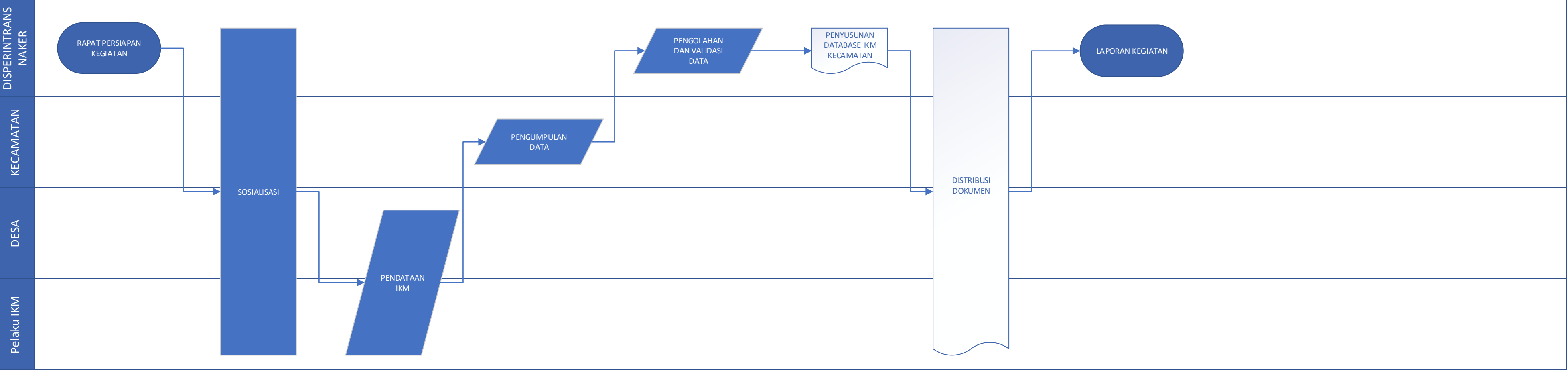
BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN PENGADAAN BRG/JASA

DLH

SLW-03.3 CFM 01

Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas (Database IKM)



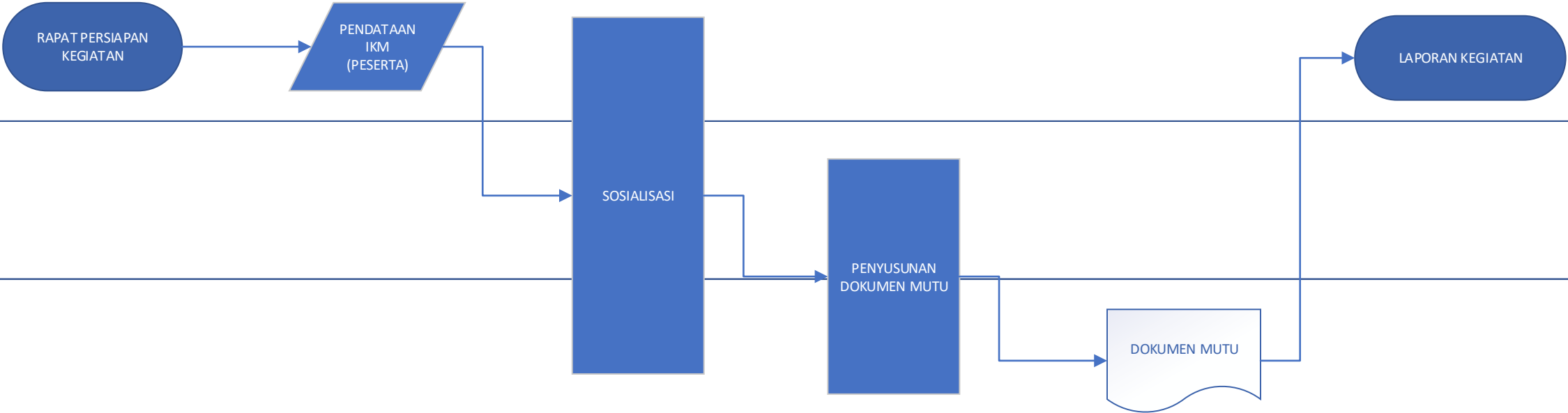
SLW-03.3 CFM 02

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

DISPERINTRAN
SNAKER

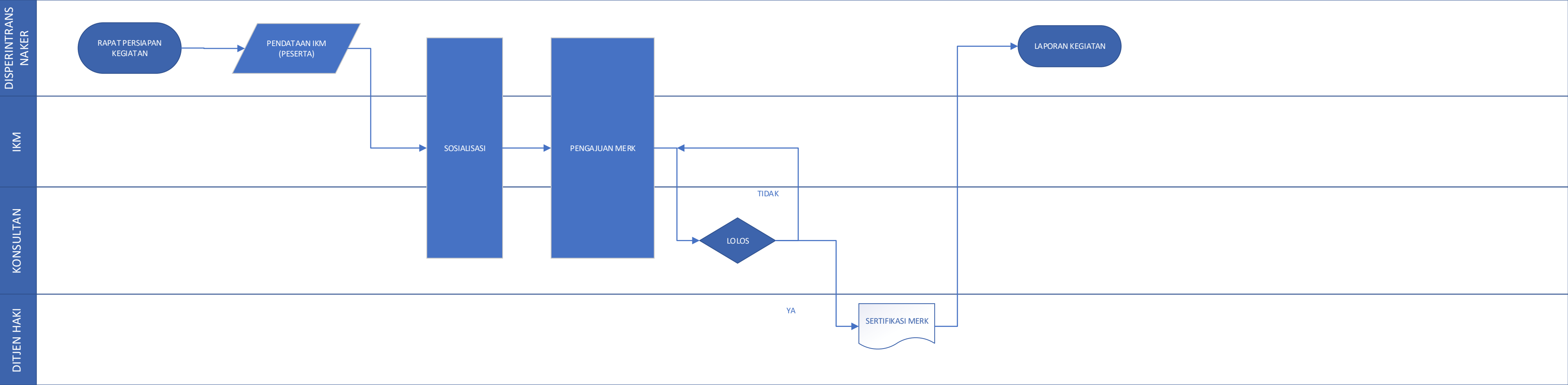
KONSULTAN
(SWASTA)

IKM



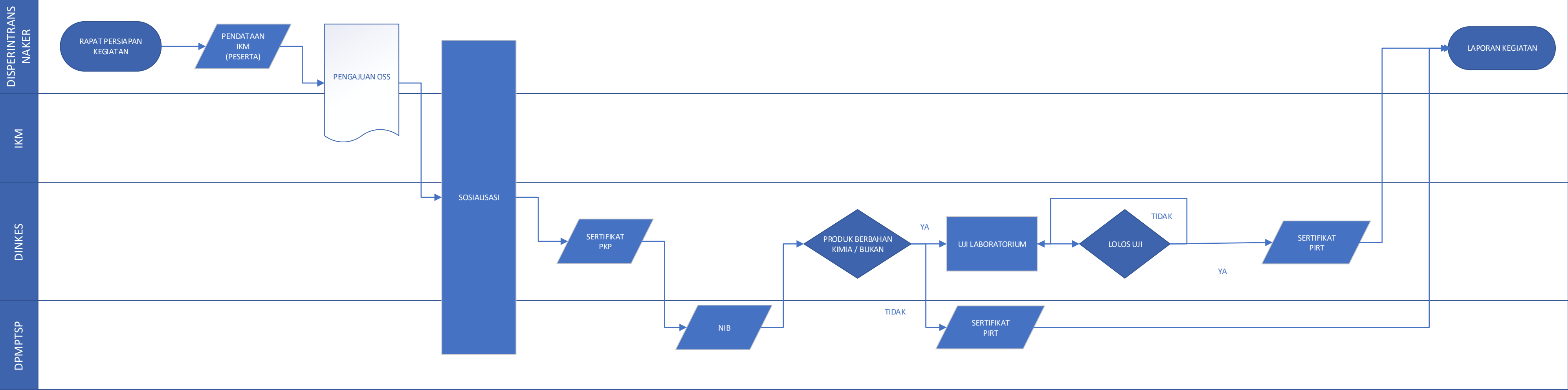
SLW-03.3 CFM 03

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Fasilitasi Merk)



SLW-03.3 CFM 04

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Sertifikasi PIRT)

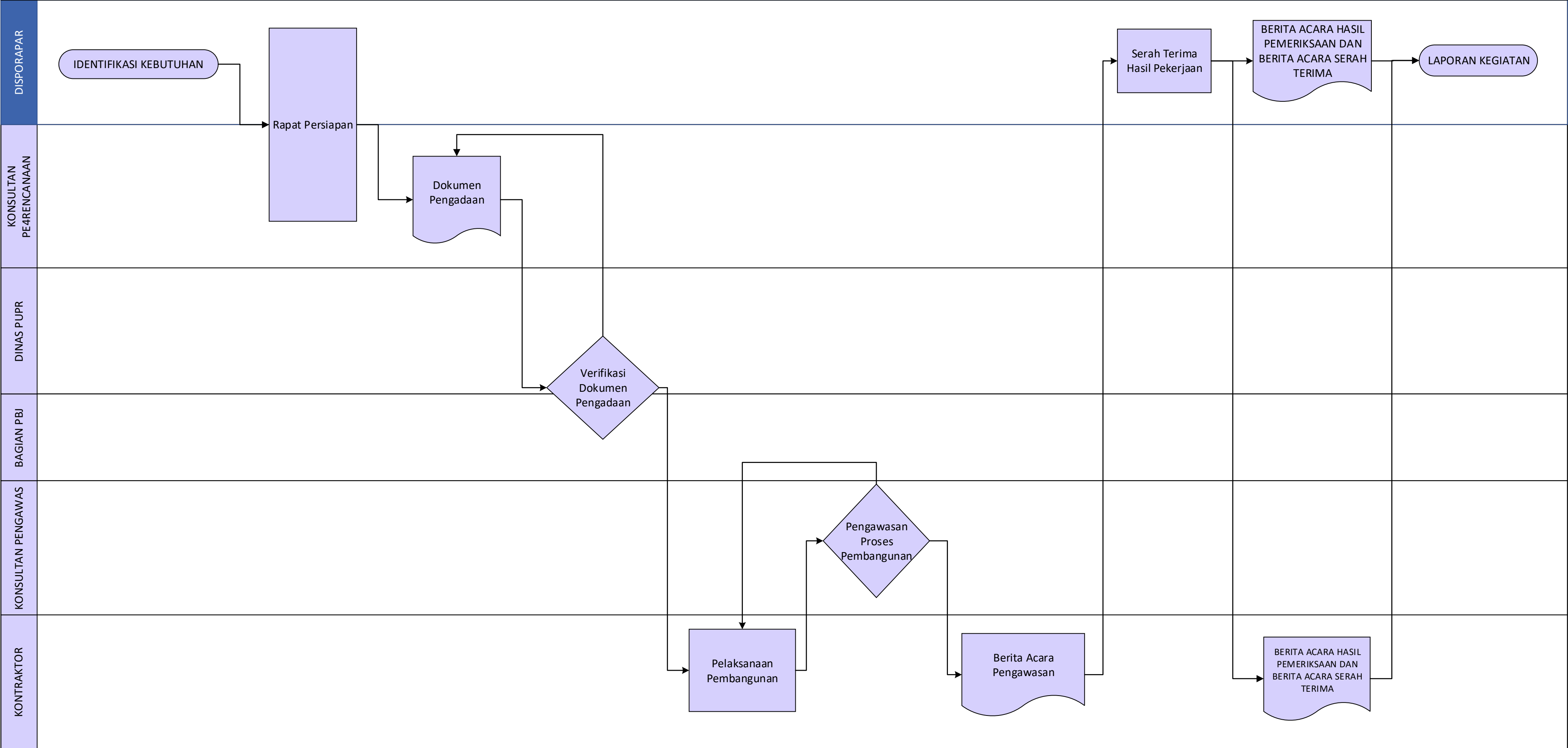


PETA RELASI

SLW-03.4

PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

DINAS PORAPAR	SETDA	SETWAN	INSPEKTORAT	DIKBUD
DINAS PUPR	SATPOL PP	DINAS SOSIAL	DINAS PERINTRANSNAKER	DINAS LH
DINAS PERMASDES	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS KOMINFO	DPMPTSP	DINAS KOP,UKM,&DAG
BAPPEDA LITBANG	BAPENDA	BKPSDM	BPBD	KECAMATAN



PETA RELASI

SLW-03.5

Peningkatan Kinerja Koperasi, UMKM, dan Sektor Perdagangan

DINKOP UKM & DAG

BAPPEDA & LITBANG

BPKAD

BKPSDM

BAPENDA

DINAS PERIKANAN

INSPEKTORAT

DINAS KOMINFO

DINAS KPTAN

DISPERINTRANSNAKER

DINKES

DINAS PUPR

DINAS PERKIMTARU

DPMPTSP

DINAS LH

KECAMATAN

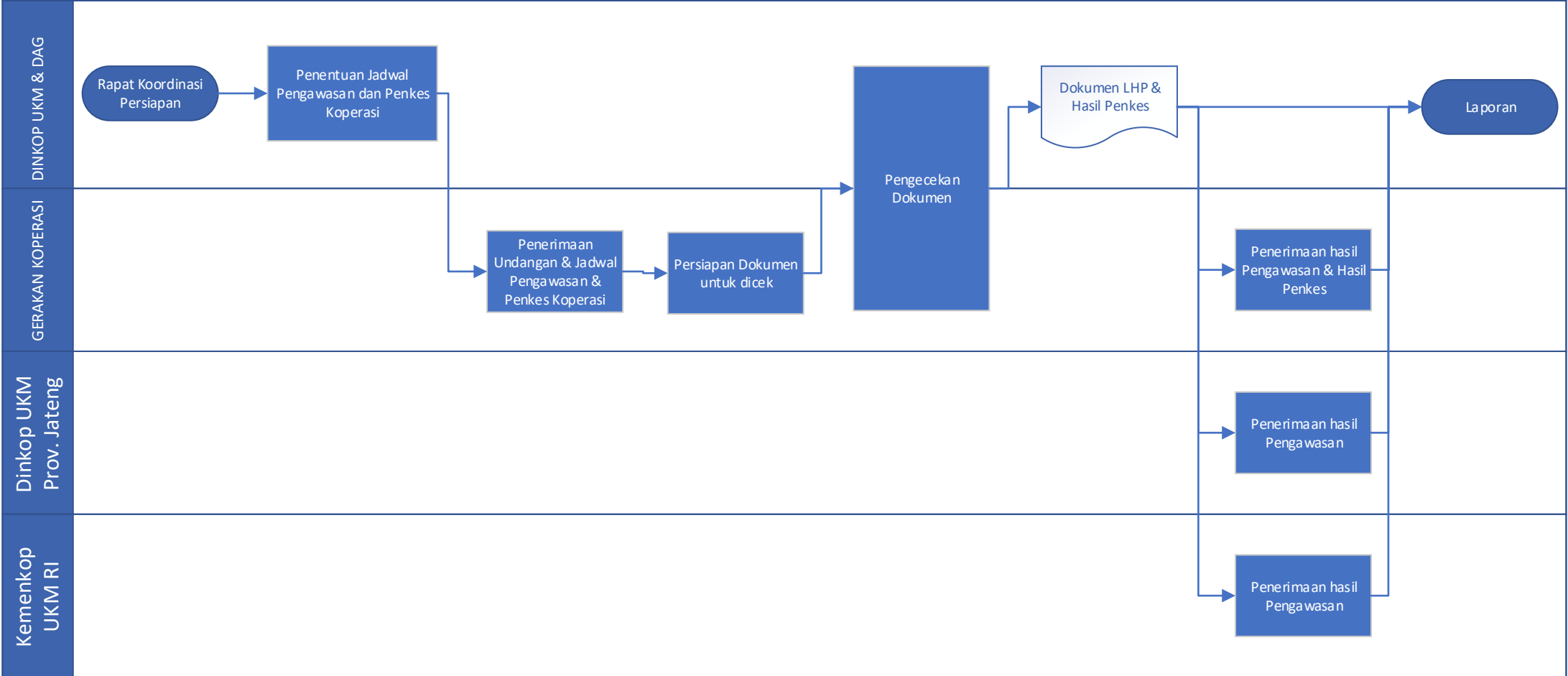
SATPOL PP

BAG. HUKUM

BAG.ORGANISASI

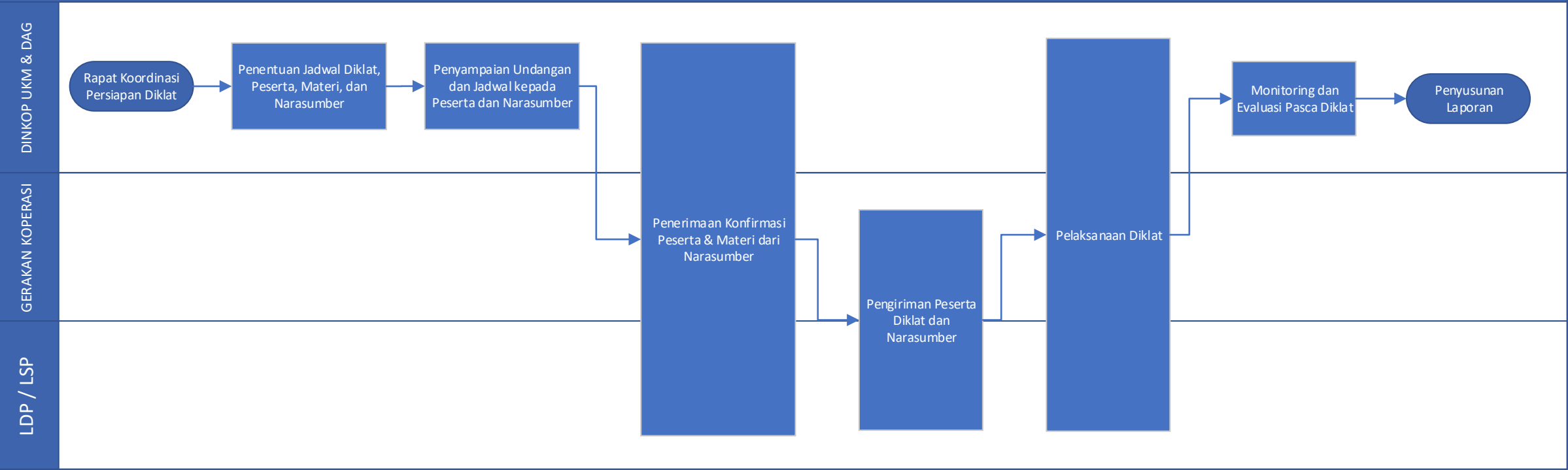
BAG.PENGADAAN

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



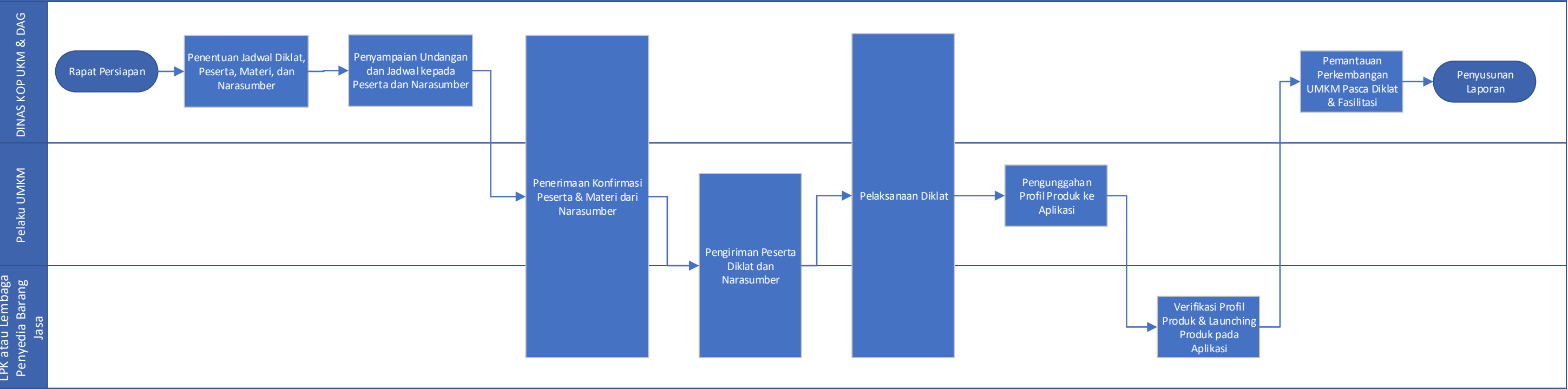
SLW-03.5 CFM 02

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



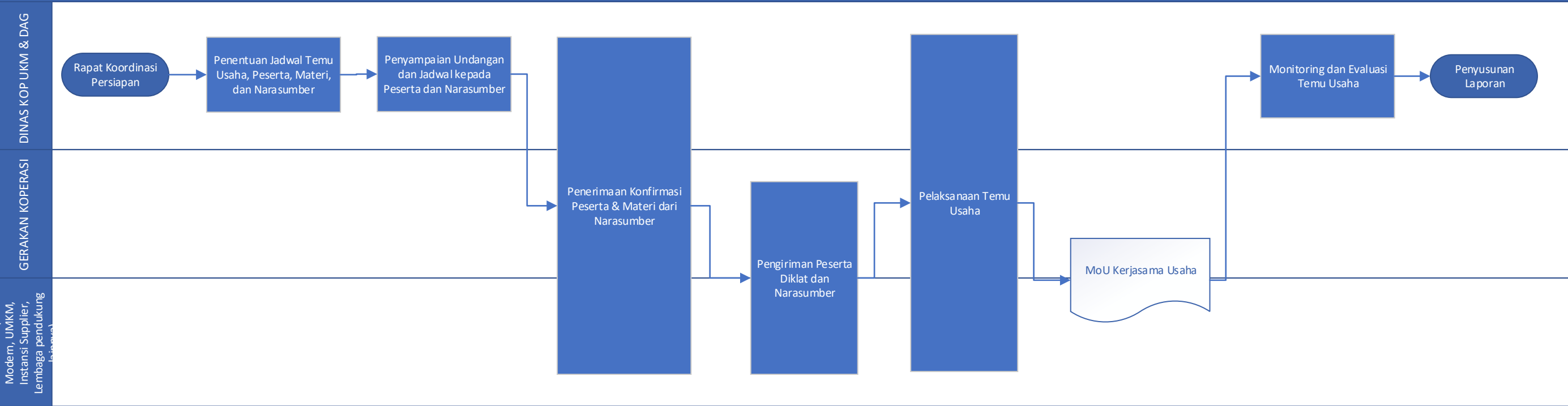
SLW-03.5 CFM 03

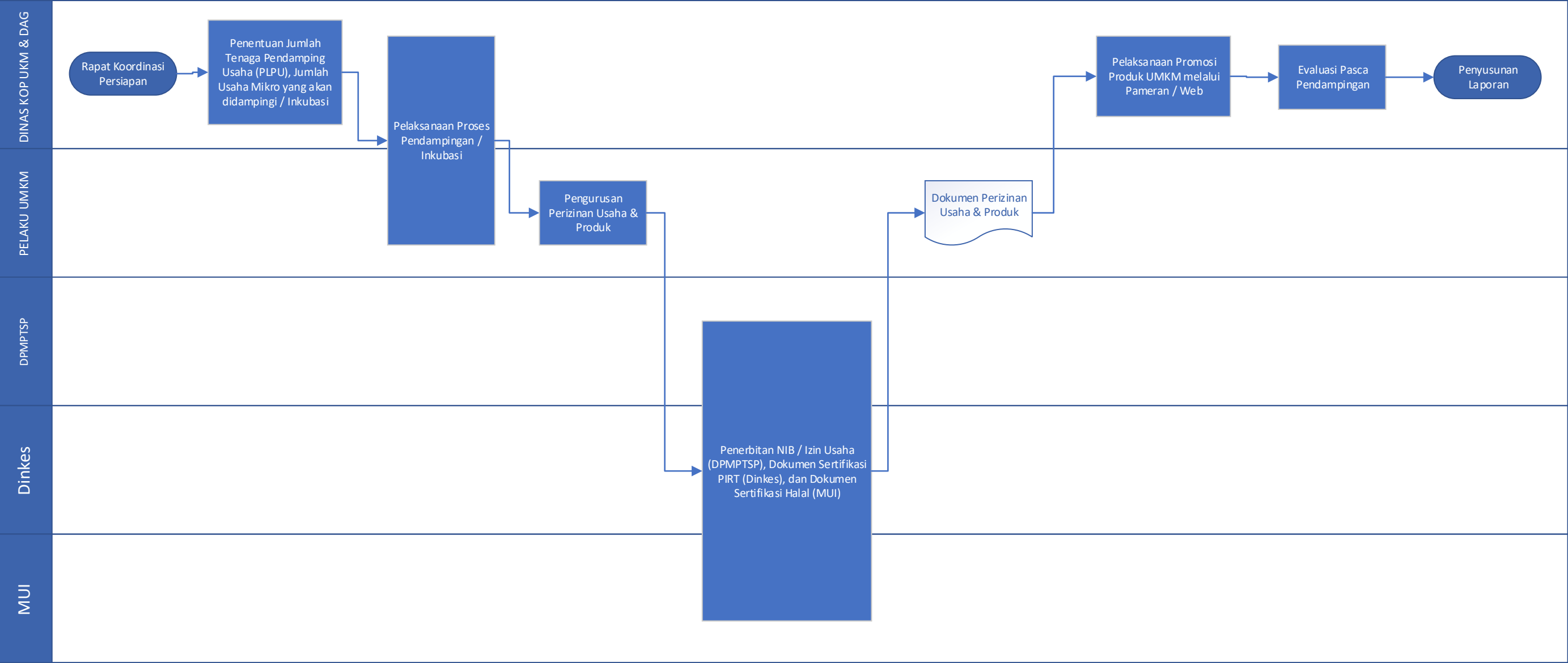
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

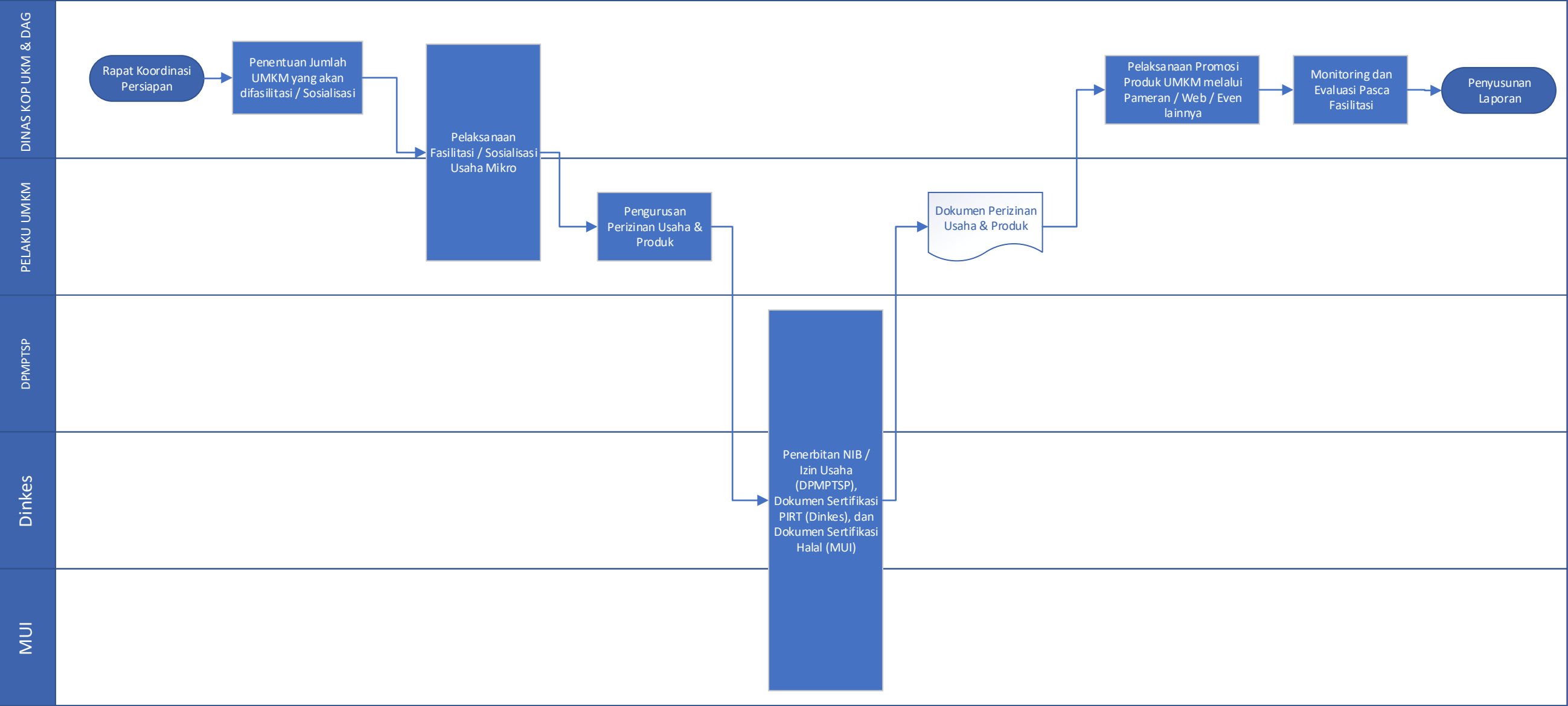


SLW-03.5 CFM 04

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

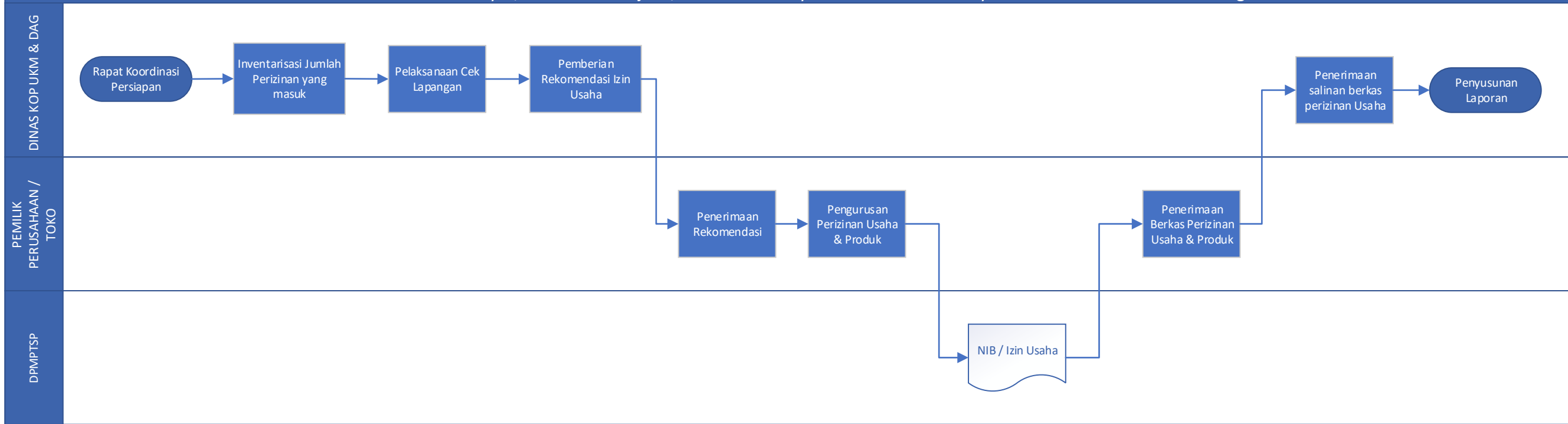






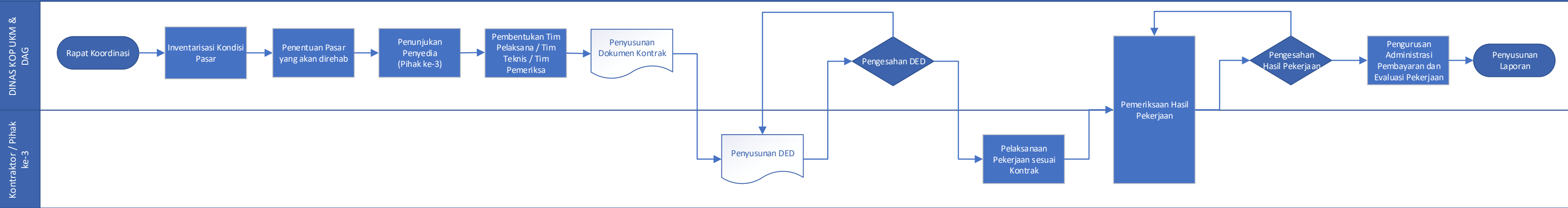
SLW-03.5 CFM 07

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



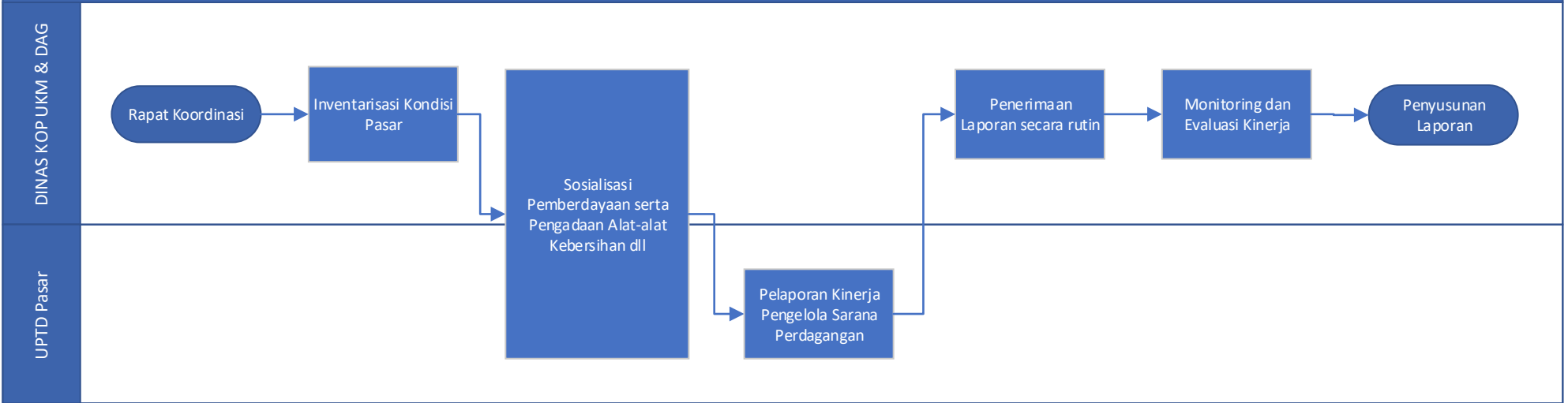
SLW-03.5 CFM 08

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan



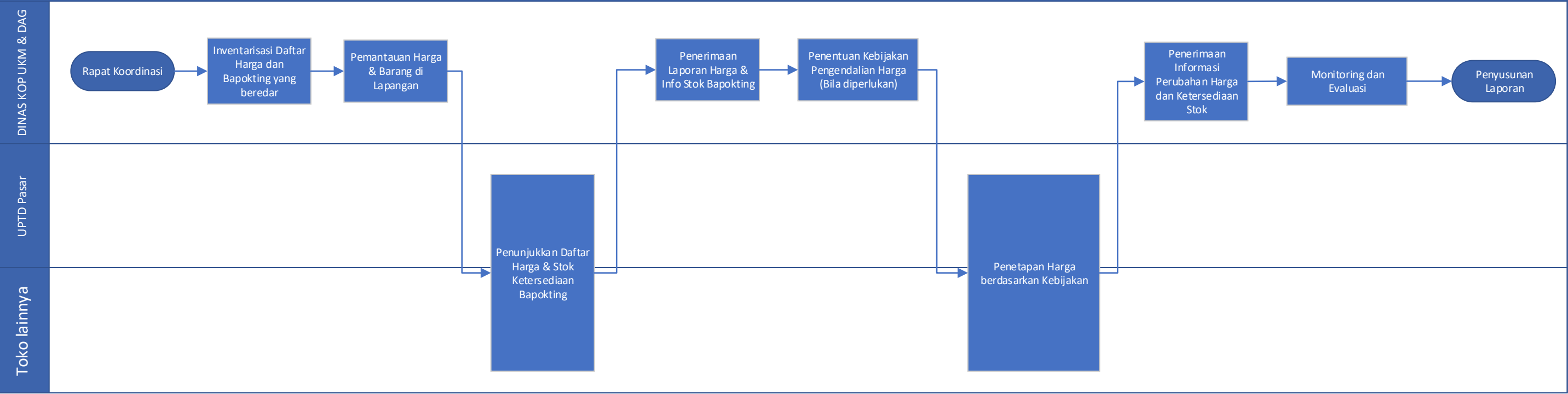
SLW-03.5 CFM 09

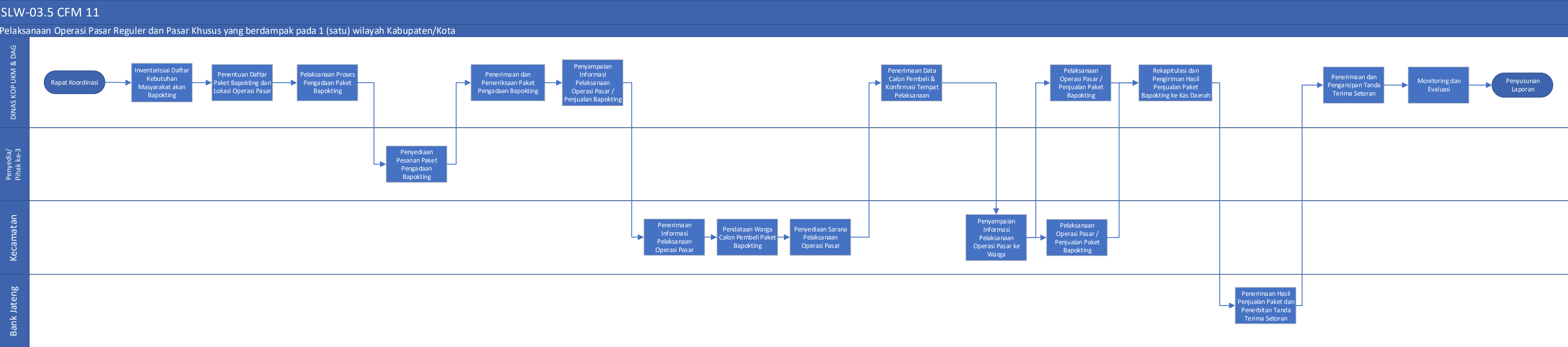
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



SLW-03.5 CFM 10

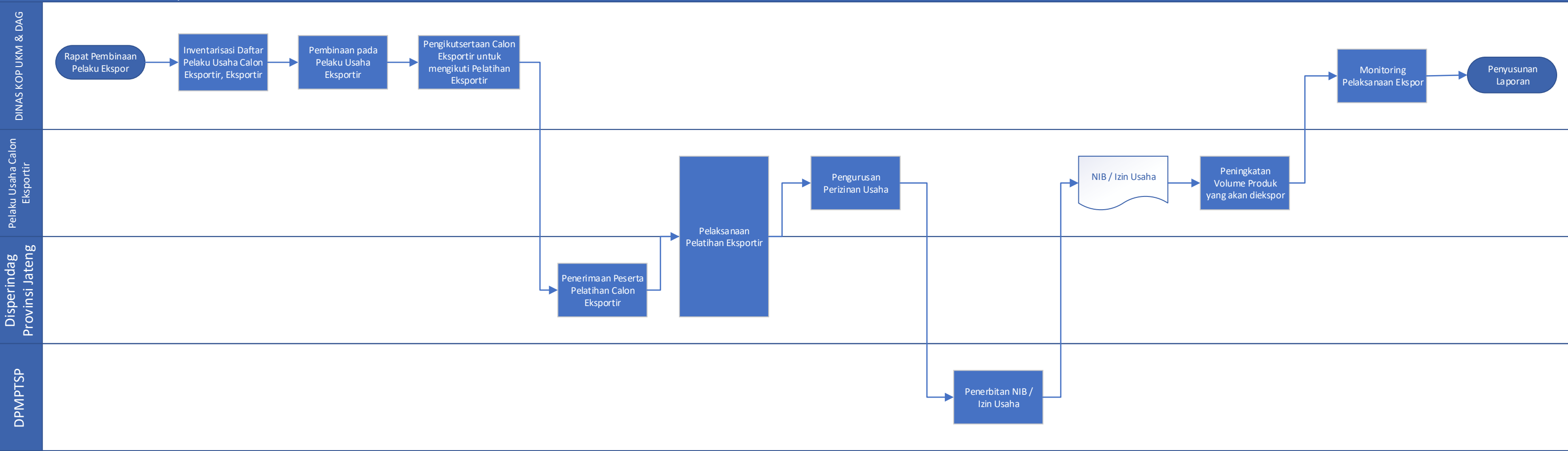
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan





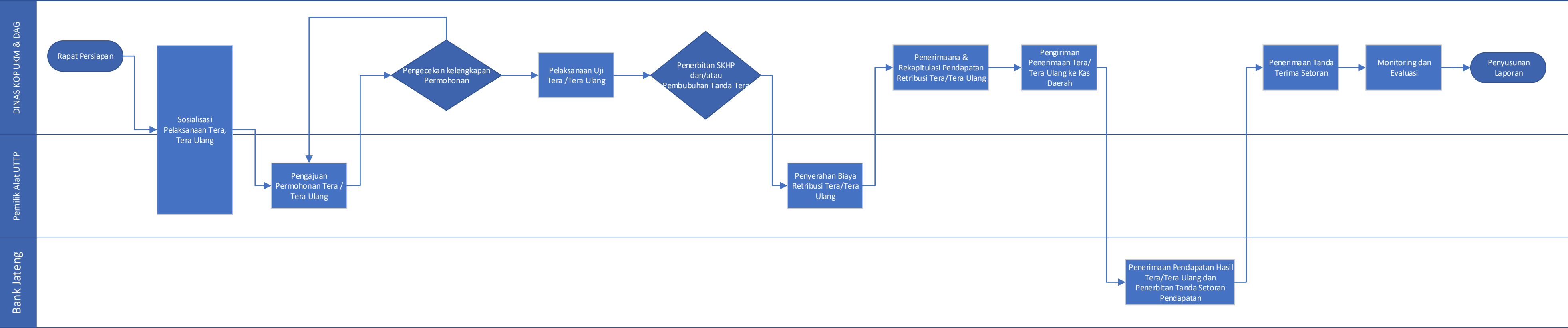
SLW-03.5 CFM 12

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor



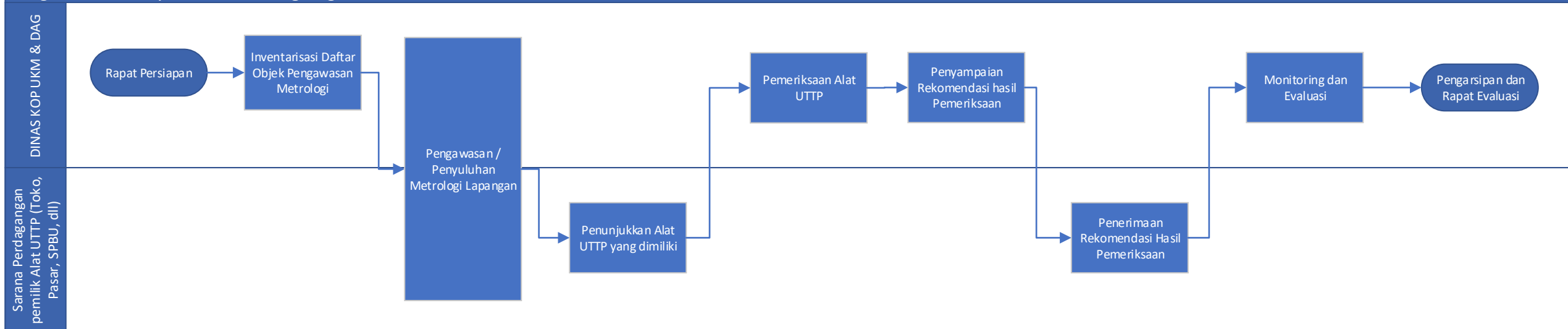
SLW-03.5 CFM 13

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang

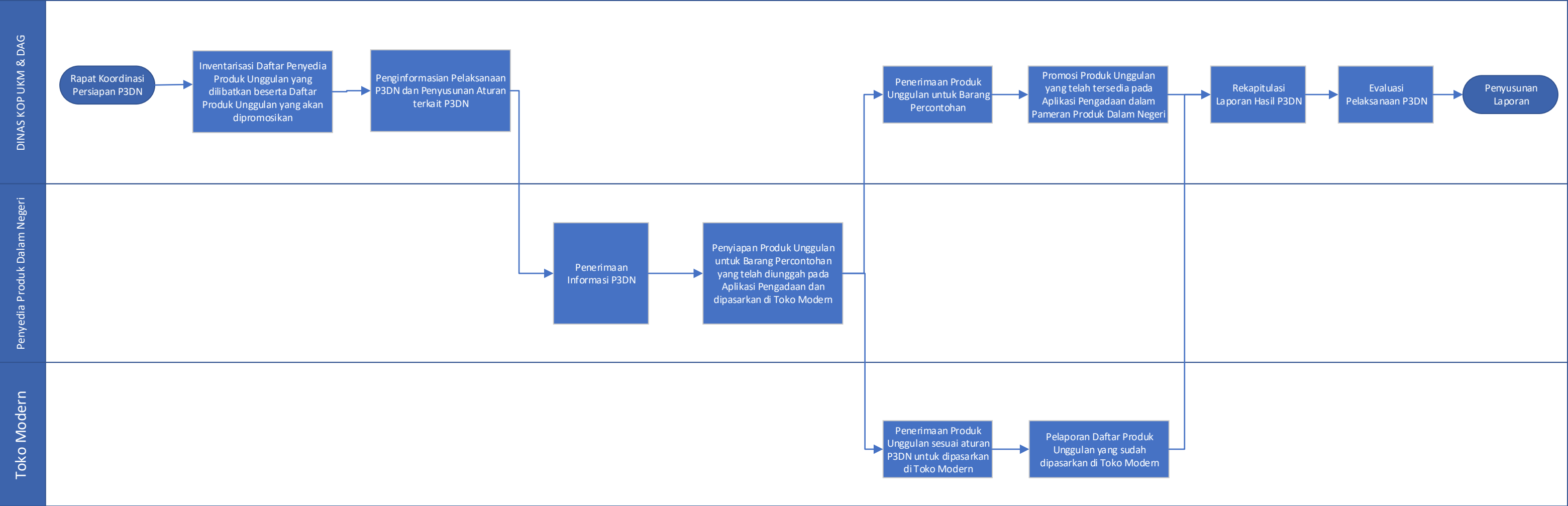


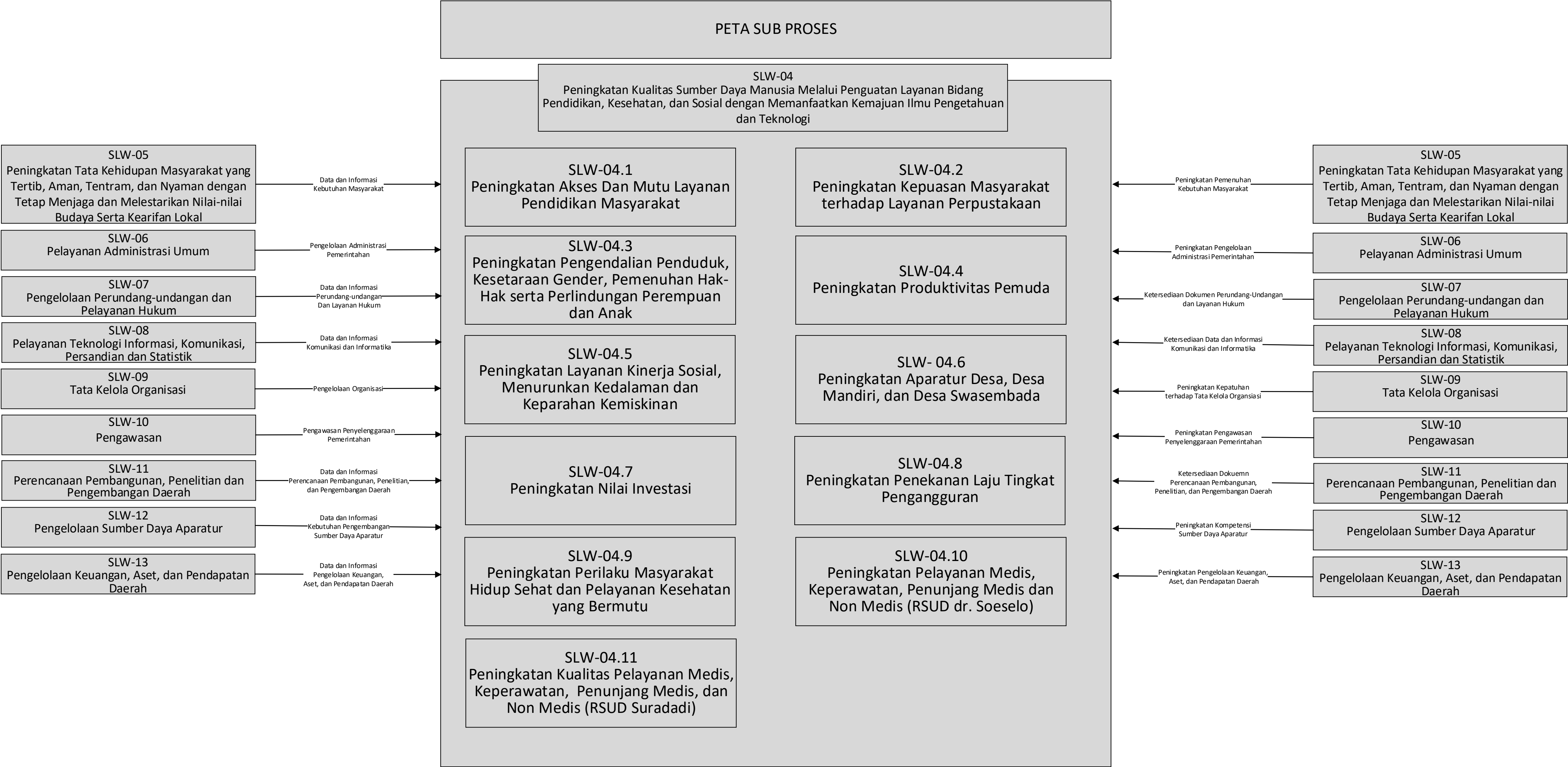
SLW-03.5 CFM 14

Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal



Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)





PETA RELASI

SLW-04.1

Peningkatan Akses Dan Mutu Layanan Pendidikan Masyarakat

DINAS DIKBUD

BPKAD

BAPPEDALITBANG

BKPSDM

DINAS PUPR

DINAS DUKCAPIL

DINAS KOMINFO

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUKUM

BAGIAN PBJ

INSPEKTORAT

BAPENDA

DINAS KESEHATAN

DINAS SOSIAL

DINAS LH

SEKRETARIAT DPRD

DINAS P3AP2 DAN KB

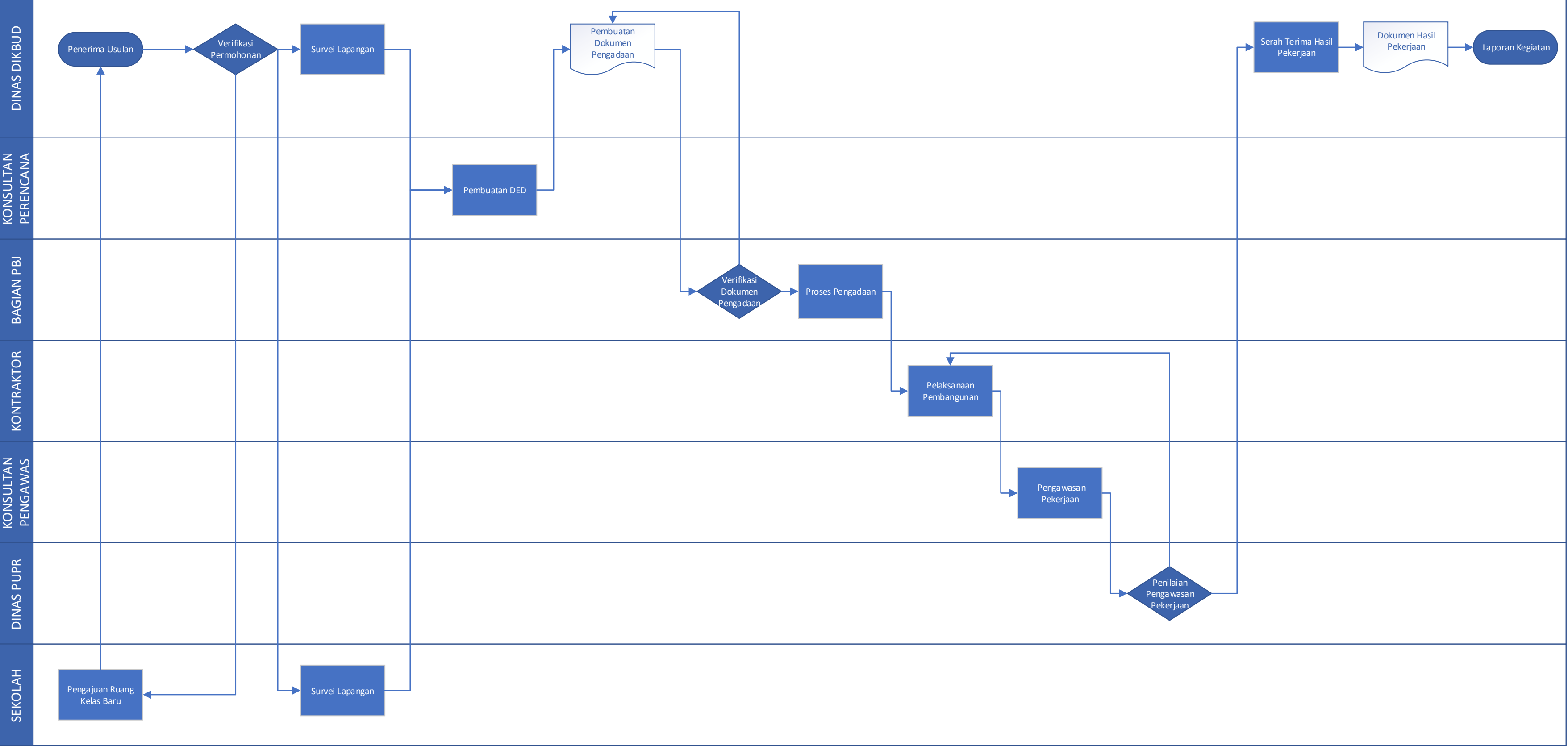
DINAS PMPTSP

DINAS PORAPAR

DINAS PERHUBUNGAN

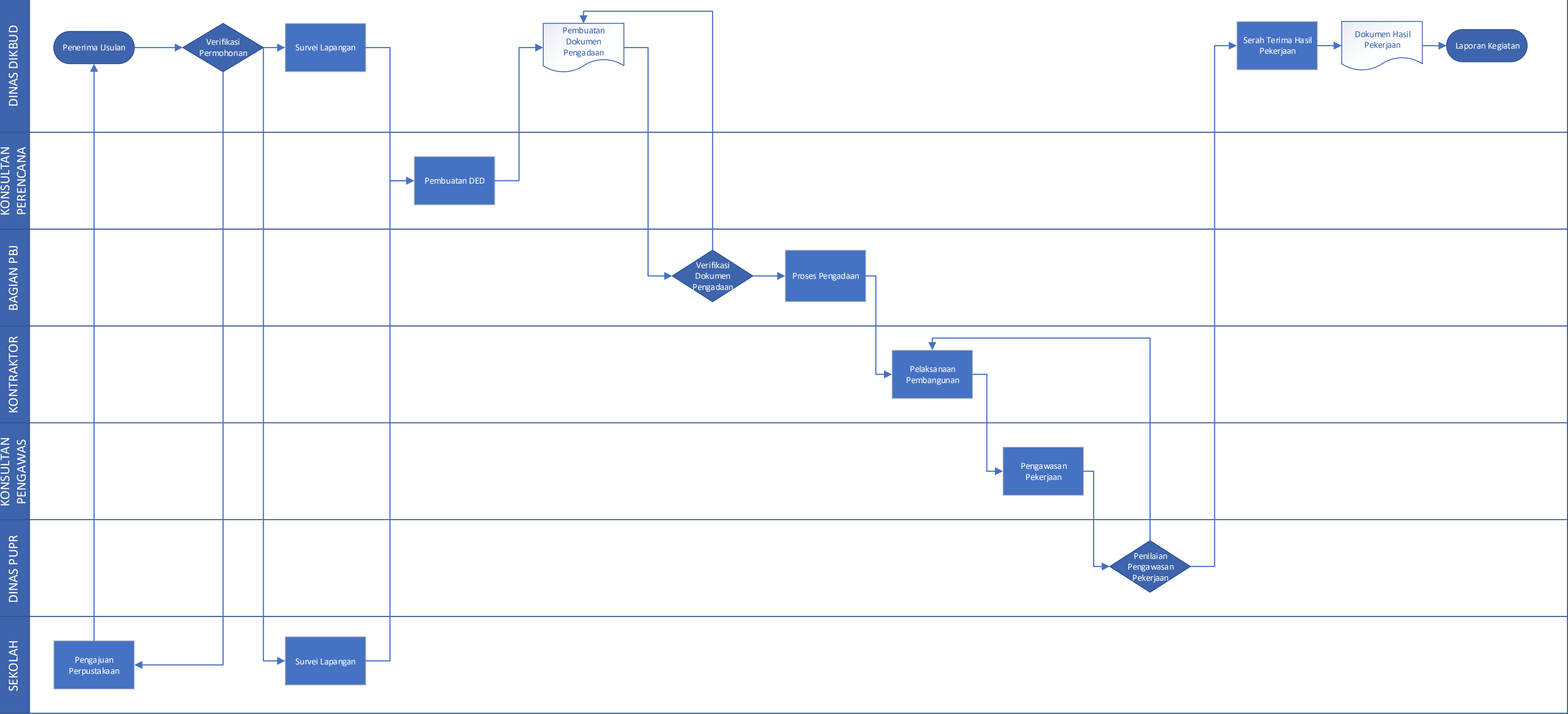
SLW-04.1 CFM 01

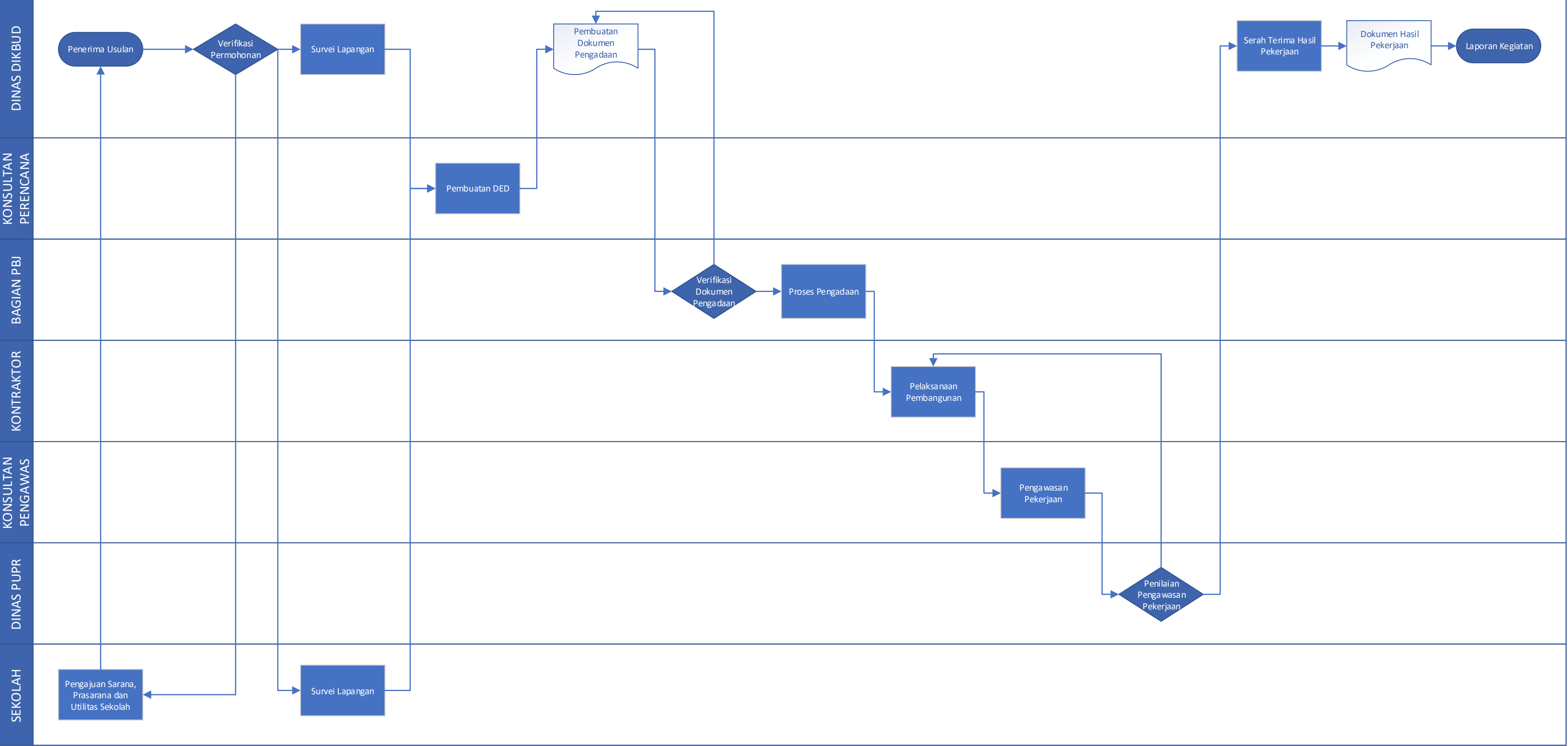
Penambahan Ruang Kelas Baru (SD)

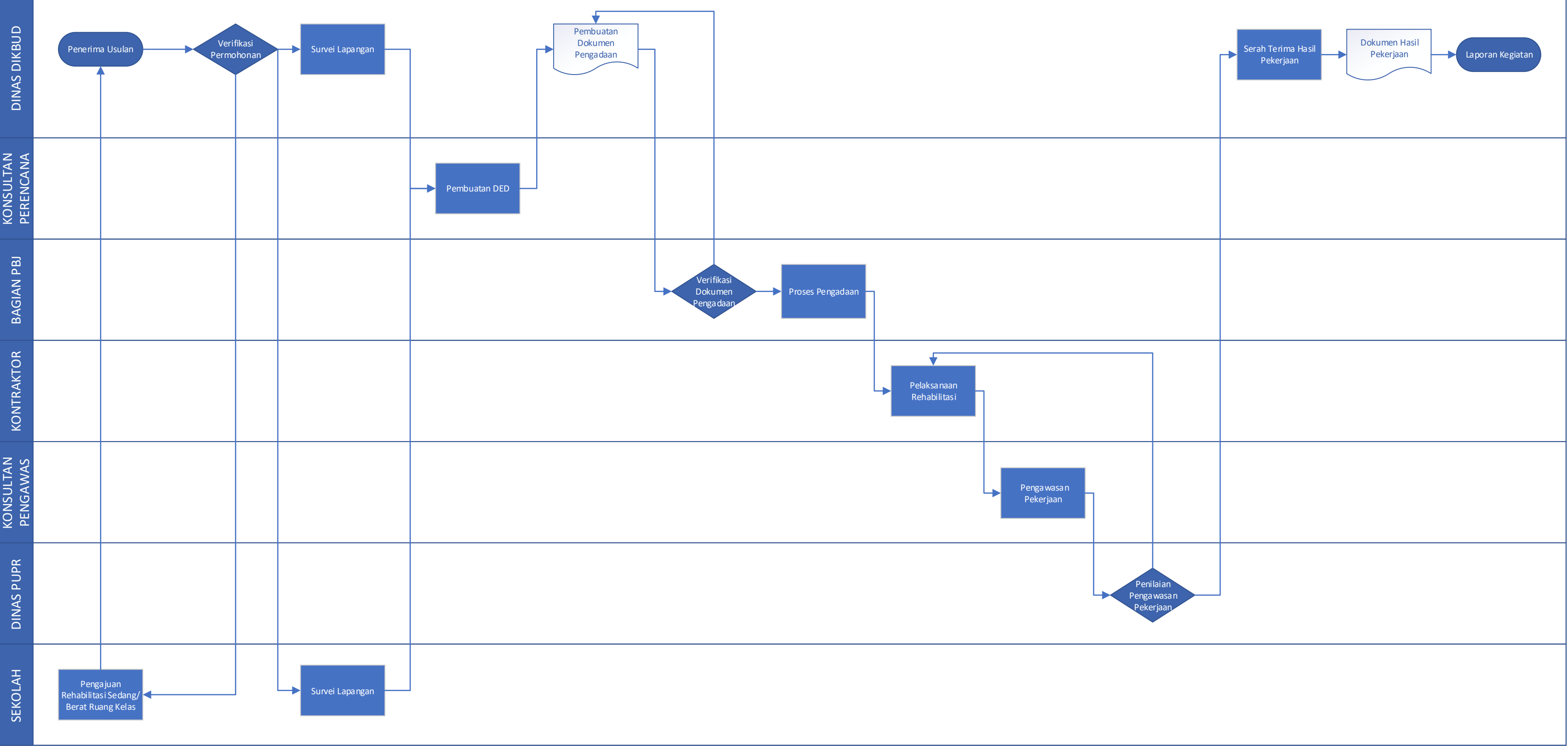


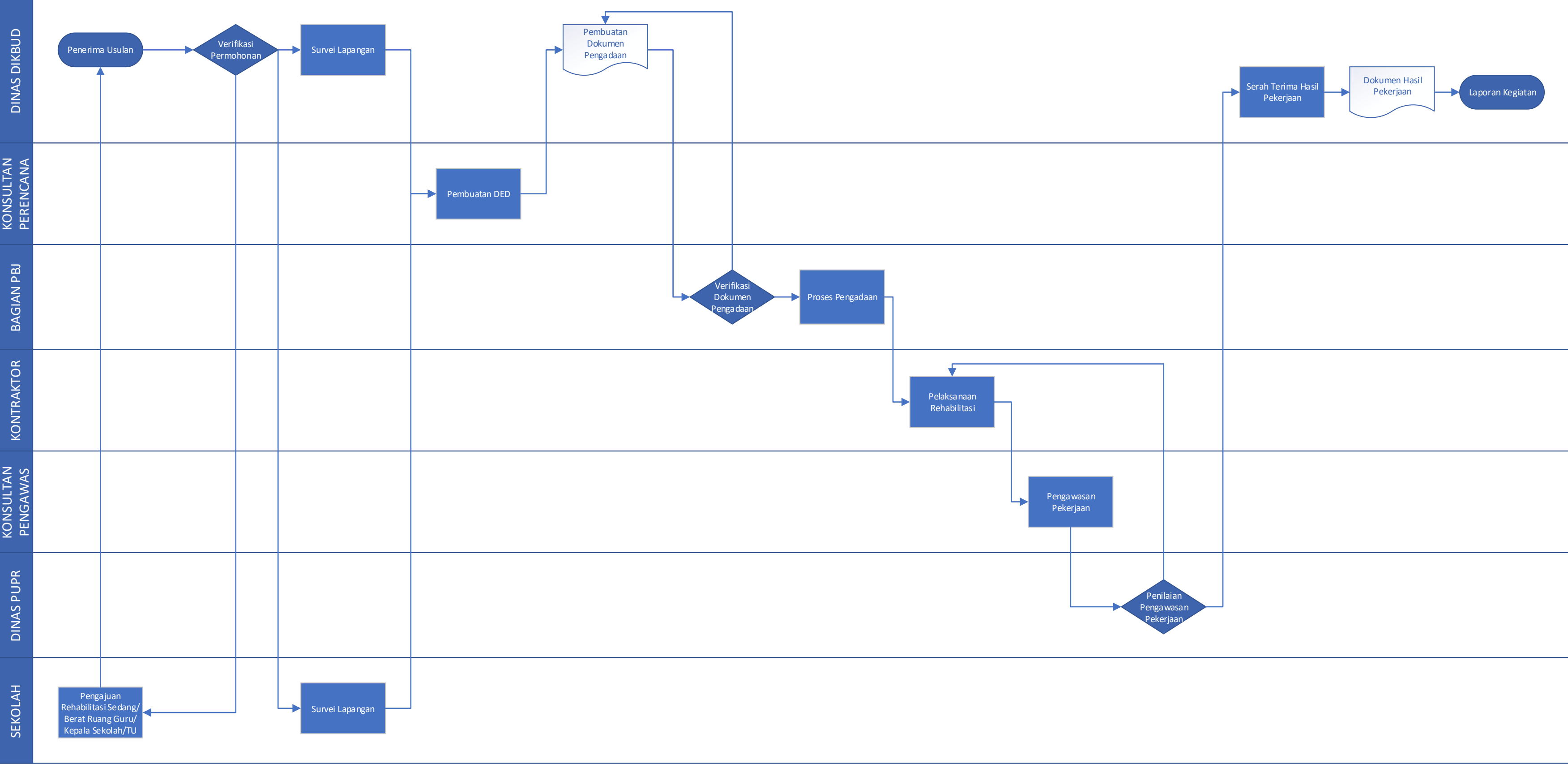
SLW-04.1 CFM 02

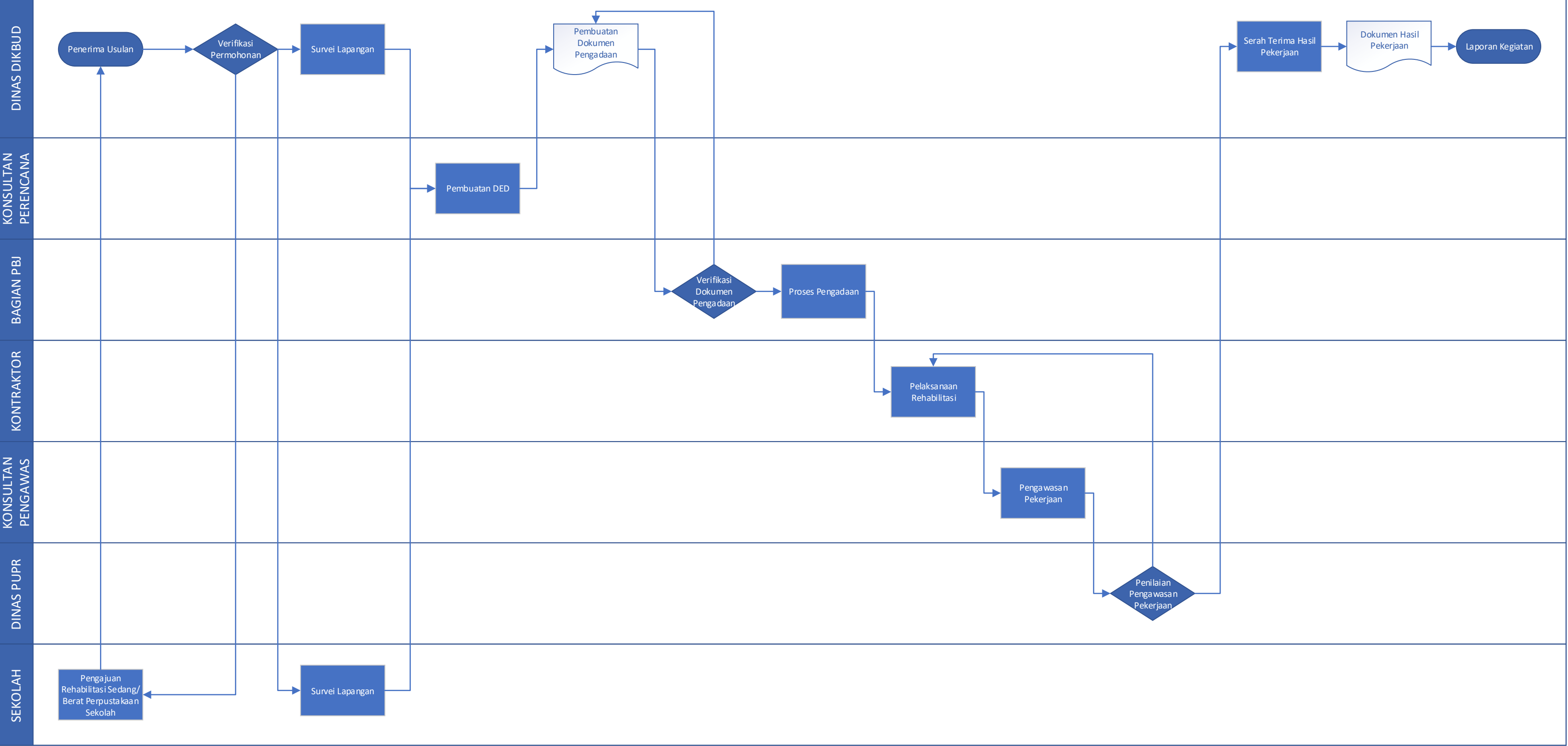
Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)

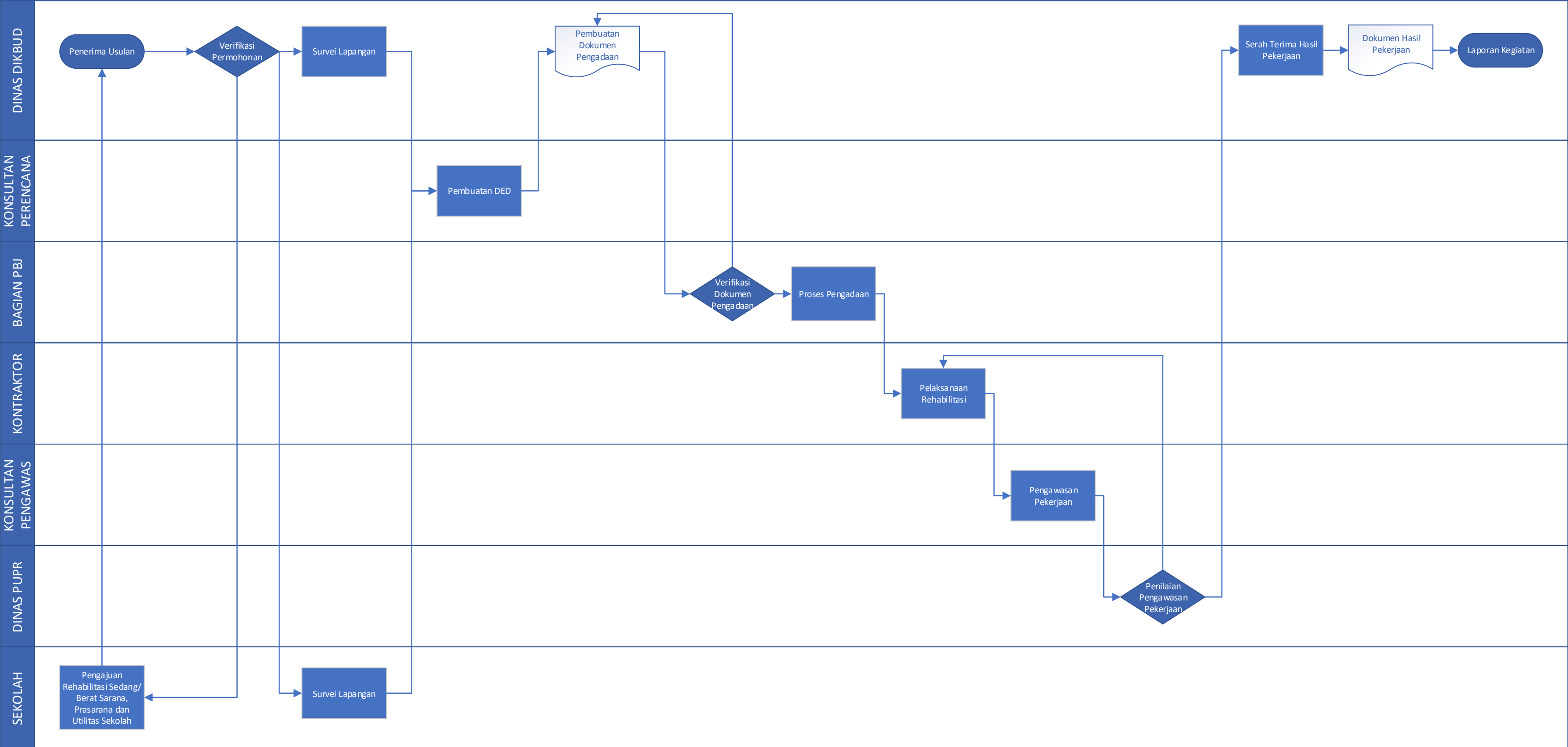






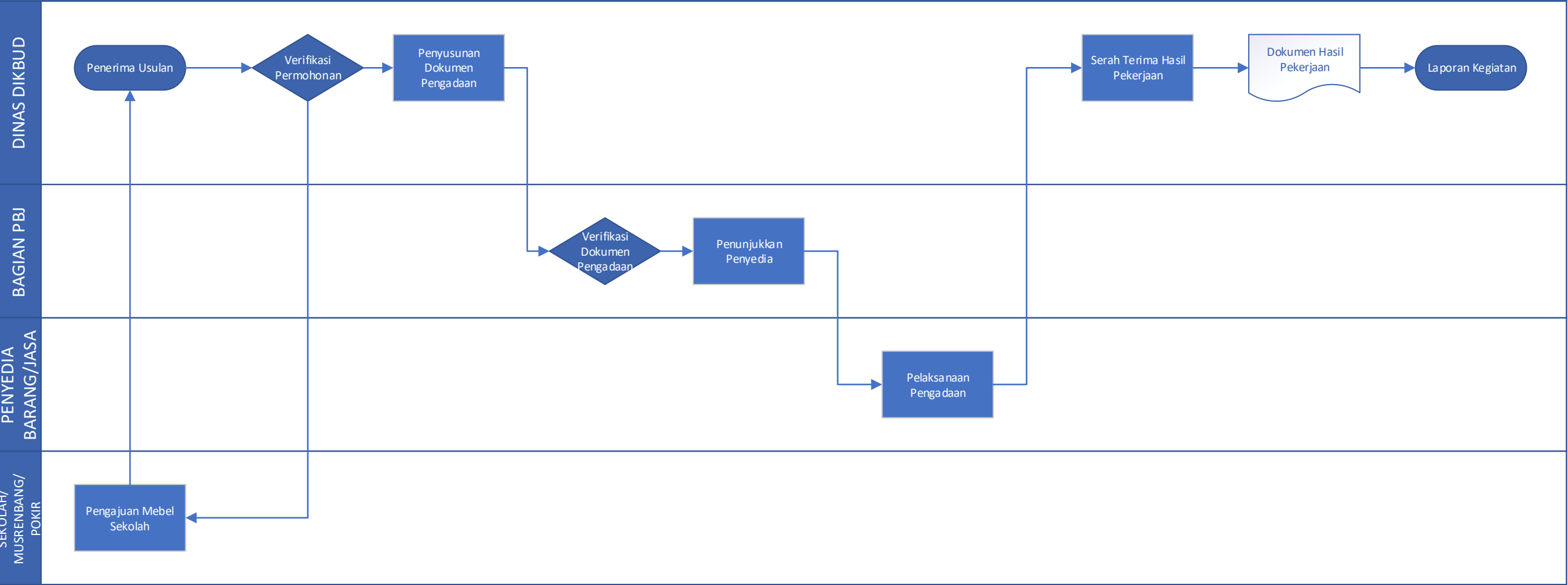




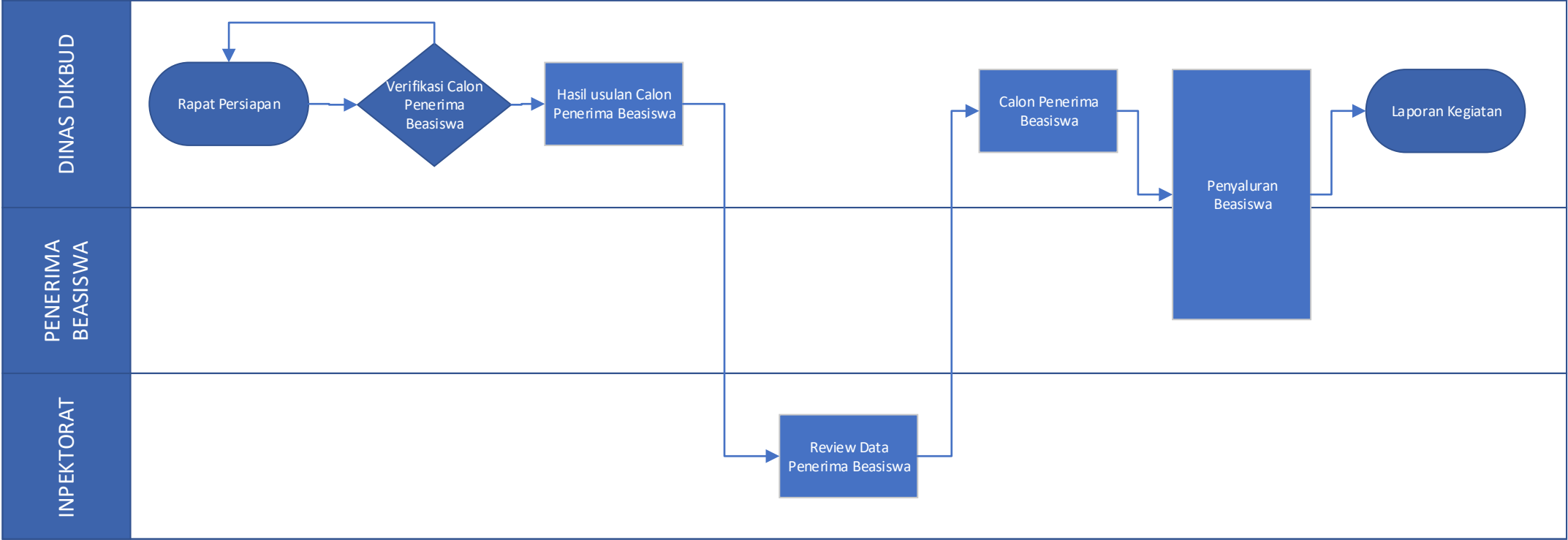


SLW-04.1 CFM 08

Pengadaan Mebel Sekolah (SD)



Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar



Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SD)

DINAS DIKBUD

Rapat Persiapan

Penyusunan List
Barang untuk Proses
PemesananPemesanan Barang
di e-KatalogPenandatanganan
Surat PesananSurat Perintah
Pengiriman BarangPenyediaan Barang
yang di Pesan

Distribusi Barang

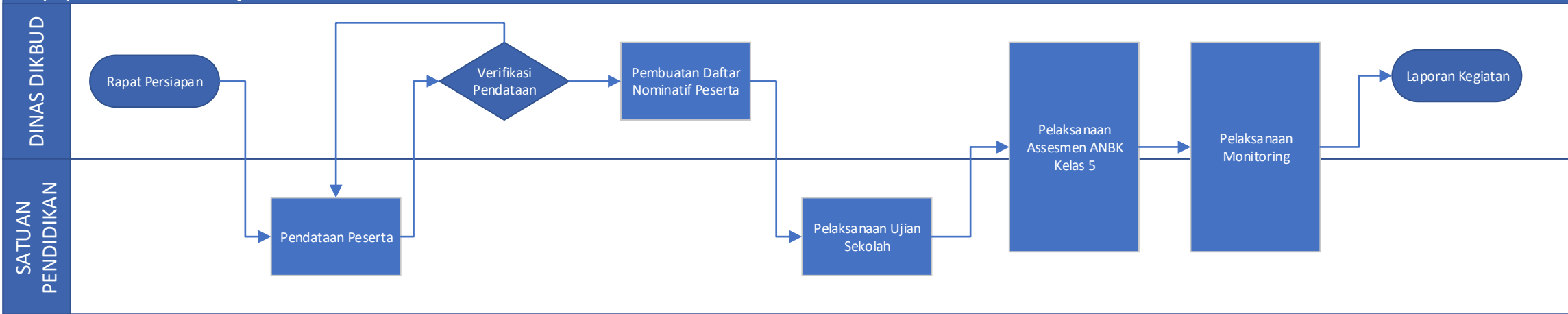
Berita Acara Serah
Terima Barang yang
di Pesan

Laporan Kegiatan

PIHAK KE 3

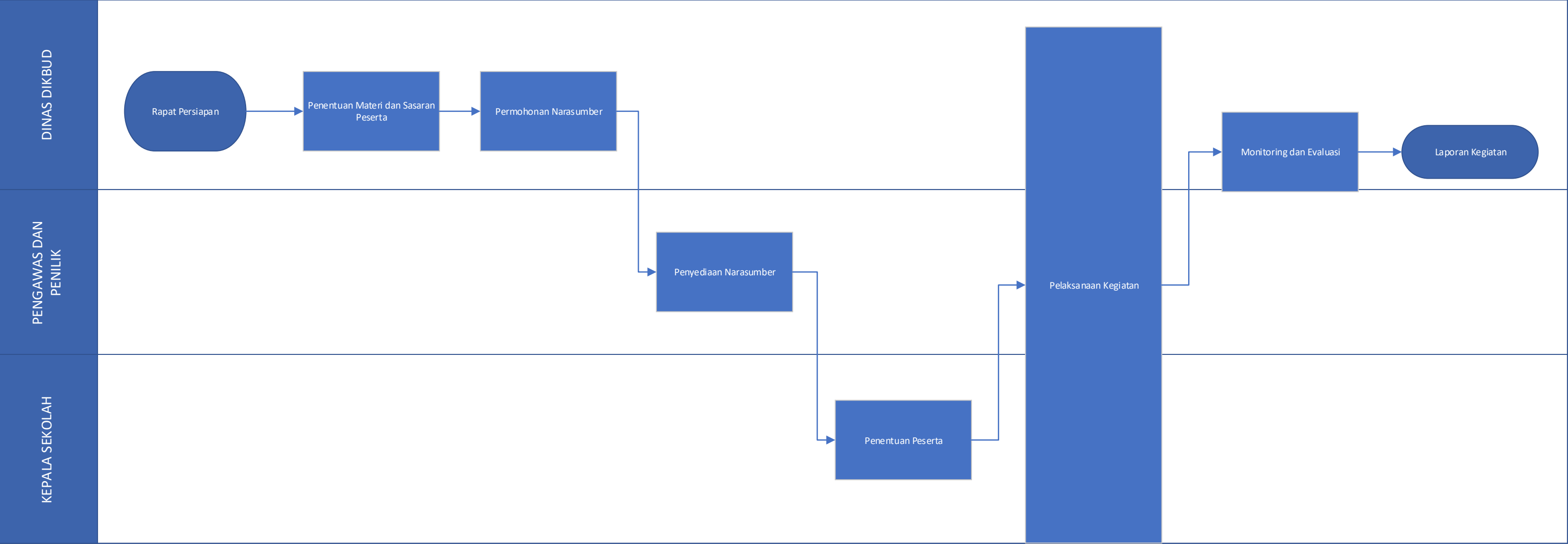
SLW-04.1 CFM 11

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

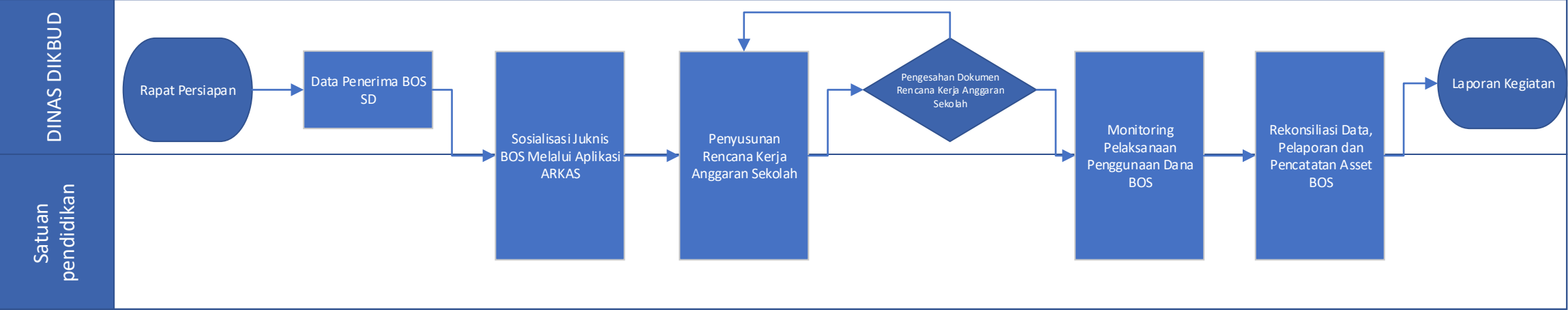


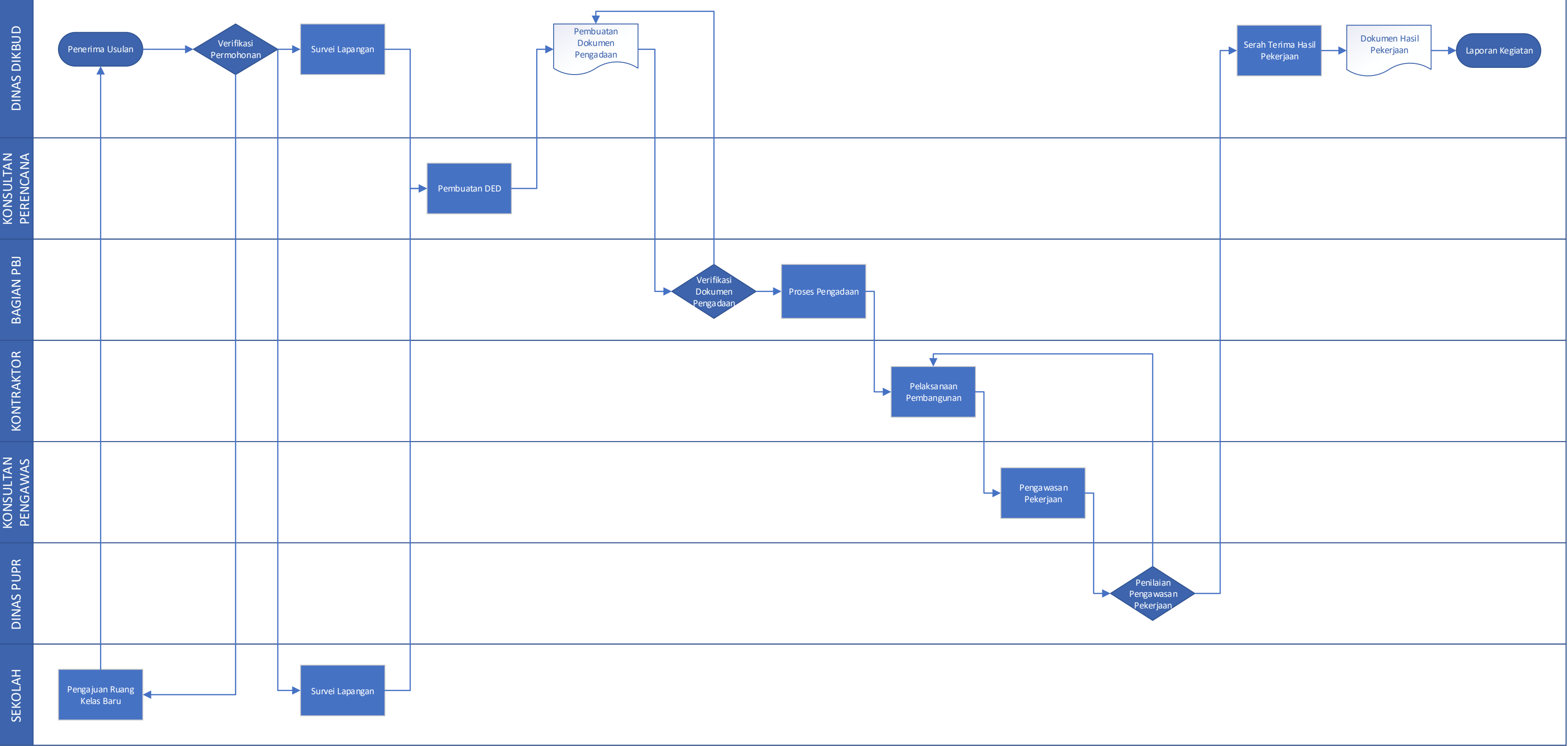
SLW 04.1 CFM 12

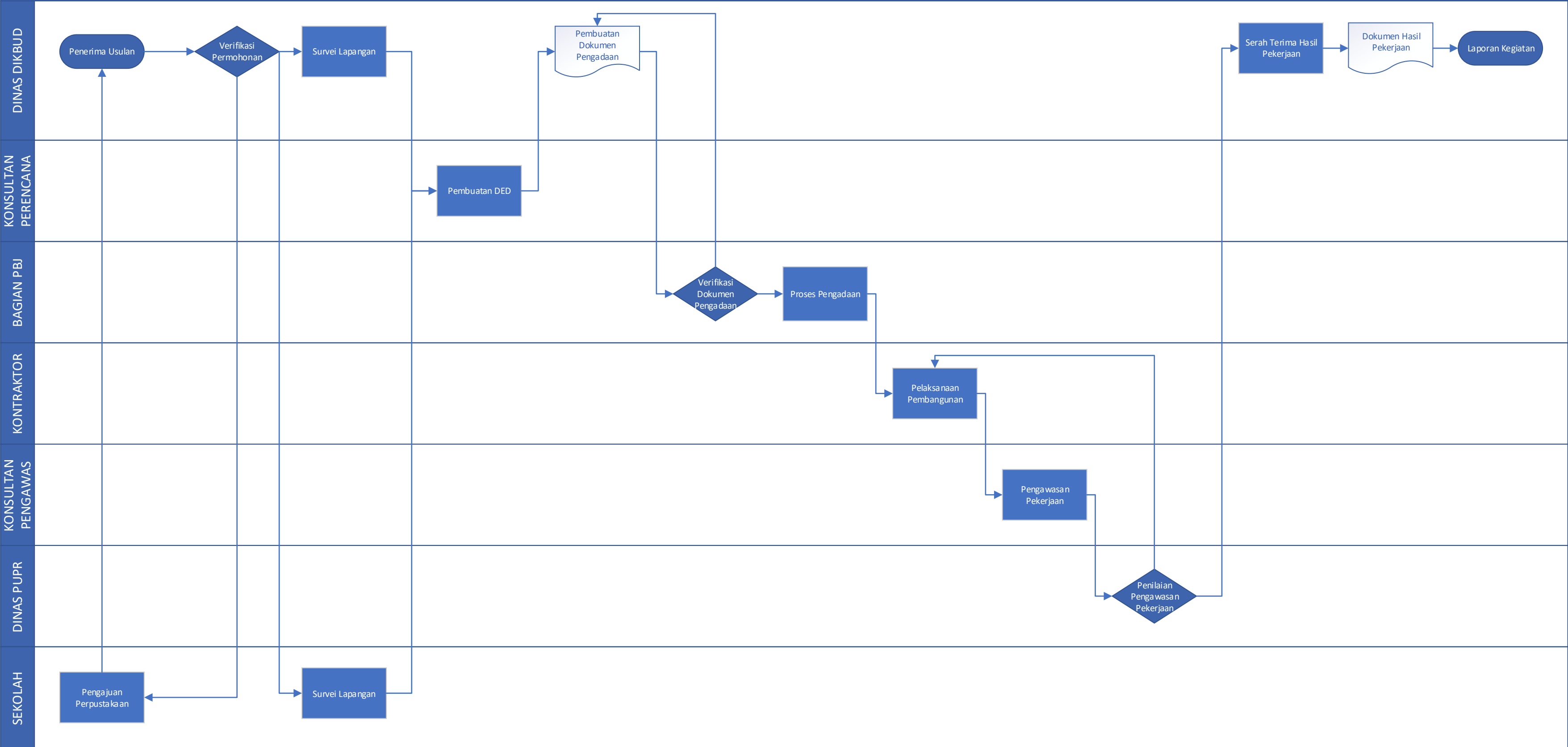
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)

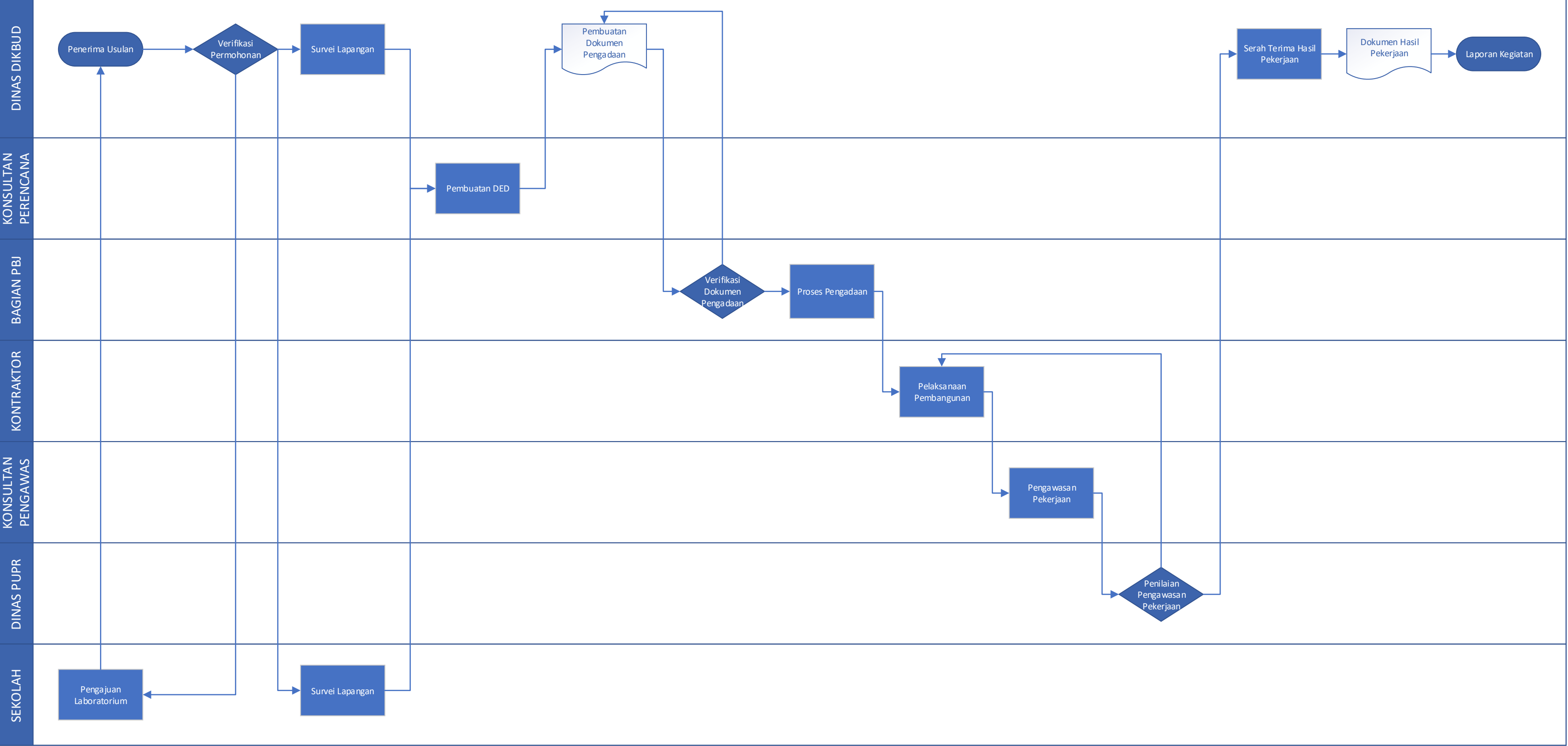


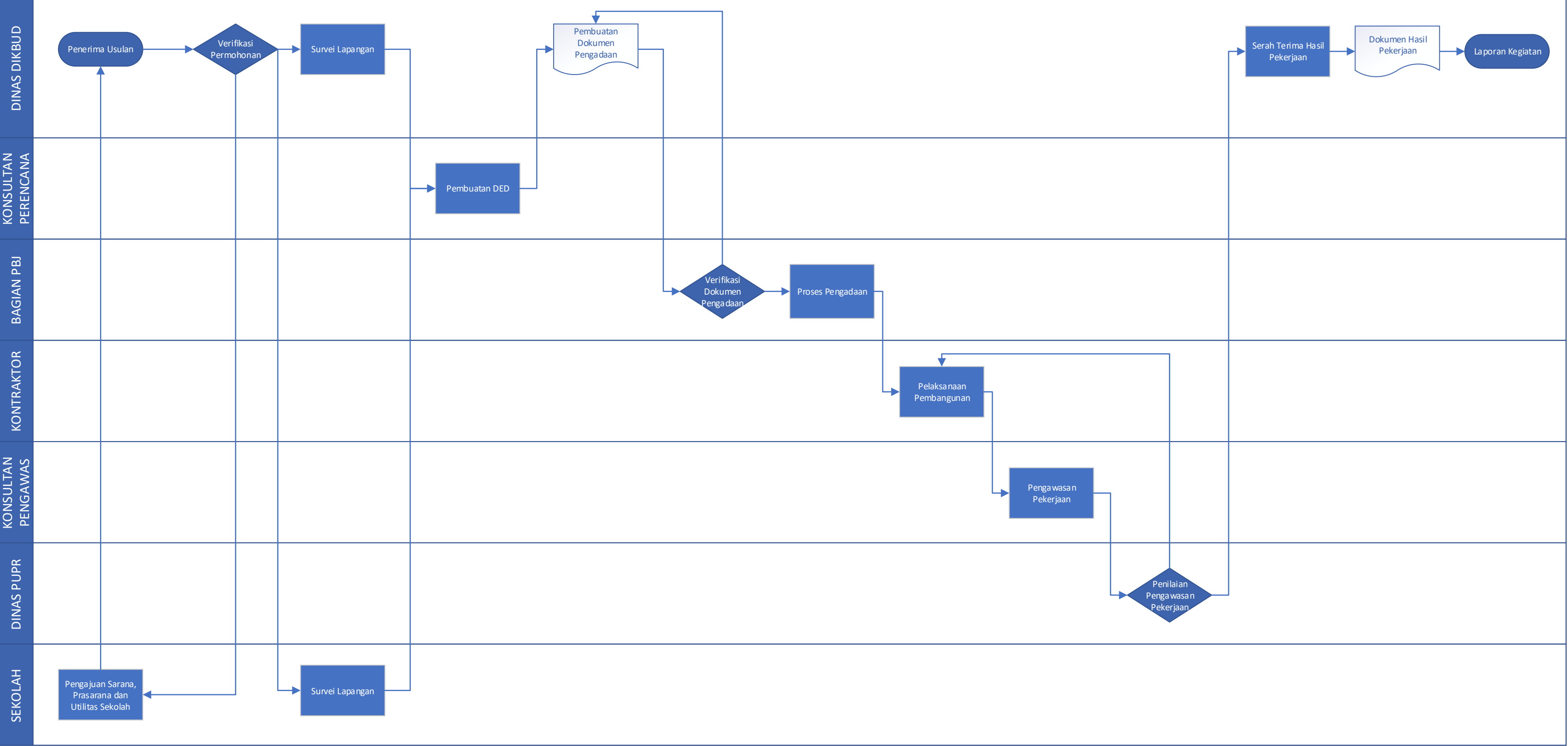
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

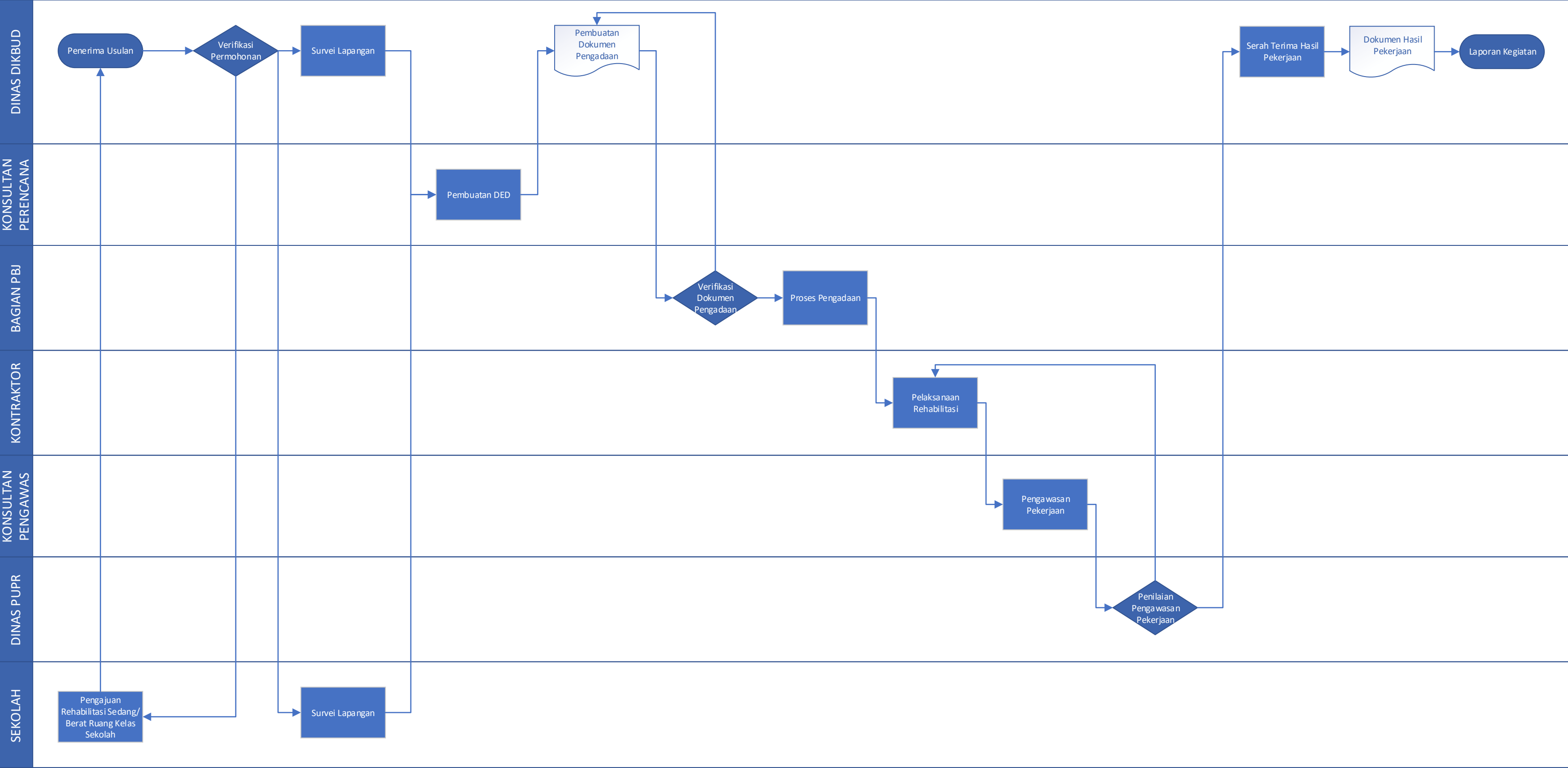


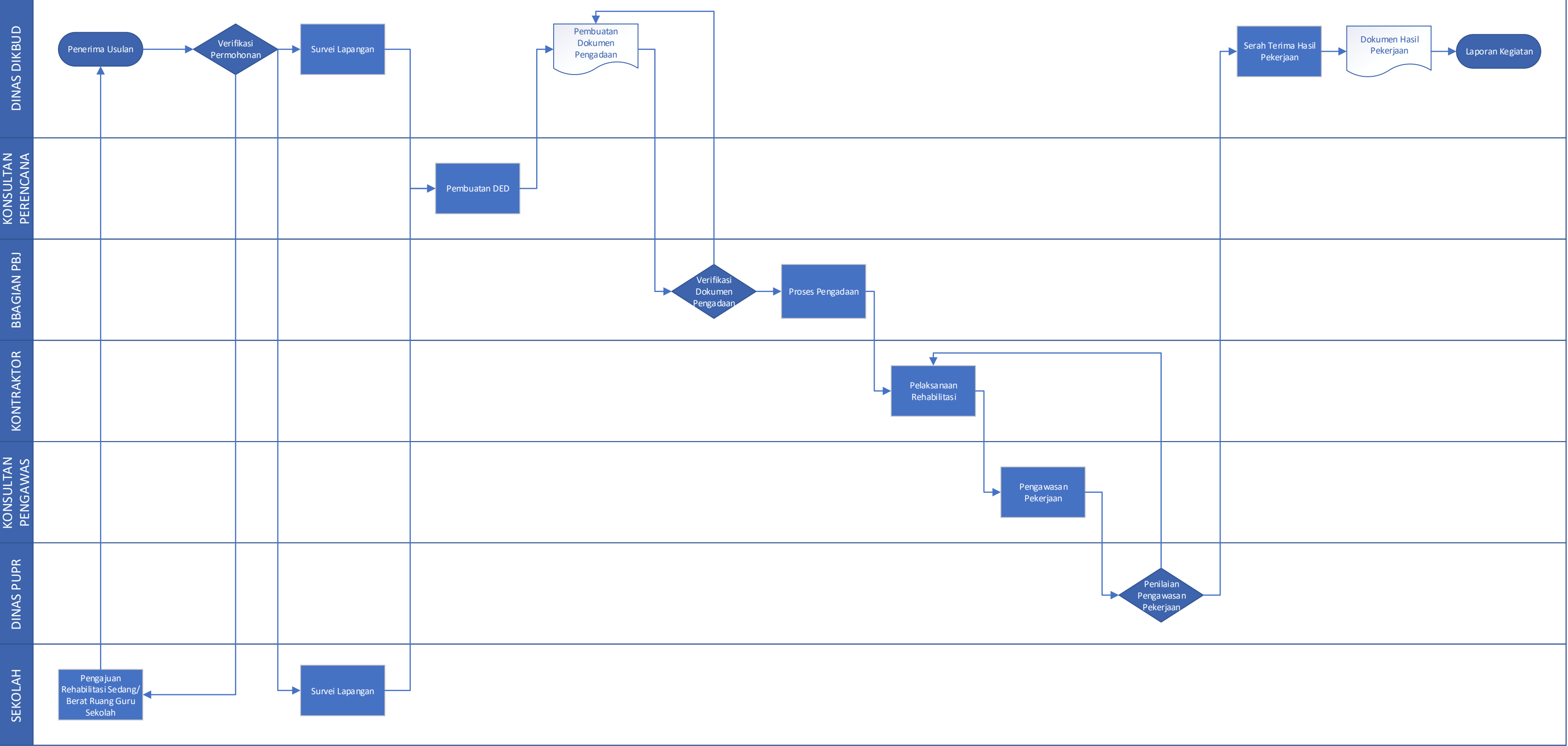


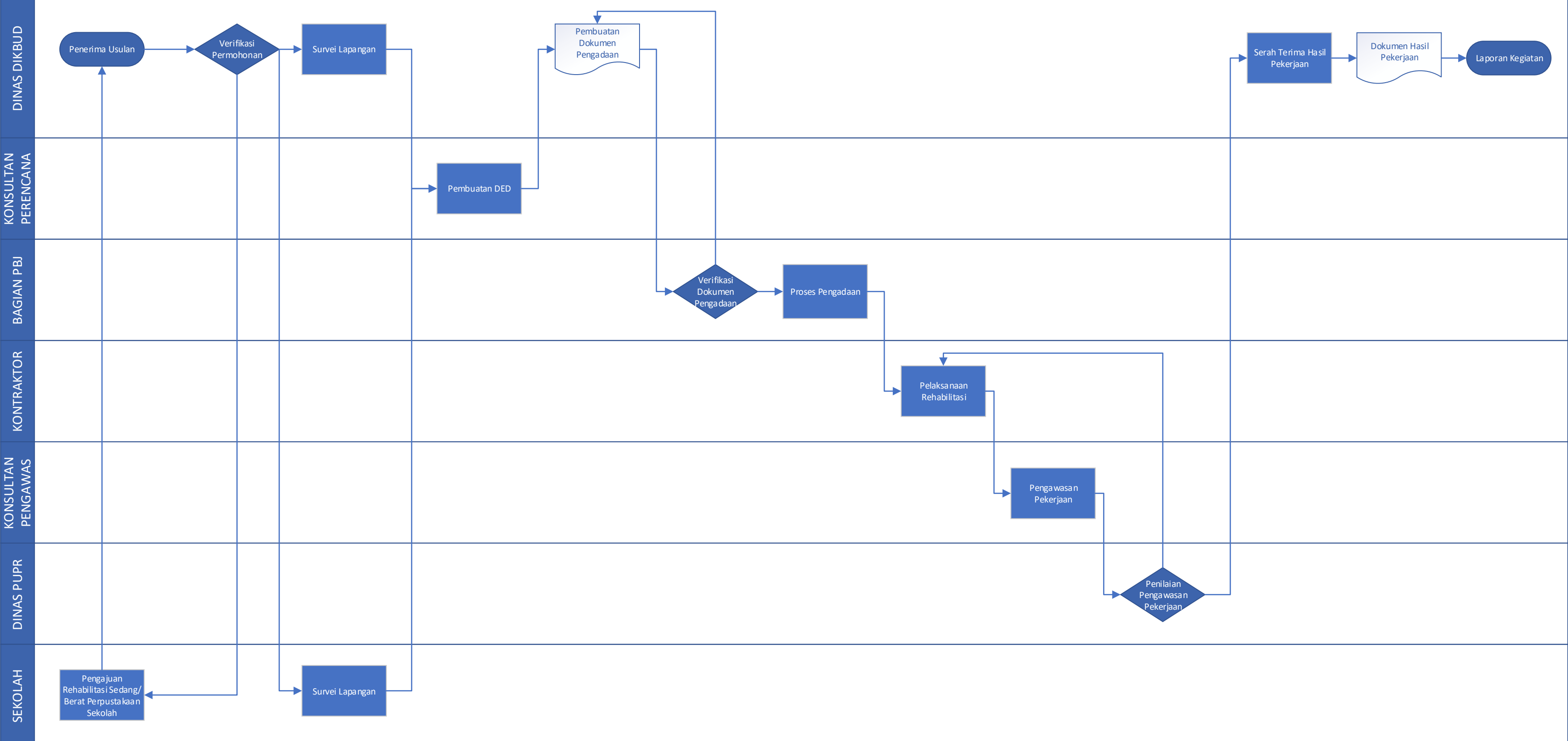


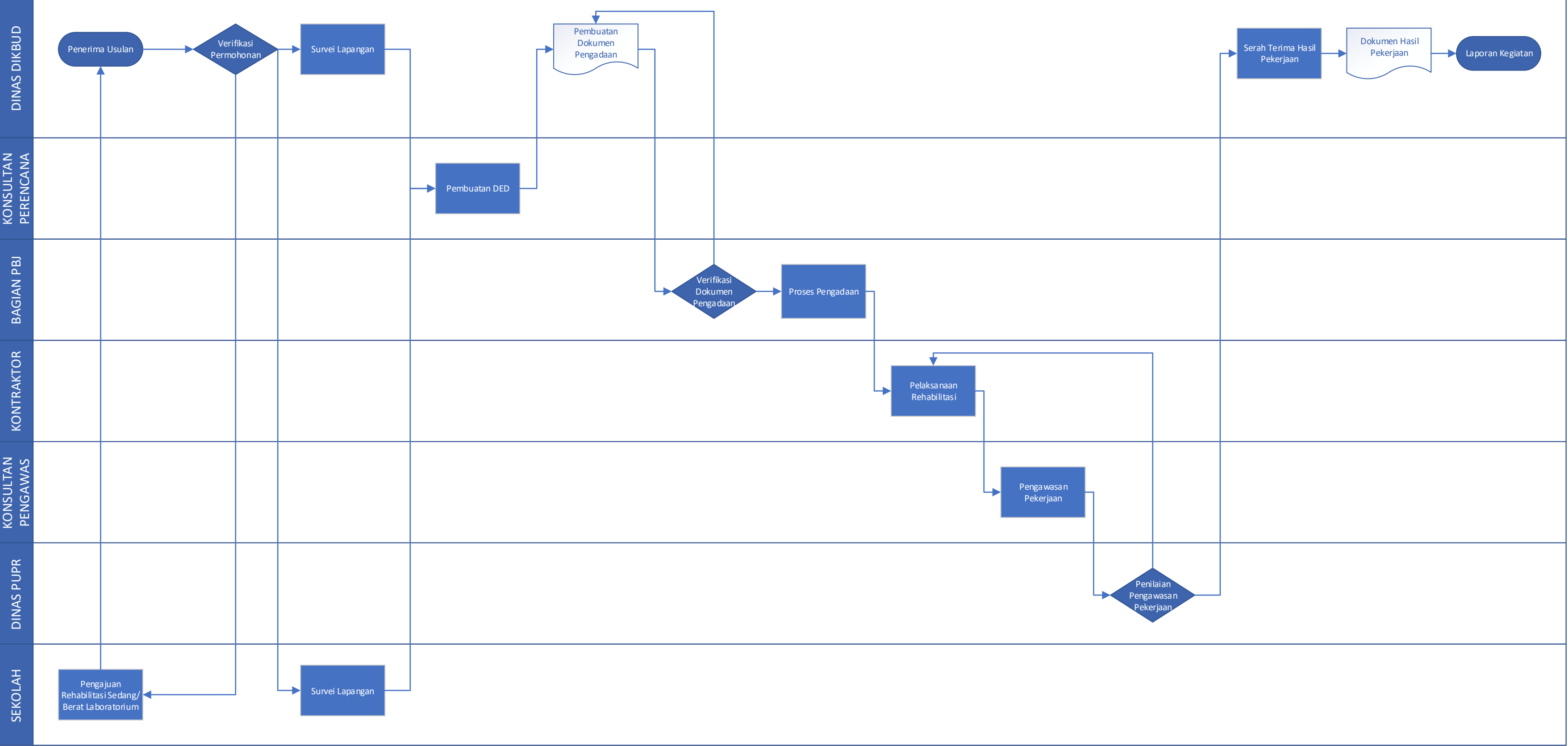


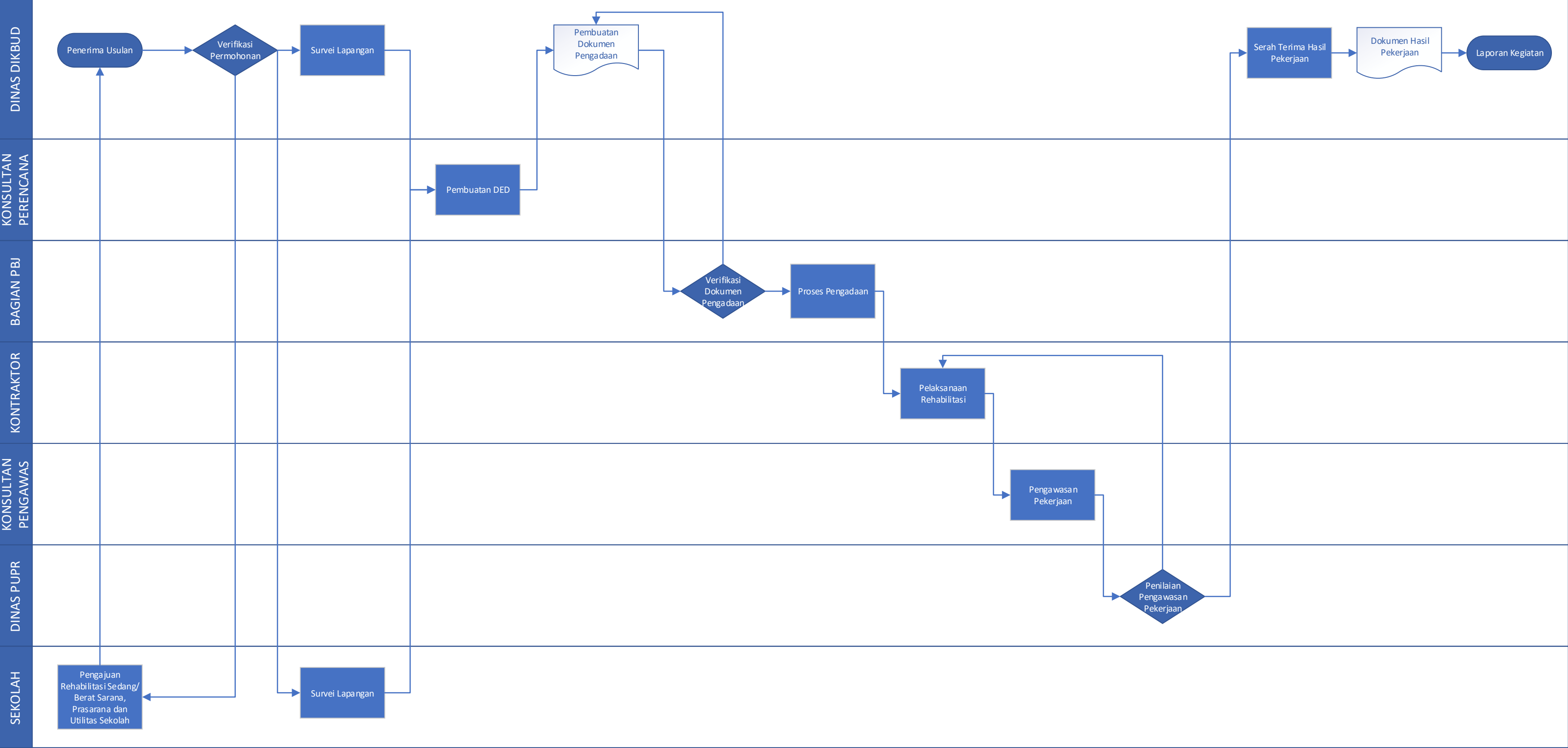




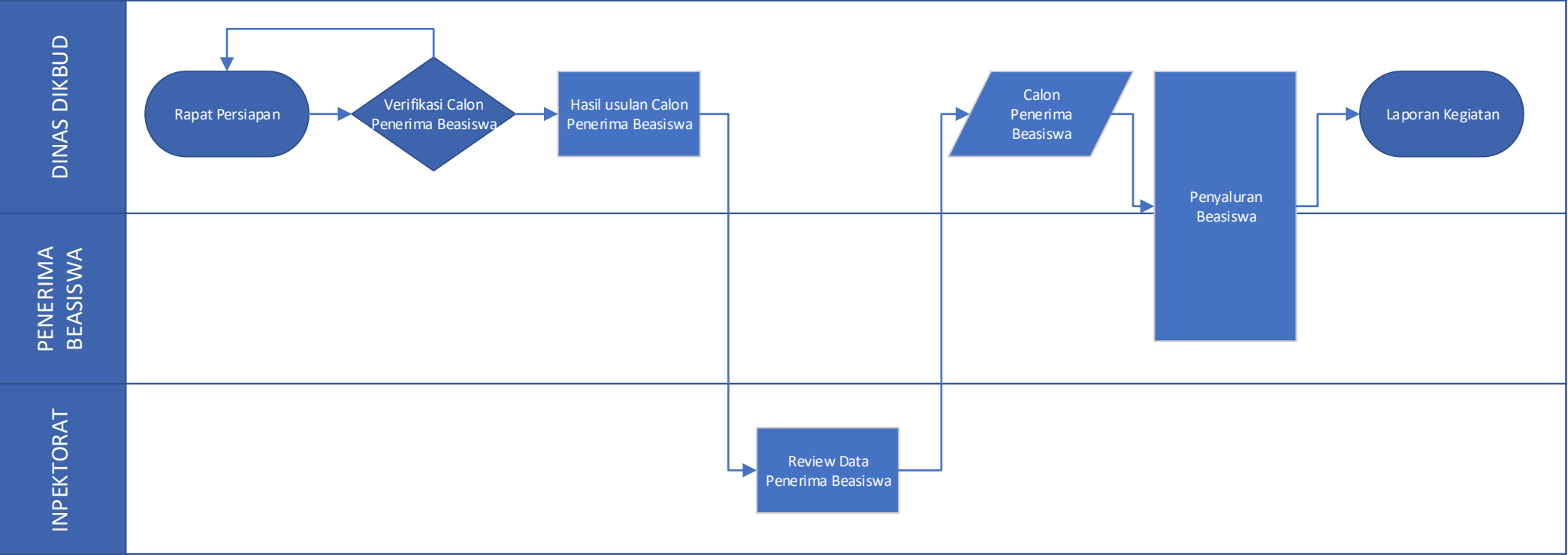








Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama



Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP)

DIKUD

Rapat Persiapan

Penyusunan List
Barang untuk Proses
PemesananPemesanan Barang
di e-KatalogPenandatanganan
Surat PesananSurat Perintah
Pengiriman BarangBerita Acara Serah
Terima Barang yang
di Pesan

Laporan Kegiatan

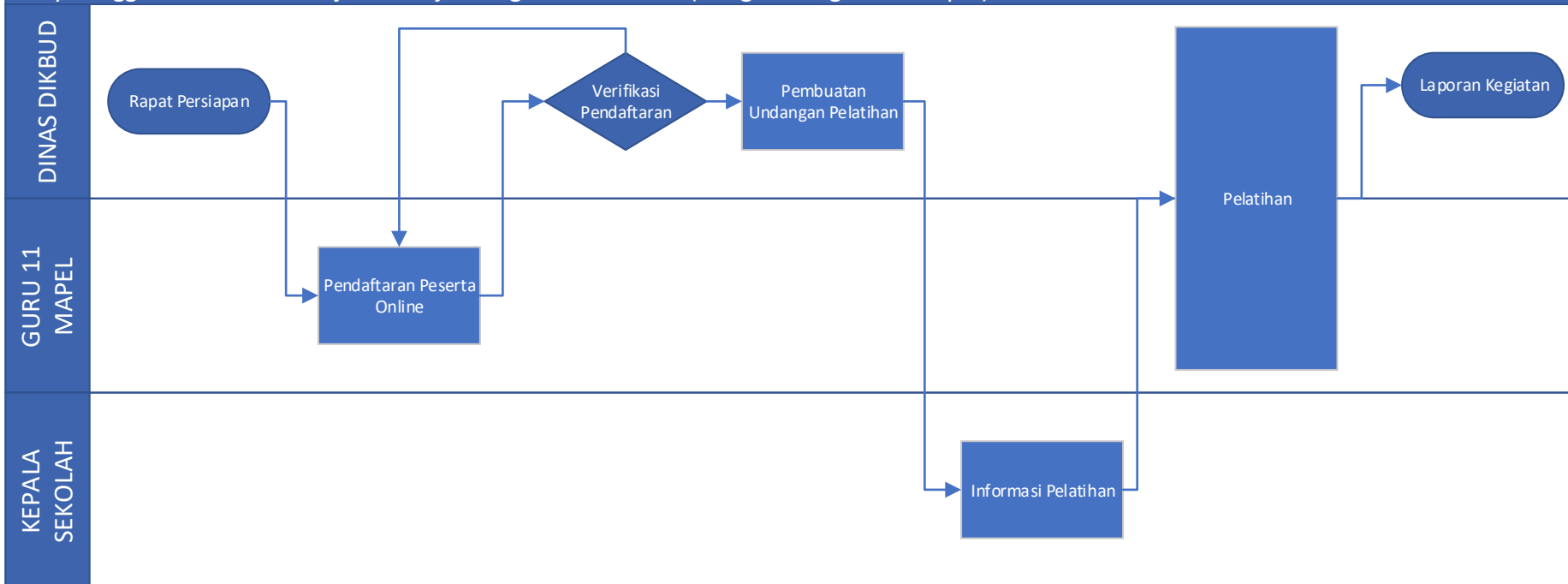
PIHAK KE 3

Penyediaan Barang
yang di Pesan

Distribusi Barang

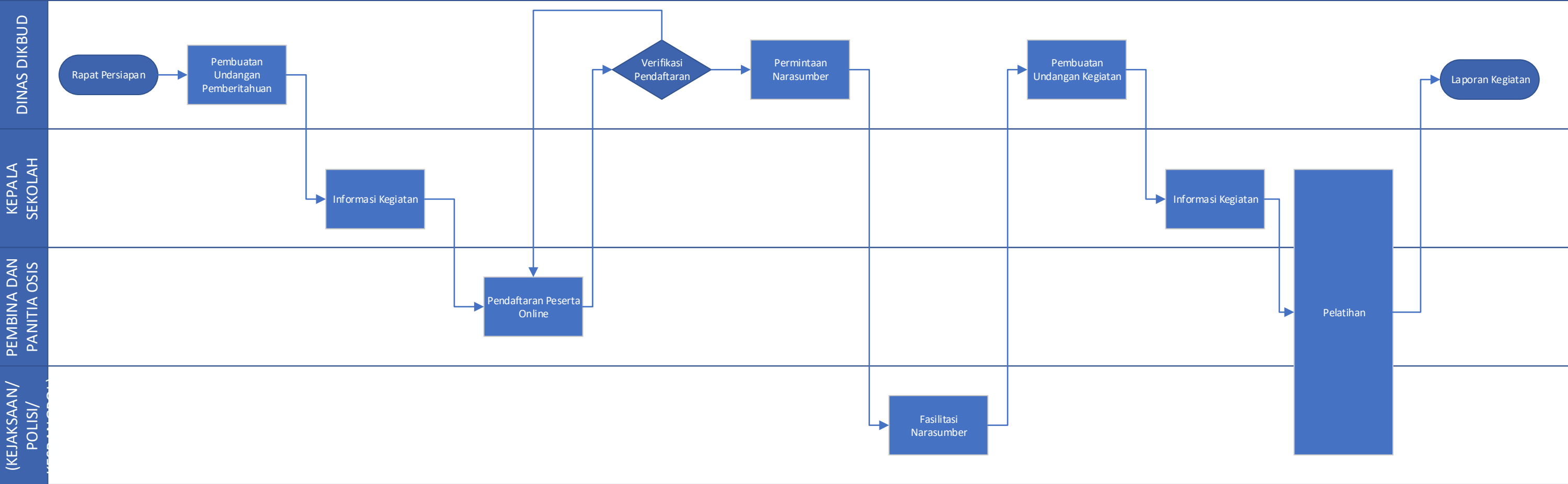
SLW-04.1 CFM 25.1

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Pengembangan 11 Mapel)



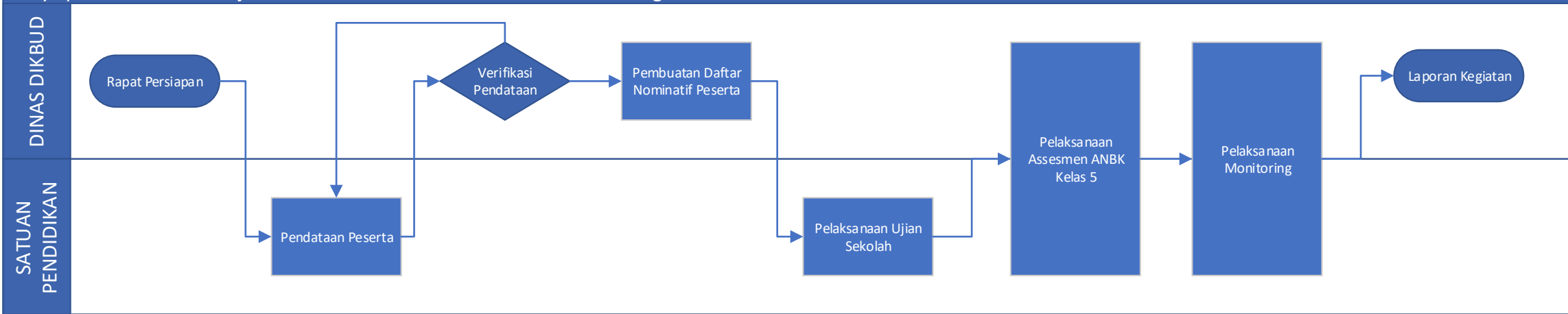
SLW-04.1 CFM 25.2

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Desiminasi Anti Korupsi)

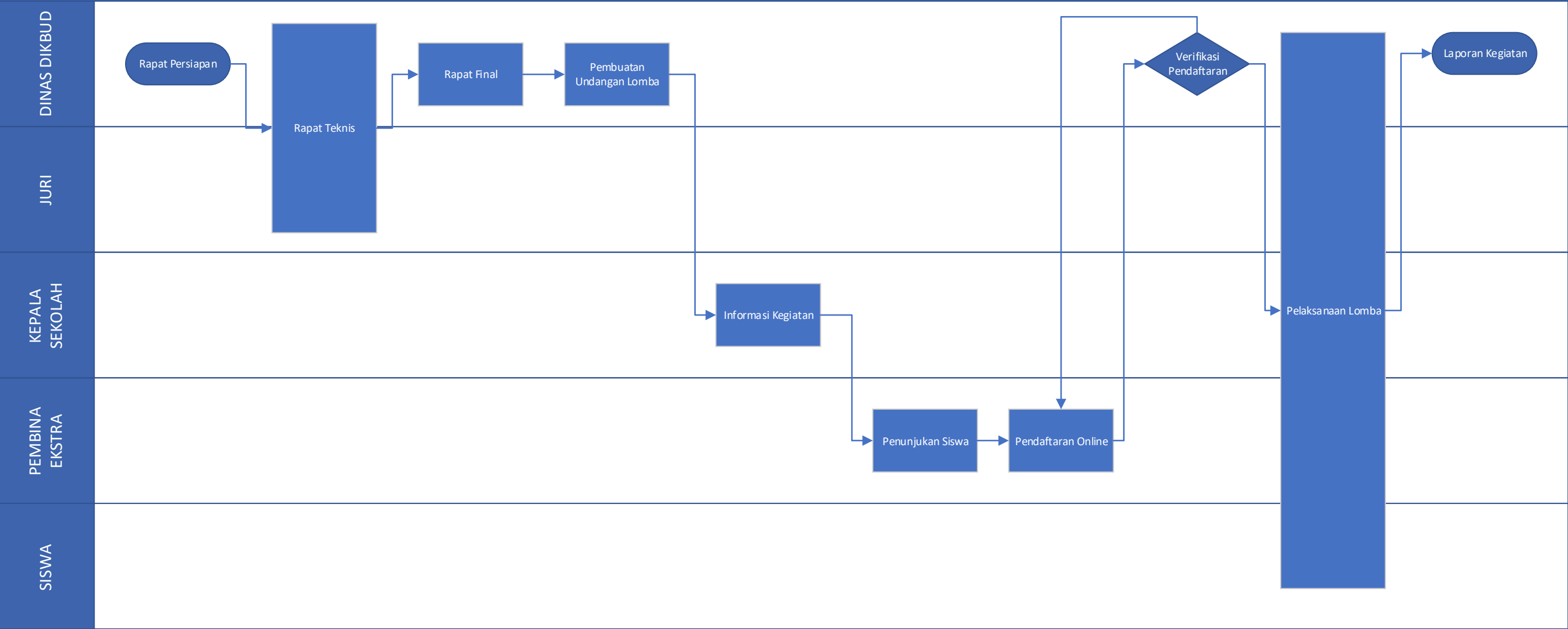


SLW-04.1 CFM 26

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

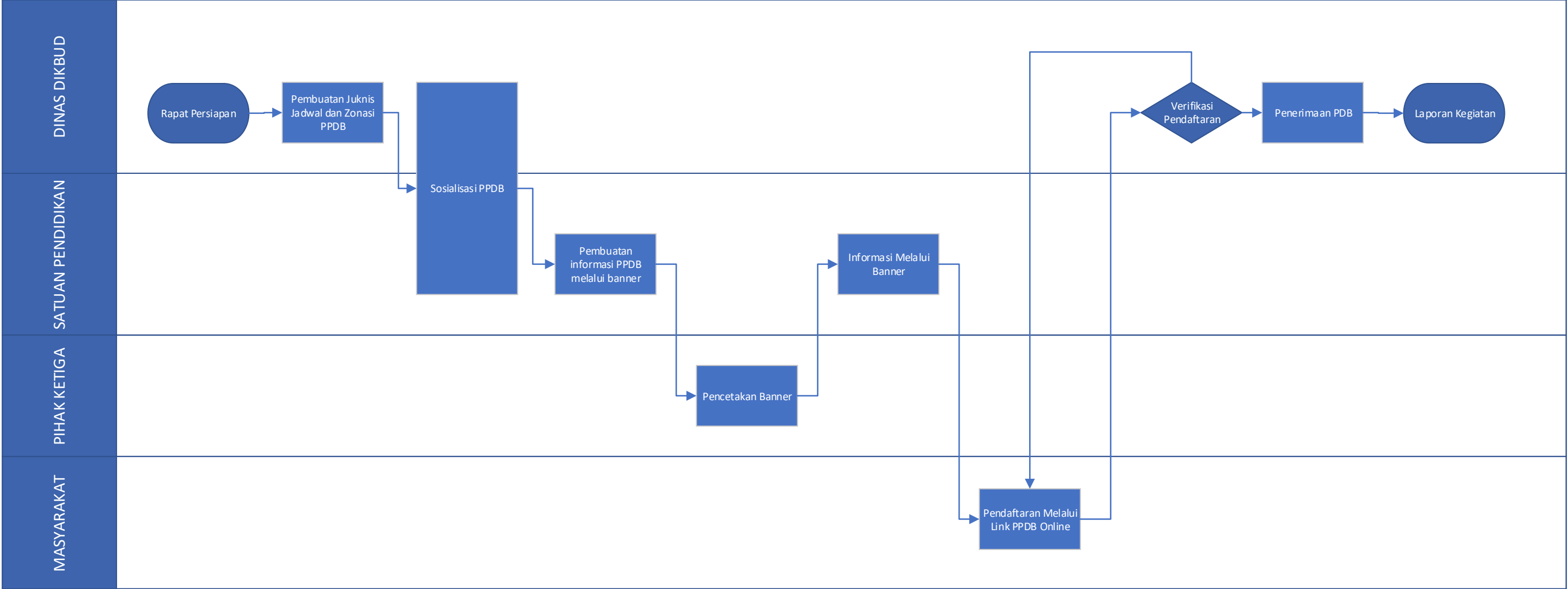


Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa



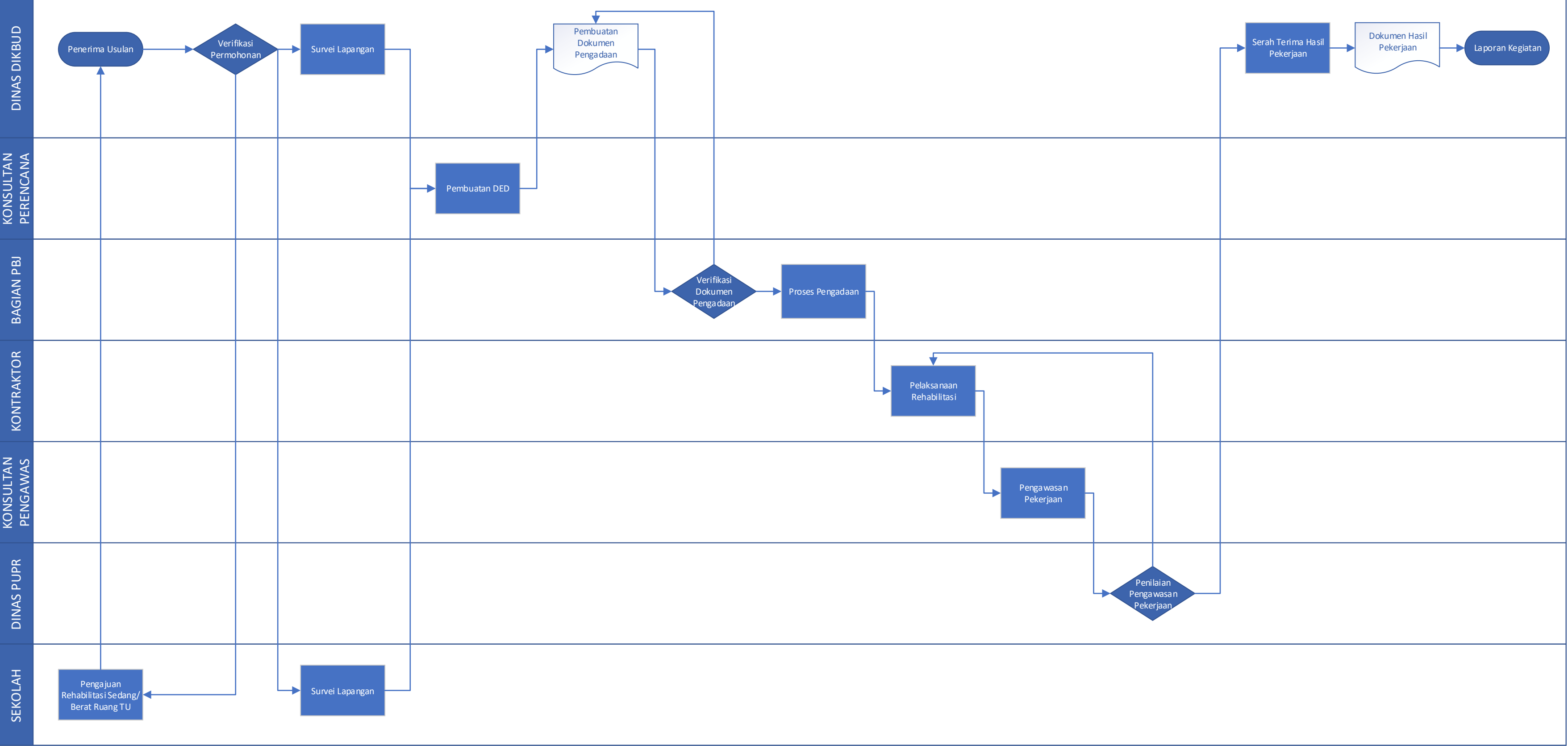
SLW 04.1 CFM 28

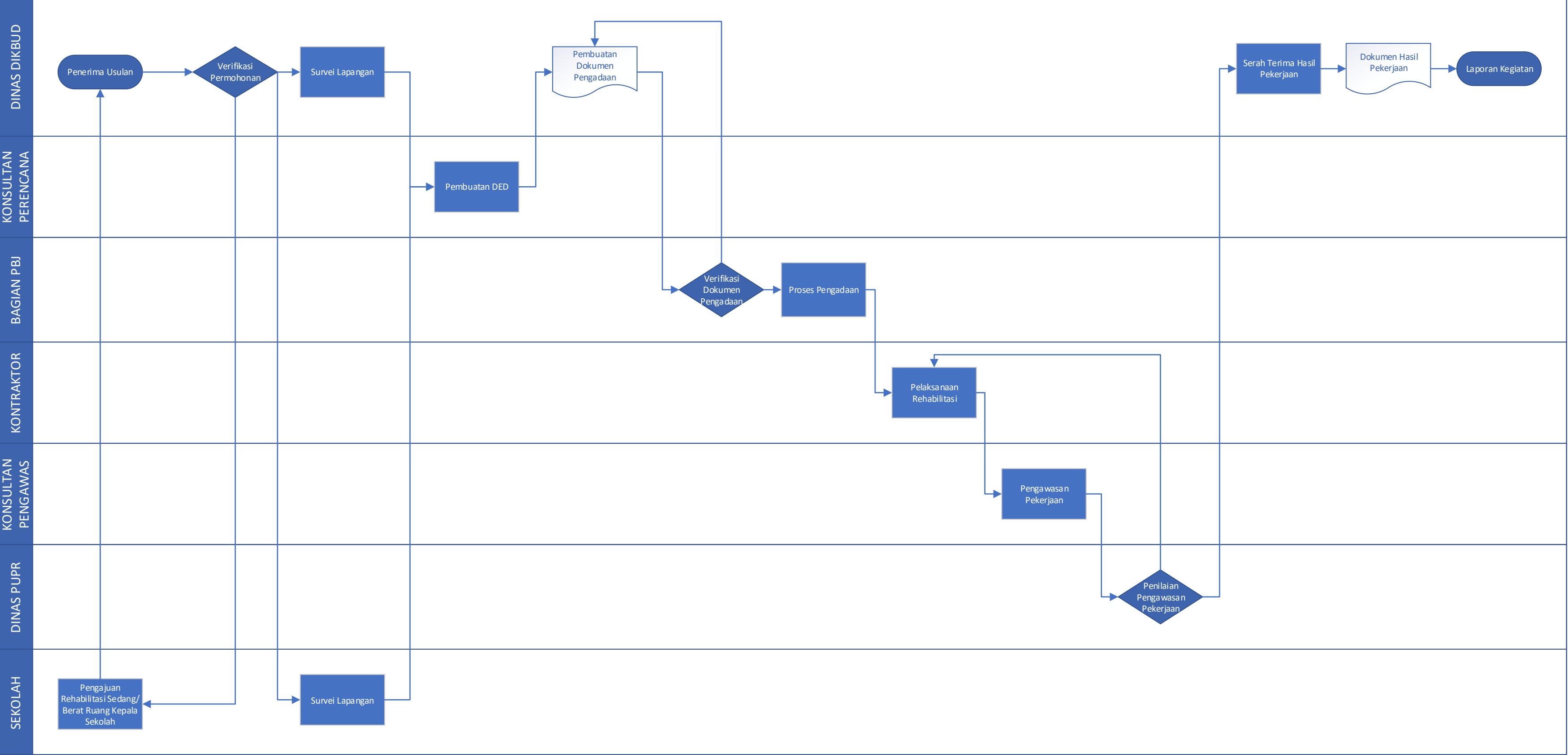
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (PPDB SMP)

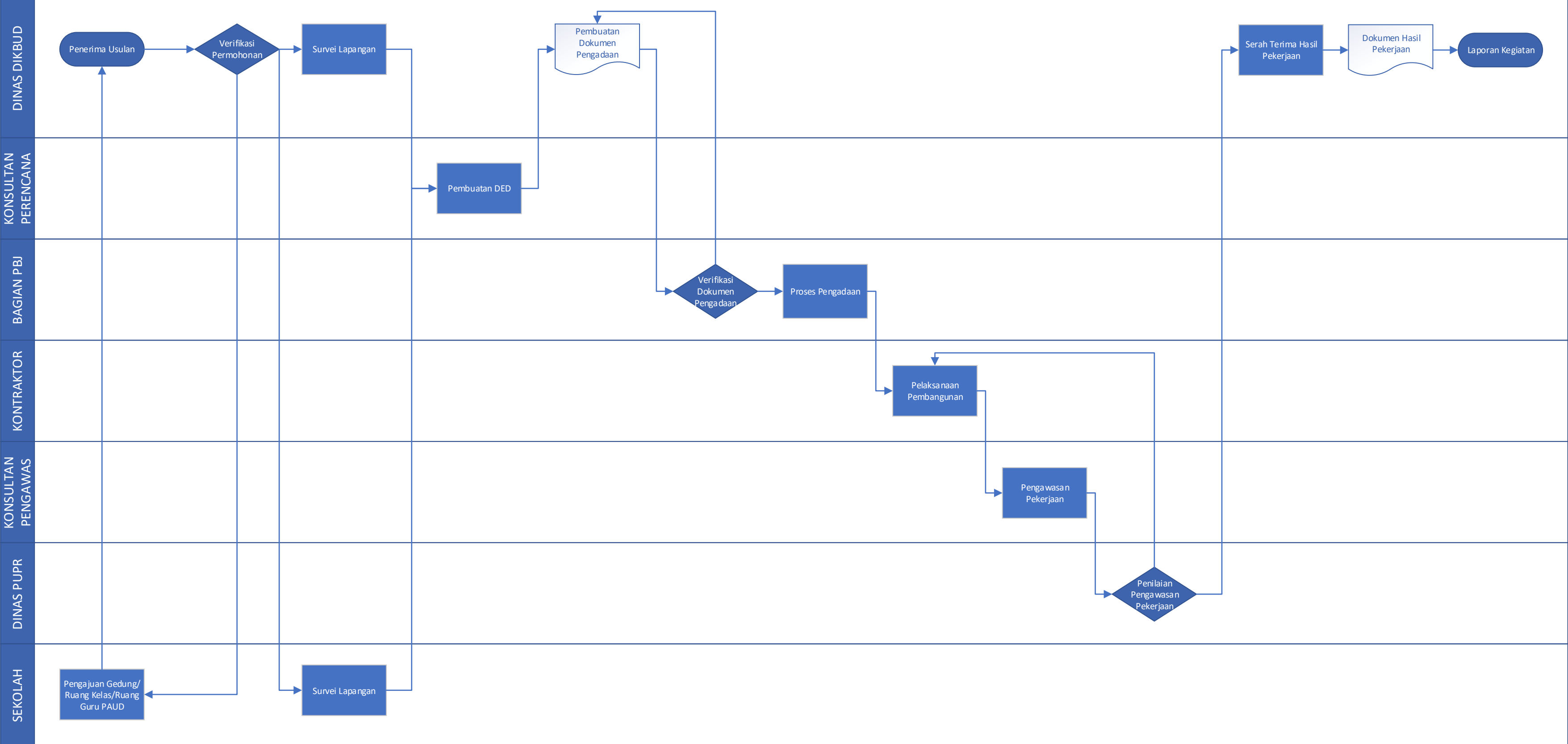


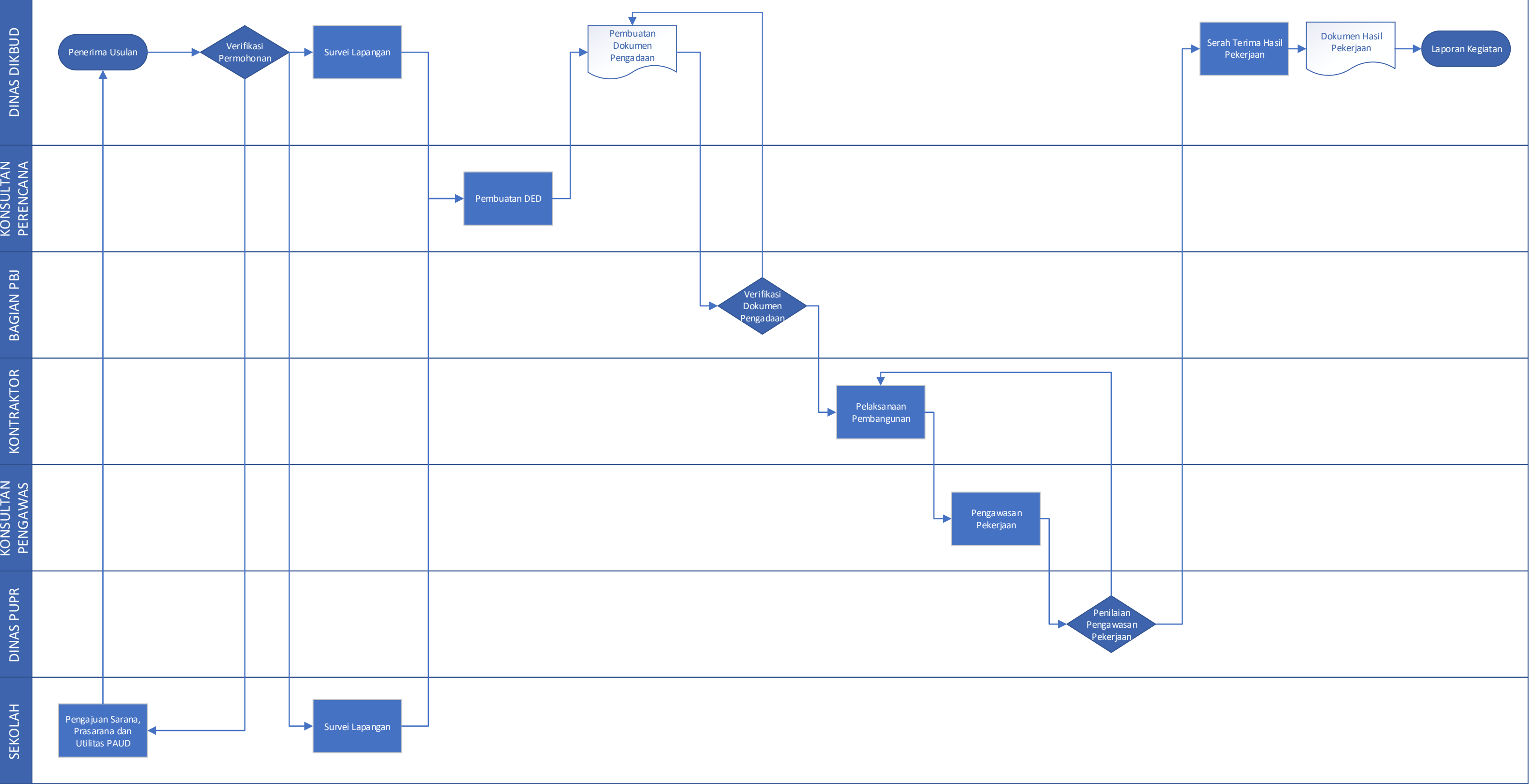
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

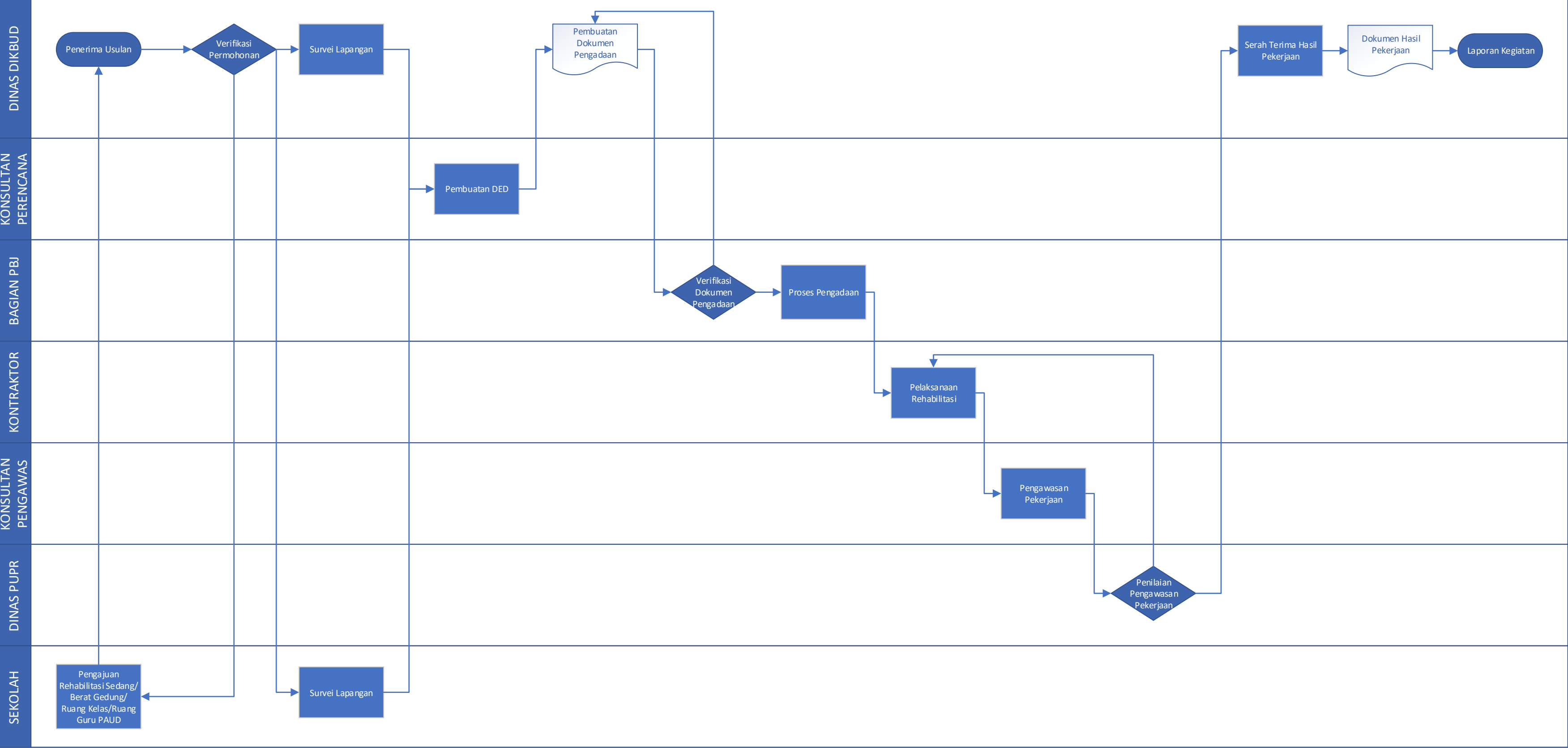


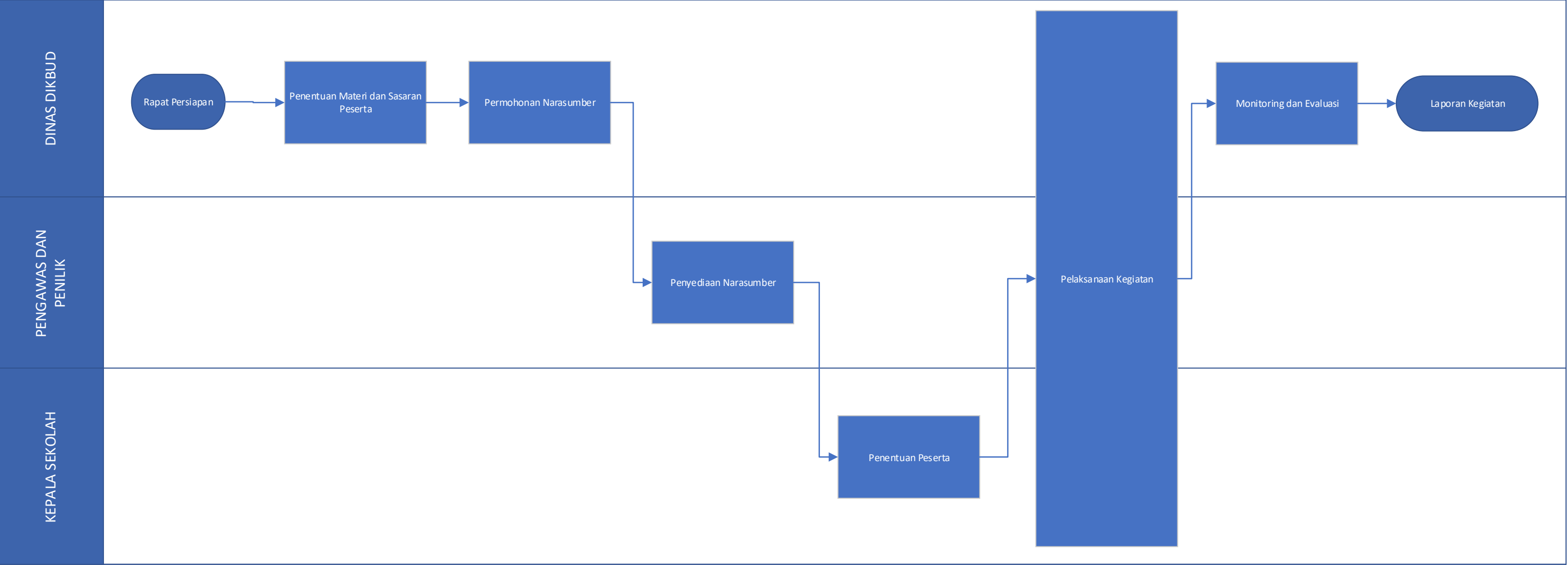




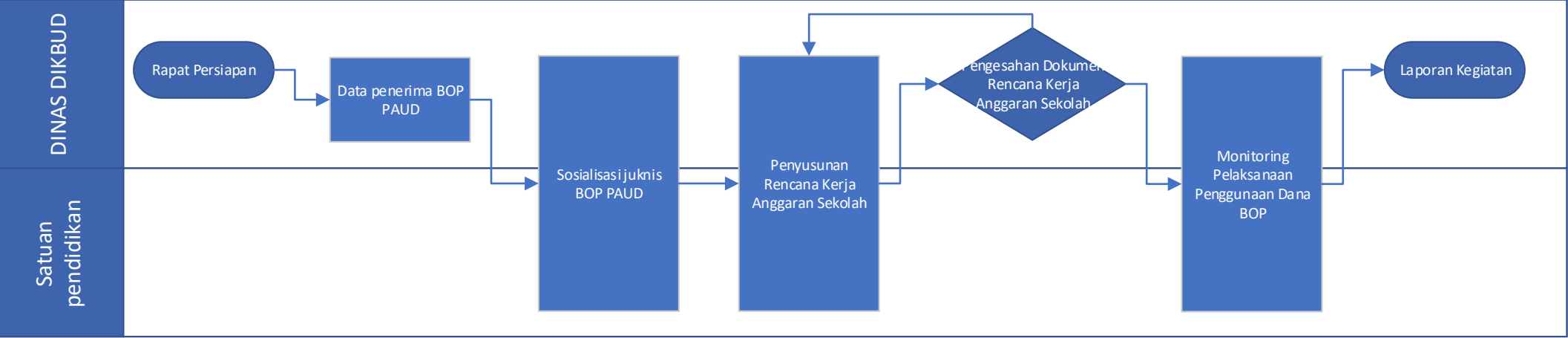


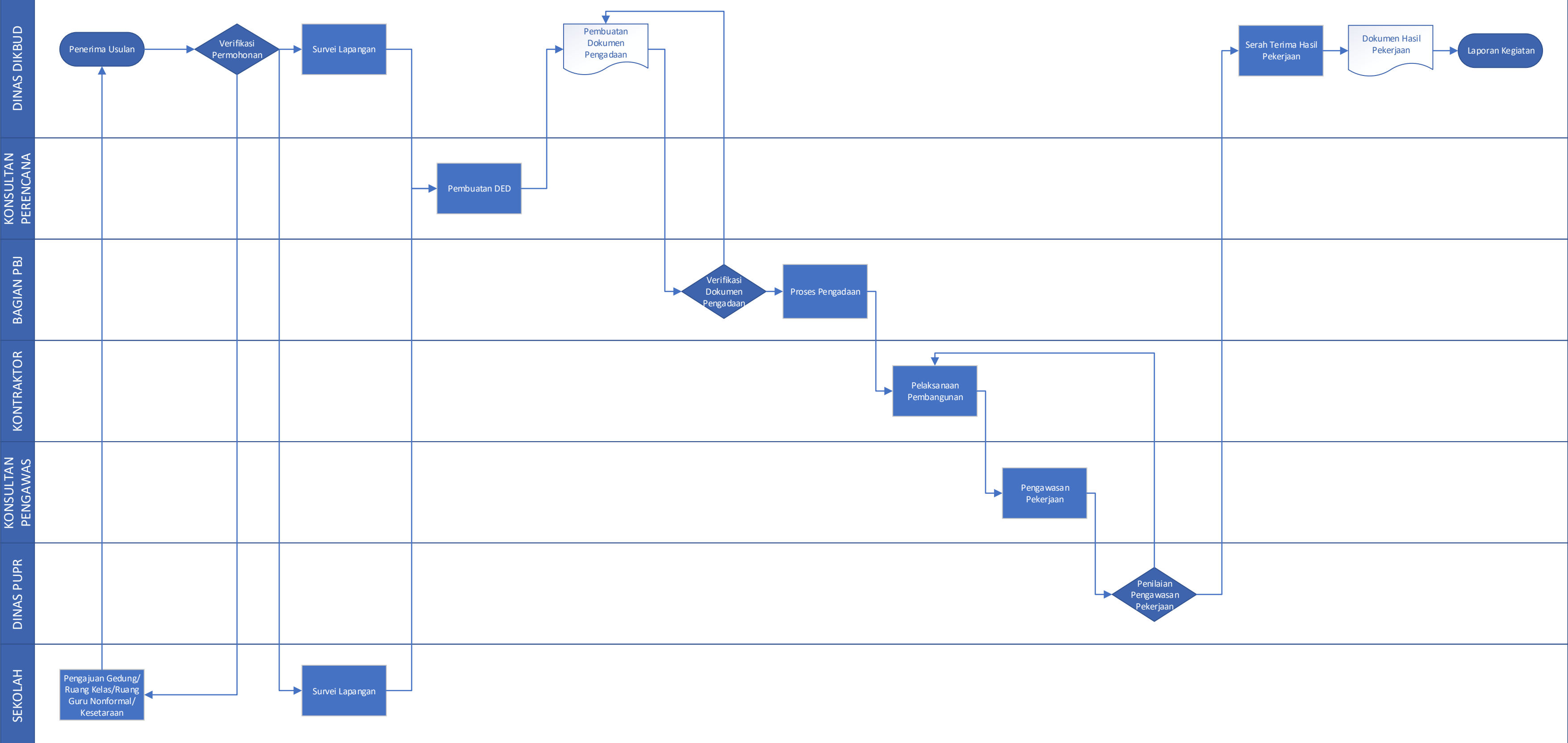


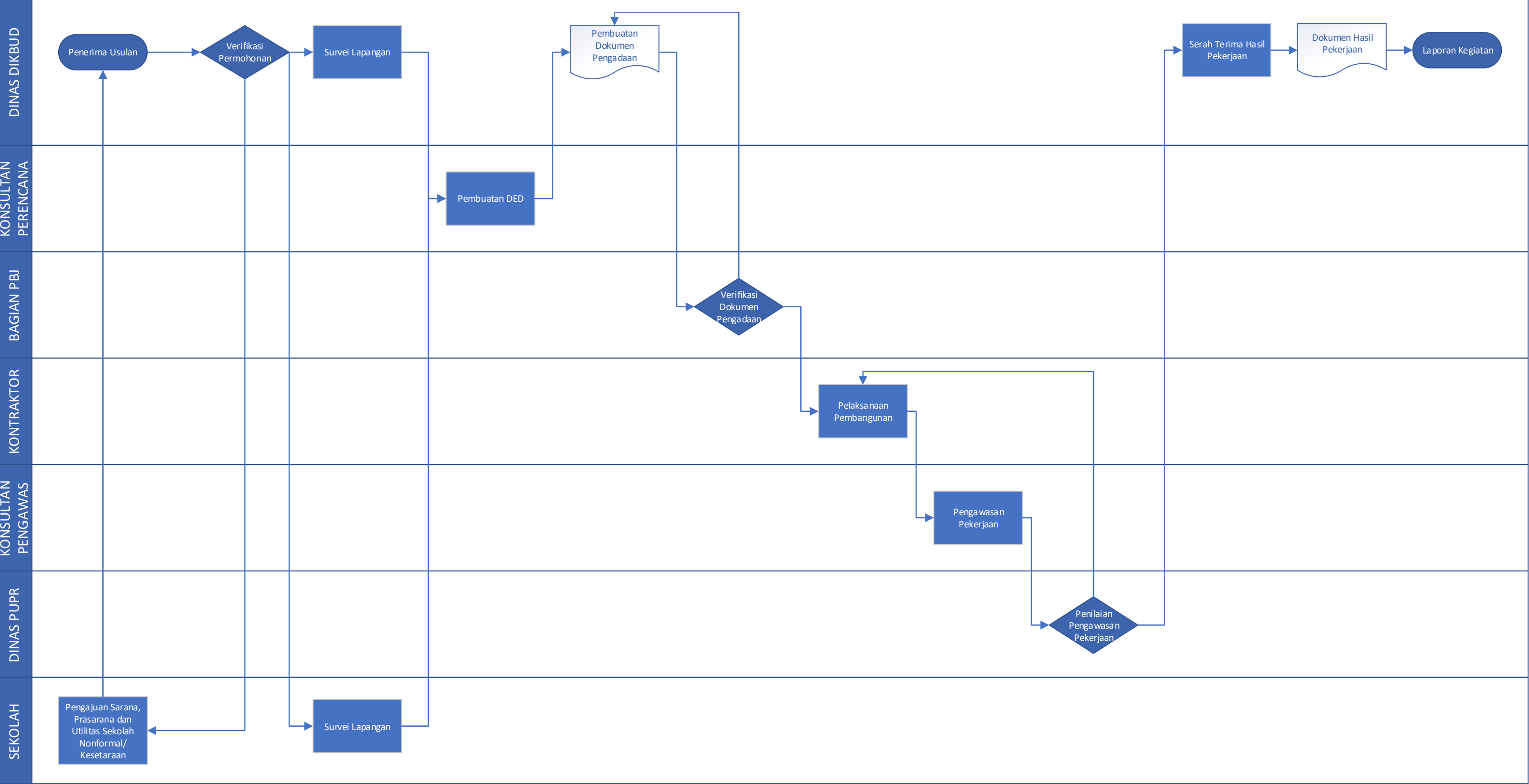




Pengelolaan Dana BOP PAUD





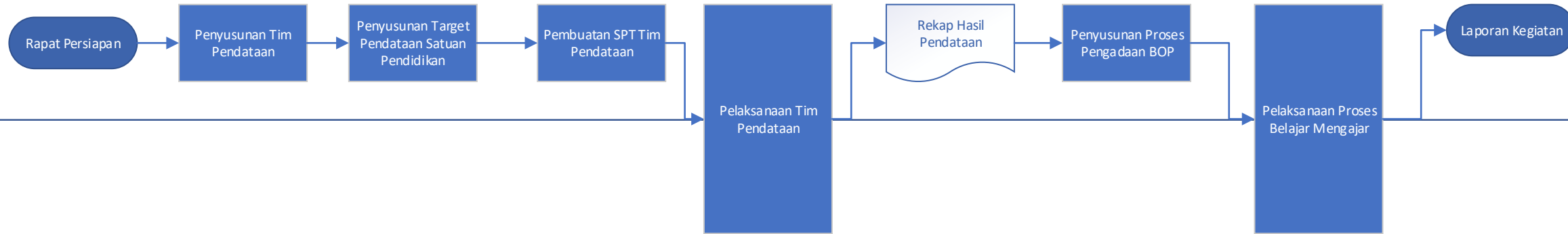


SLW-04.1 CFM 39

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Yuh Sekolah Maning)

DINAS DIKBUD

SATUAN
PENDIDIKAN



Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

DINAS DIKBUD

Rapat Persiapan

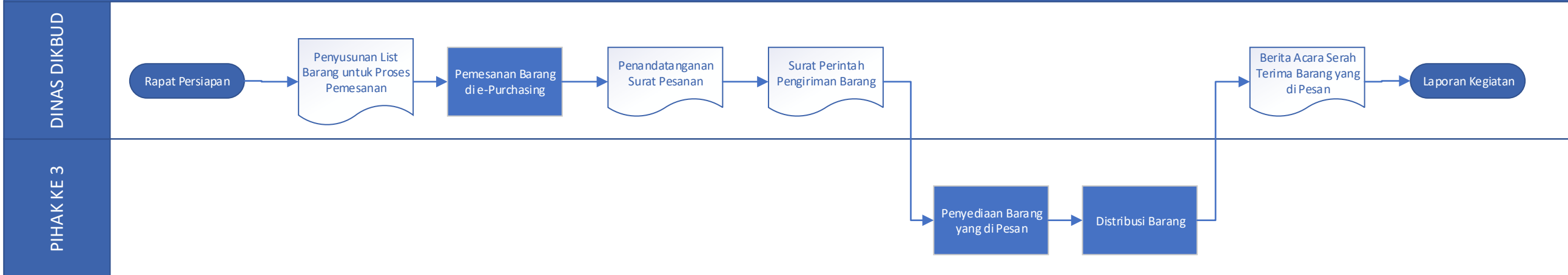
Penyusunan List
Barang untuk Proses
PemesananPemesanan Barang
di e-PurchasingPenandatanganan
Surat PesananSurat Perintah
Pengiriman BarangPenyediaan Barang
yang di Pesan

Distribusi Barang

Berita Acara Serah
Terima Barang yang
di Pesan

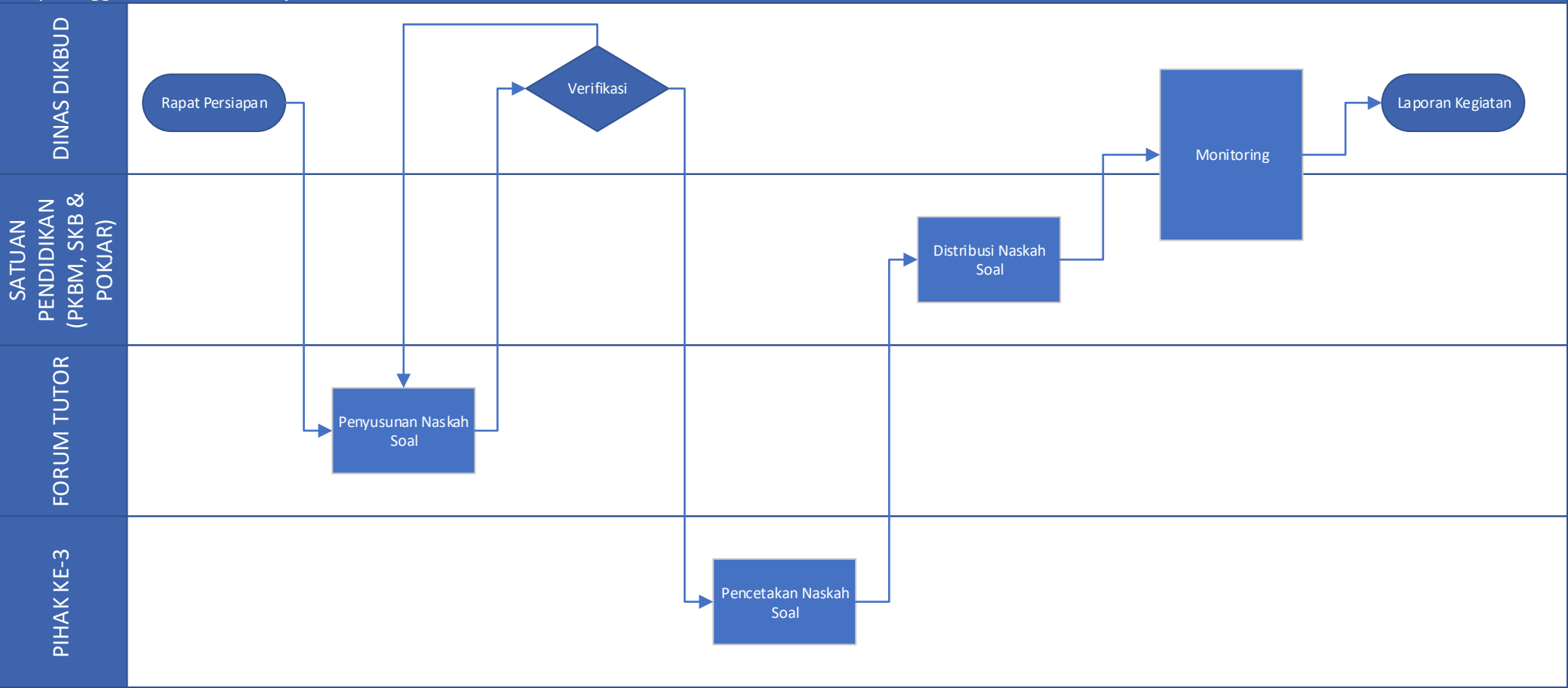
Laporan Kegiatan

PIHAK KE 3



SLW-04.1 CFM 41

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

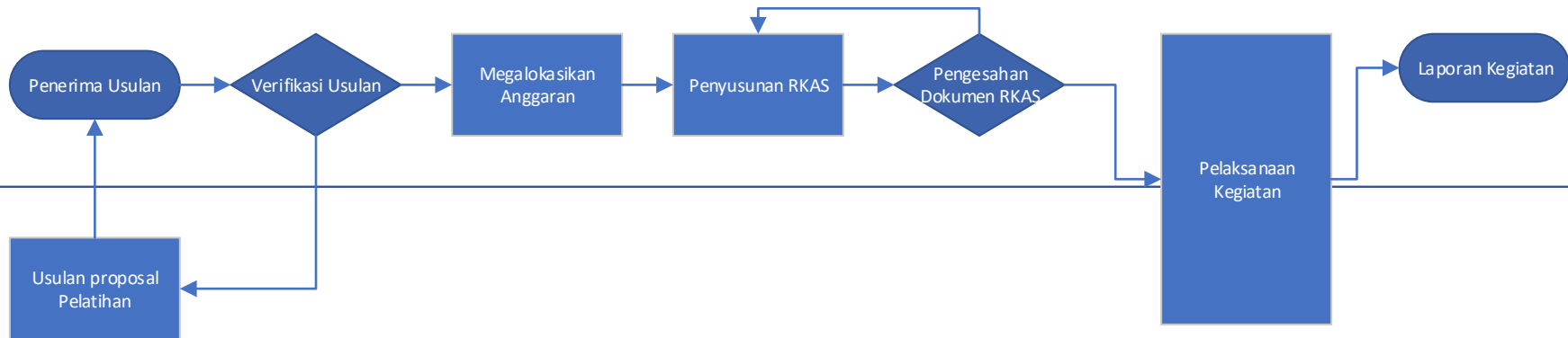


SLW-04.1 CFM 42

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

DINAS DIKBUD

LKP



Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

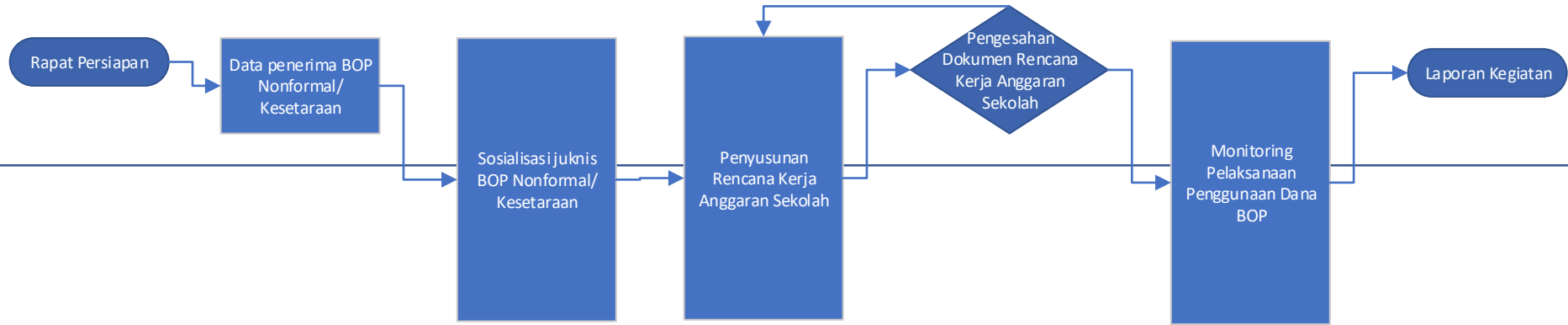
DINAS DIKBUD

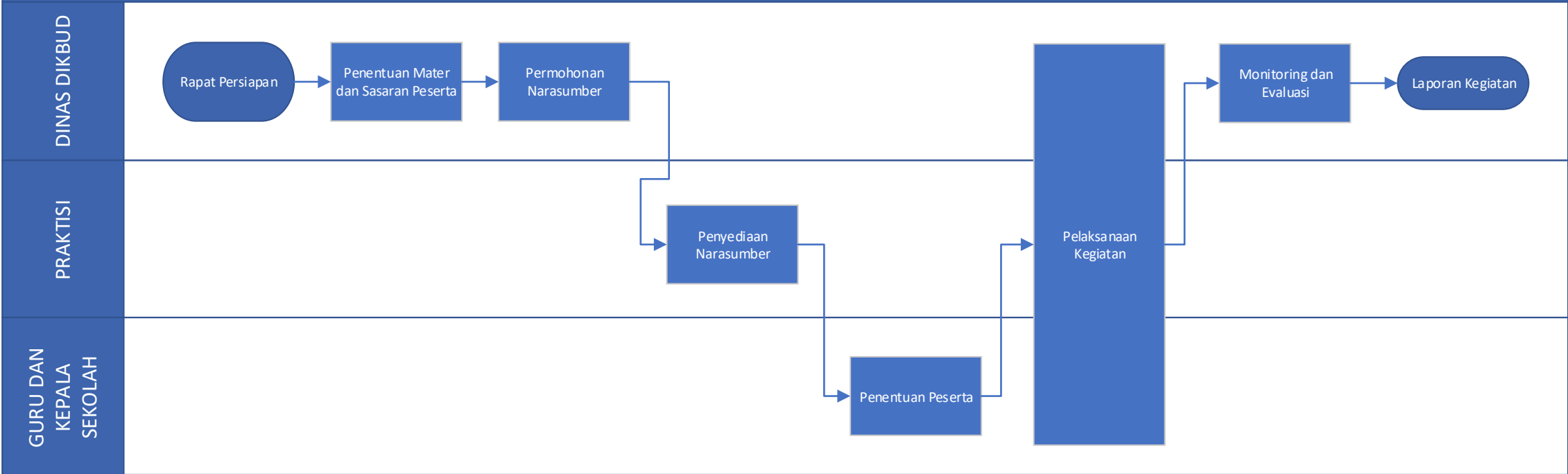
Satuan
pendidikan

Rapat Persiapan

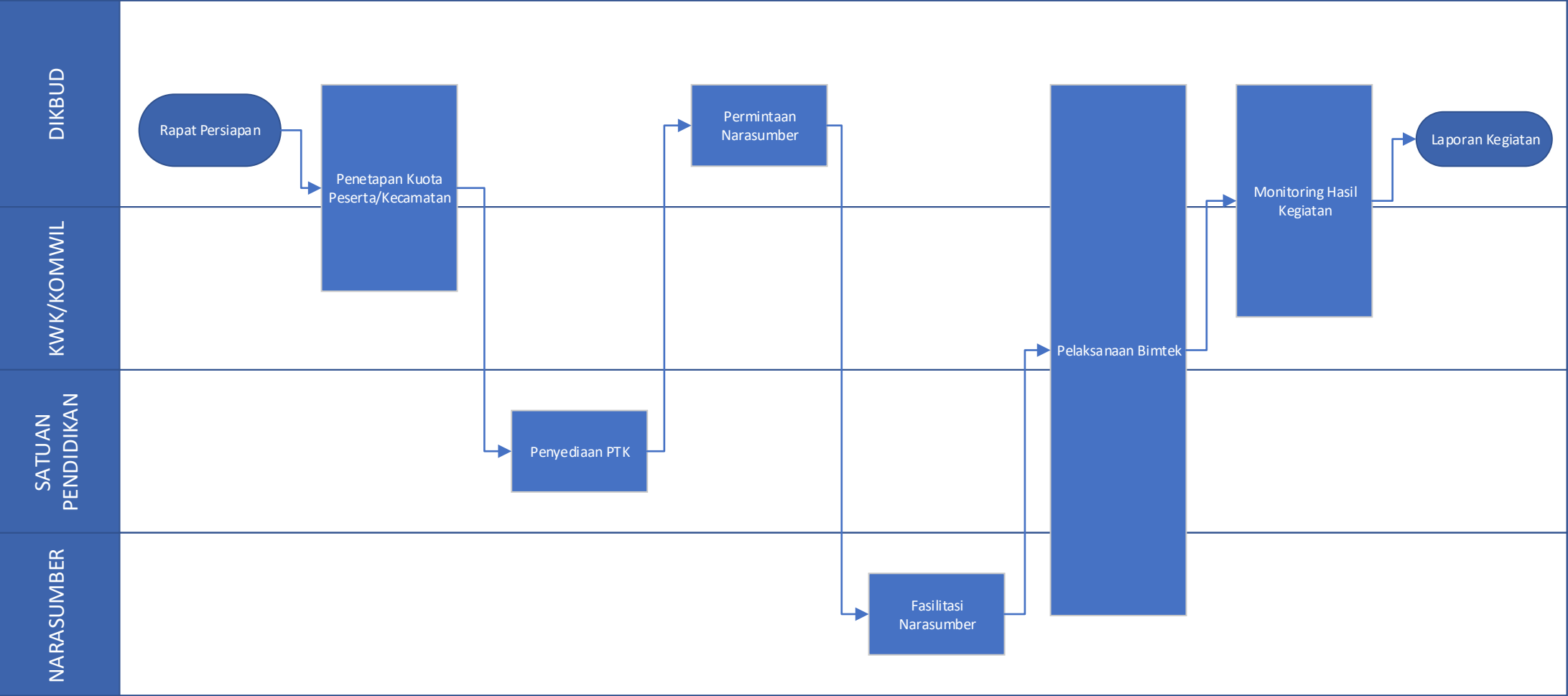
Data penerima BOP
Nonformal/
KesetaraanSosialisasi juknis
BOP Nonformal/
KesetaraanPenyusunan
Rencana Kerja
Anggaran SekolahPengesahan
Dokumen Rencana
Kerja Anggaran
SekolahMonitoring
Pelaksanaan
Penggunaan Dana
BOP

Laporan Kegiatan

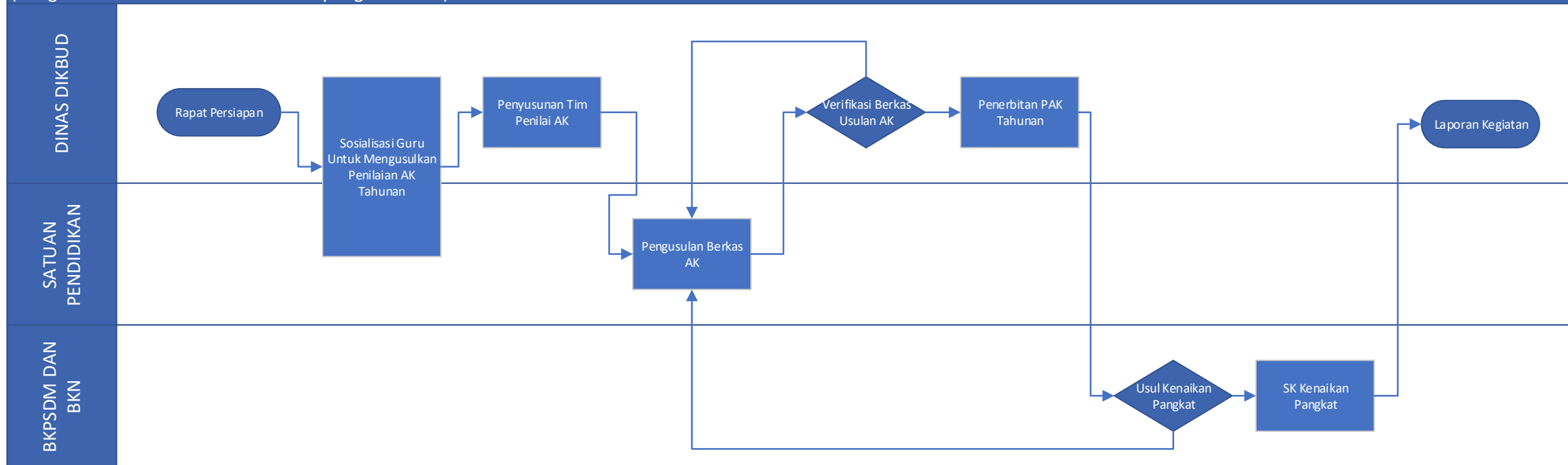




Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar , PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(Bimtek Penguatan Kompetensi PTK)



Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan PTK)



PETA RELASI

SLW-04.2

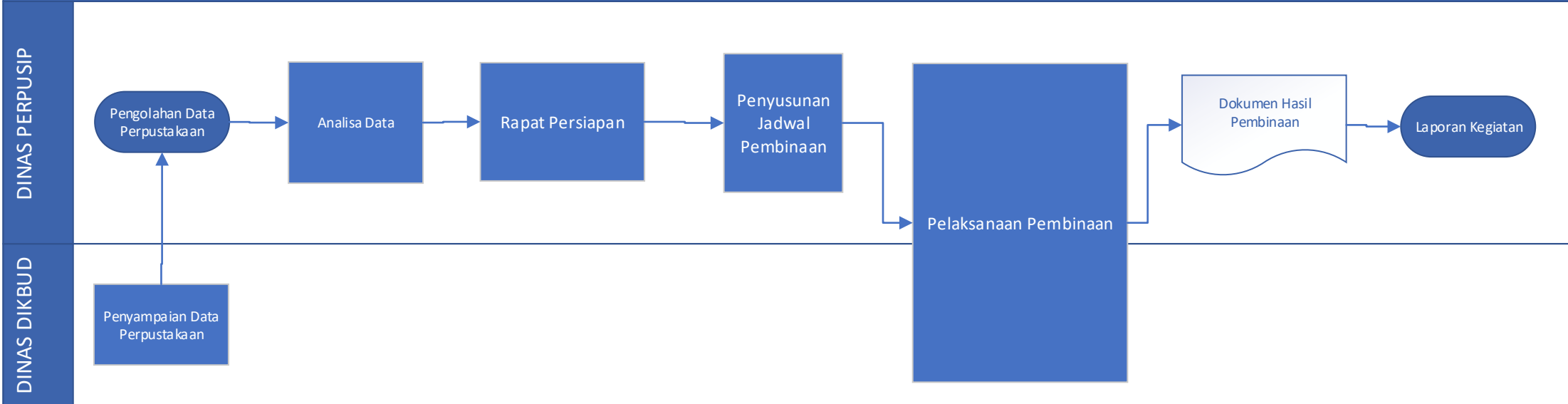
Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Perpustakaan

DINAS PERPUSIP

SELURUH PERANGKAT
DAERAH

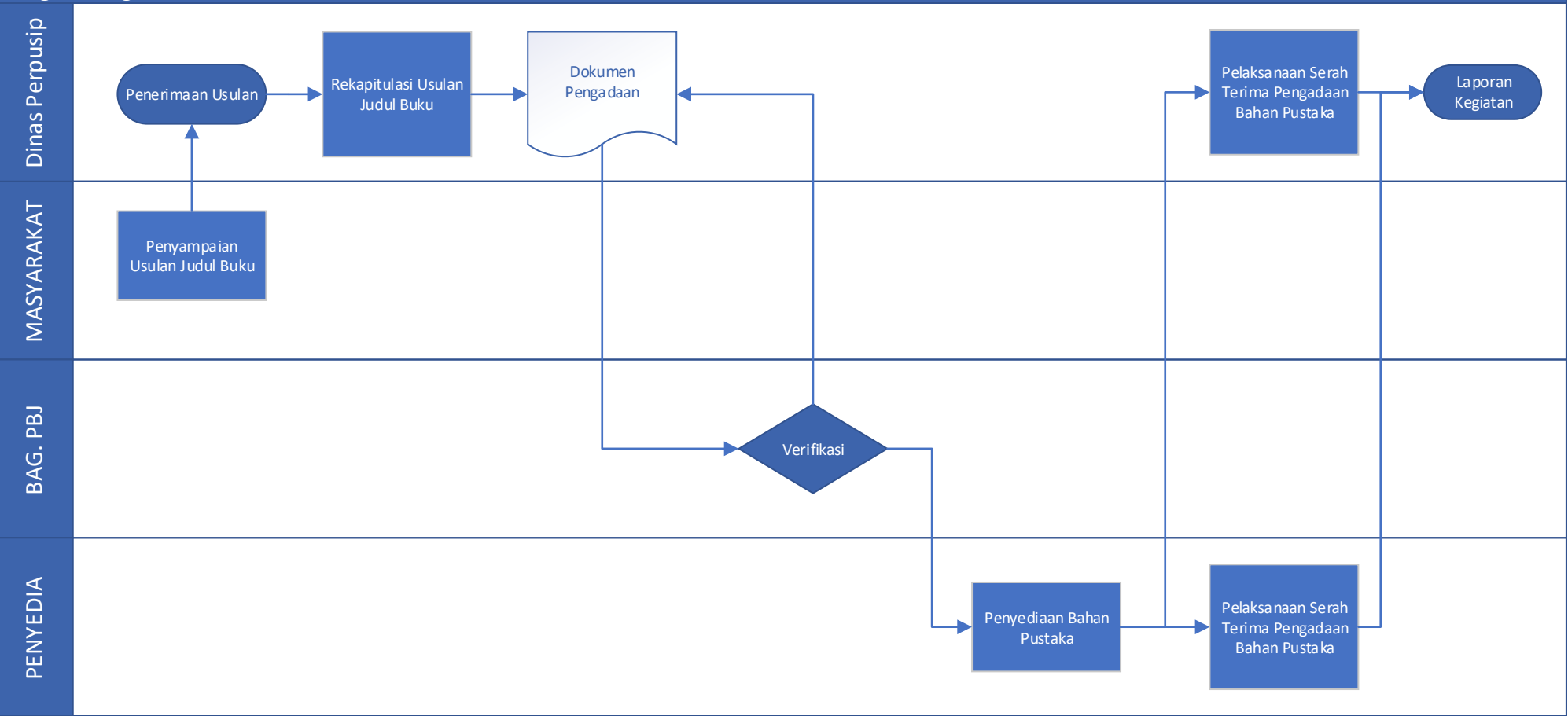
SLW-04.2 CFM 01

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota



SLW-04.2 CFM 02

Pengembangan Bahan Pustaka



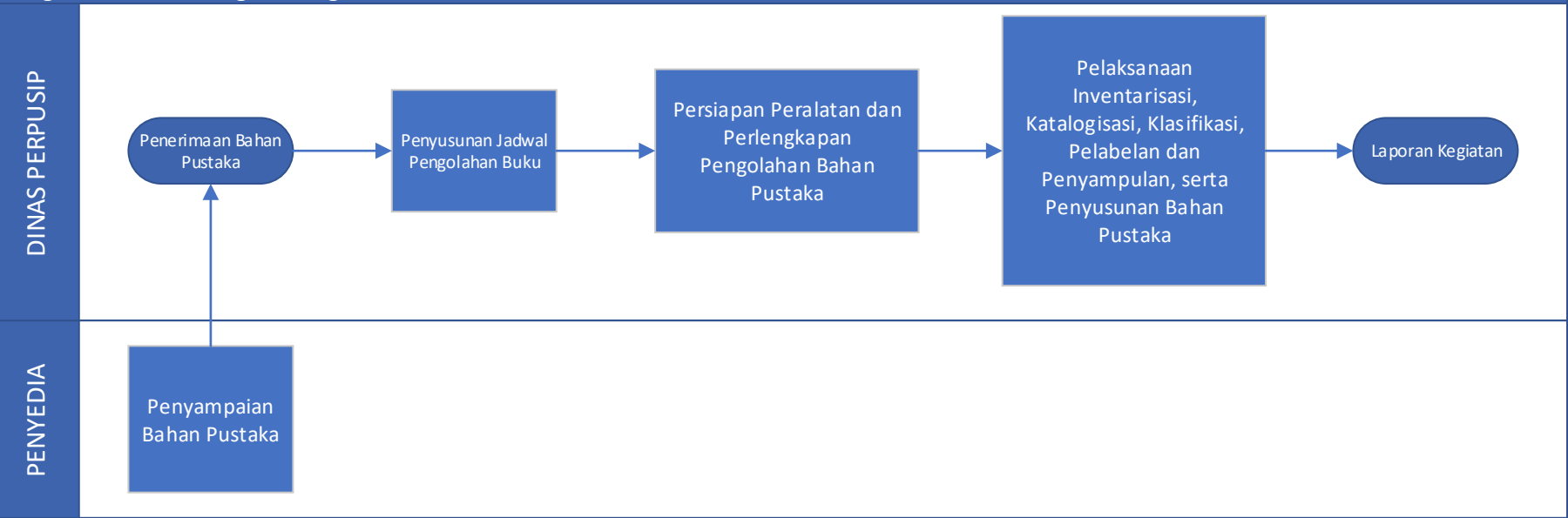
SLW-04.2 CFM 03

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kab/Kota



SLW-04.2 CFM 04

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka



SLW-04.2 CFM 05

Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

DINAS PERPUSIP

Rapat Persiapan

Analisa Data
Kebutuhan
Kunjungan Layanan
Perpustakaan
Keliling

Penyusunan Jadwal
Layanan
Perpustakaan
Keliling

Pelaksanaan
Kegiatan
Layanan
Perpustakaan
Keliling

Monitoring dan
Evaluasi

Laporan Kegiatan

KECAMATAN

PETA RELASI

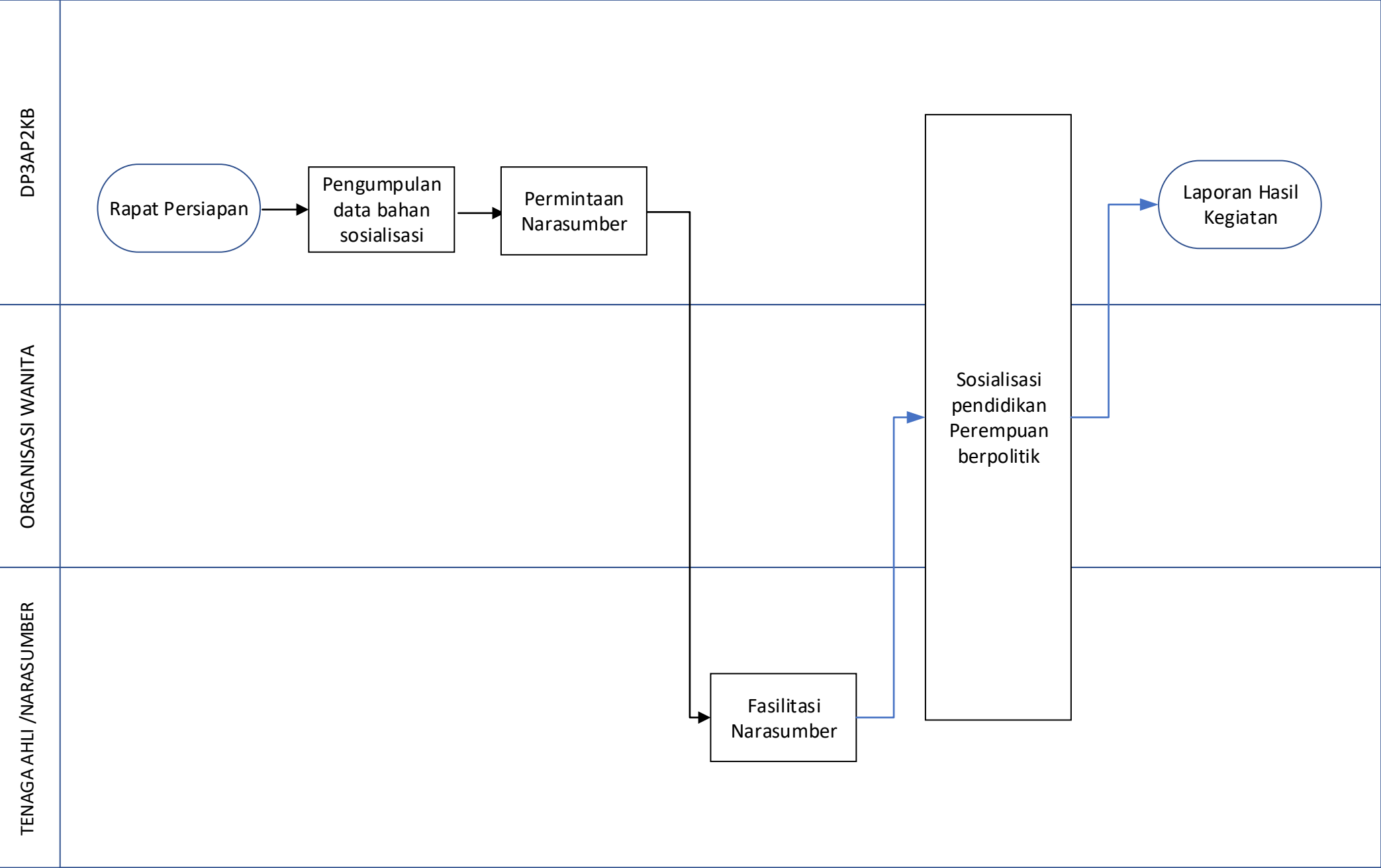
SLW-04.3

Peningkatan Pengendalian Penduduk, Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak-Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak

DP3AP2 DAN KB	BAPPEDA LITBANG	BKPSDM	BPKAD
BAGIAN PBJ	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM	DINAS KOMINFO
BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DPRD	DINAS KESEHATAN	DINAS DIKBUD
DINAS SOSIAL	DINAS DUKCAPIL	DINAS PERMASDES	RSUD
DINAS PERINTRANS NAKER	BPBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS LH
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	DINAS PERPUSIP	DINAS KPTAN	BAGIAN PEMERINTAHAN
SATPOL PP	DINAS PERKIM	DINAS PUPR	DINAS PERIKANAN
BADAN KESBANGPOL	BAGIAN KESRA	DINAS PORAPAR	KECAMATAN

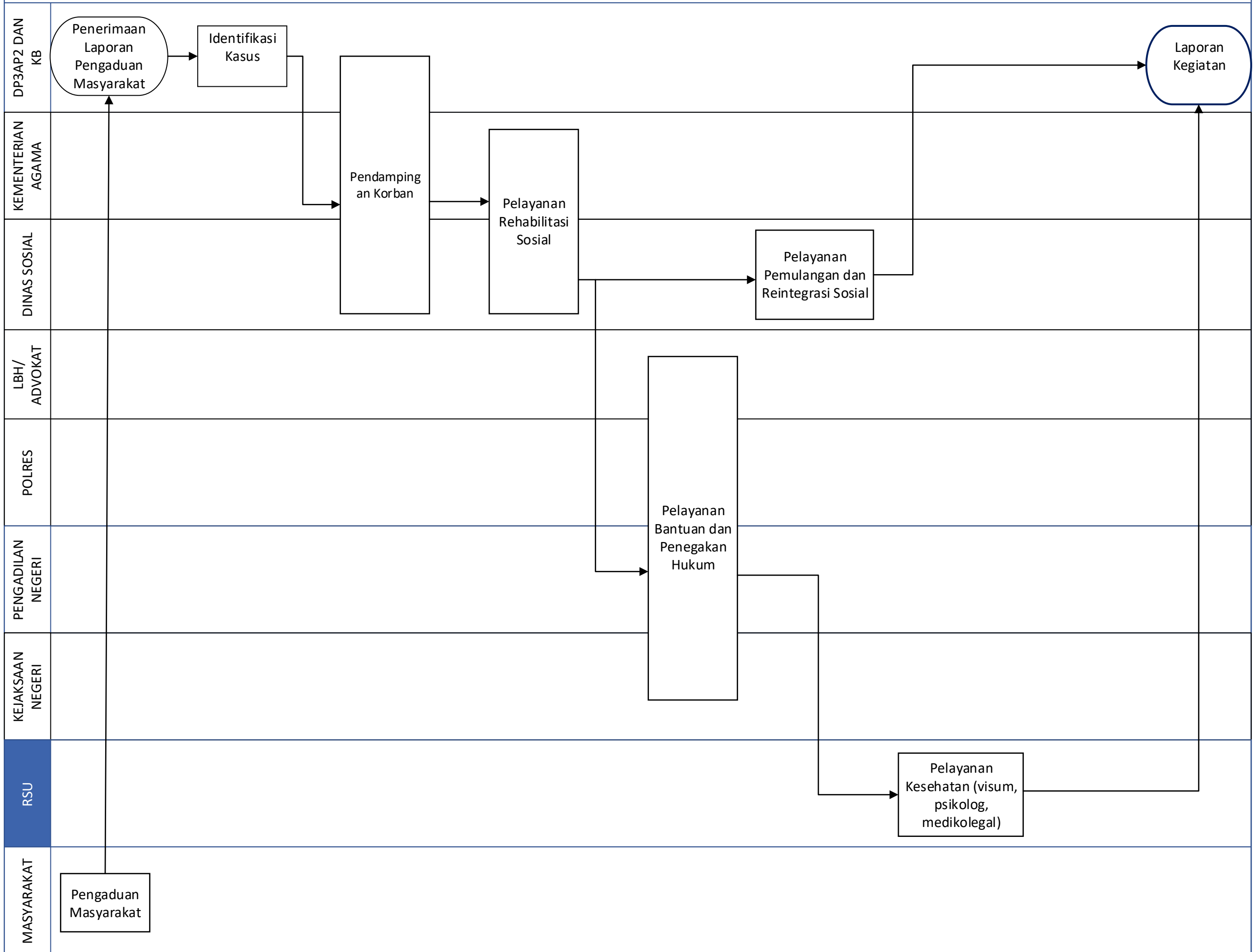
SLW-04.3 CFM 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

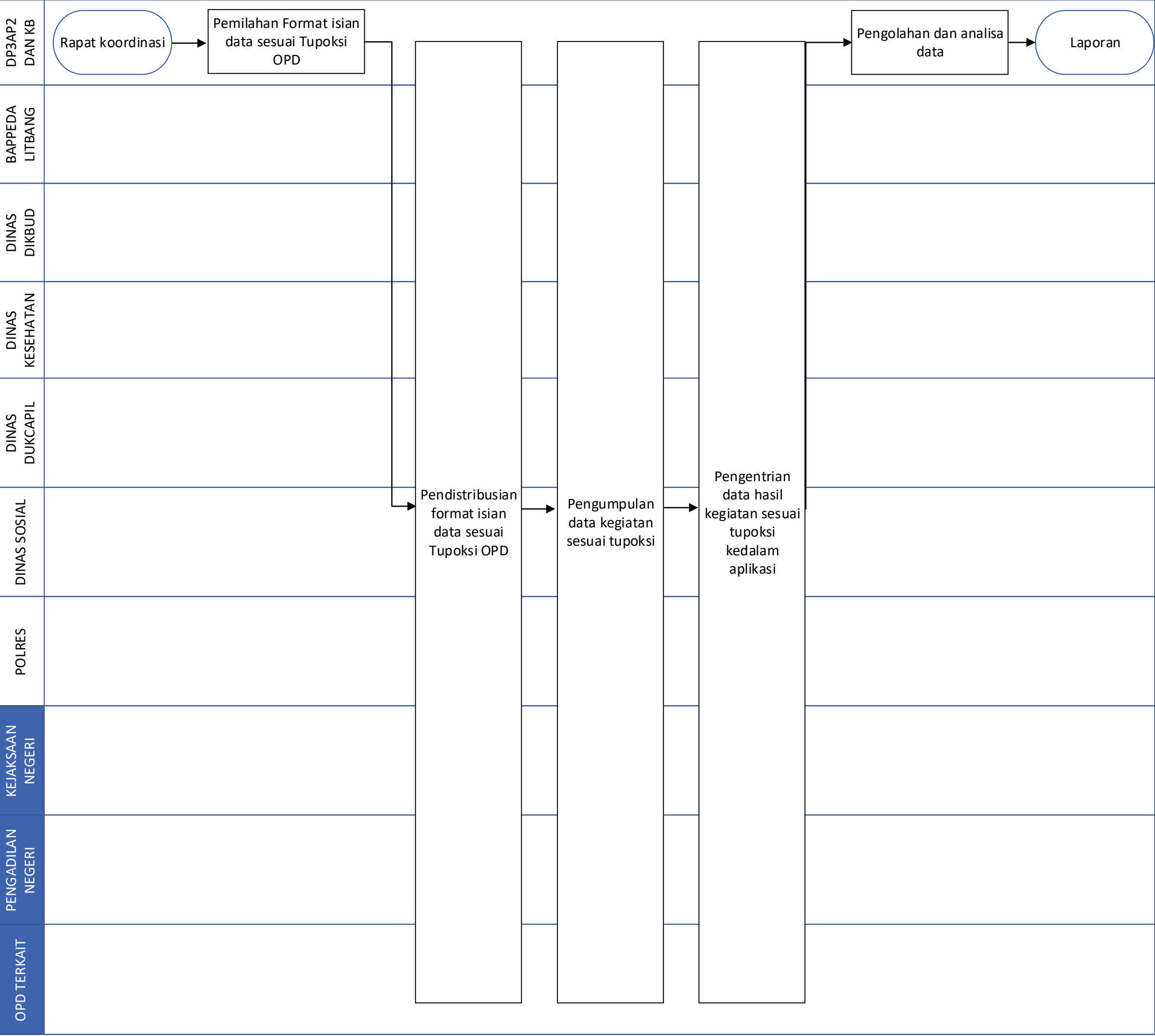


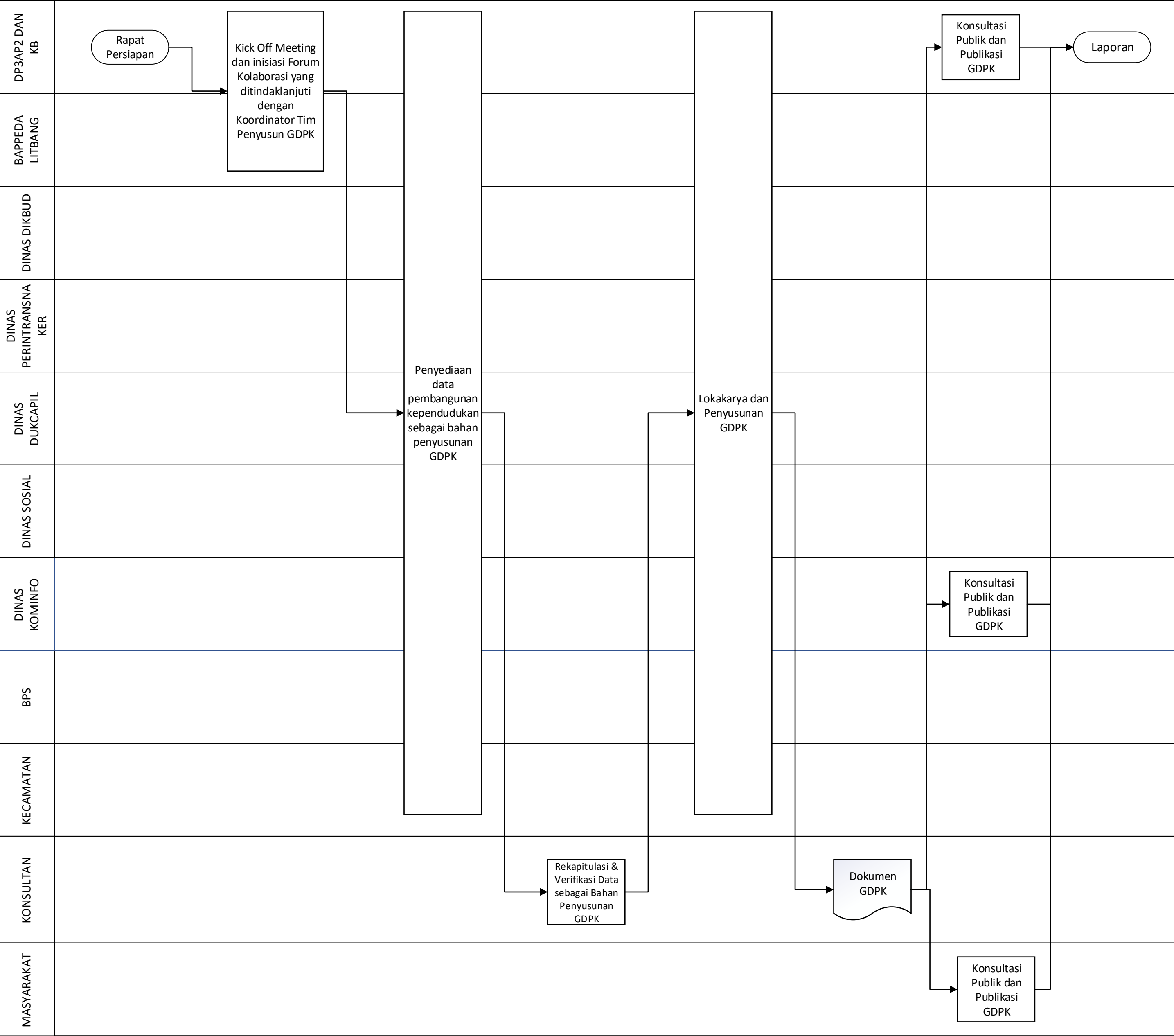
SLW-04.3 CFM 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

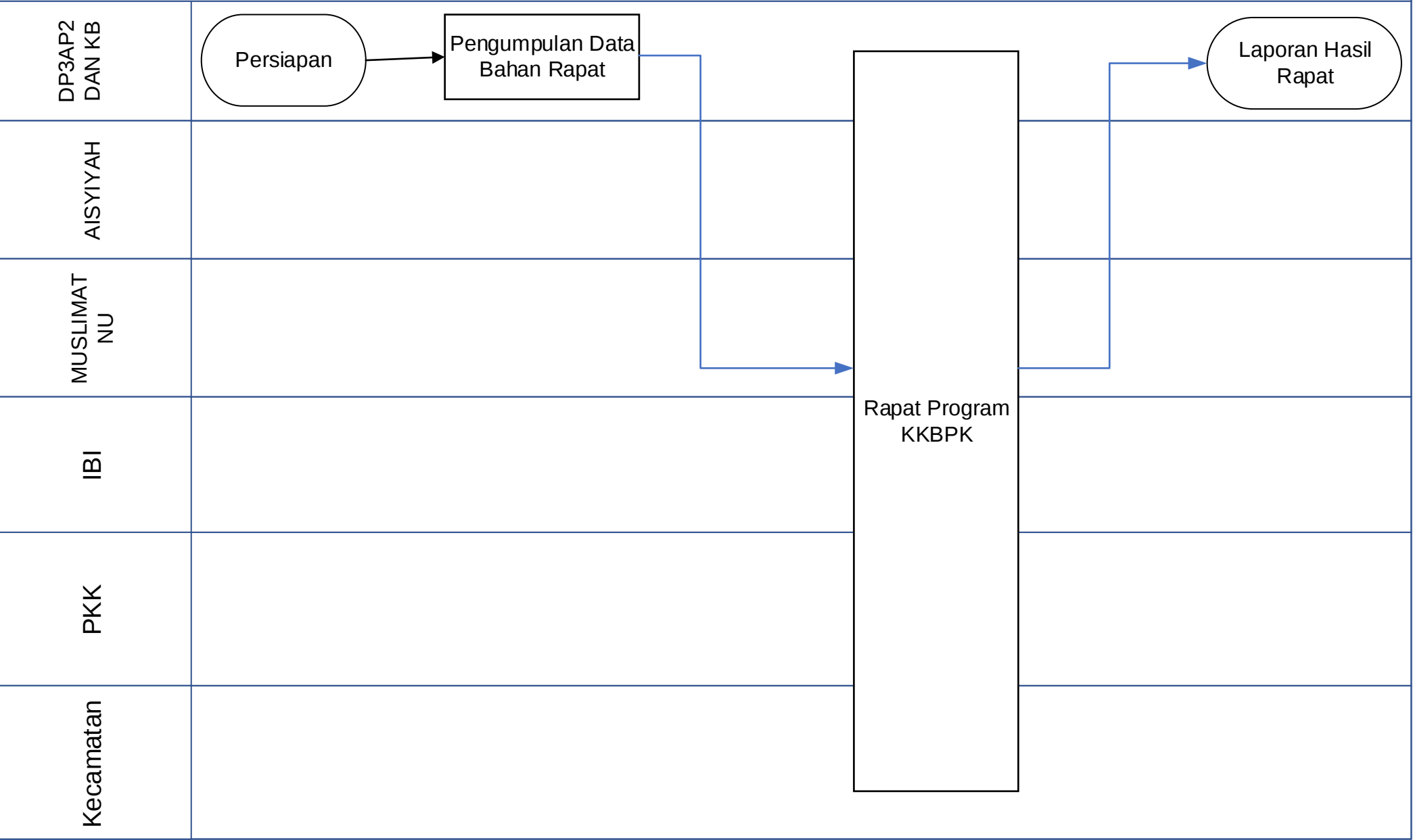


Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota



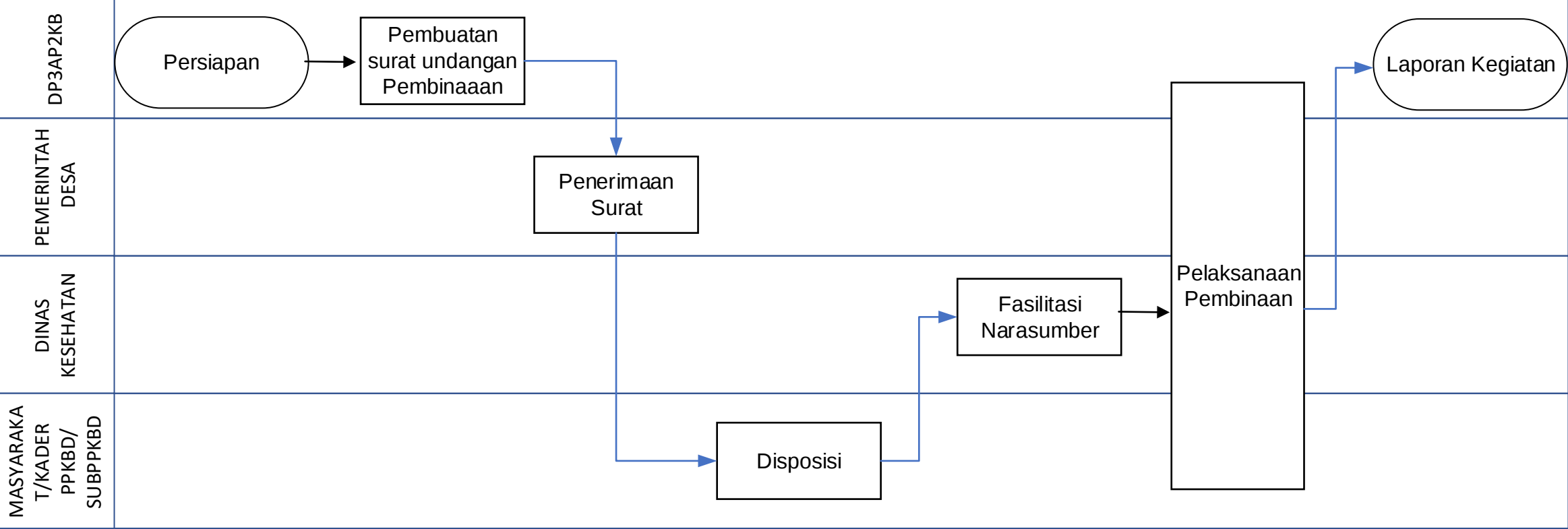


Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja



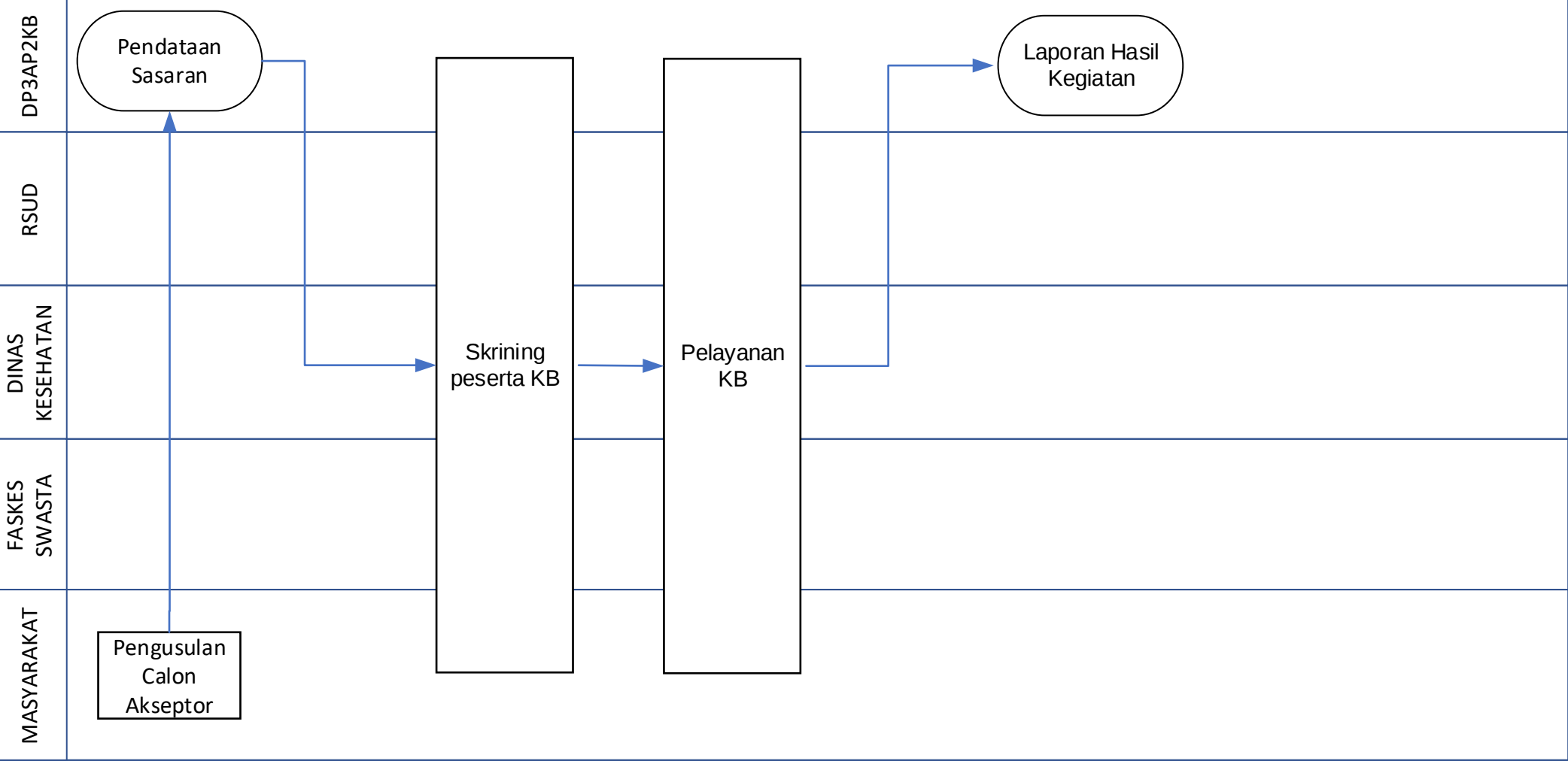
SLW-04.3 CFM 07

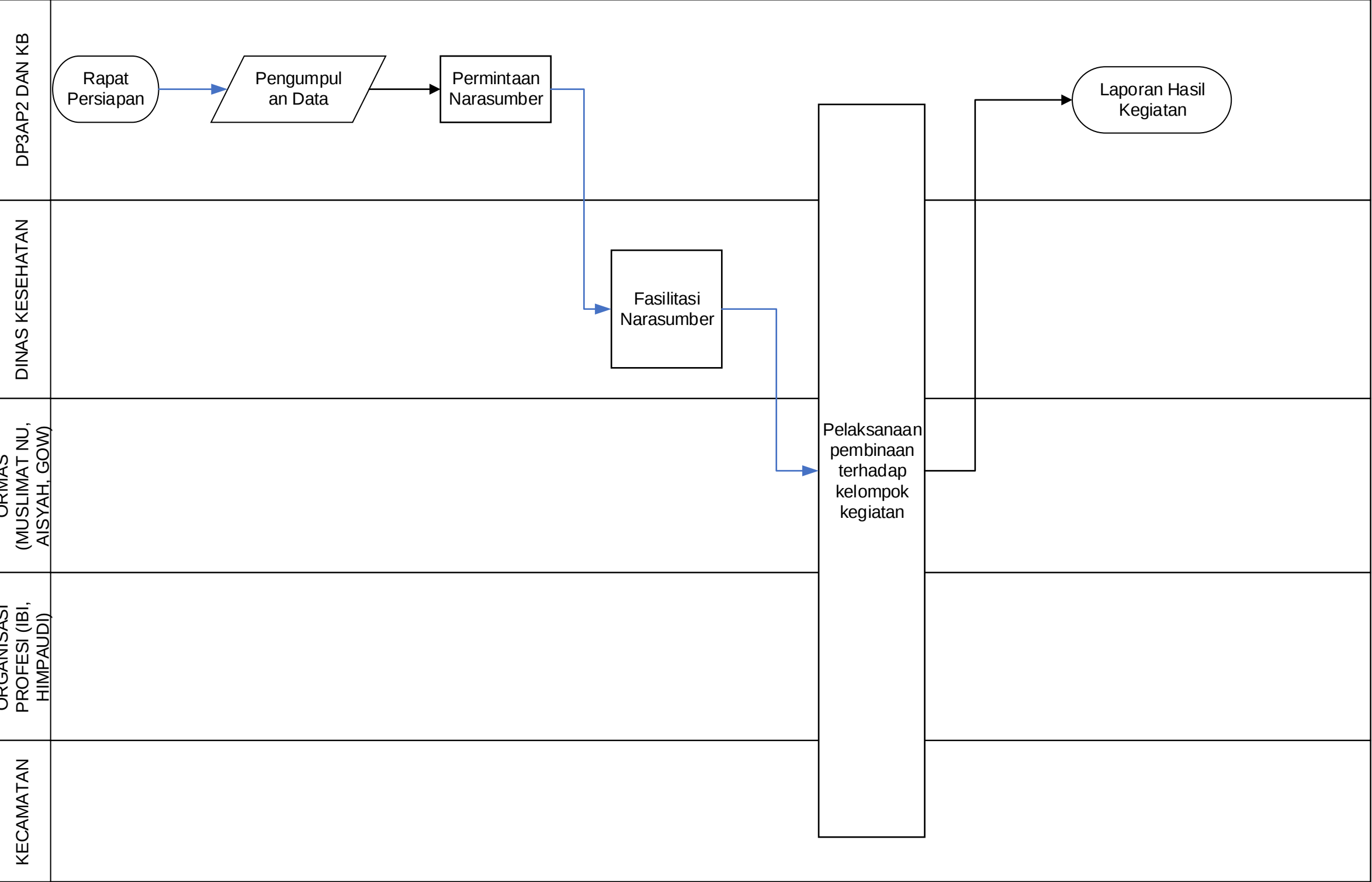
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB



SLW-04.3 CFM 08

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)





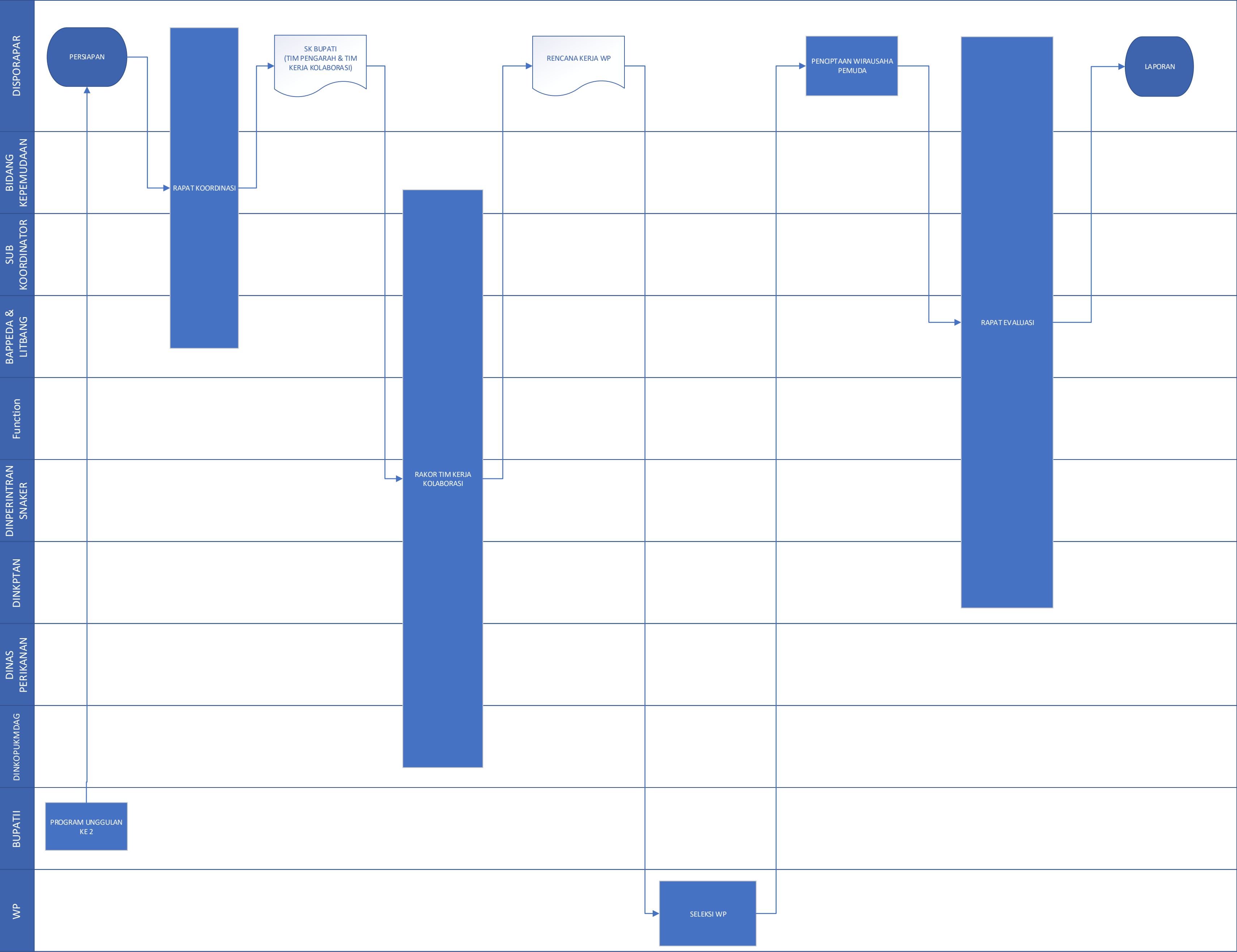
PETA RELASI

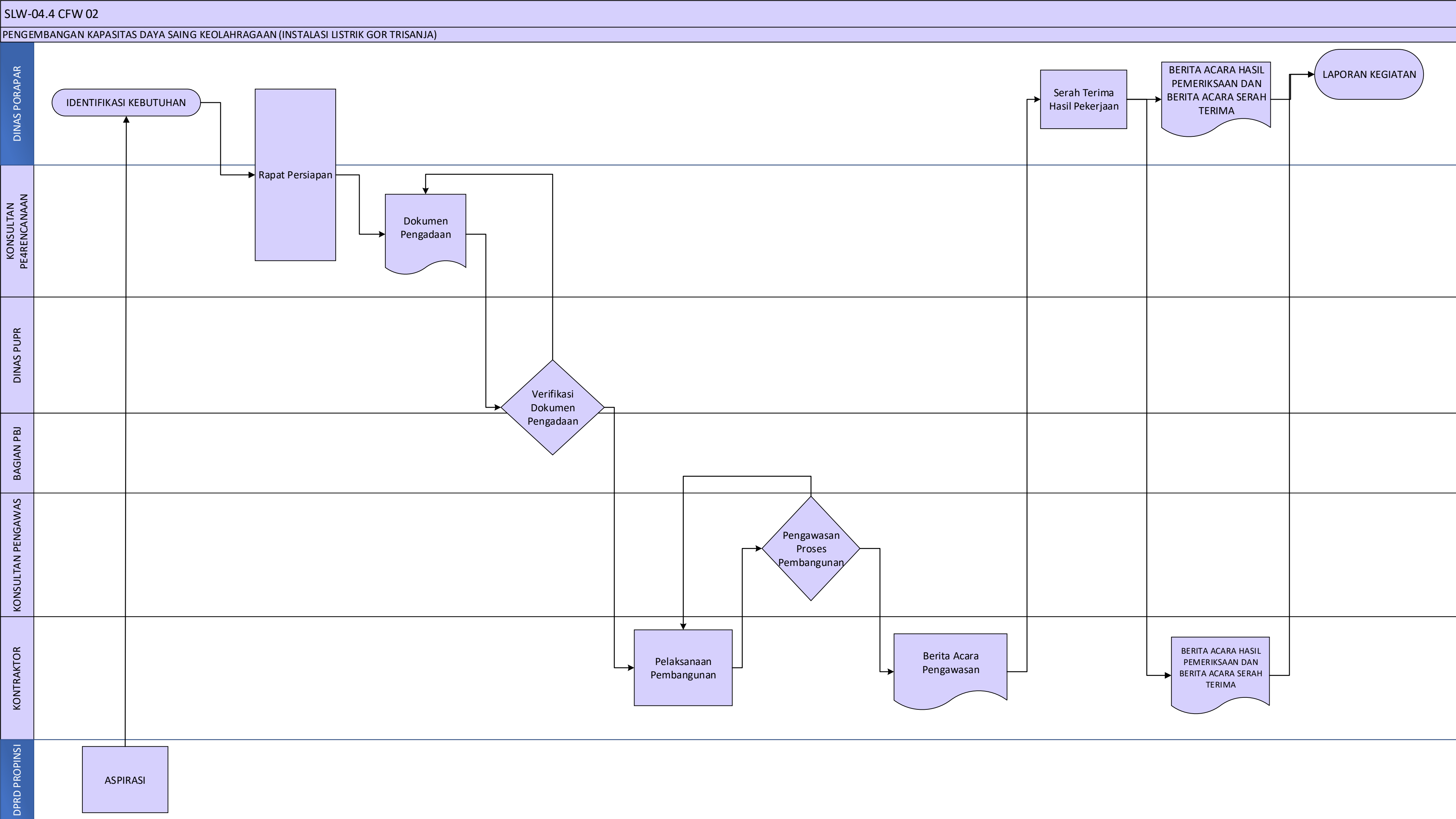
SLW-04.4

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMUDA

DINAS KPOP

SEMUA OPD

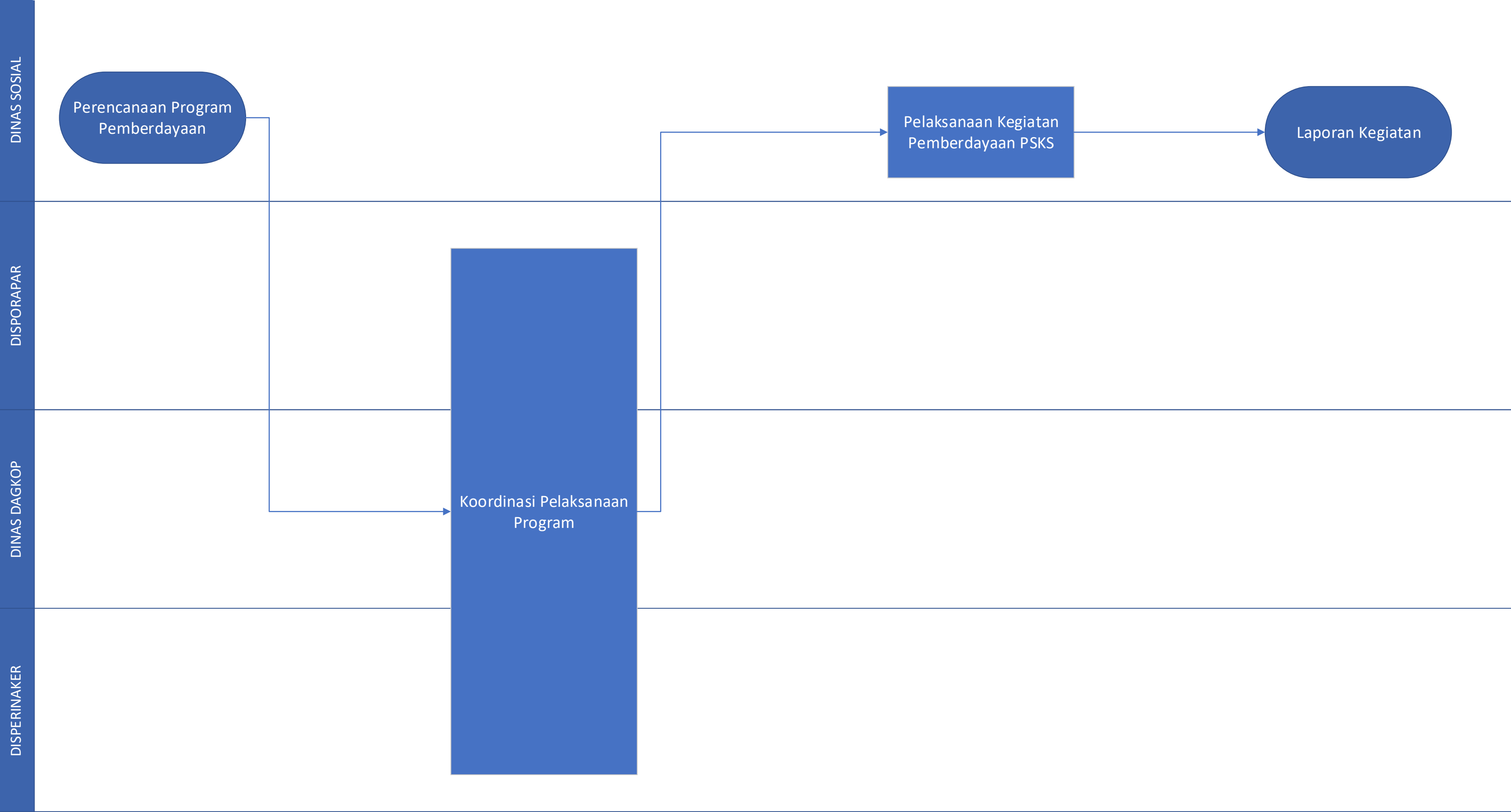




PETA RELASI

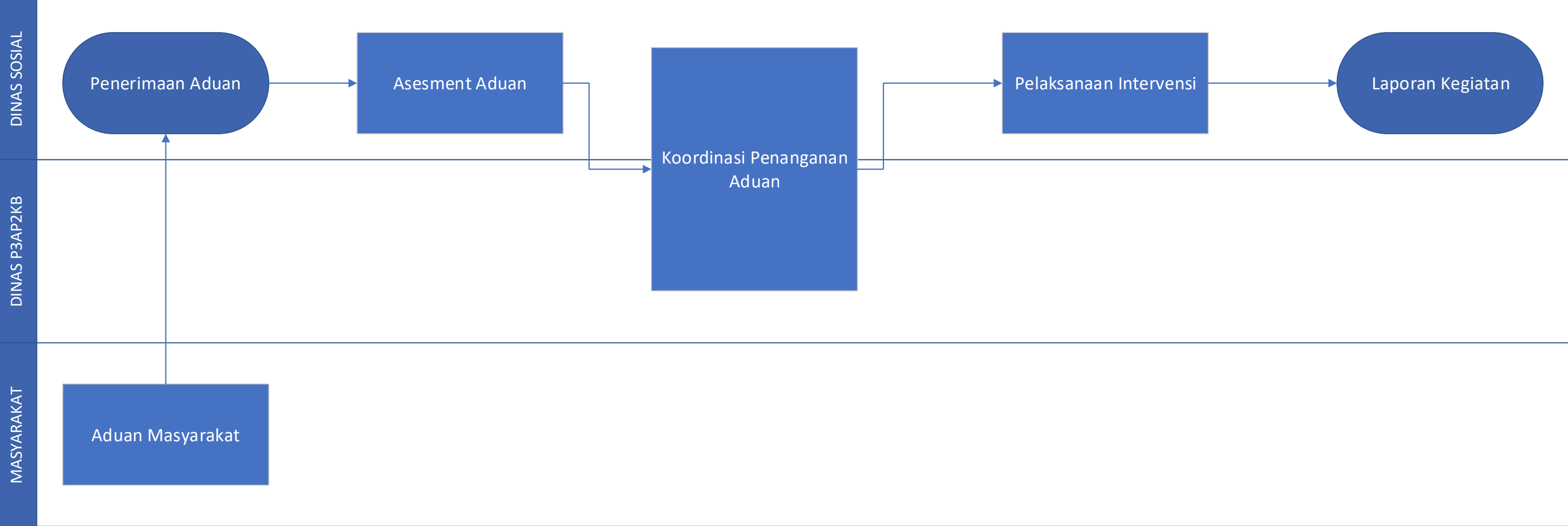
SLW-04.5
Peningkatan Layanan Kinerja Sosial, Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan





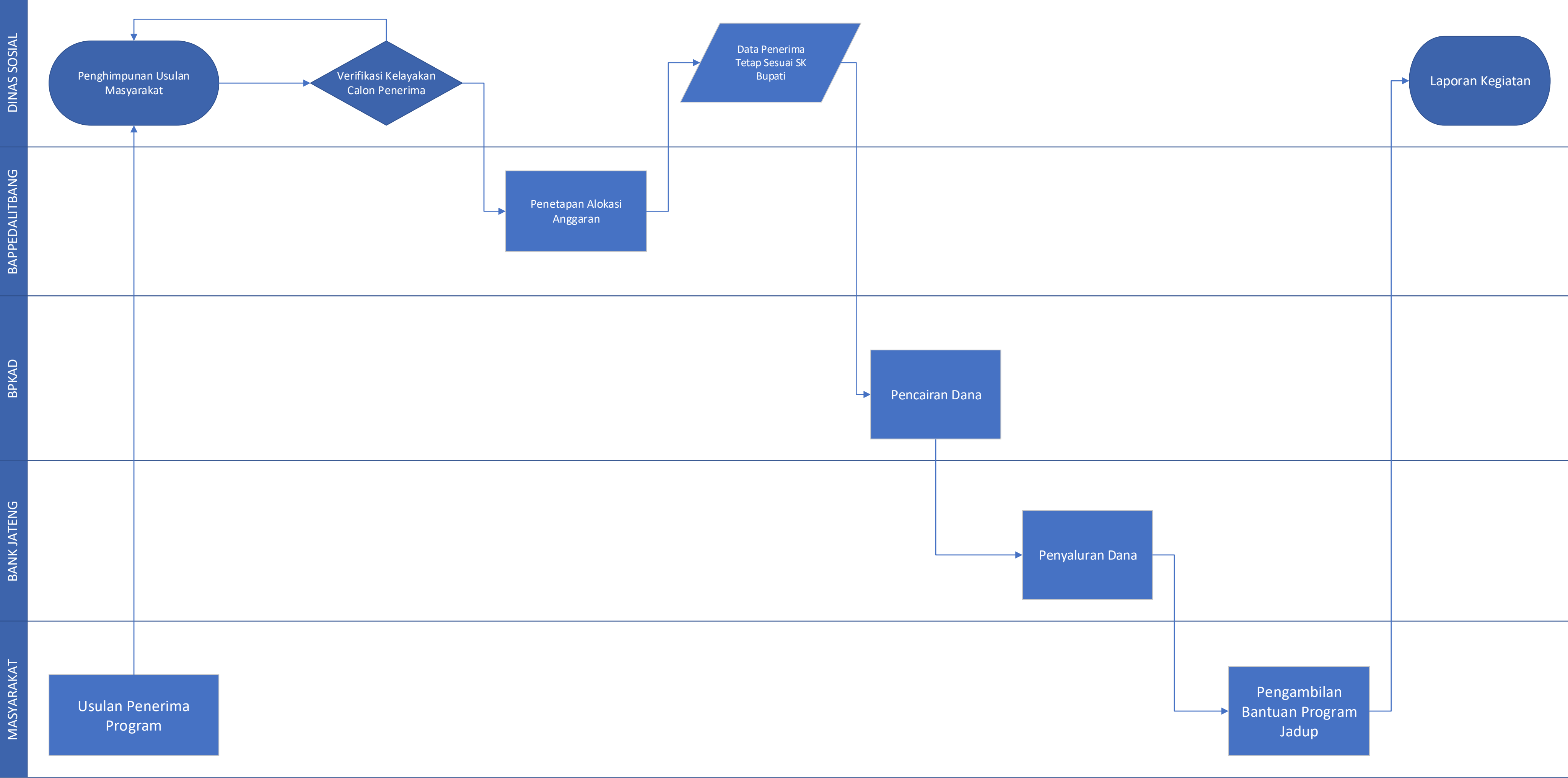
SLW-04.5 CFM 02

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota – Peningkatan Kemampuan Sumber Daya dan Penguatan Lembaga LK3



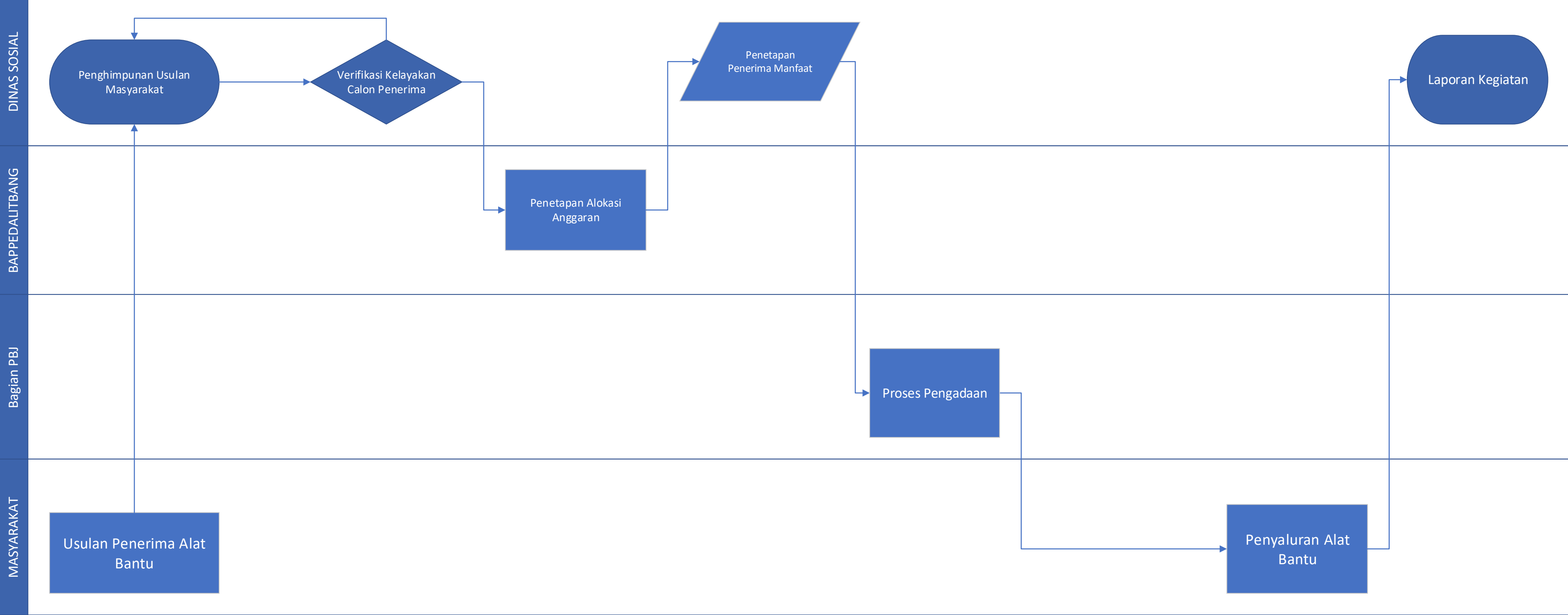
SLW-04.5 CFM 03

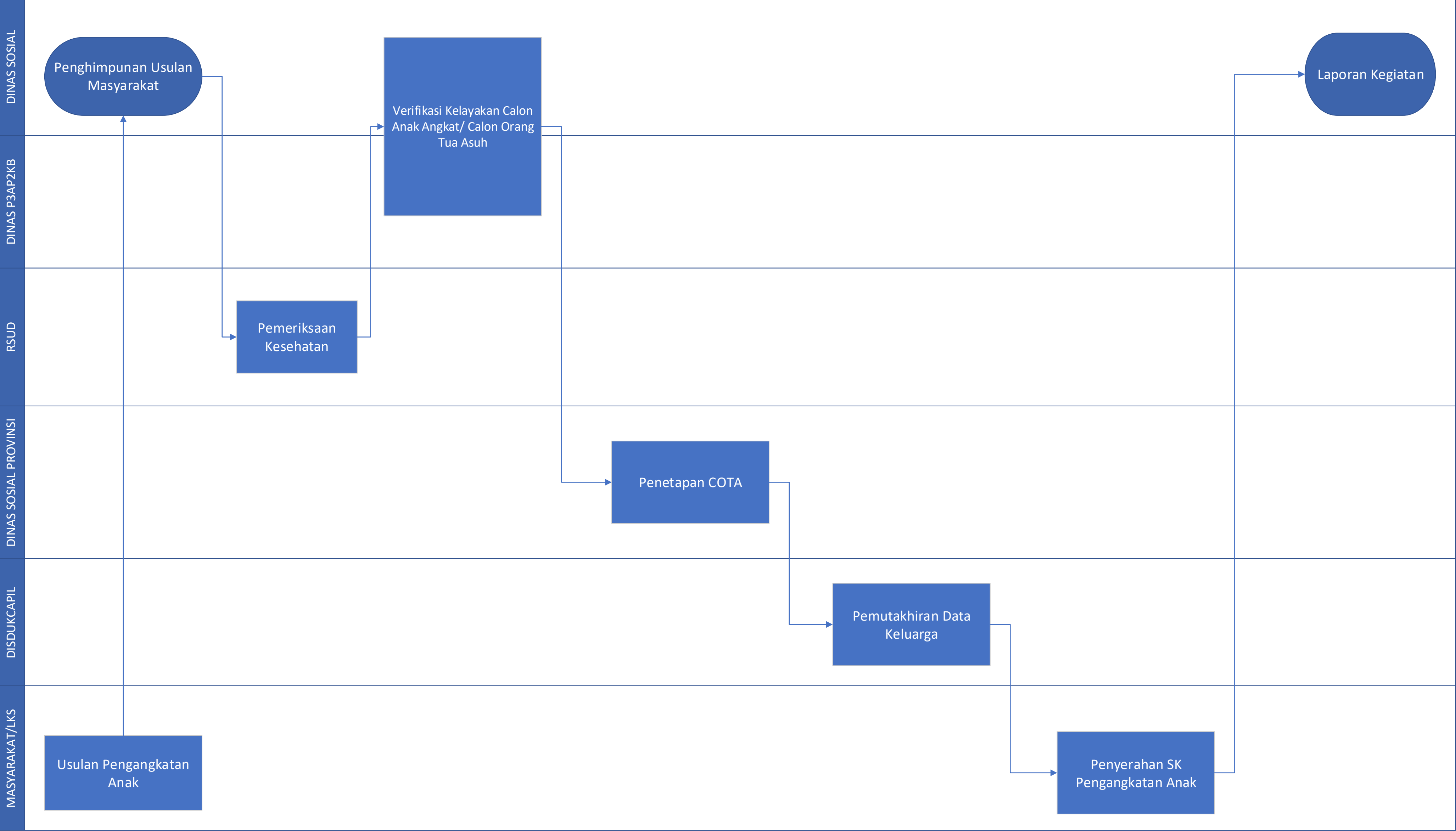
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Penyediaan Permakanan - Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia (Jadup)

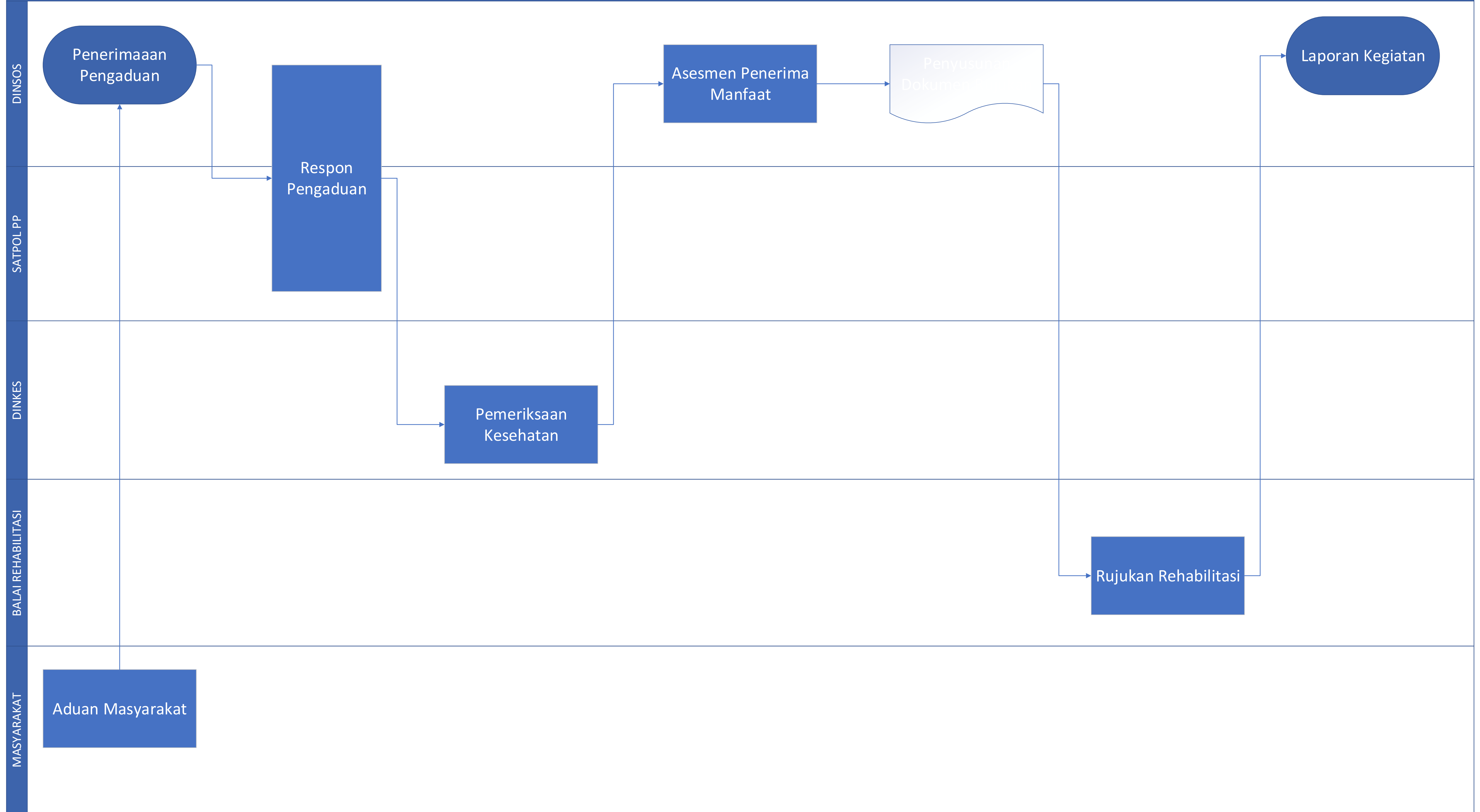


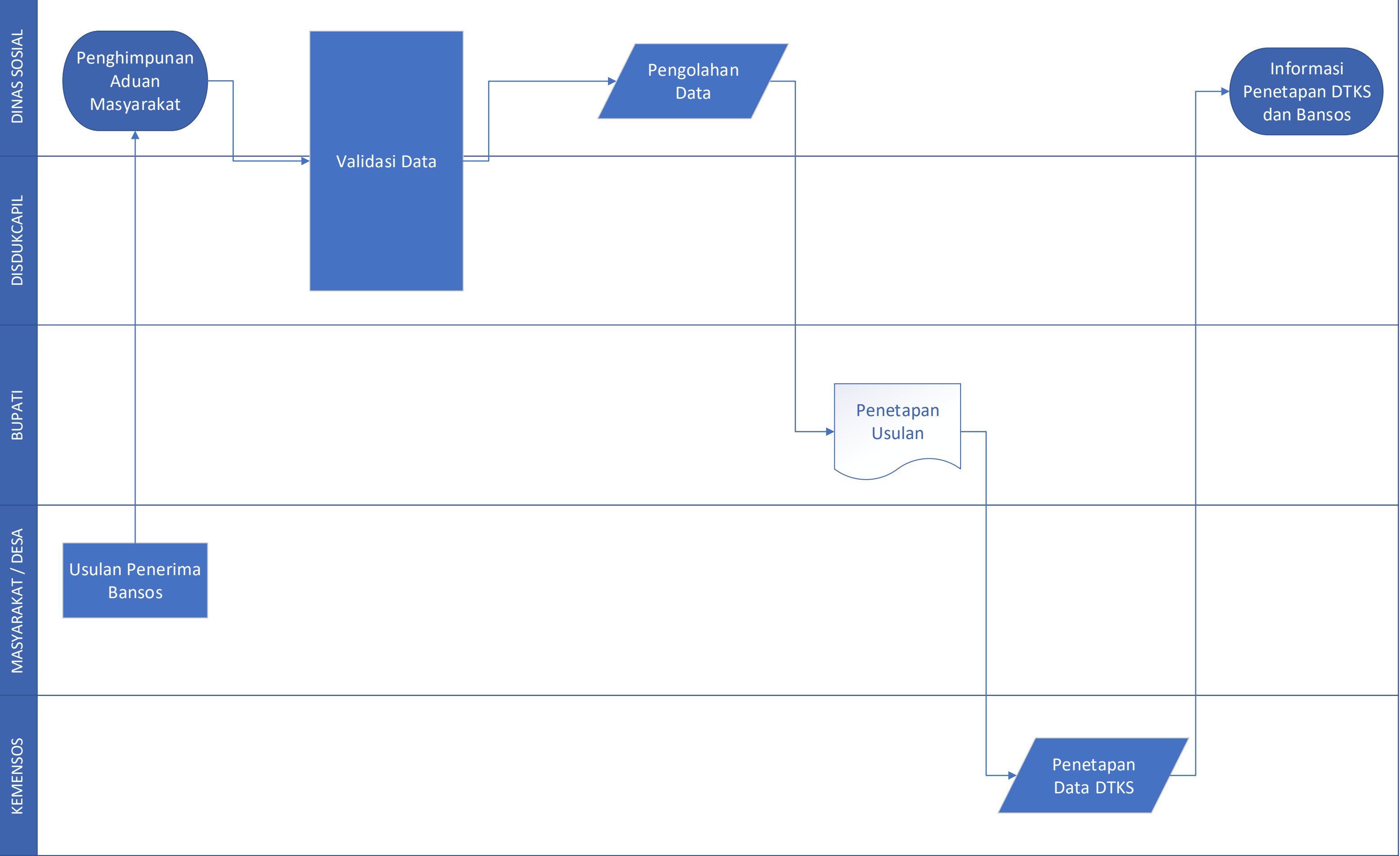
SLW-04.5 CFM 04

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Penyediaan Alat Bantu



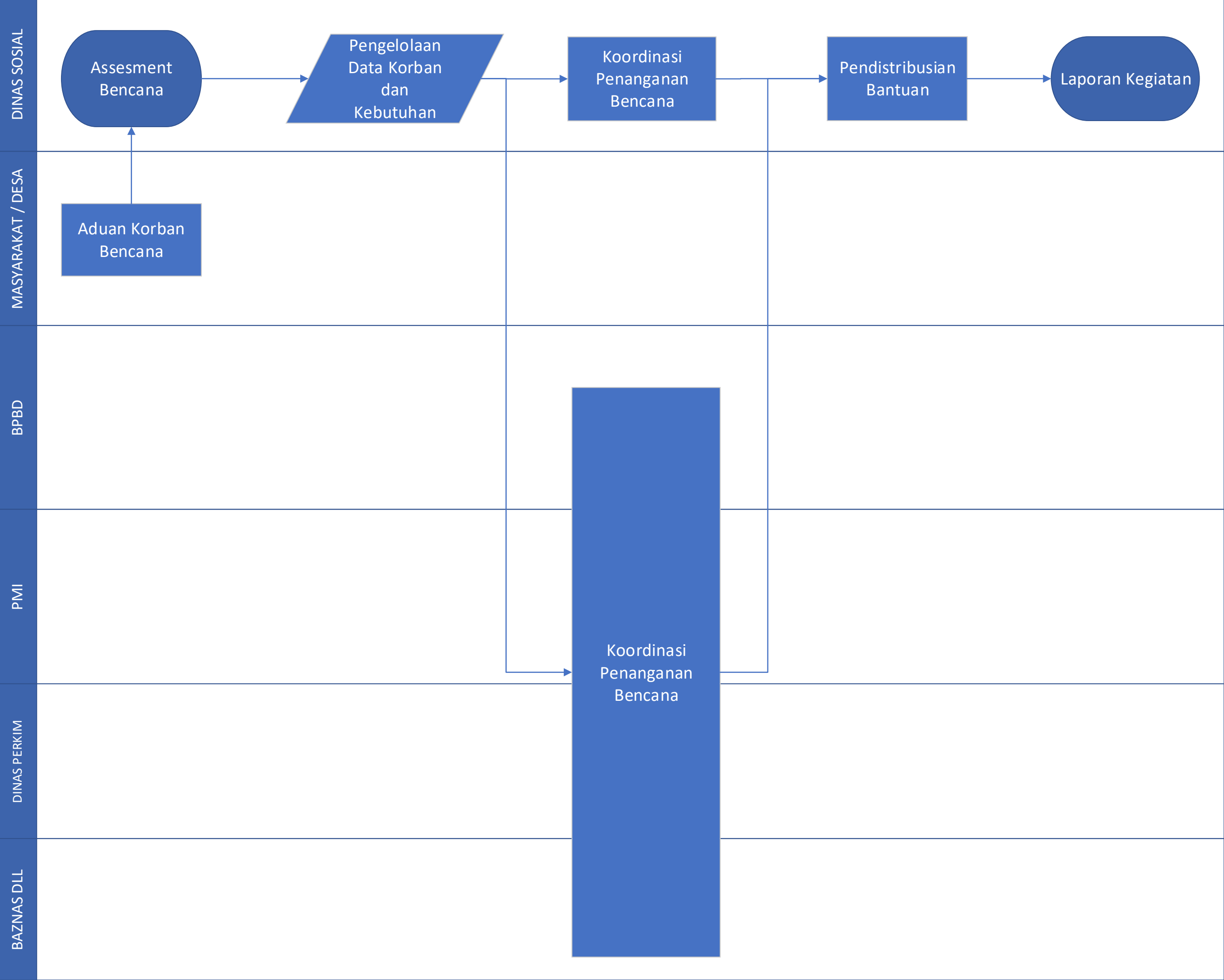






SLW-04.5 CFM 08

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Tegal - Penyediaan Makanan



PETA RELASI

SLW 04.6

PENINGKATAN APARATUR DESA , DESA MANDIRI, DAN DESA SWASEMBADA

DISPERMASDES

BAPPEDA & LITBANG

BPKAD

DPUPR

DISKIMTARU

DINSOS

DINKES

BKPSDM

BPJB

BAG.HUKUM

BAG.
ORGANISASI

DISPERMASDES
BAG..PEMERINTAHAN

KECAMATAN

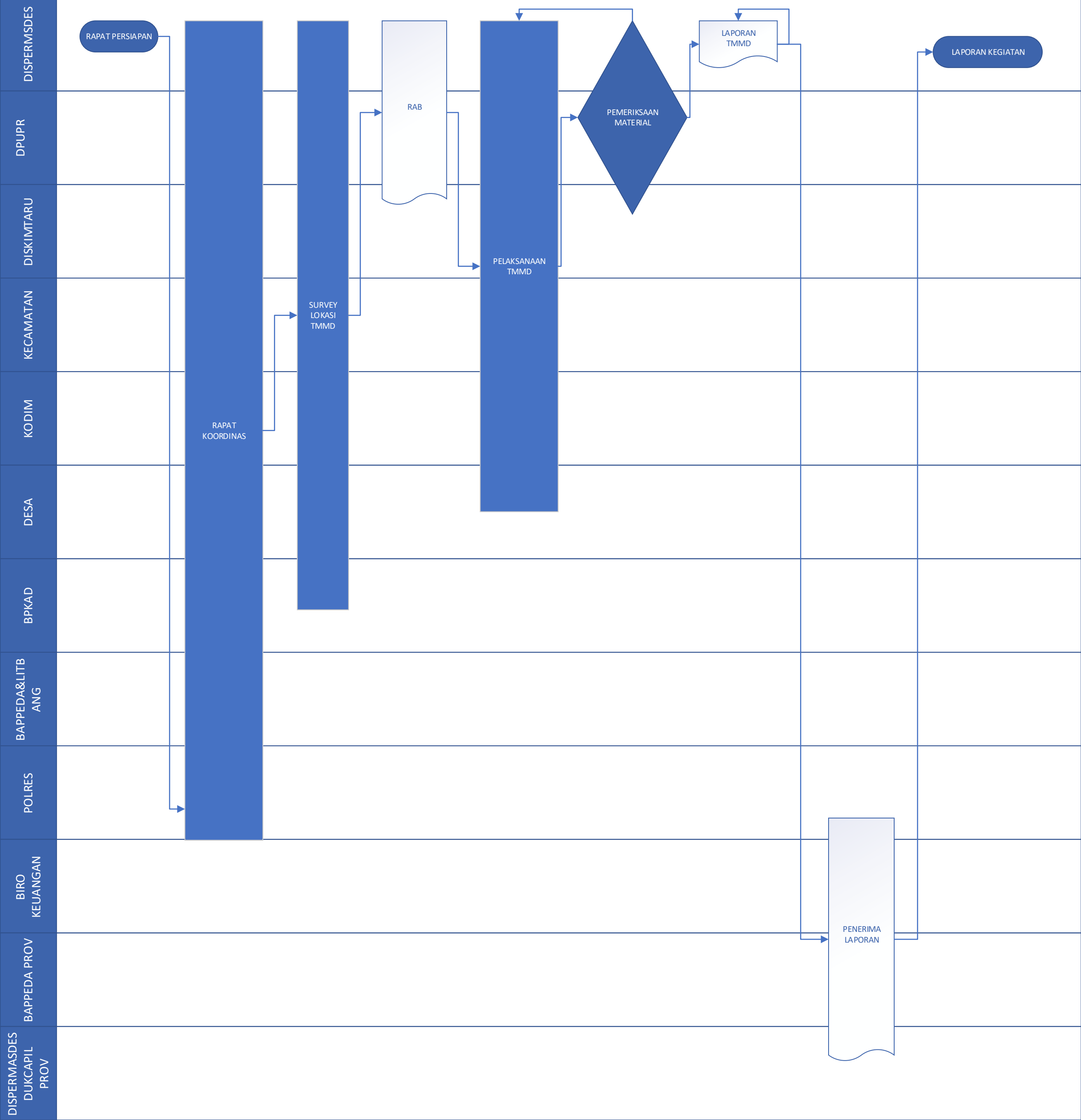
KEMENDAGRI

KEMENDES

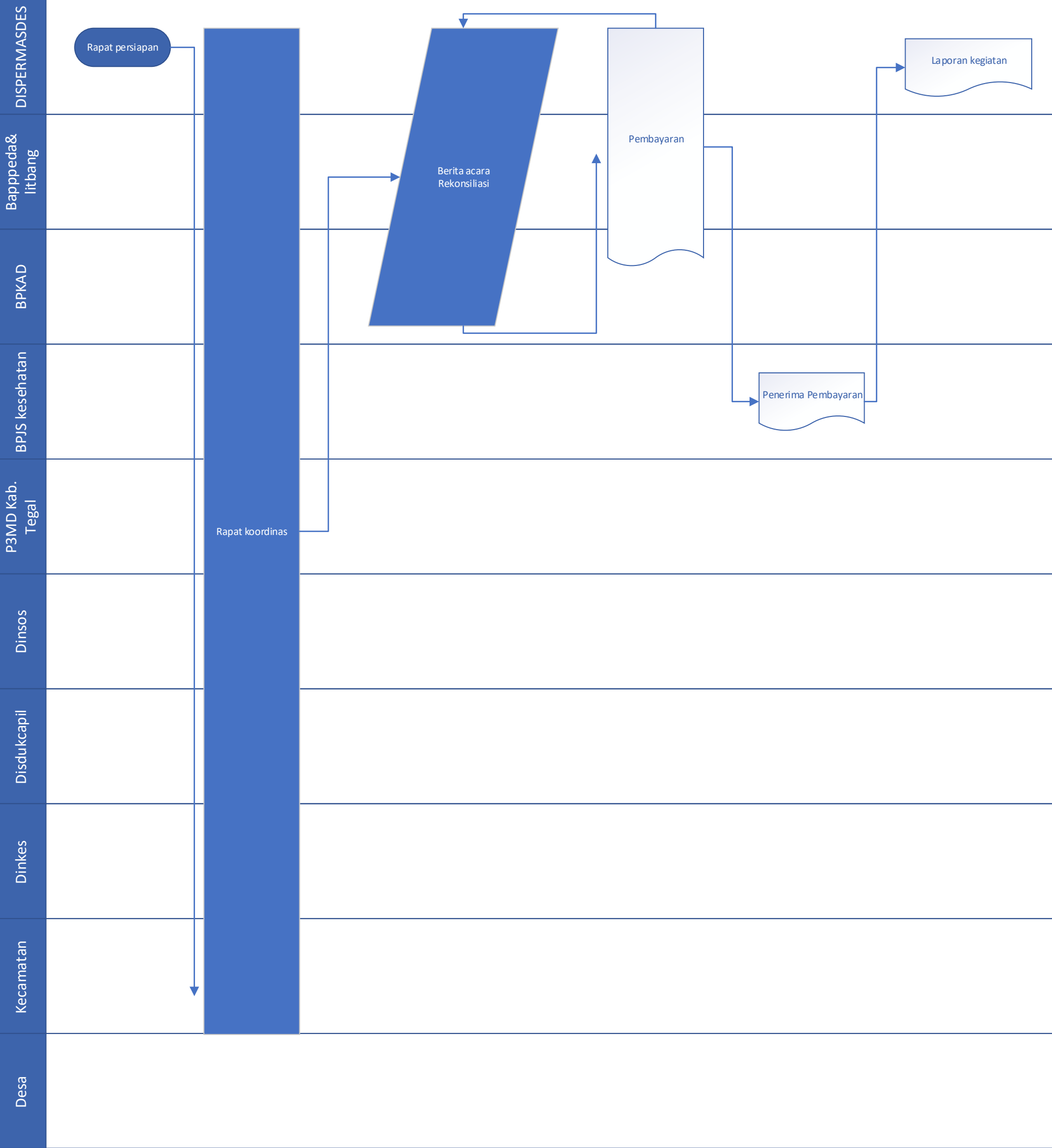
DISPERMASDES DUKCAPIL PROV.
JATENG

SLW 04.6 CFM 01

FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA



PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN KAB/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA



PETA RELASI

SLW-04.7

Peningkatan Nilai Investasi

DPMPTSP

DINAS PERINTRANSNAKER

DINAS PUPR

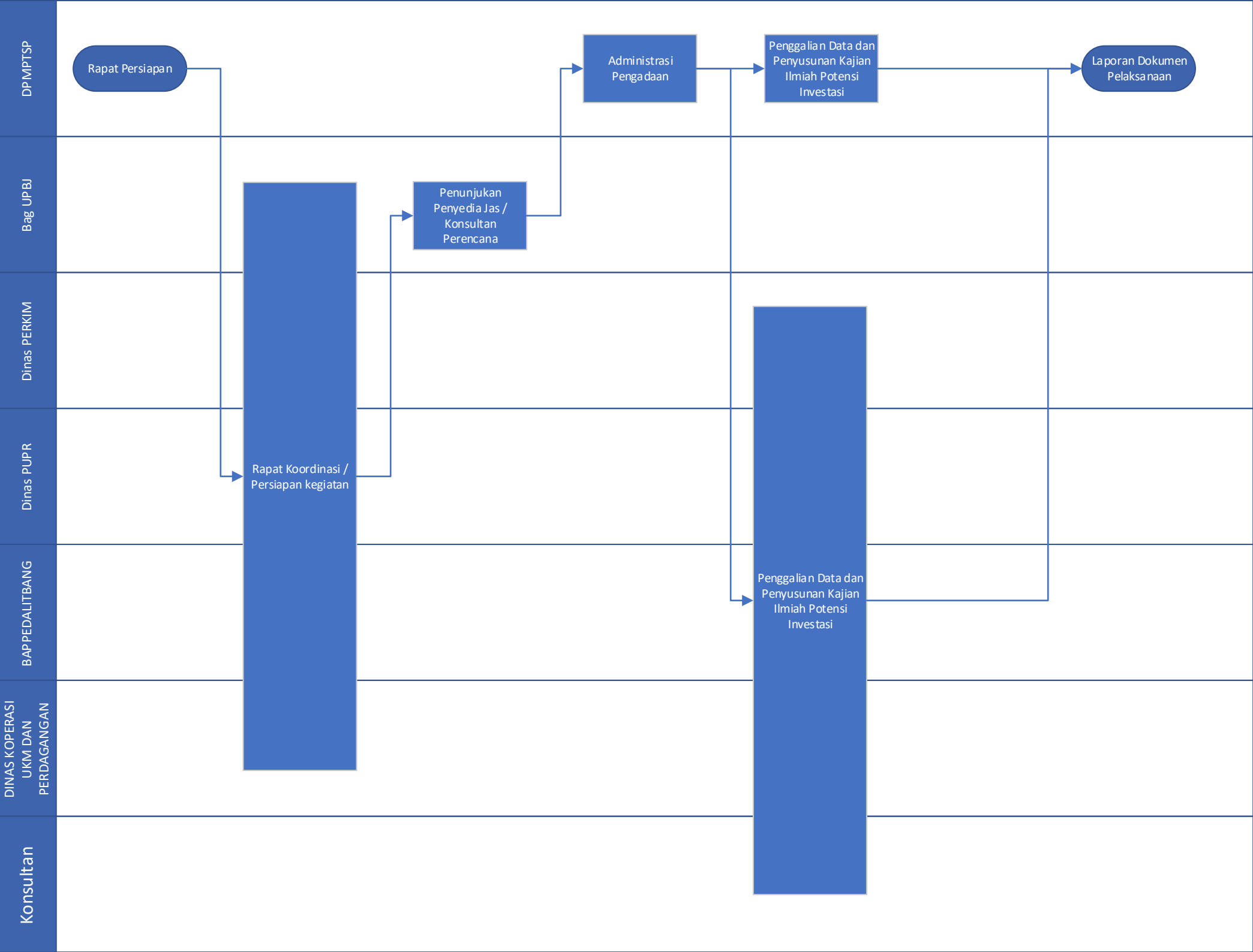
DINAS KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN

DINAS PERKIM

BAPPEDALITBANG

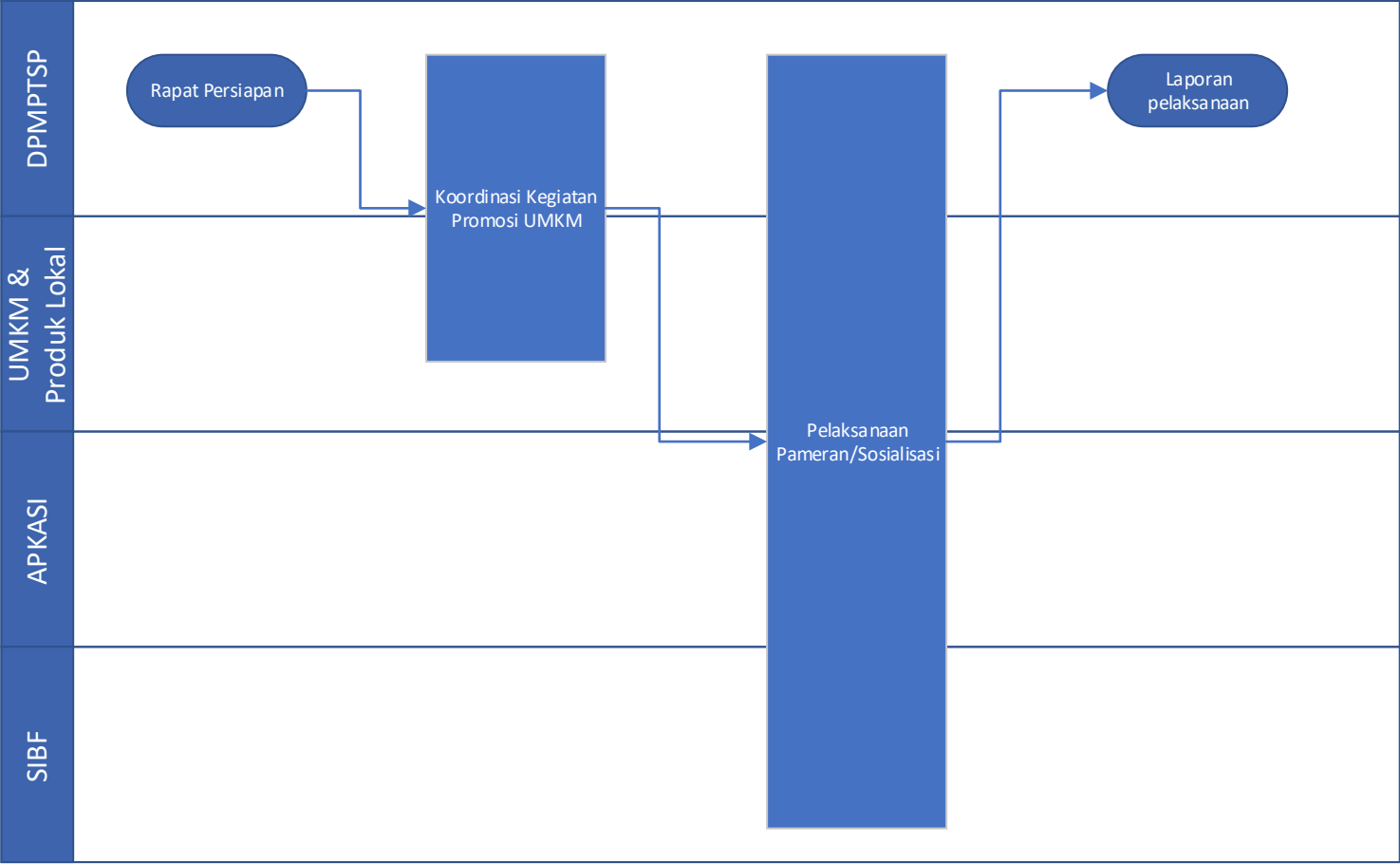
DINAS PORAPAR

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota



SLW-04.7 CFM 02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

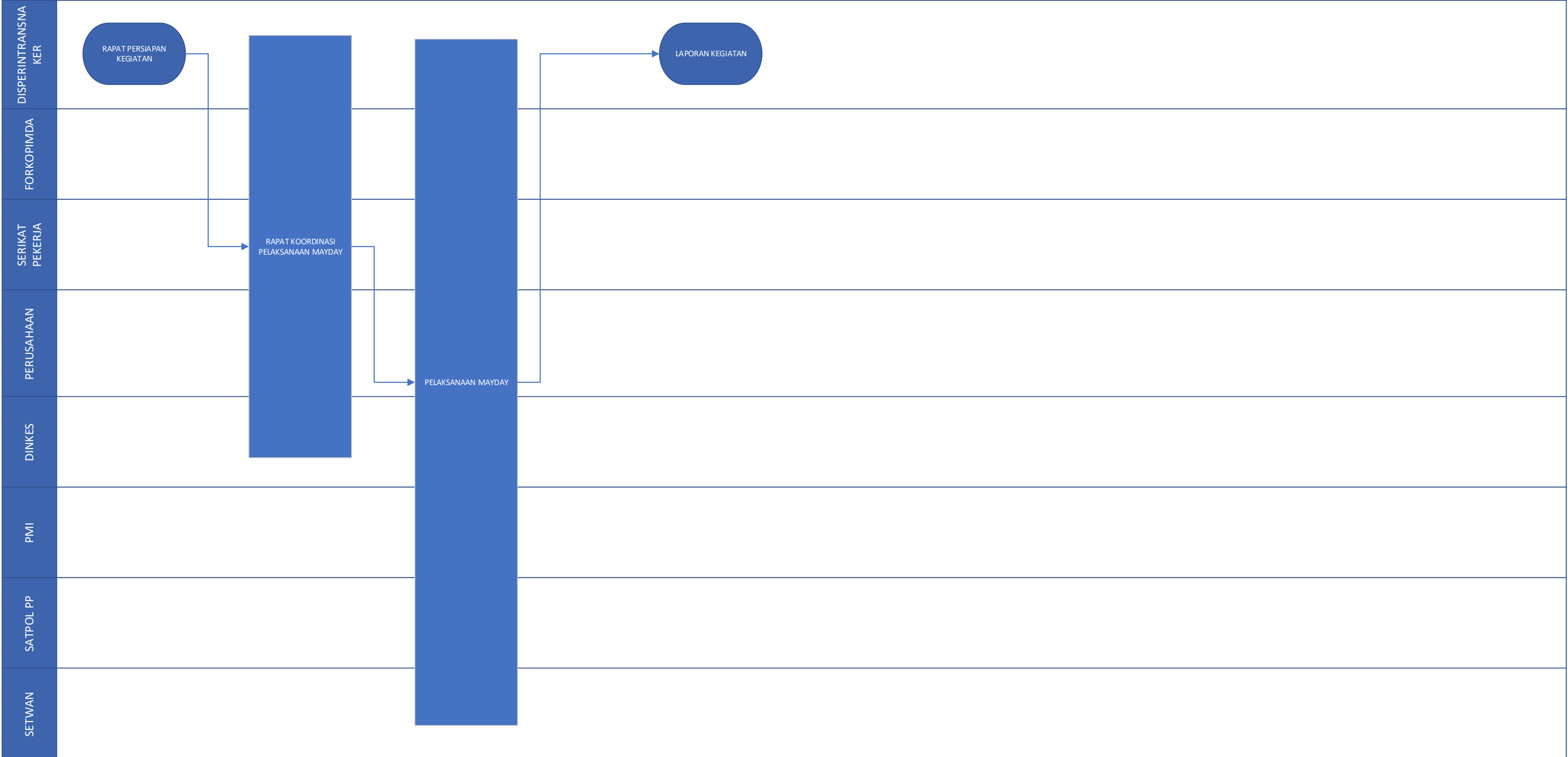


PETA RELASI

SLW-04.8
Peningkatan Penekanan Laju Tingkat Pengangguran

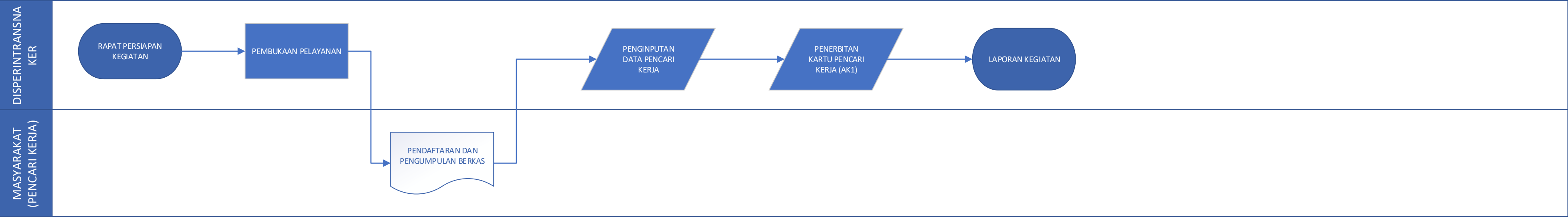


Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi (MAY DAY)



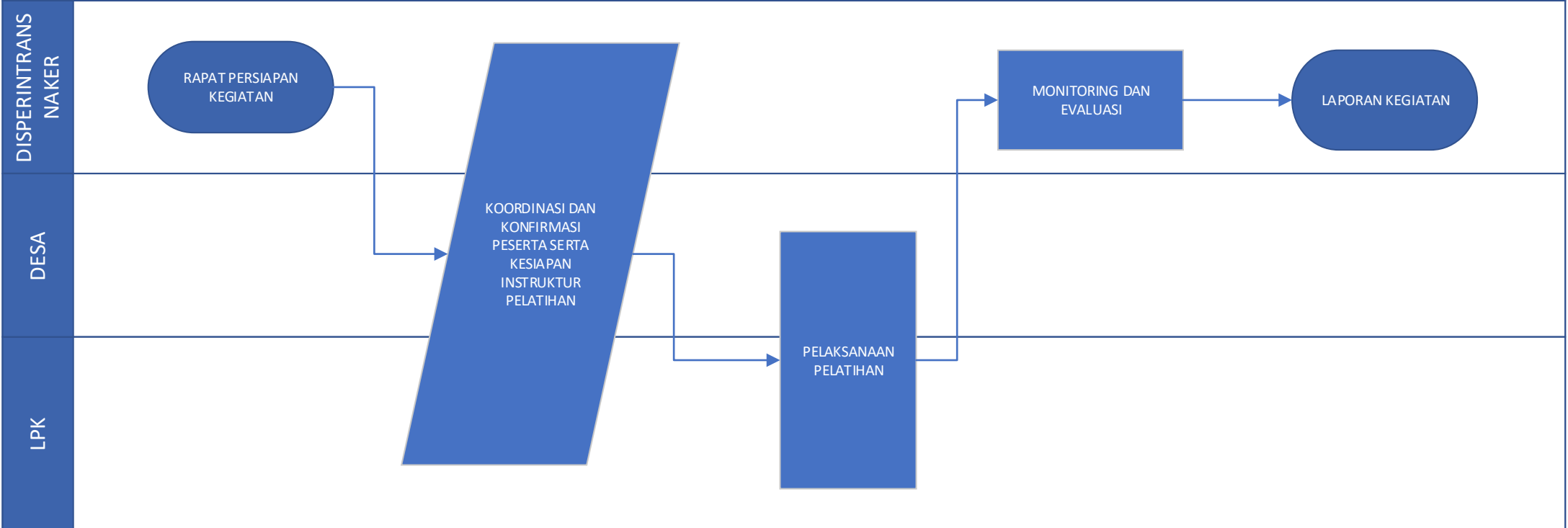
SLW-04.8 CFM 02

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Pembuatan AK1)



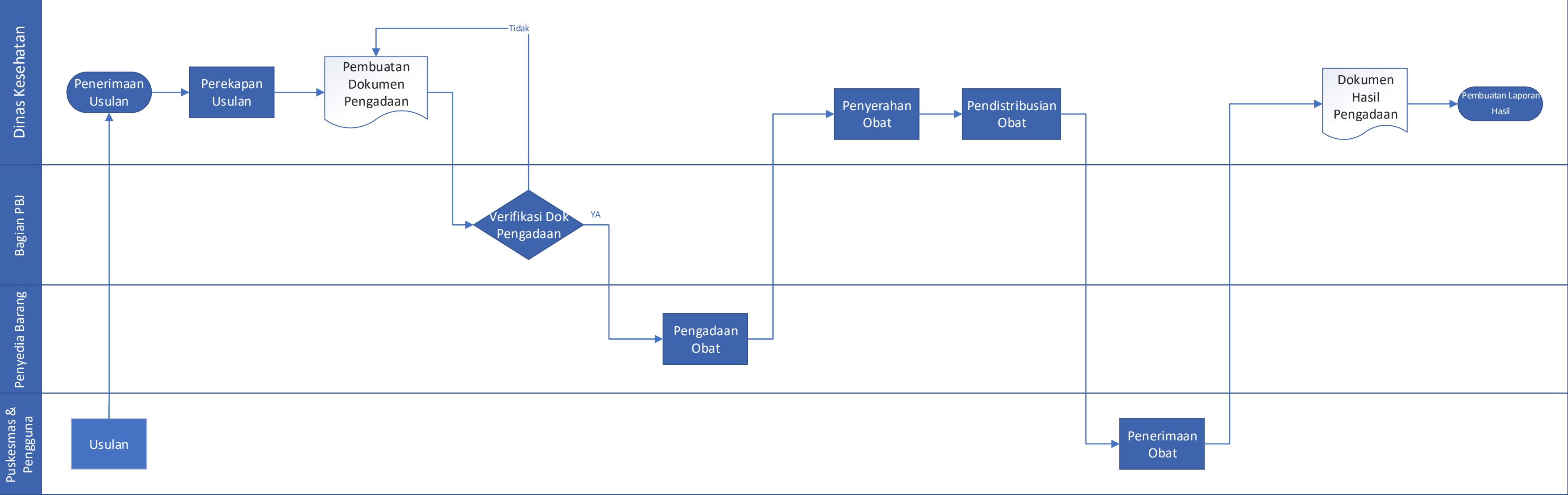
SLW-04.8 CFM 03

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi



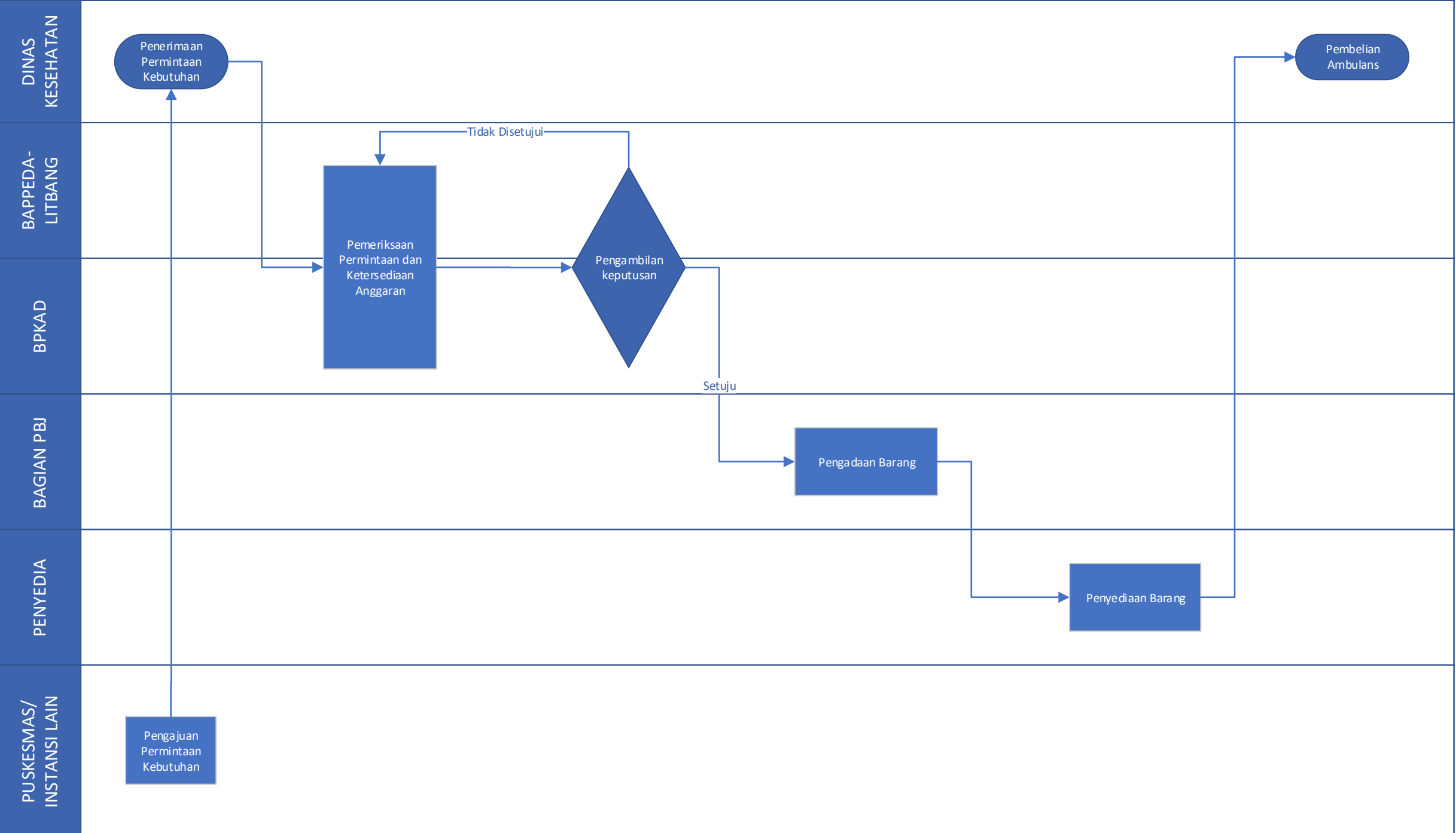
SLW-04.9 CFM 01

Pengadaan Obat dan Vaksin

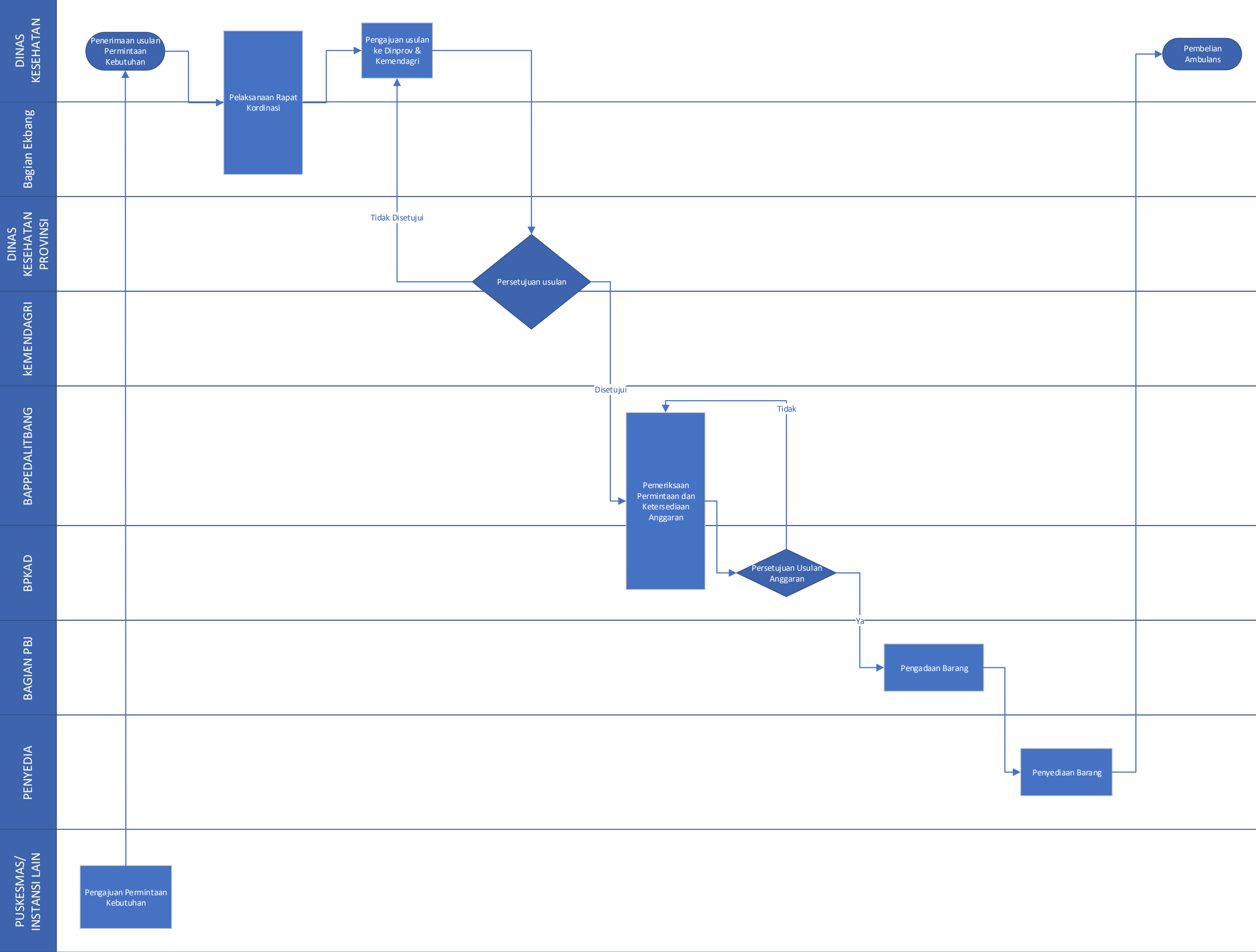


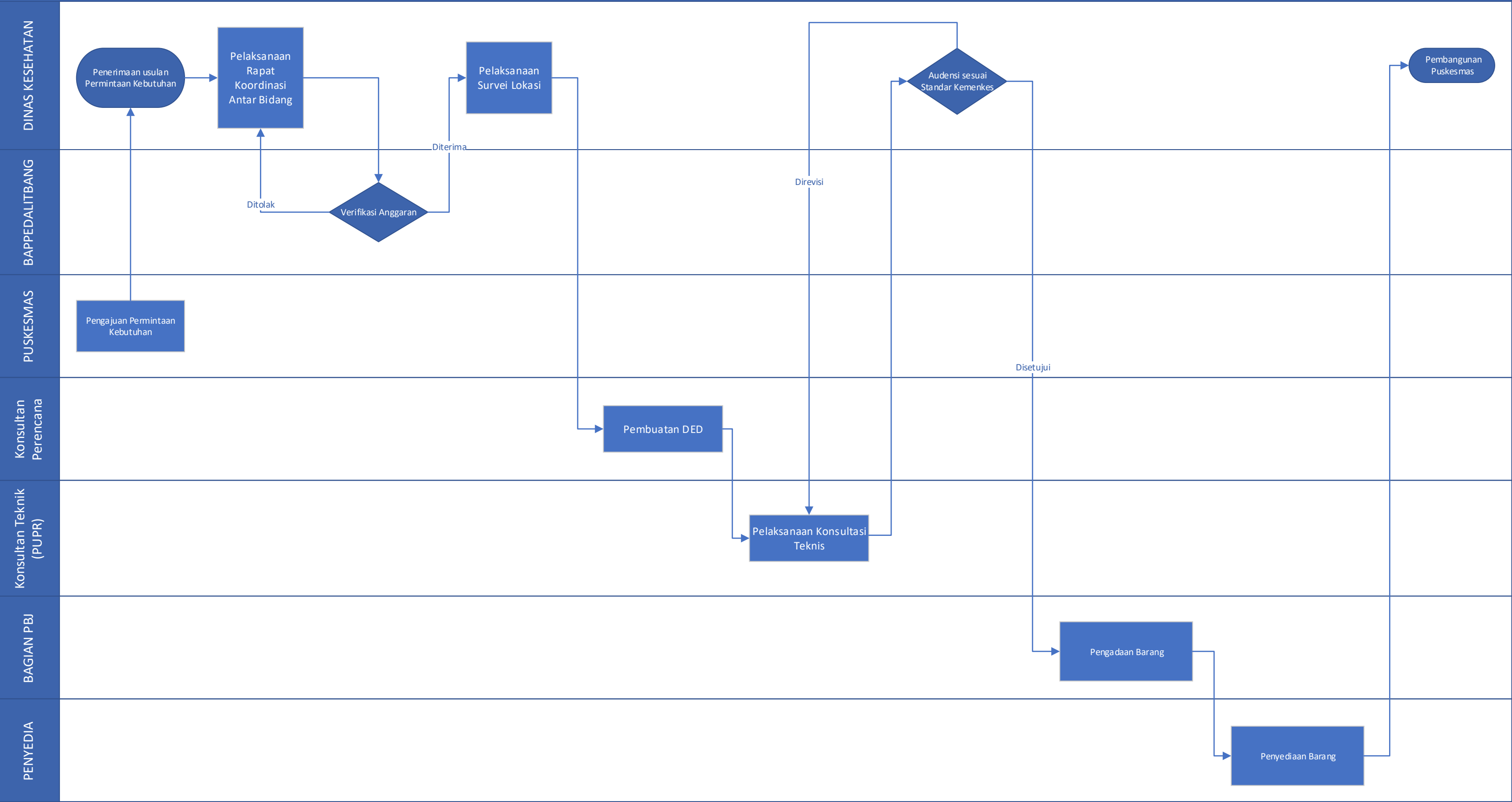
SLW-04.9 CFM 02

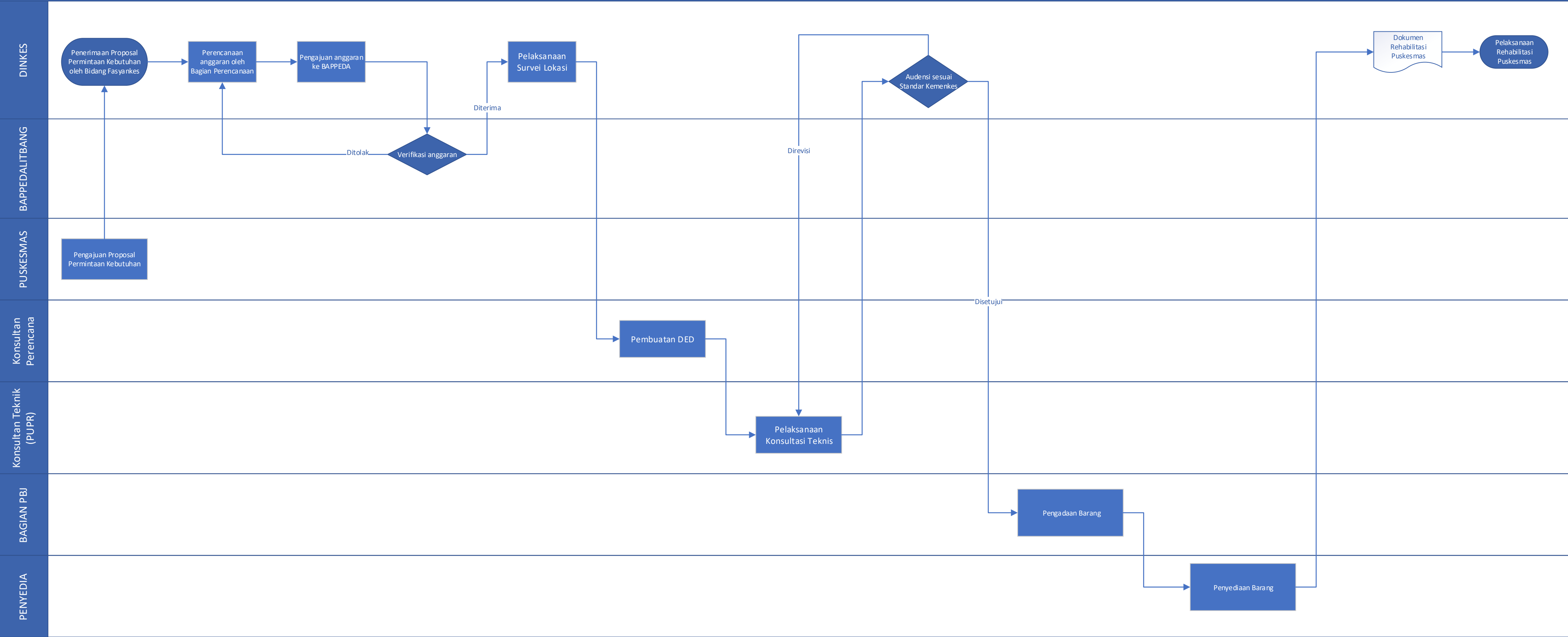
Pengadaan Ambulans Menggunakan Dana DAU



Pengadaan Ambulans Menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT)

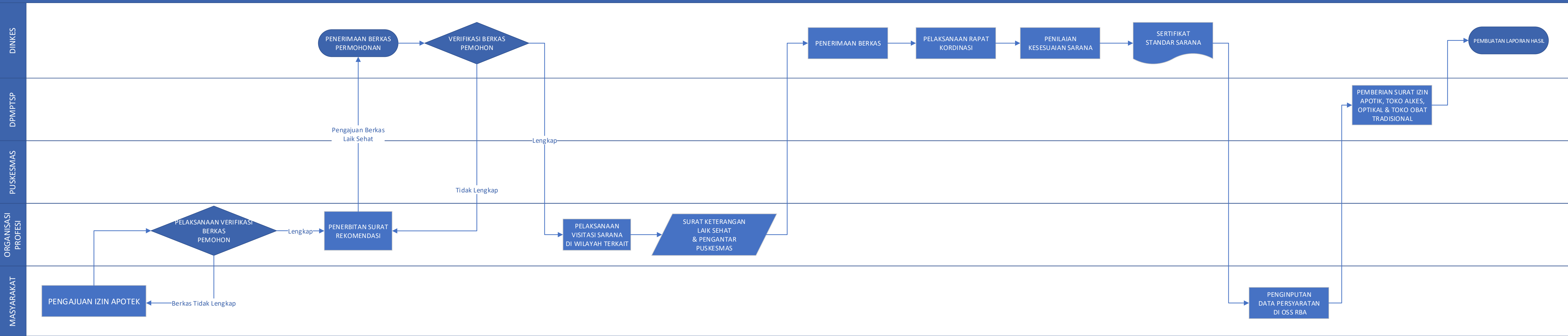


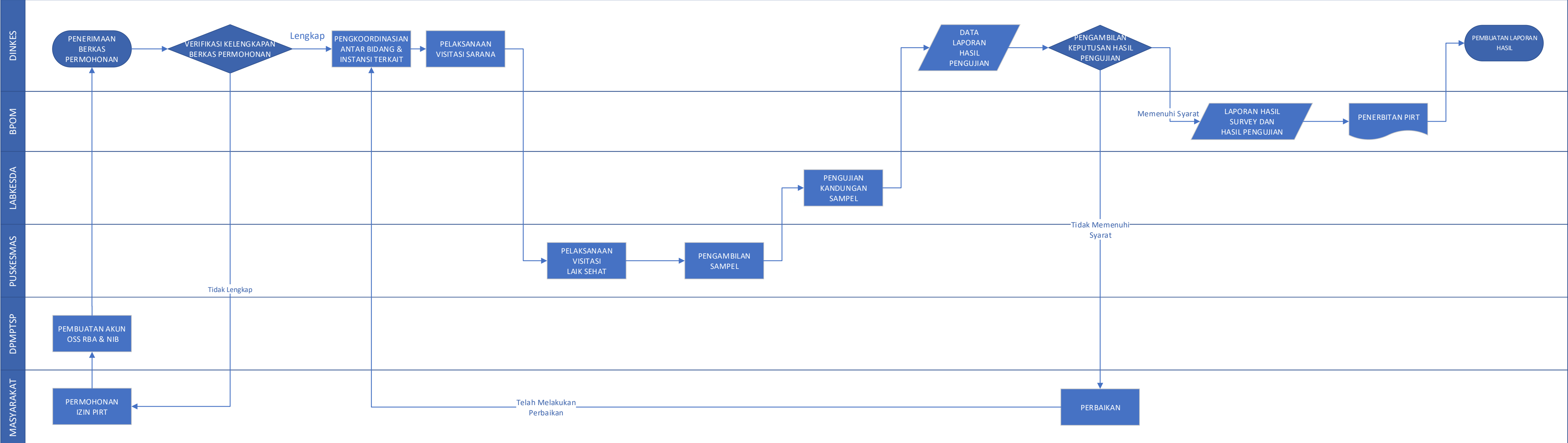




SLW-04.9 CFM 06

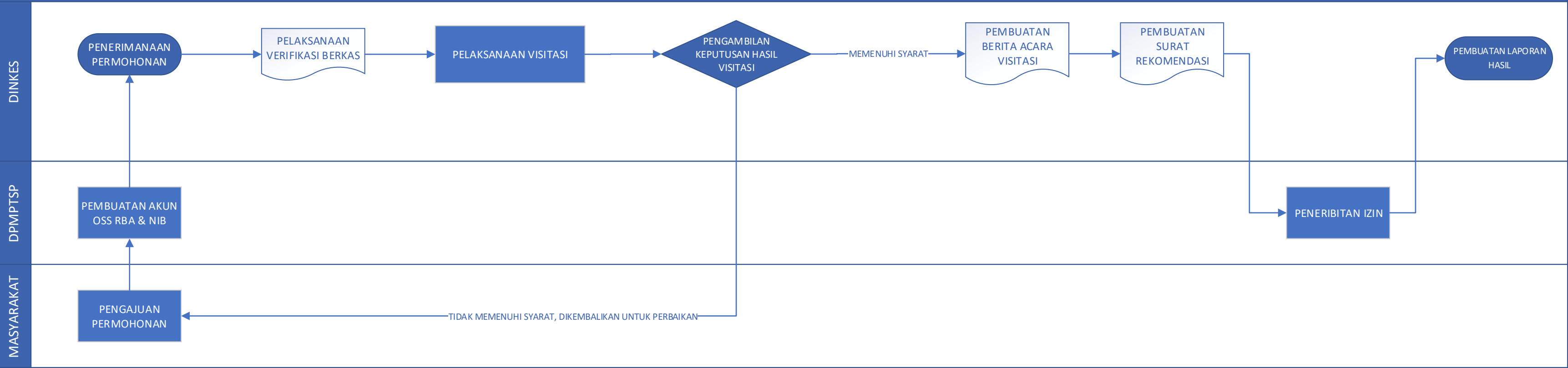
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional

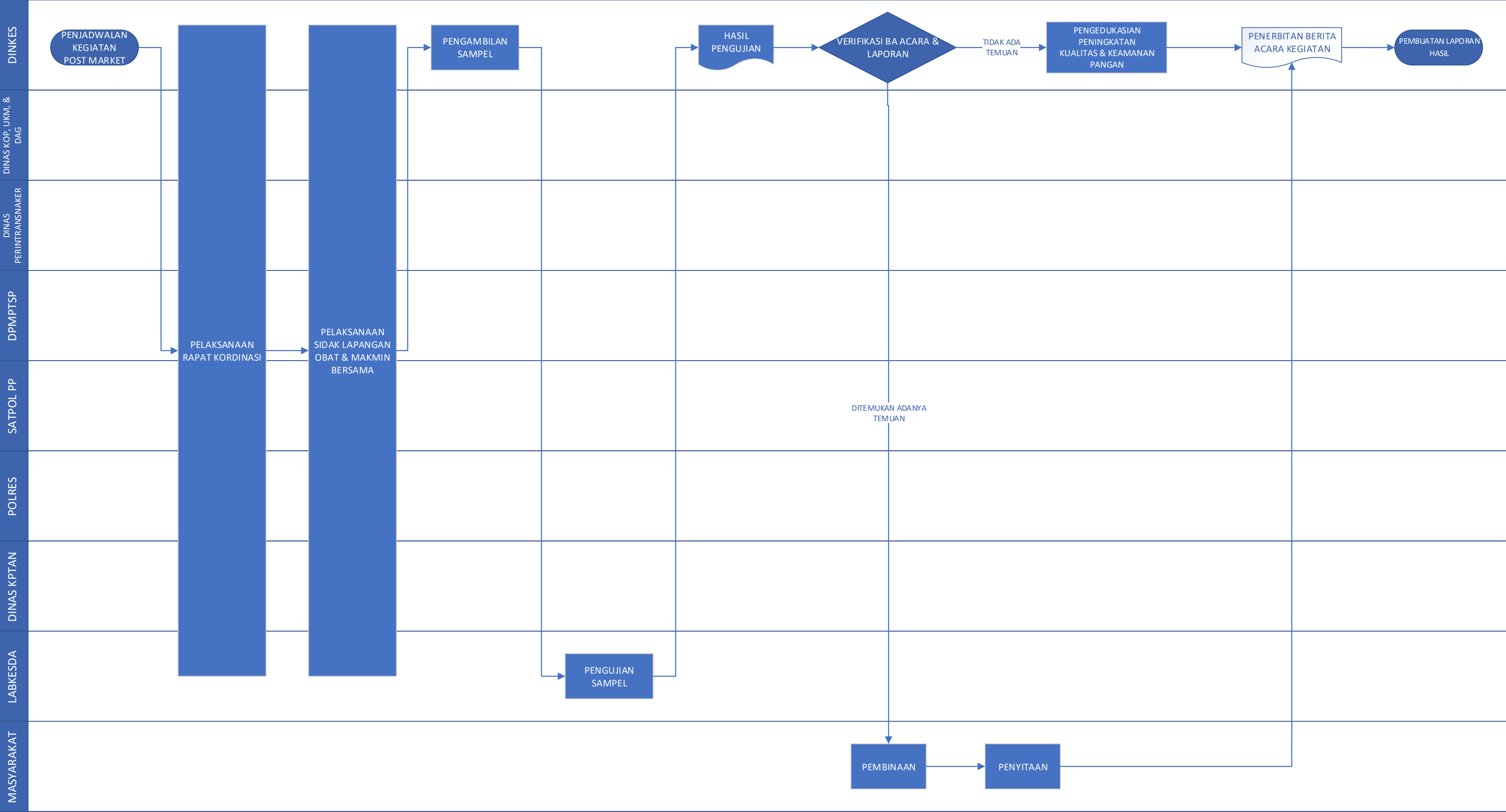




SLW-04.9 CFM 08

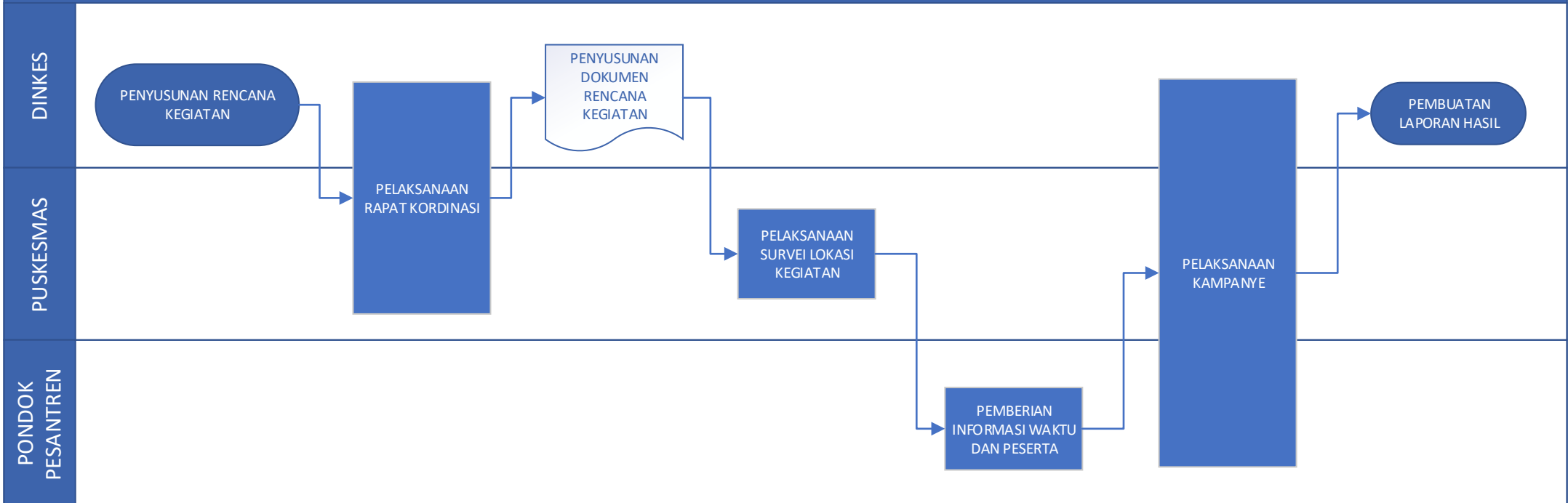
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga





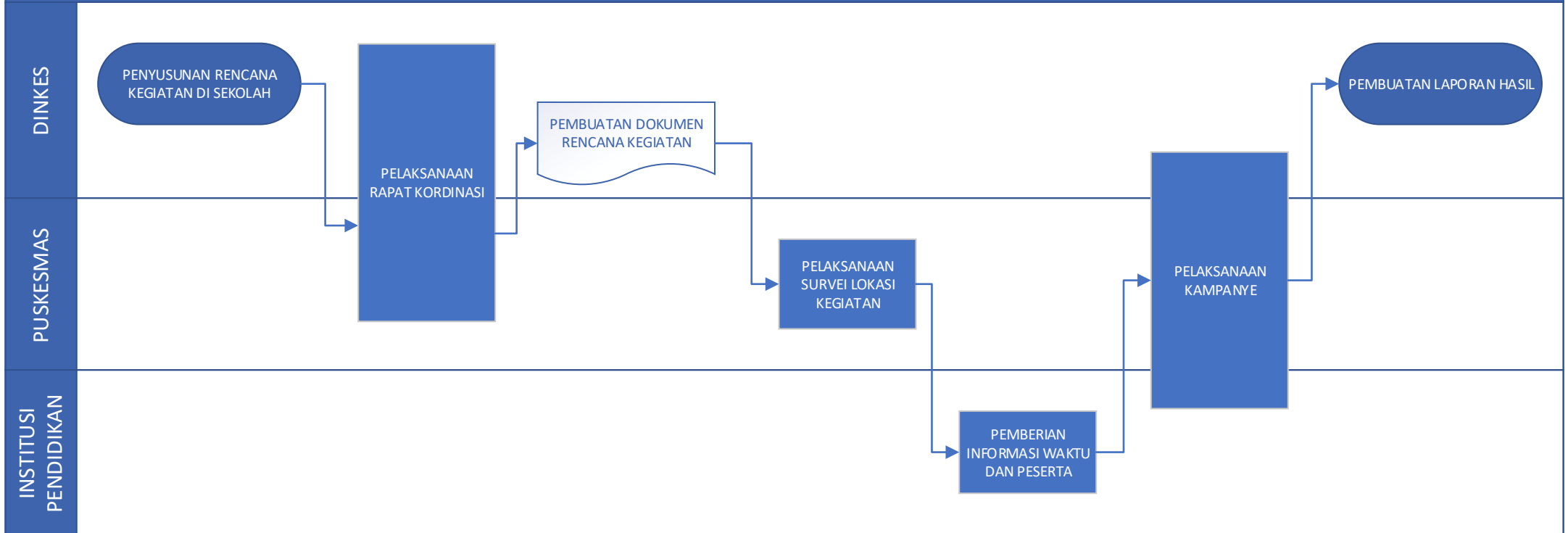
SLW-04.9 CFM 10

KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PONDOK PESANTREN



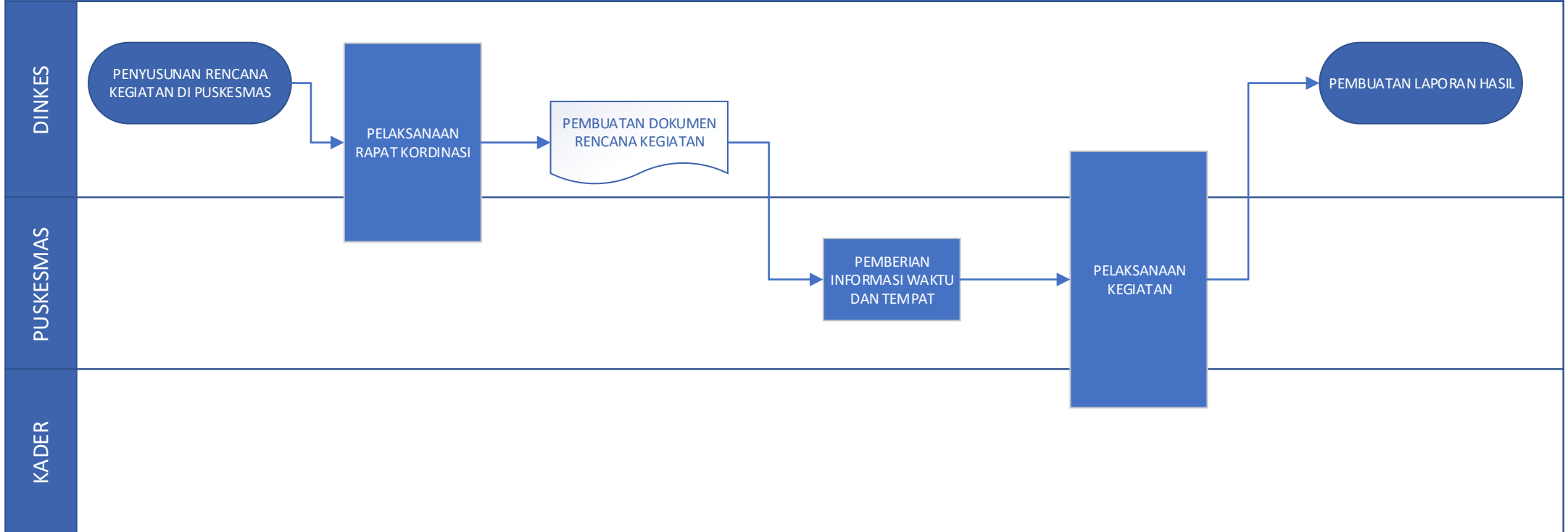
SLW-04.9 CFM 11

KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI INSTITUSI PENDIDIKAN



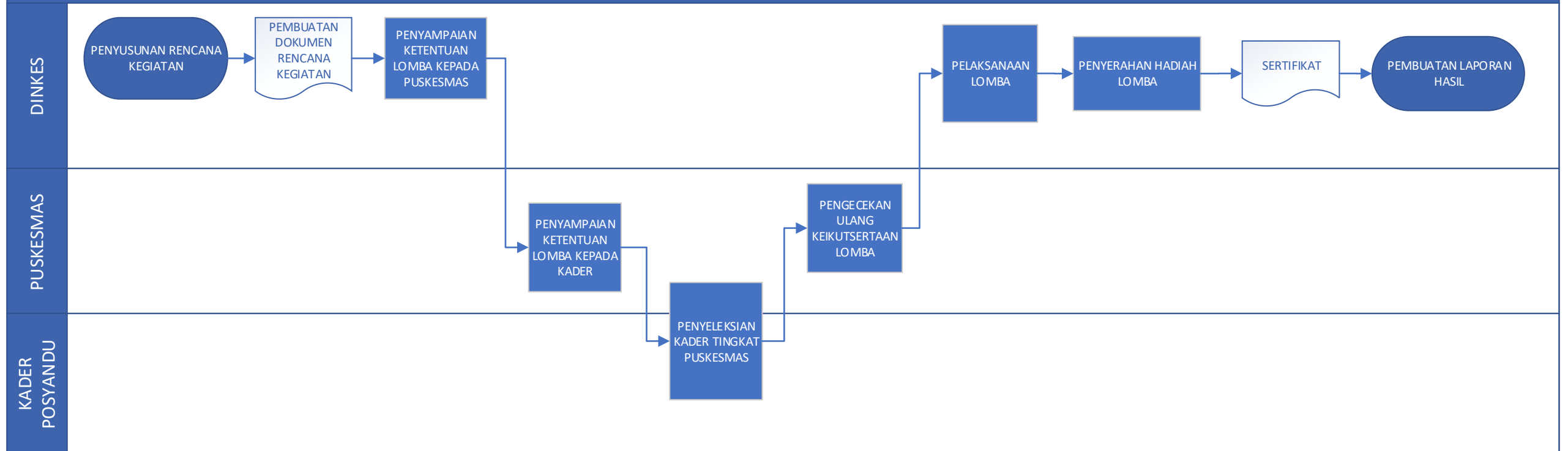
SLW-04.9 CFM 12

REFRESHING KADER KESEHATAN



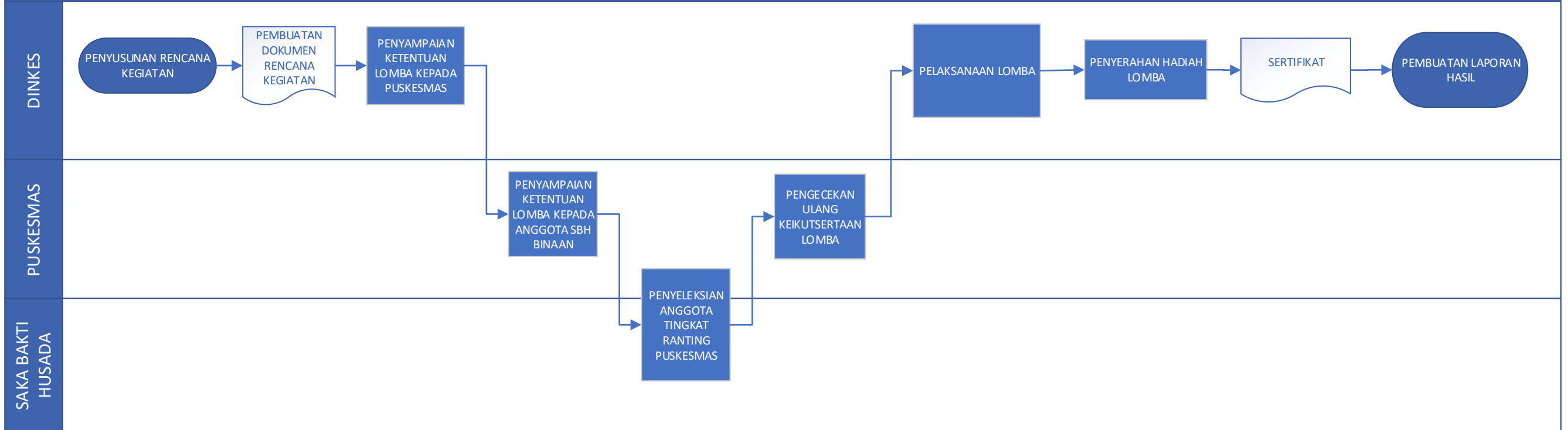
SLW-04.9 CFM 13

LOMBA CERDAS CERMAT KADER POSYANDU TINGKAT KABUPATEN TEGAL



SLW-04.9 CFM 14

LOMBA CERDAS CERMAT SAKA BAKTI HUSADA TINGKAT KABUPATEN TEGAL



SLW-04.9 CFM 15

LOMBA FILM KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN TEGAL

DINKES

PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN

PEMBUATAN
DOKUMEN RENCANA
KEGIATAN

PENYAMPAIAN
KETENTUAN
LOMBA KEPADA
PUSKESMAS

PERSIAPAN
SAMPAI
PRODUKSI FILM

DOKUMEN FILM

PENGUMPULAN FILM

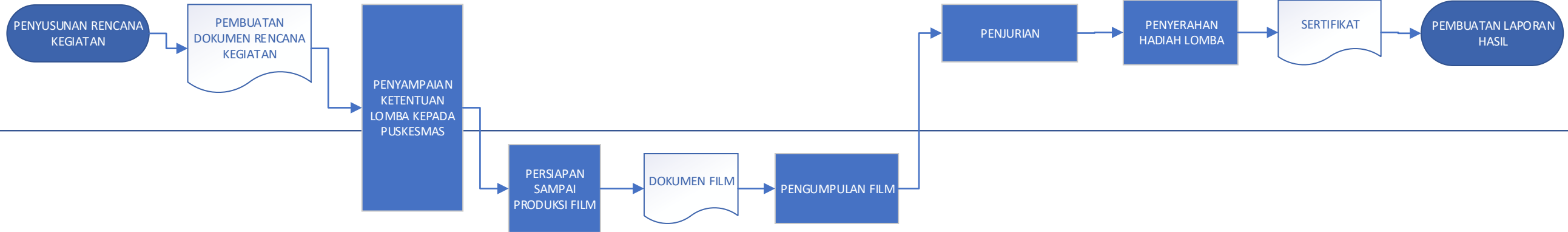
PENJURIAN

PENYERAHAN
HADIAH LOMBA

SERTIFIKAT

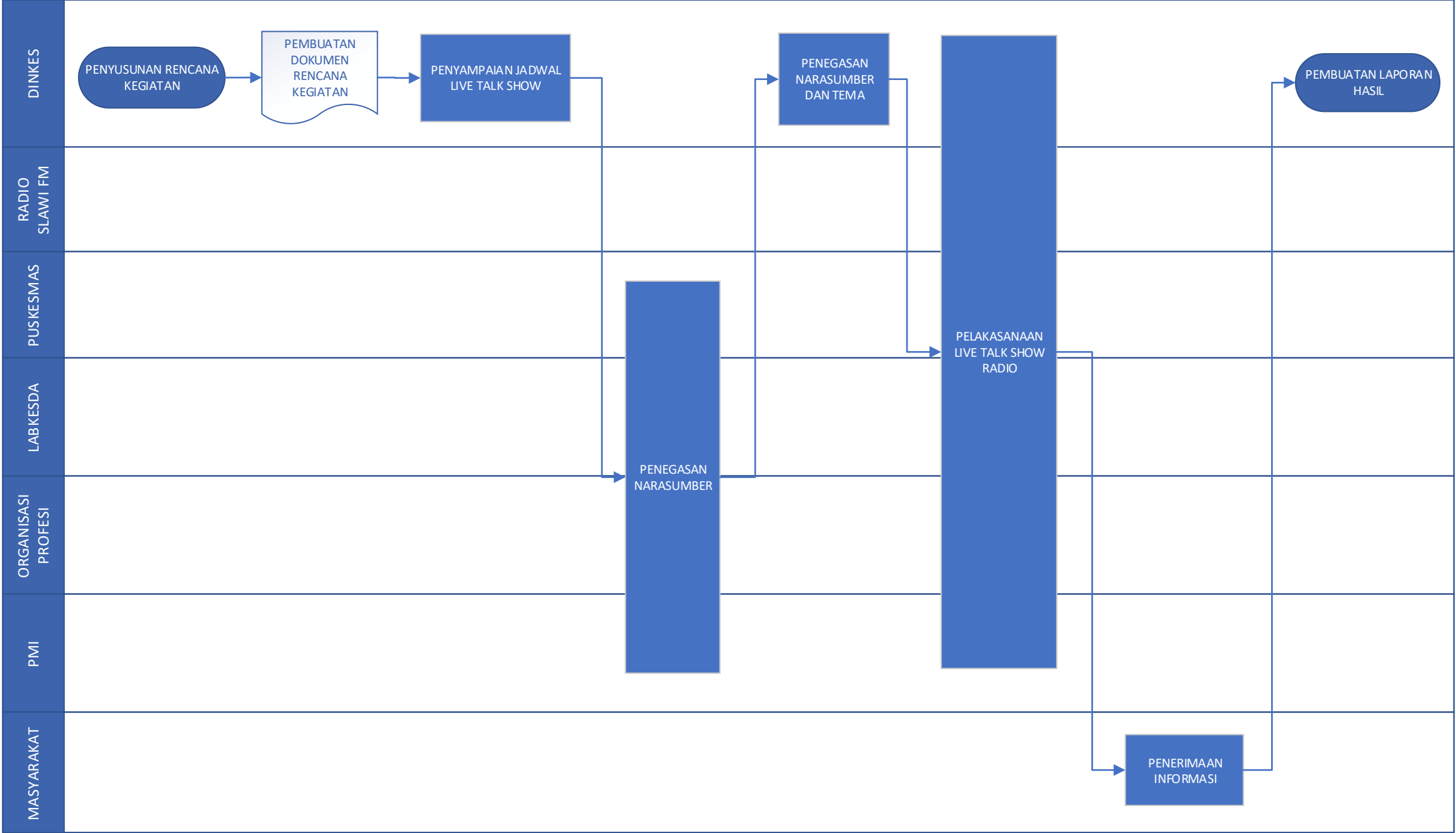
PEMBUATAN LAPORAN
HASIL

PUSKESMAS



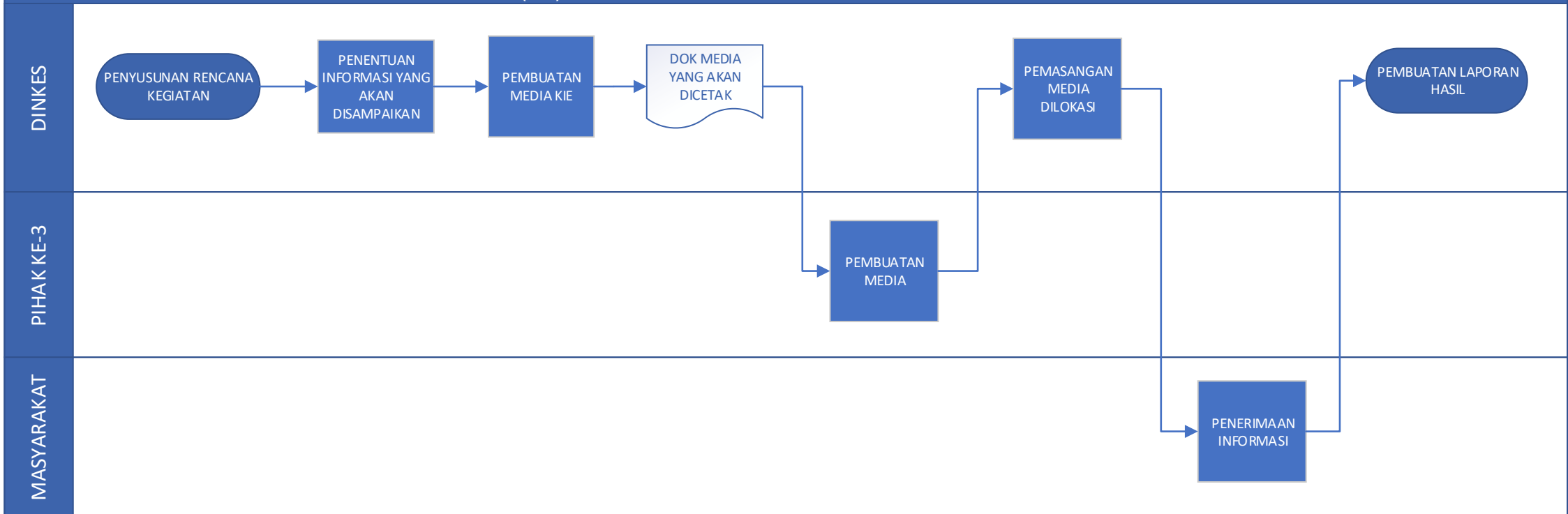
SLW-04.9 CFM 16

LIVE TALK SHOW RADIO SLAWI FM SETIAP HARI RABU PUKUL 10.00 s.d. 11.00 WIB



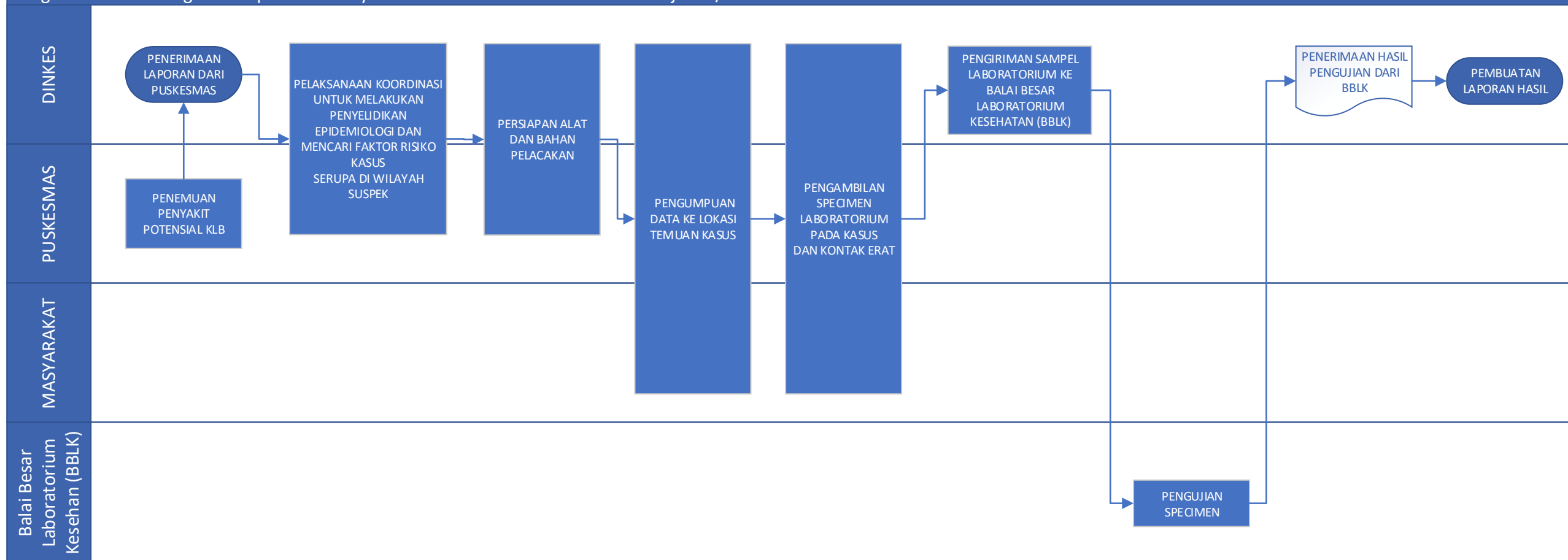
SLW-04.9 CFM 17

PEMBUATAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)

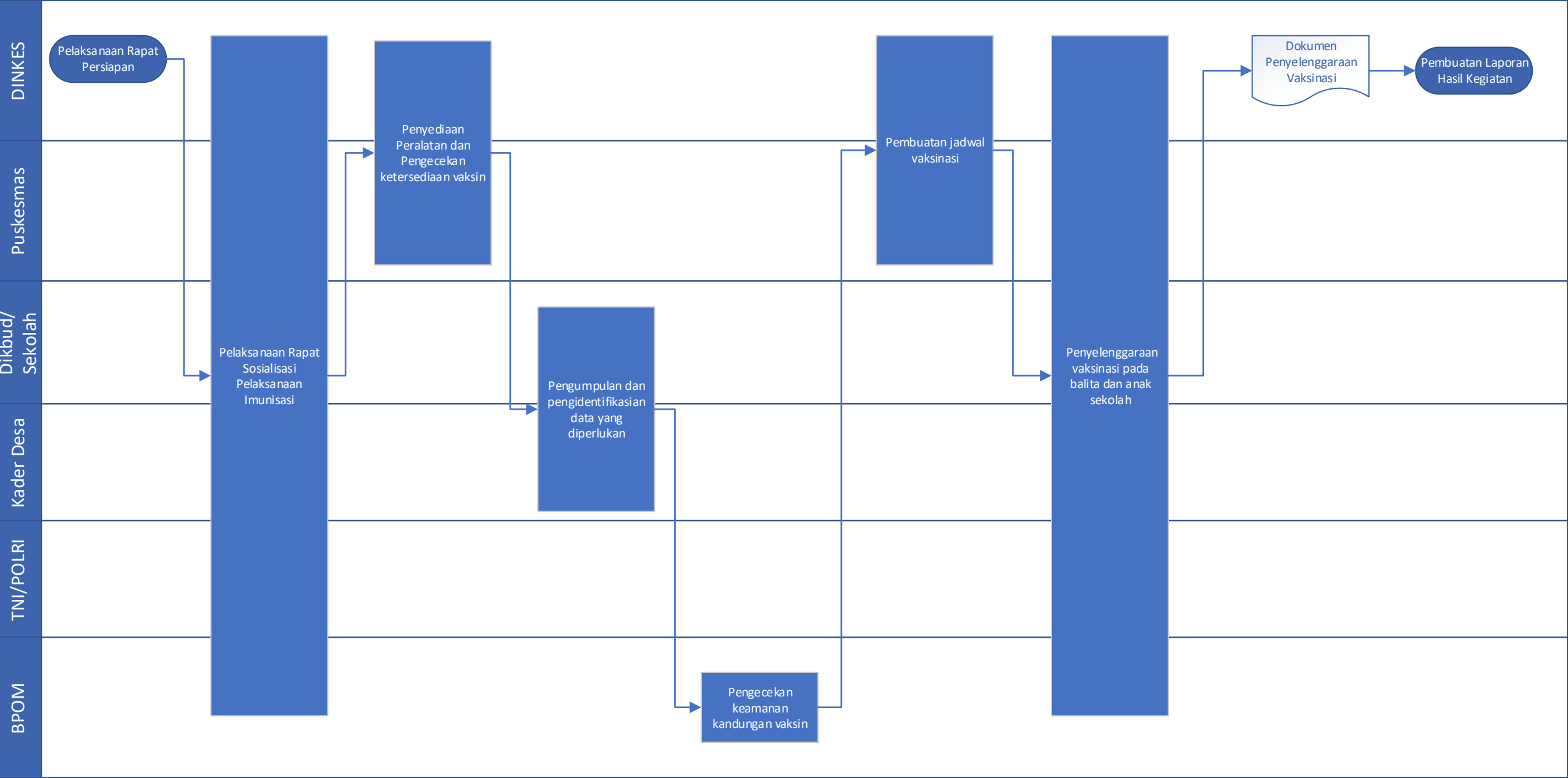


SLW-04.9 CFM 18

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

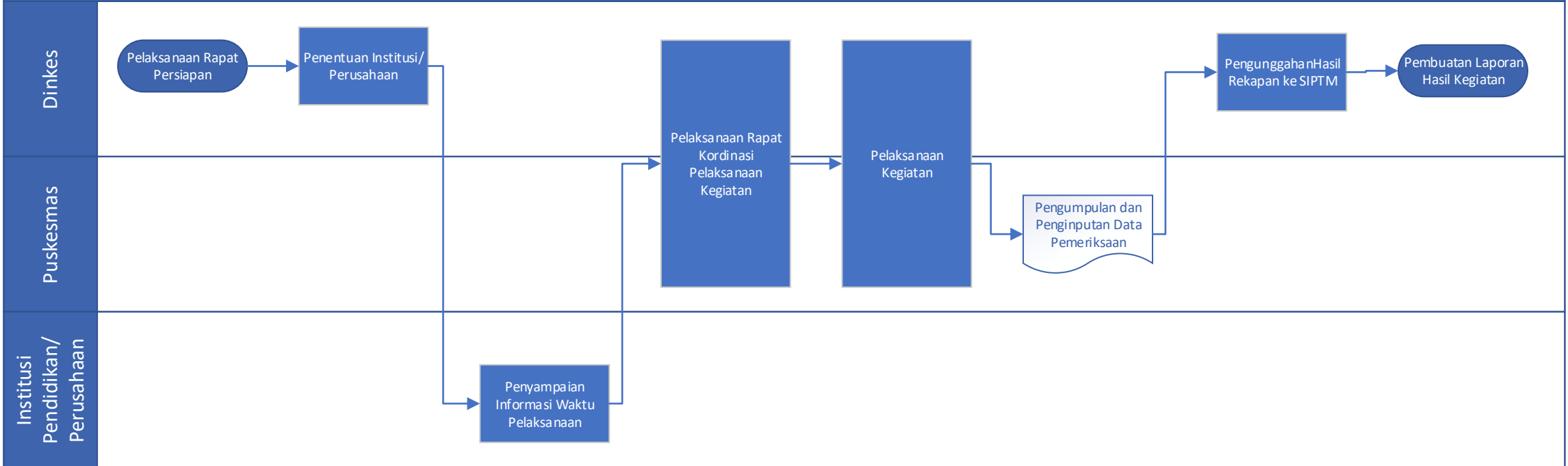


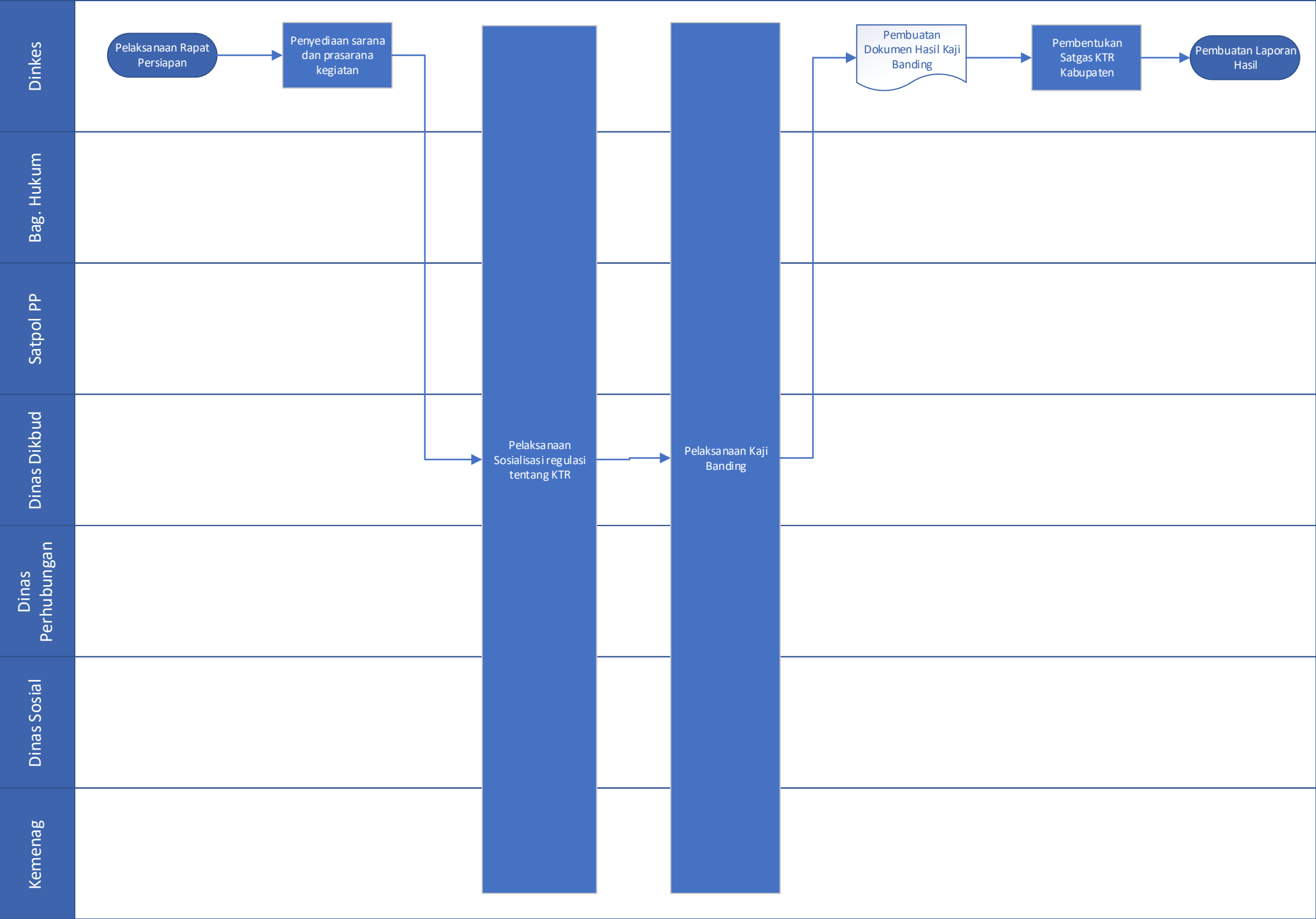
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah



SLW-04.9 CFM 20

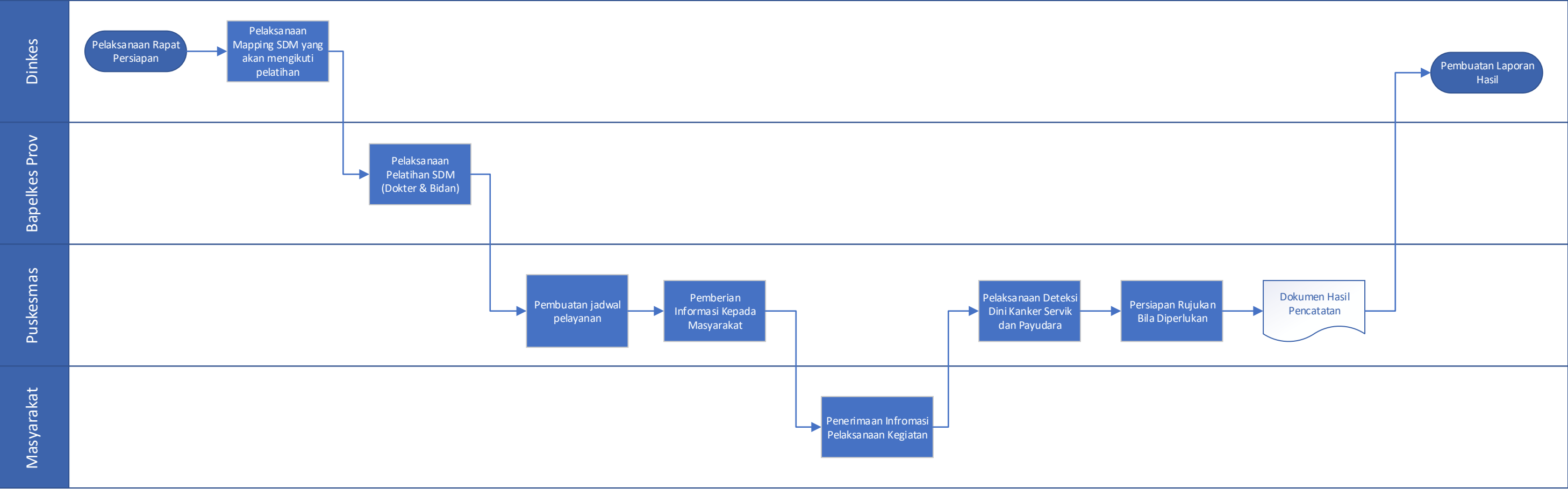
Deteksi Dini Faktor Risiko Hipertensi dan DM





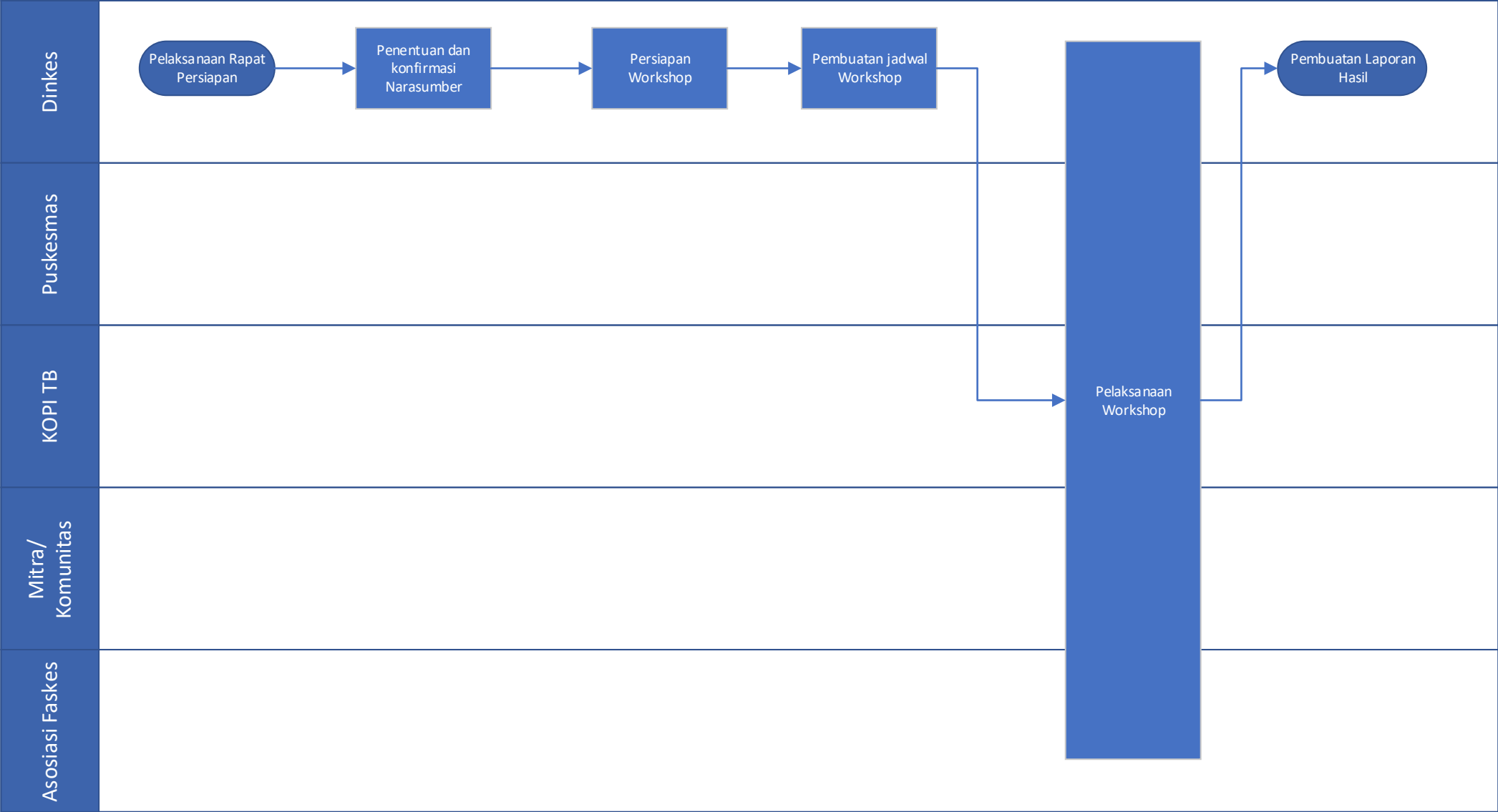
SLW-04.9 CFM 22

Deteksi Dini Kanker Servik (IVA) dan Payudara



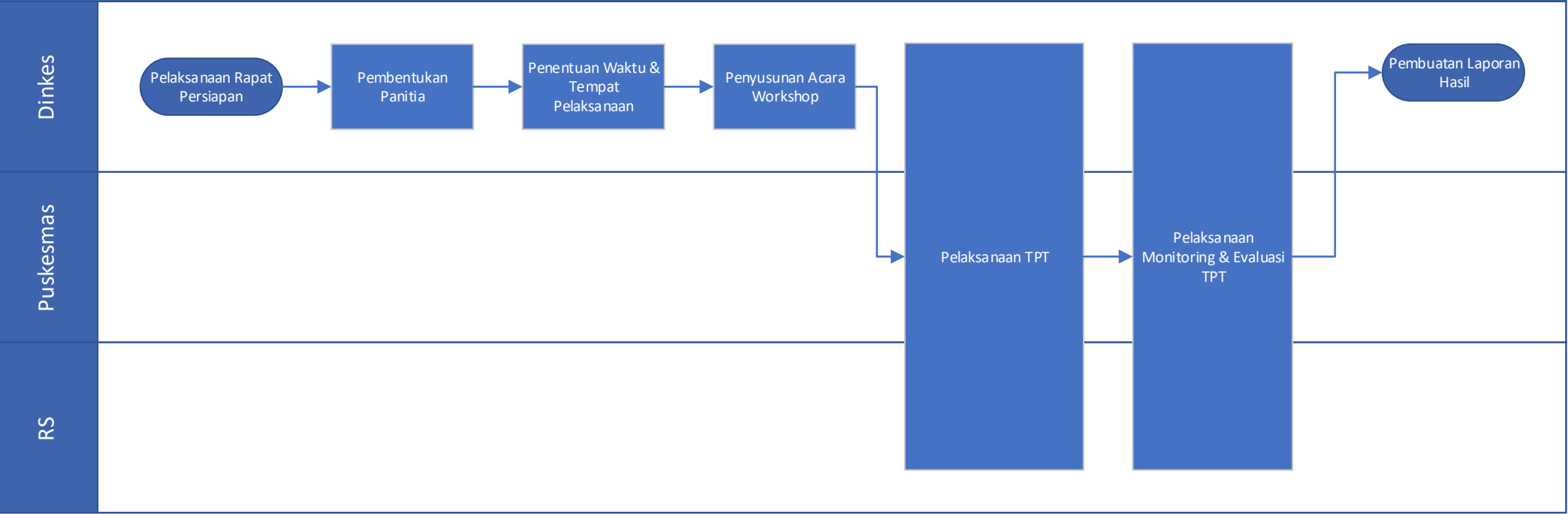
SLW-04.9 CFM 23

Workshop Implementasi Strategi dan Intervensi DPPM Tingkat Kabupaten



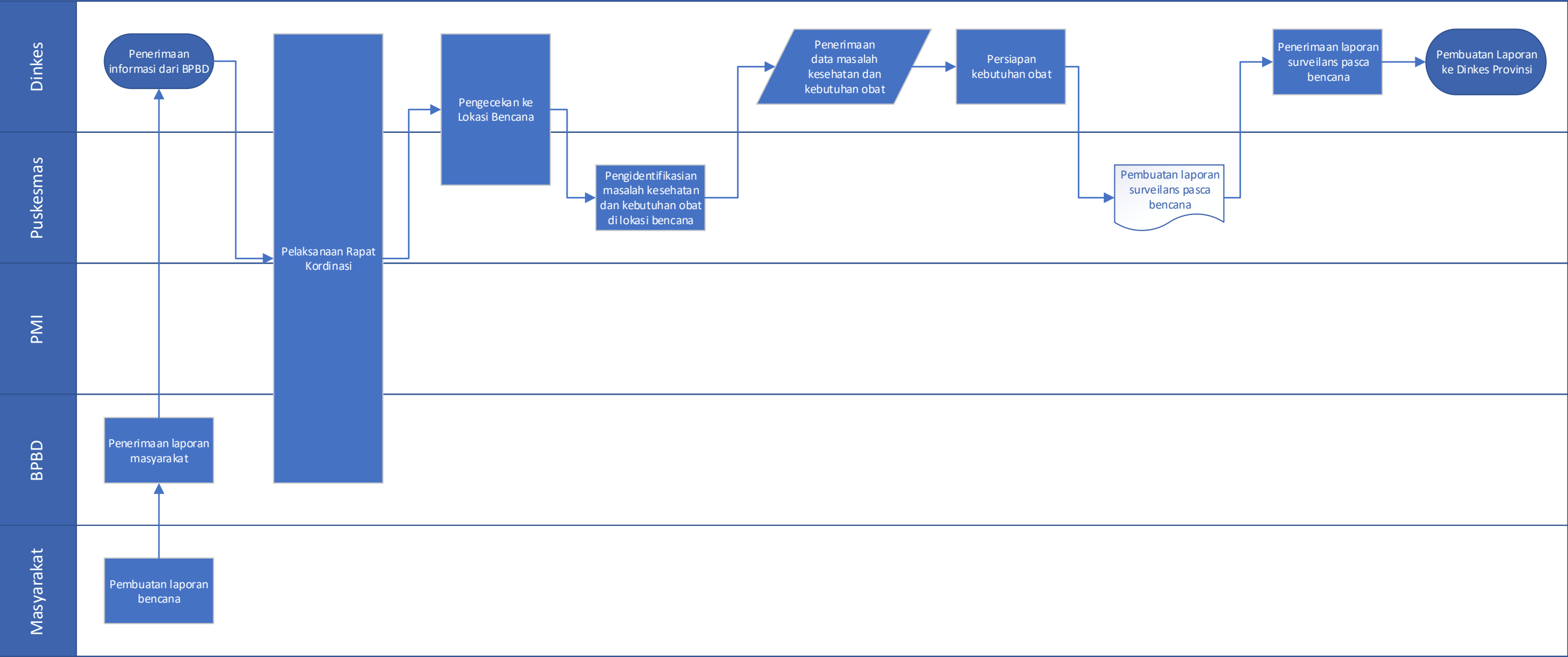
SLW-04.9 CFM 24

Workshop Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)



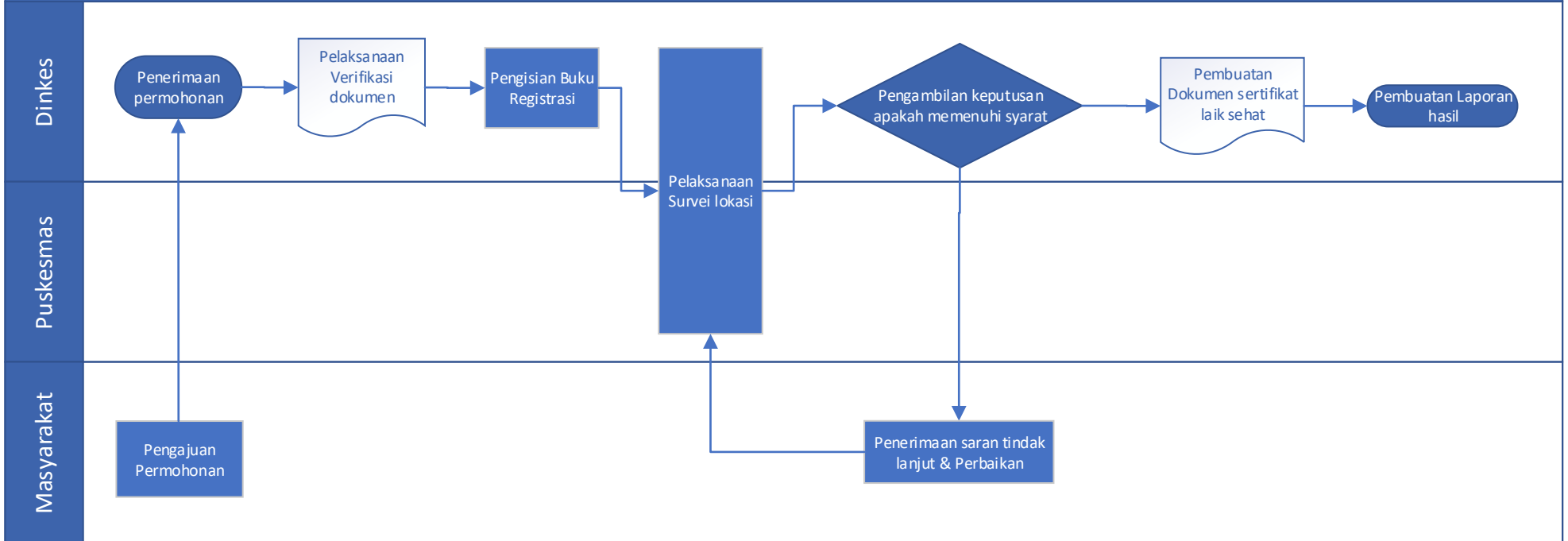
SLW-04.9 CFM 25

Pengelolaan Surveilans Bencana

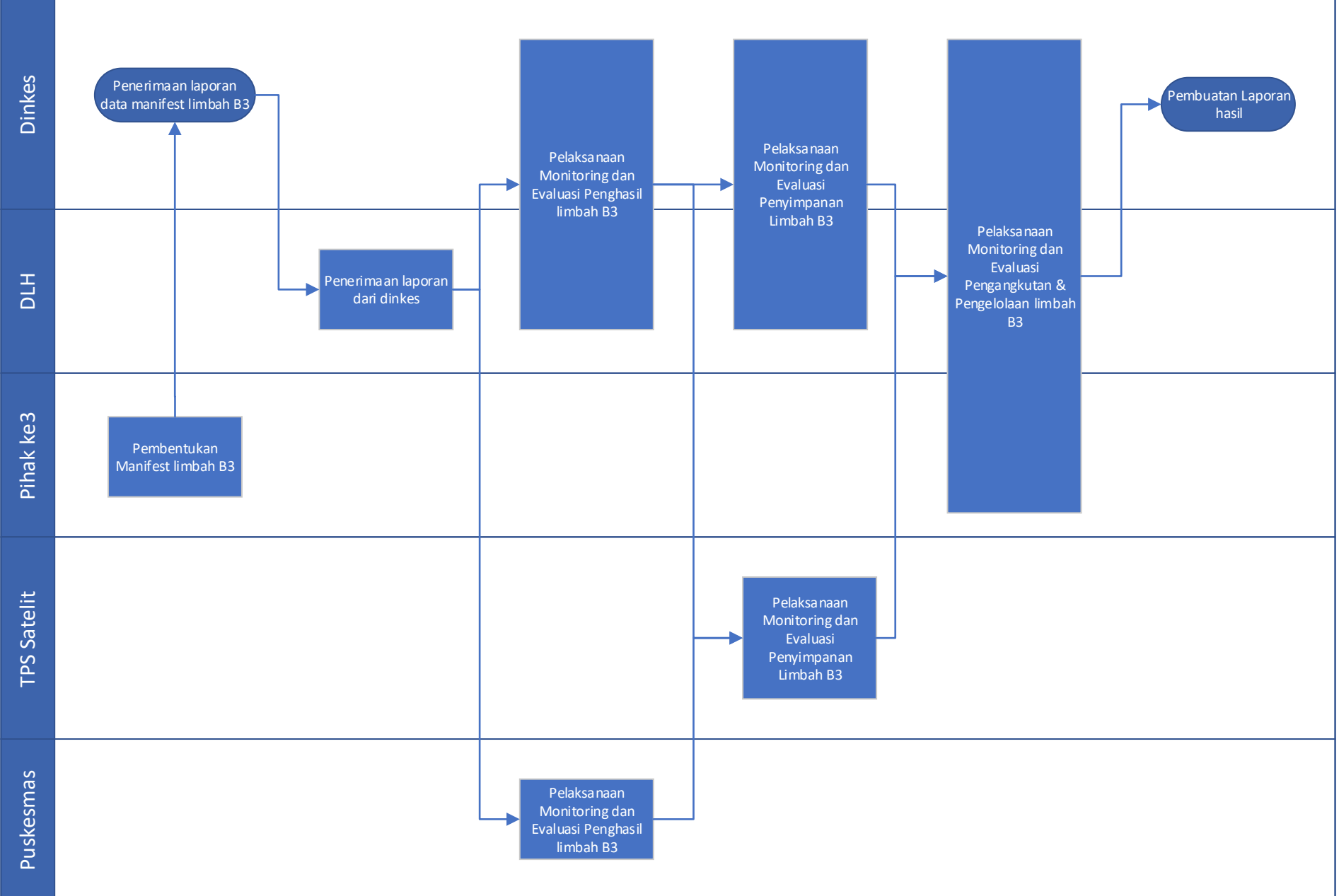


SLW-04.9 CFM 26

Pembuatan sertifikasi laik sehat



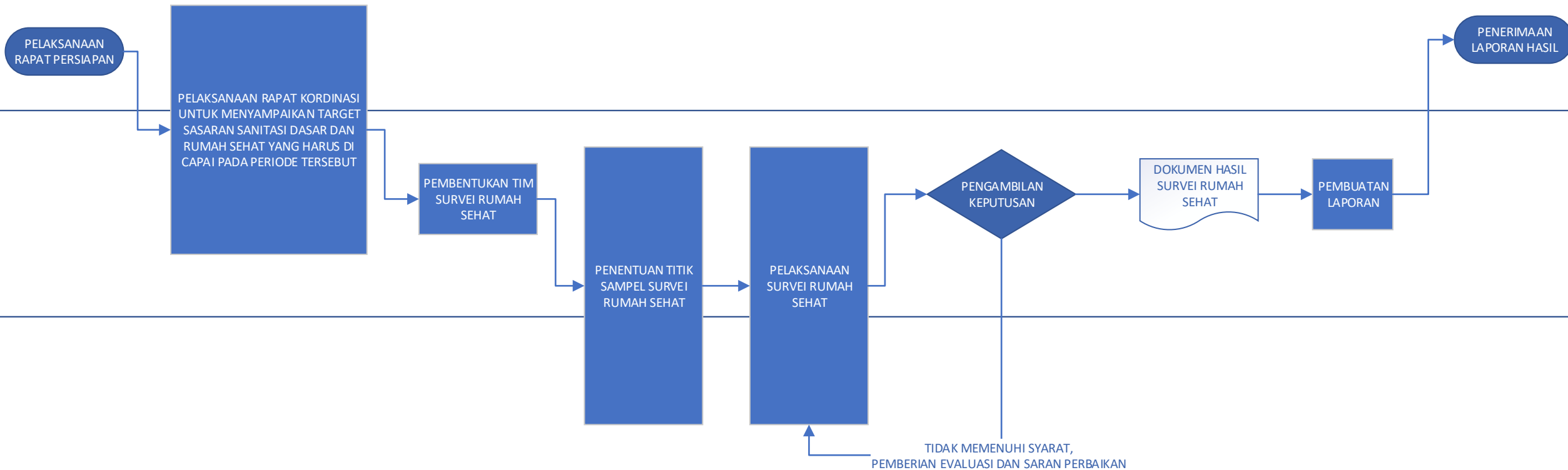
MONITORING & EVALUASI LIMBAH MEDIS PADAT



Dinkes

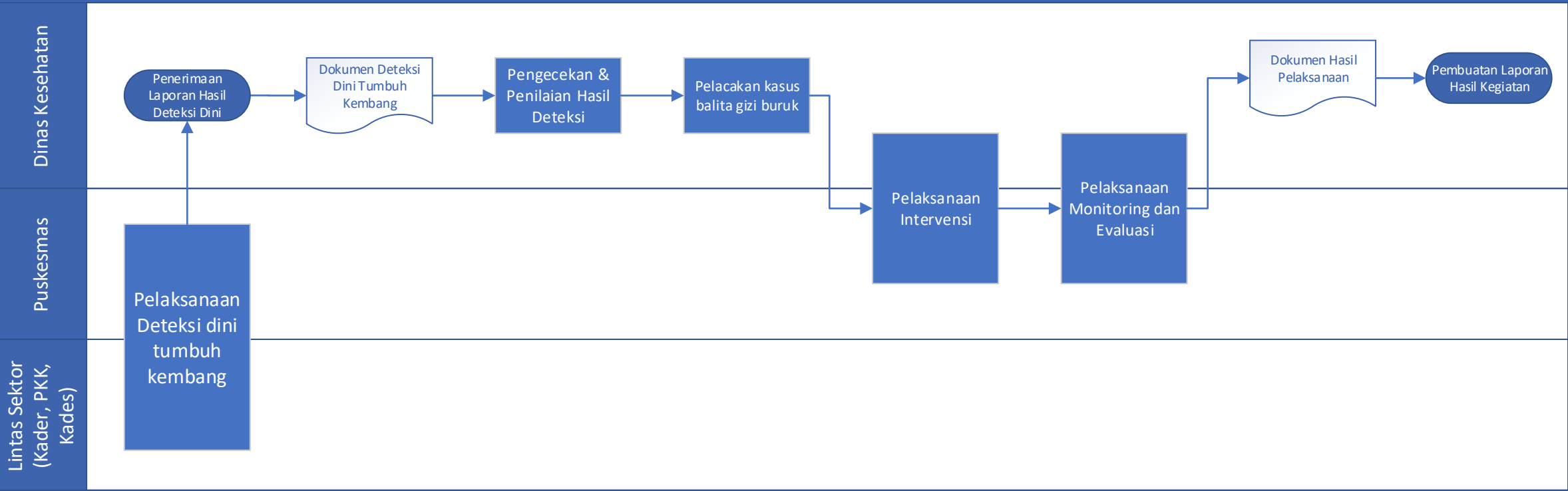
Puskesmas

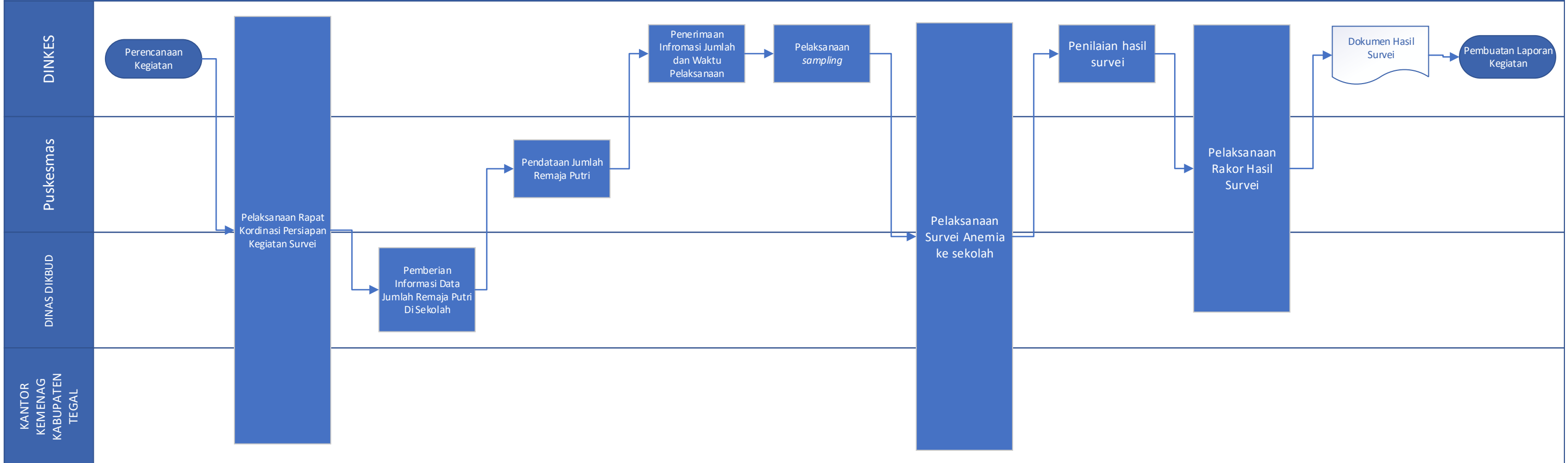
Masyarakat

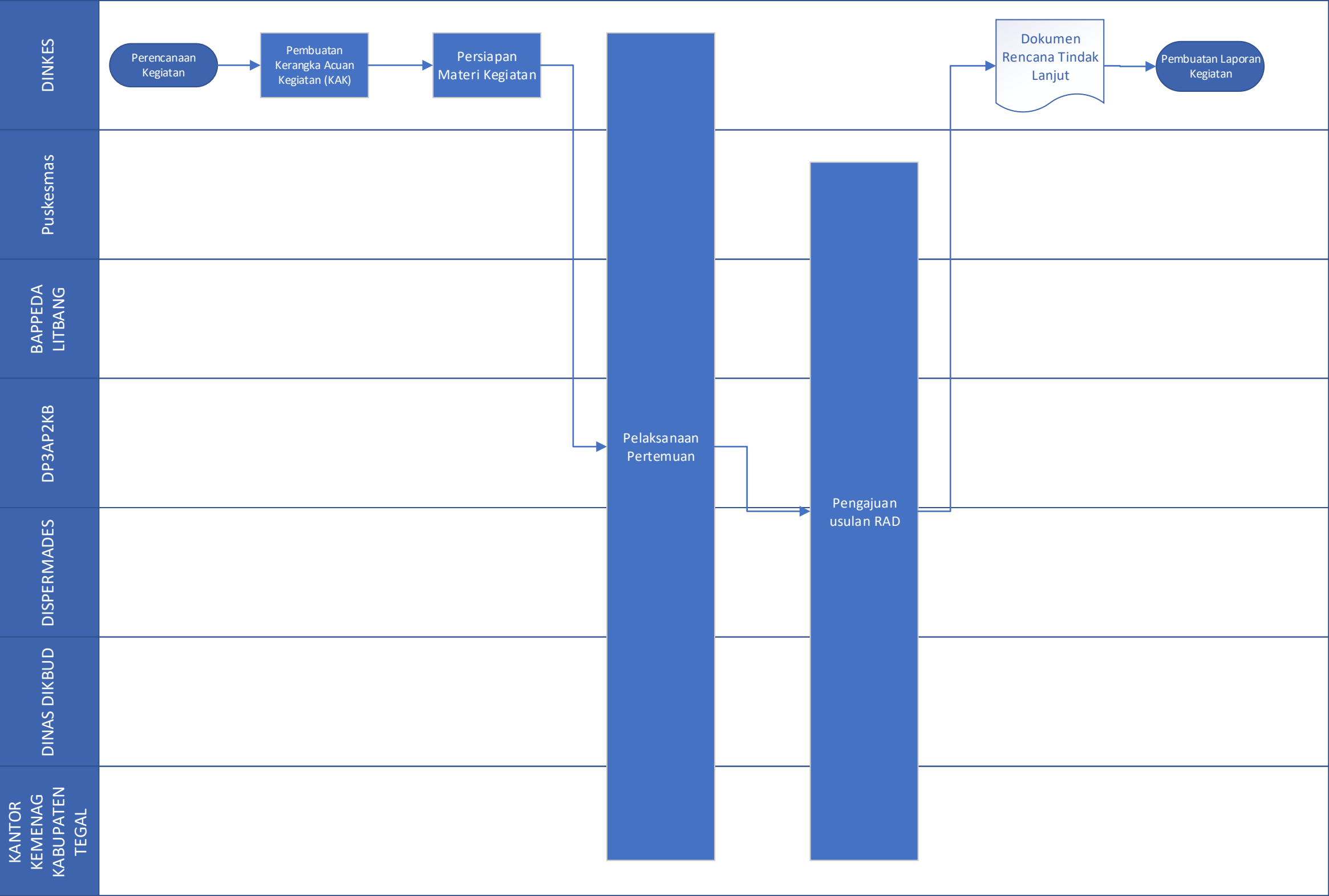


SLW-04.9 CFM 29

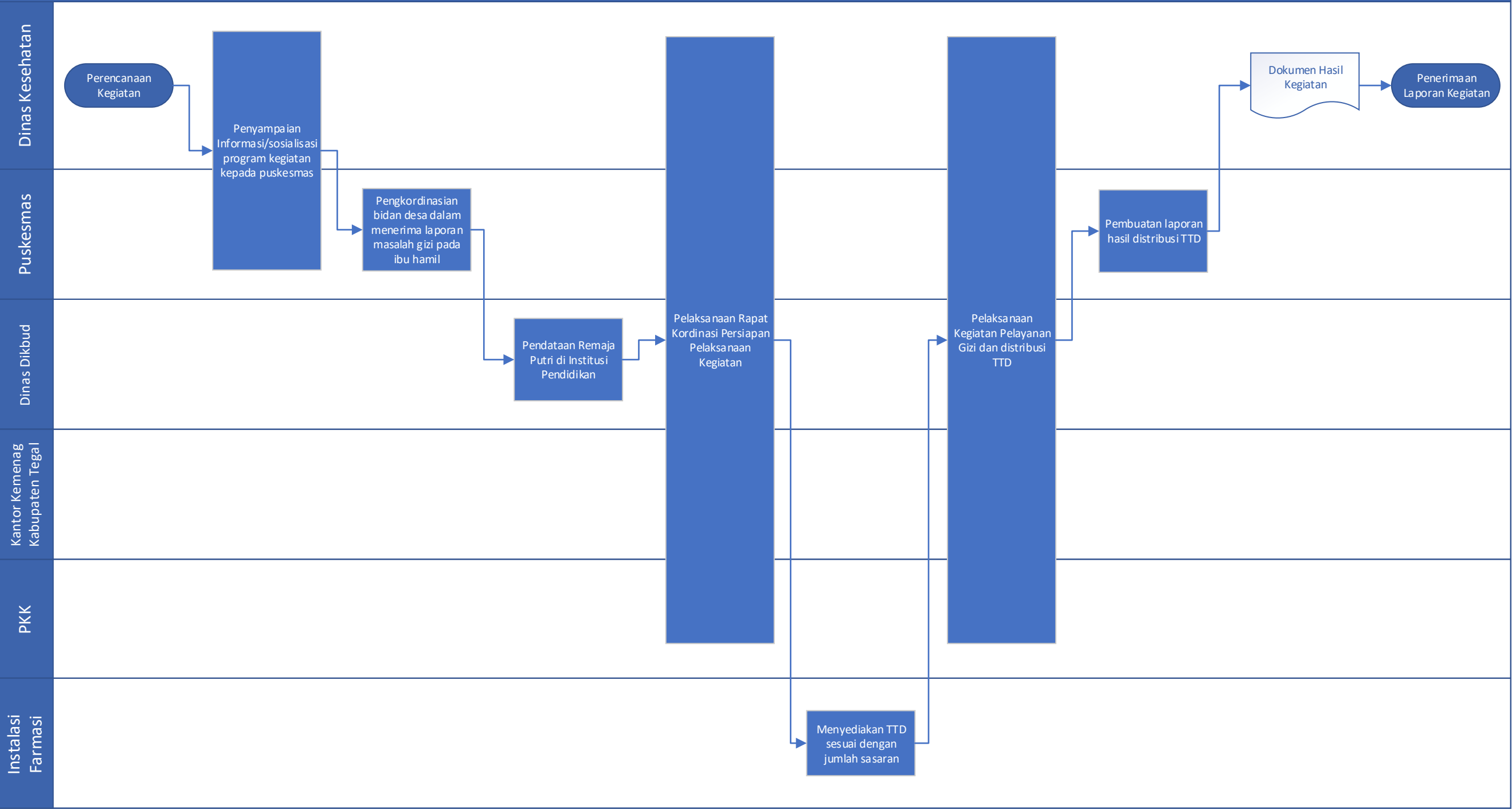
Pelacakan Kasus Gizi Buruk

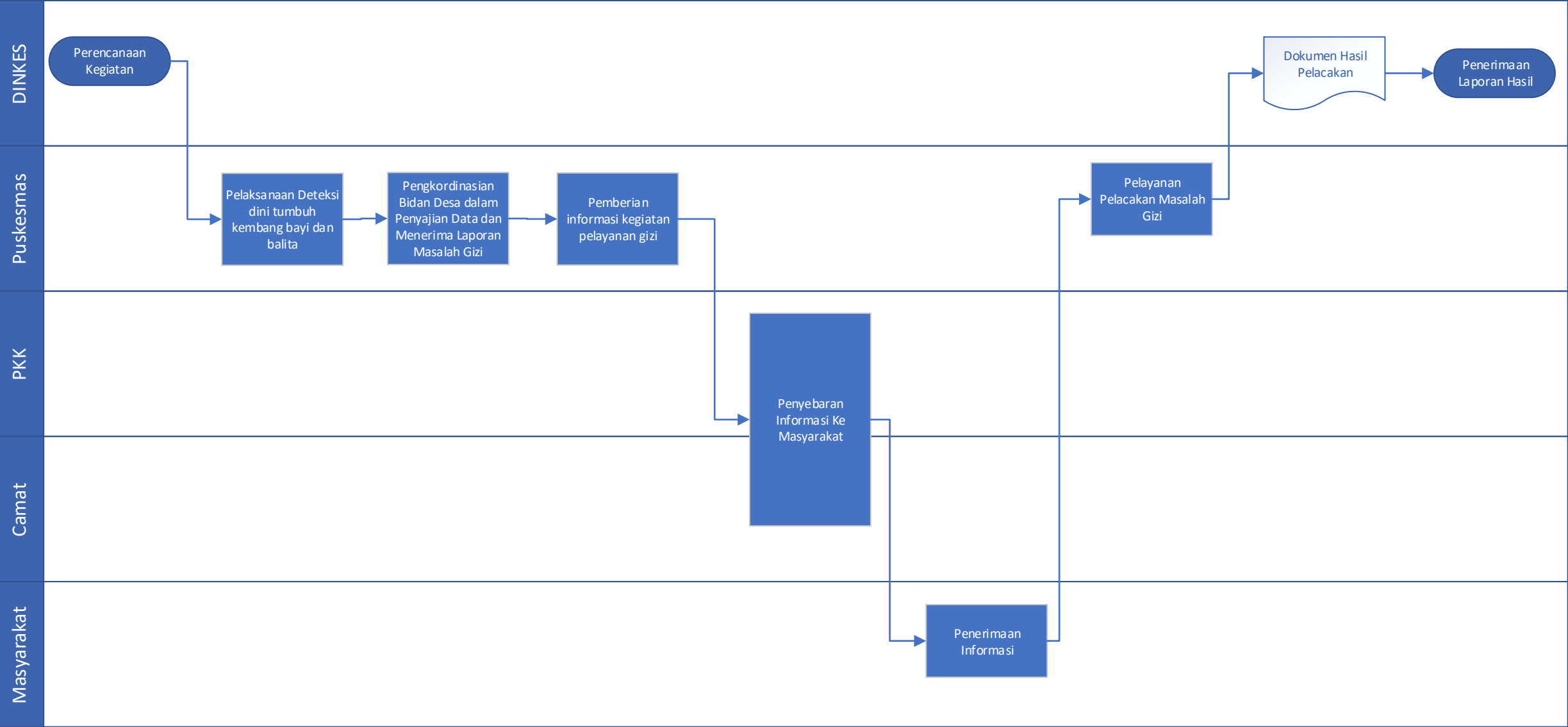


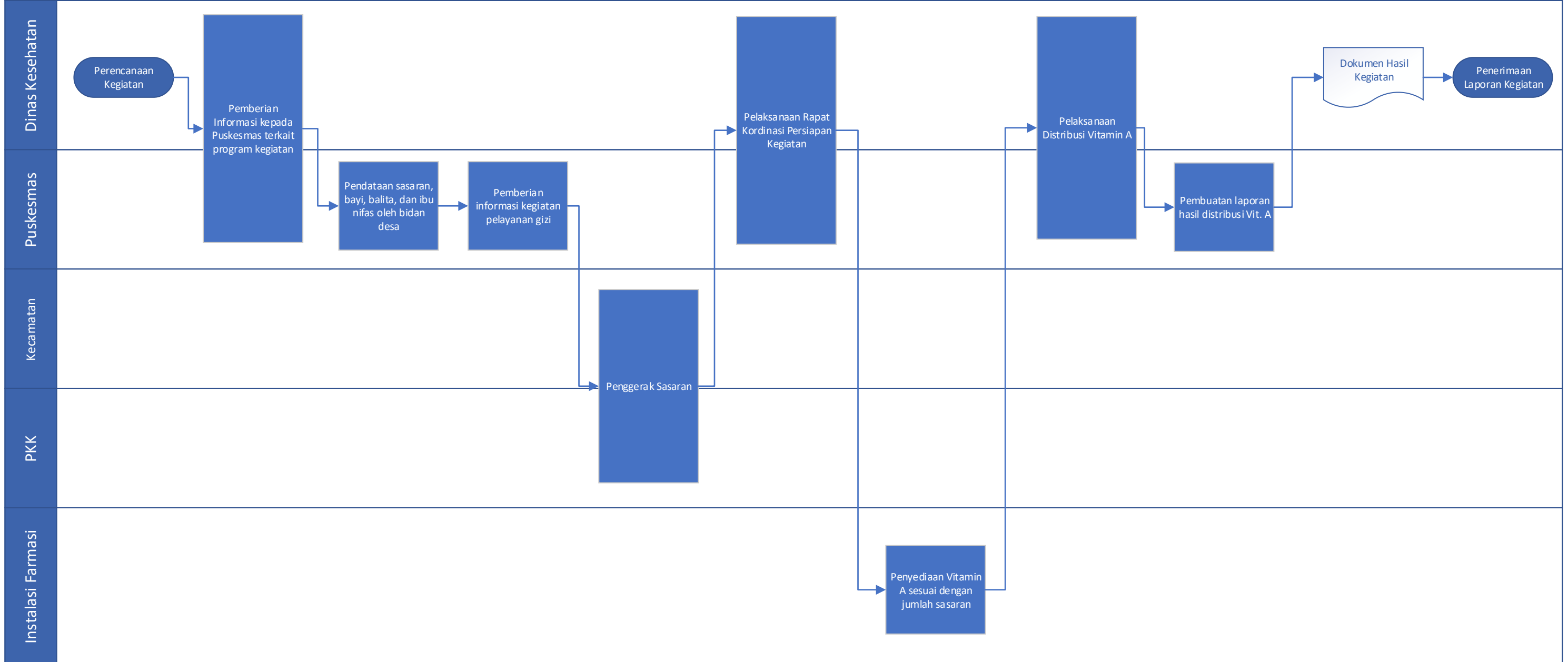


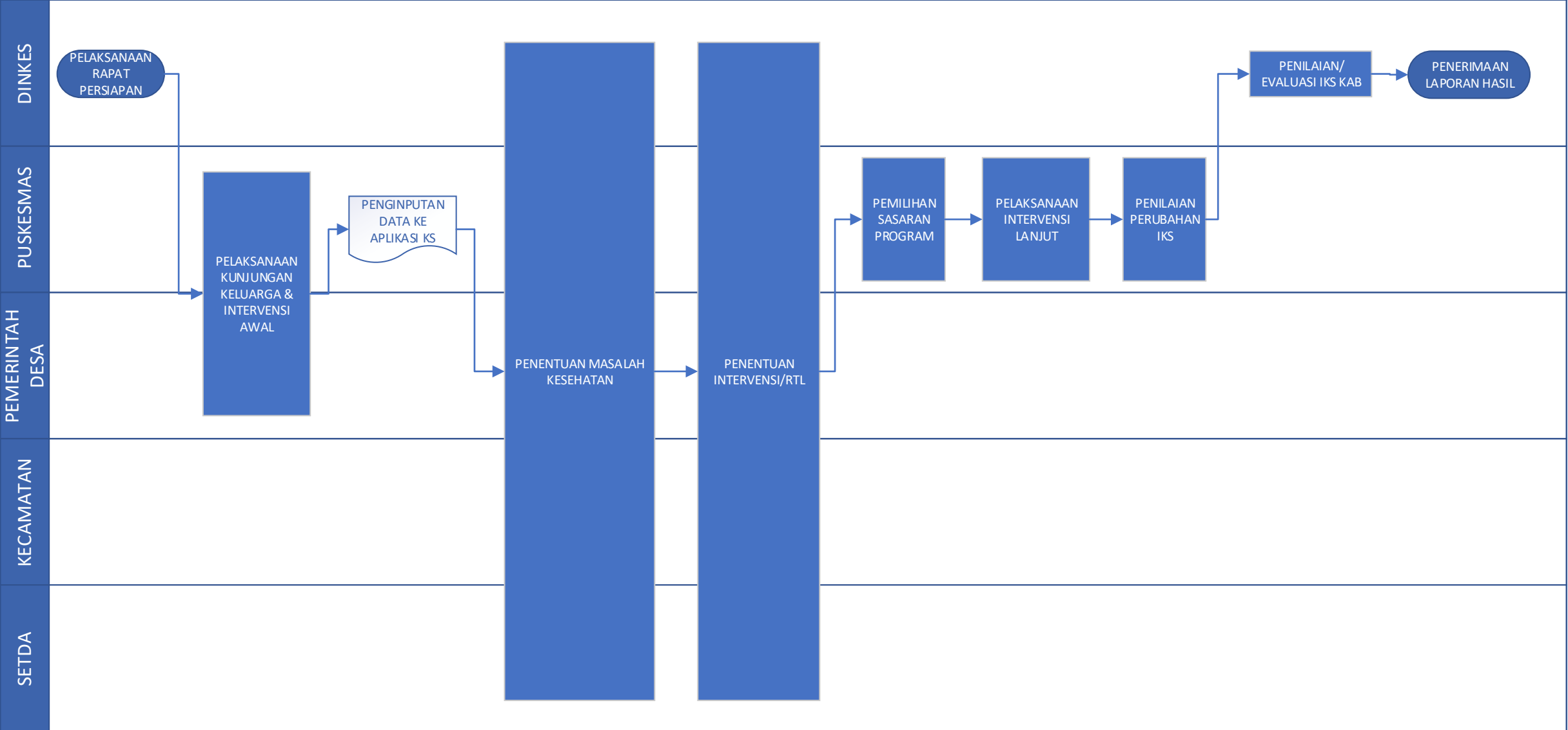


Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri dan Ibu Hamil



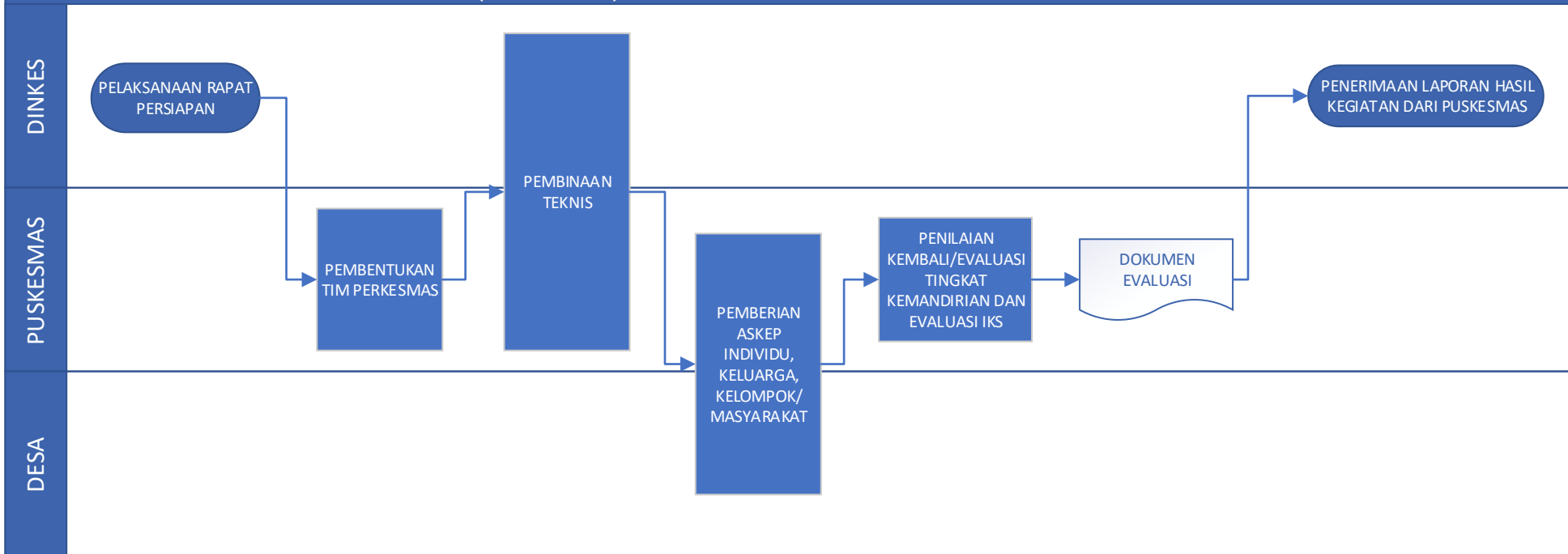


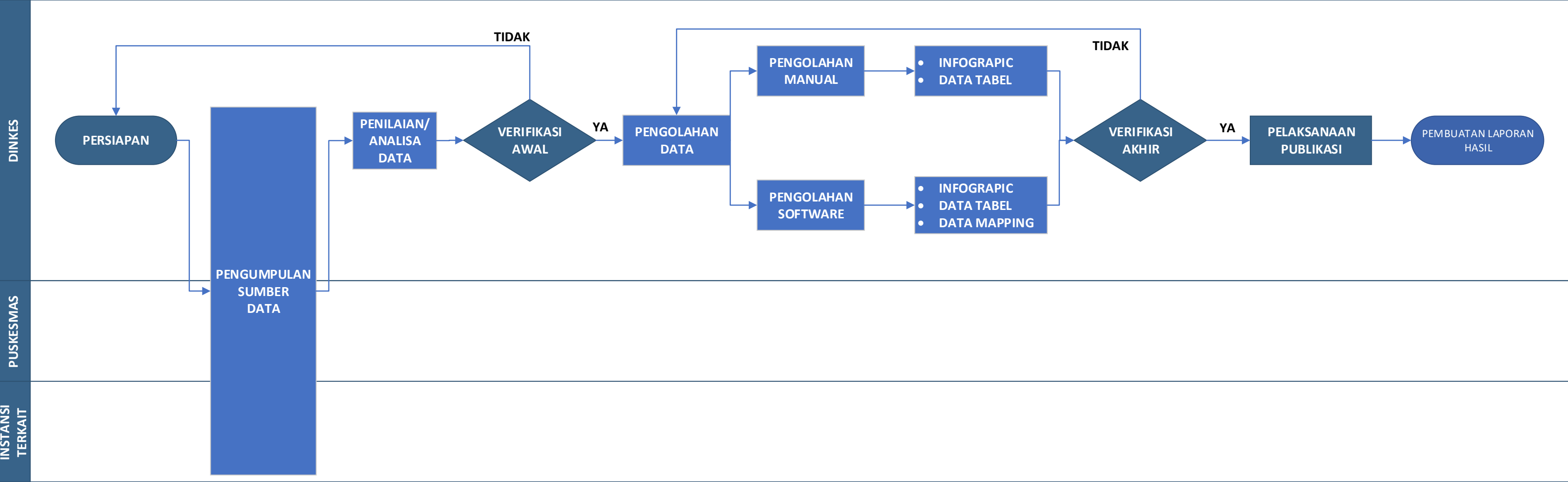




SLW-04.9 CFM 36

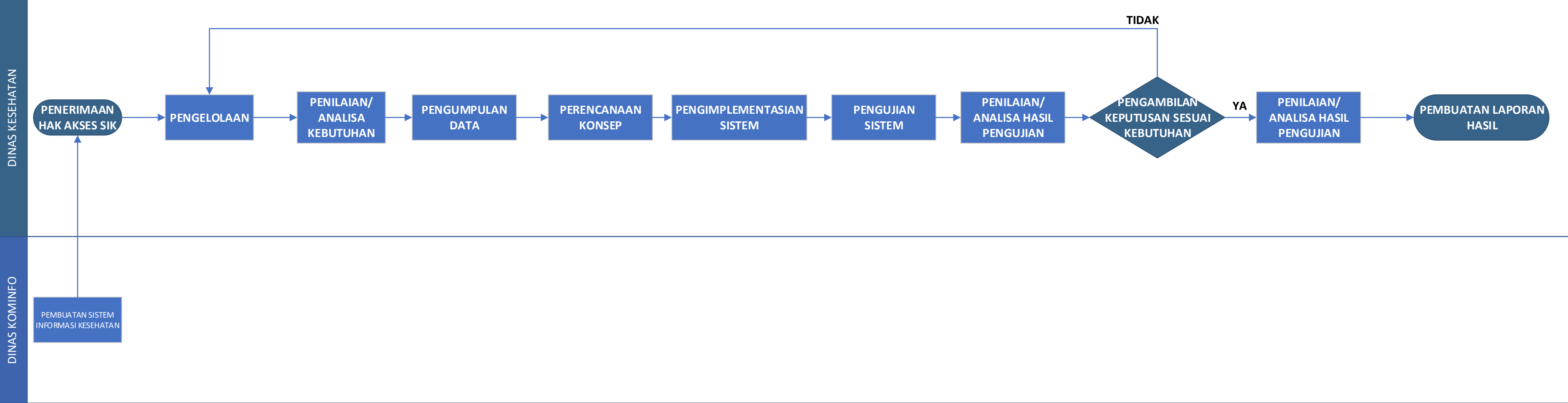
PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS (PERKESMAS)

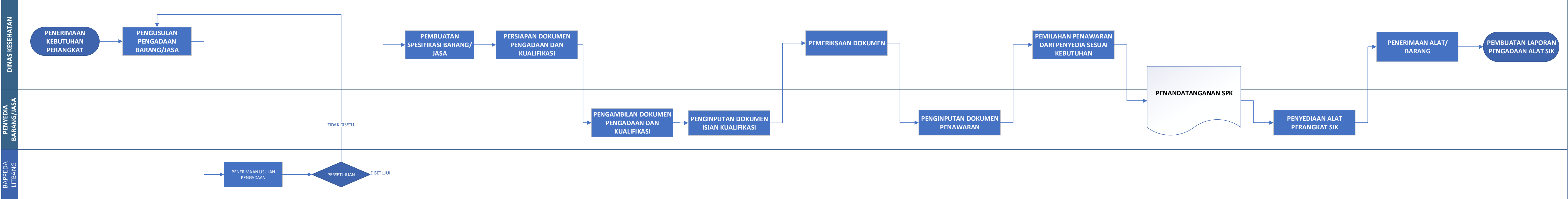




SLW-04.9 CFM 38

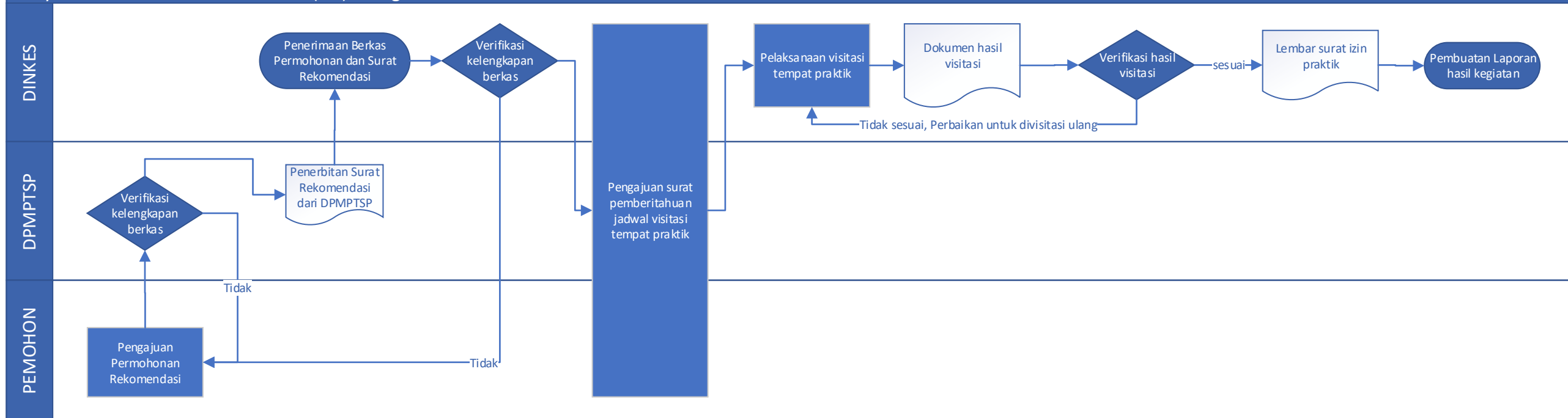
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN





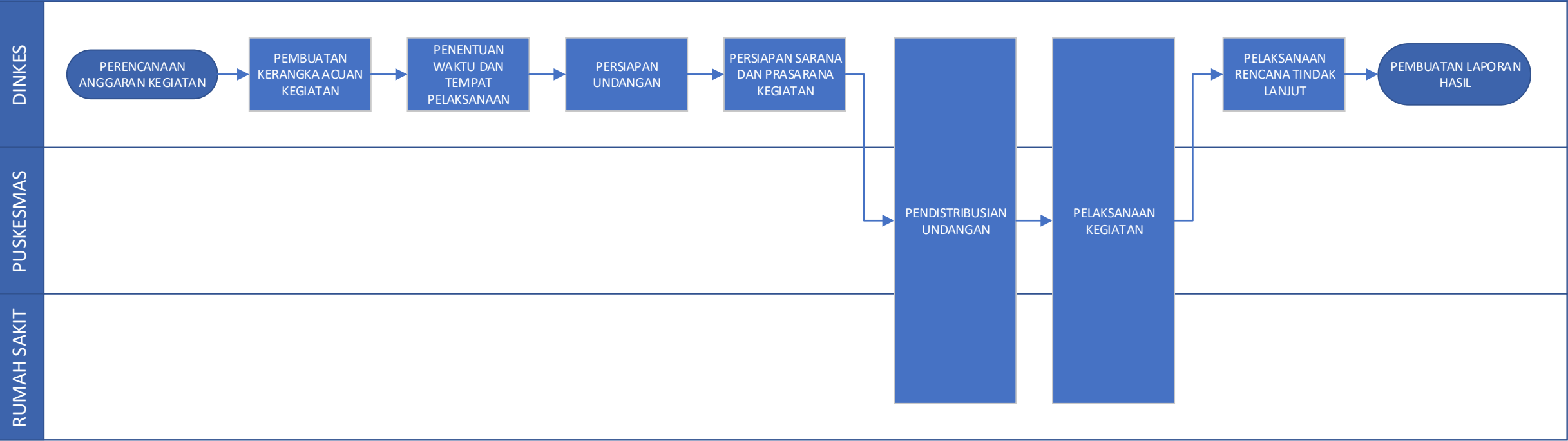
SLW-04.9 CFM 40

Pelayanan Perizinan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan



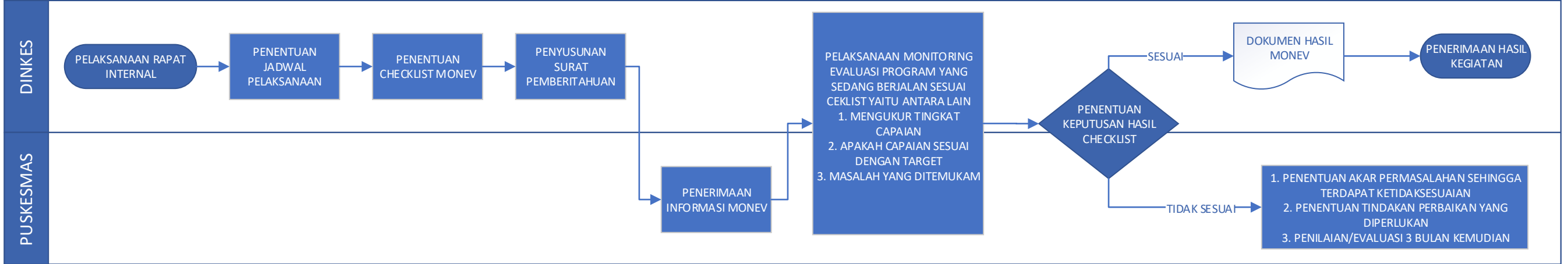
SLW-04.9 CFM 41

Pertemuan Lintas Sektor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)



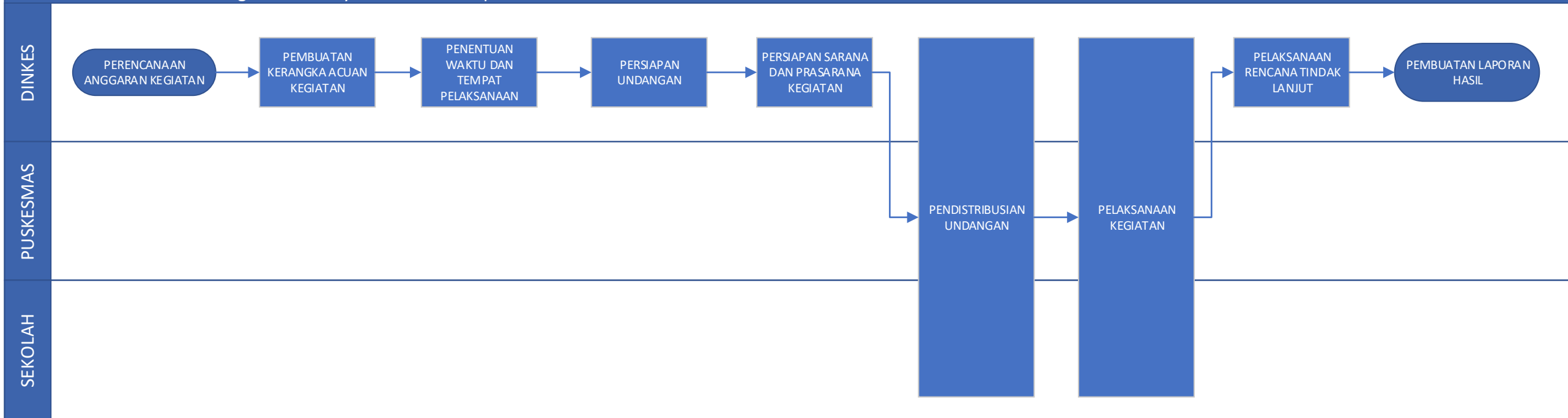
SLW-04.9 CFM 42

Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



SLW-04.9 CFM 43

Pertemuan Lintas Sektor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



PETA RELASI

SLW-04.10
Peningkatan Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang Medis dan Non Medis (RSUD dr. Soeselo)

RSUD dr.SOESELO SLAWI

DINKES KAB.TEGAL

INSPEKTORAT

DINSOS KAB TEGAL

SATPOL

BAPPEDA & LITBANG

P3AP2KB

BKPSDM

BPBD

BPKAD

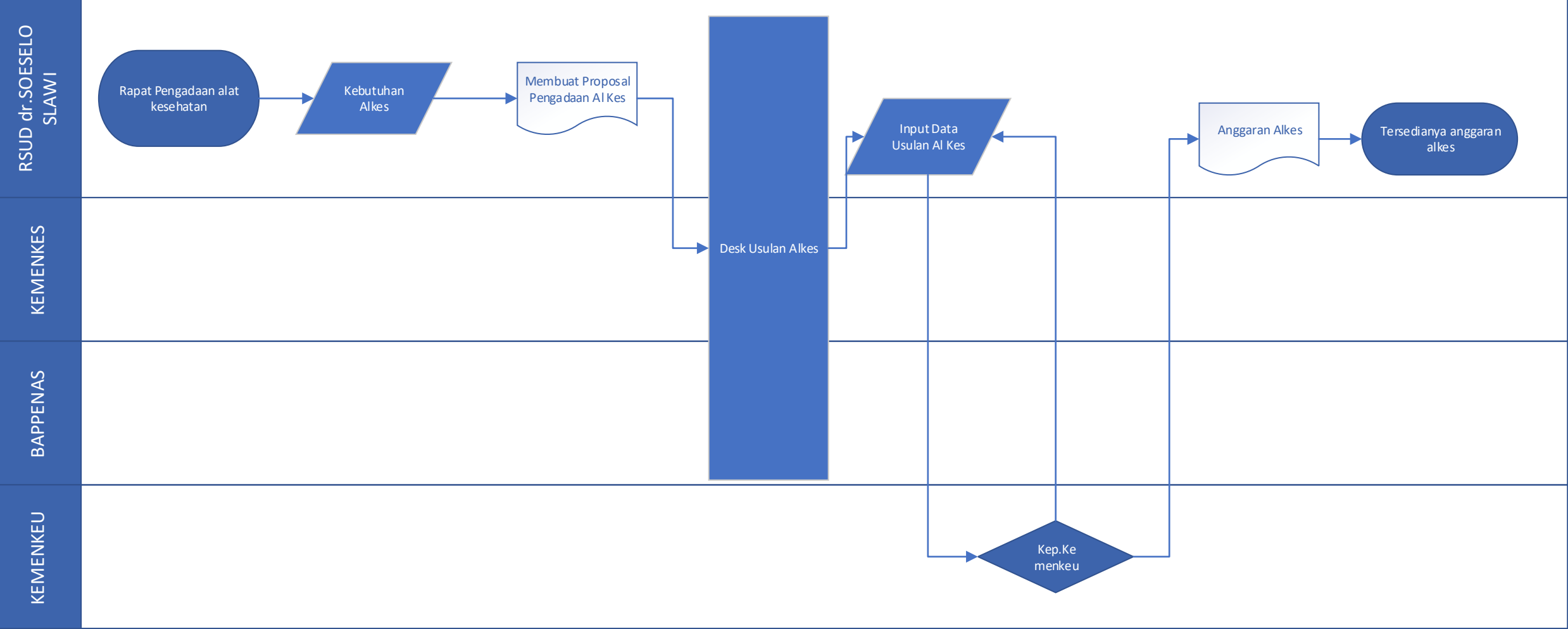
BPBJ

BAG.ORGANISASI

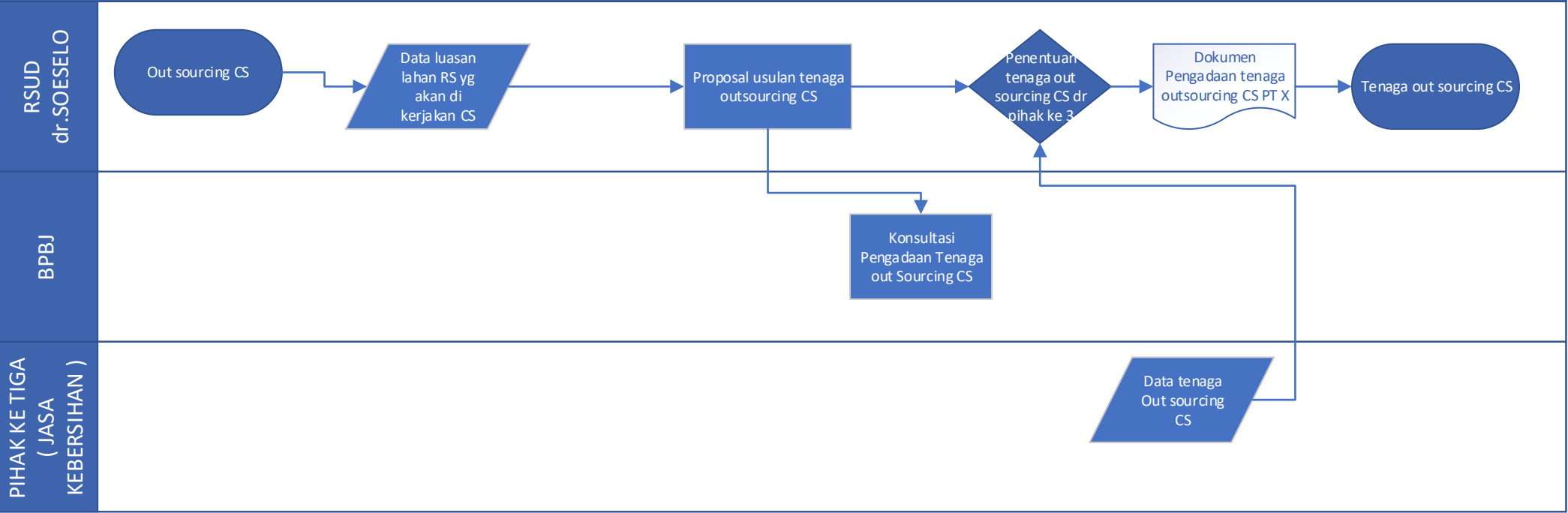
BAG.HUKUM

BAPPENDA

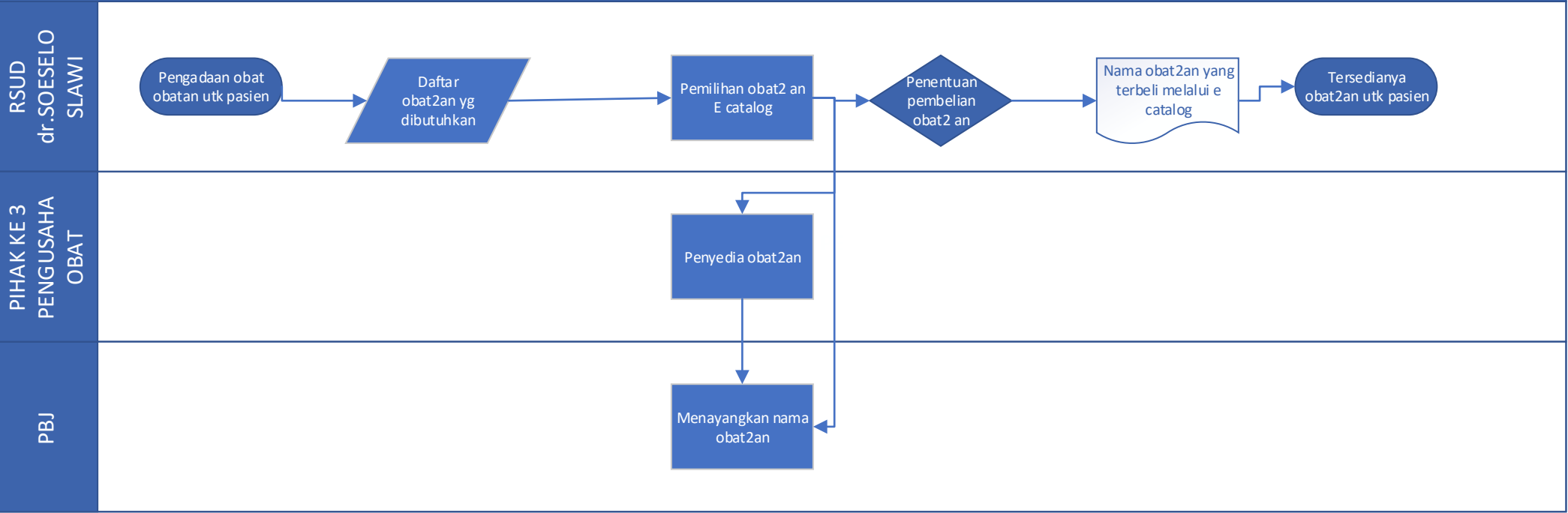
DPMTSP



PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN



PENINGKATAN PELAYANAN PENUNJANG



PETA RELASI

SLW-04.11

Peningkatan Kualitas Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang Medis, dan Non Medis (RSUD Suradadi)

RSUD Suradadi

BPKAD

Bappeda Litbang

Bappenda

Inspektorat

Dinas Kesehatan

Sekda

Setwan

DPUPR

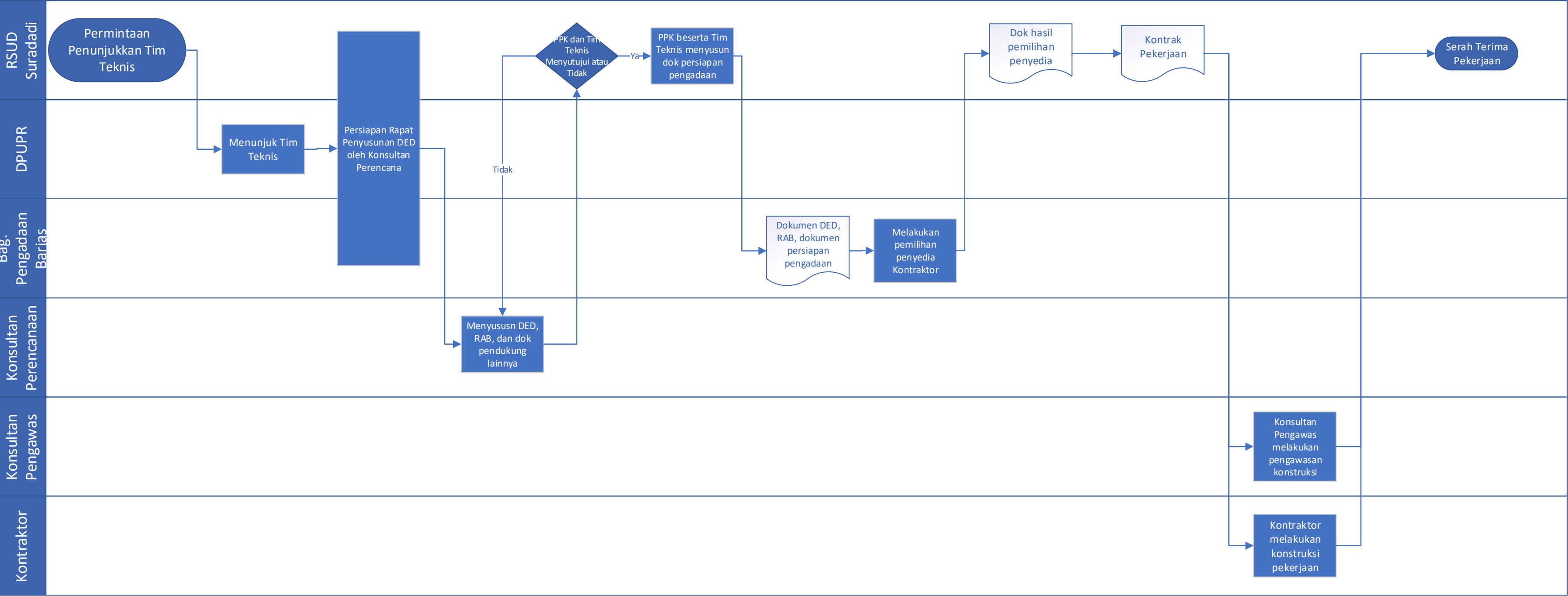
BPBD

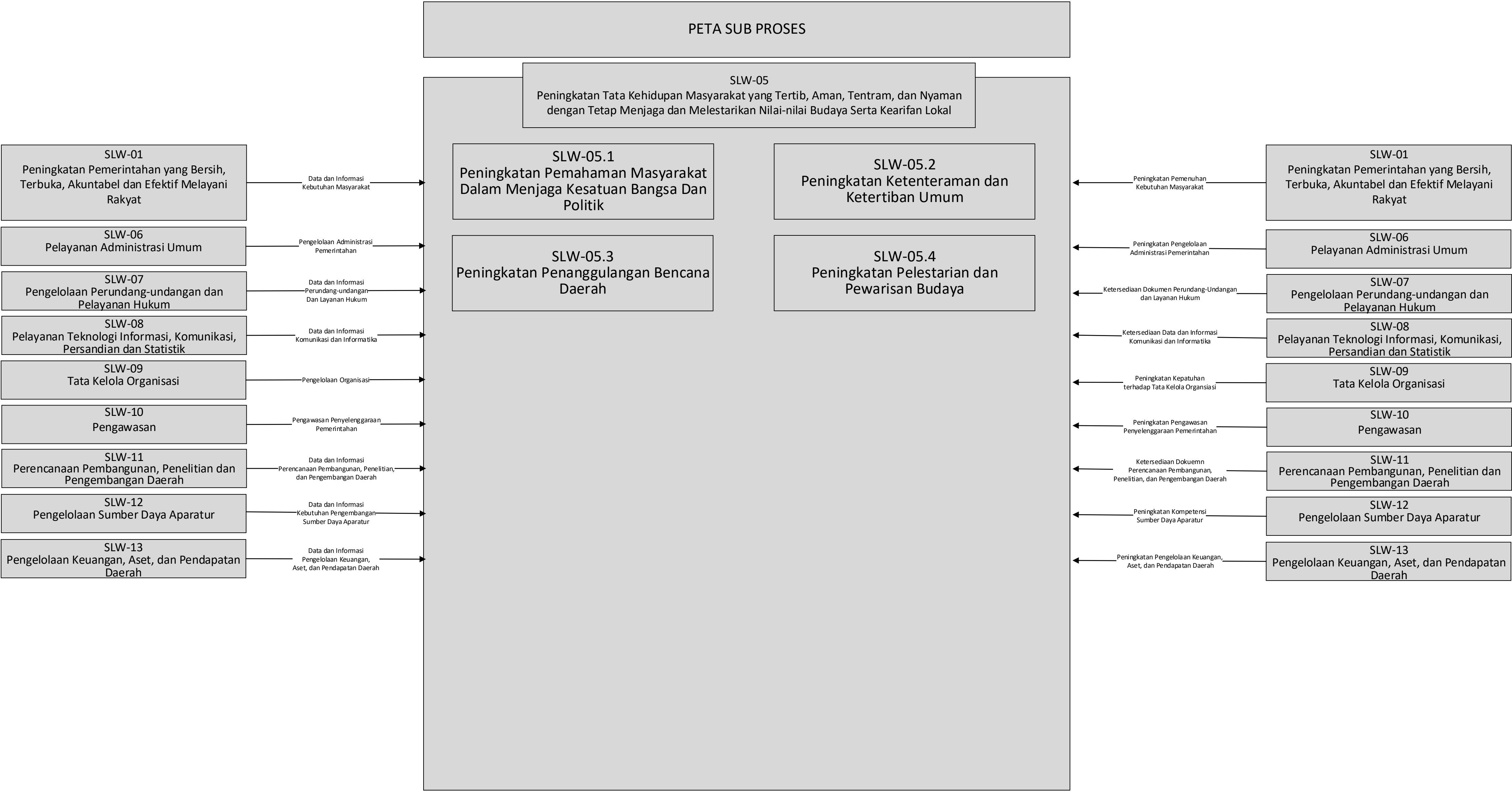
BKPSDM

Dinsos

Diskominfo

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD





PETA RELASI

SLW-05.1

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesbangpol

Bagian Organisasi

Bagian Hukum

Kecamatan

Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

BPKAD

Dinas Perintransnaker

Bappedalitbang

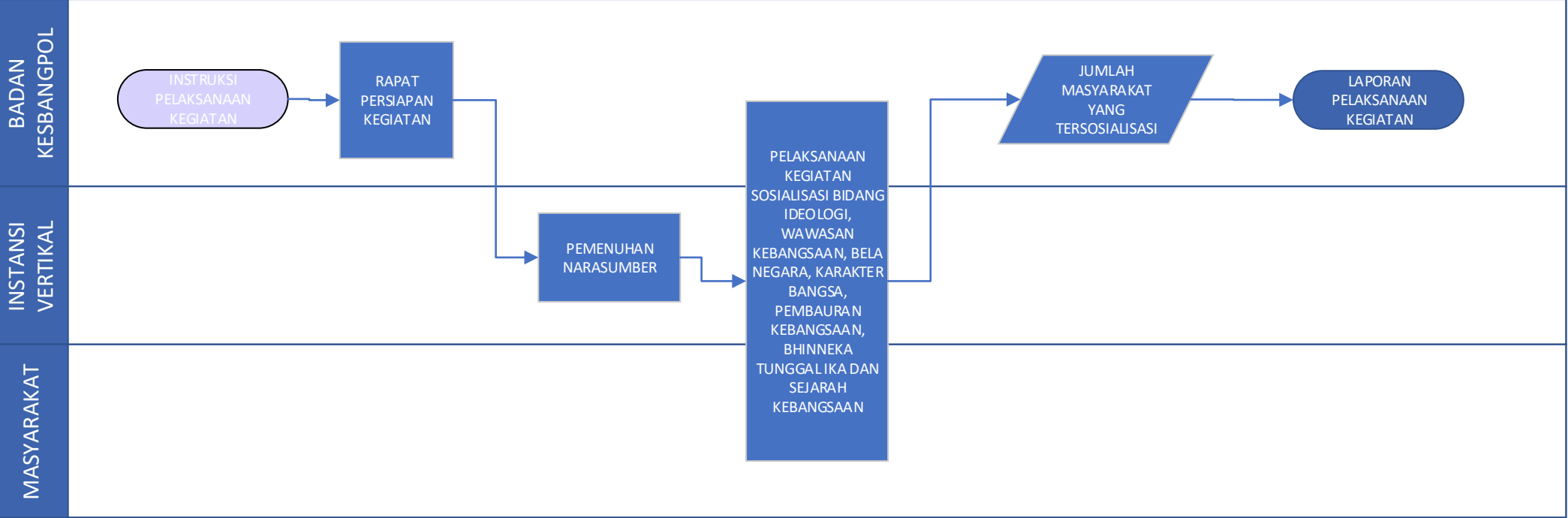
Dinas Kominfo

SATPOL PP

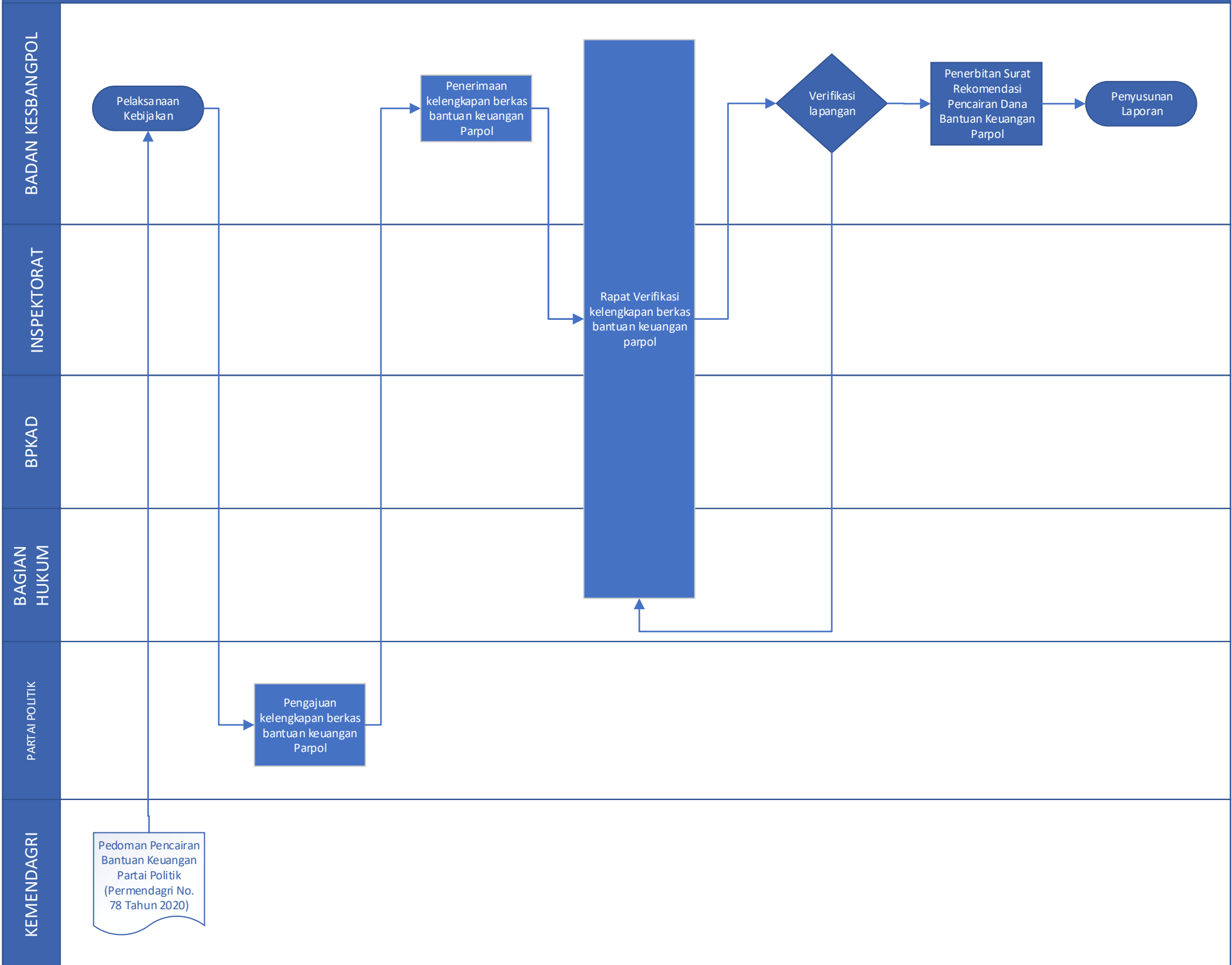
Bagian Pemerintahan

SLW-05.1 CFM 01

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

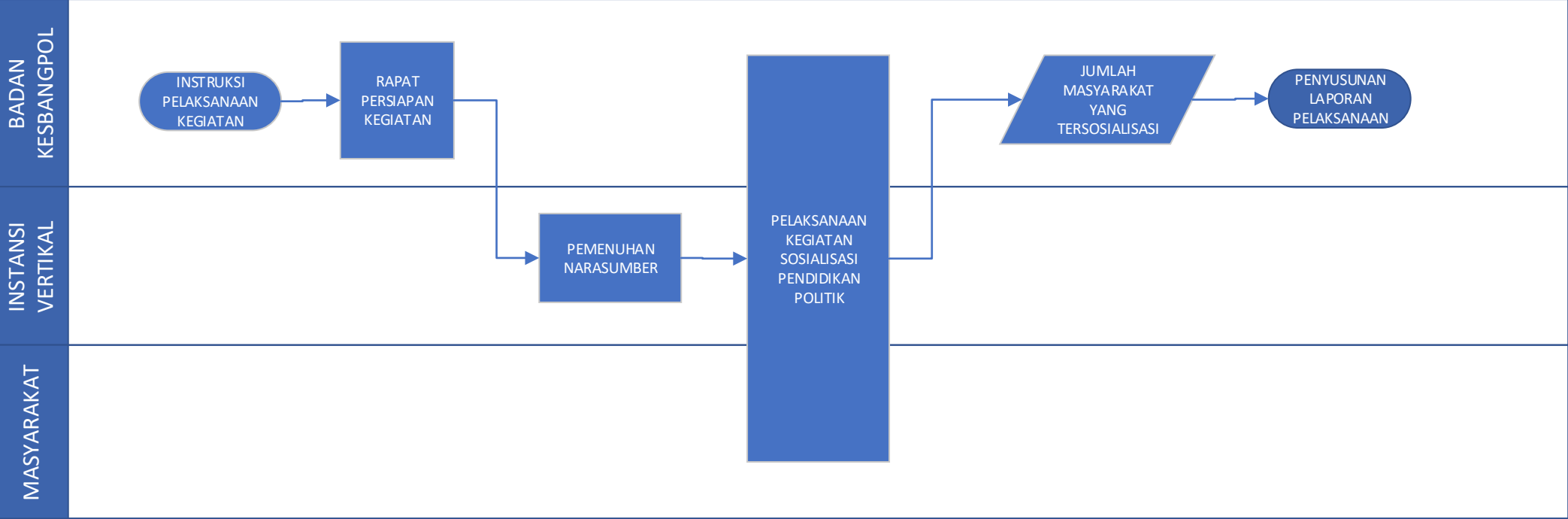


Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



SLW-05.1 CFM 03

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



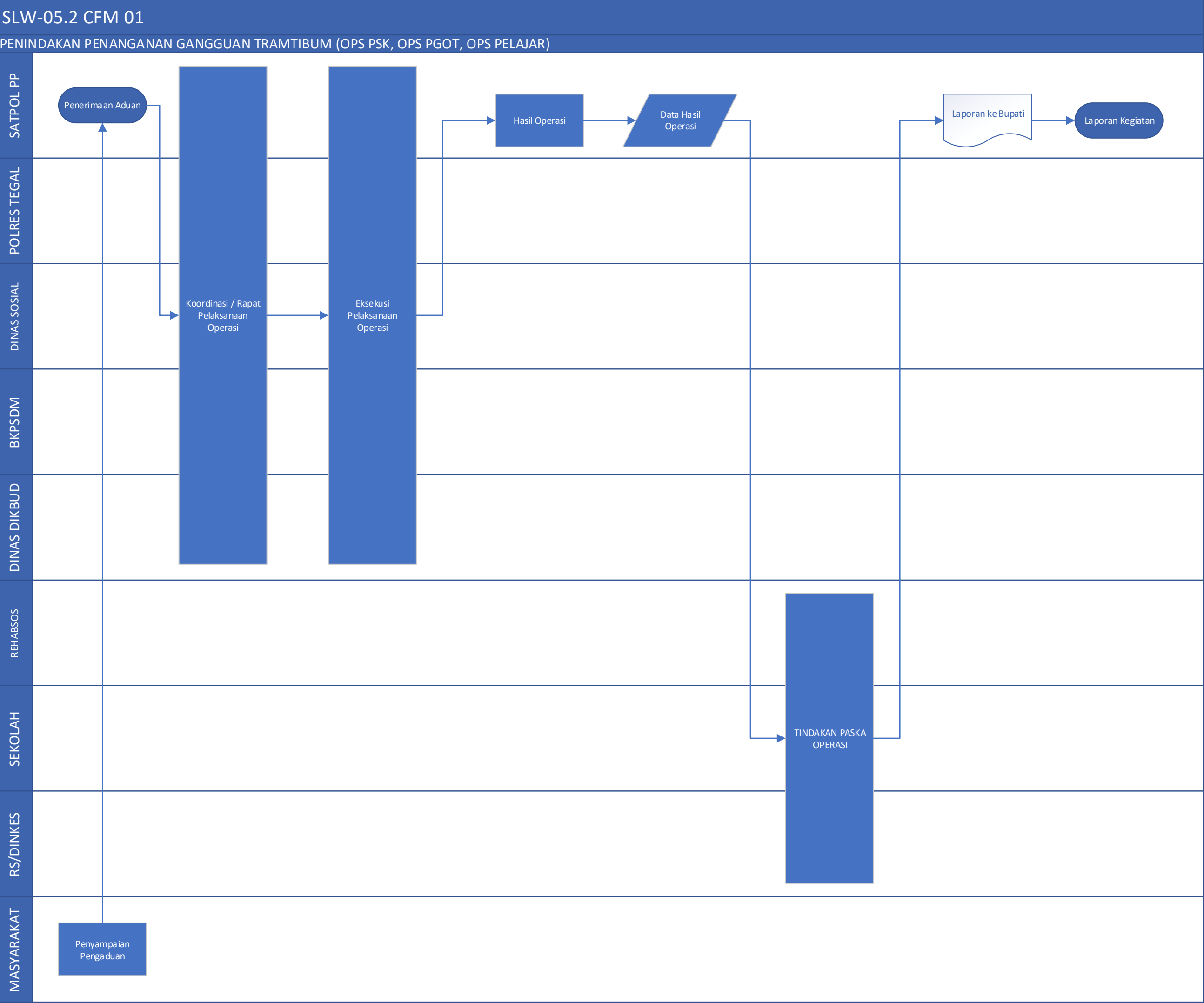
PETA RELASI

SLW-05.2

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

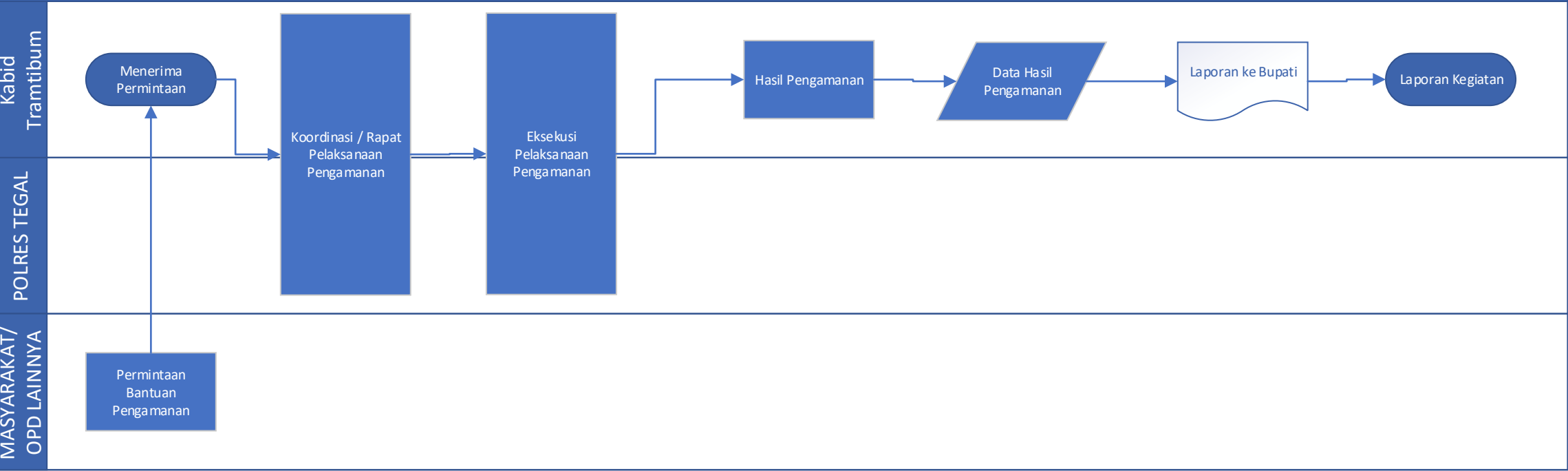
SATPOL PP

SELURUH PERANGKAT DAERAH



SLW-05.2 CFM 02

KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



PETA RELASI

SLW 05.03
PENANGGULANGAN BENCANA

BPBD

BAPPEDALITBANG

BKPSDM

INSPEKTORAT

BAPENDA

DINAS PUPR

Dinas Perkim

DINAS
KPTAN

BAG. HUKUM

BAG.
ORGANISASI

BAG.
PEMERINTAHAN

DINSOS

DLH

Bag. Kesra

SATPOL PP

DISKOMINFO

DINKES

Dinas Permasdes

KECAMATAN

DINAS
DIKBUD

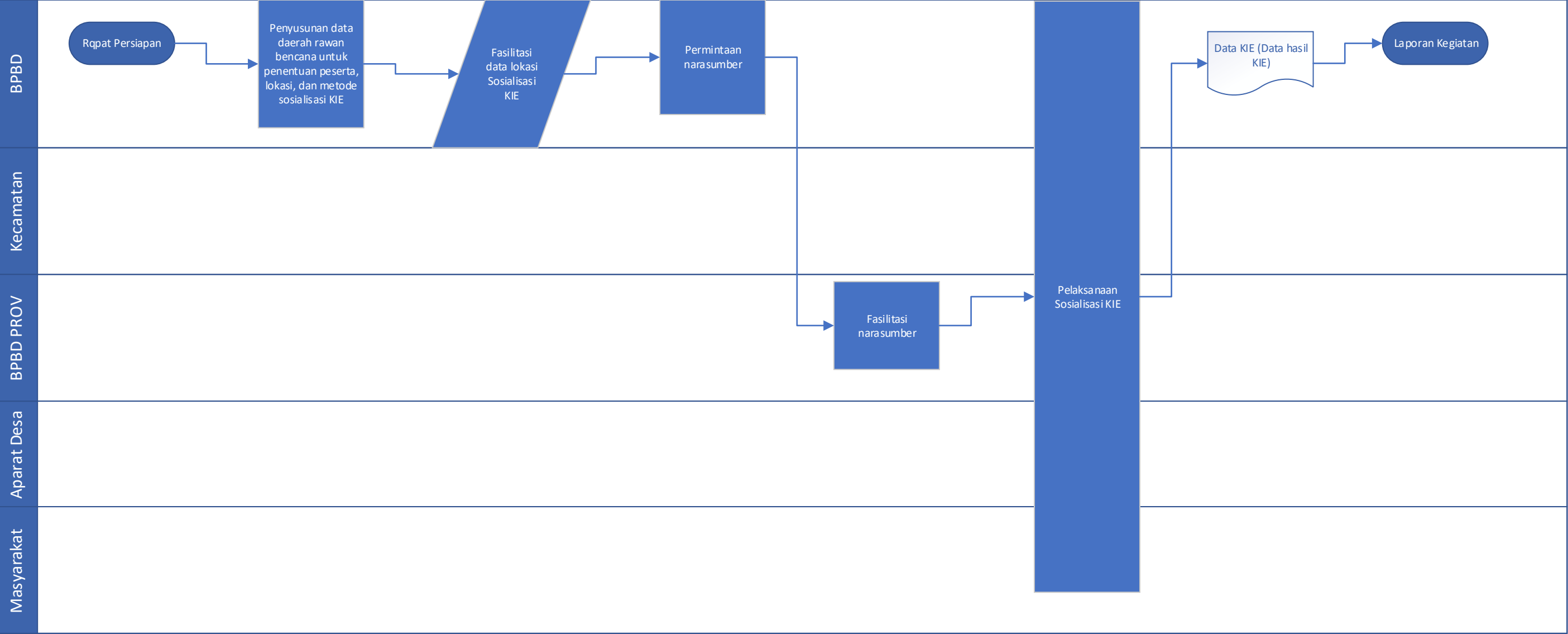
DINAS
DUKCAPIL

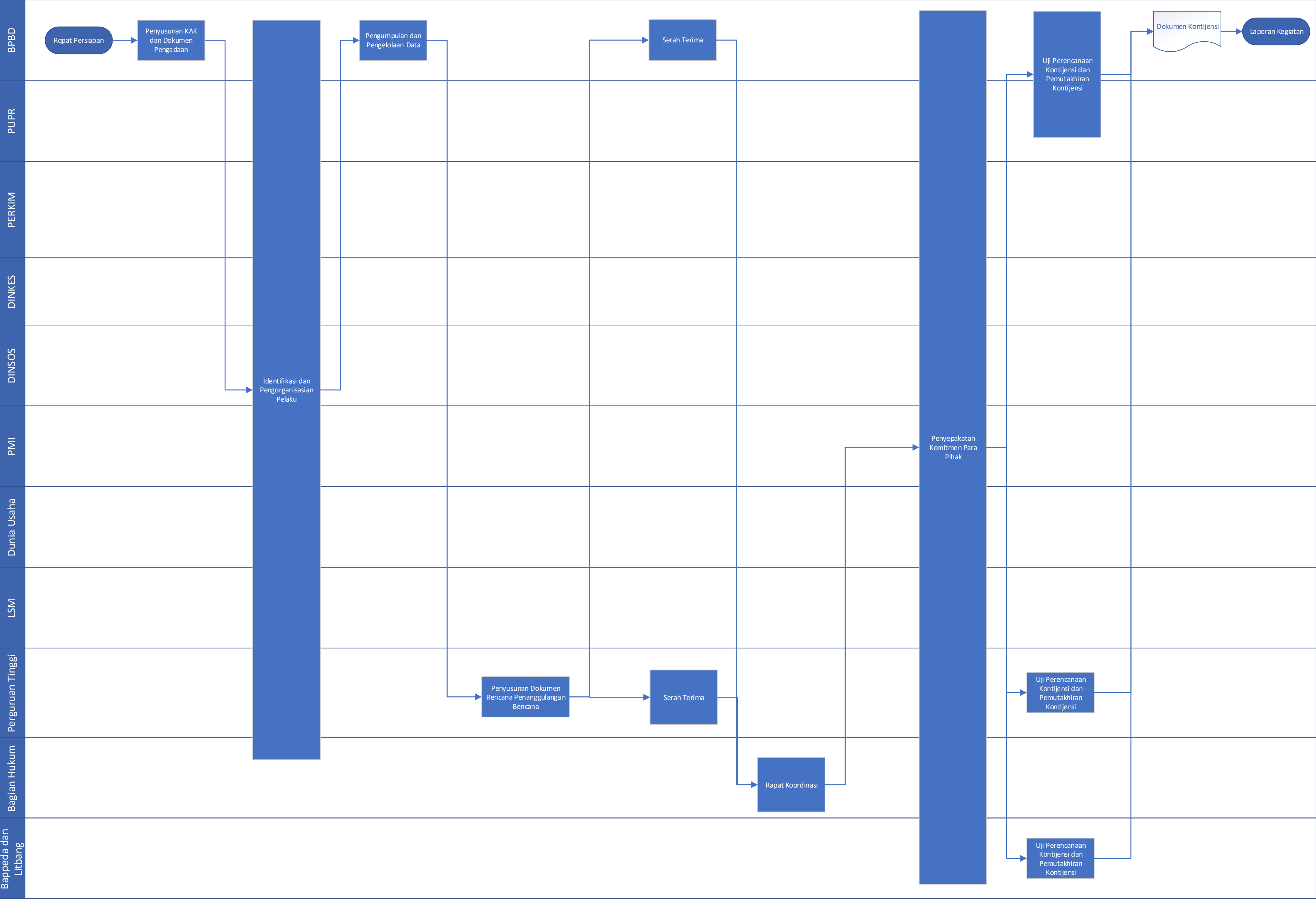
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

BAG. PBJ

SLW-05.3 CFM 01

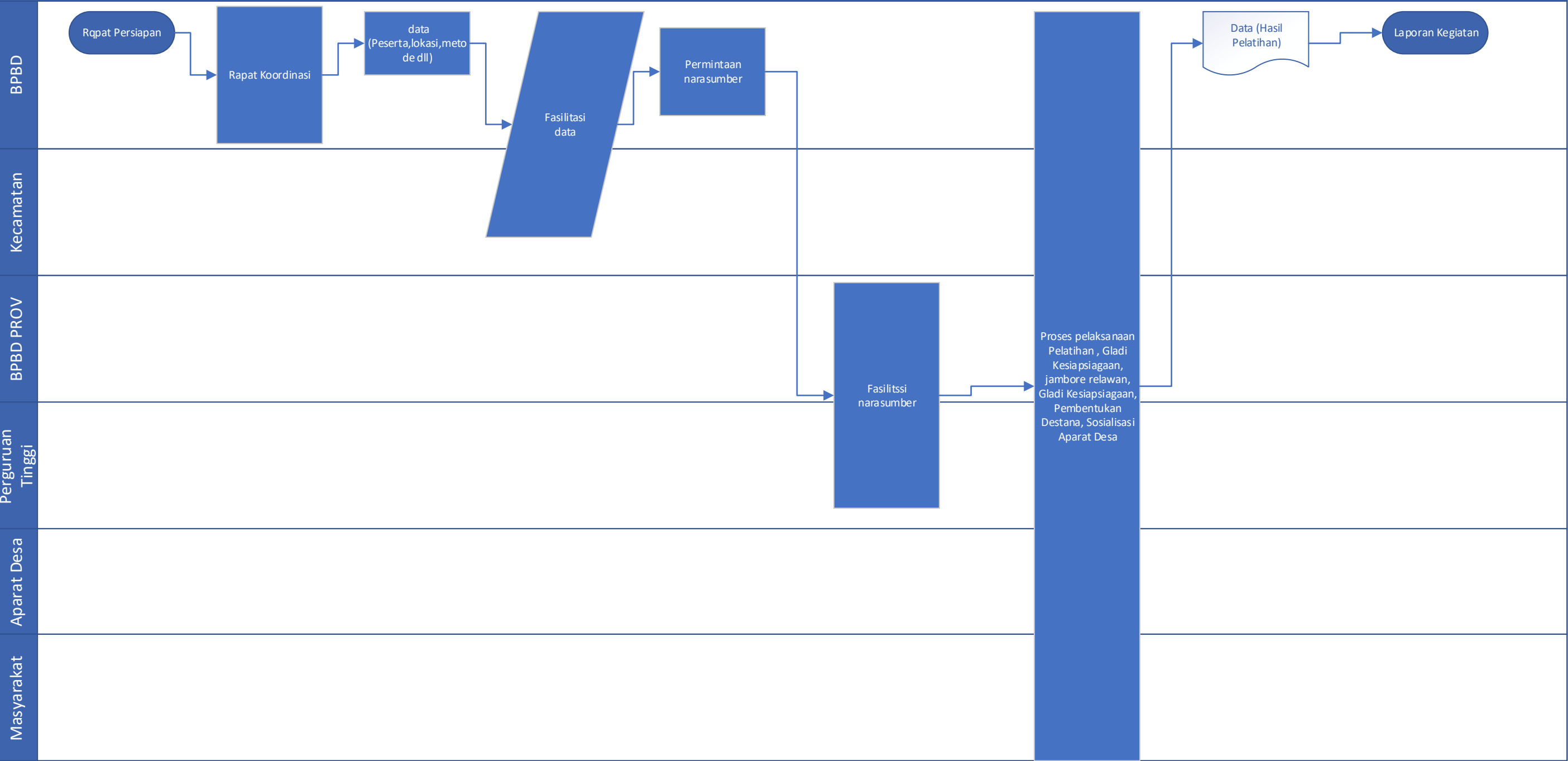
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

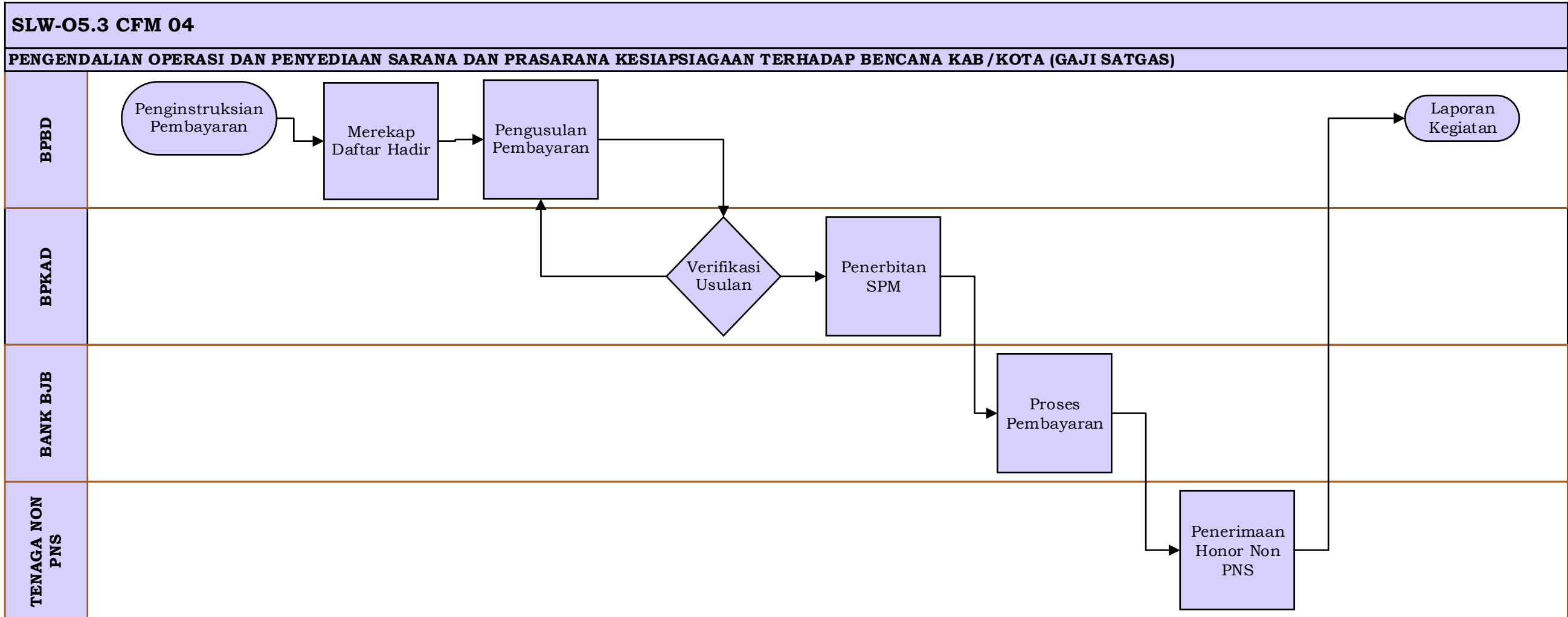


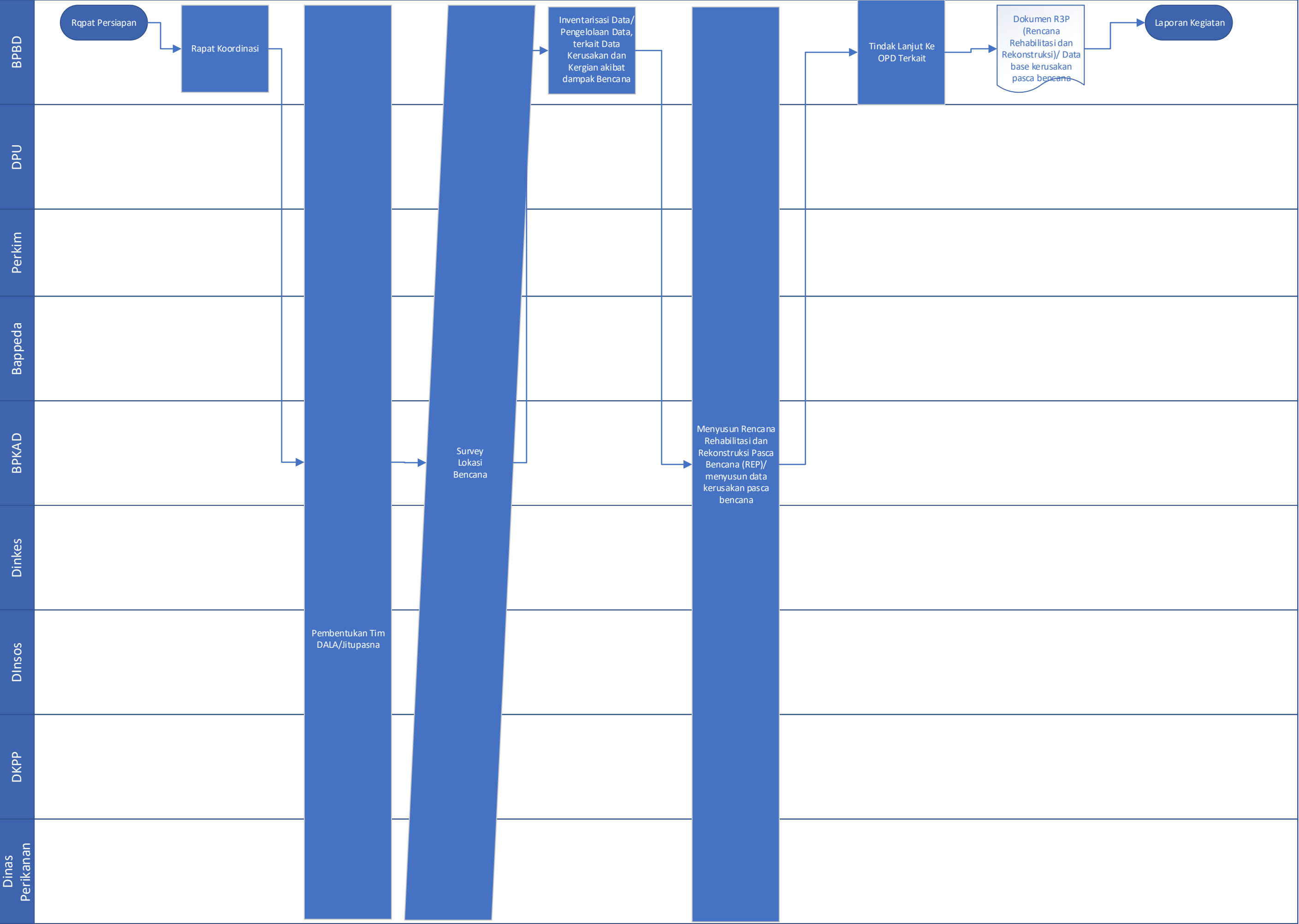


SLW-05.3 CFM 03

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota

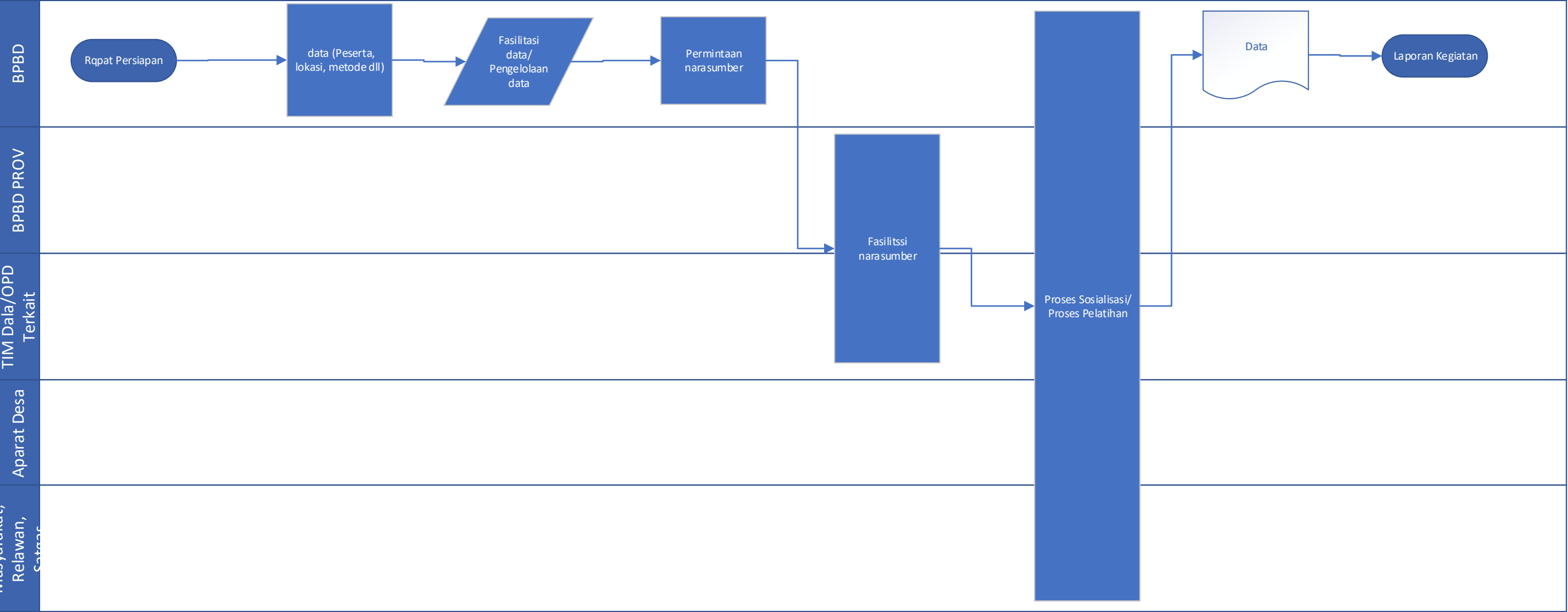






SLW-05.3 CFM 06

Penanganan Pasca Bencana (Sosialisasi Pasca Bencana)

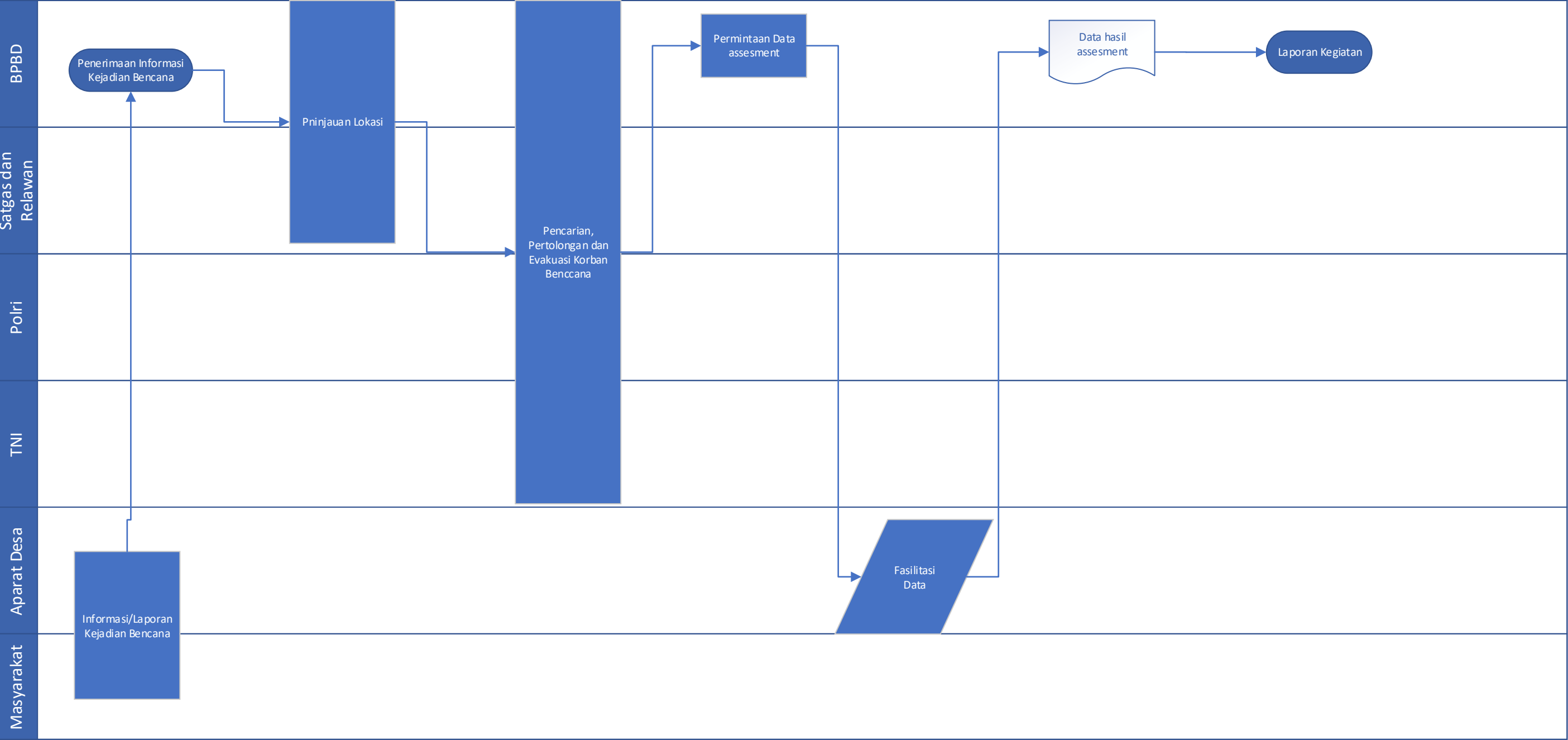


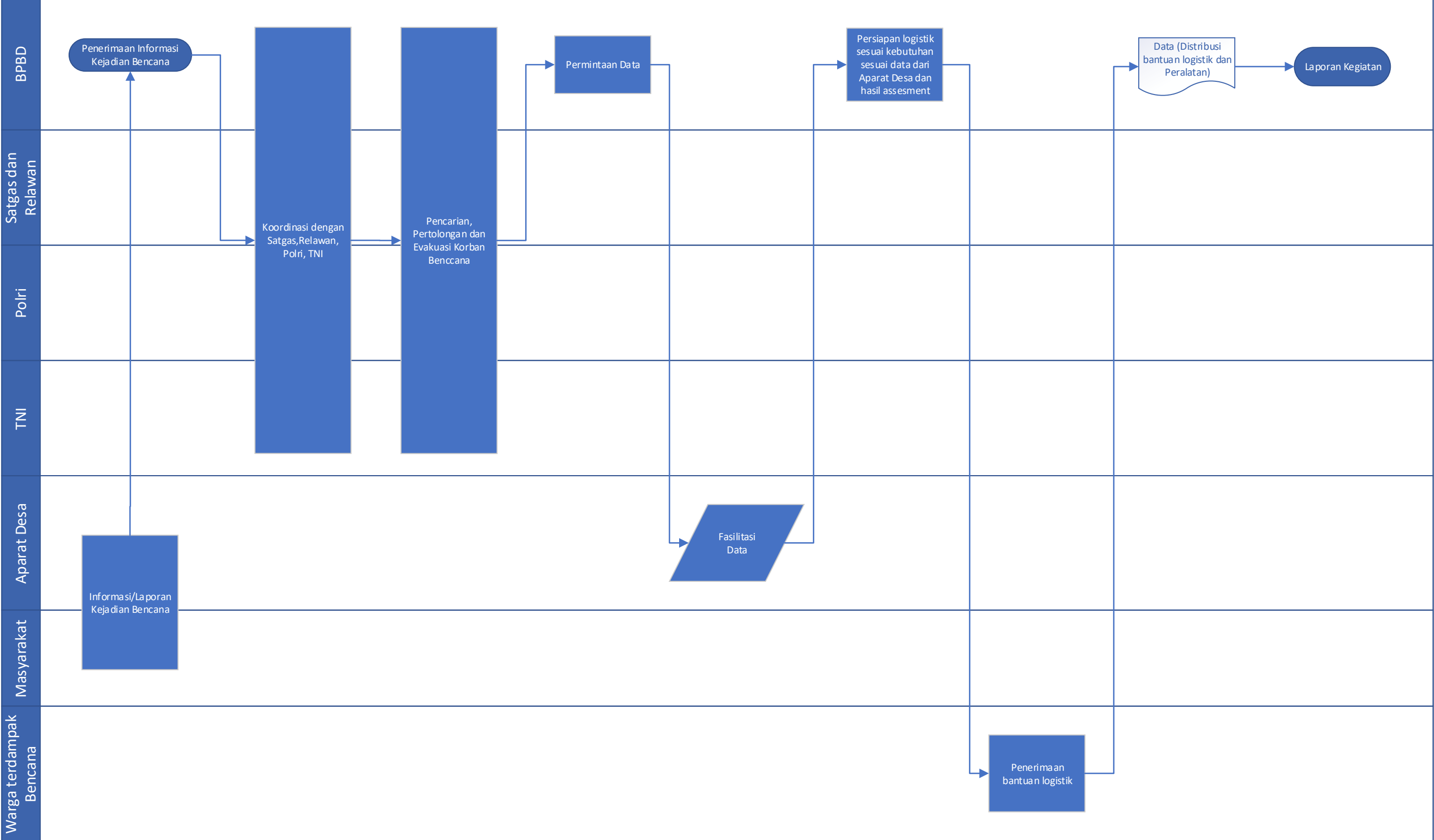
Respon Cepat Darurat Bencana



SLW-05.3 CFM 08

Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana





PETA RELASI

SLW-05.4
Peningkatan Pelestarian dan Pewarisan Budaya

DINAS DIKBUD

BPKAD

BAPPEDALITBANG

BKPSDM

DINAS PUPR

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUKUM

BAGIAN PBJ

INSPEKTORAT

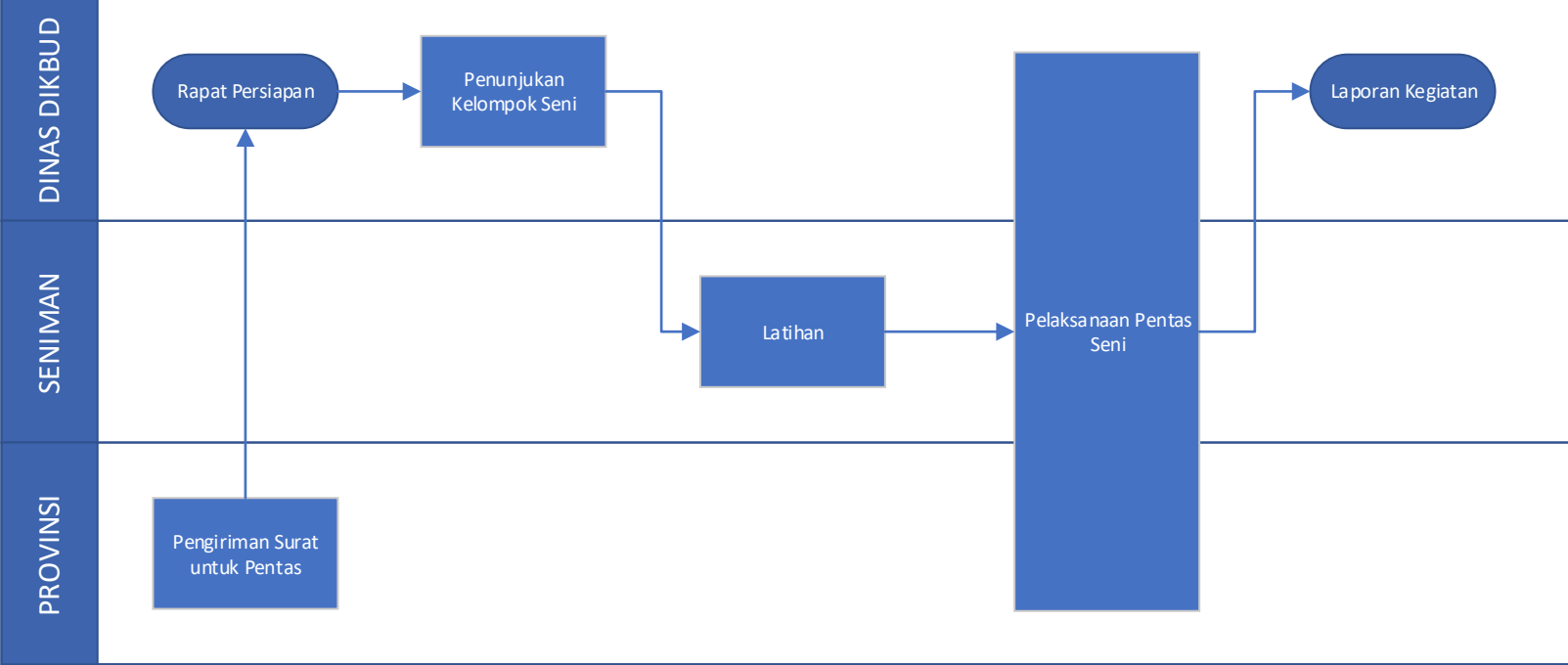
BAPENDA

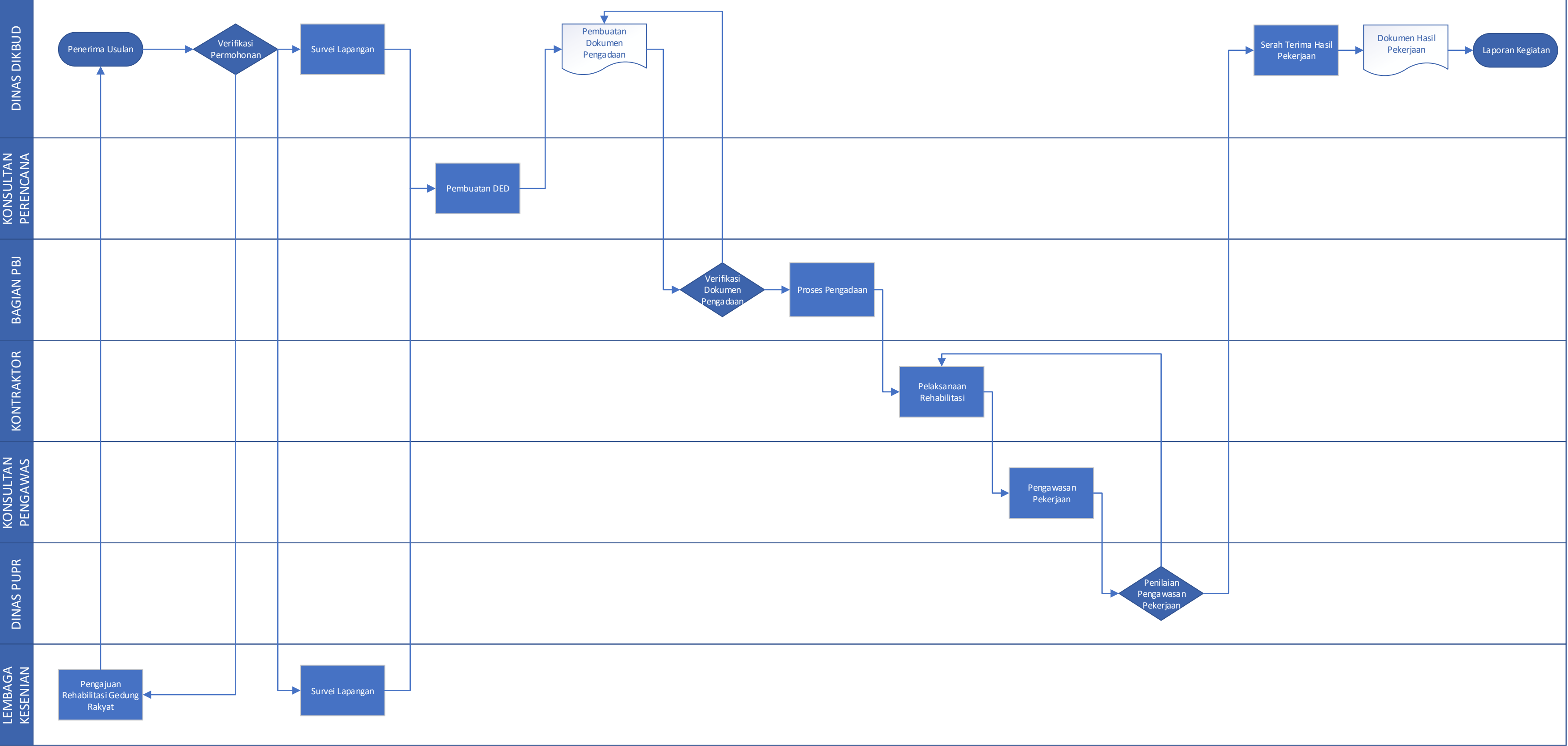
DINAS LH

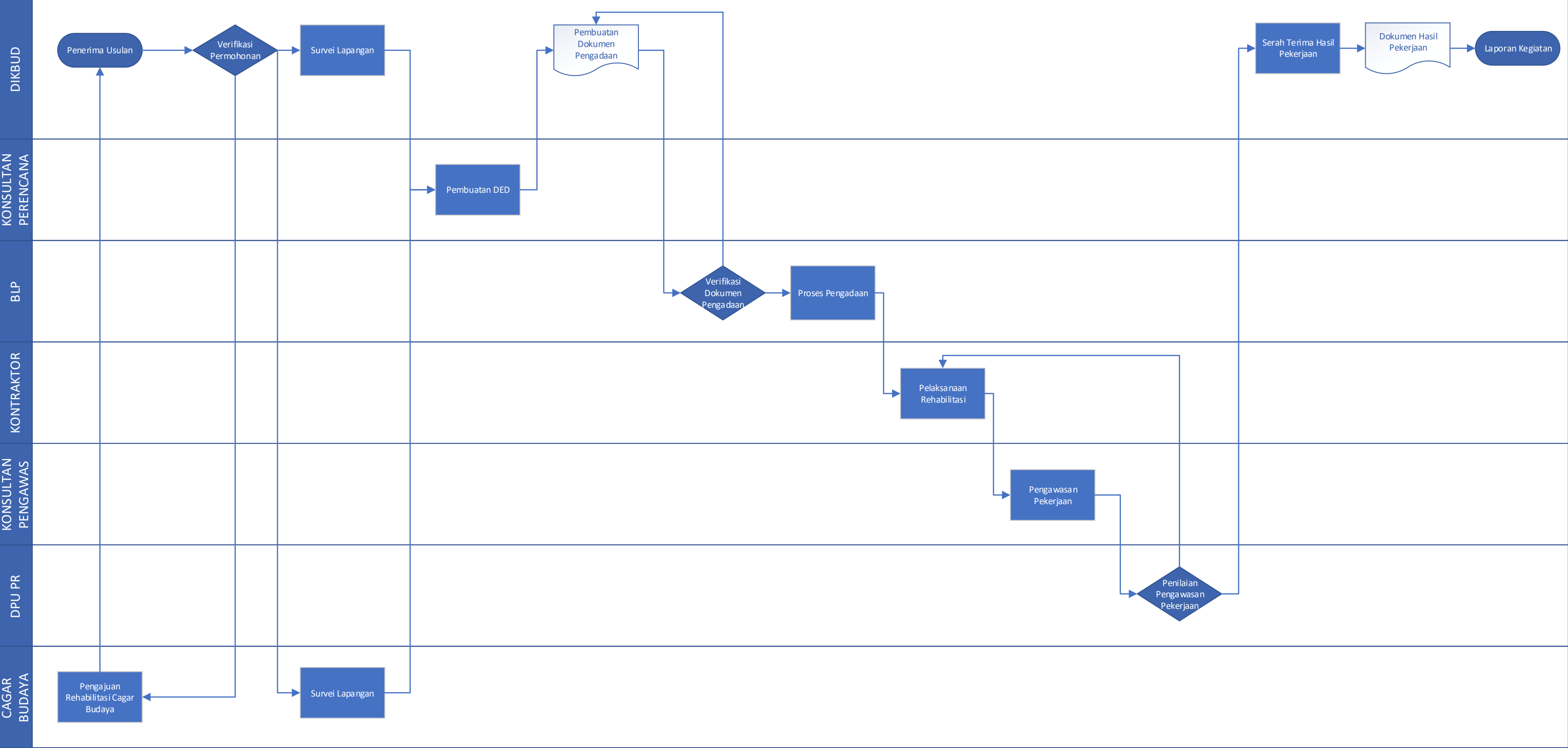
SEKRETARIAT DPRD

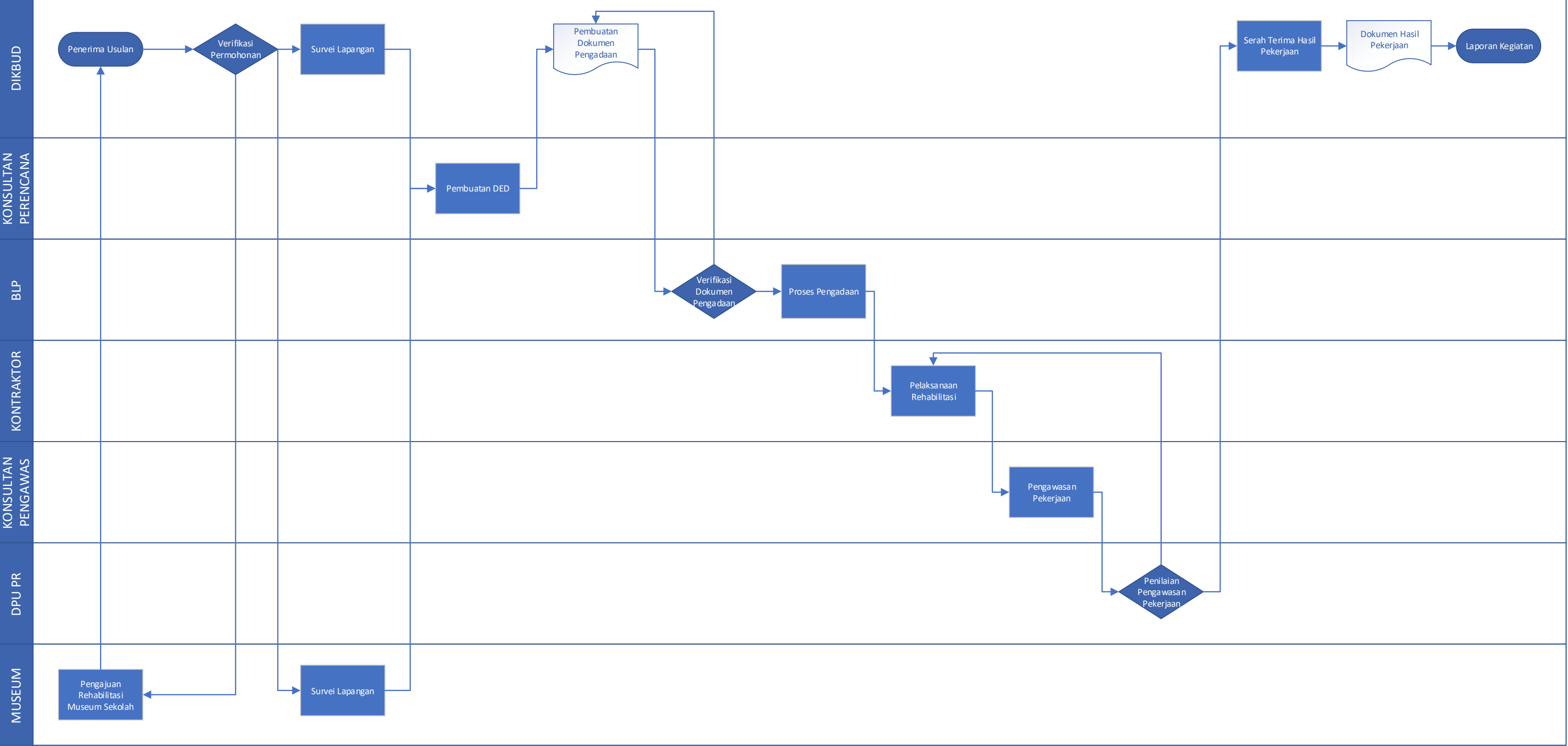
DINAS PORAPAR

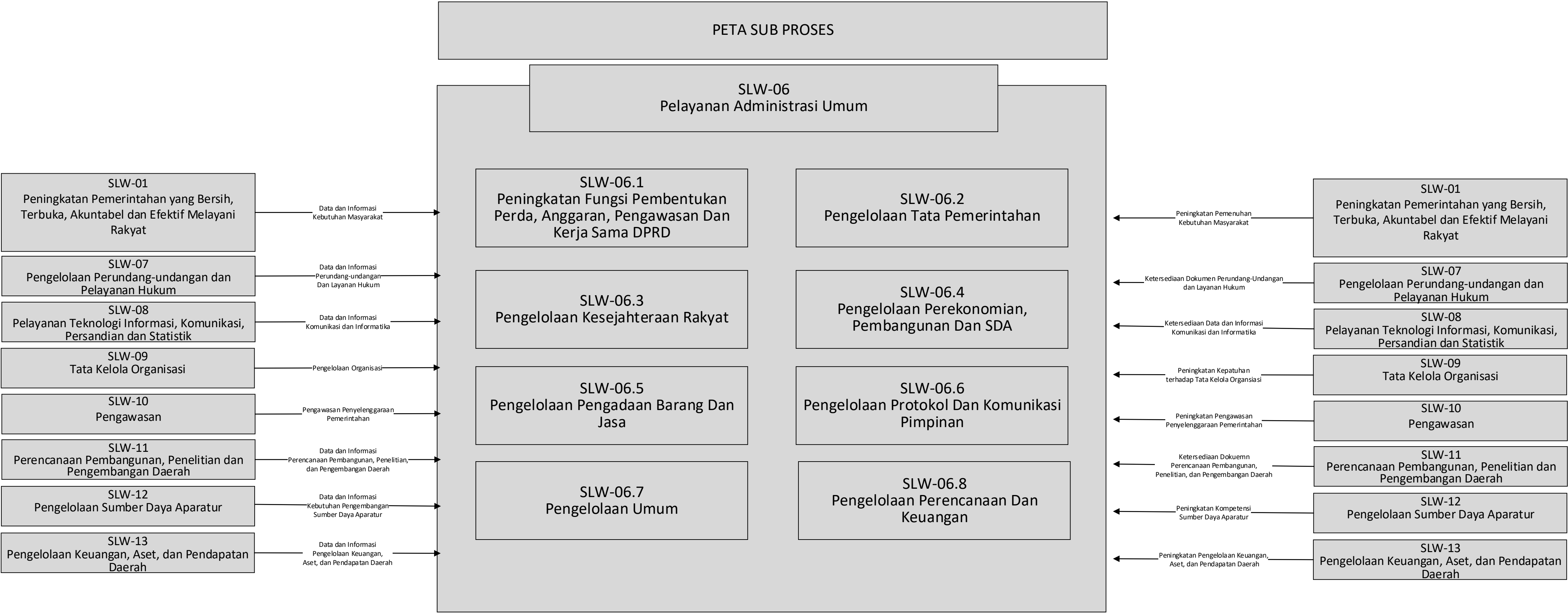
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional











PETA RELASI

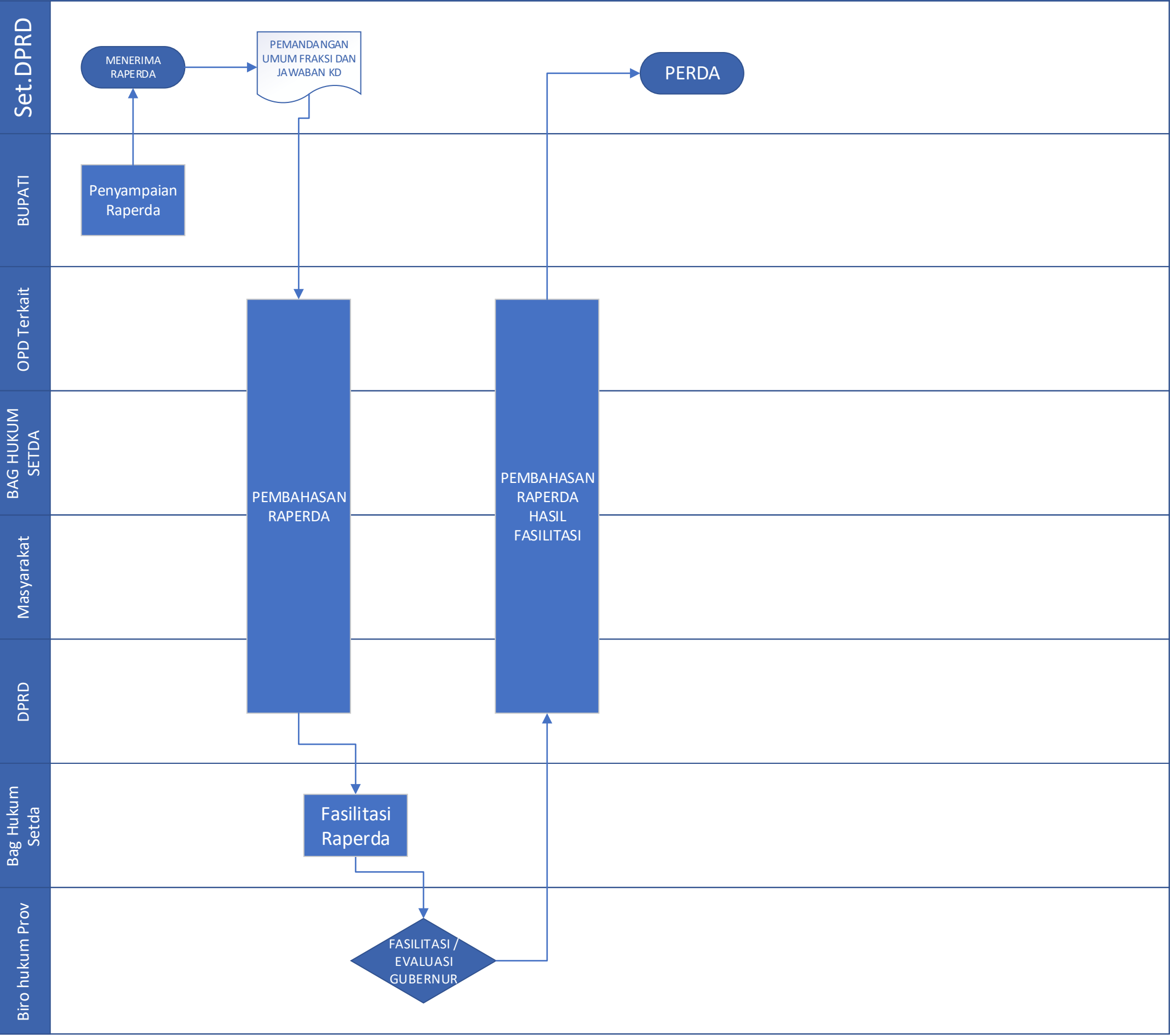
SLW-06.1

Peningkatan Fungsi Pembentukan Perda, Anggaran, Pengawasan Dan Kerja Sama
DPRD

SEKRETARIAT DPRD

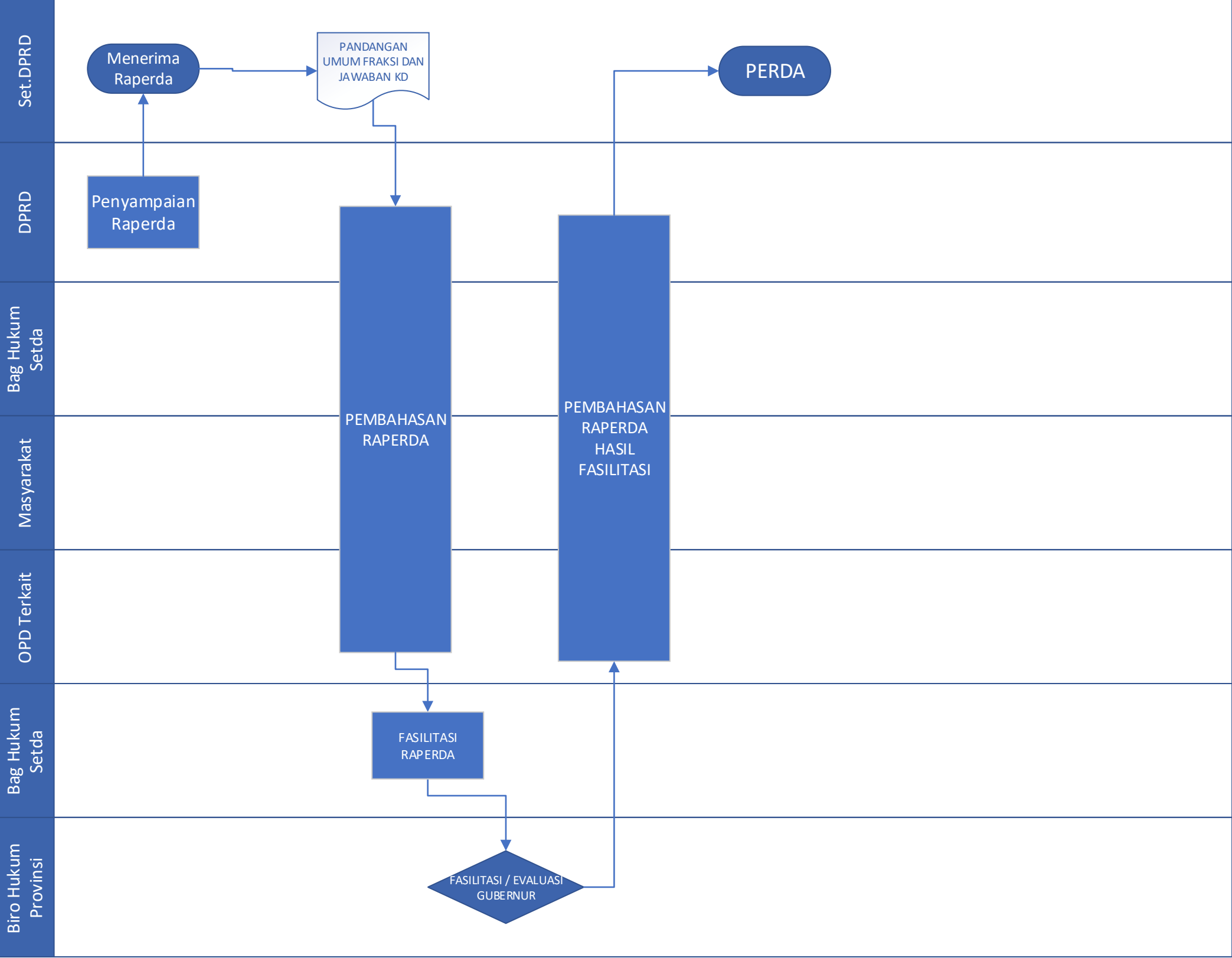
SEMUA PERANGKAT DAERAH

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dari Bupati)



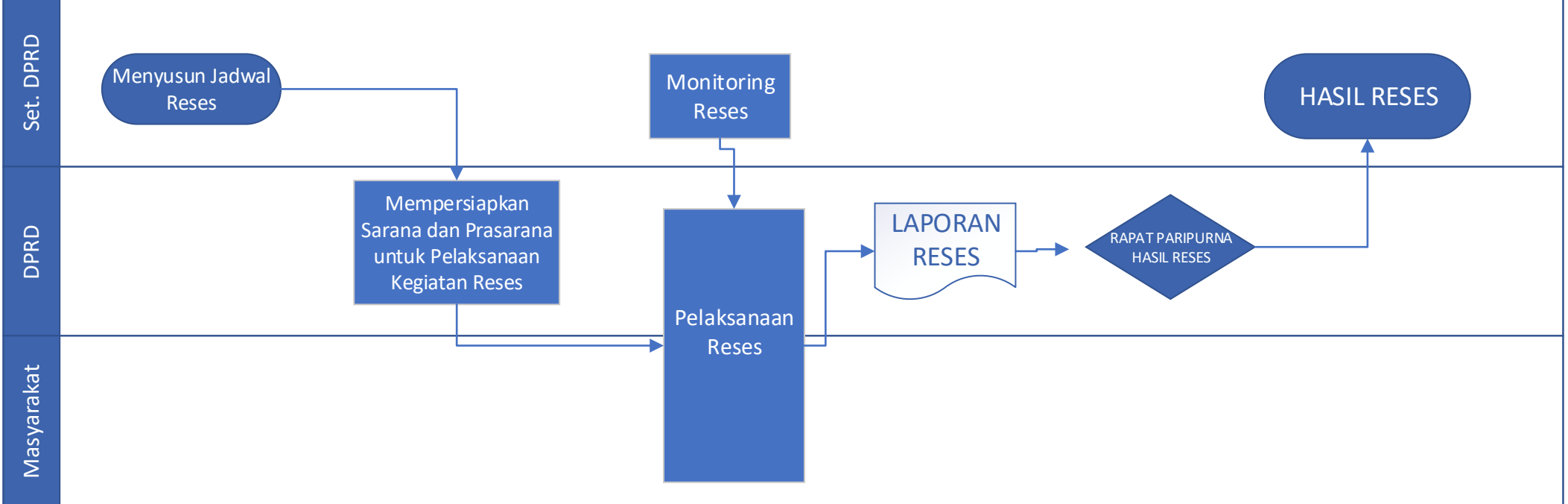
SLW-06.1 CFM 02

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif dari DPRD)



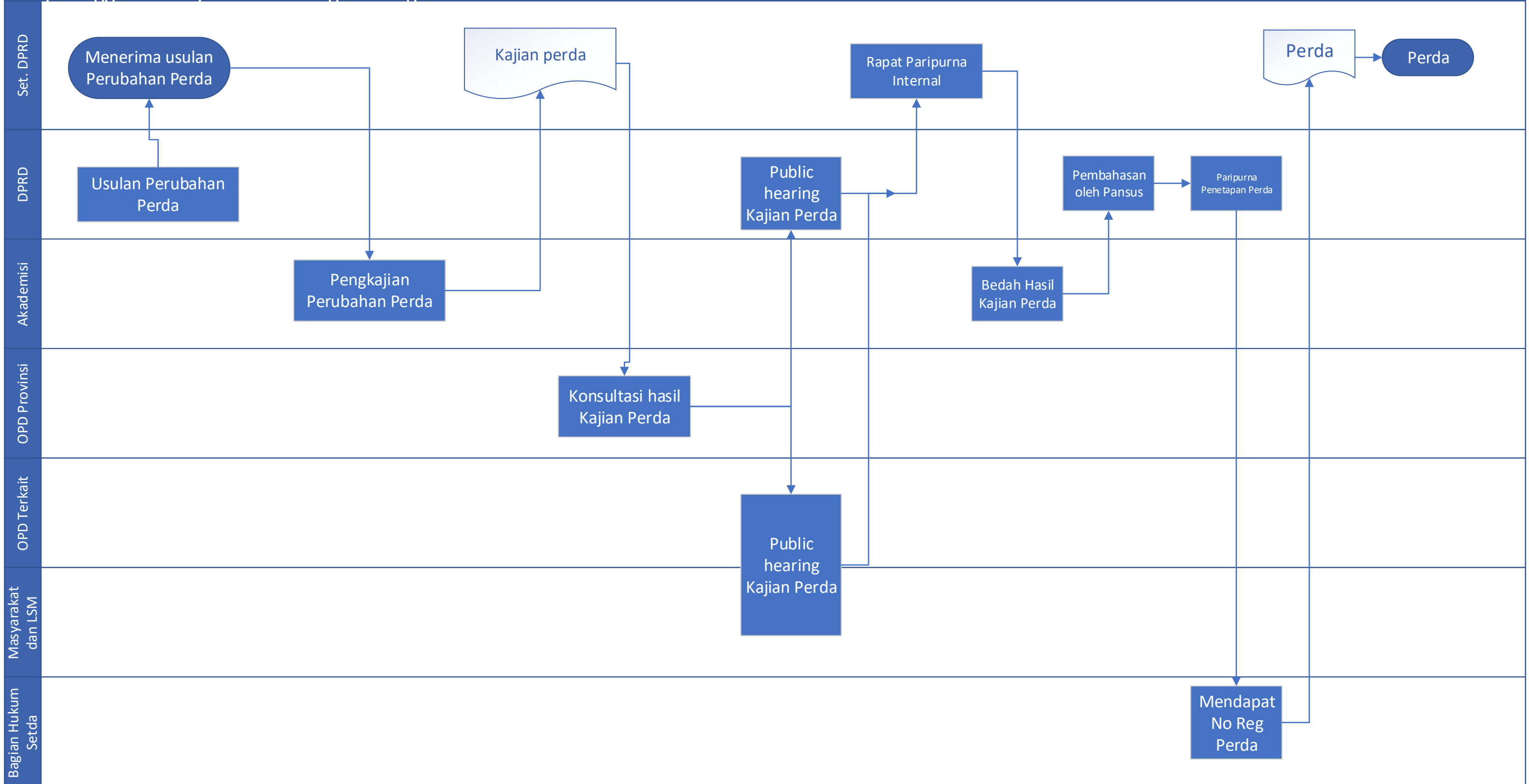
SLW-06.1 CFM 03

Pelaksanaan Reses



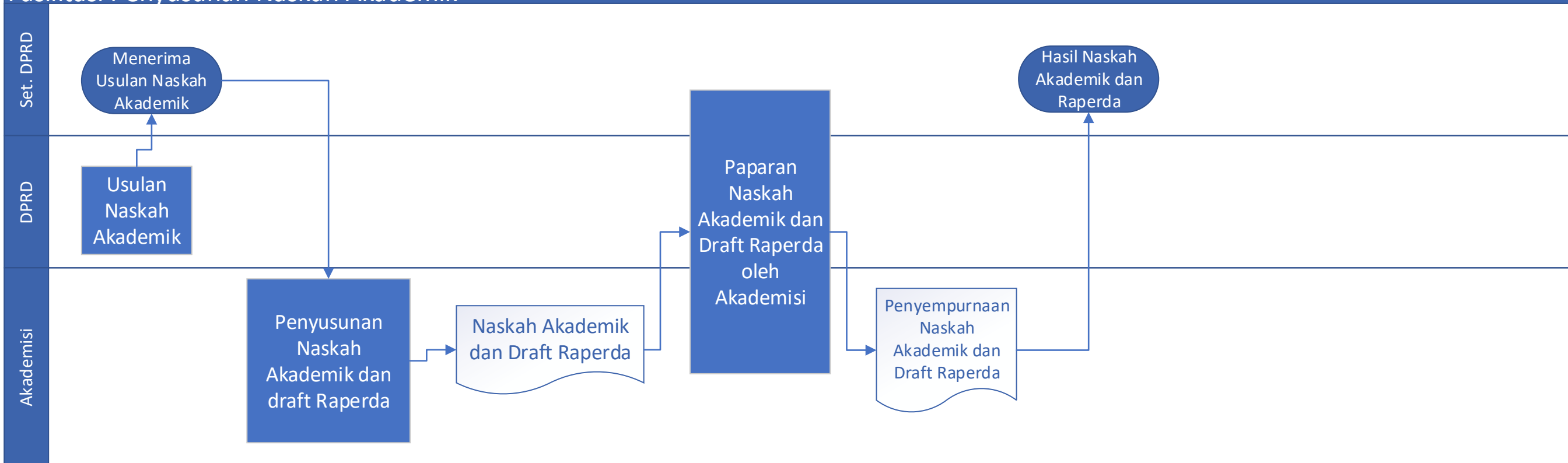
SLW-06.1 CFM 04

Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan



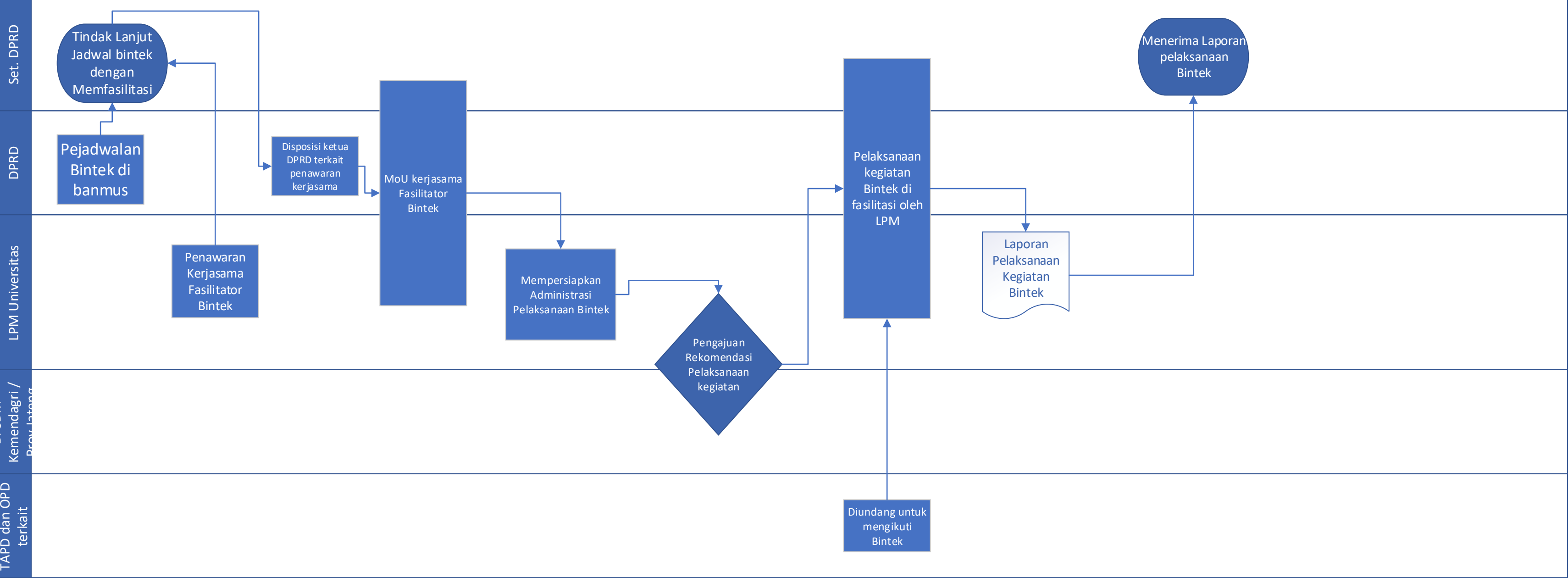
SLW-06.1 CFM 05

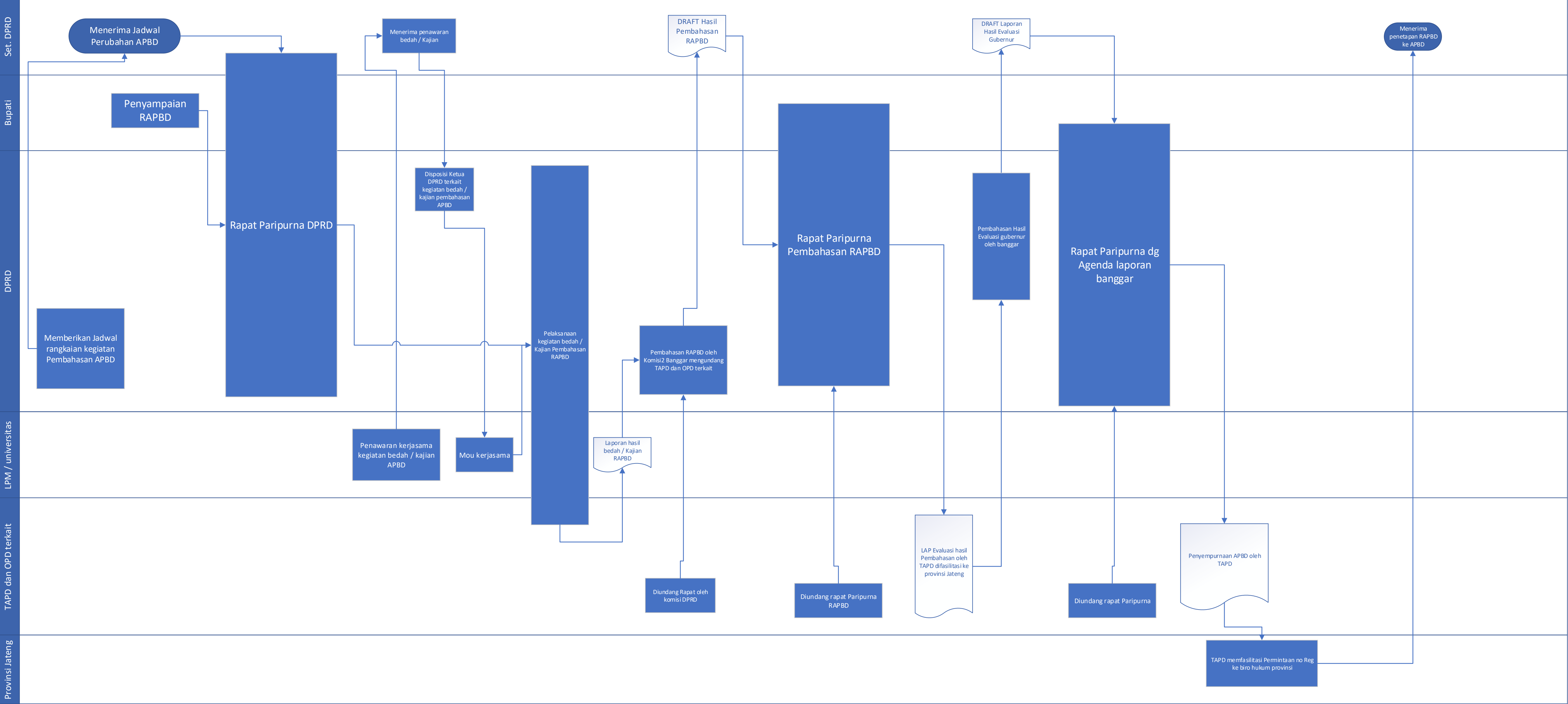
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik



SLW-06.1 CFM 06

Pendalaman Tugas DPRD (Bintek)





PETA RELASI

SLW-06.2

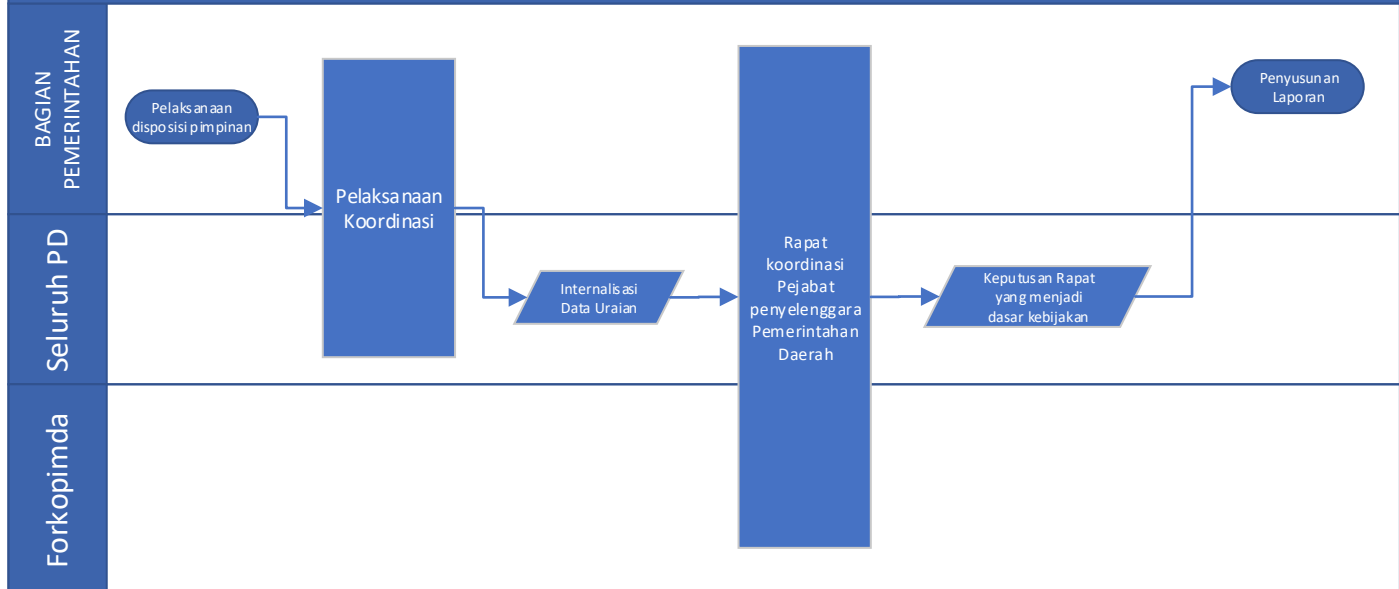
PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEMUA PERANGKAT DAERAH

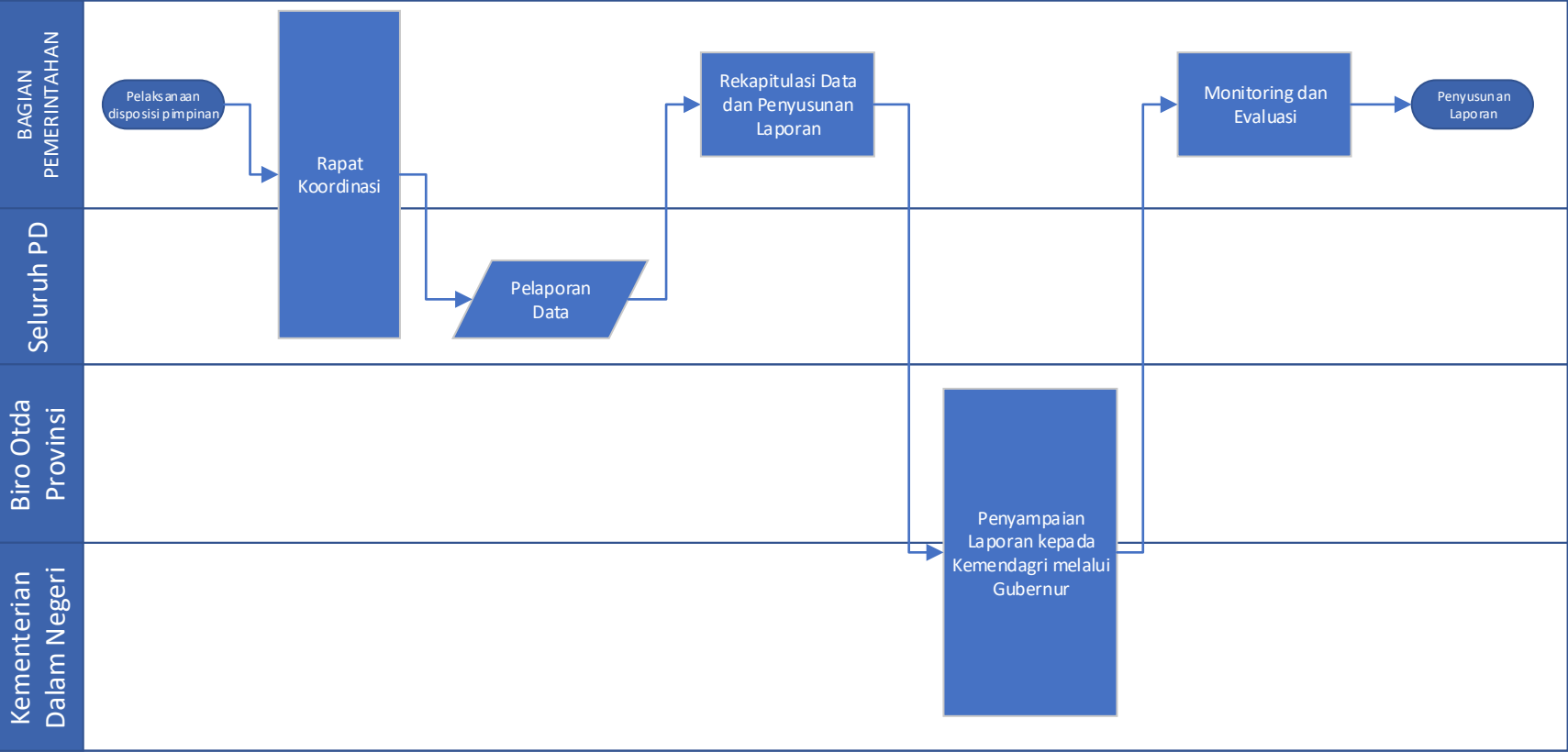
SLW-06.2 CFM 01

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Rakor Pejabat Penyelenggara Pemerintahan Daerah)



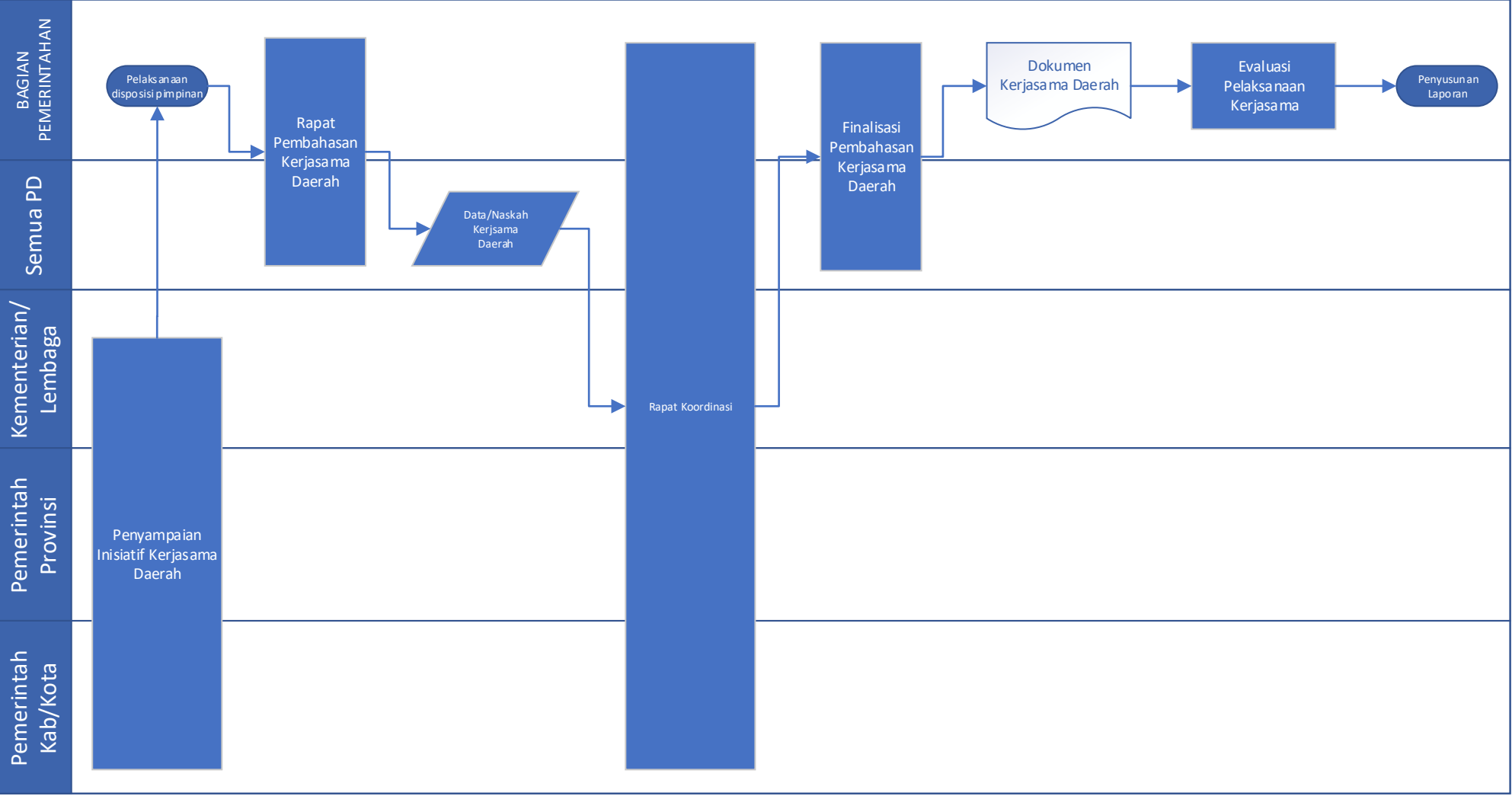
SLW-06.2 CFM 02.1

OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA (LPPD, SPM, Rakor Pelaksanaan Otda)



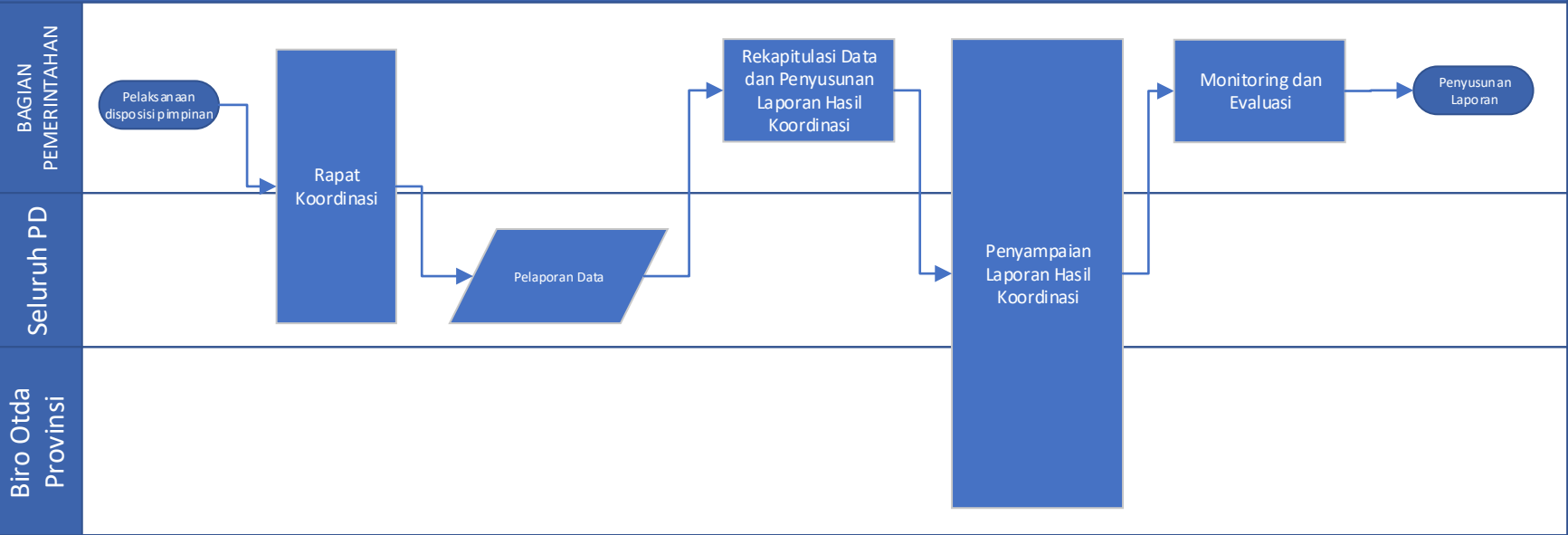
SLW-06.2 CFM 02.2

OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA (Kerjasama Daerah)



SLW-06.2 CFM 03

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN (BATAS DAERAH, RUPABUMI, TILIK DESA)



PETA RELASI

SLW-06.4

Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan Dan SDA

BAGIAN EKBANG

DINAS SOSIAL

Dinas PMPTSP

Dinas Porapar

Dinas Kop, UKM dan
Perdagangan

Dinas
Perintransnaker

Dinas Perkim

Dinas PUPR

BAPPEDALITBANG

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KPTAN

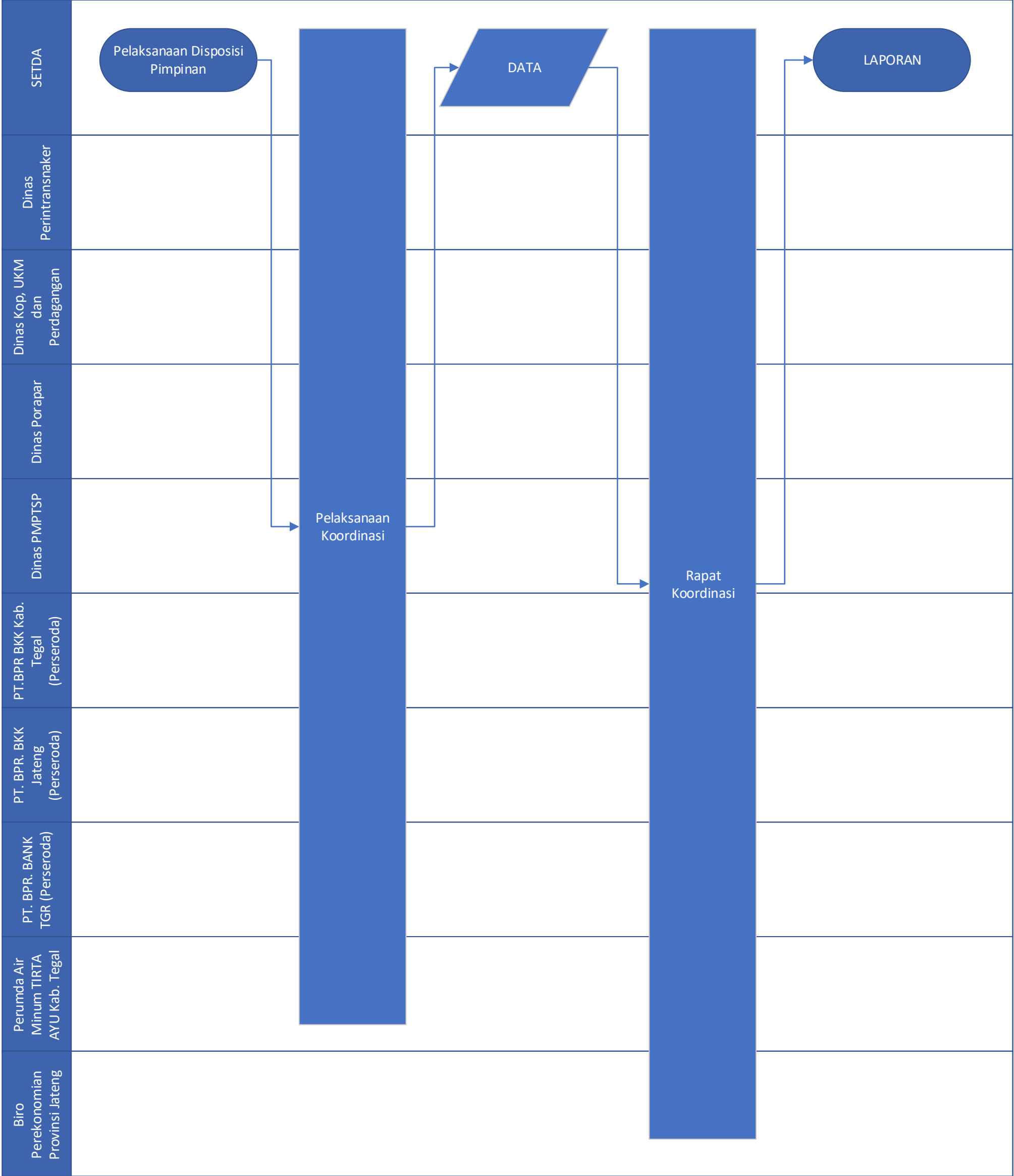
DINAS PERIKAN AN

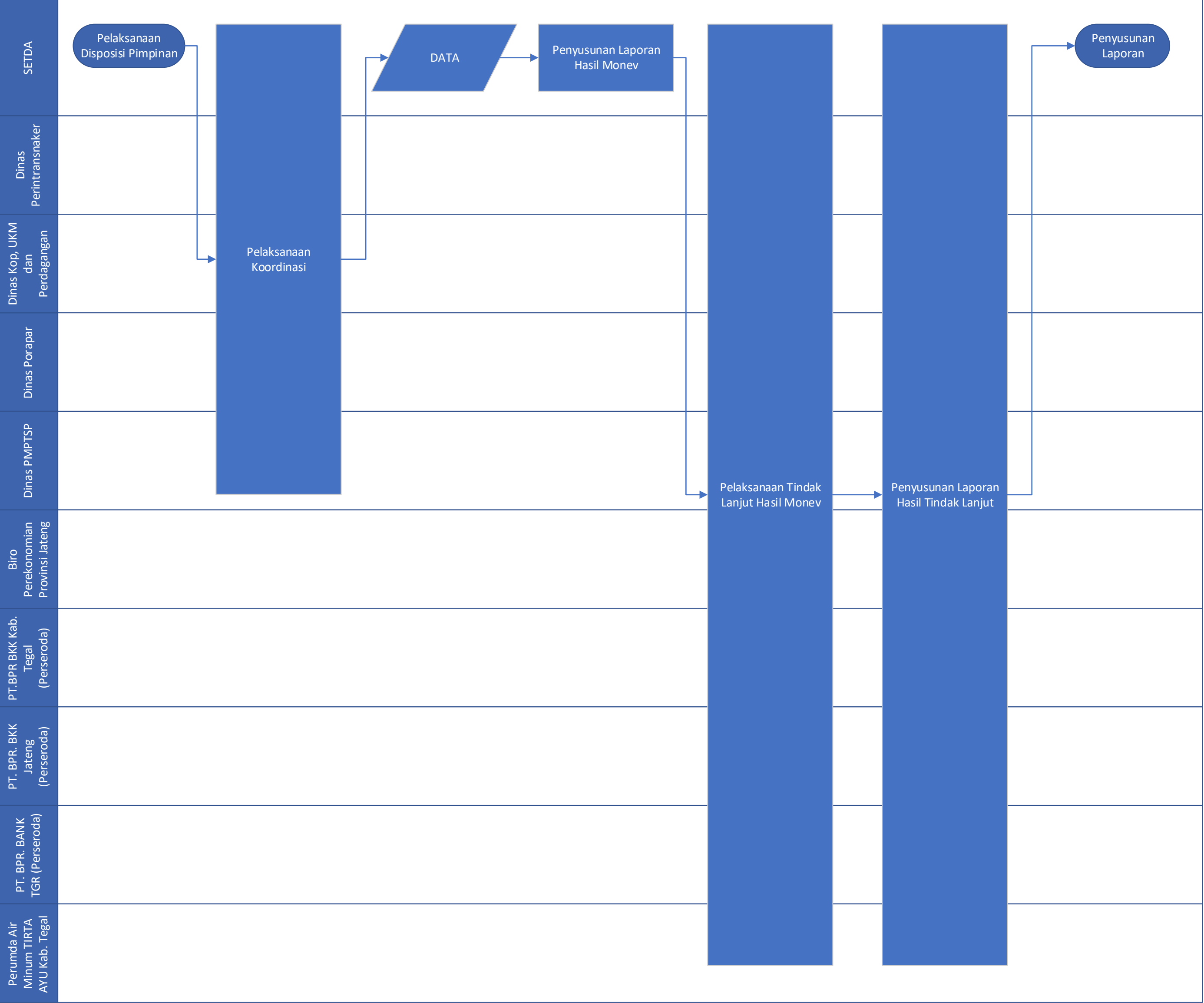
DINAS LH

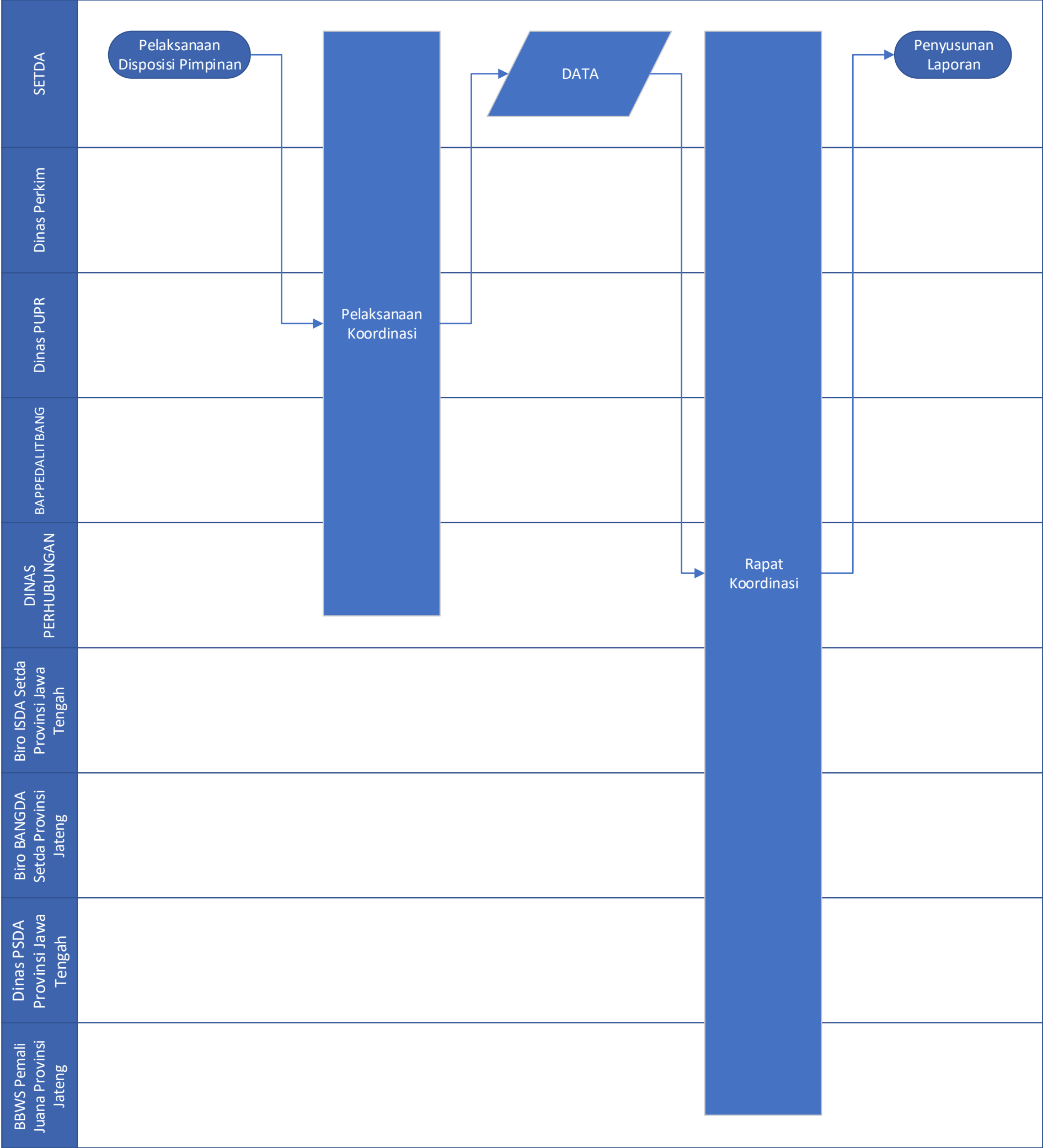
DINAS KESEHATAN

SATPOL PP

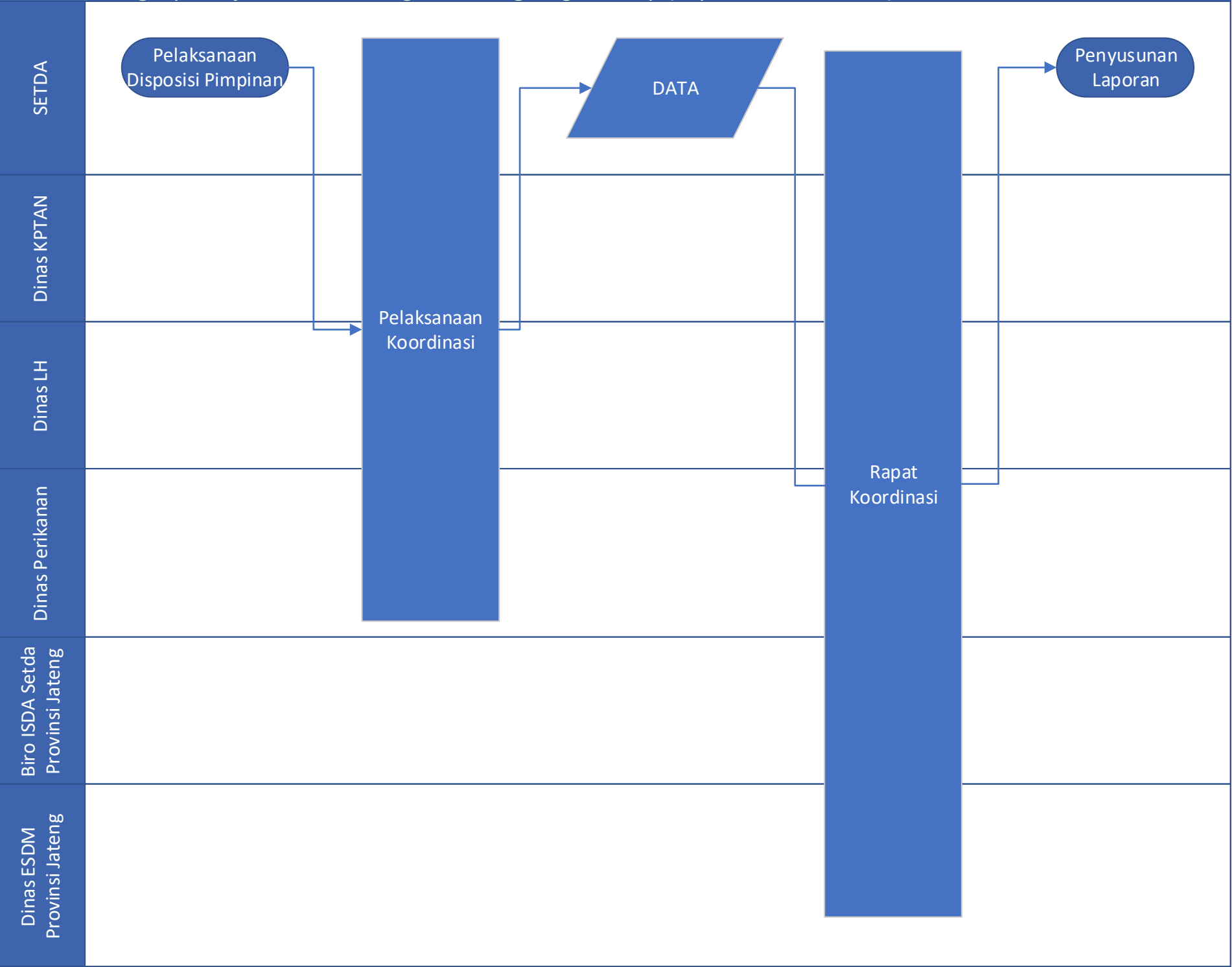
DINAS KOMINFO

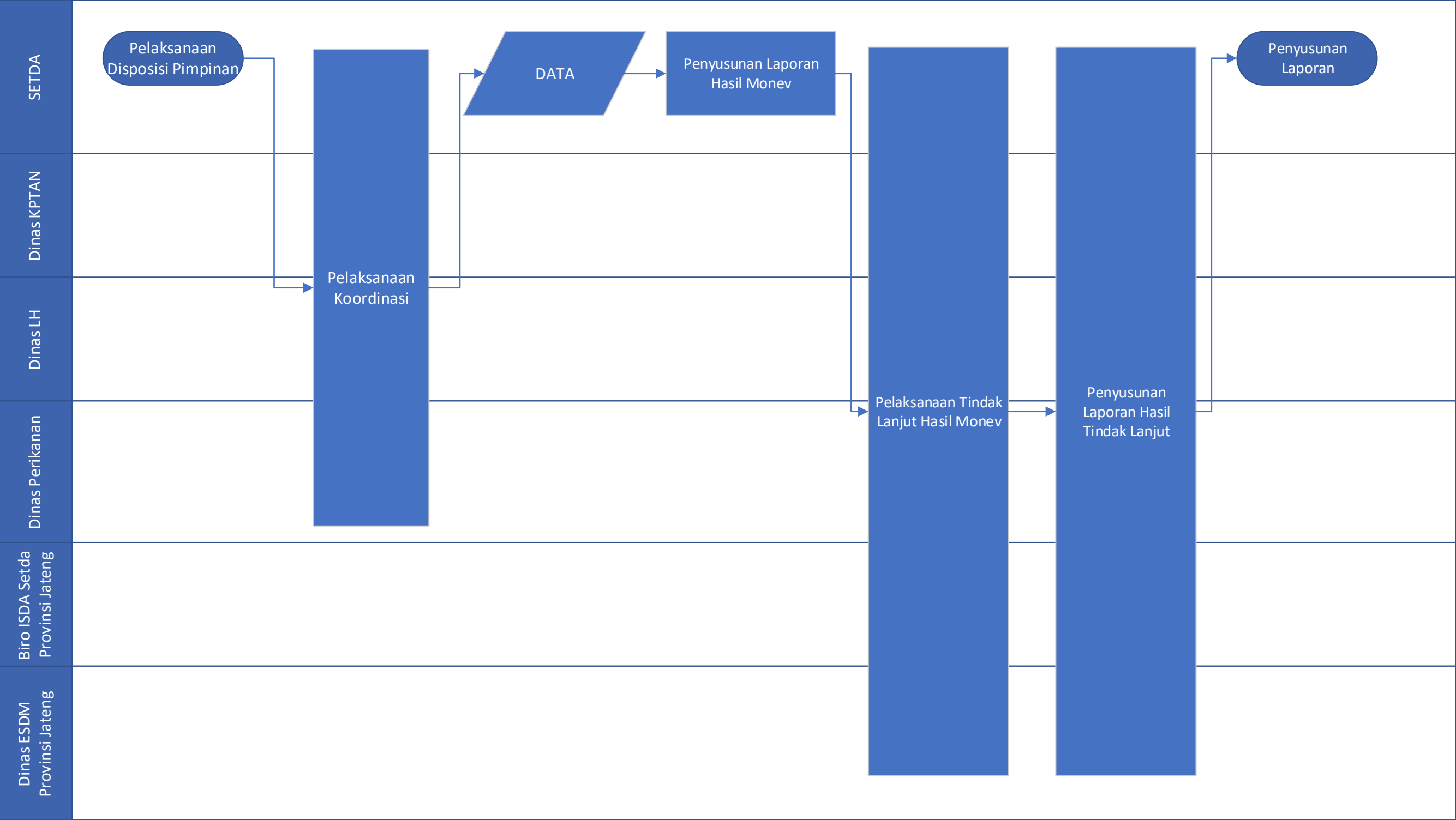


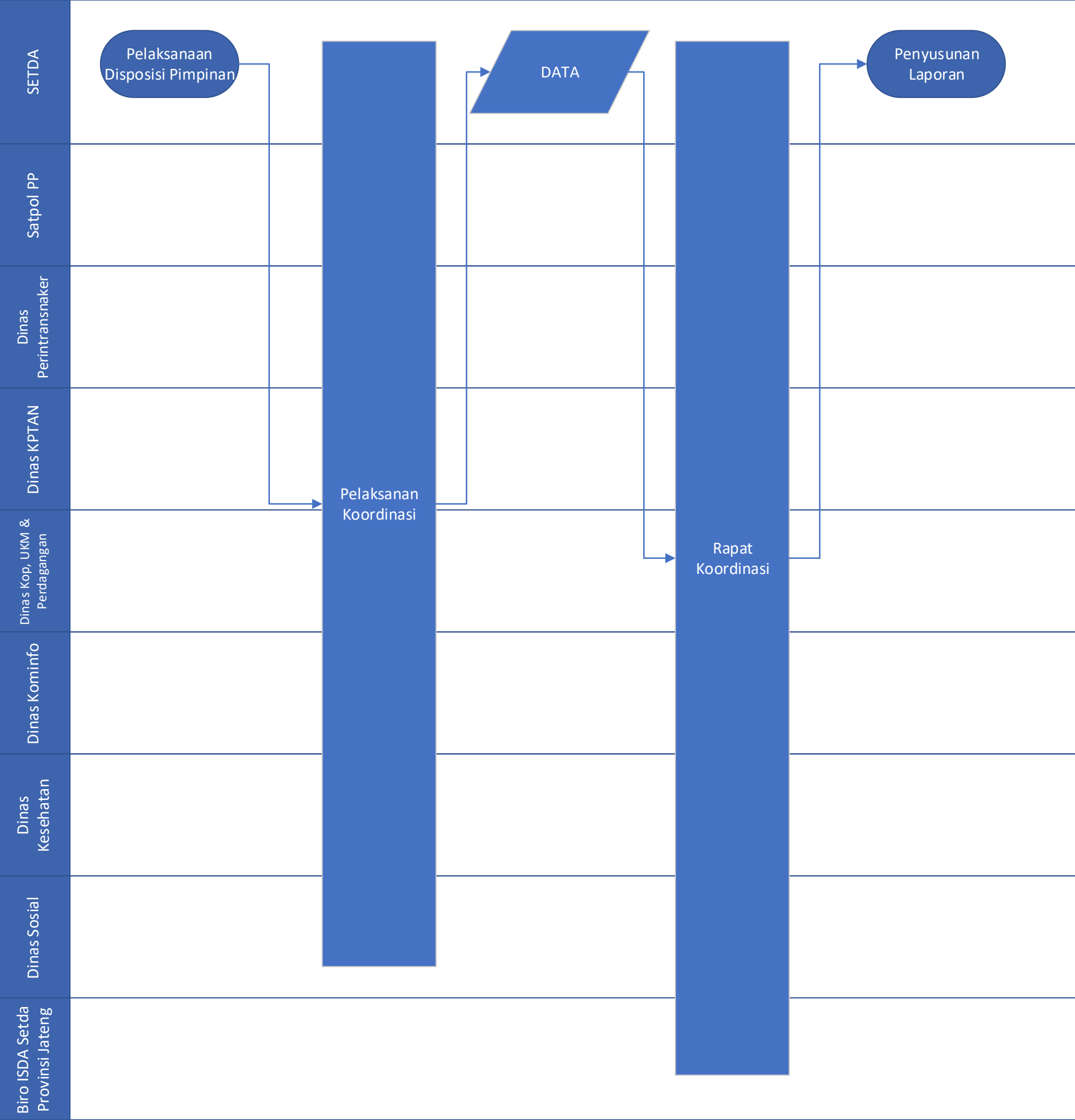


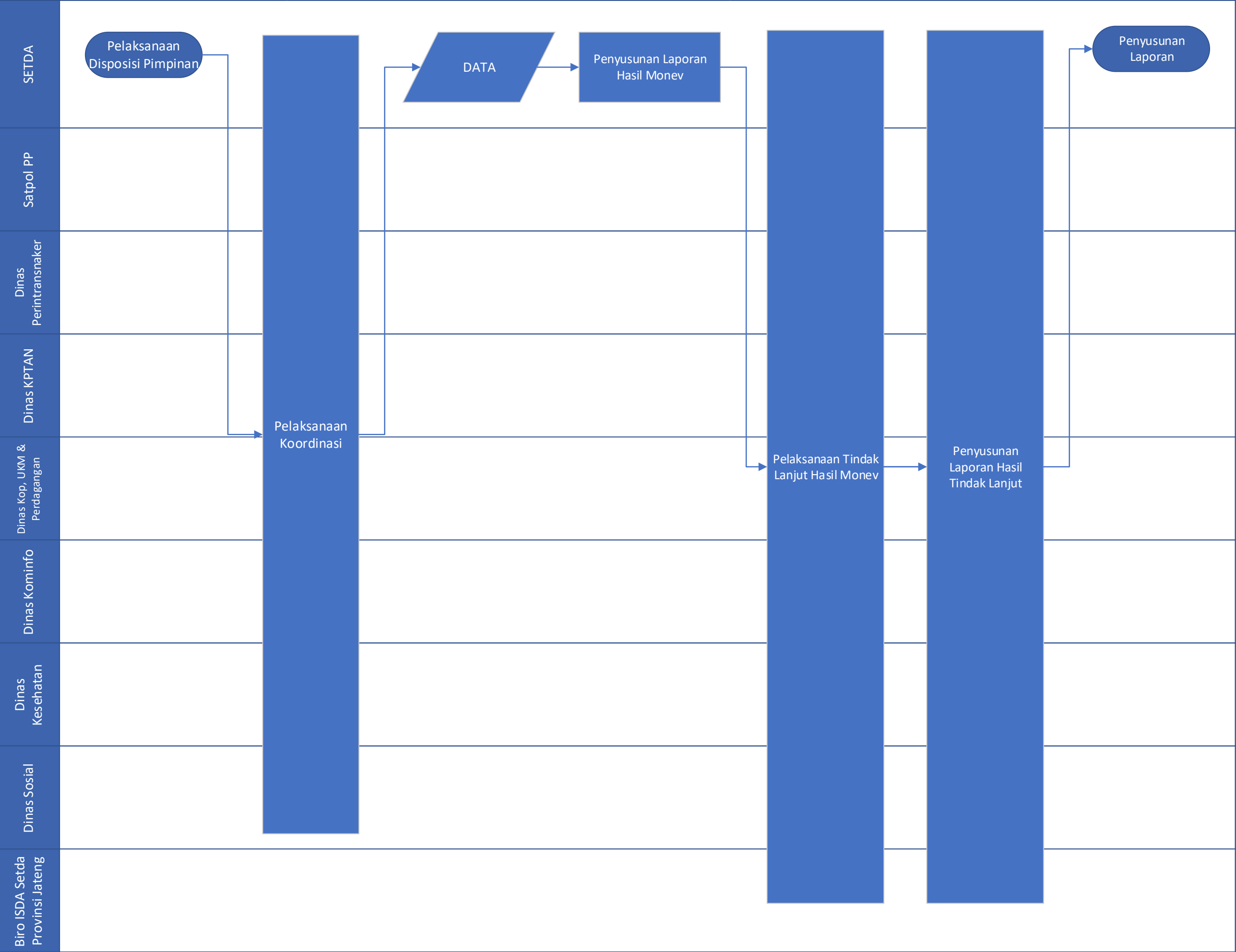


Koordinasi Lingkup Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Rapat Koordinasi SDA)









PETA RELASI

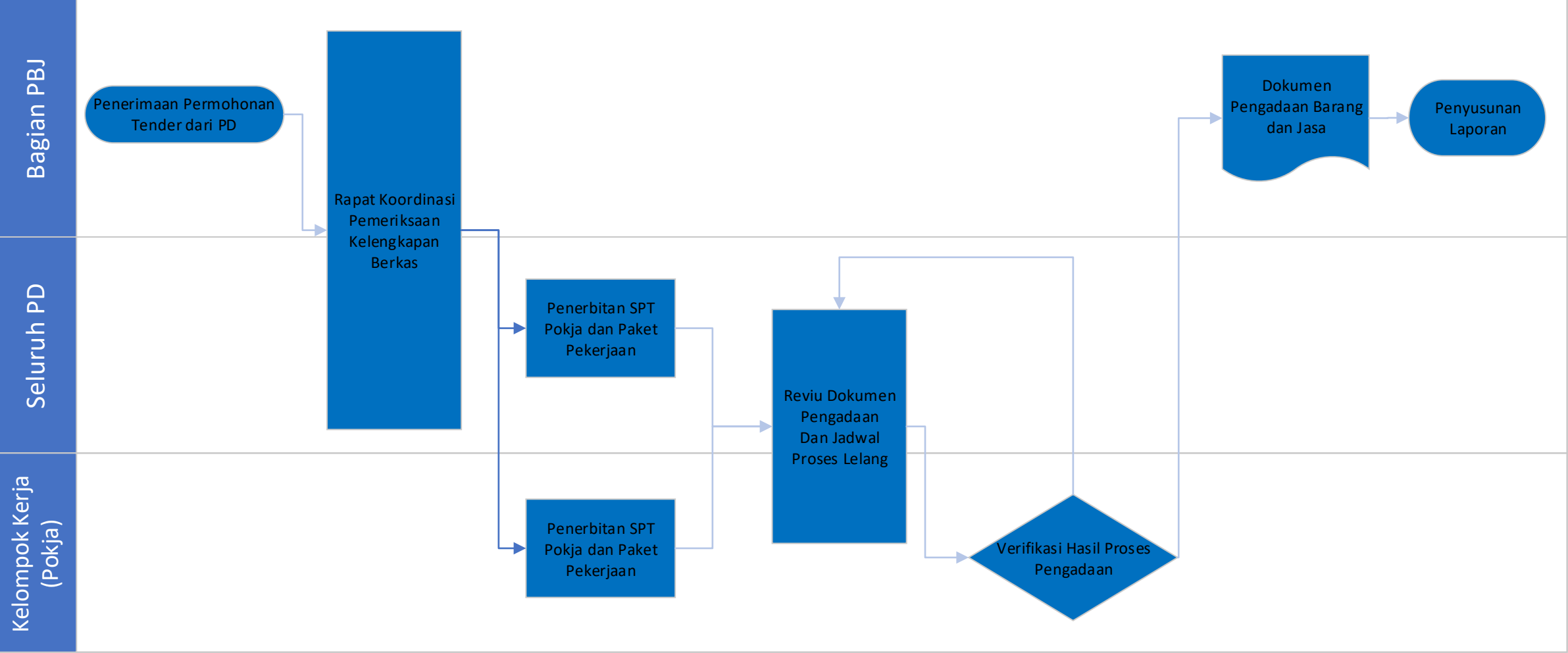
SLW-06.5

Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

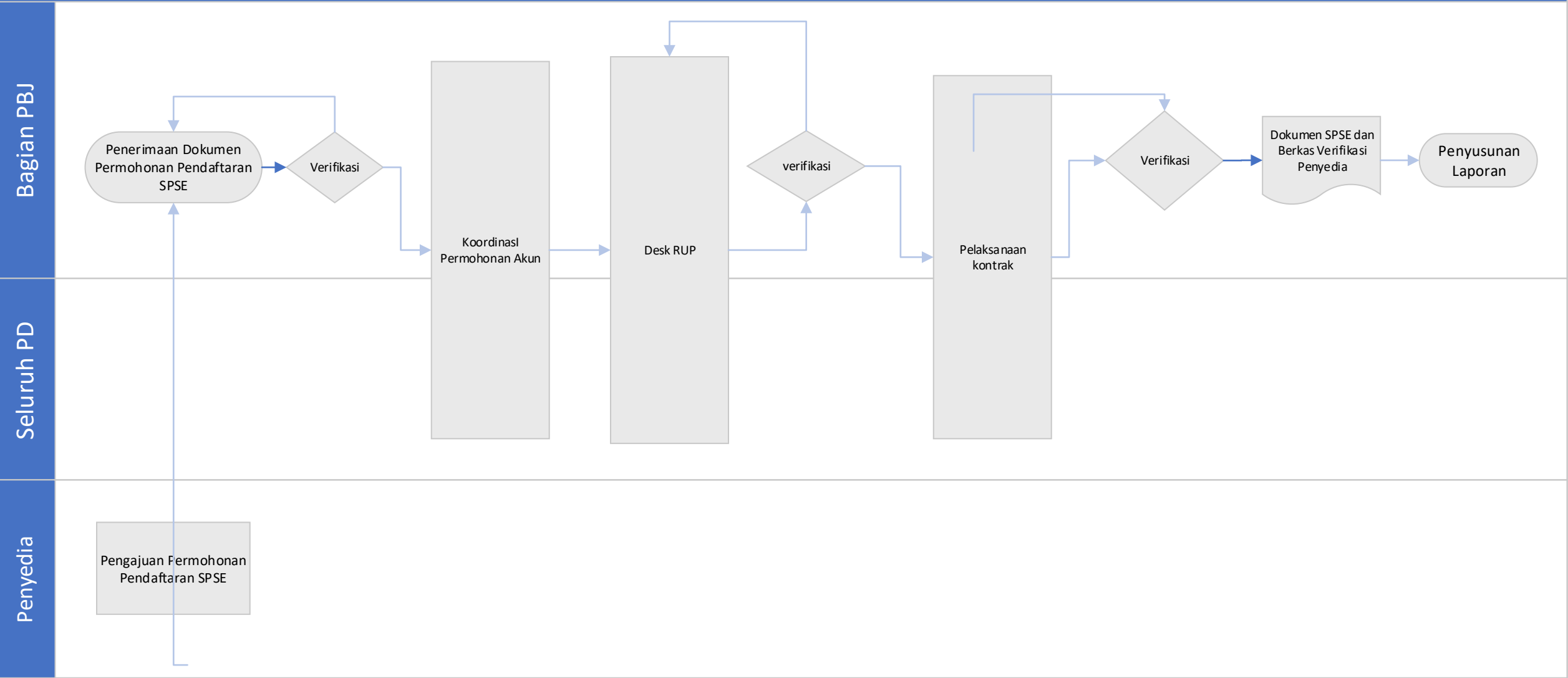
BAGIAN PBJ

SELURUH PERANGKAT DAERAH

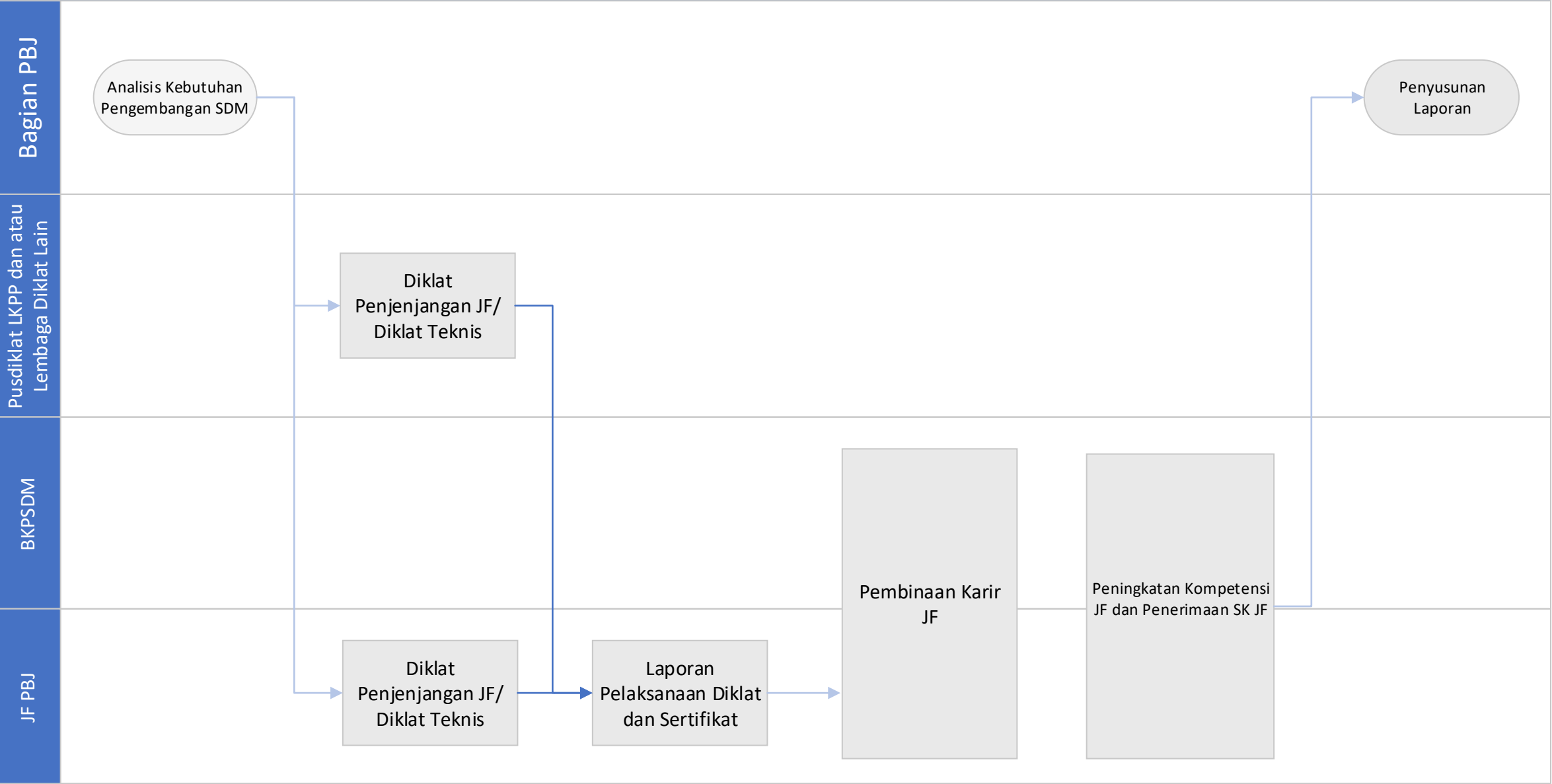
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

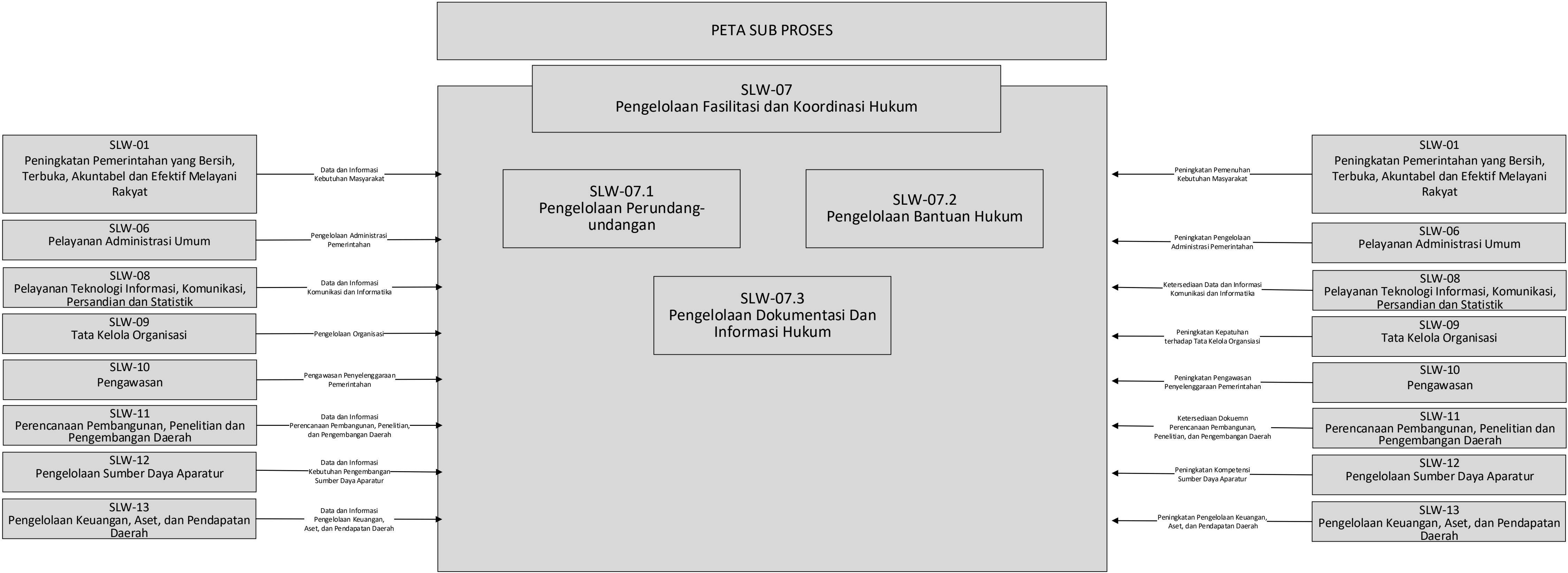


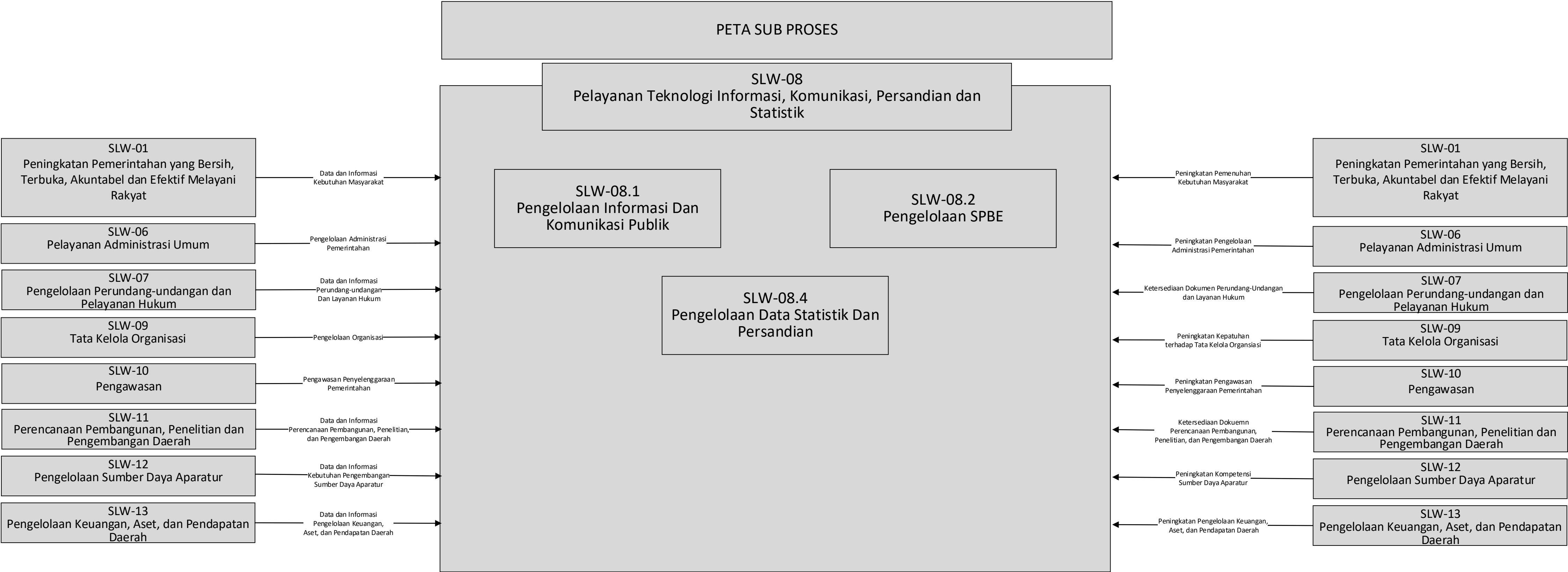
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa







PETA RELASI

SLW-08.1

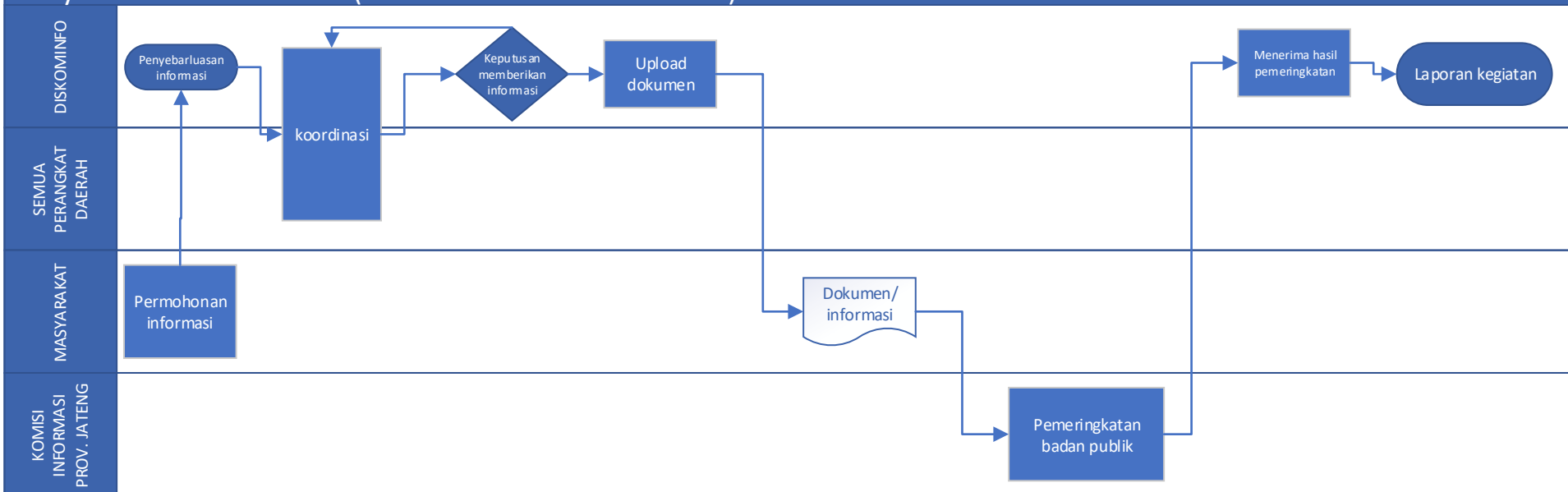
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

DINAS KOMINFO

SEMUA PERANGKAT DAERAH

SLW-08.1-CFM 01

Pelayanan Informasi Publik (keterbukaan Informasi Publik)



PETA RELASI

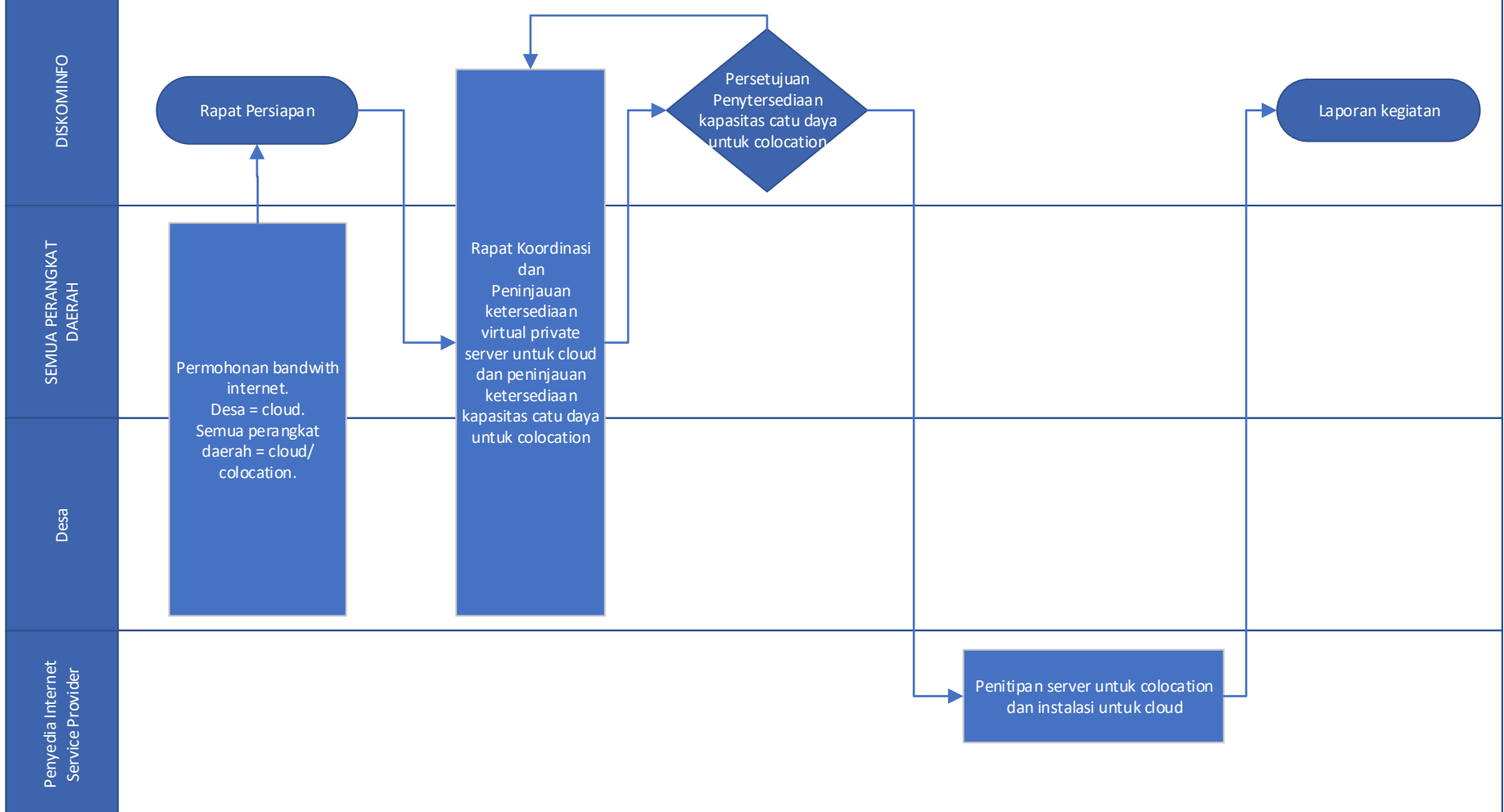
SLW-08.2
Pengelolaan SPBE

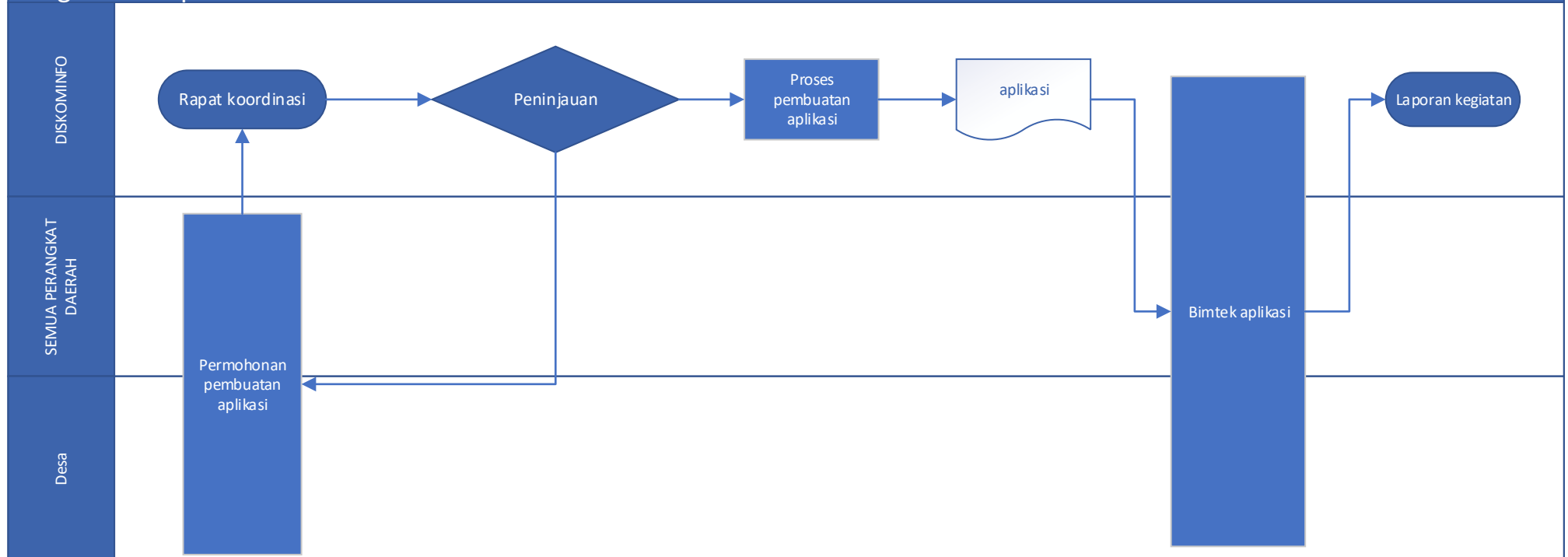
DINAS KOMINFO

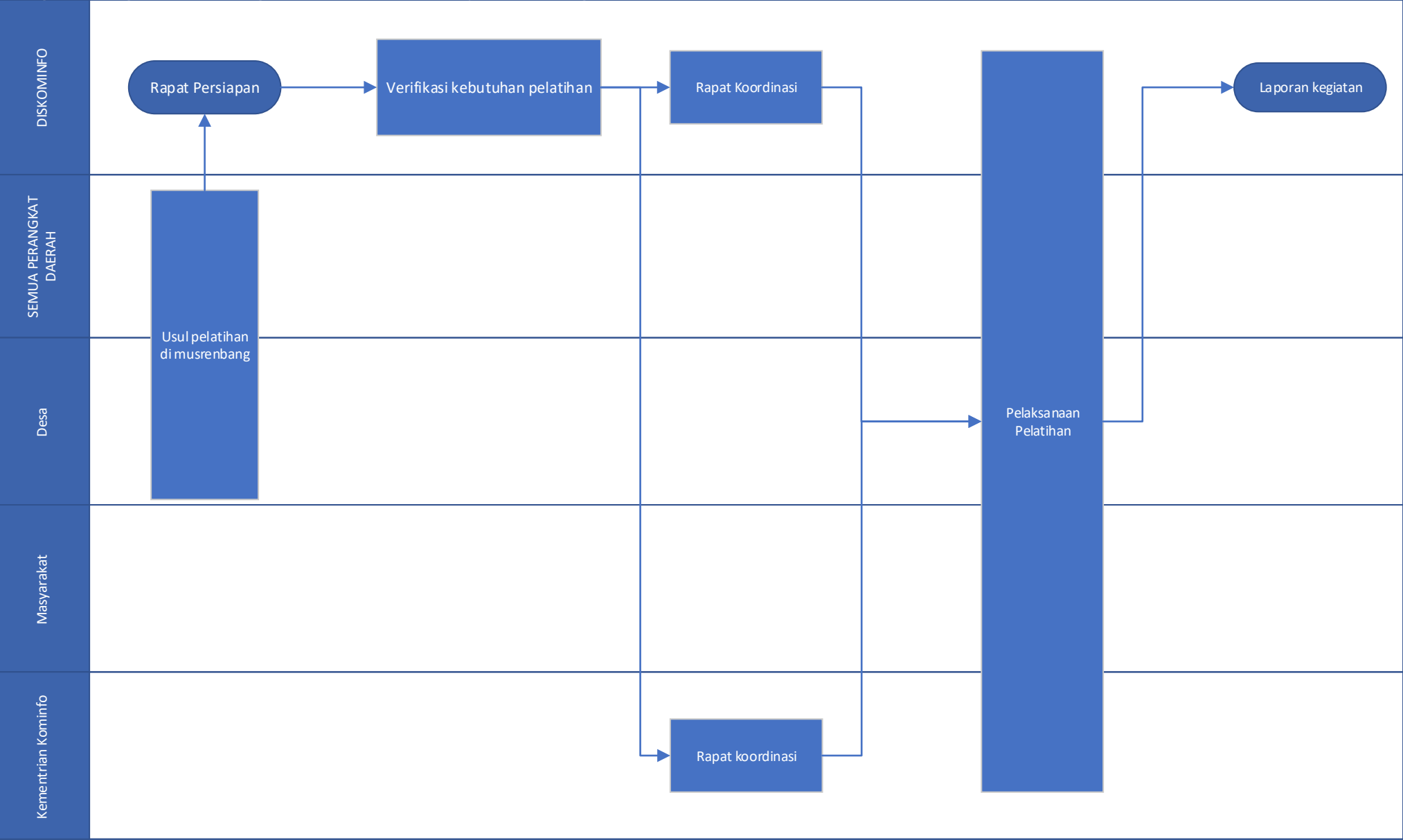
Semua Perangkat Daerah

SLW-08.2 CFM 01

Pengelolaan Pusat Data (Permohonan Bandwidth – Cloud Dan Colocation)







PETA RELASI

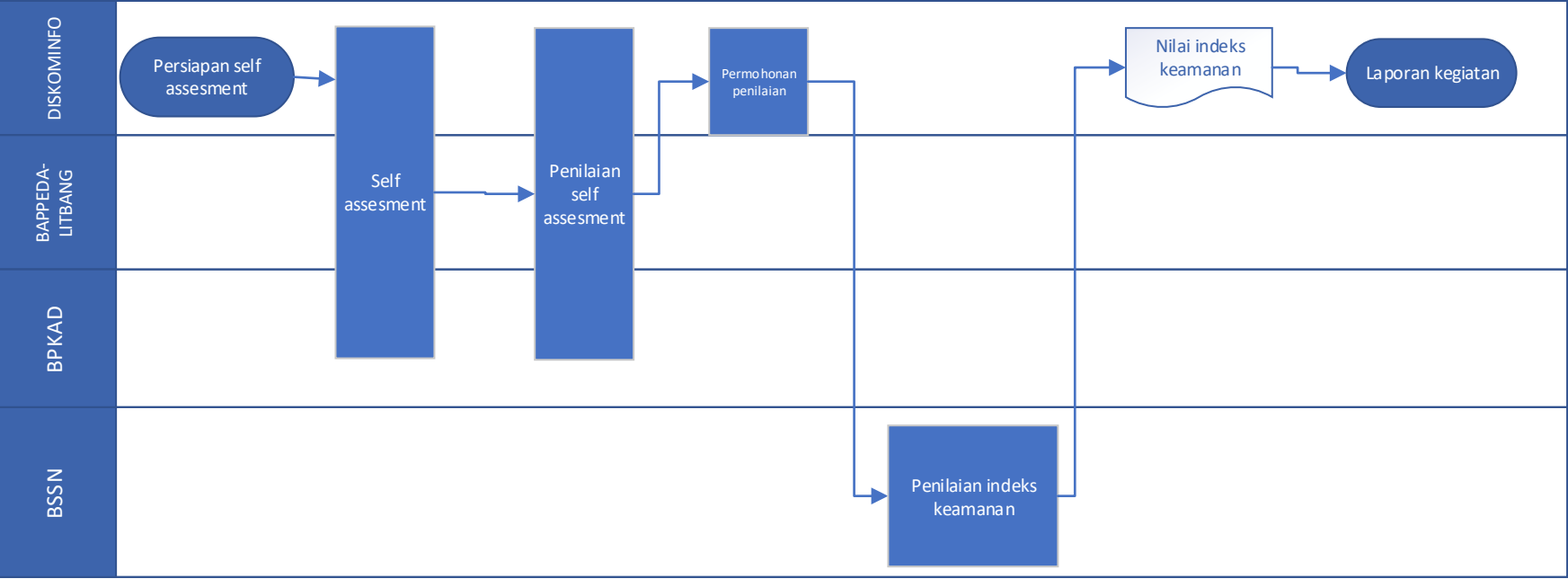
SLW-08.3
Pengelolaan Data Statistik Dan Persandian

DINAS KOMINFO

SEMUA PERANGKAT DAERAH

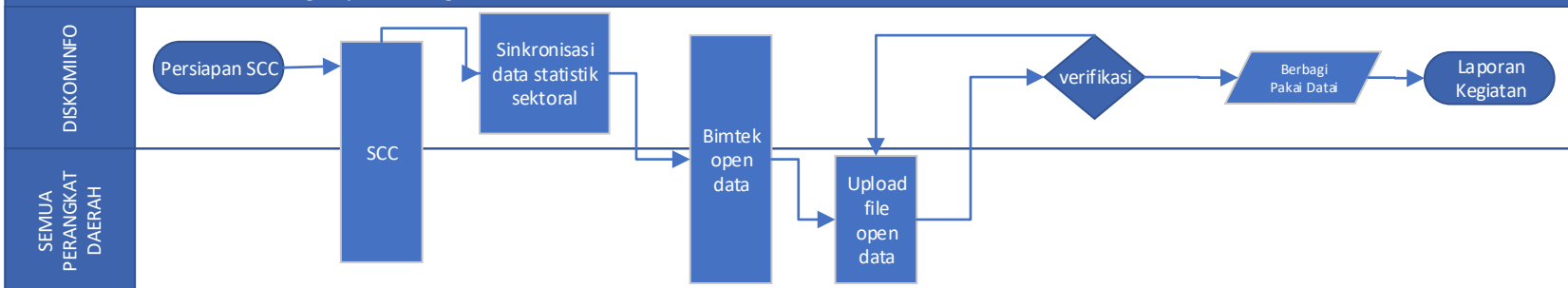
SLW-08.3 CFM 01

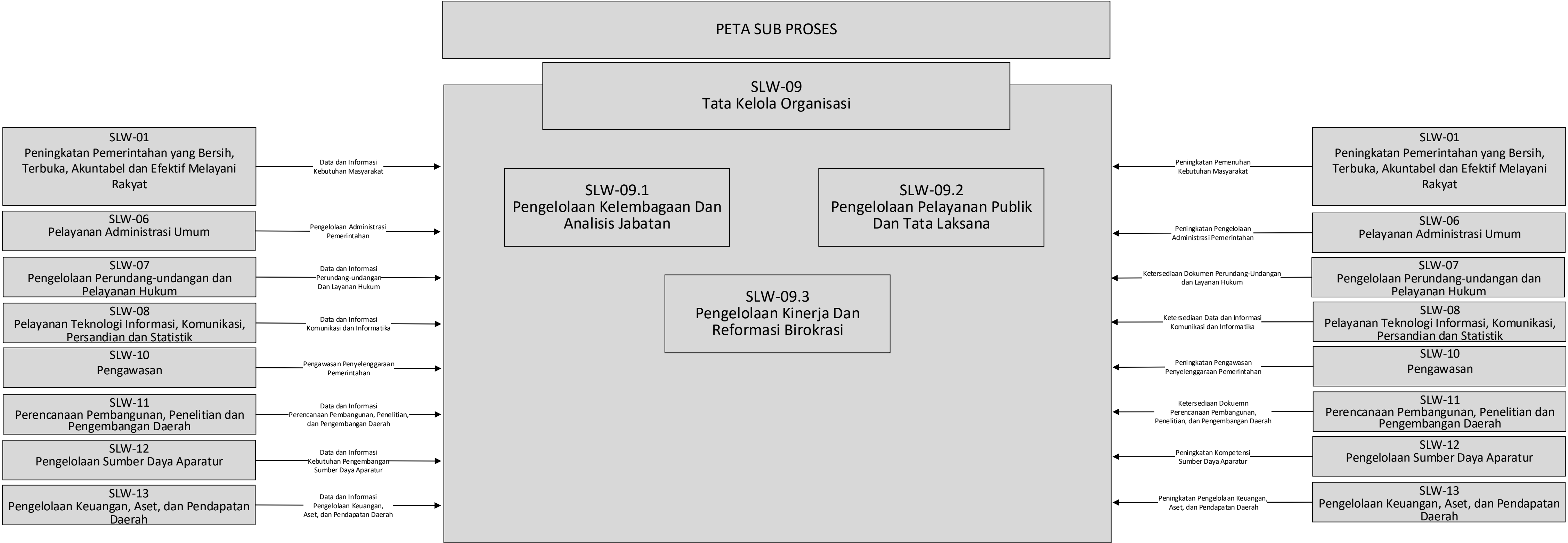
Persandian-Penilaian Indeks Keamanan



SLW-08.3 CFM 02

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral





PETA RELASI

SLW-09.01

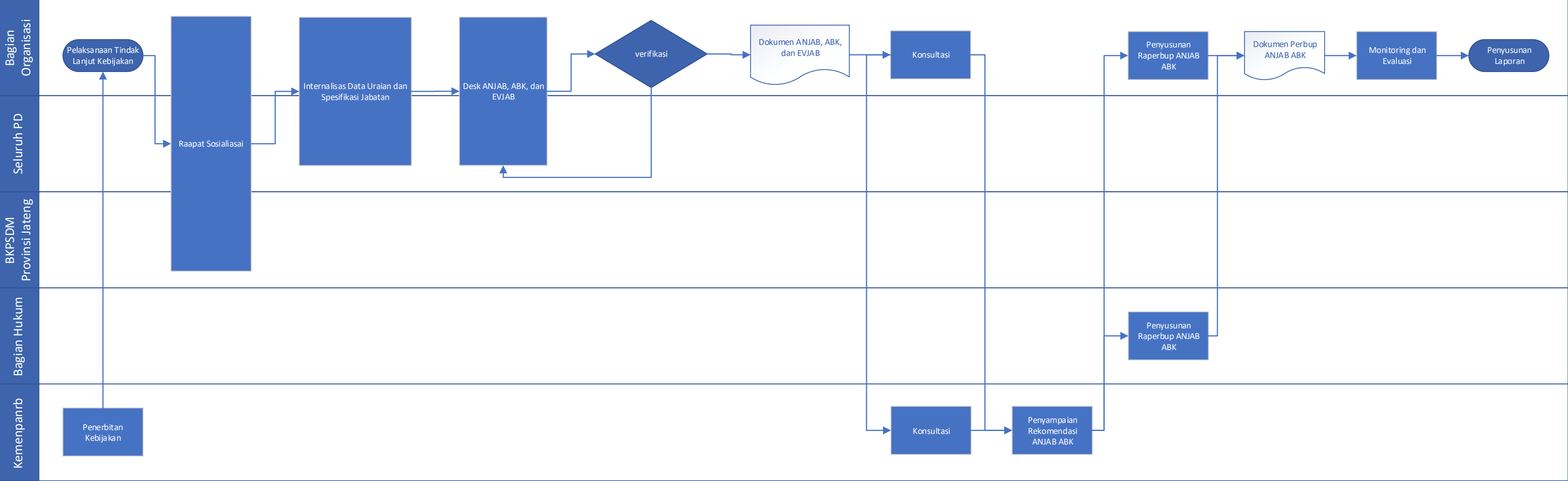
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Organisasi

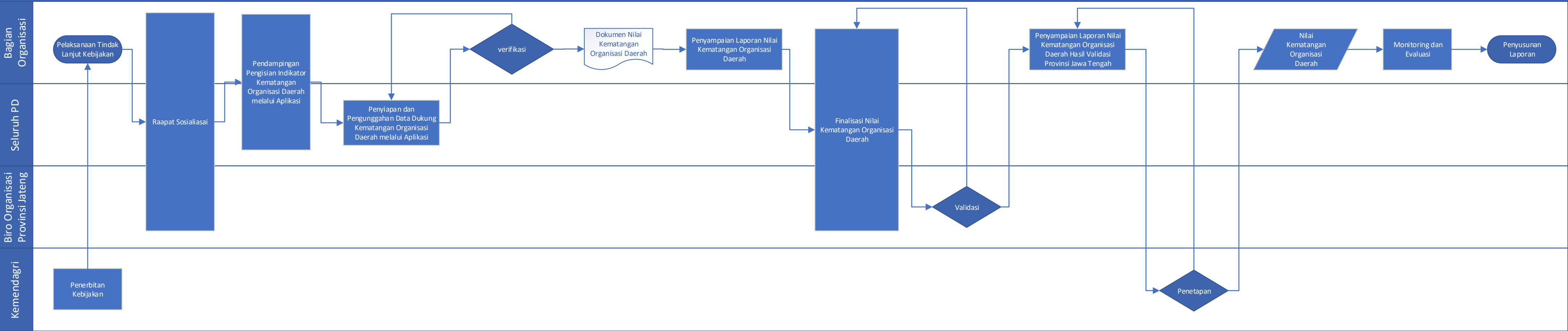
Semua Perangkat
Daerah

SLW-09.1 CFM 01

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (ANJAB, ABK, dan EVJAB)



Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Kematangan Organisasi Daerah)



PETA RELASI

SLW-09.02

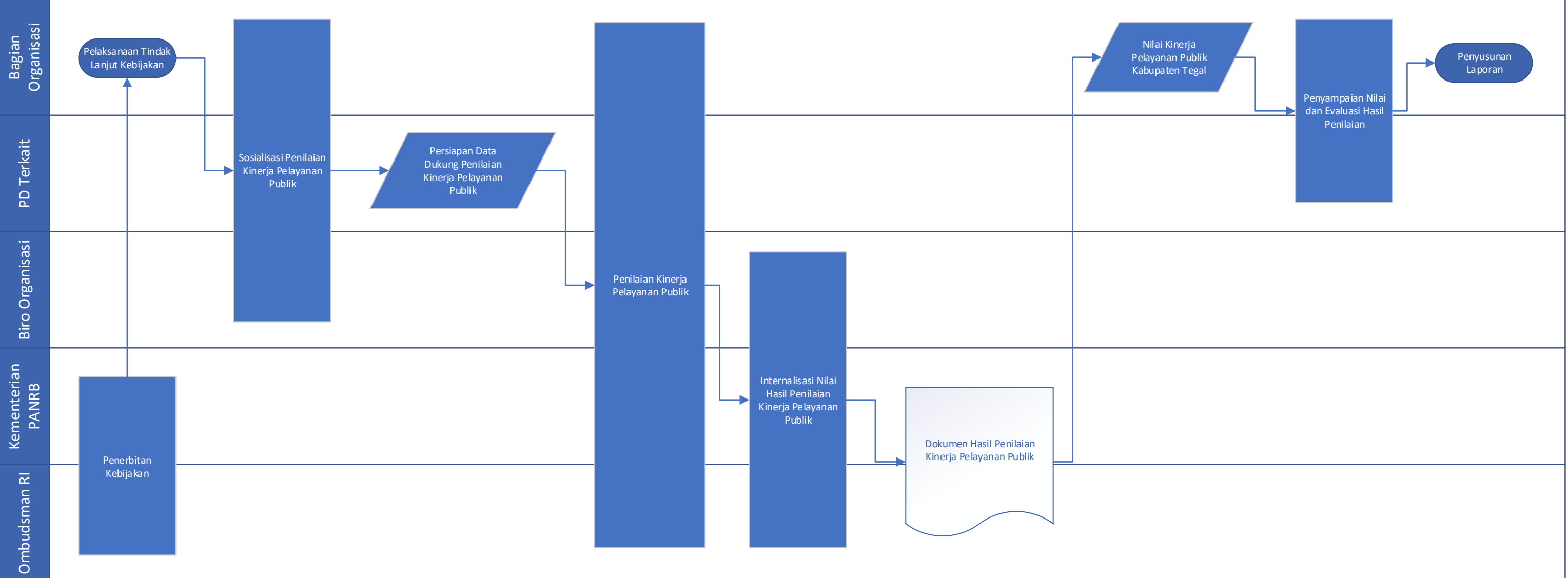
Pengelolaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Bagian Organisasi

Semua Perangkat
Daerah

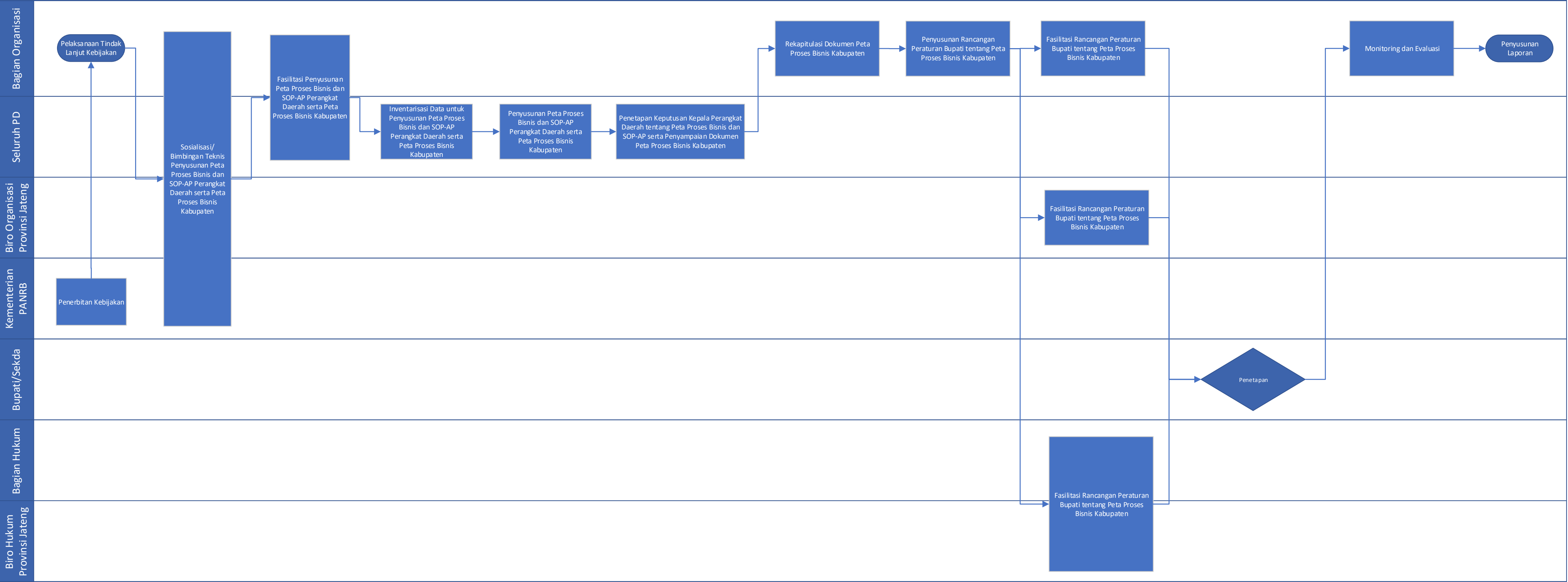
SLW-09.2 CFM 01

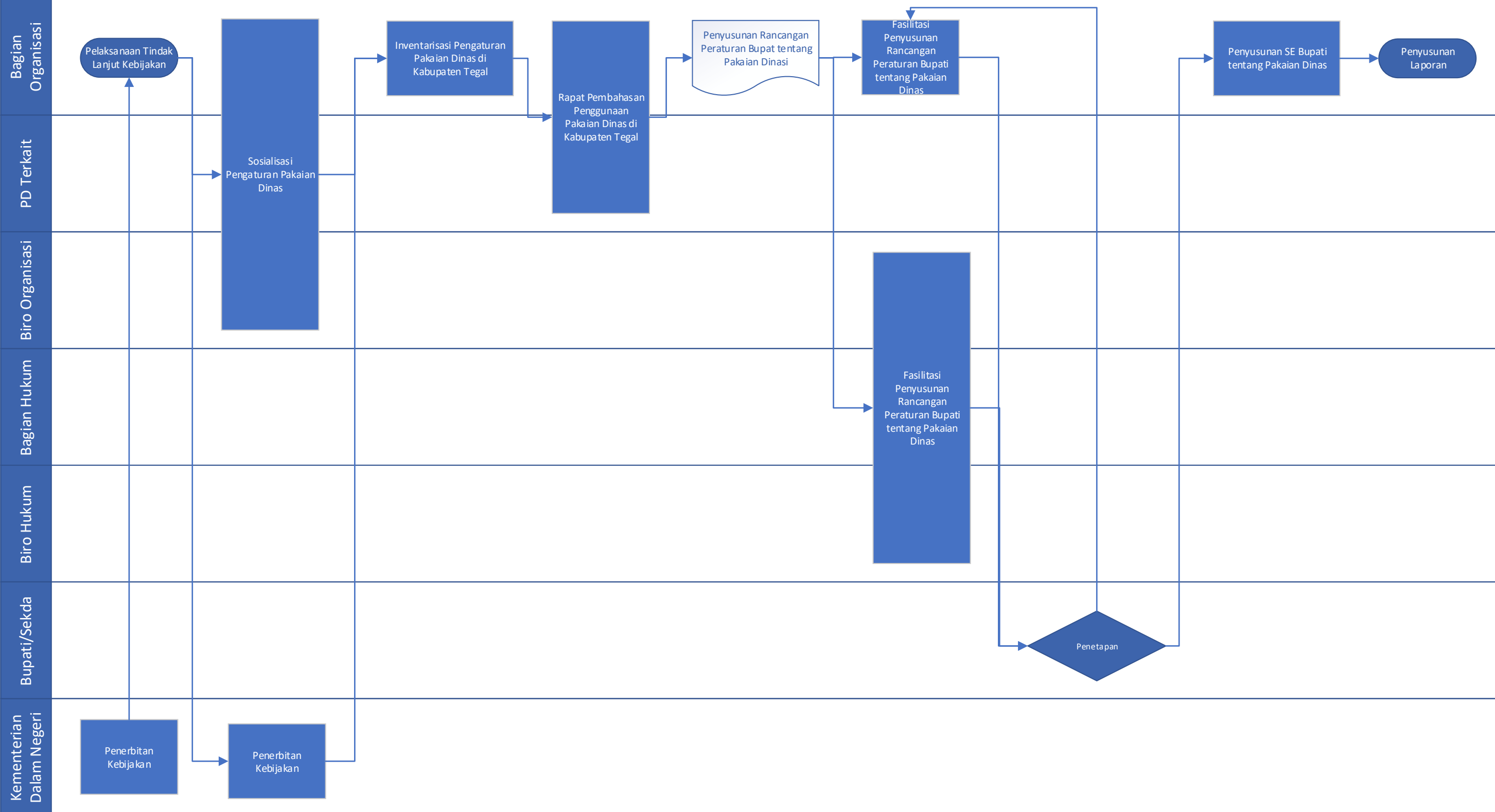
Pengelolaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Penilaian Kinerja Pelayanan Publik)



SLW-09.2 CFM 02

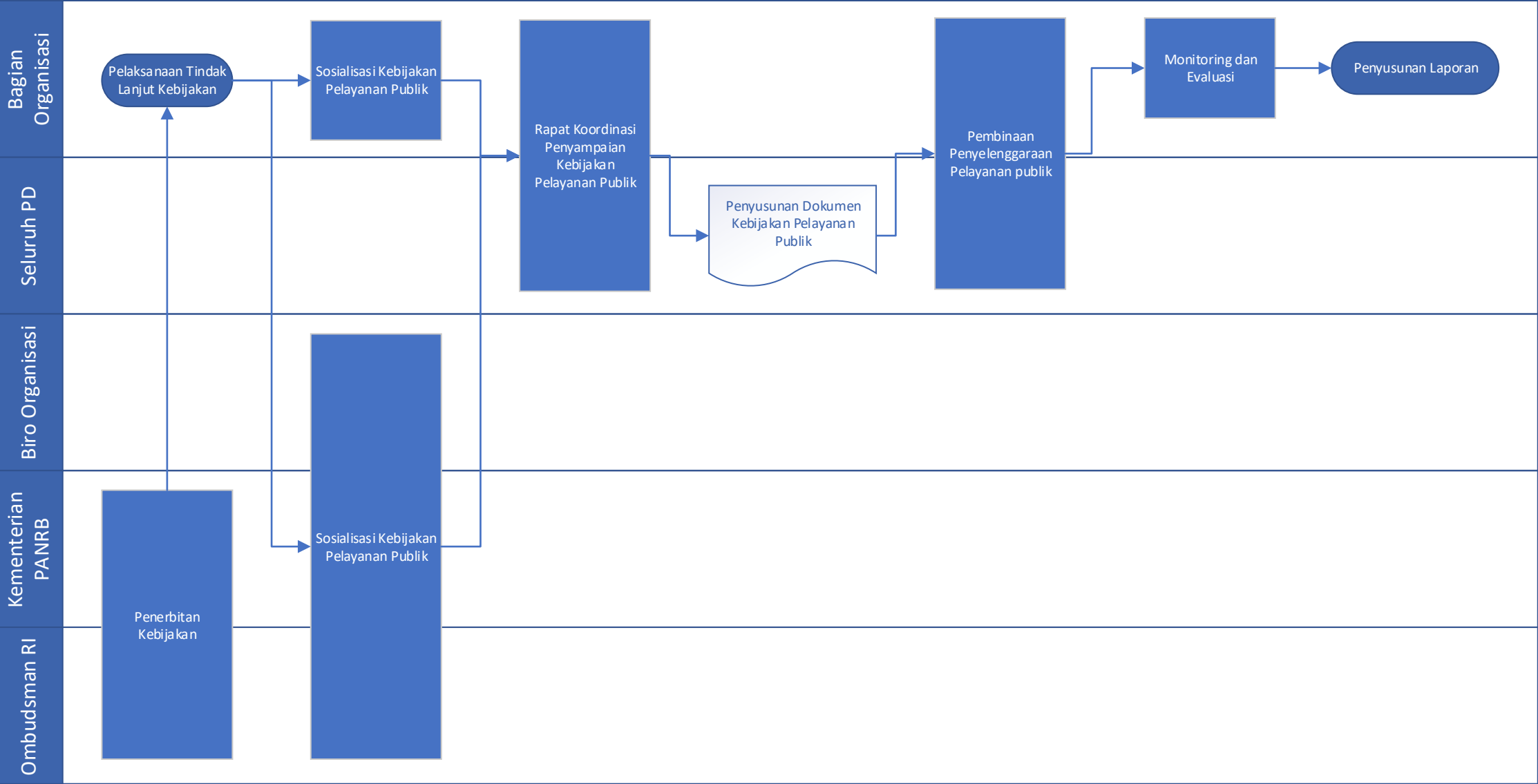
Pengelolaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan)

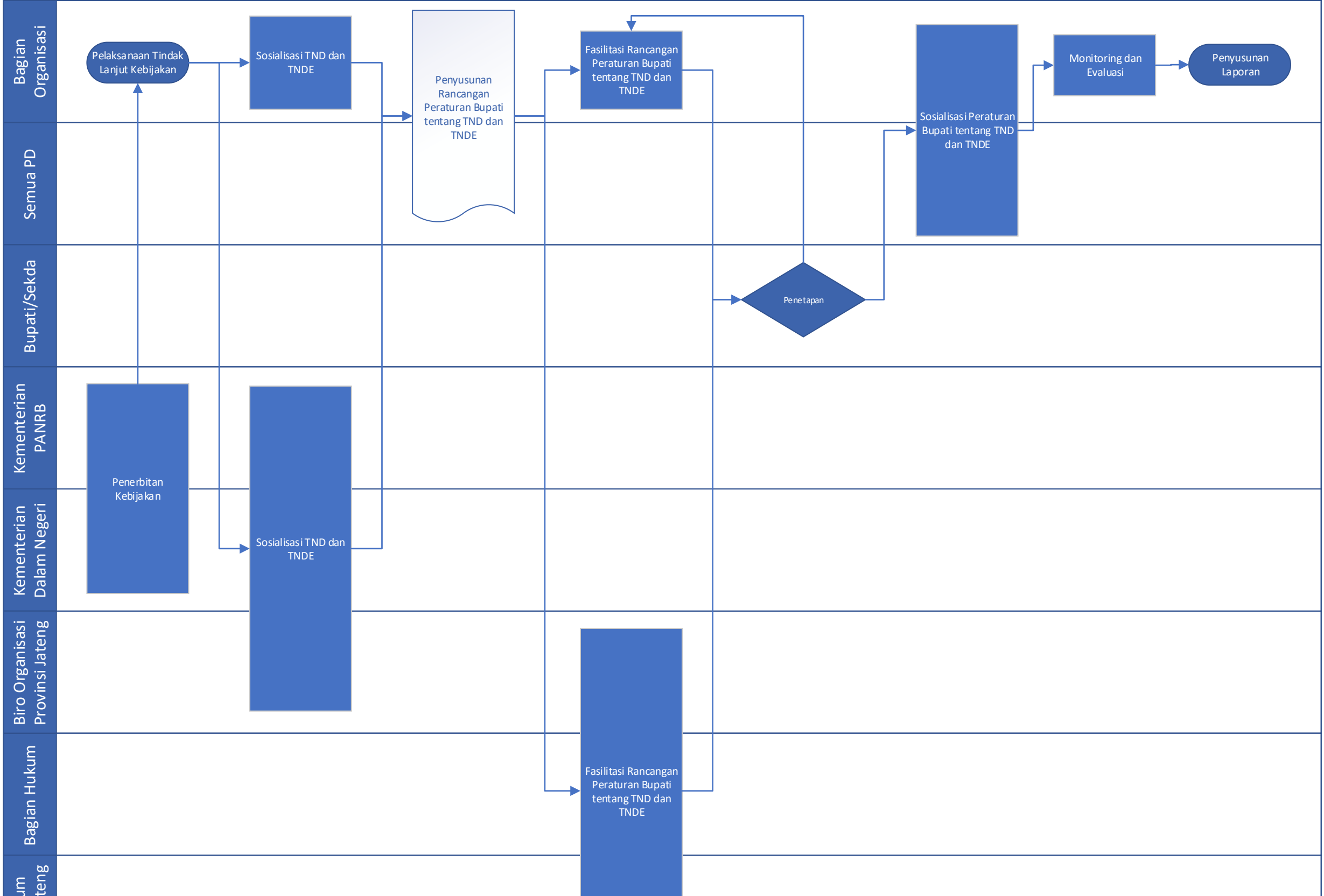




SLW-09.2 CFM 04

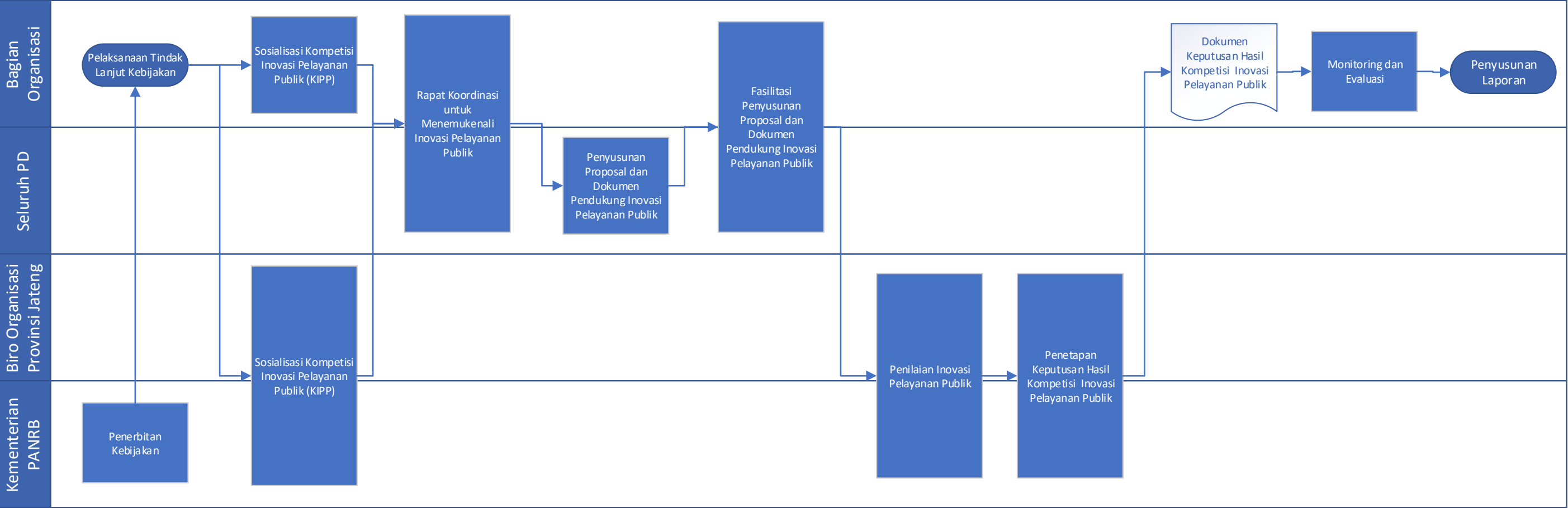
Pengelolaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Publik)





SLW-09.2 CFM 06

Pengelolaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Pembahasan Keikutsertaan Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP)



PETA RELASI

SLW-09.03

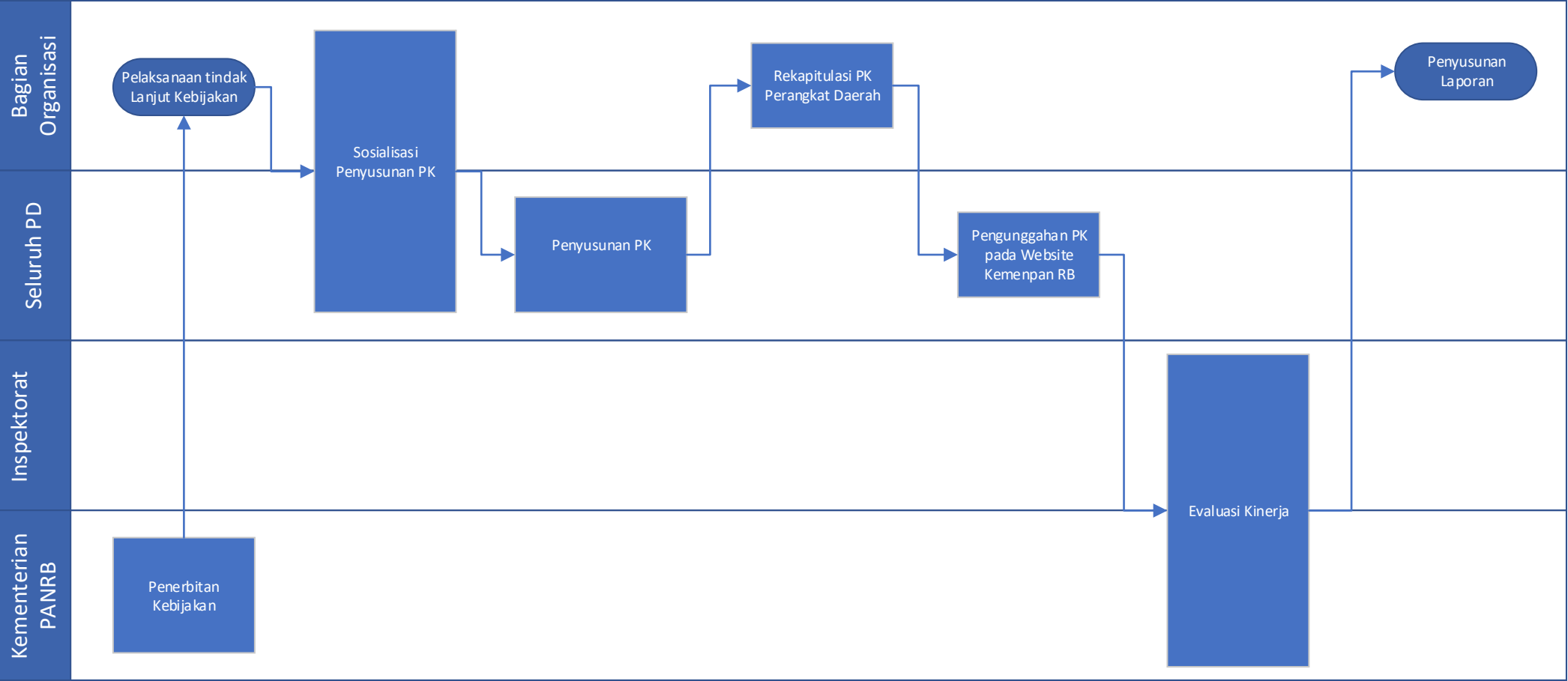
Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi

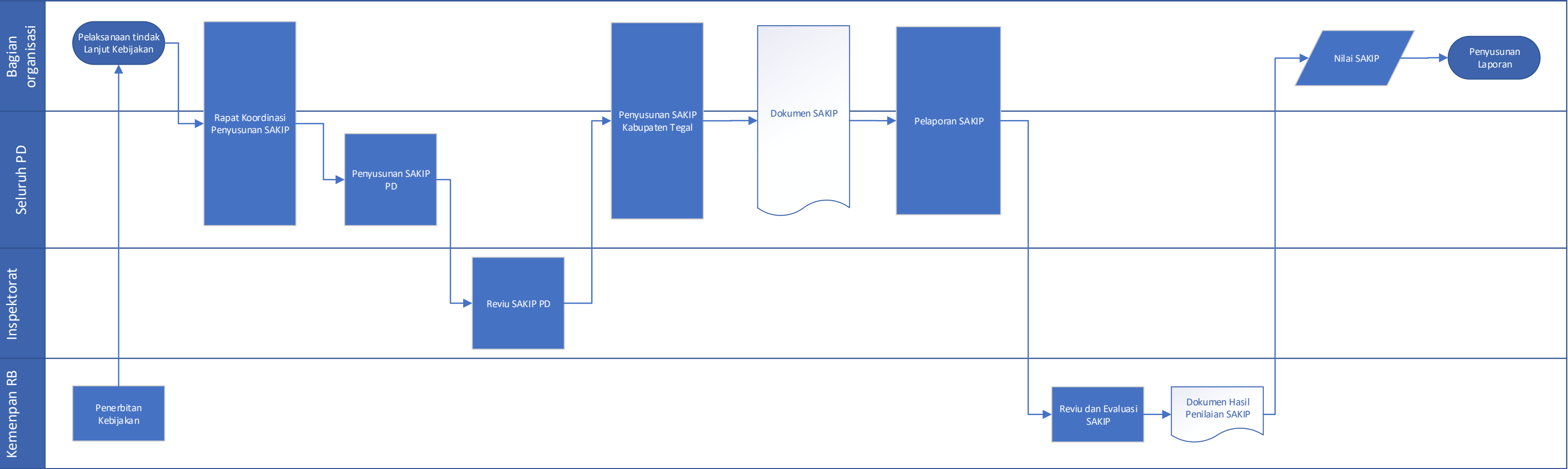
Semua Perangkat
Daerah

SLW-09.3 CFM 01

Pengolahan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Penyusunan Perjanjian Kinerja)

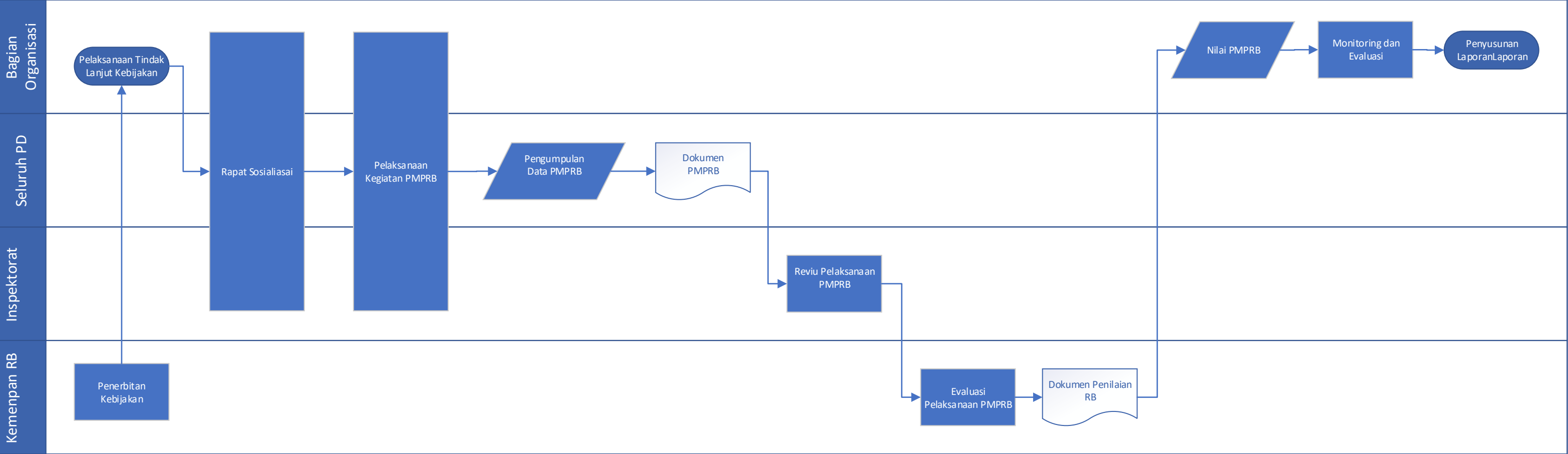


Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokasi (SAKIP)



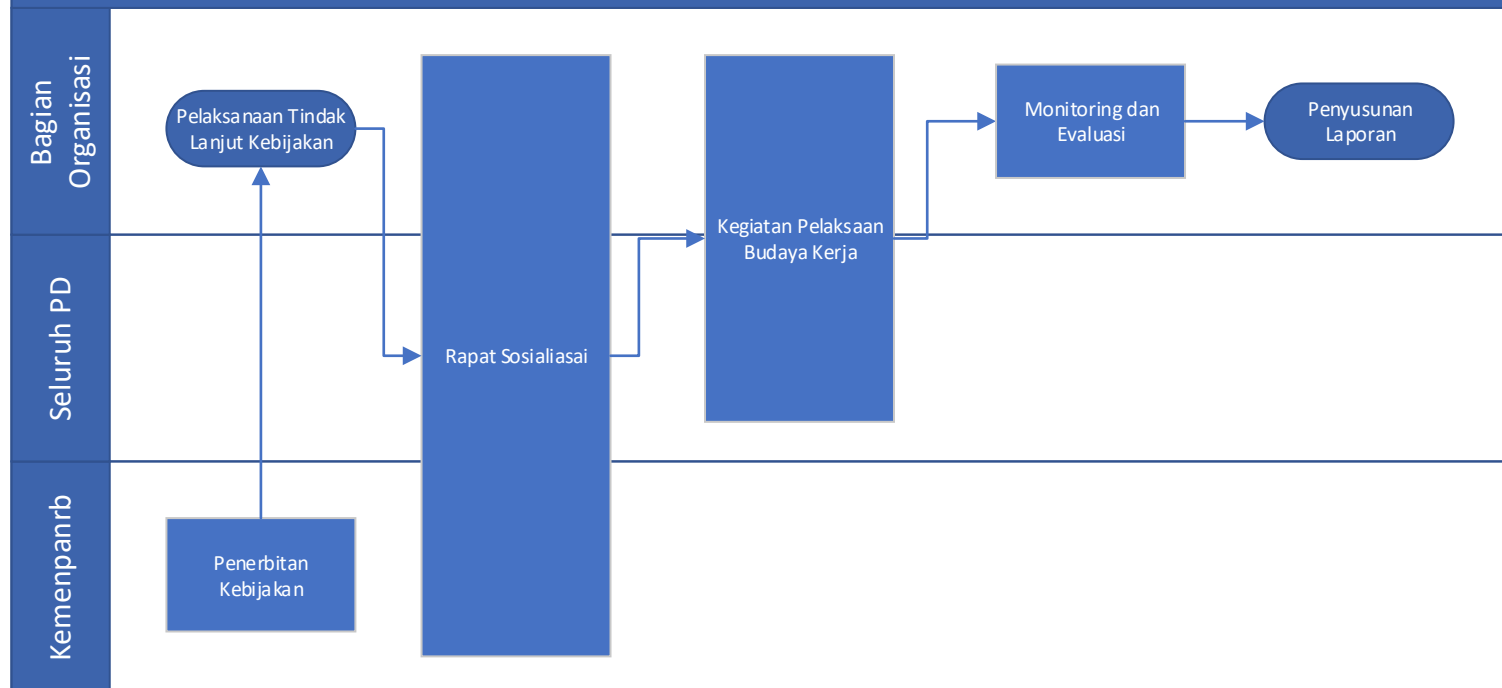
SETDA - 01.2 CFM 03

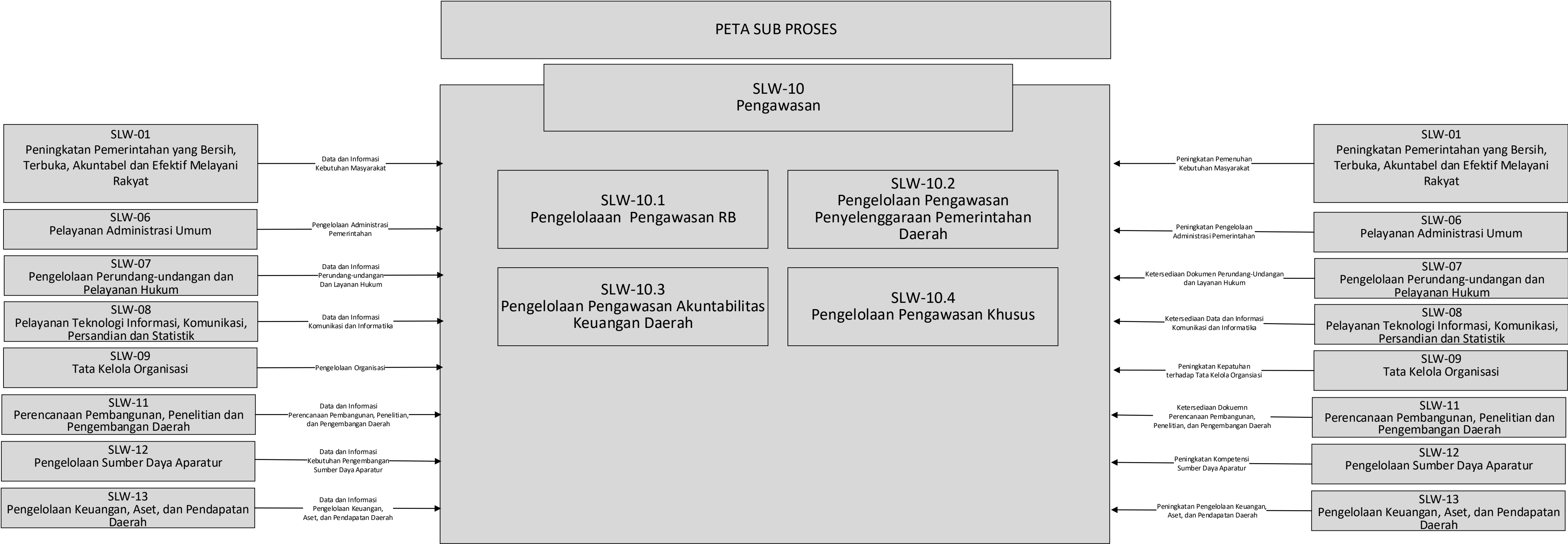
Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Penyusunan Reformasi Birokrasi)



SLW-09.3 CFM 04

Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokasi (Pengelolaan Budaya Kerja)





Peta Relasi

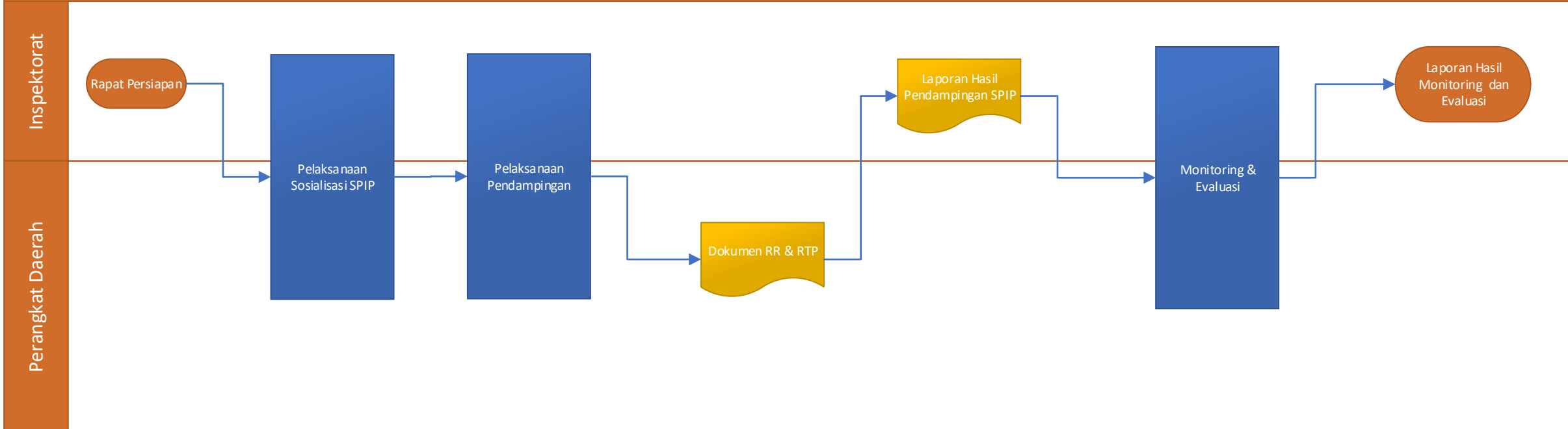
SLW-10.1
Pengelolaan Pengawasan RB

Inspektorat

Semua perangkat daerah

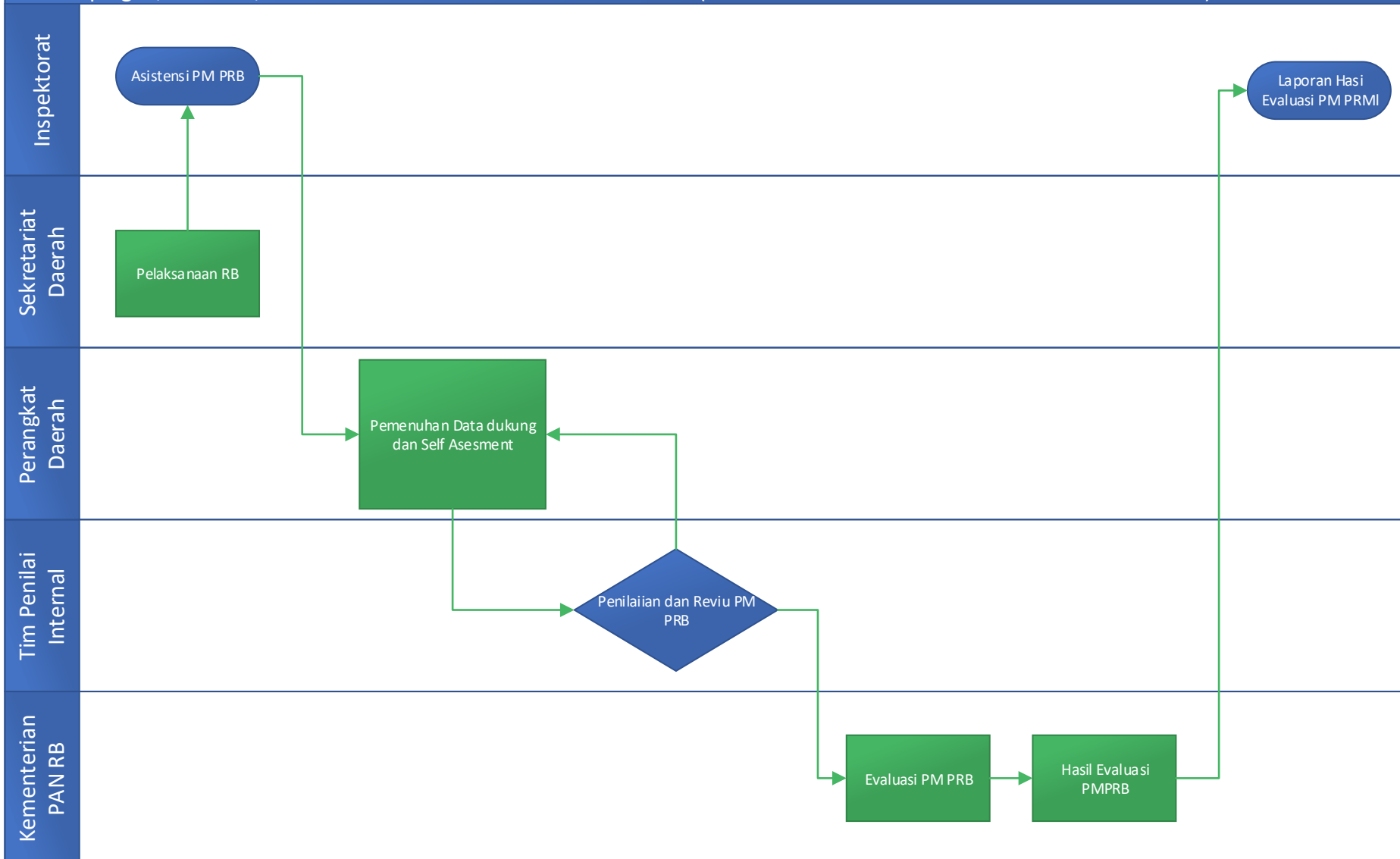
SLW-10.1 CFM 01

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP)

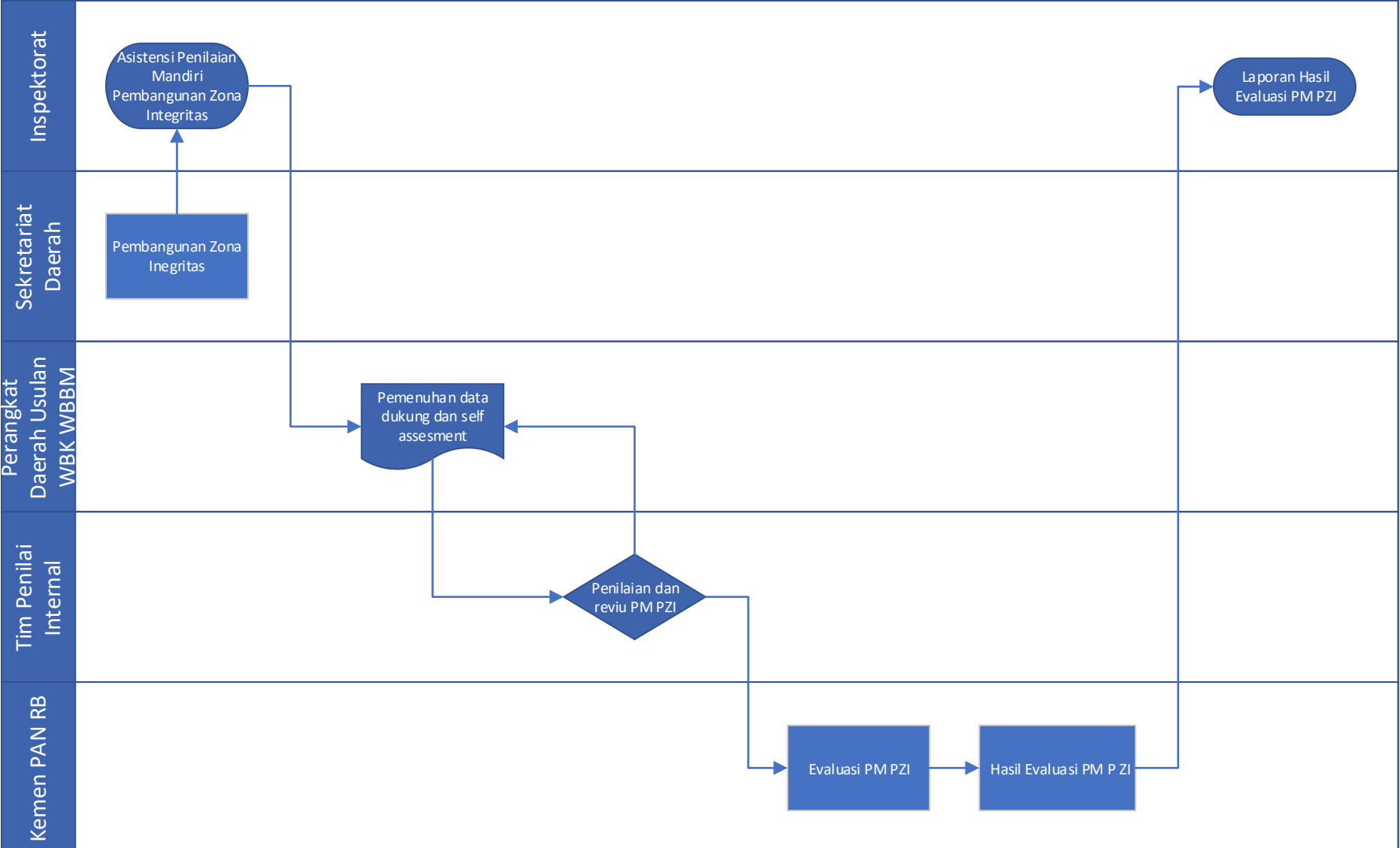


SLW-10.1 CFM 02.1

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

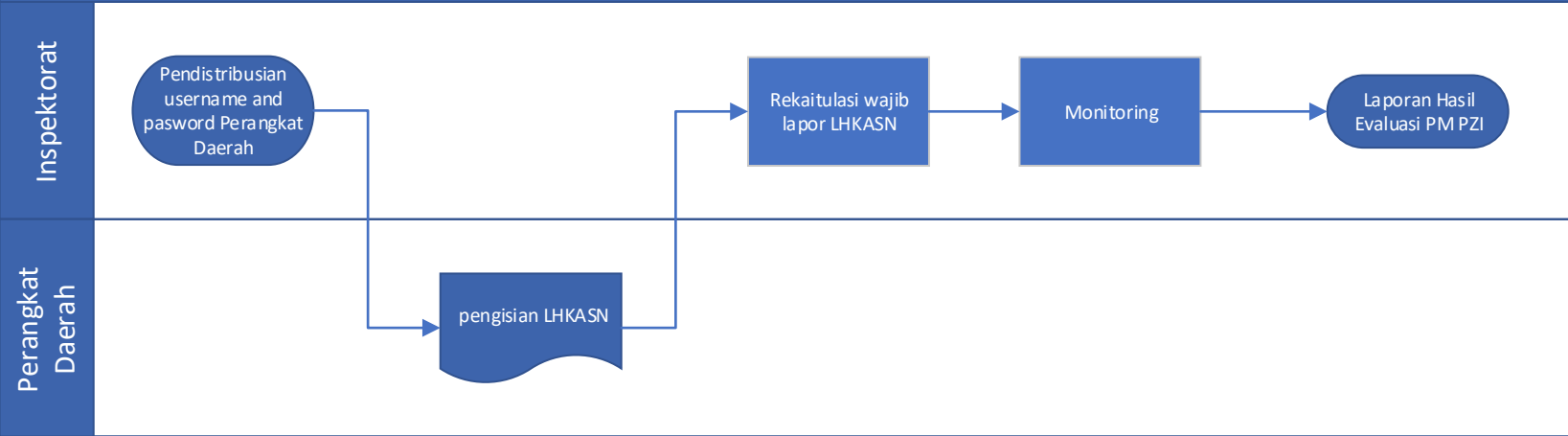


SLW-10.1 CFM 02.2



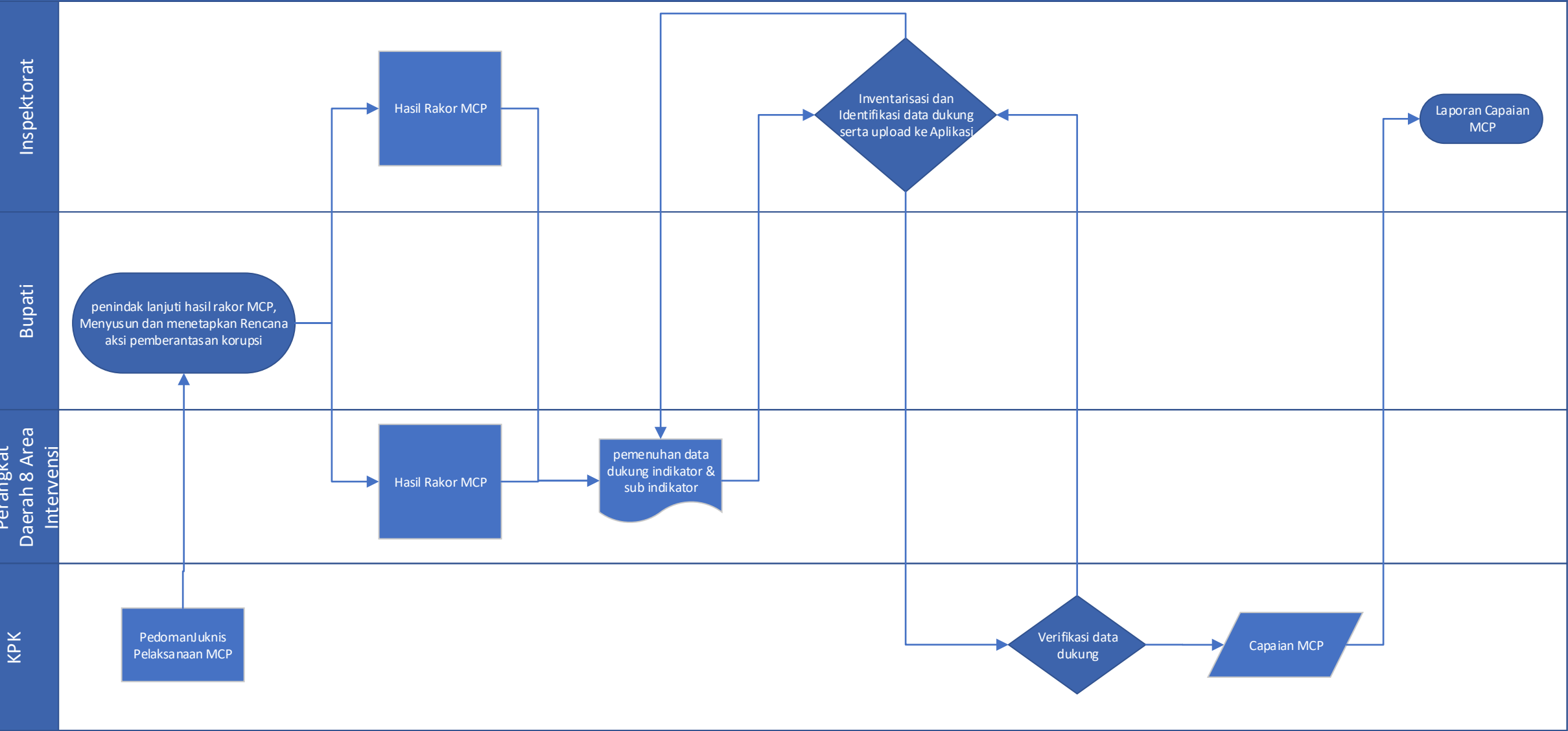
SLW-10.1 CFM 02.3

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Monitoring LHKASN)



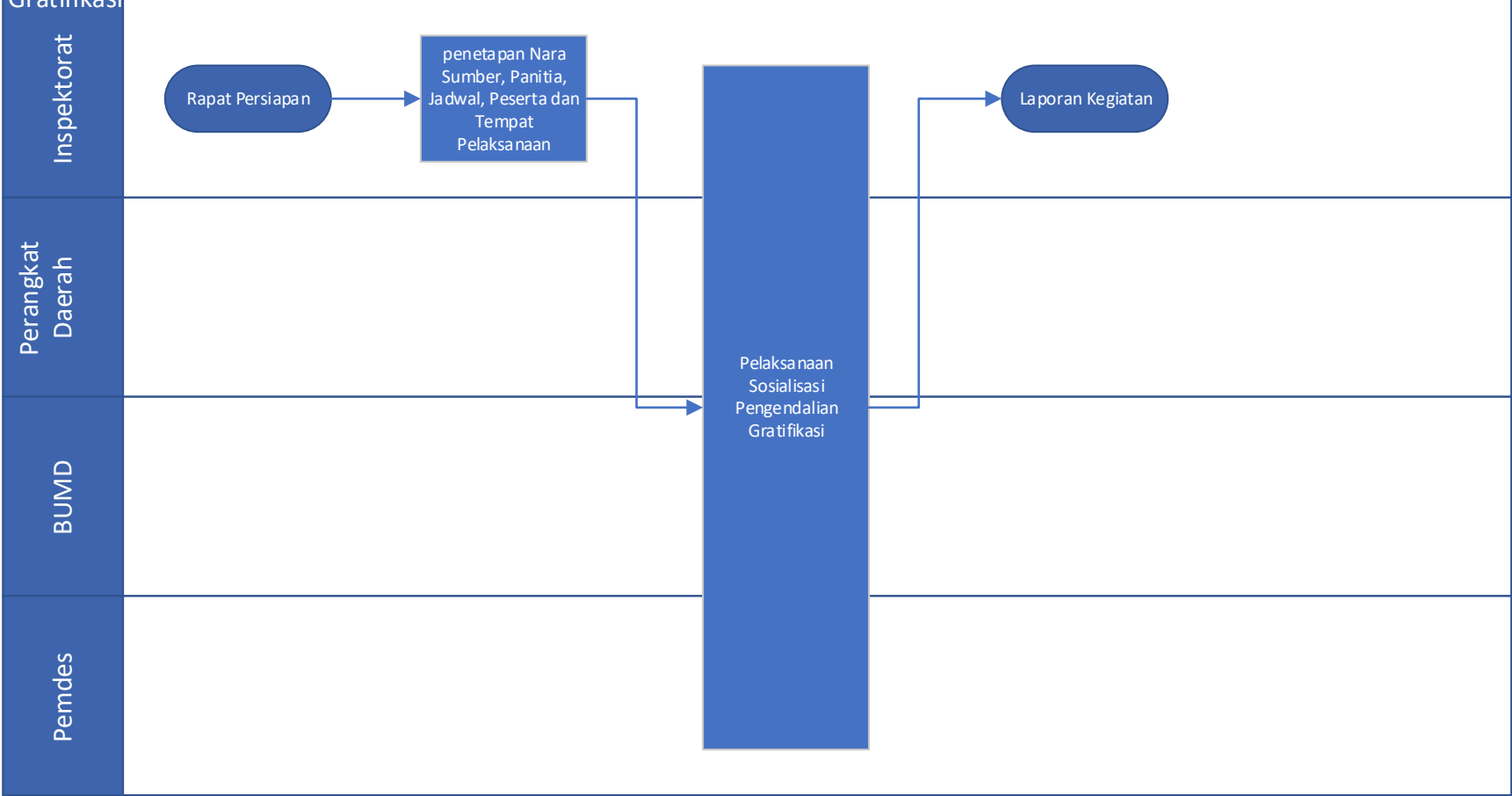
SLW-10.1 CFM 03.1

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP Korsupgah)



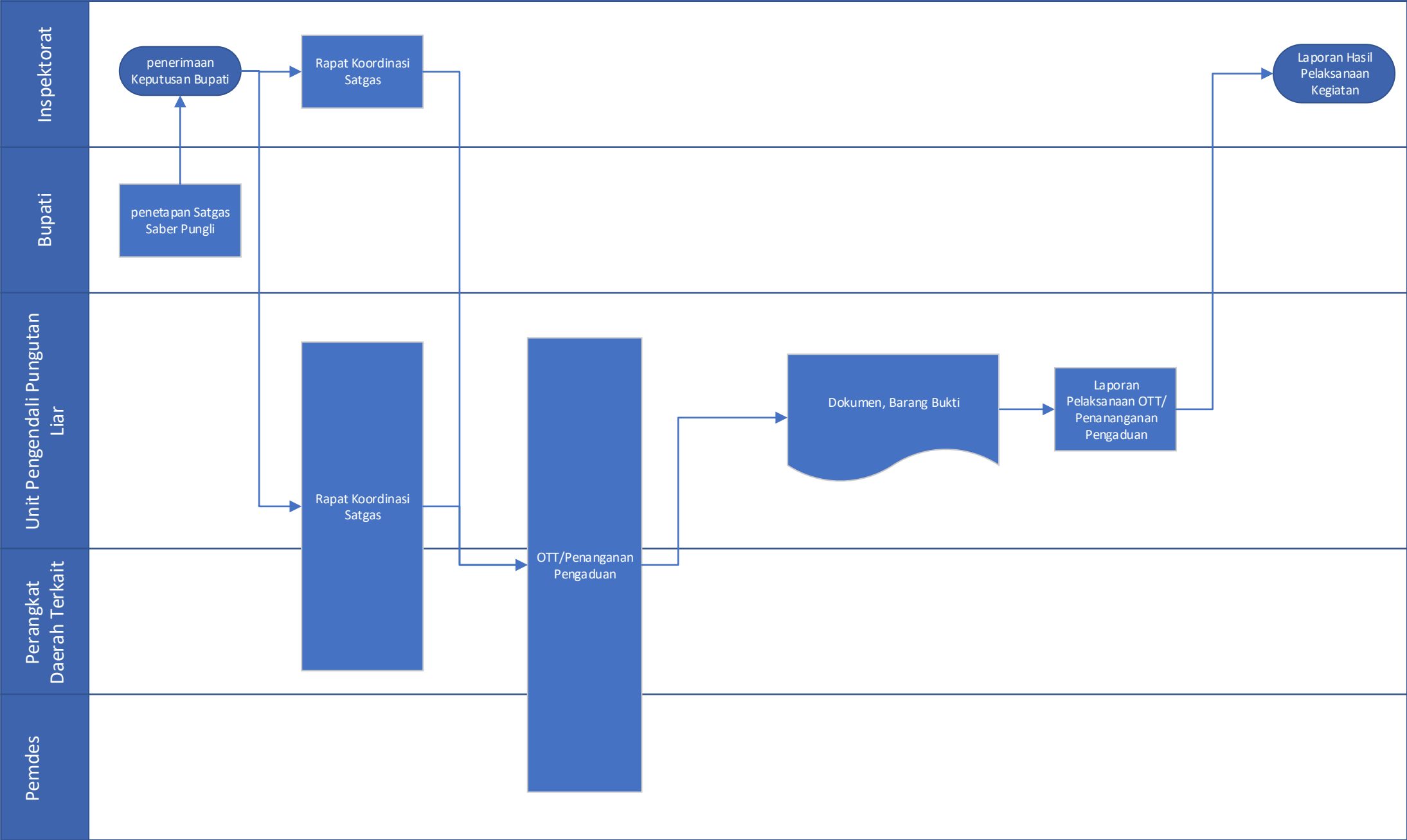
SLW-10.1 CFM 03.2

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi (Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi)



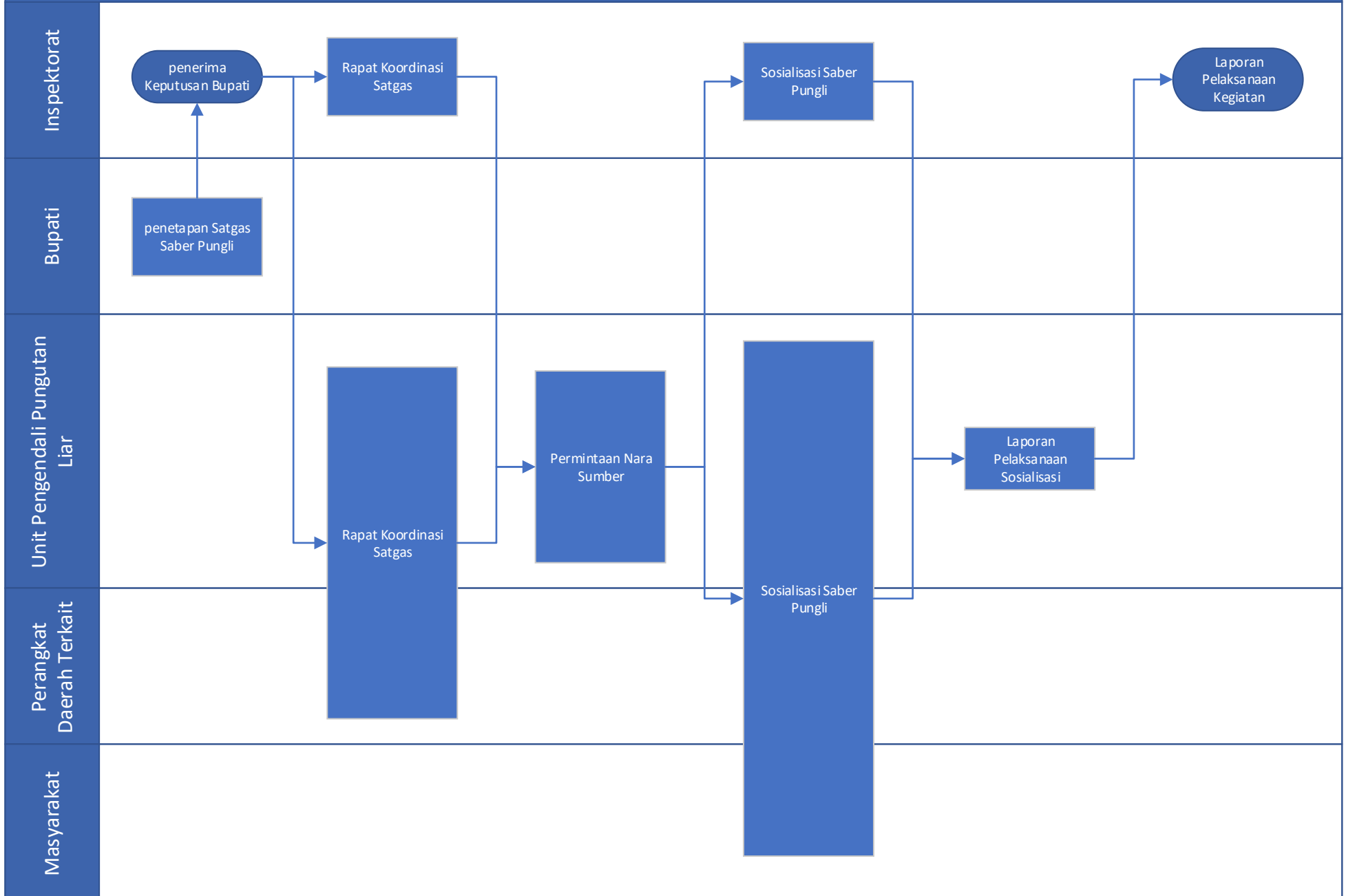
SLW-10.1 CFM 03.3

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi (Sapu Bersih Pungutan Liar)



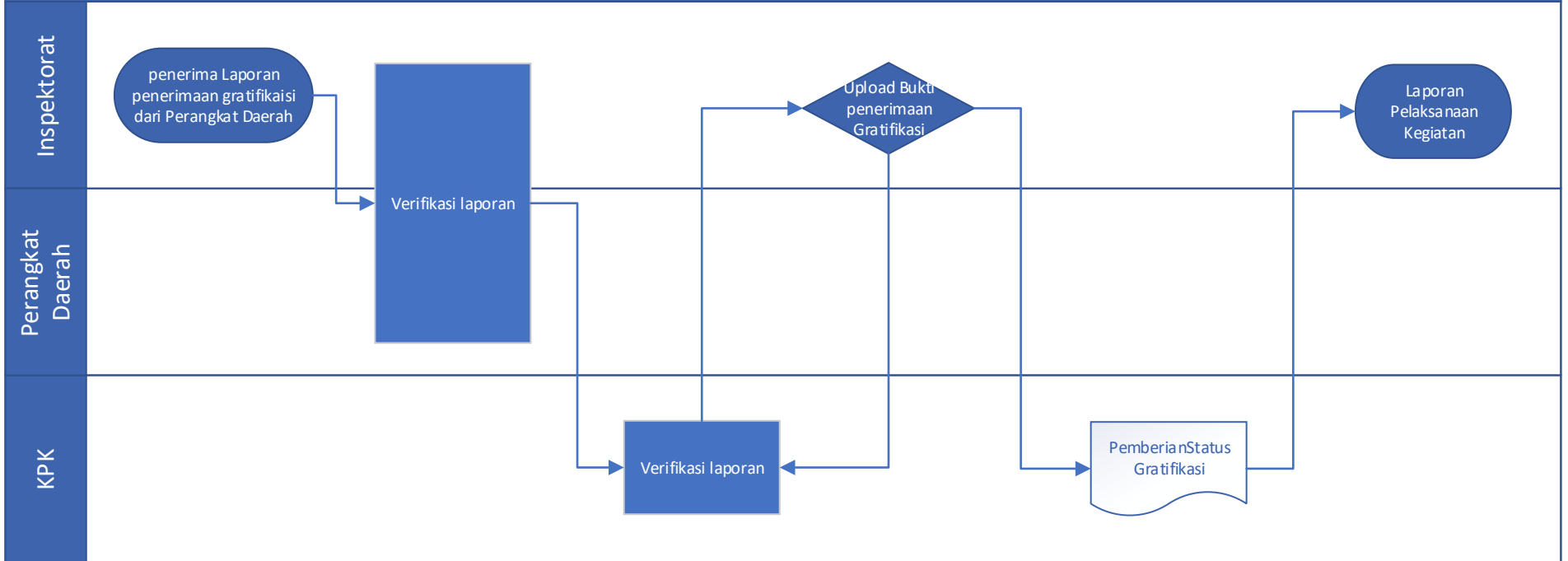
SLW-10.1 CFM 03.4

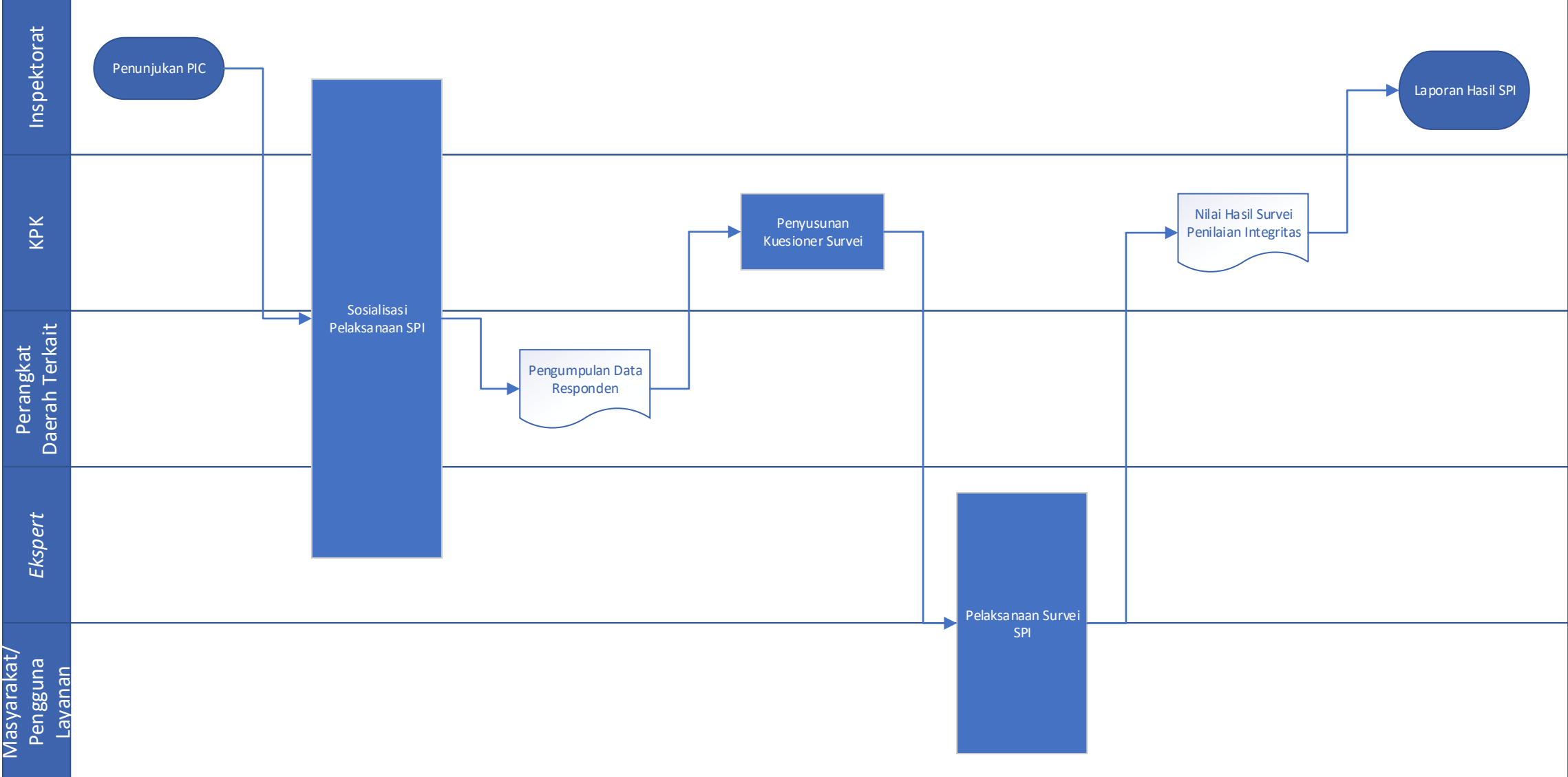
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi (Sapu Bersih Pungutan Liar)



SLW-10.1 CFM 03.5

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi (GOL)





Peta Relasi

SLW-10.2

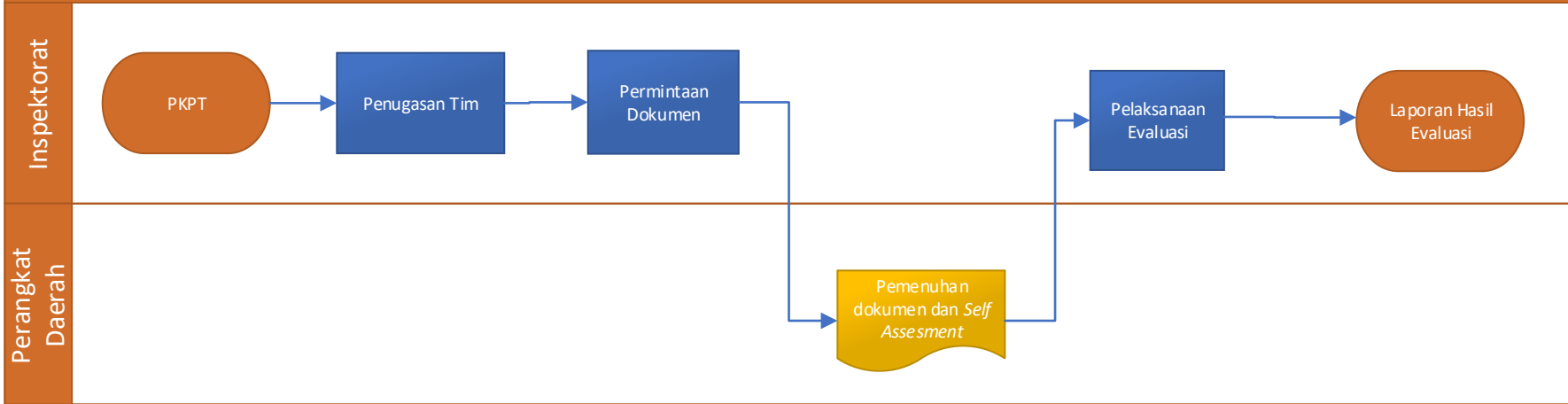
Pengelolaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektorat

Semua perangkat daerah

SLW-10.2 CFM 01.1

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP)

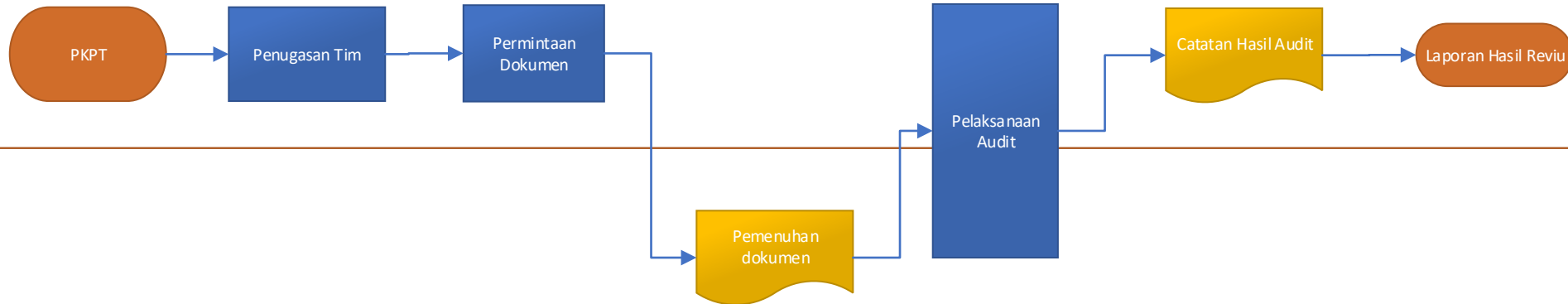


SLW-10.2 CFM 01.2

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pengawasan BMD)

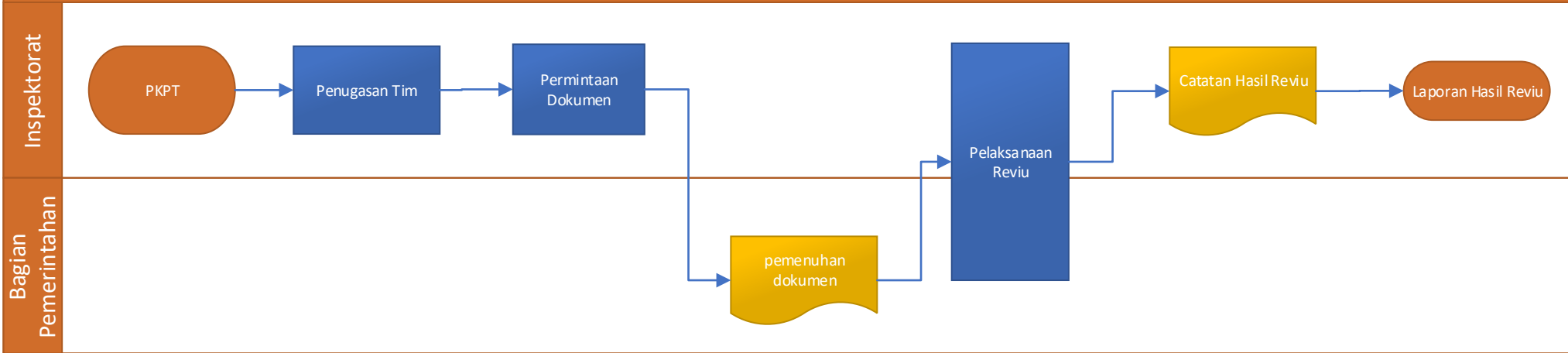
Inspektorat

BPKAD



SLW-10.2 CFM 01.3

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pengawasan Pengelolaan Belanja)



SLW-10.2 CFM 01.4

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN))

Inspektorat

PKPT

Penugasan Tim

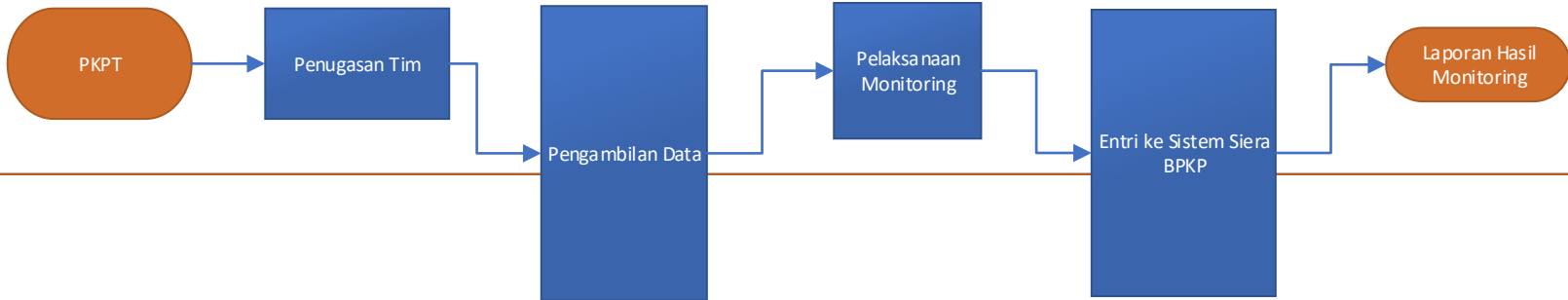
Pengambilan Data

Pelaksanaan
Monitoring

Entri ke Sistem Siera
BPKP

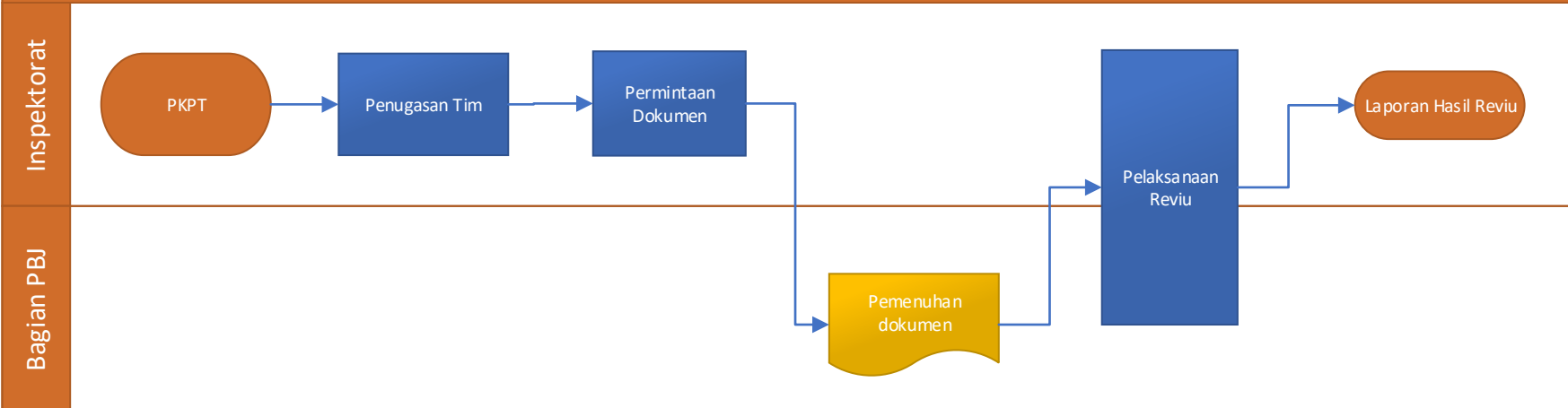
Laporan Hasil
Monitoring

Bagian PBJ



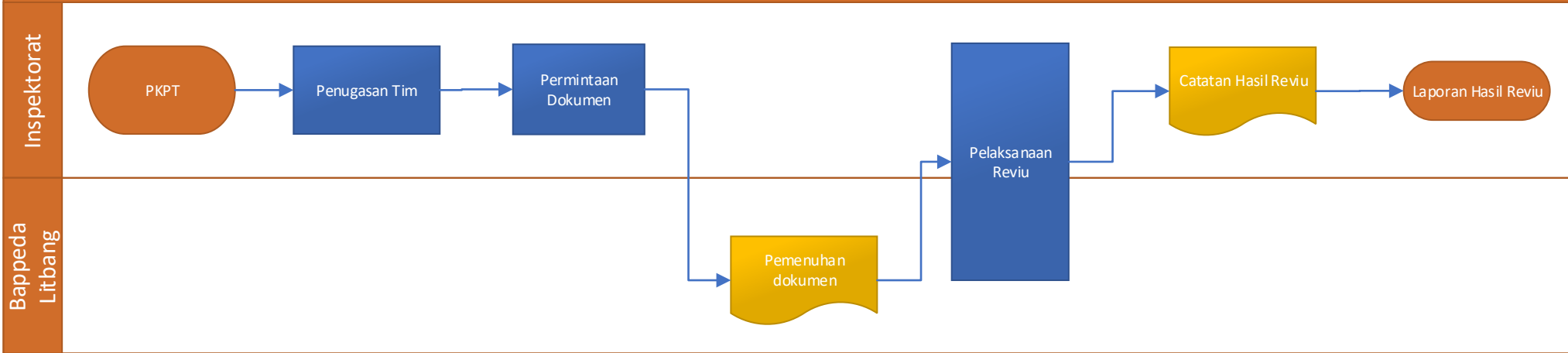
SLW-10.2 CFM 02.1

Reviu Kinerja (Pengadaan Barang dan Jasa)



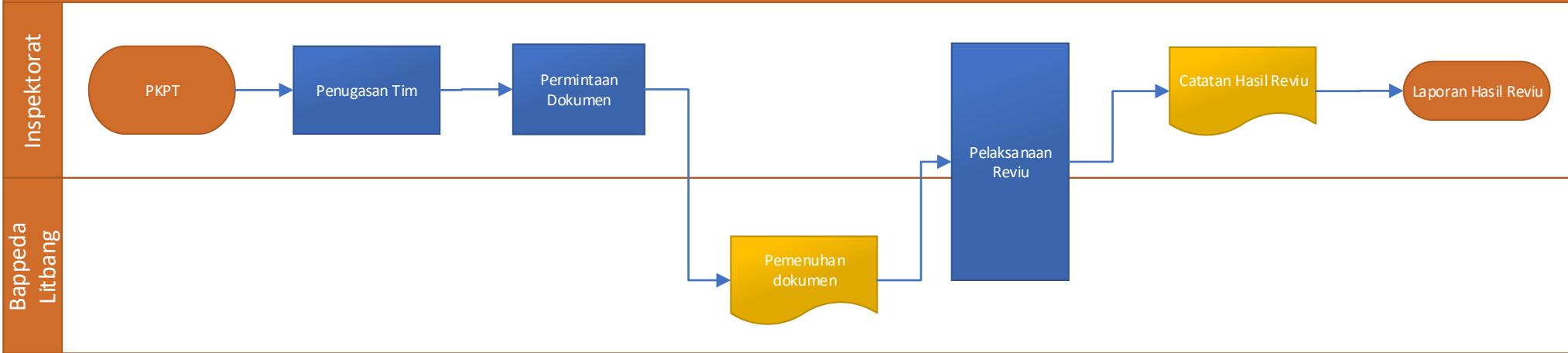
SLW-10.2 CFM 02.2

Reviu Kinerja (Reviu RKPD)



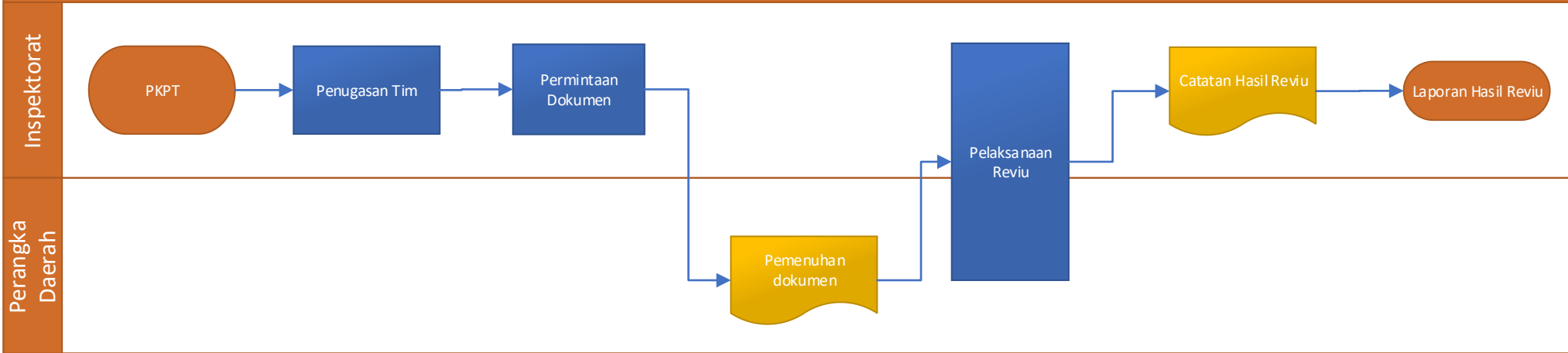
SLW-10.2 CFM 02.3

Reviu Kinerja (Reviu Renstra)



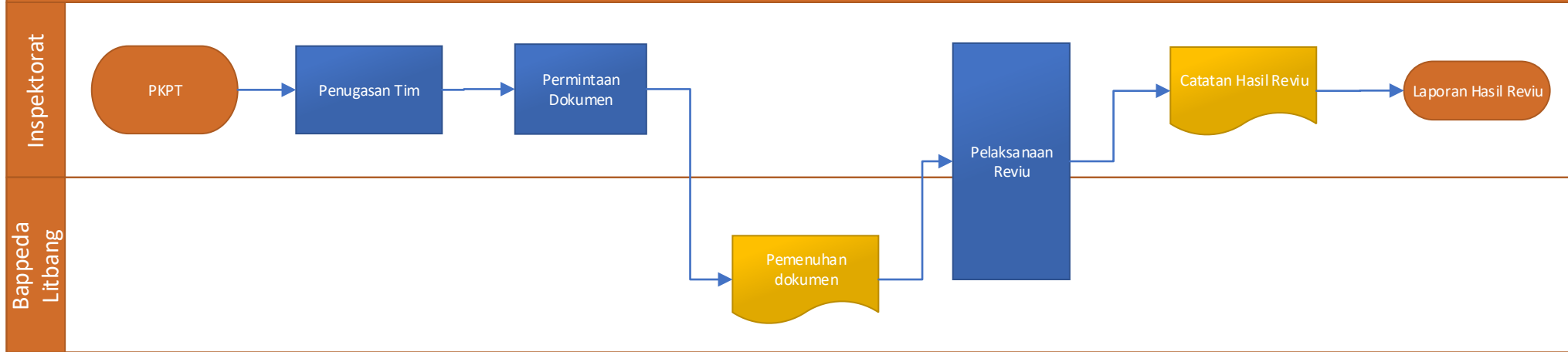
SLW-10.2 CFM 02.4

Reviu Kinerja (Reviu Renja)



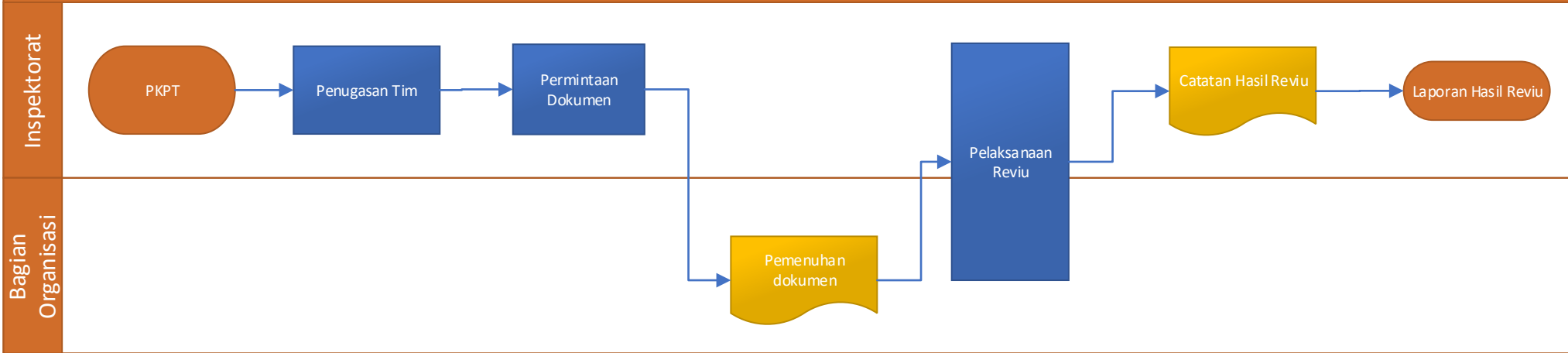
SLW-10.2 CFM 02.5

Reviu Kinerja (Reviu RPJMD)



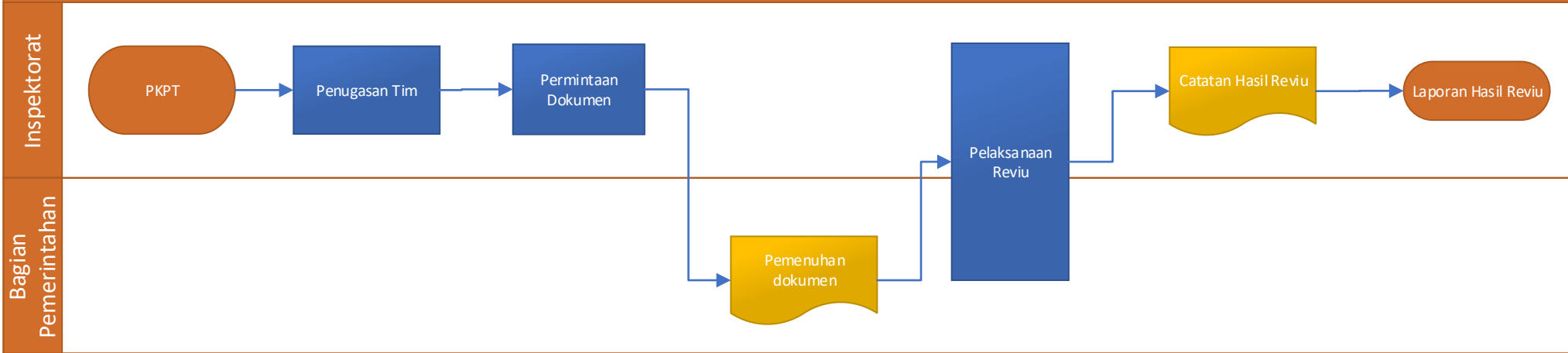
SLW-10.2 CFM 02.6

Reviu Kinerja (Reviu LKJIP)



SLW-10.2 CFM 02.7

Reviu Kinerja (Reviu LPPD)



Peta Relasi

SLW-10.3

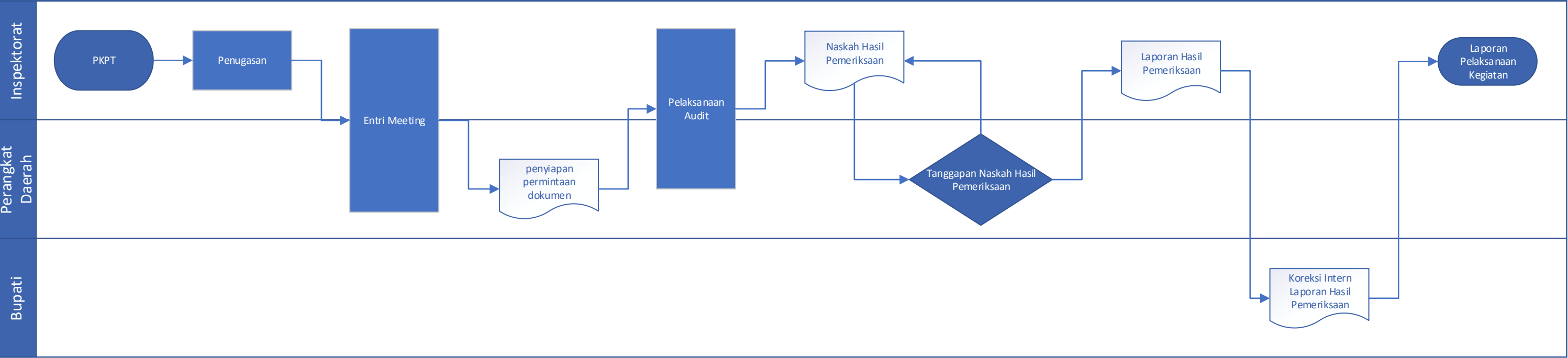
Pengelolaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Inspektorat

Semua Perangkat Daerah

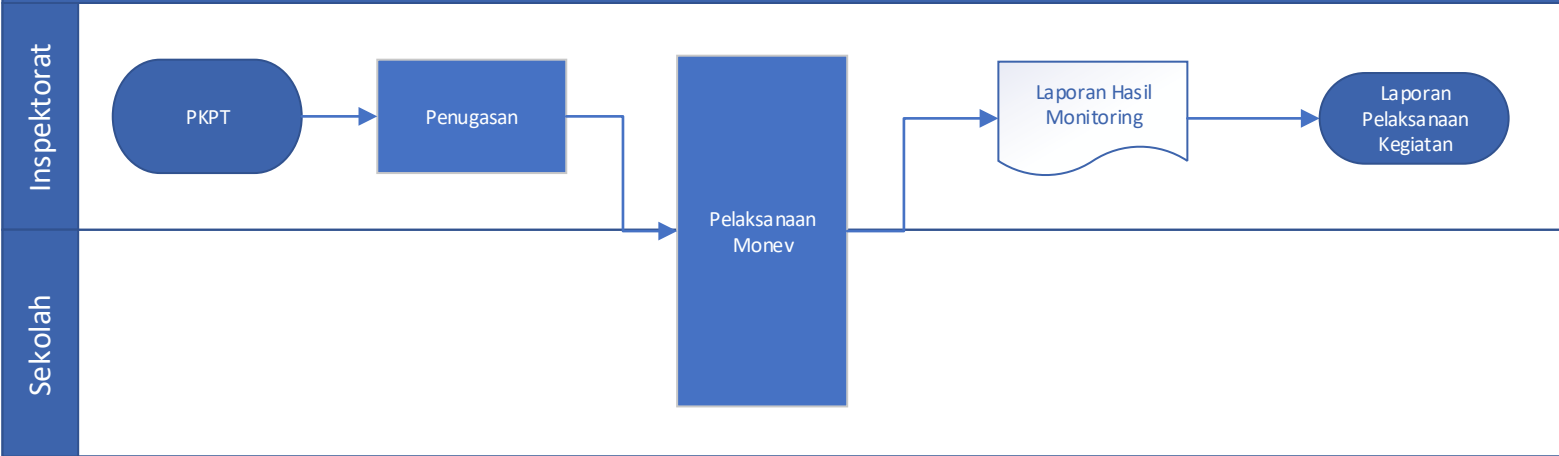
SLW-10.3 CFM 01.1

Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah (audit perangkat daerah)



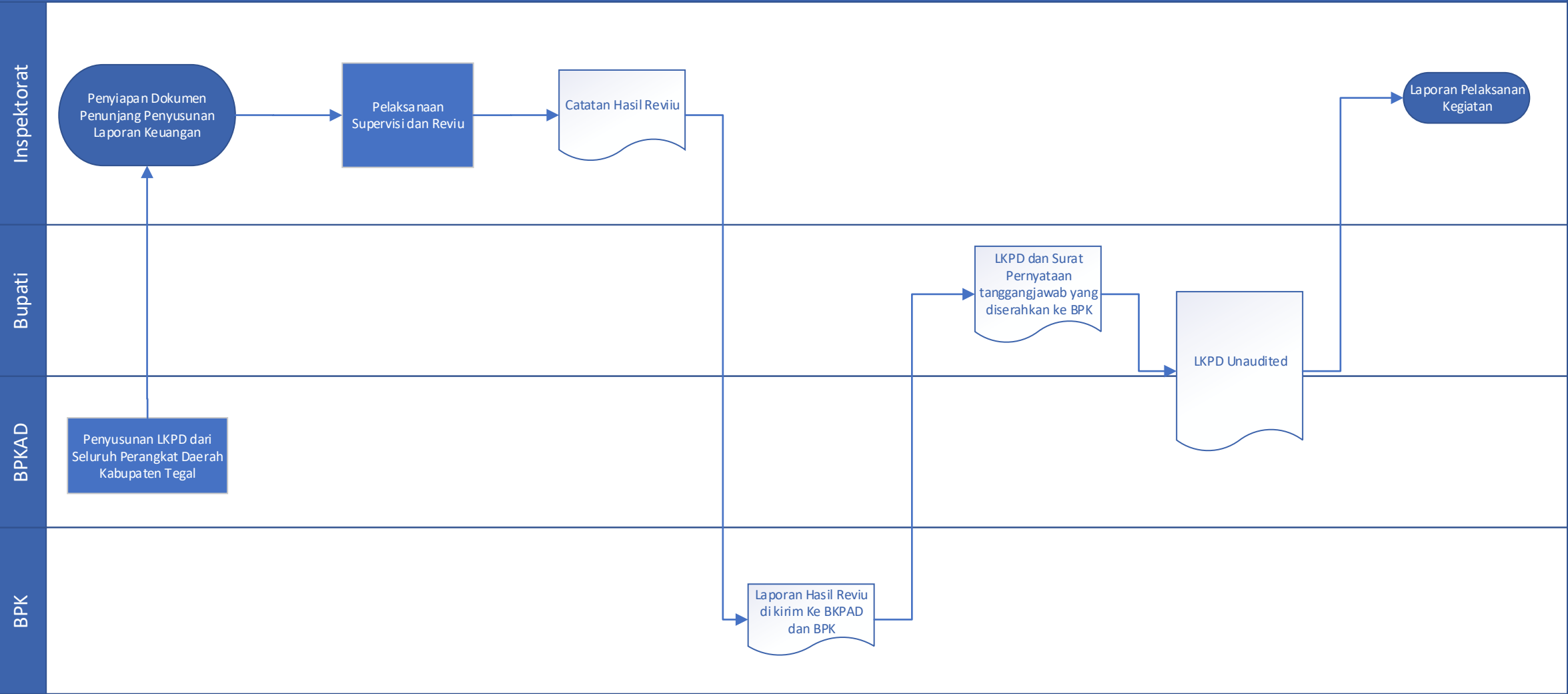
SLW-10.3 CFM 01.2

Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah (Monitoring dan Evaluasi BOS)



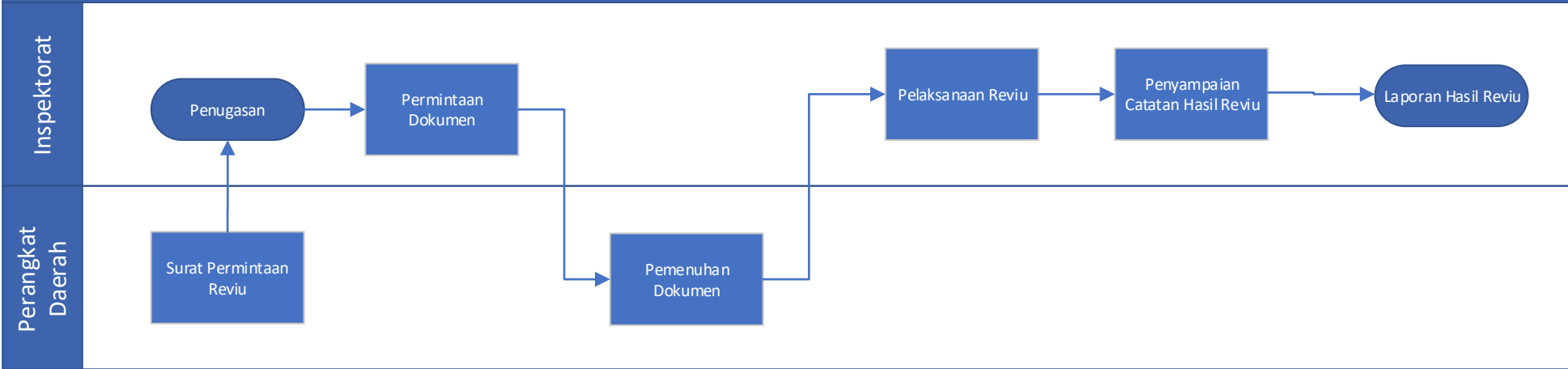
SLW-10.3 CFM 02.1

Reviu Laporan Keuangan (Reviu LKPD)



SLW-10.3 CFM 02.2

Reviu Laporan Keuangan (Reviu DAK)



SLW-10.3 CFM 02.3

Reviu Laporan Keuangan (Reviu SHS)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

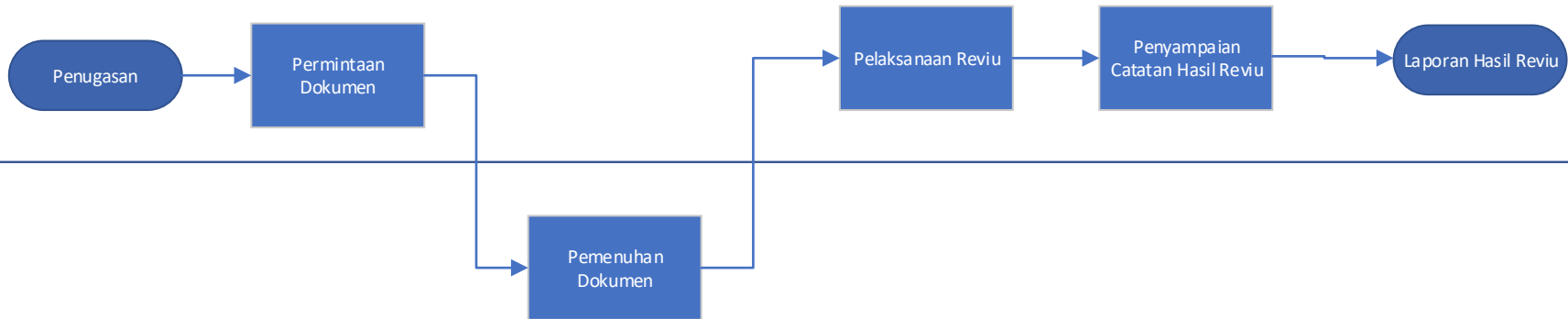
Pelaksanaan Reviu

Penyampaian
Catatan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu

BPKAD

Pemenuhan
Dokumen



SLW-10.3 CFM 02.4

Reviu Laporan Keuangan (Reviu ASB)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

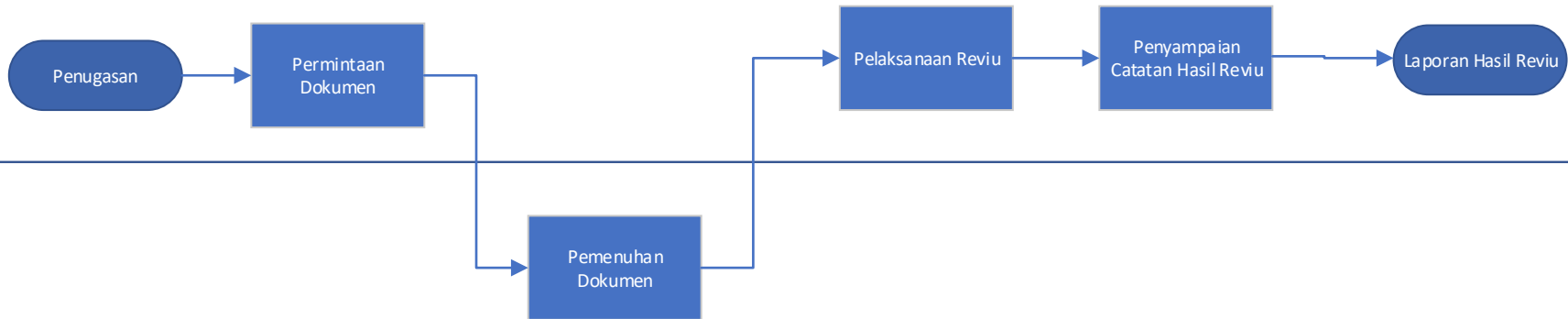
Pelaksanaan Reviu

Penyampaian
Catatan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu

BPKAD

Pemenuhan
Dokumen



SLW-10.3 CFM 02.5

Reviu Laporan Keuangan (Reviu HSPK)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

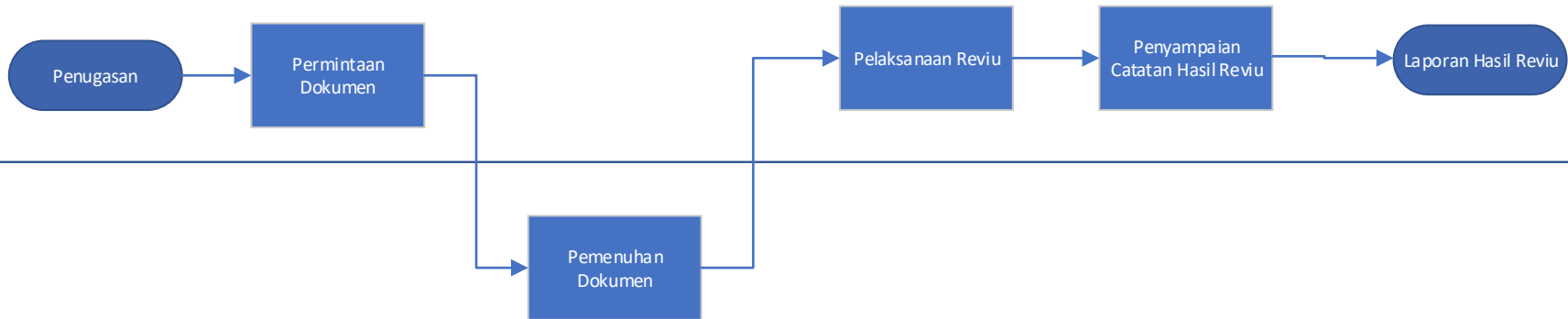
Pelaksanaan Reviu

Penyampaian
Catatan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu

BPKAD

Pemenuhan
Dokumen



SLW-10.3 CFM 02.6

Reviu Laporan Keuangan (Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

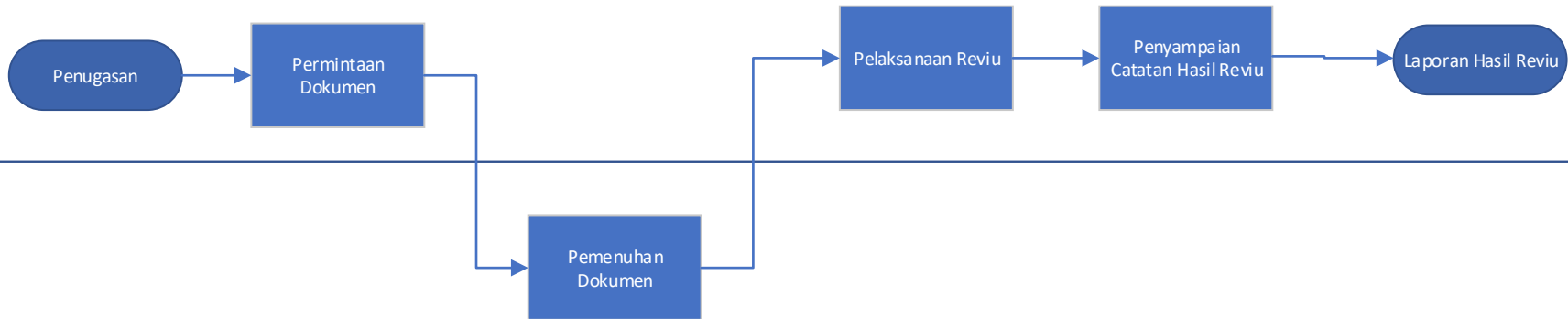
Pelaksanaan Reviu

Penyampaian
Catatan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu

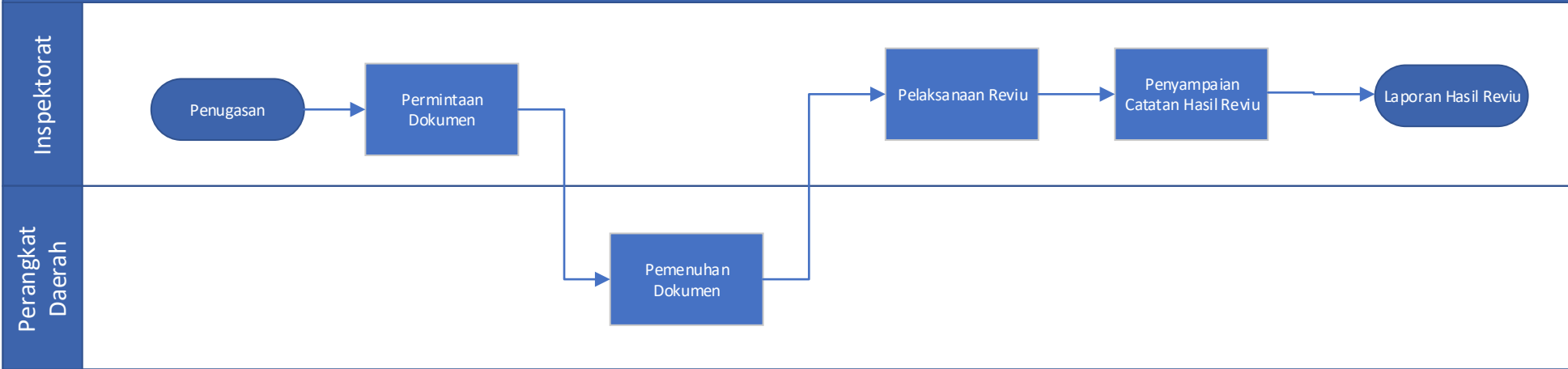
Bagian PBJ

Pemenuhan
Dokumen



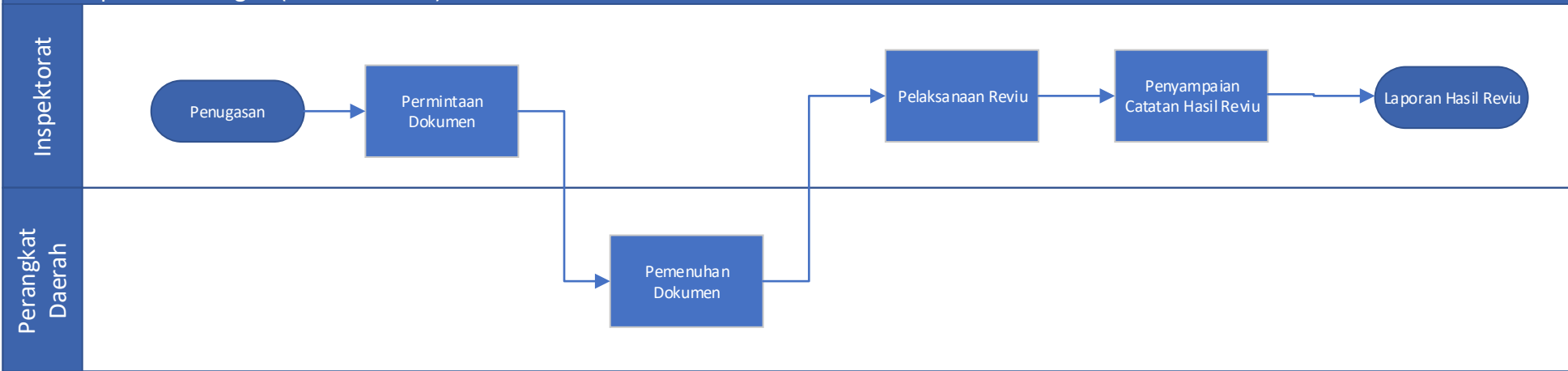
SLW-10.3 CFM 02.7

Reviu Laporan Keuangan (Reviu RKA)



SLW-10.3 CFM 02.8

Reviu Laporan Keuangan (Reviu KUPPAS)



SLW-10.3 CFM 02.9

Reviu Laporan Keuangan (Reviu Pengelolaan Pendapatan)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

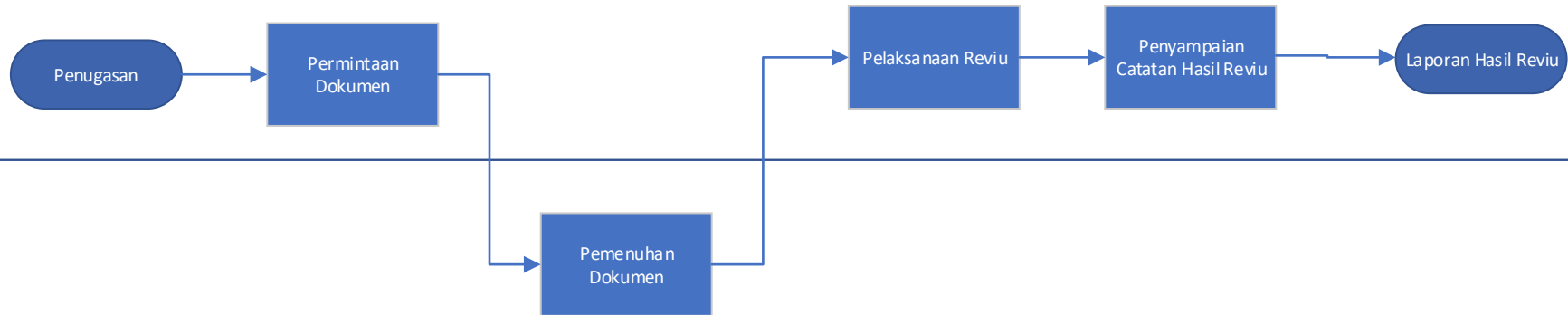
Pelaksanaan Reviu

Penyampaian
Catatan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu

BAPENDA

Pemenuhan
Dokumen



SLW-10.3 CFM 03.1

Pengawasan Desa (APIP Mitra Desa)

Inspektorat

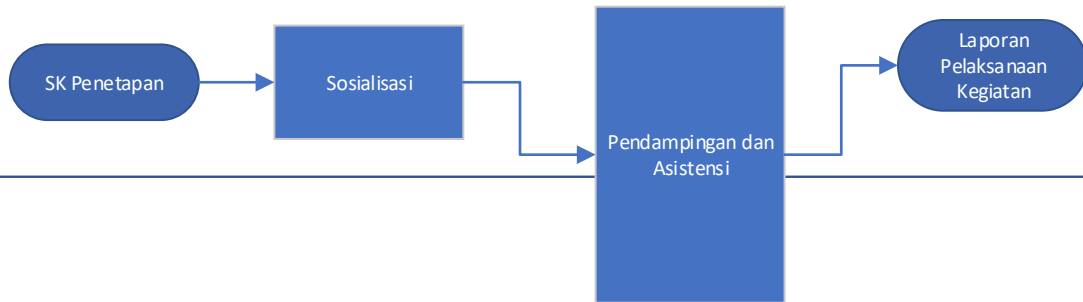
SK Penetapan

Sosialisasi

Pendampingan dan
Asistensi

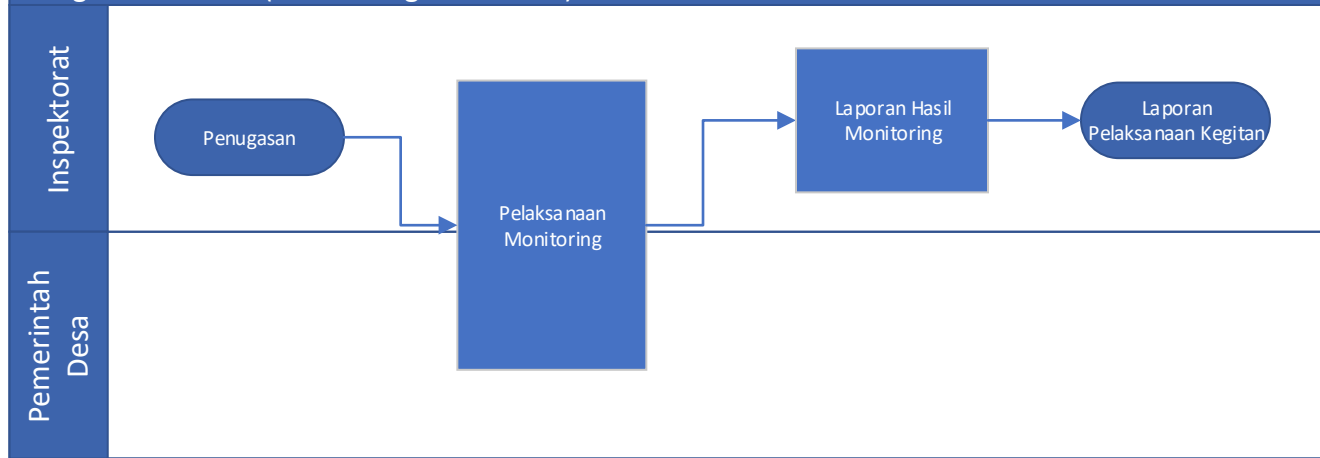
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan

Pemerintah
Desa



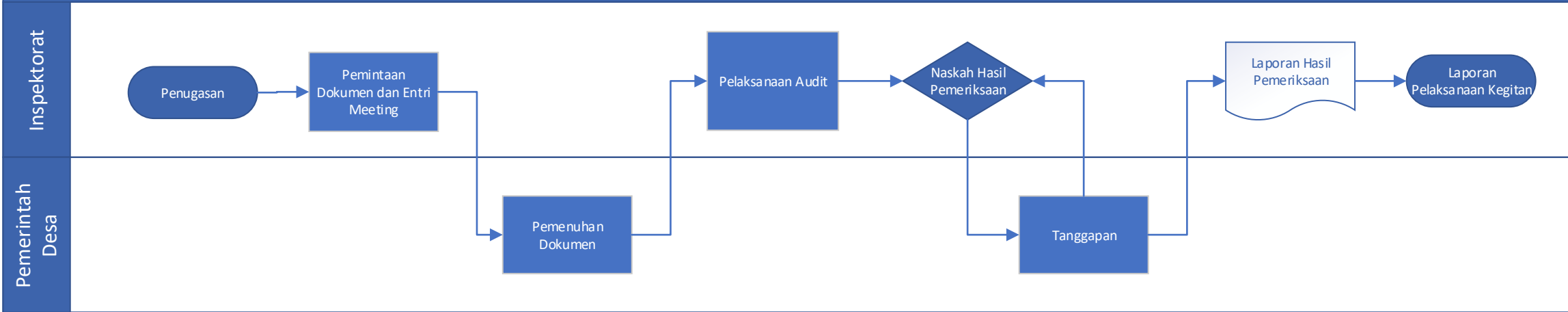
SLW-10.3 CFM 03.2

Pengawasan Desa (Monitoring Dana Desa)



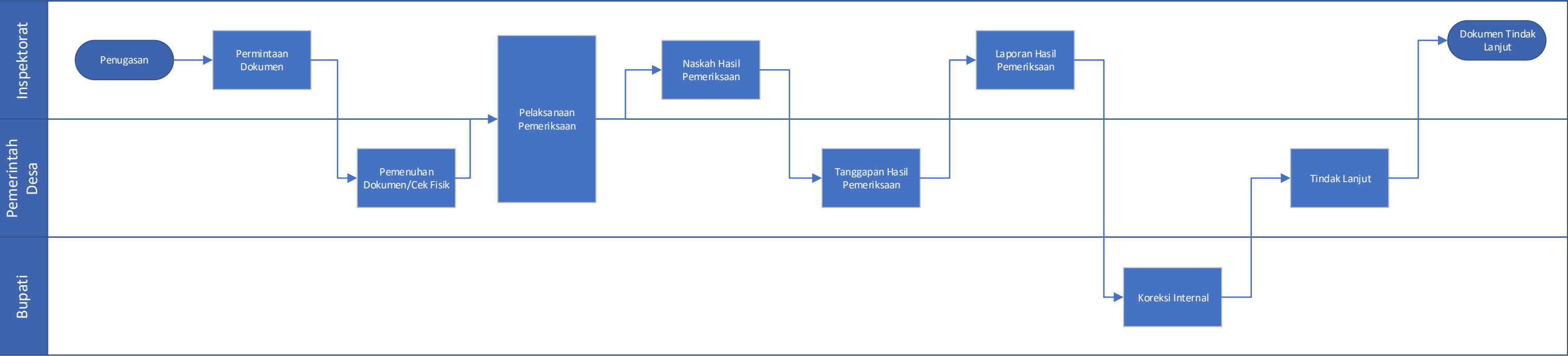
SLW-10.3 CFM 03.3

Pengawasan Desa (Audit Dana Desa)



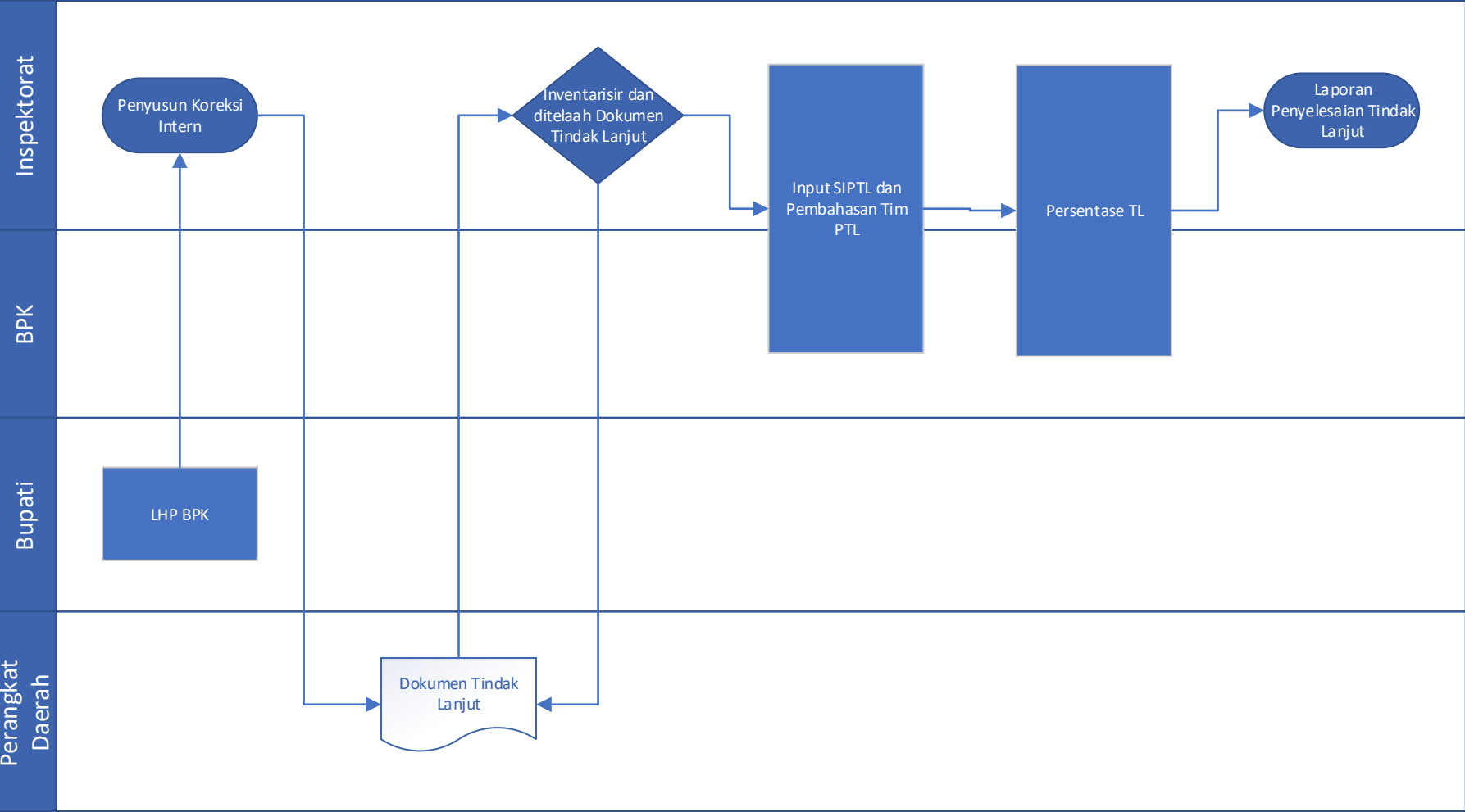
SLW 10.3 CFM 03.4

Pengawasan Desa (Pemeriksaan Pengelolaan keuangan Desa)



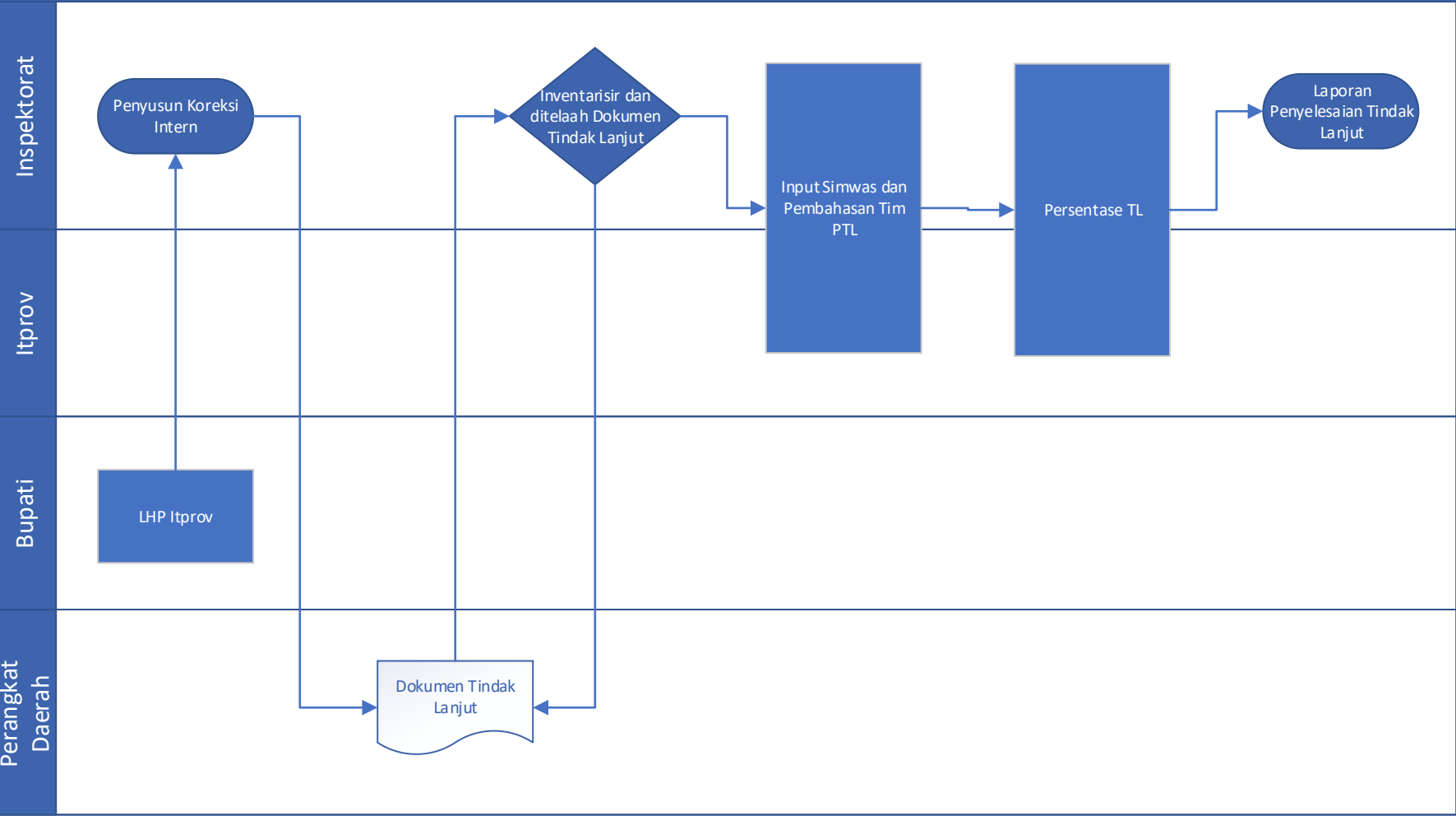
SLW-10.3 CFM 04.1

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut (Hasil Pemeriksaan BPK)



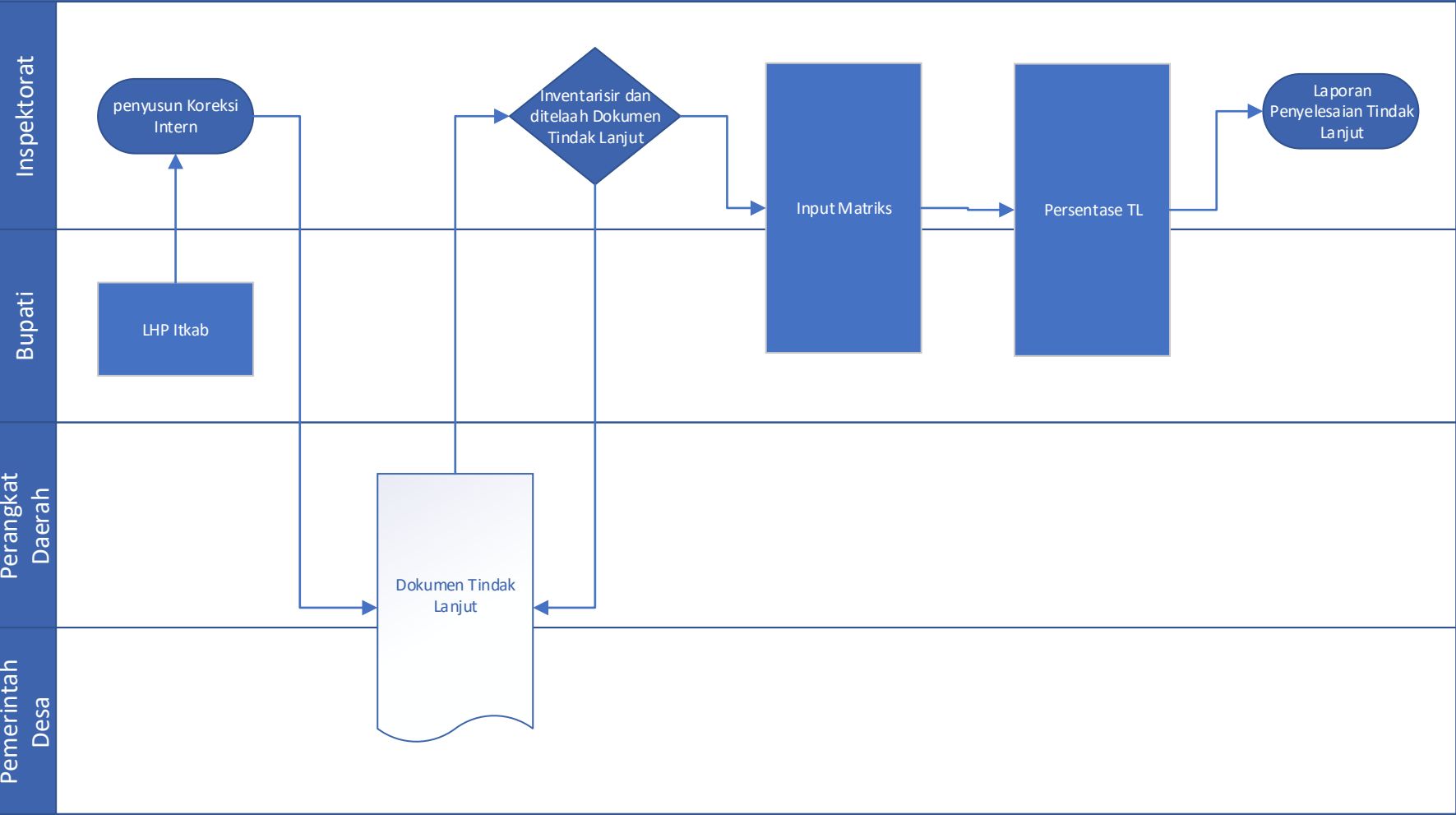
SLW-10.3-CFM 04.2

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut (Hasil Pemeriksaan Itprov)



SLW-10.3-CFM 04.3

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut (Hasil Pemeriksaan Itkab)



Peta Relasi

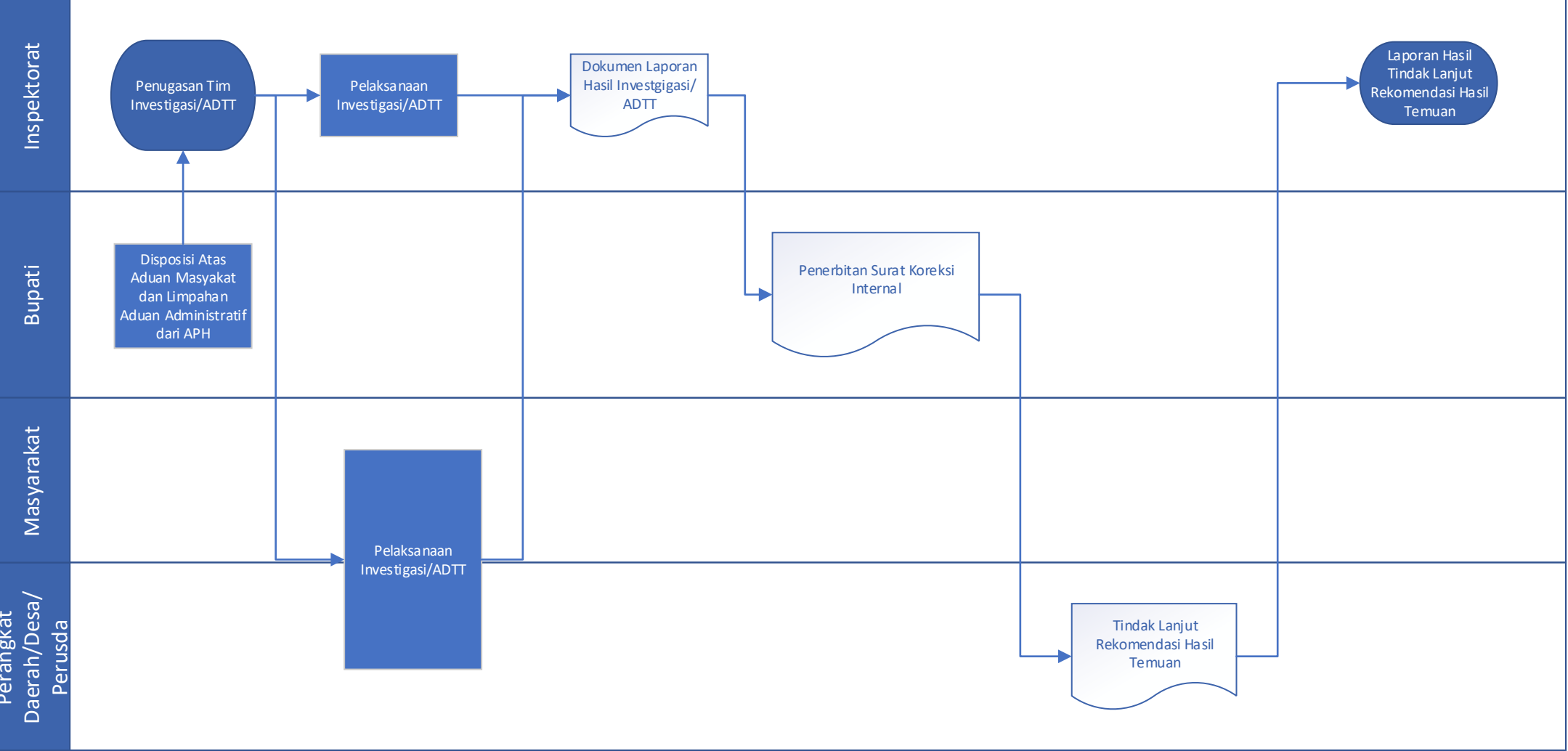
SLW-10.4
Pengelolaan Pengawasan Khusus

Inspektorat

Semua Perangkat Daerah

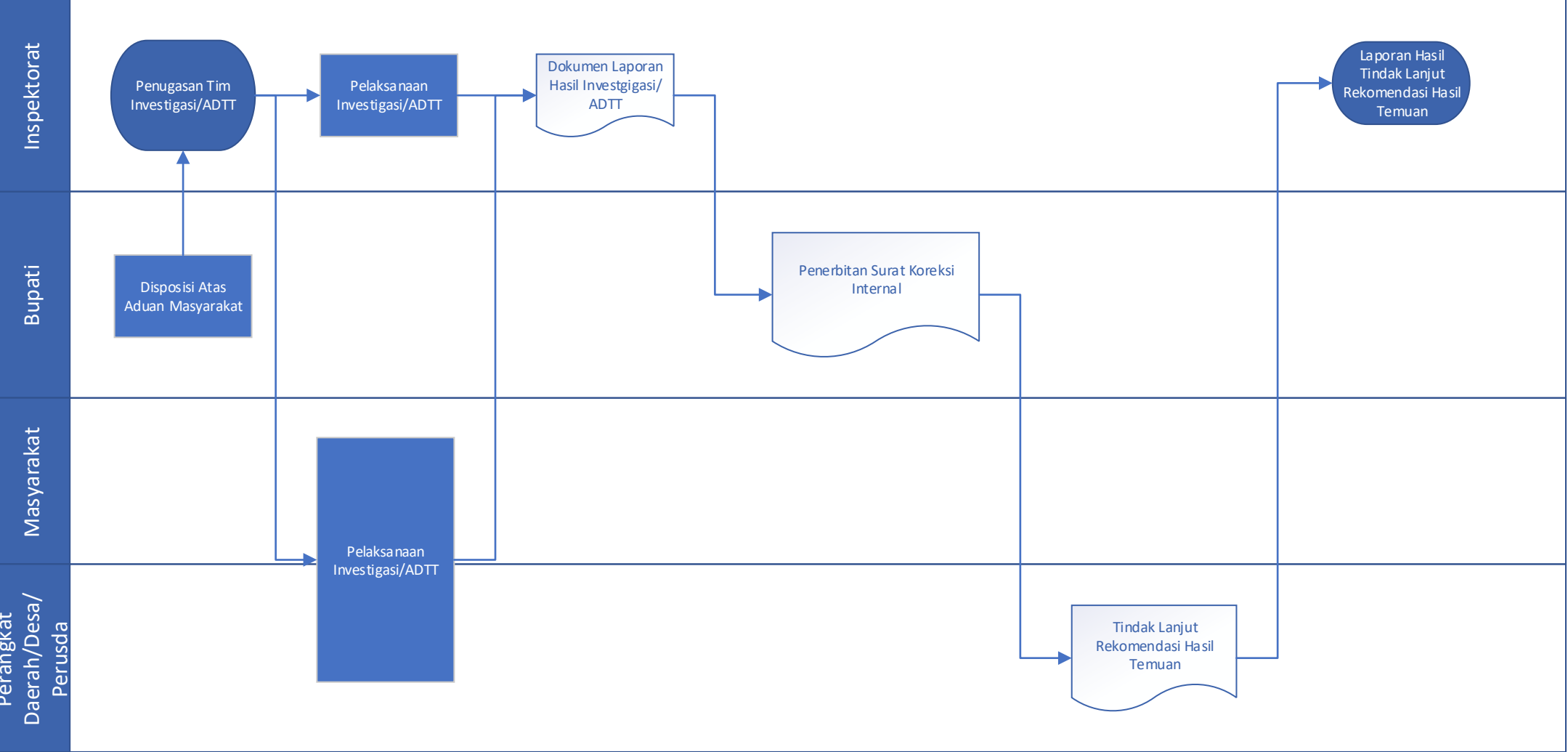
SLW-10.4 CFM 01.1

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigasi/ ADTT limpahan APH)



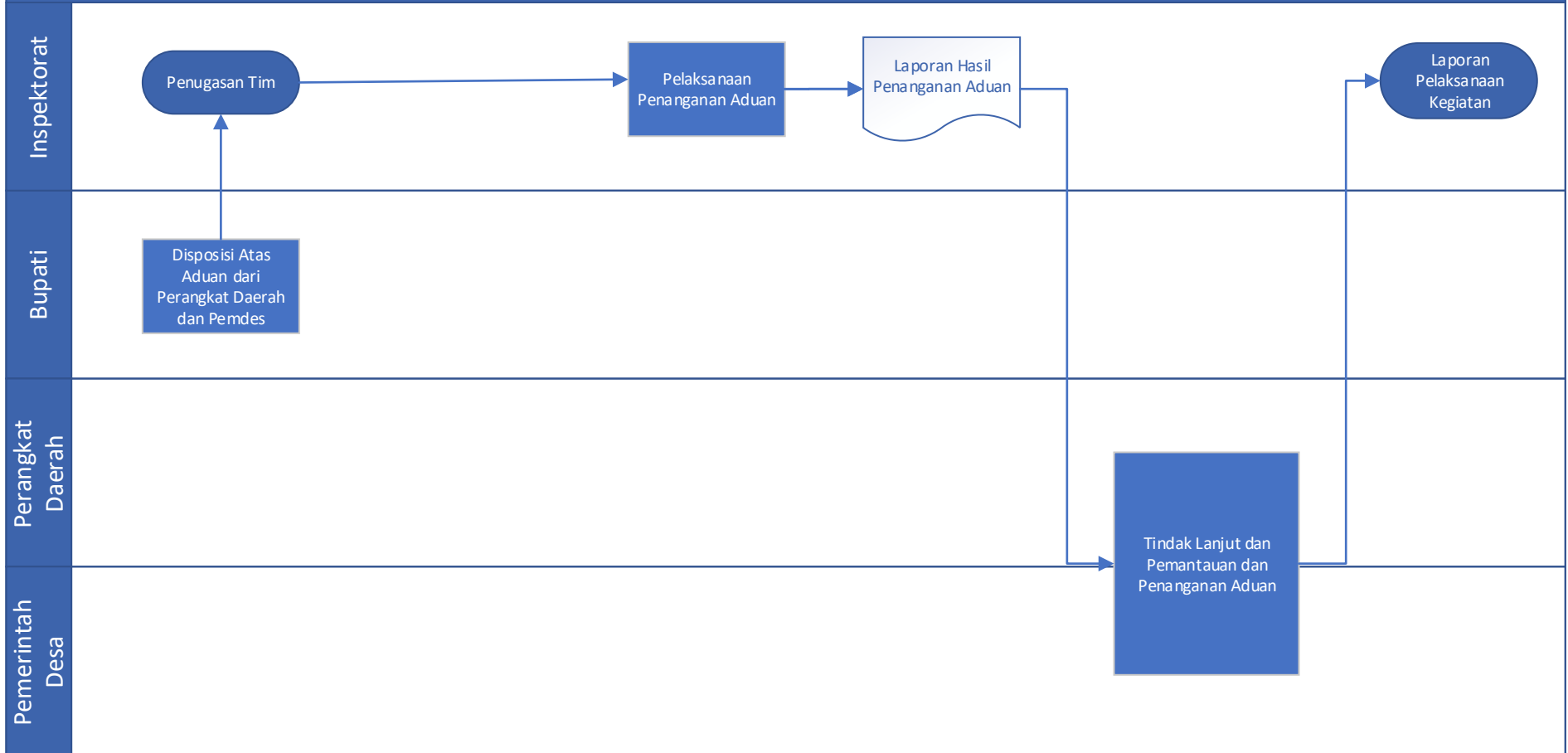
SLW-10.4 CFM 01.2

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigasi/ ADTT Aduan Masyarakat)



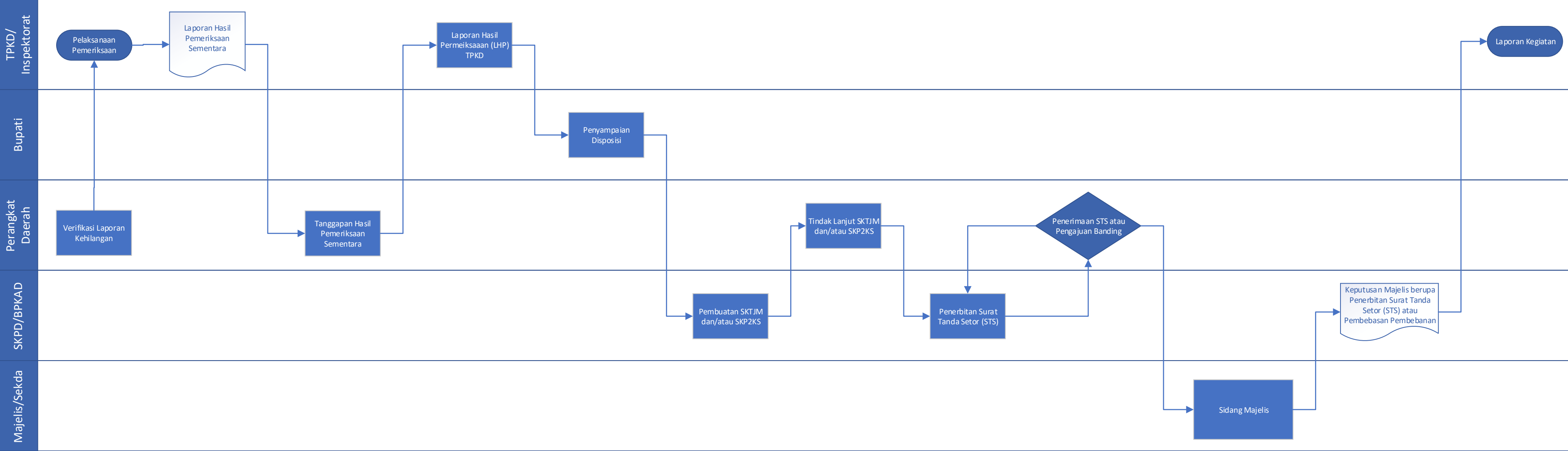
SLW-10.4 CFM 01.3

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Wistleblower System)



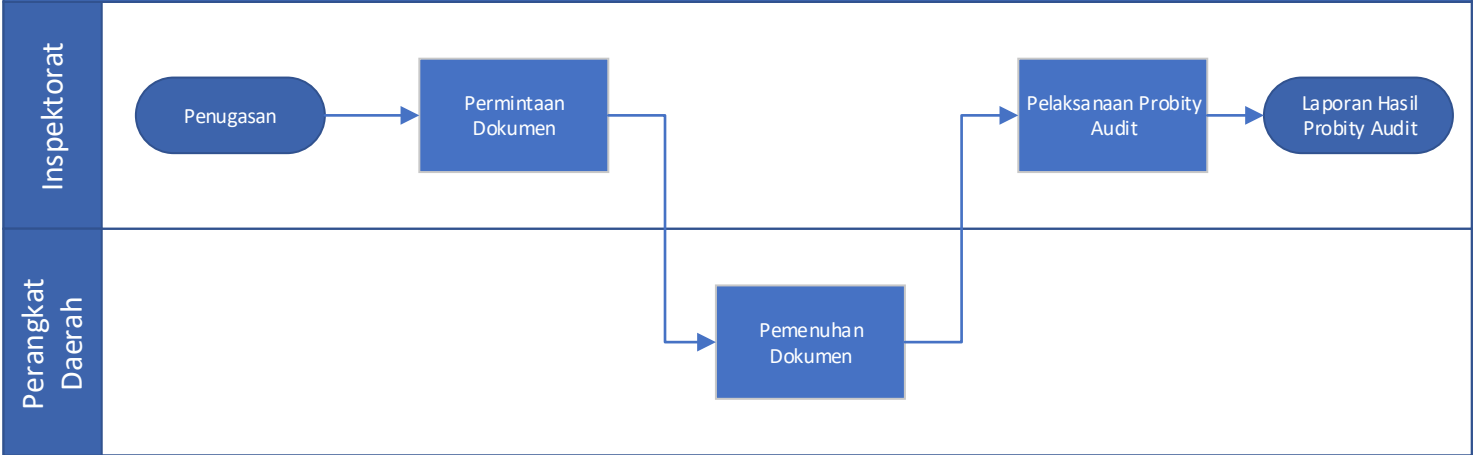
SLW-10.4 CFM 01.4

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR))



SLW-10.4 CFM 01.5

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Probity Audit)



SLW-10.4 CFM 01.6

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu, Promosi, Rotasi, Mutasi)

Inspektorat

Penugasan

Permintaan
Dokumen

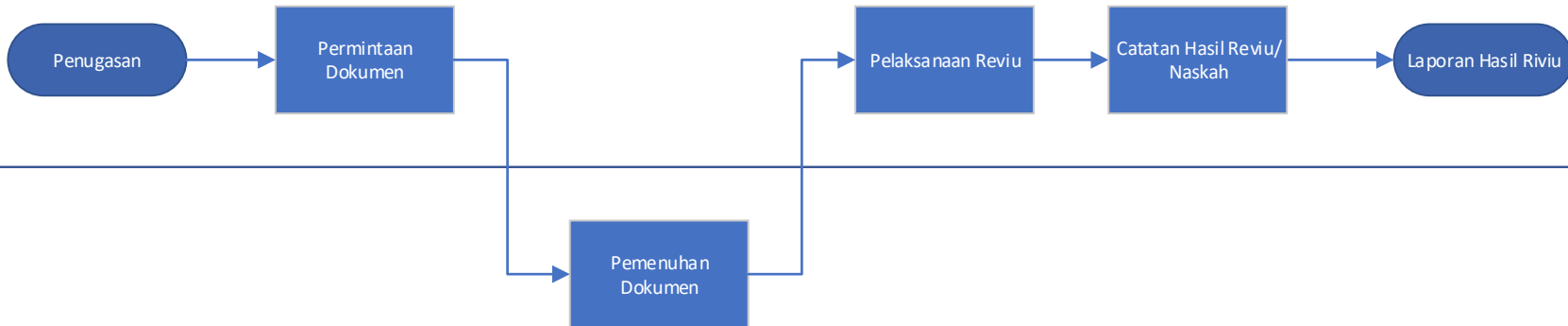
Pelaksanaan Reviu

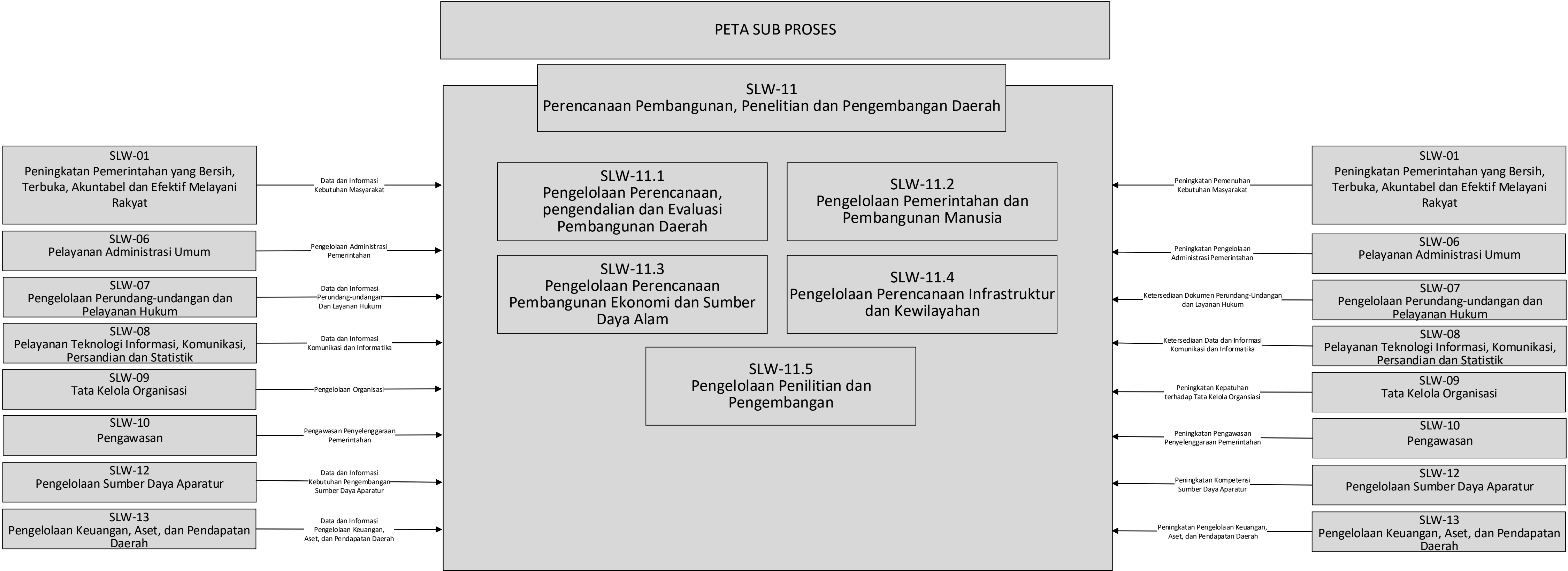
Catatan Hasil Reviu/
Naskah

Laporan Hasil Rivi

BKPSDM

Pemenuhan
Dokumen





PETA RELASI

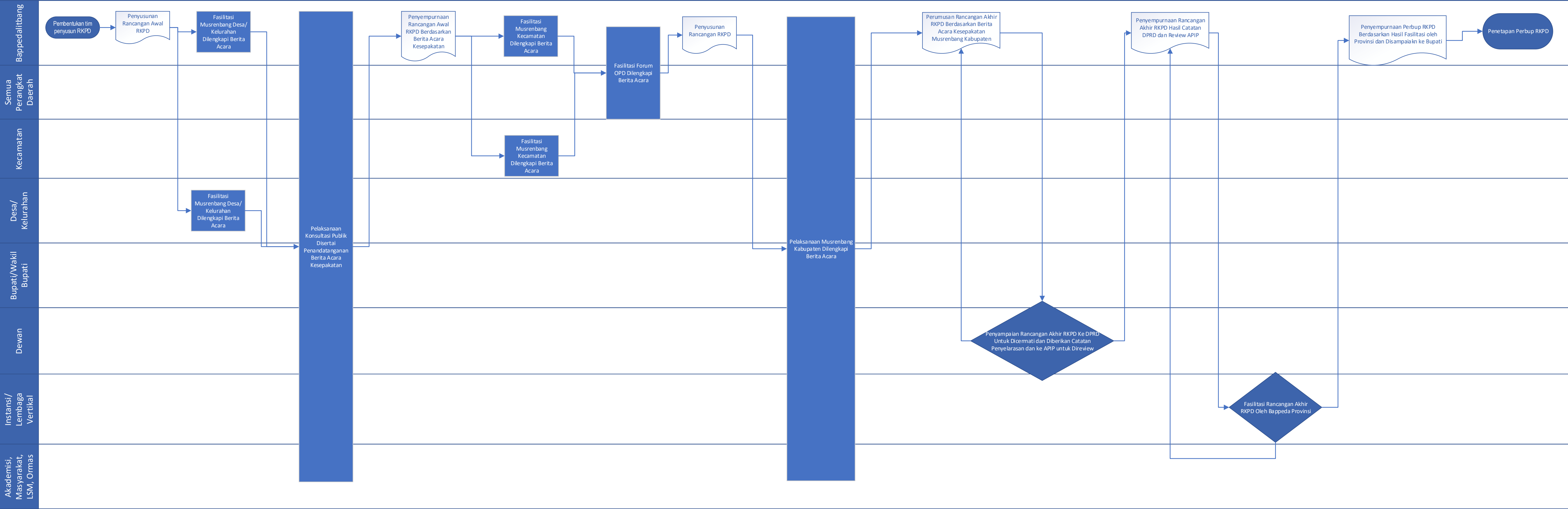
SLW-11.1

Pengelolaan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BAPPEDALITBANG

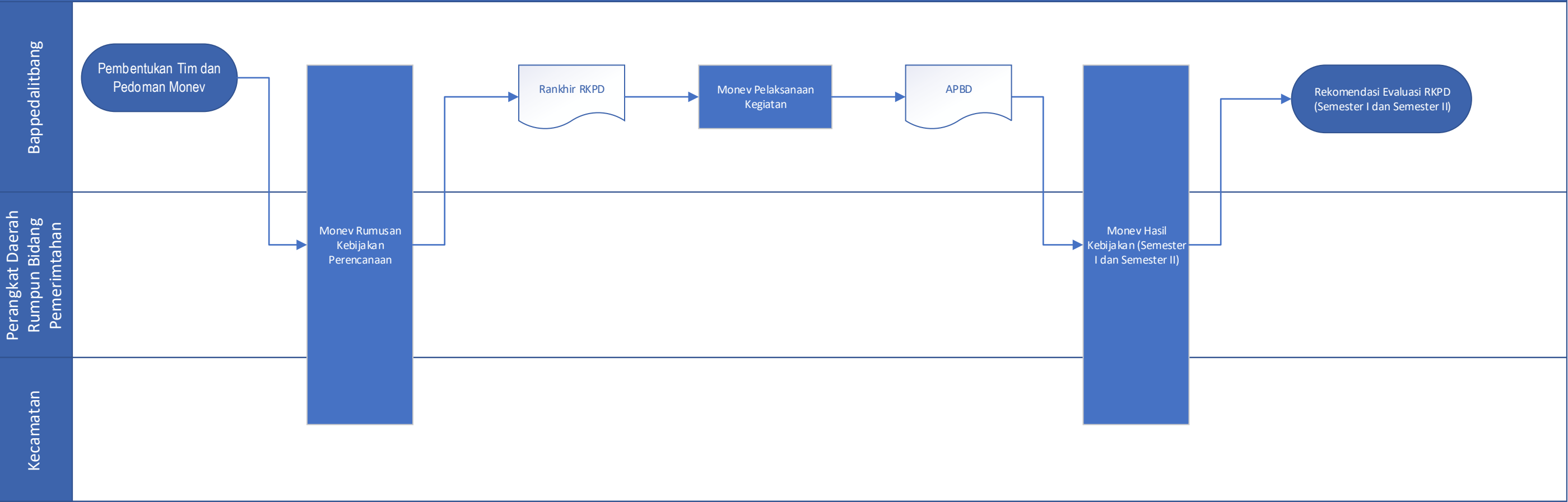
SEMUA PERANGKAT DAERAH

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota



SLW-11.1 CFM 02

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah



PETA RELASI

SLW-11.2

Pengelolaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPEDALITBANG

KECAMATAN

SETDA

SETWAN

INSPEKTORAT

DINAS DIKBUD

DINAS
KESEHATAN

SATPOL PP

DINAS SOSIAL

DINAS P3AP2KB

DINAS DUKCAPIL

DISPERMADES

DINAS KOMINFO

DINAS PERPUSIP

BAPENDA

BPKAD

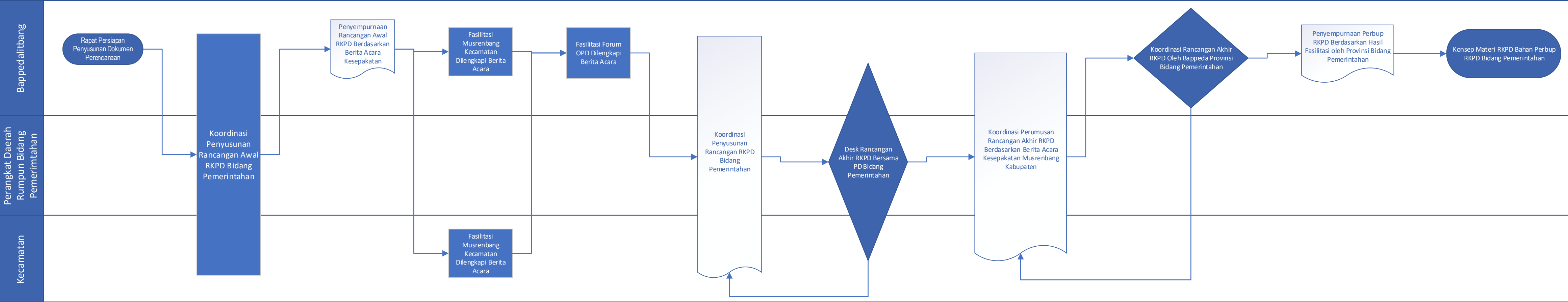
BKPSDM

BADAN
KESBANGPOL

BPBD

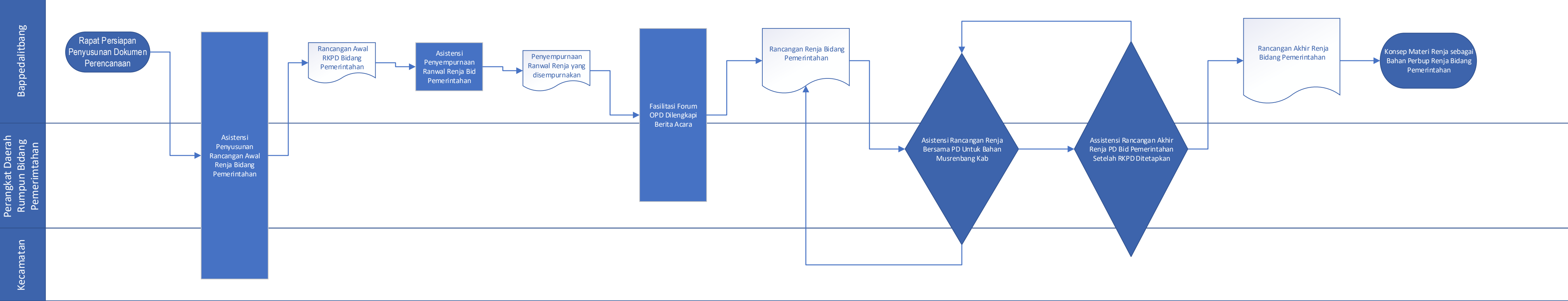
SLW-11.2 CFM 01

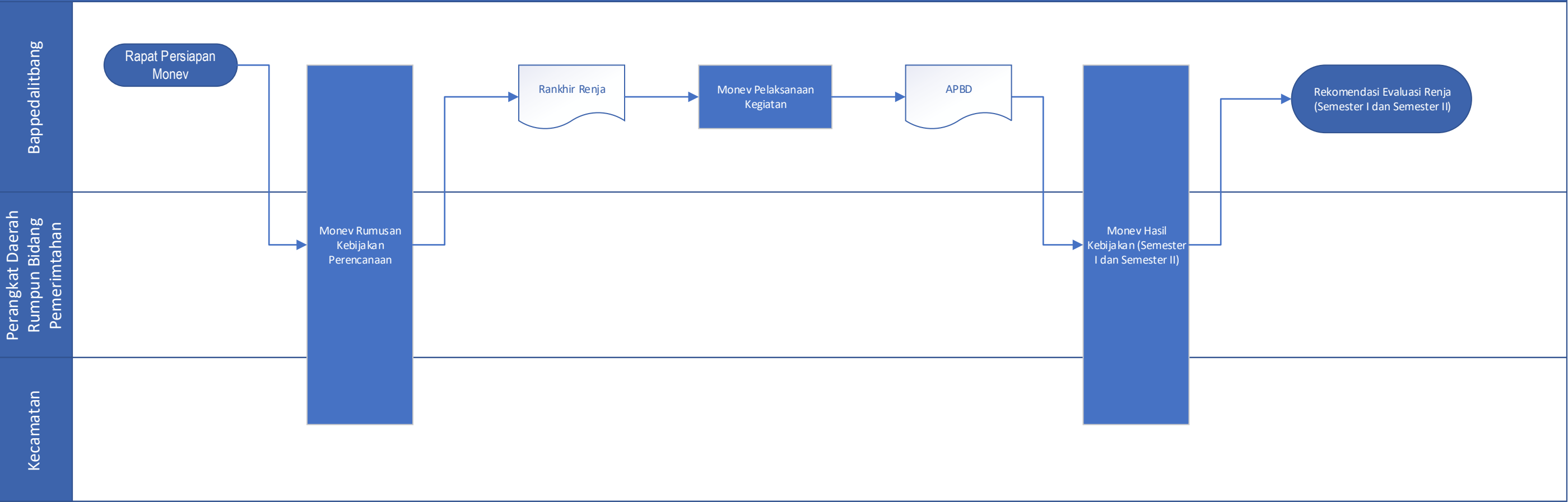
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

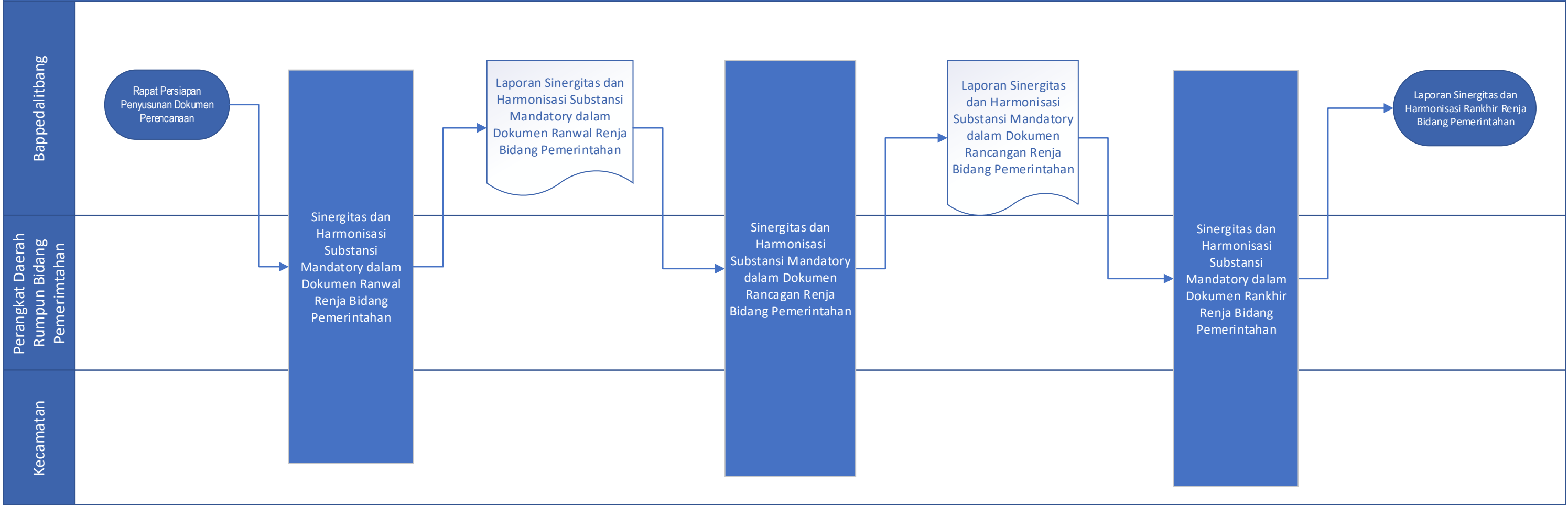


SLW-11.2 CFM 02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan







PETA RELASI

SLW-11.3

Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAPPEDALITBANG

DPMPTSP

DINAS PORAPAR

DINAS
KOP,UKM,&DAG

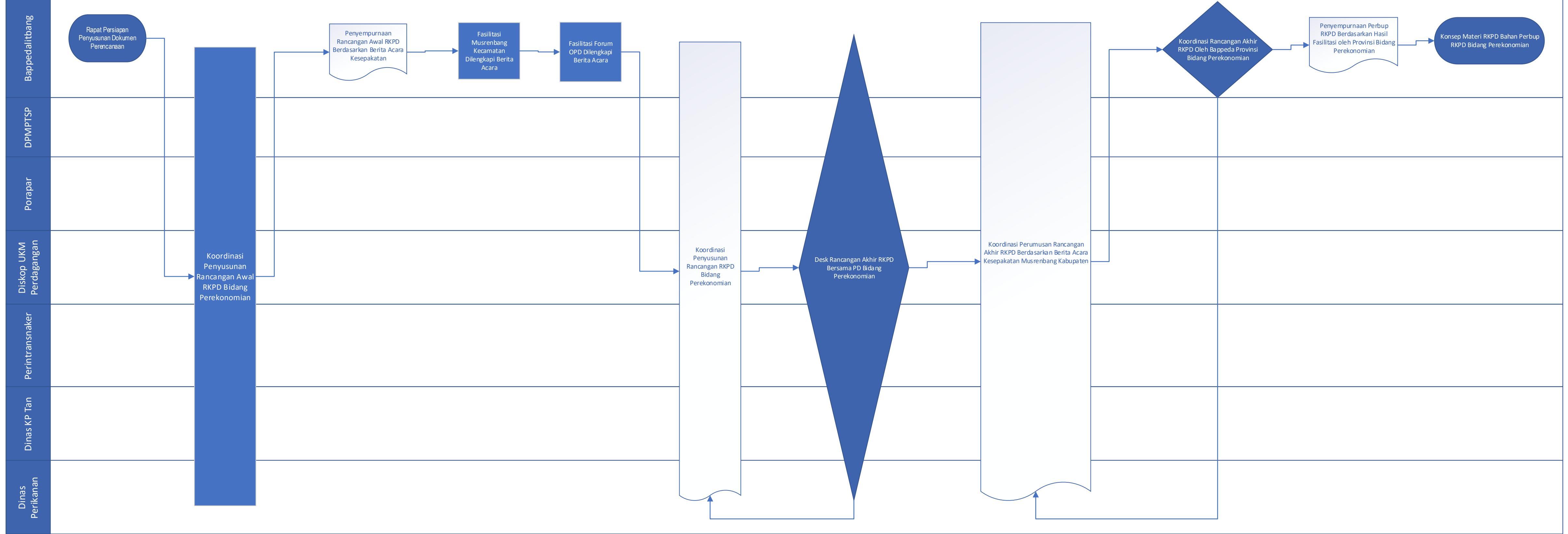
DINAS PERINTRANSNAKER

DINAS KPTAN

DINAS PERIKANAN

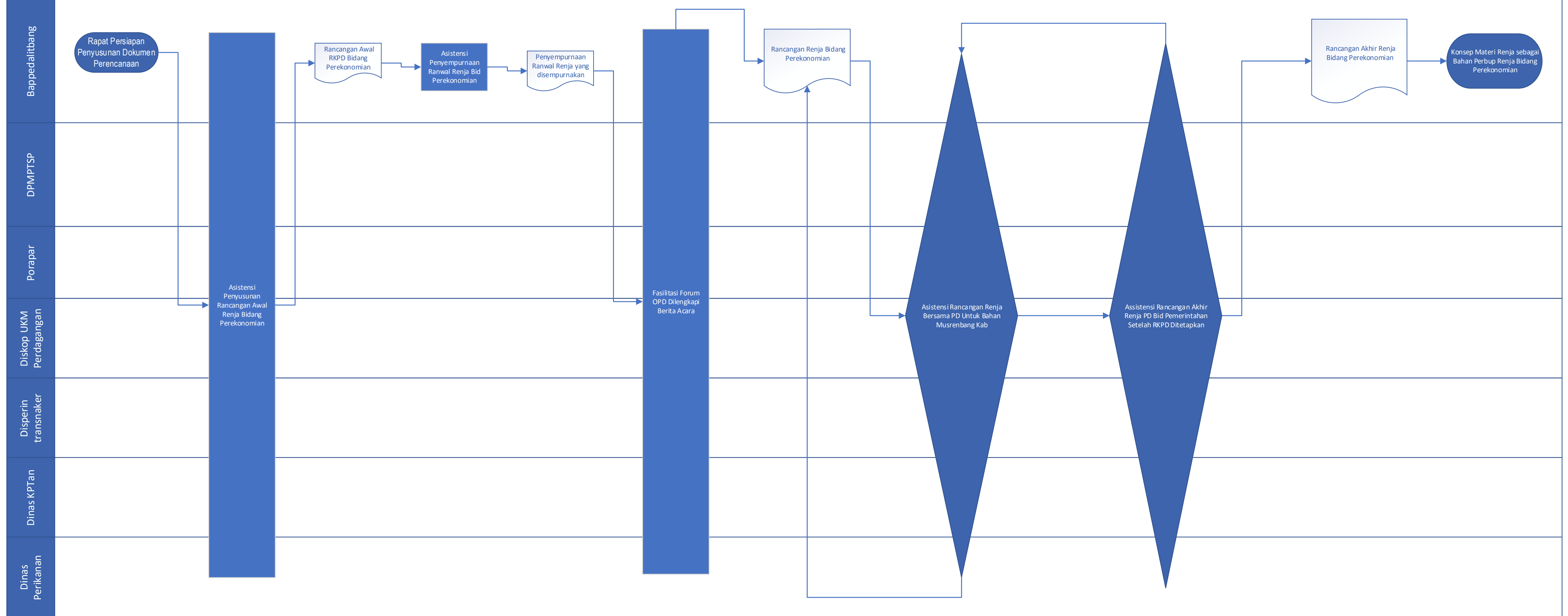
SLW-11.3 CFM 01

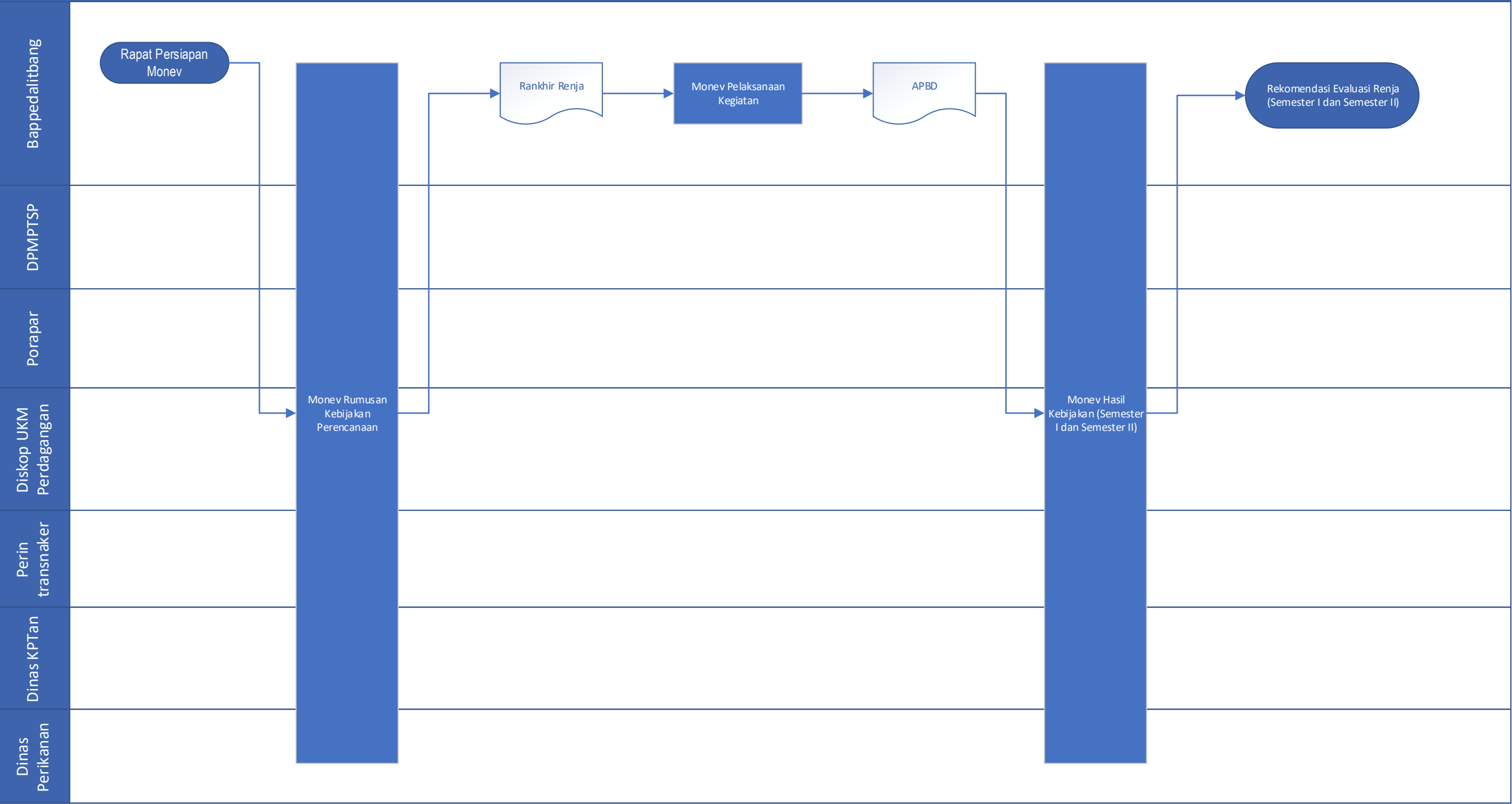
Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

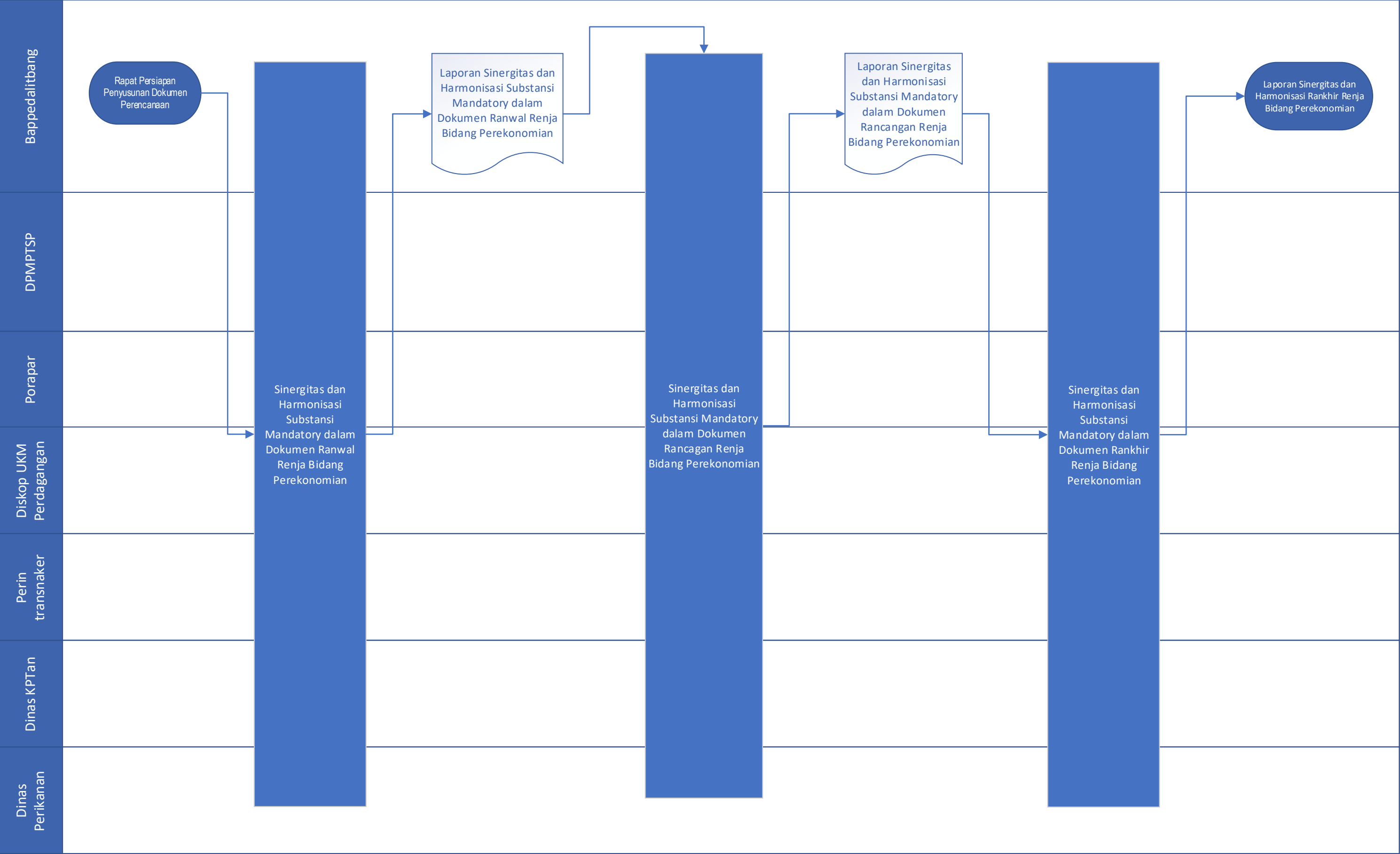


SLW-11.3 CFM 02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian







PETA RELASI

SLW-11.4

Pengelolaan Infrastruktur dan Kewilayahan

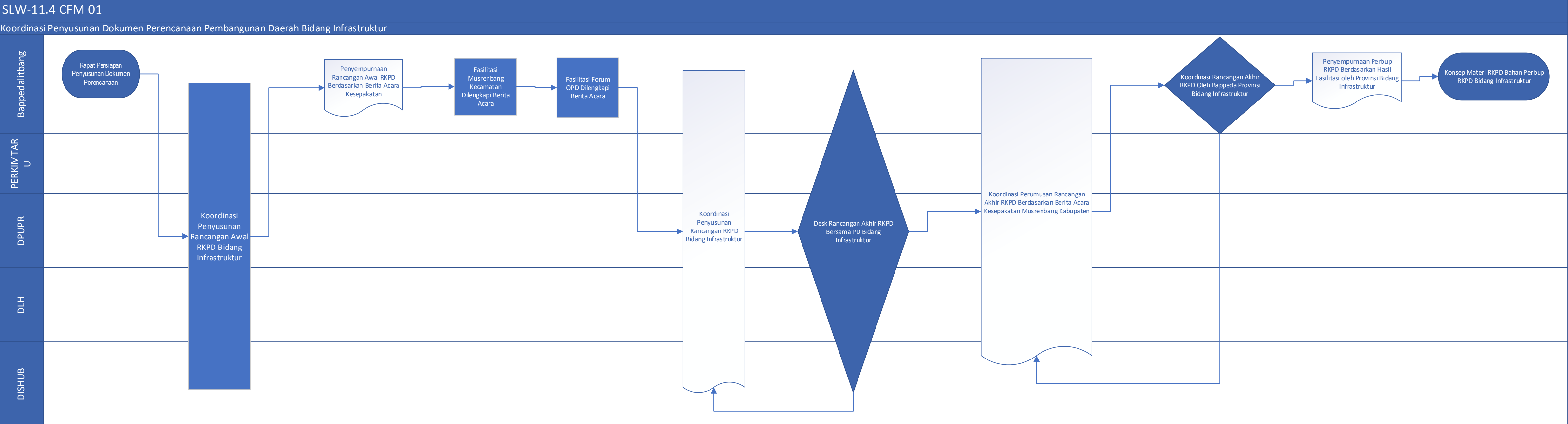
BAPPEDALITBANG

DINAS PERKIM

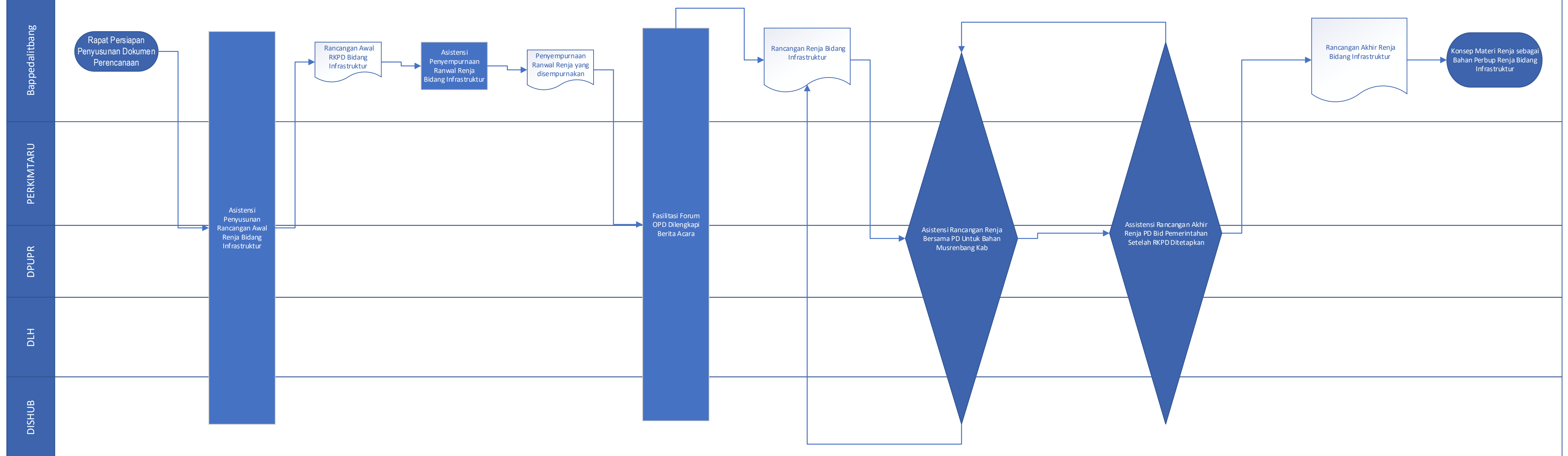
DINAS PUPR

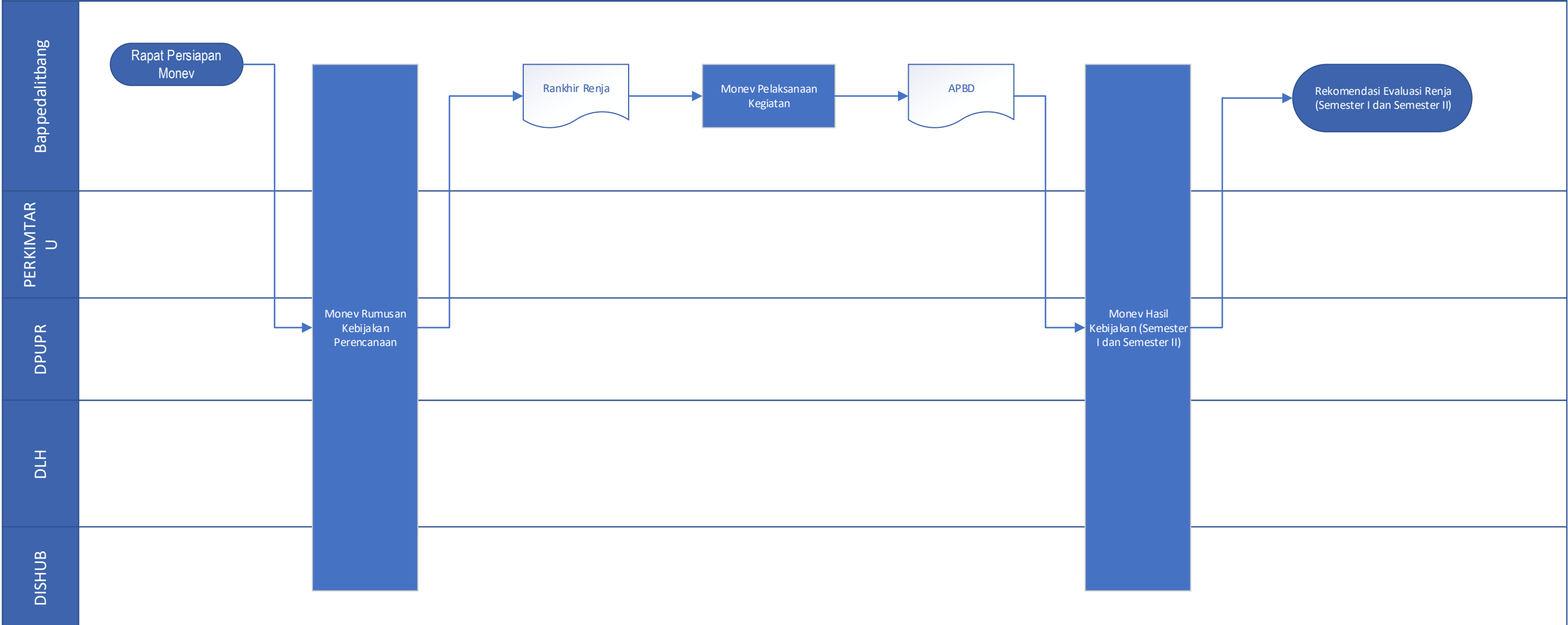
DINAS LH

DINAS
PERHUBUNGAN



Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur





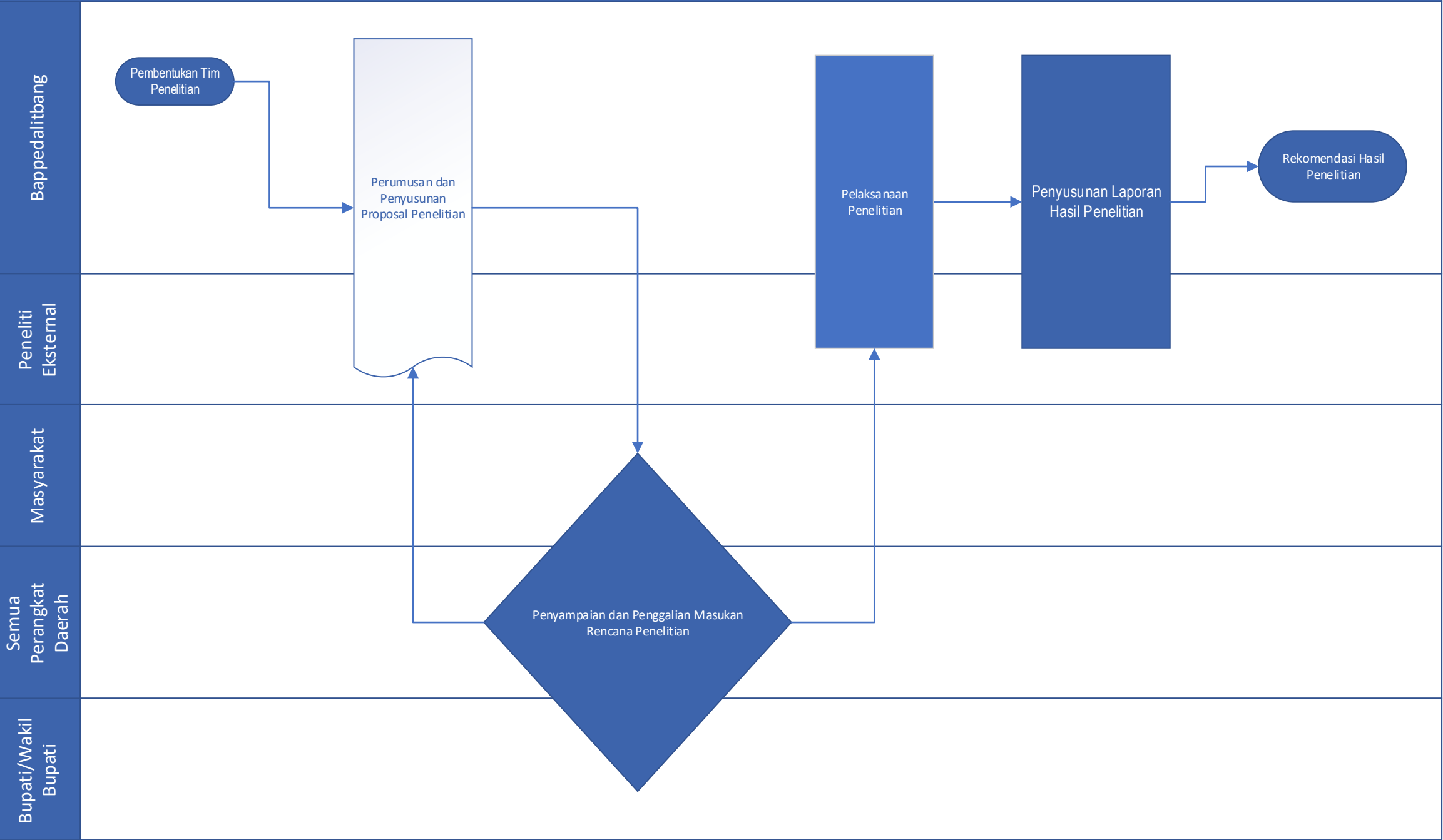
PETA RELASI

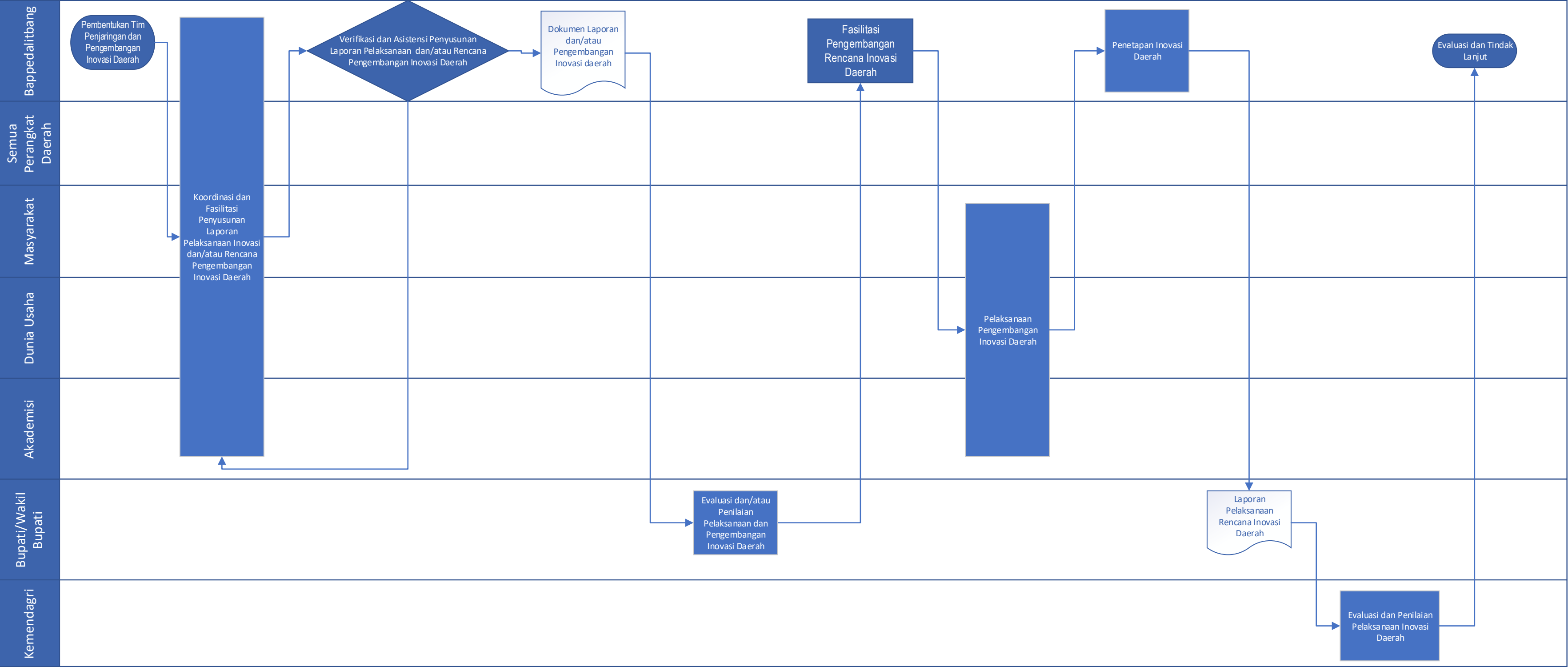
SLW-11.5

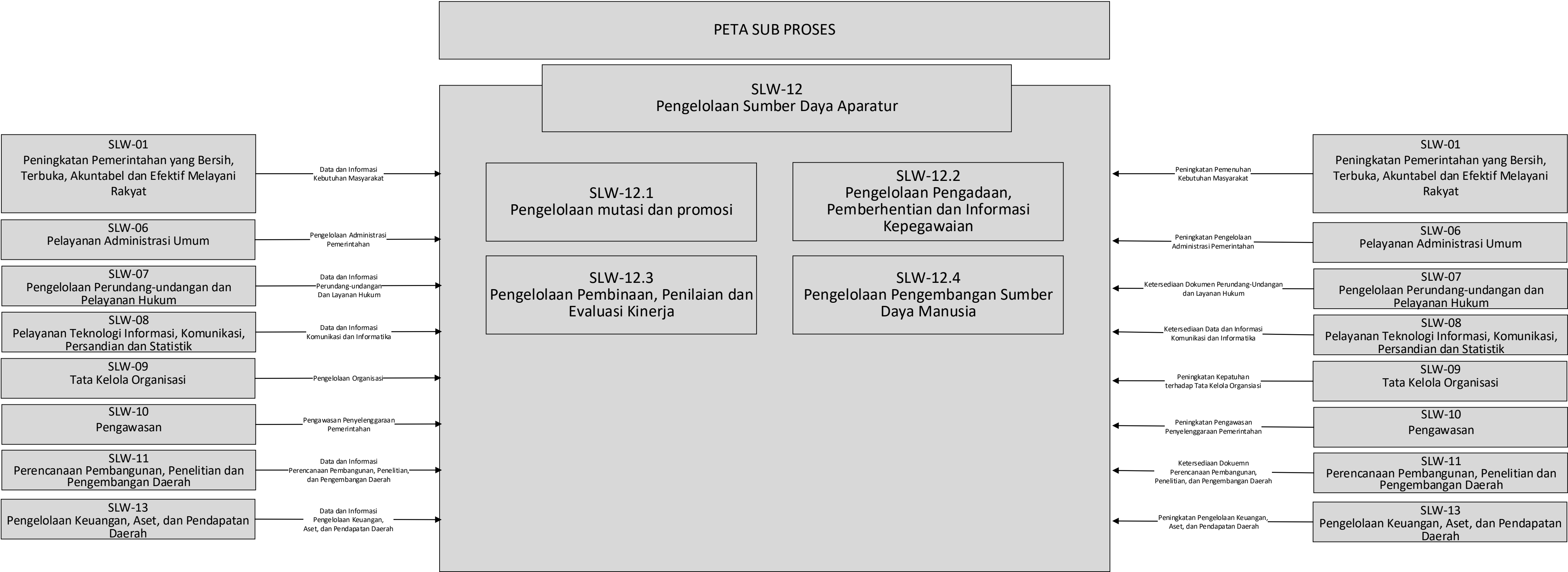
Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDALITBANG

SEMUA PERANGKAT DAERAH







PETA RELASI

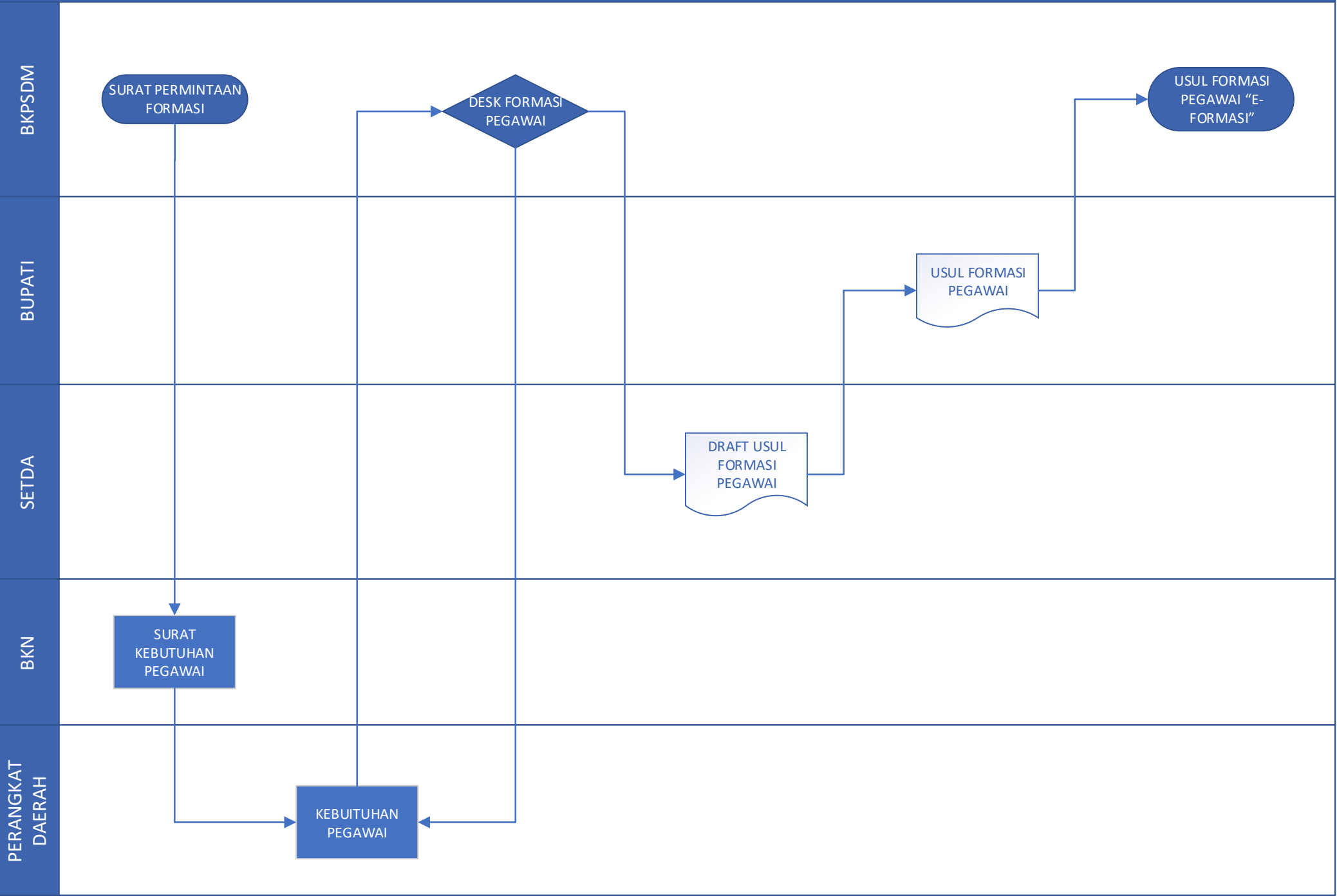
SLW-12.1
Pengelolaan Mutasi dan Promosi

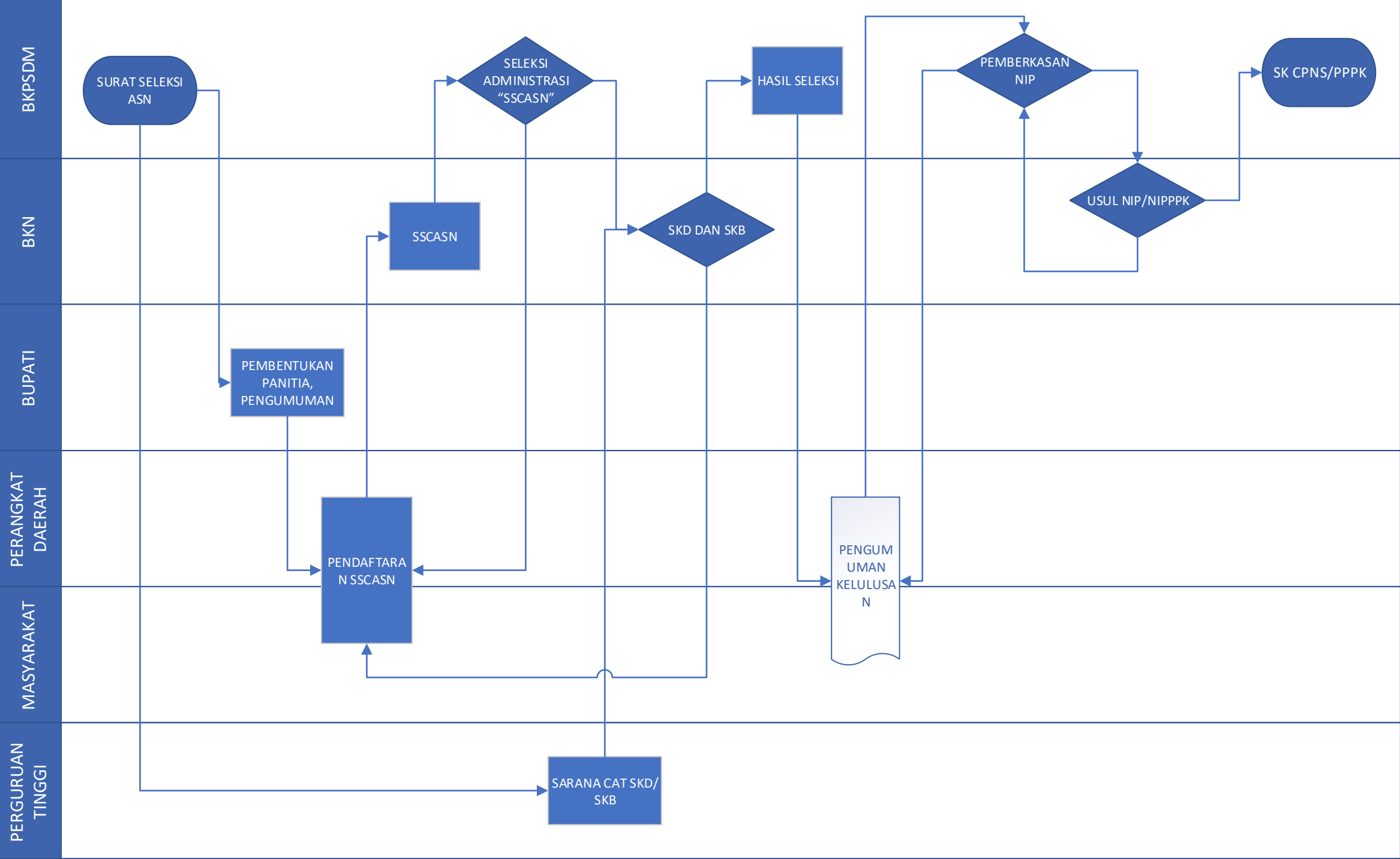
BKPSDM

SELURUH PERANGKAT DAERAH

SLW-12.1 CFM 01

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN



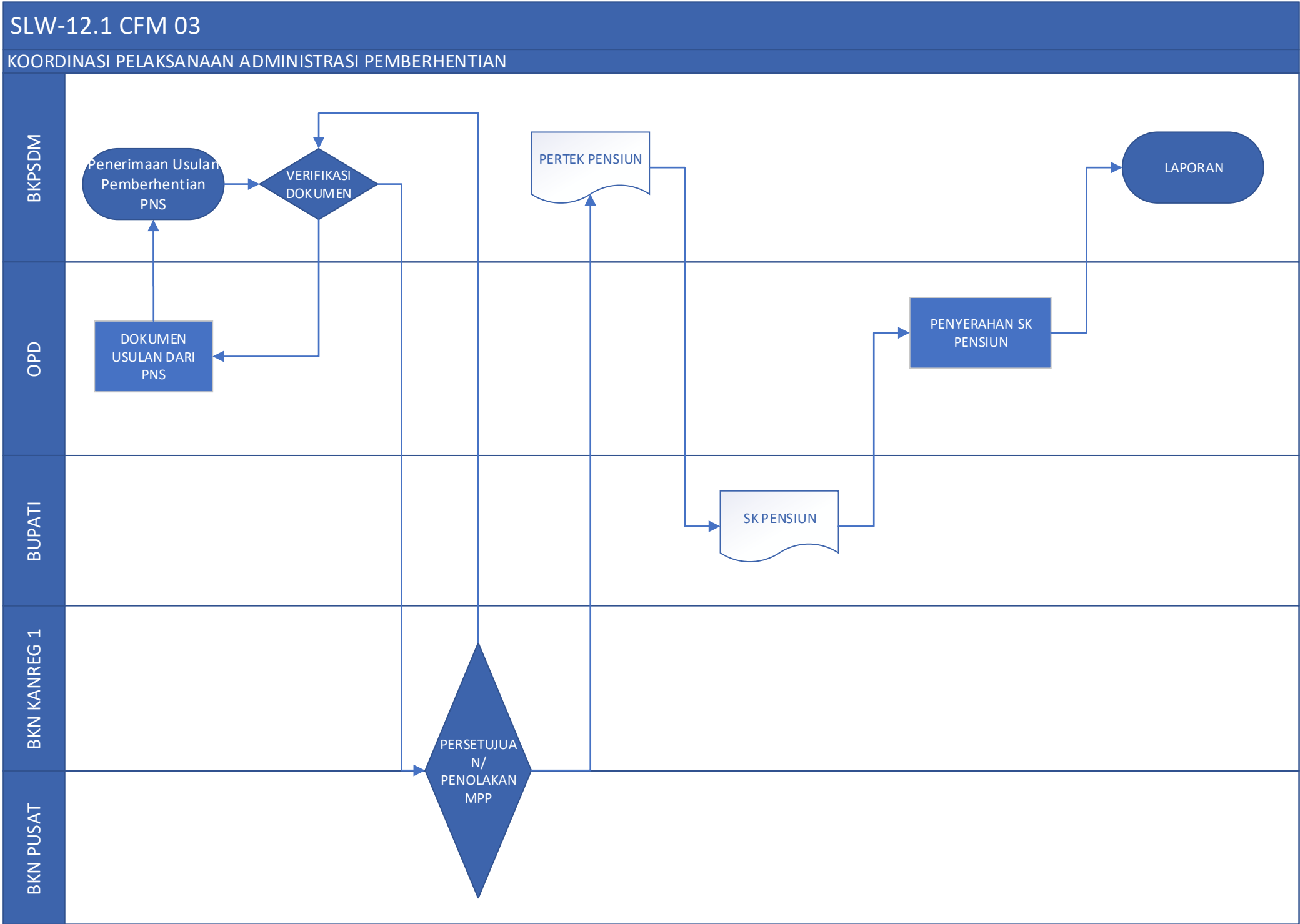


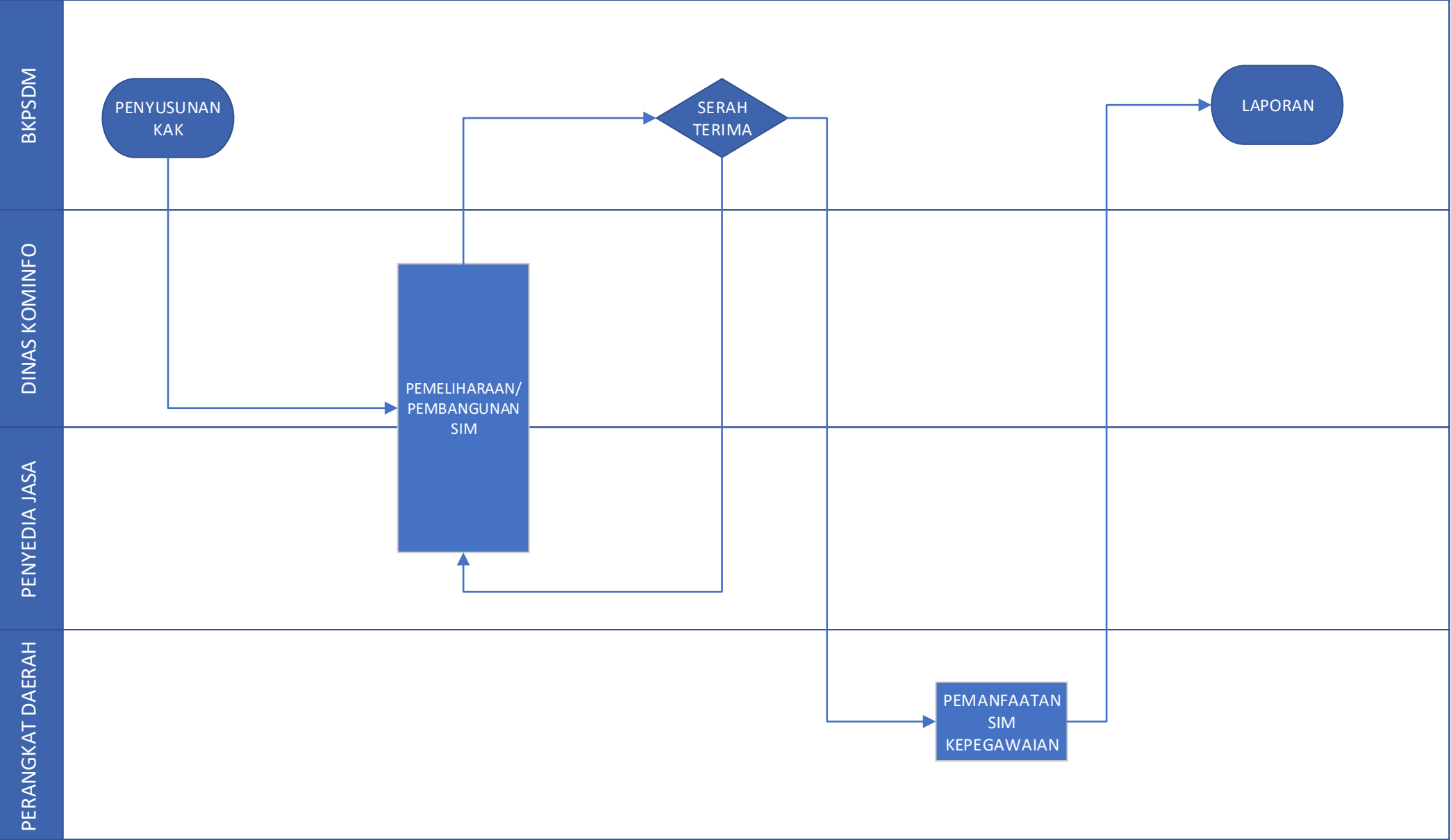
SLW-12.1 CFM 03

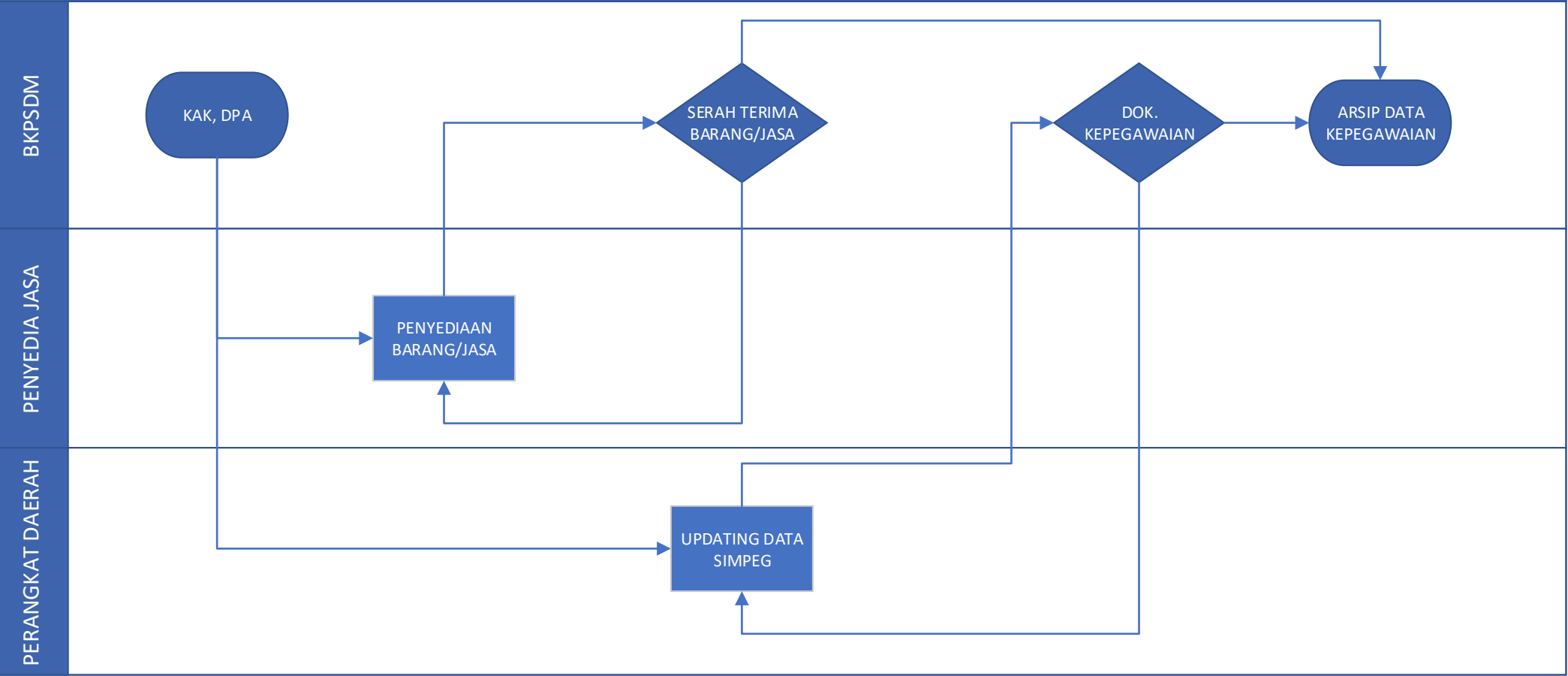
KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN

SLW-12.1 CFM 03

KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN







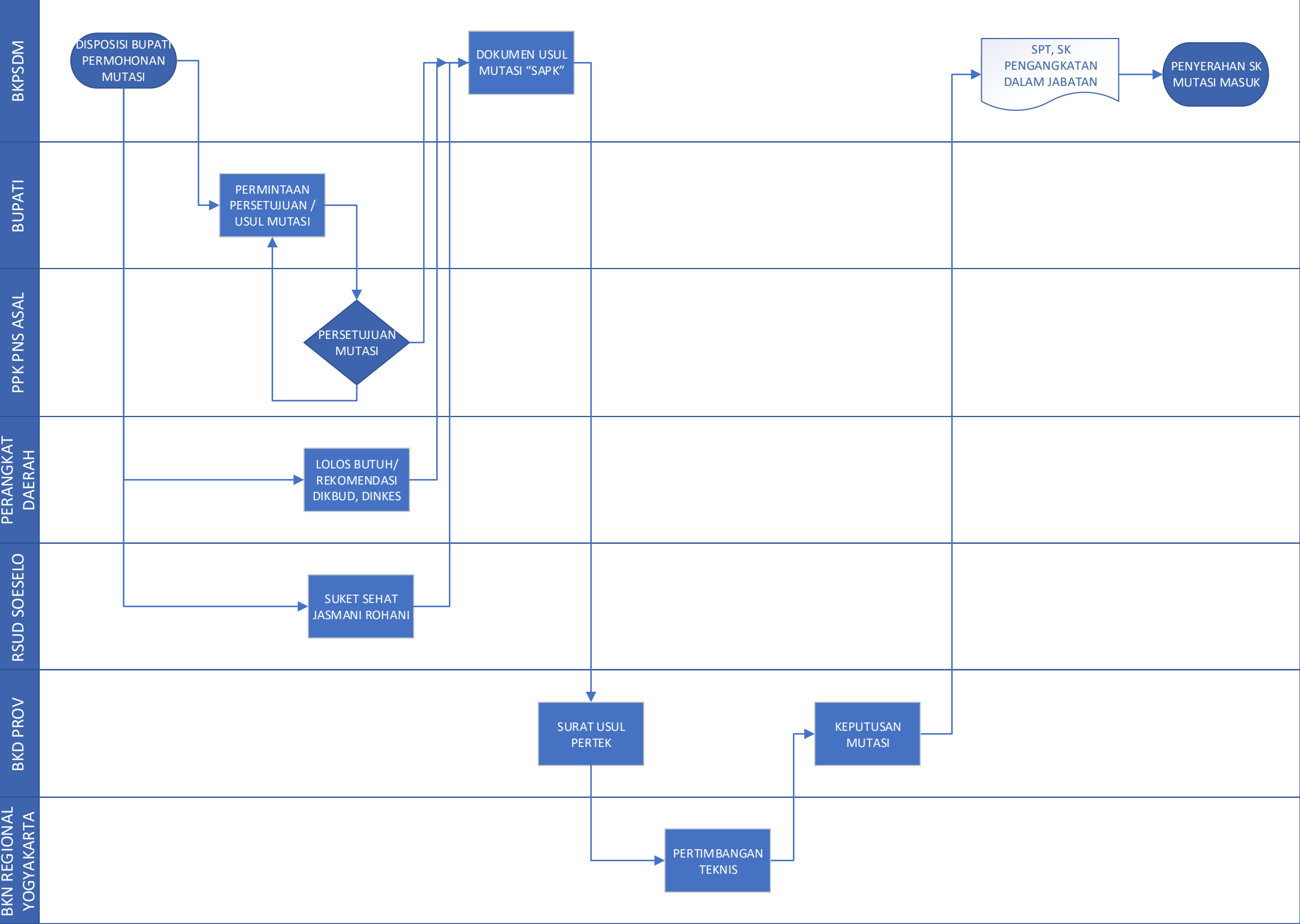
PETA RELASI

SLW-12.2

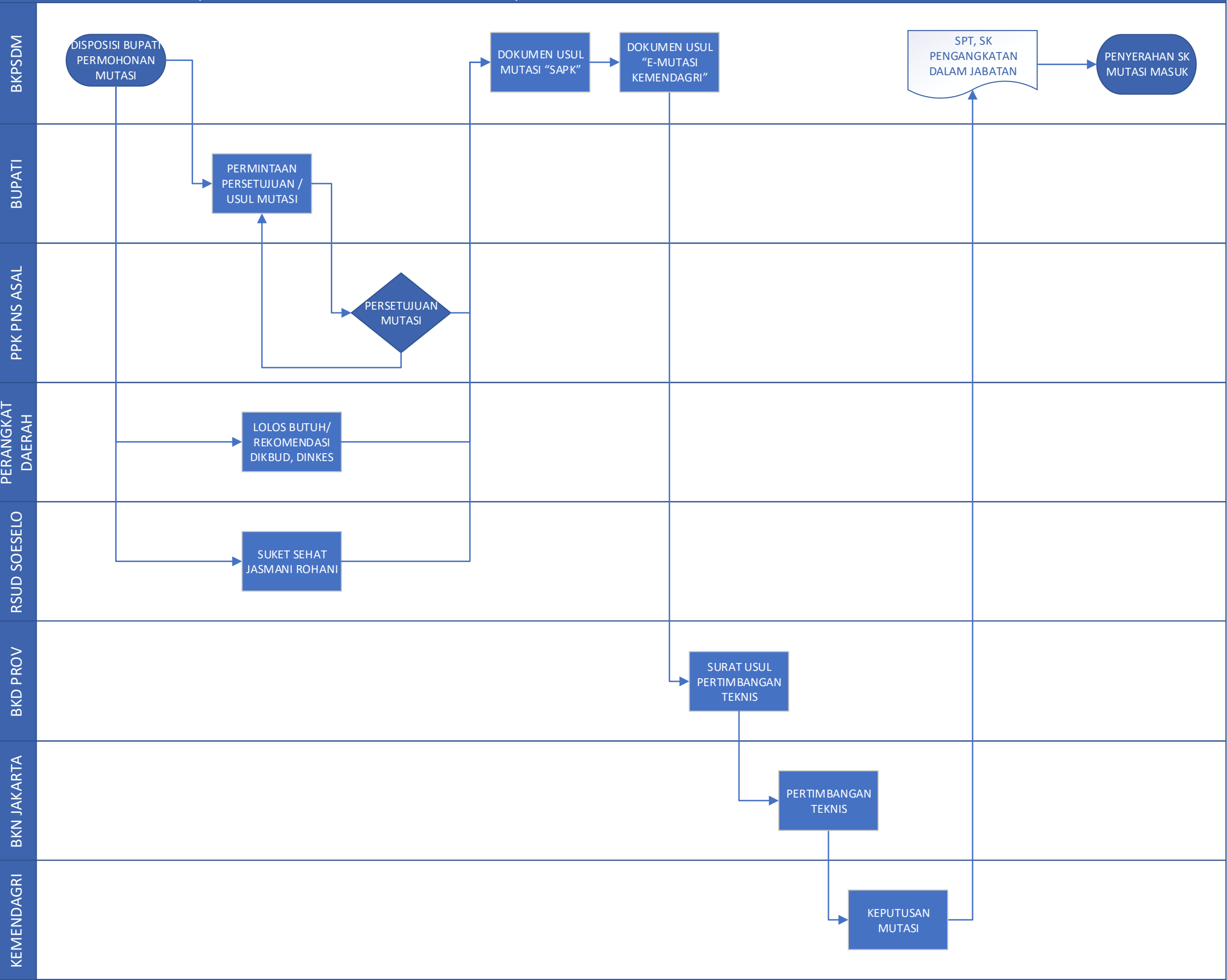
Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

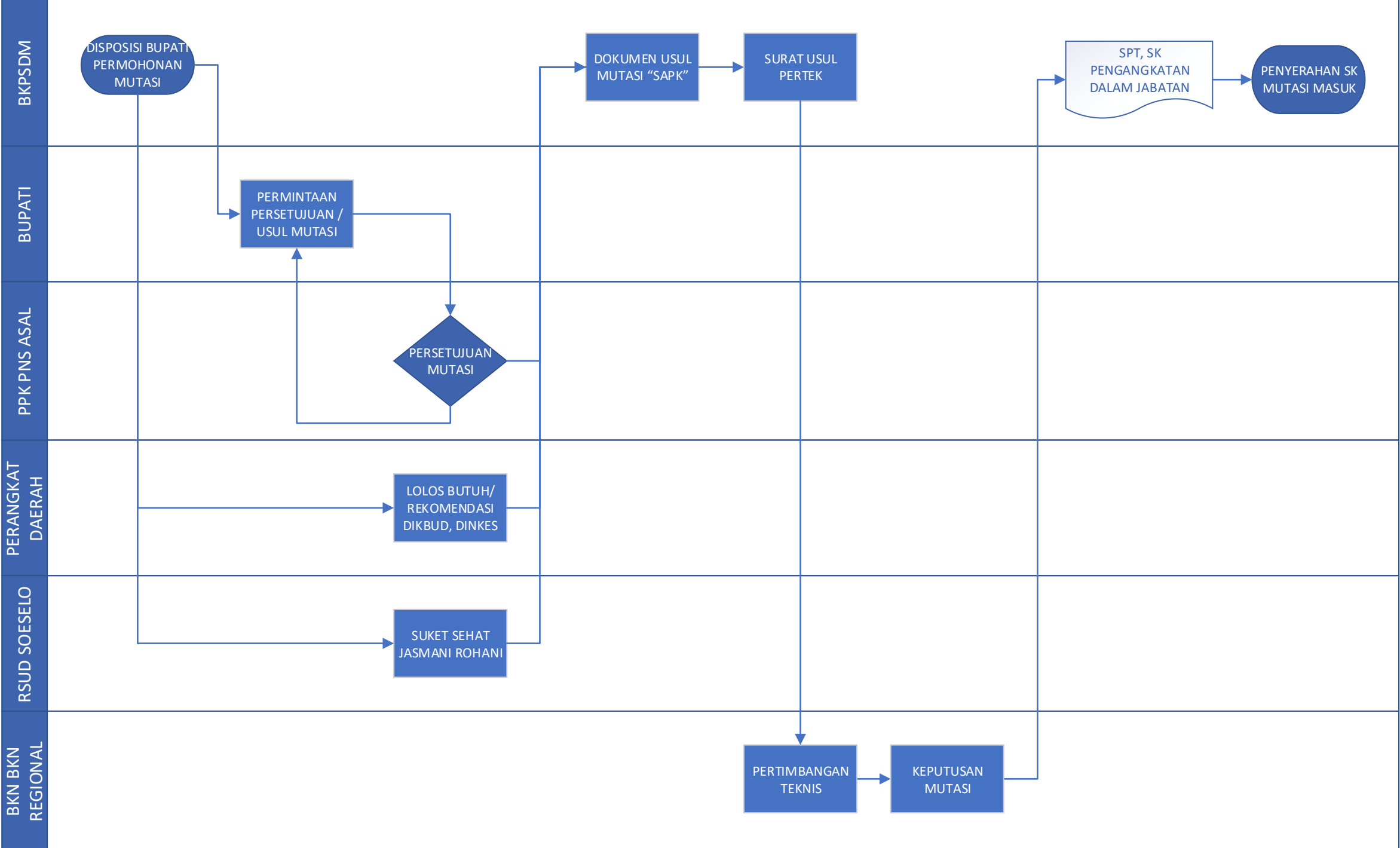
BKPSDM

SELURUH PERANGKAT DAERAH

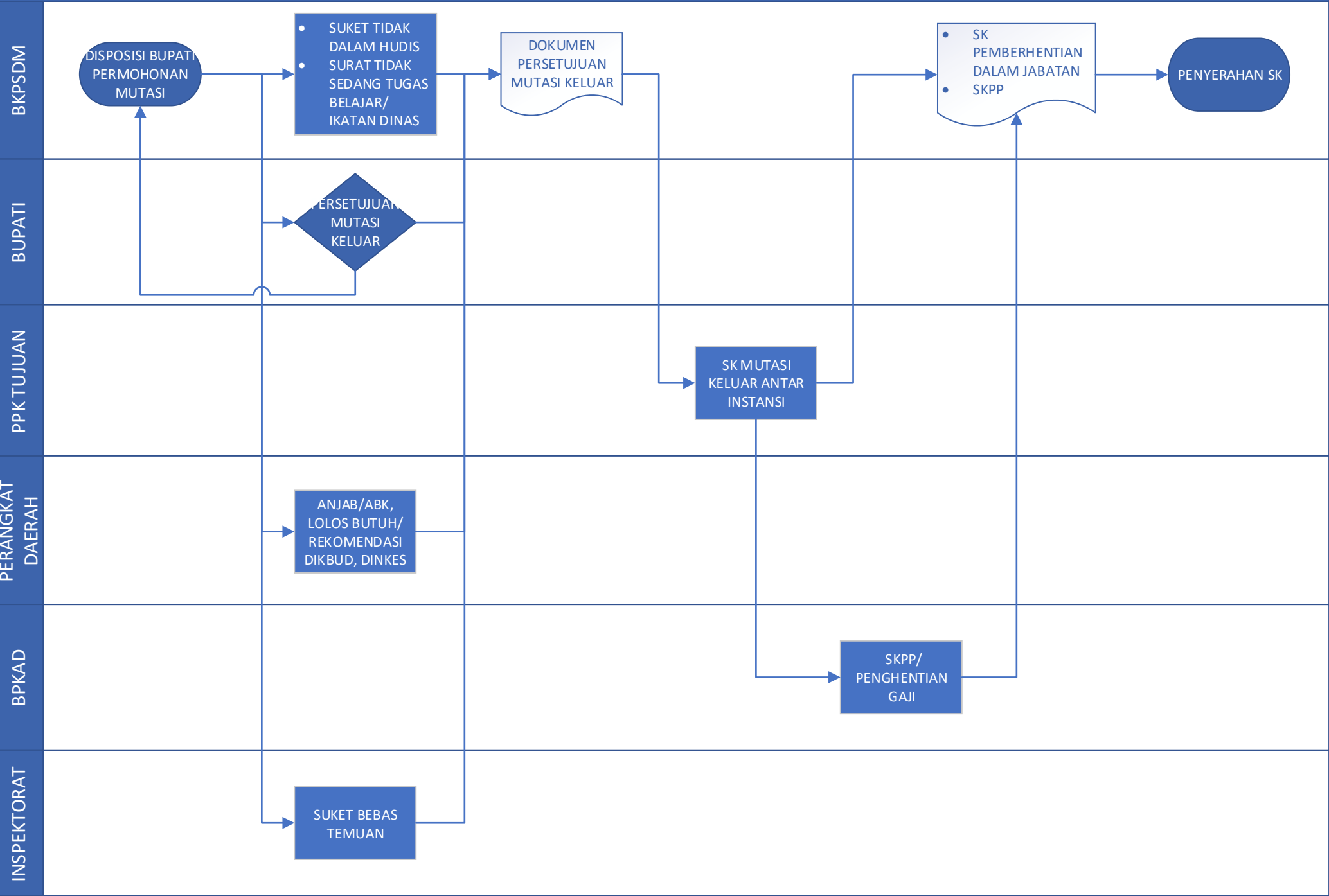


PENGELOLAAN MUTASI ASN (MUTASI MASUK DARI PEMDA LUAR PROVINSI)



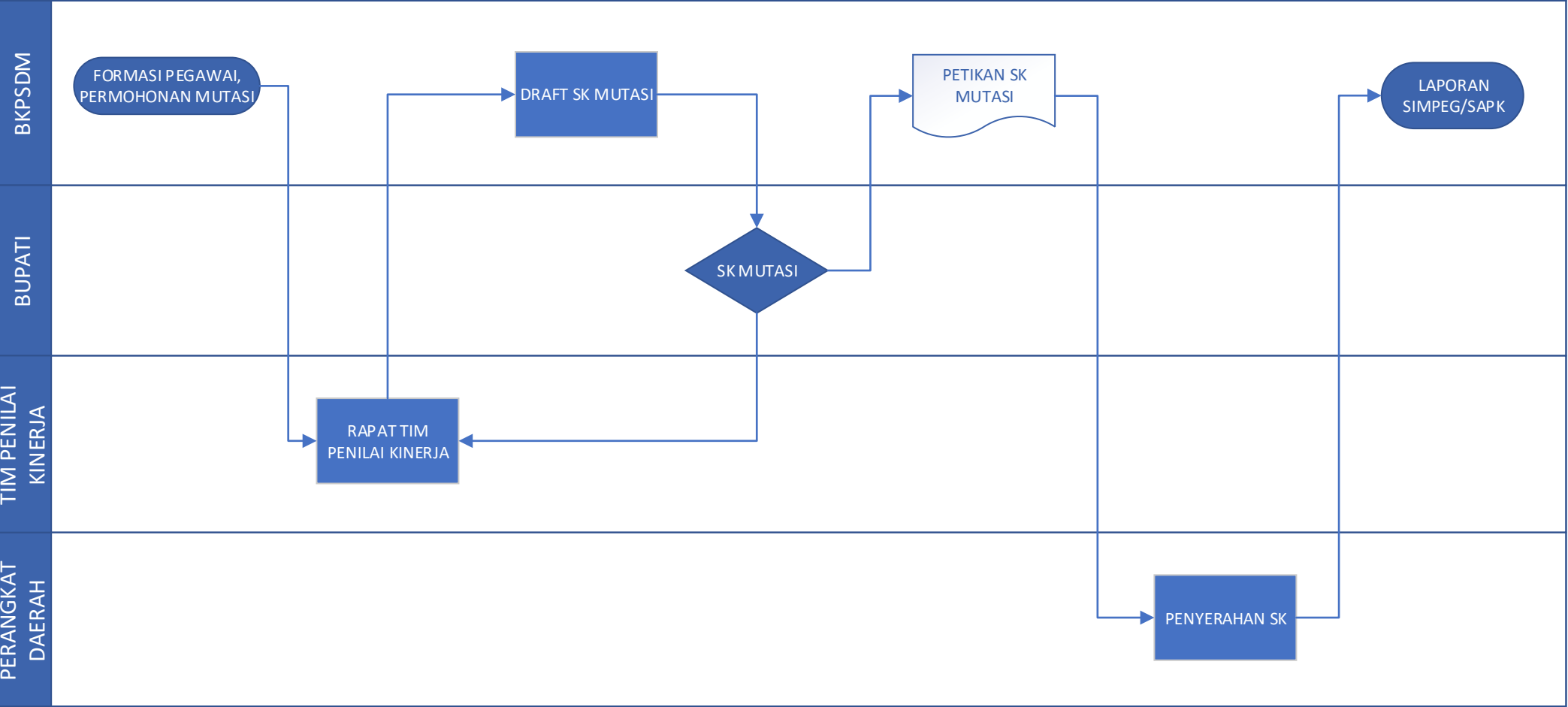


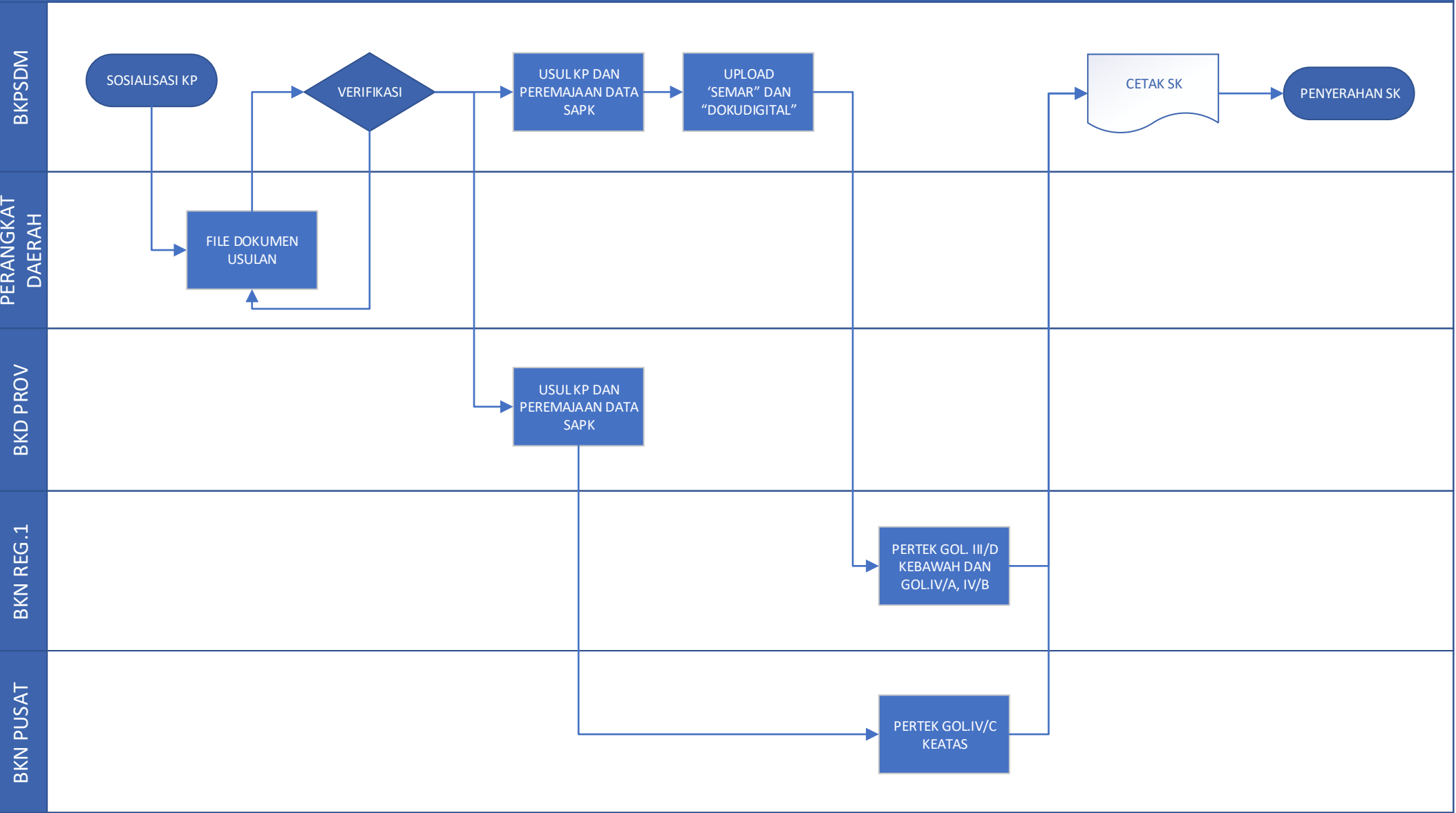
PENGELOLAAN MUTASI KELUAR

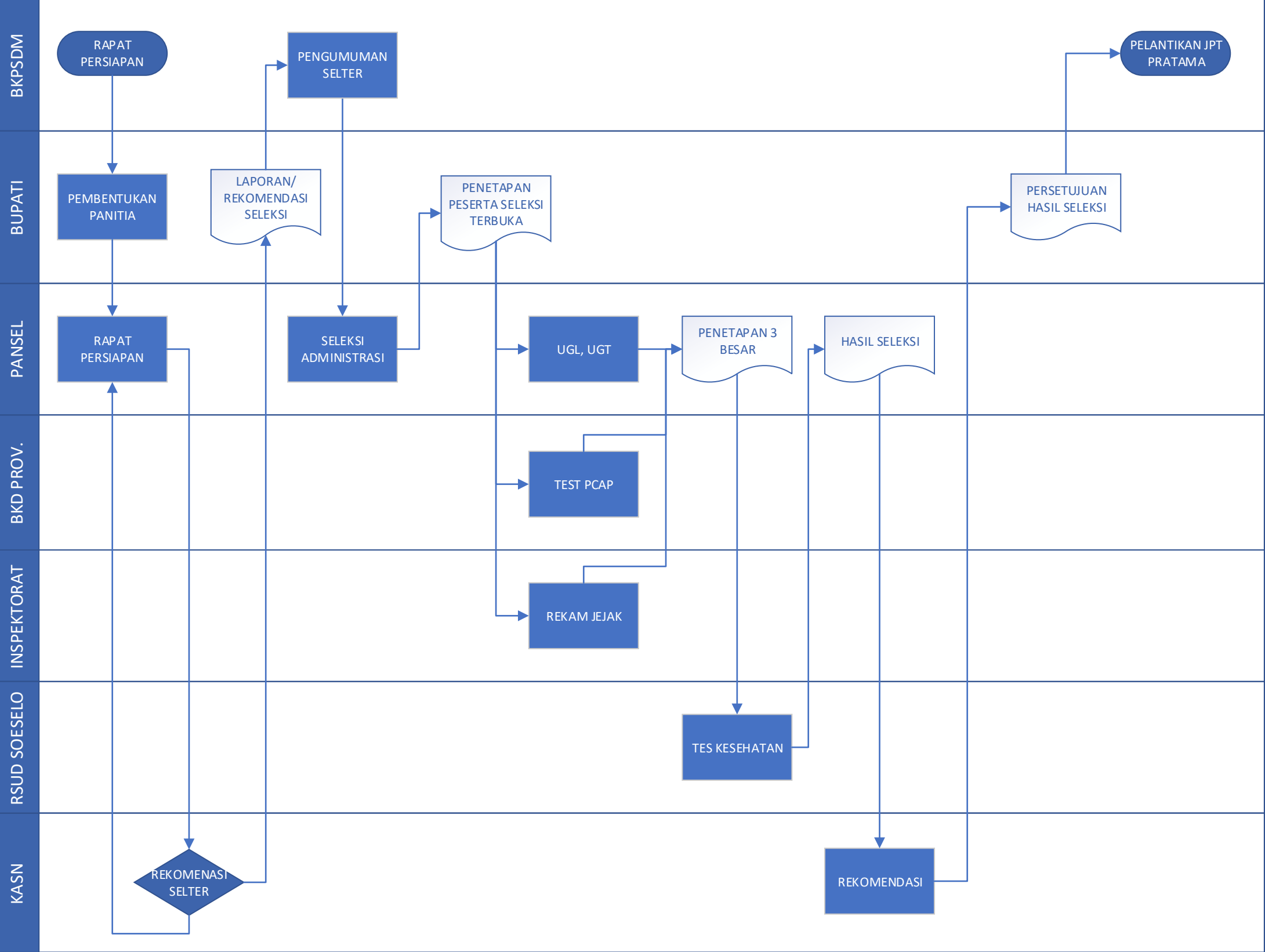


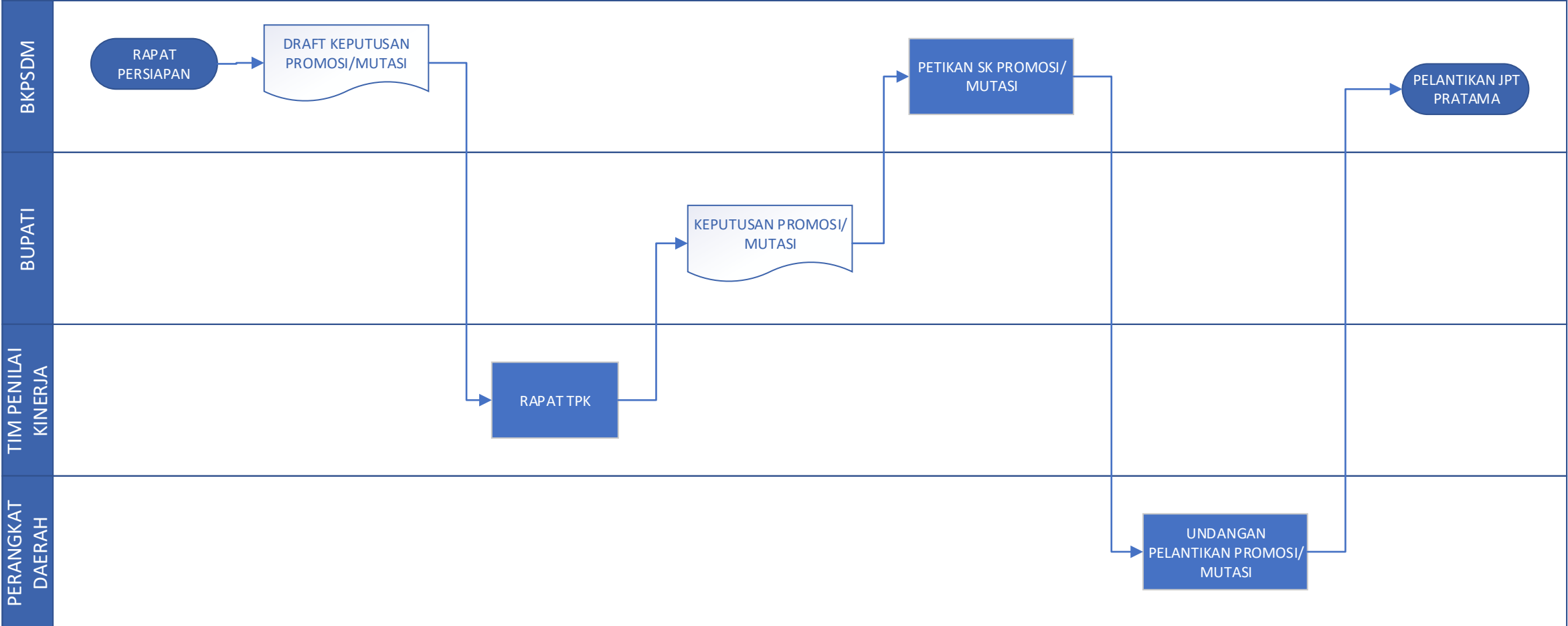
SLW-12.2 CFM 05

PENGELOLAAN MUTASI DALAM INSTANSI







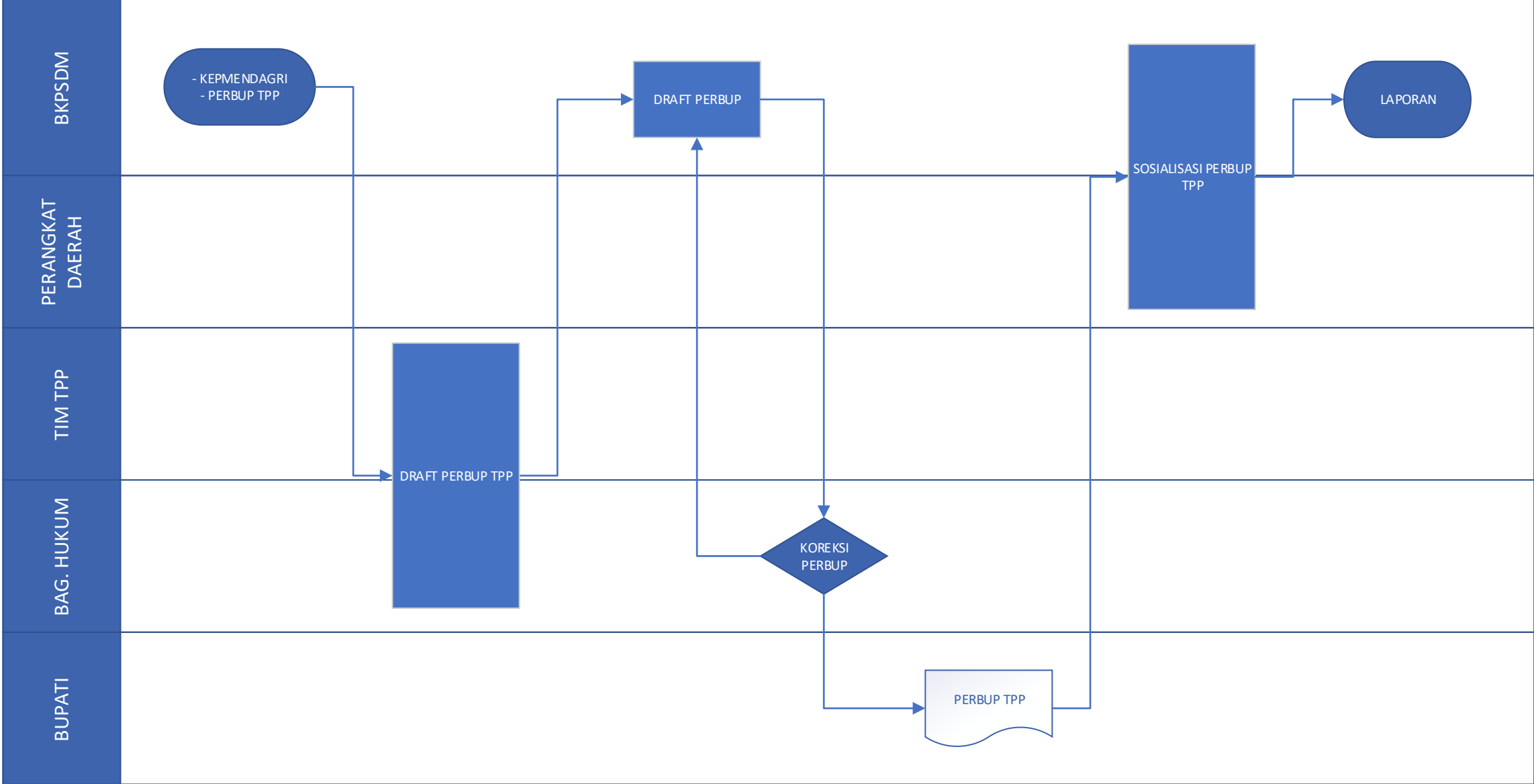


PETA RELASI

SLW-12.3
Pengelolaan Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja

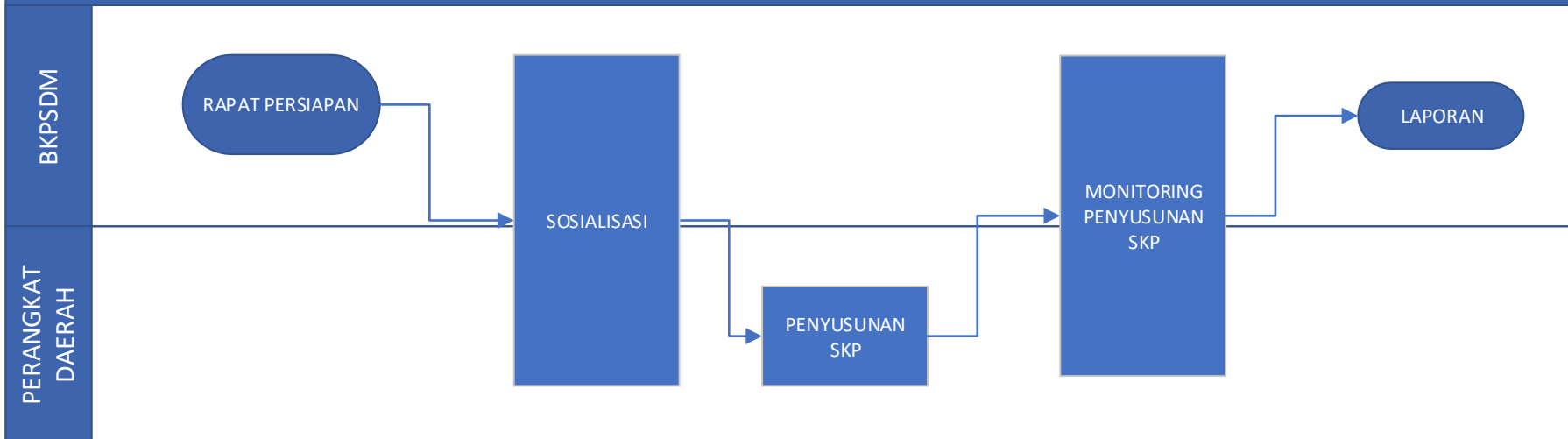
BKPSDM

SELURUH PERANGKAT DAERAH



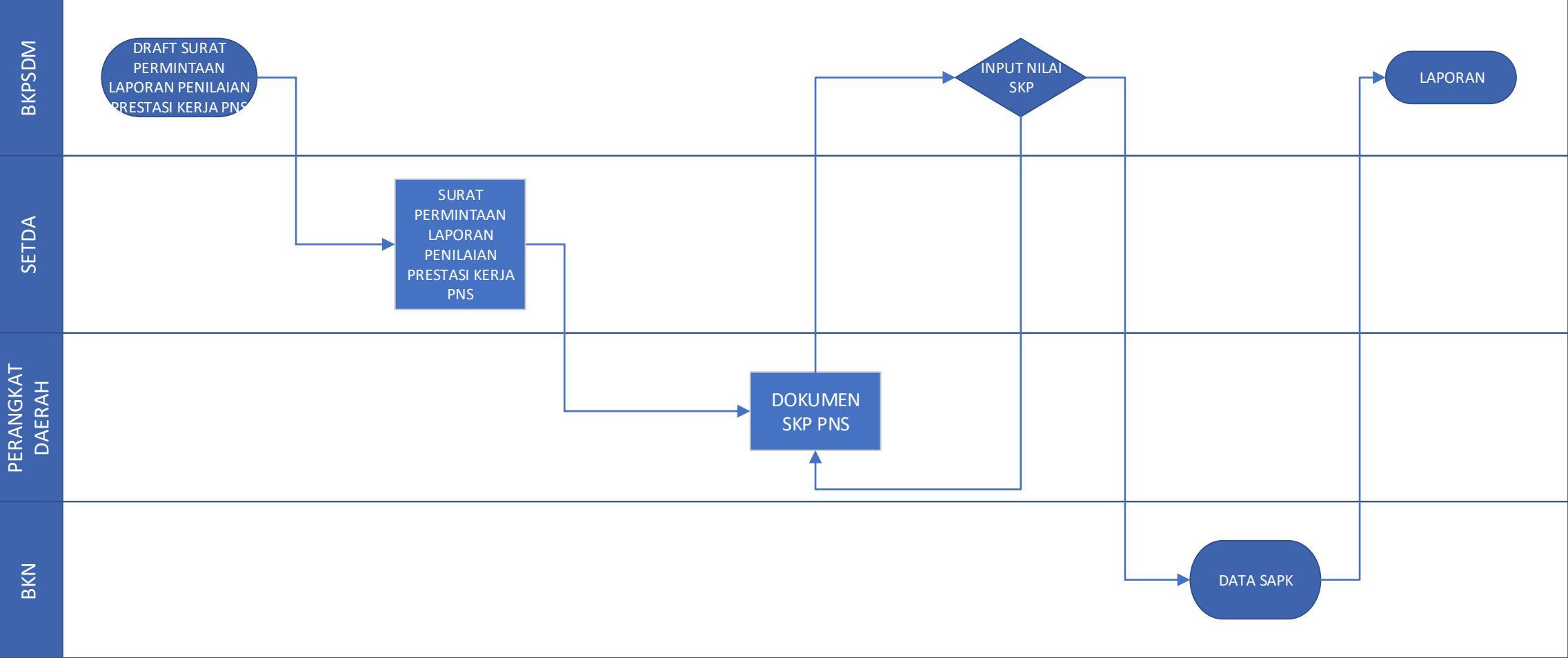
SLW-12.3 CFM 02

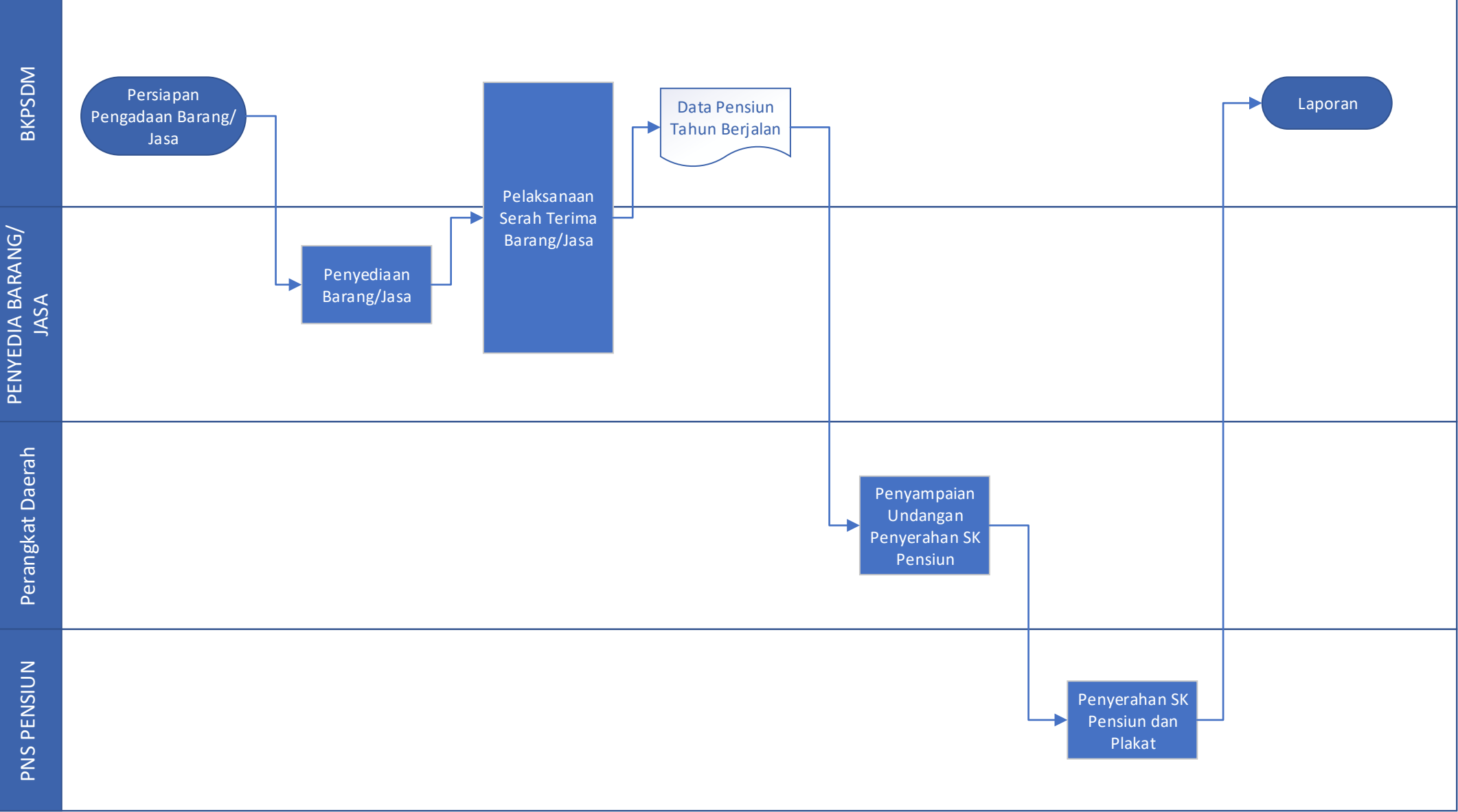
PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

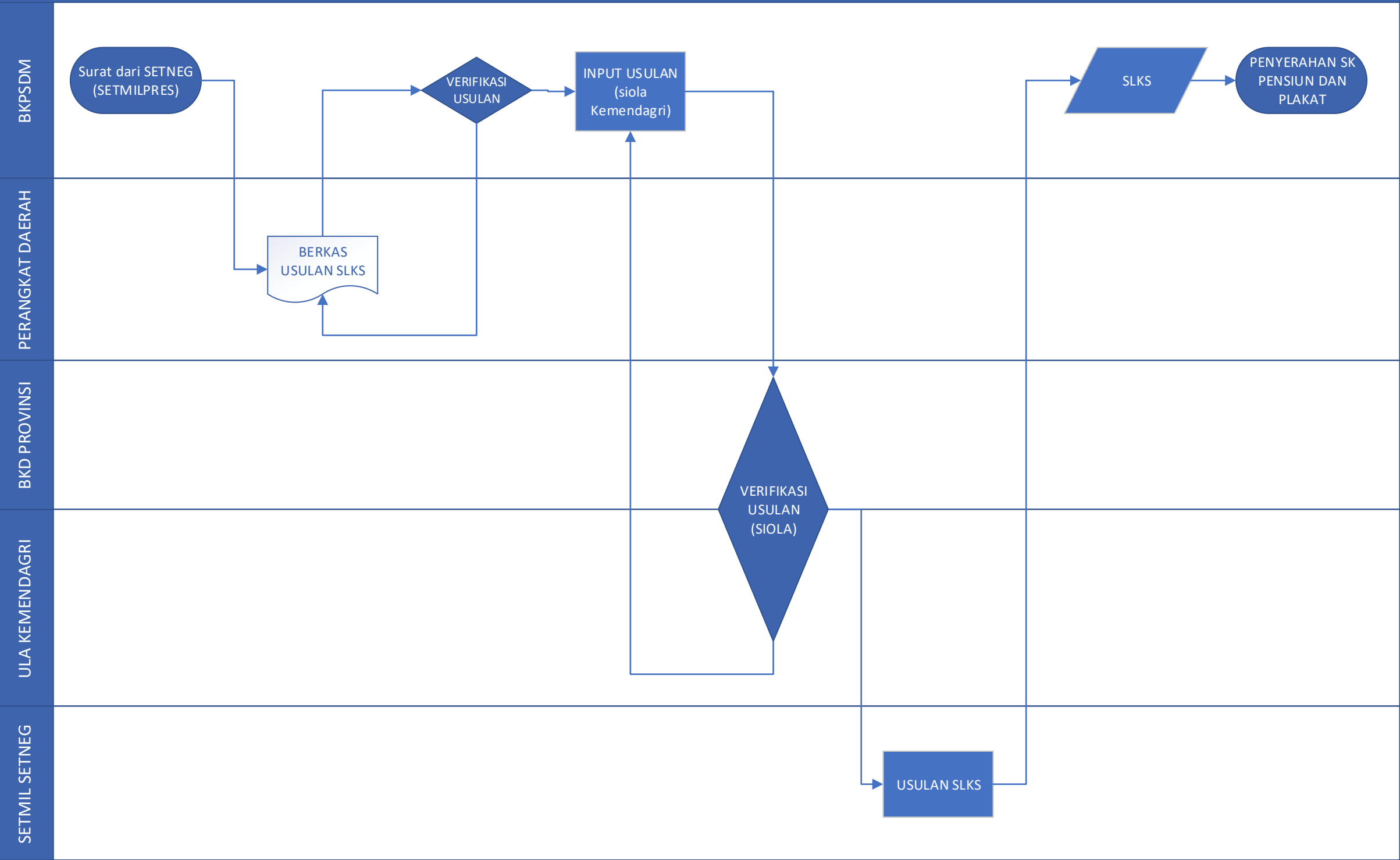


SLW-12.3 CFM 03

EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA







SLW-12.3 CFM 06

PEMBINAAN DISIPLIN

BKPSDM

- PRESENSI BULANAN
- DISPOSISI BUPATI

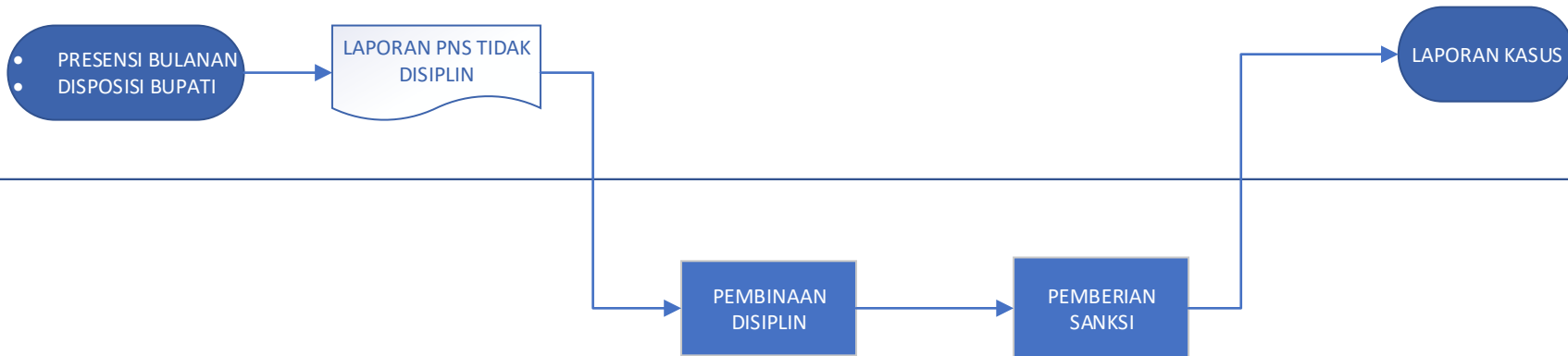
LAPORAN PNS TIDAK
DISIPLIN

LAPORAN KASUS

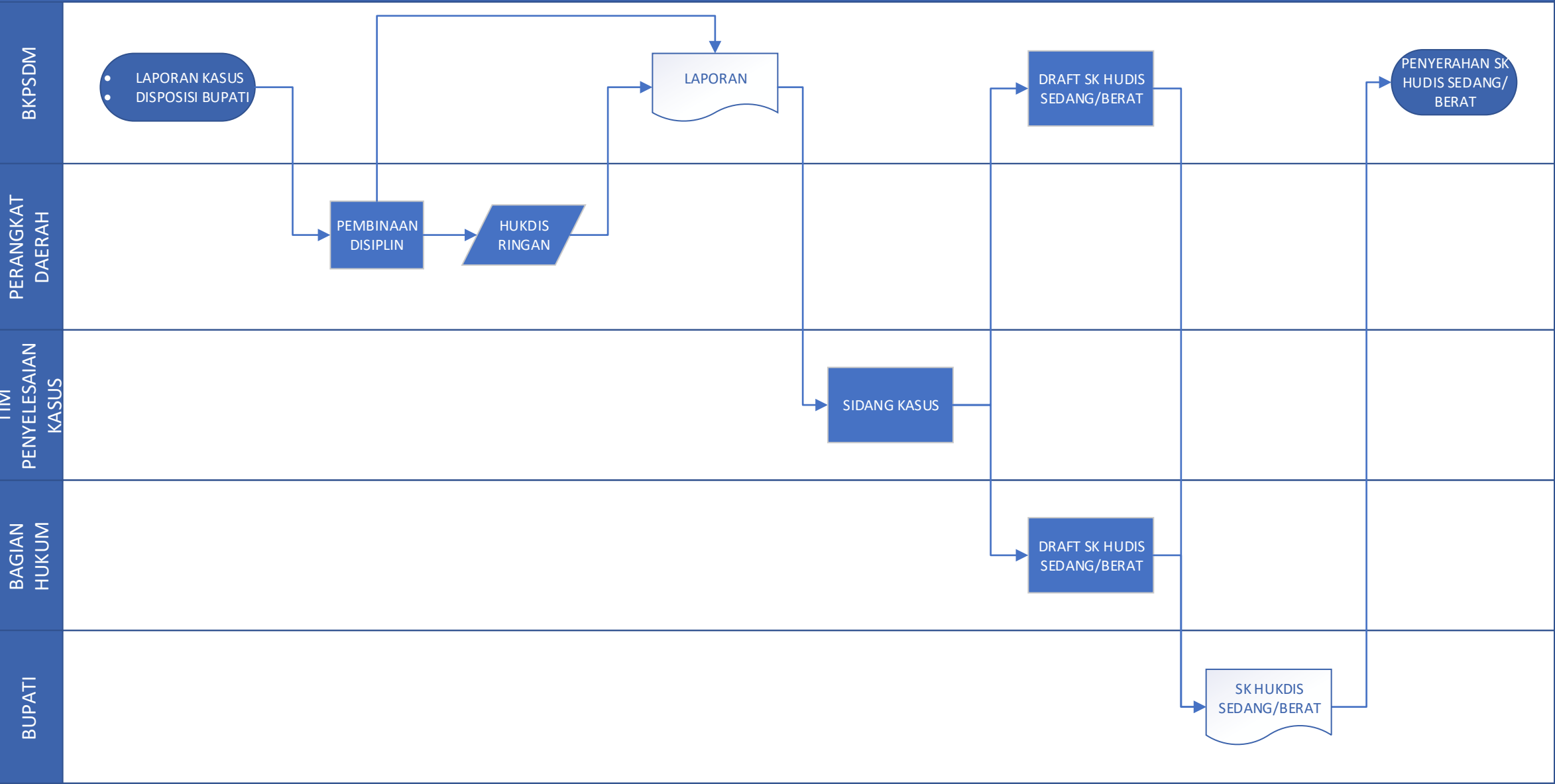
PERANGKAT
DAERAH

PEMBINAAN
DISIPLIN

PEMBERIAN
SANKSI

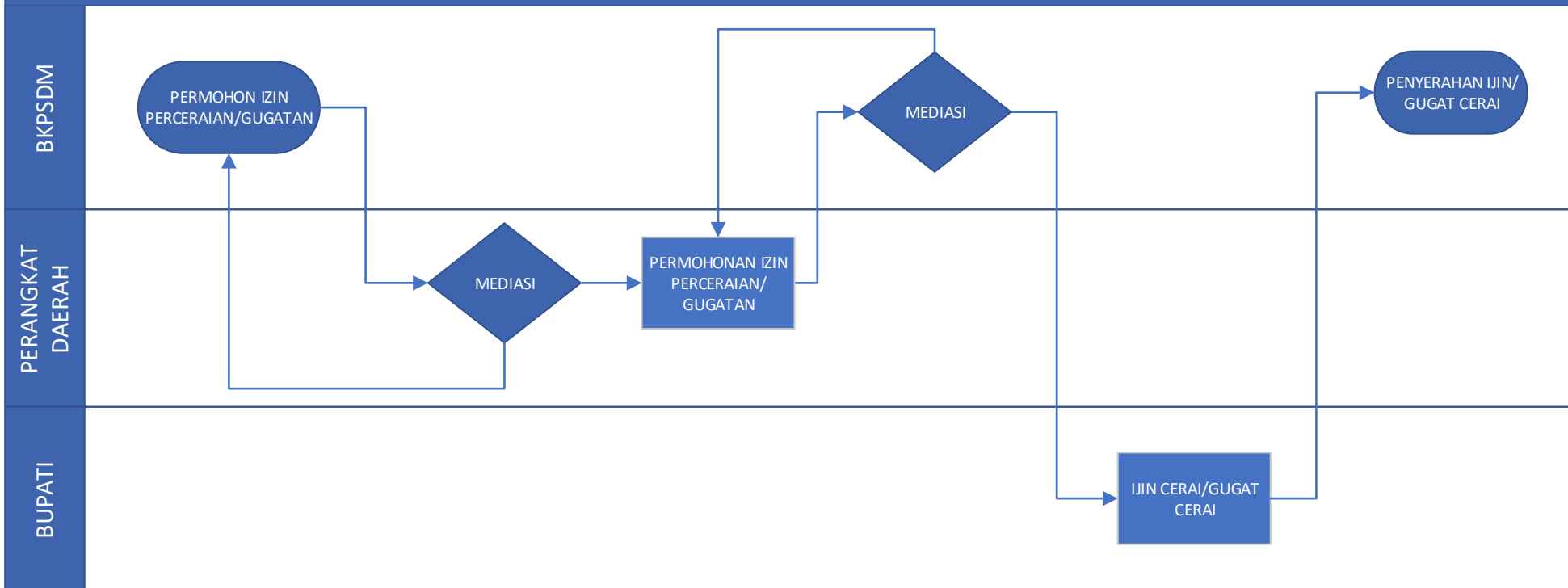


PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS



SLW-12.3 CFM 08

PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN



PETA RELASI

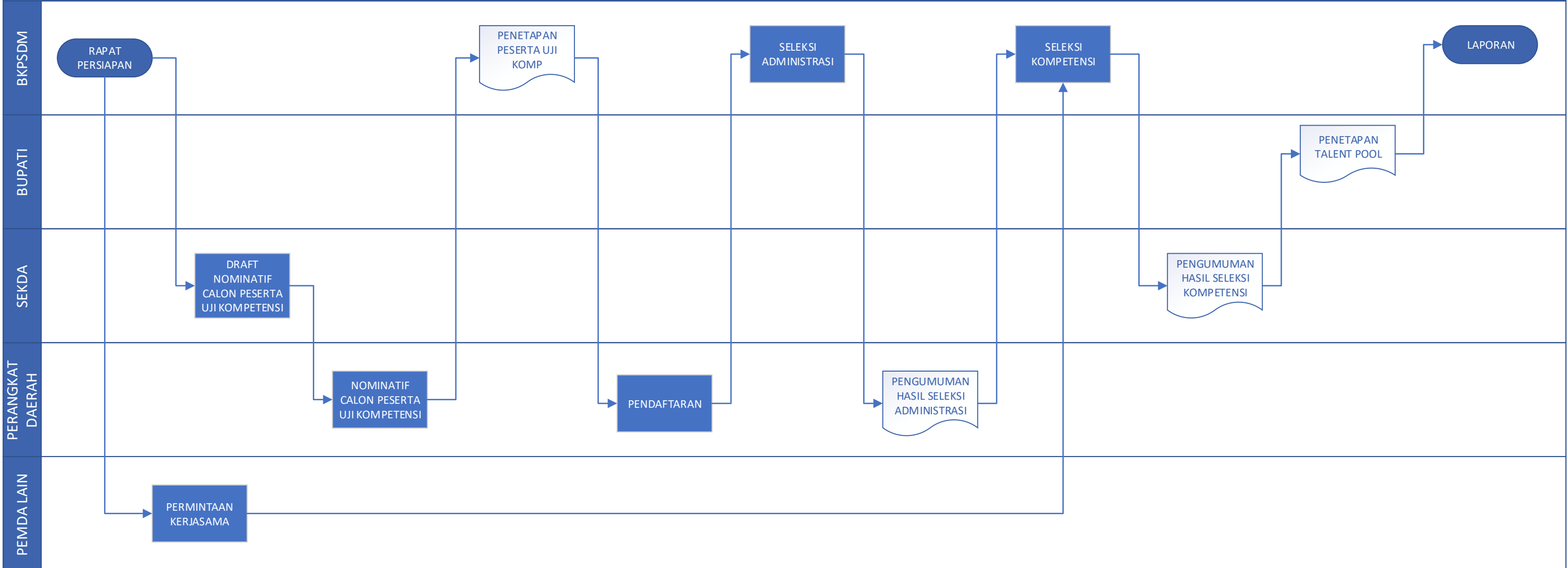
SLW-12.4
Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM

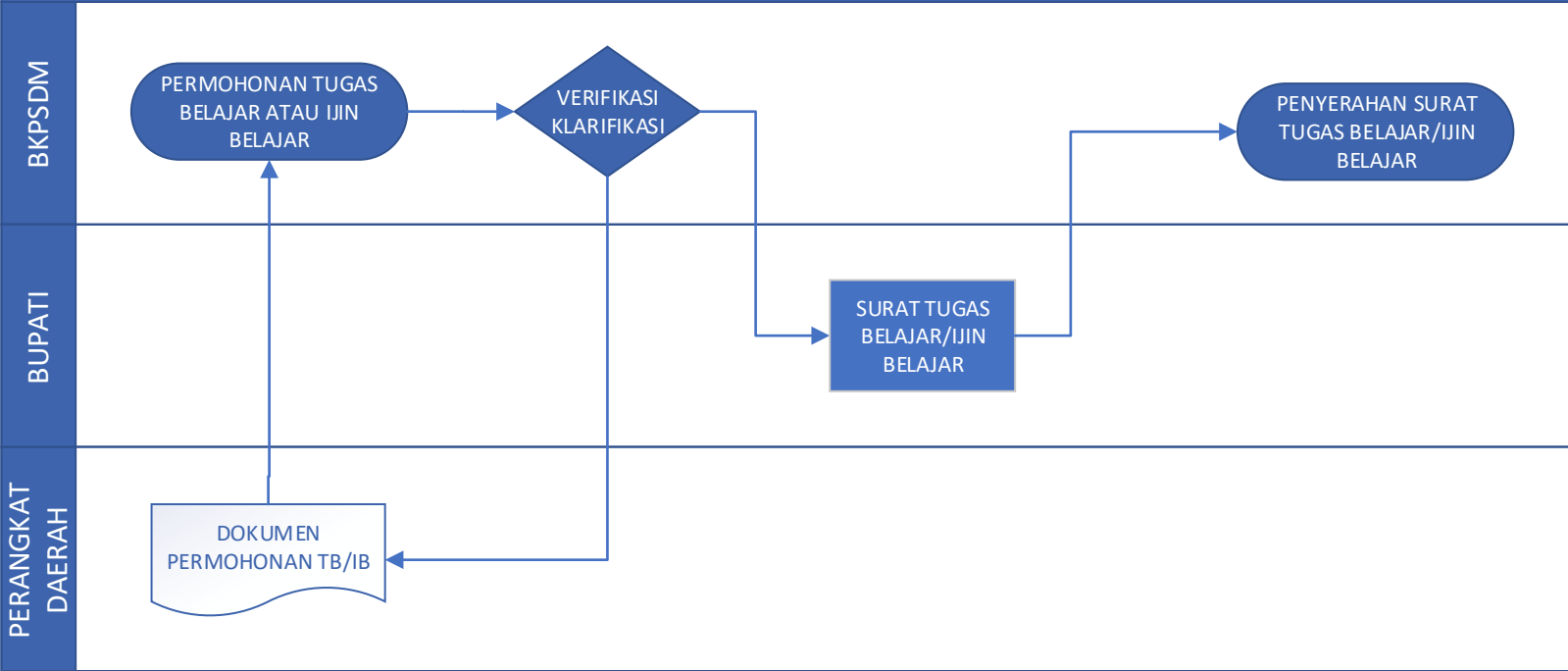
SELURUH PERANGKAT DAERAH

SLW-12.4 CFM 01

PENGELOLAAN ASSESMENT CENTER

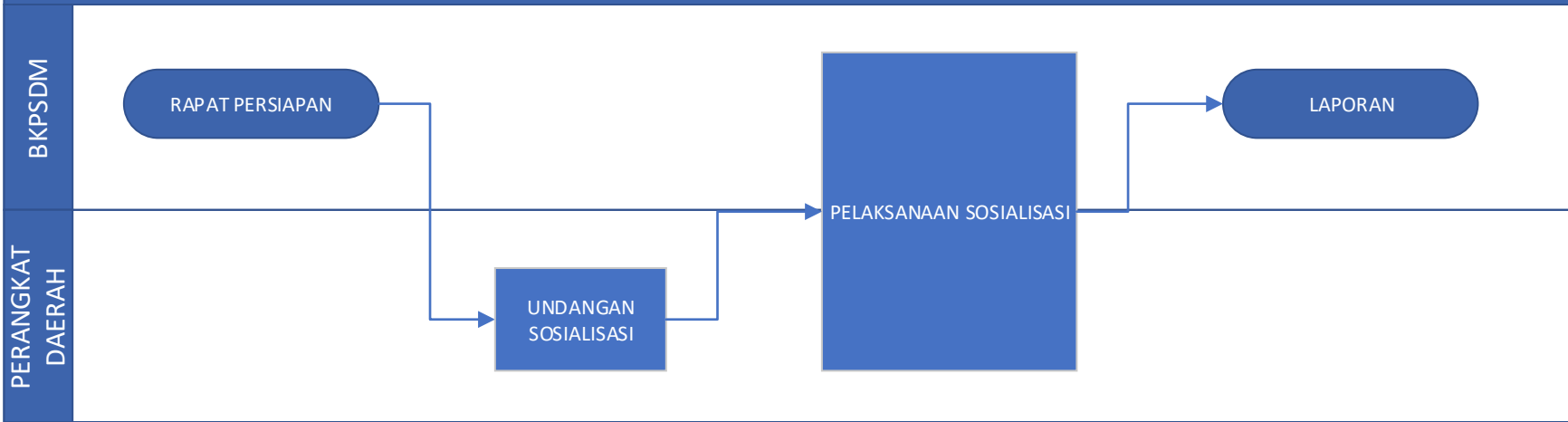


PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN



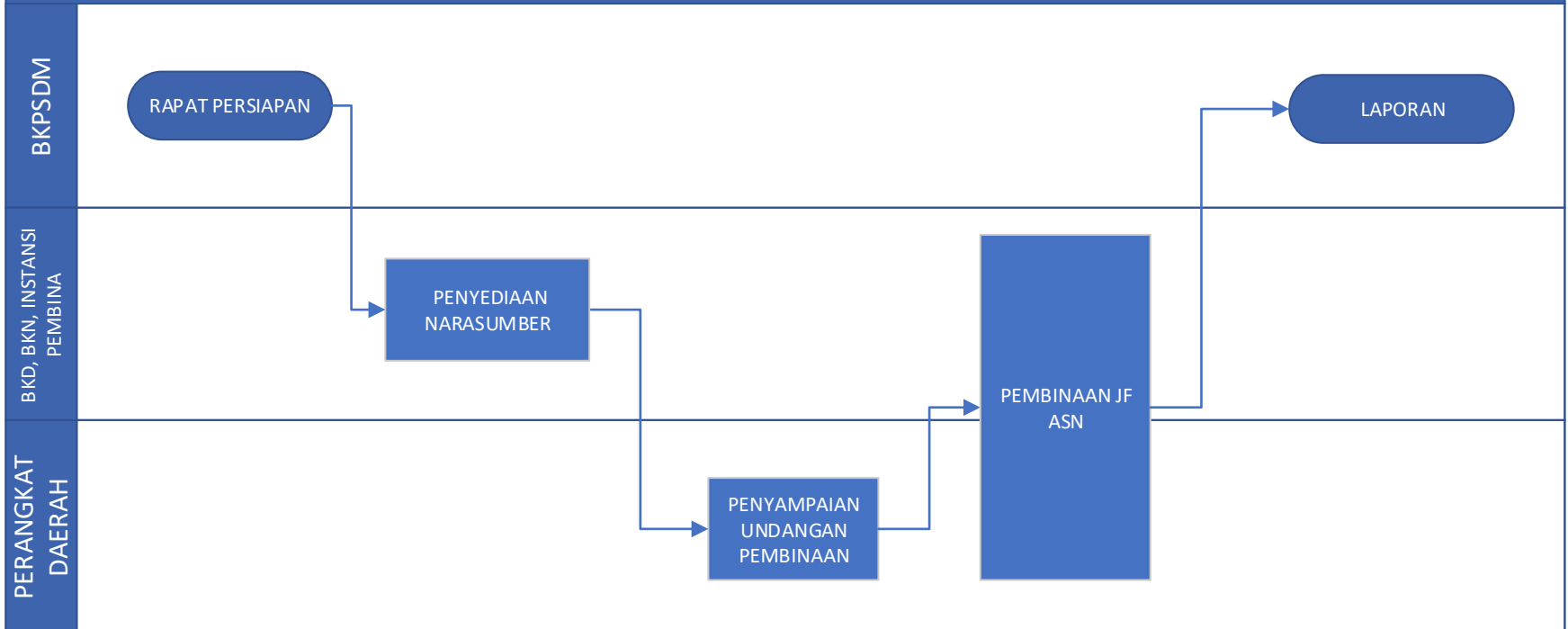
SLW-12.4 CFM 03

SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASN



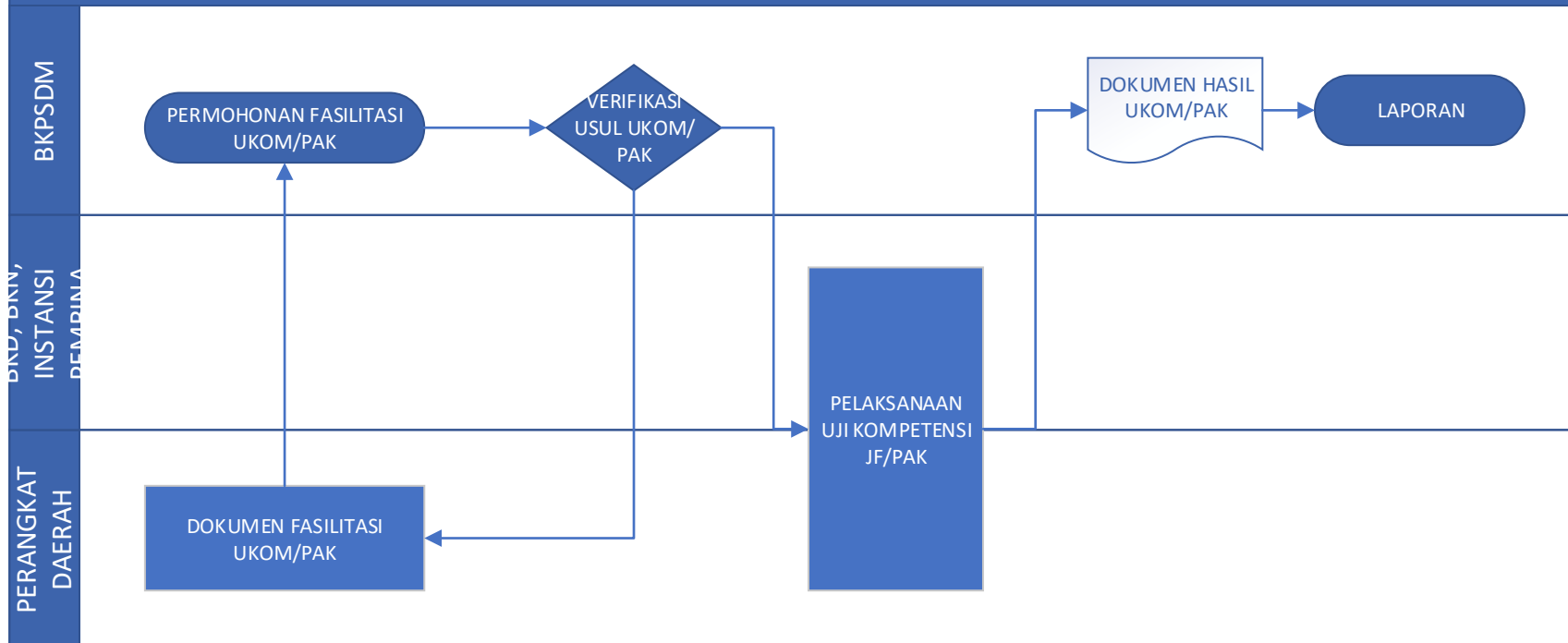
SLW-12.4 CFM 04

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN



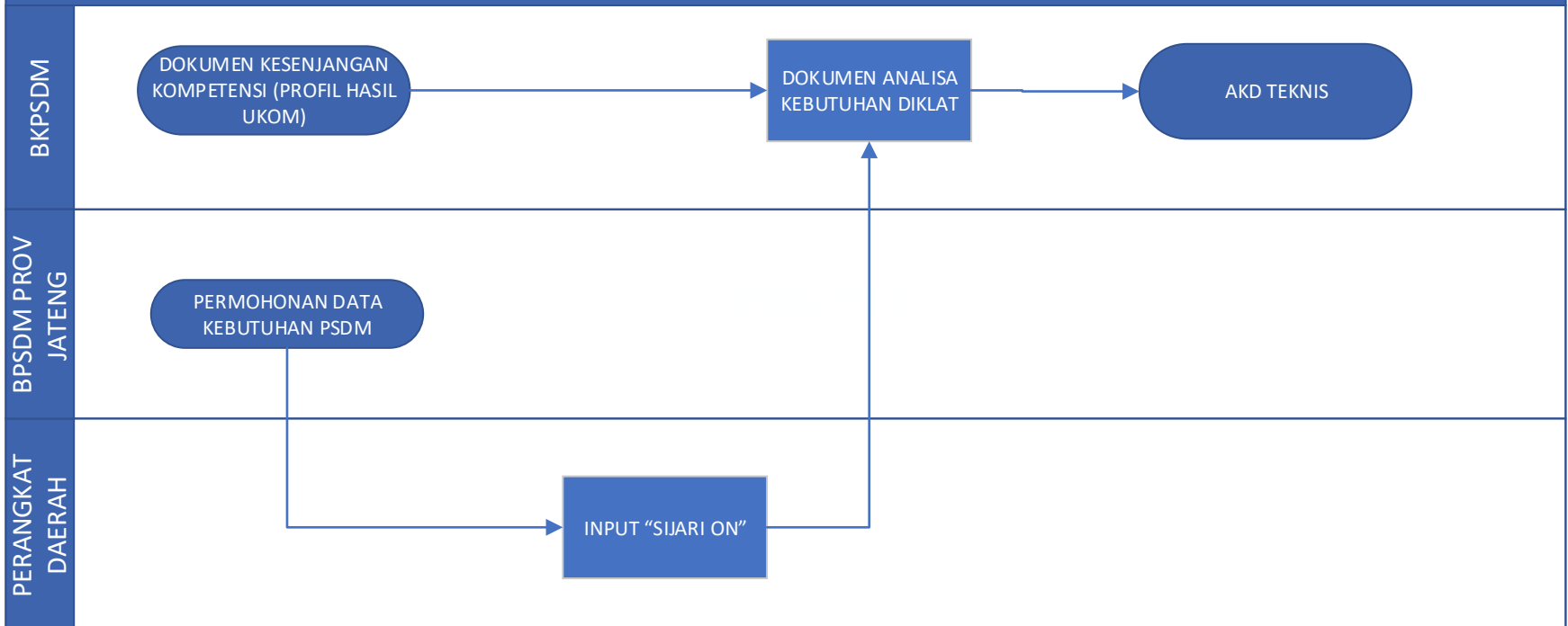
SLW-12.4 CFM 05

FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASN



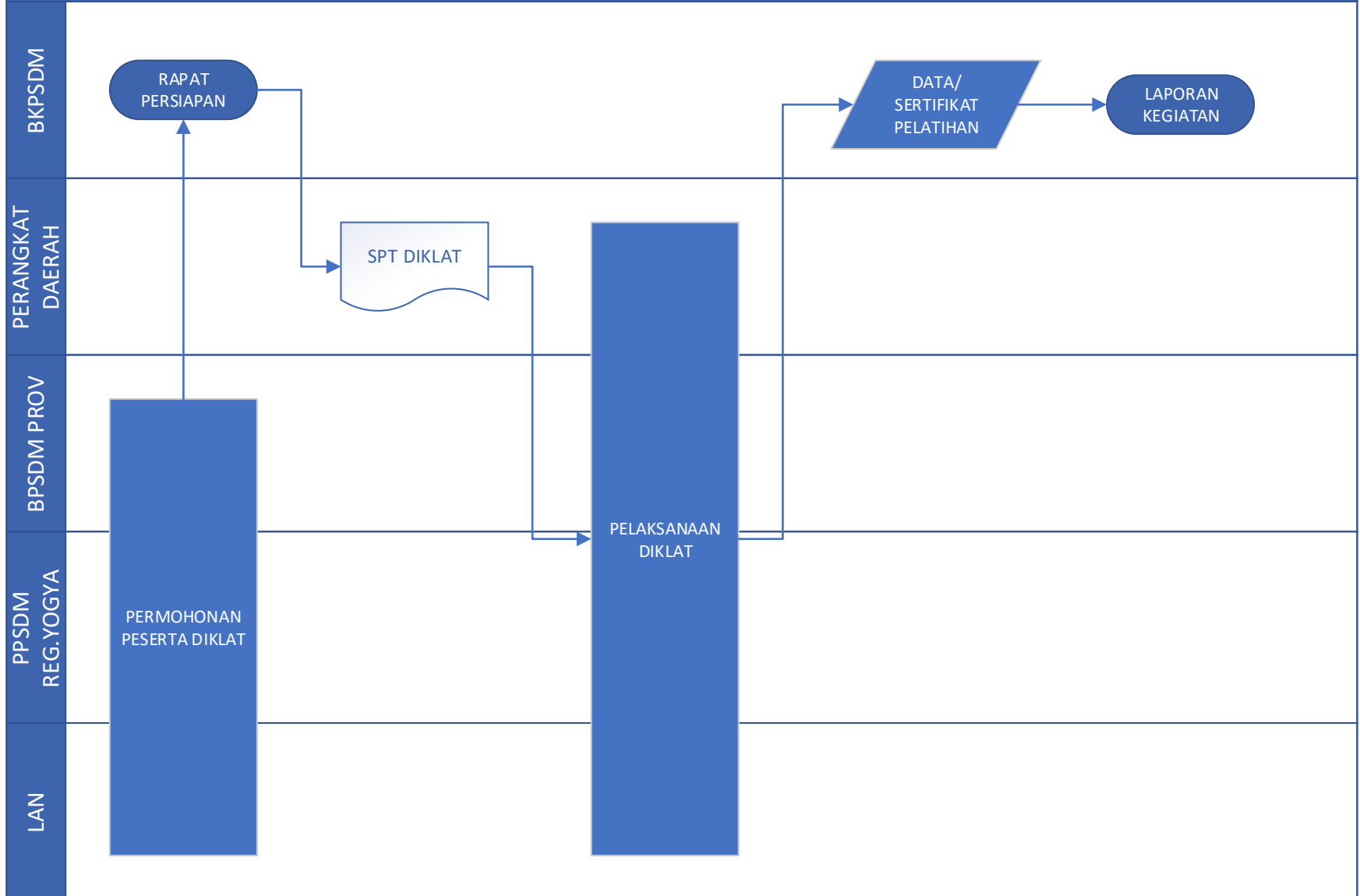
SLW-12.4 CFM 06

PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS



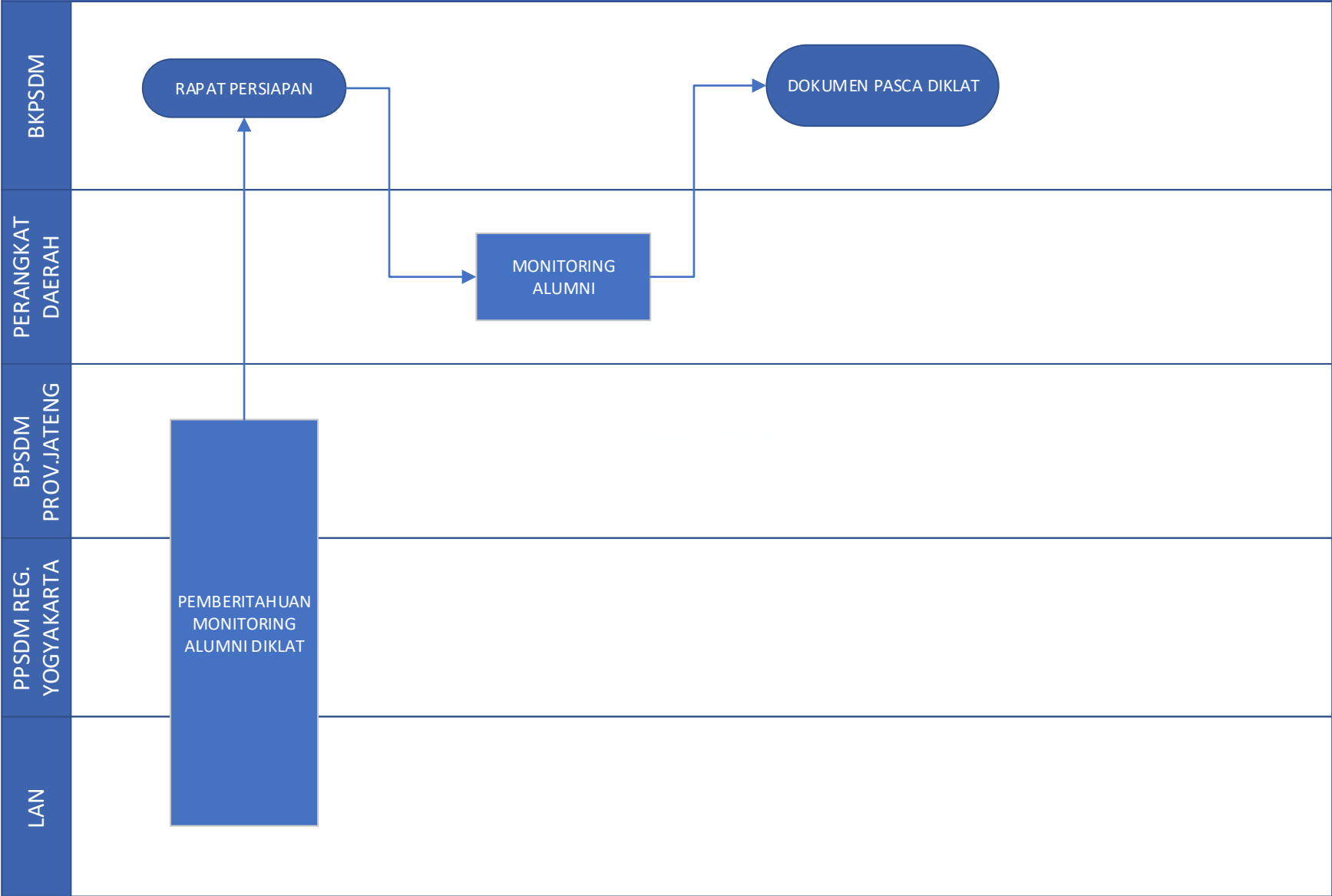
SLW-12.4 CFM 07

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI (LATPIM)



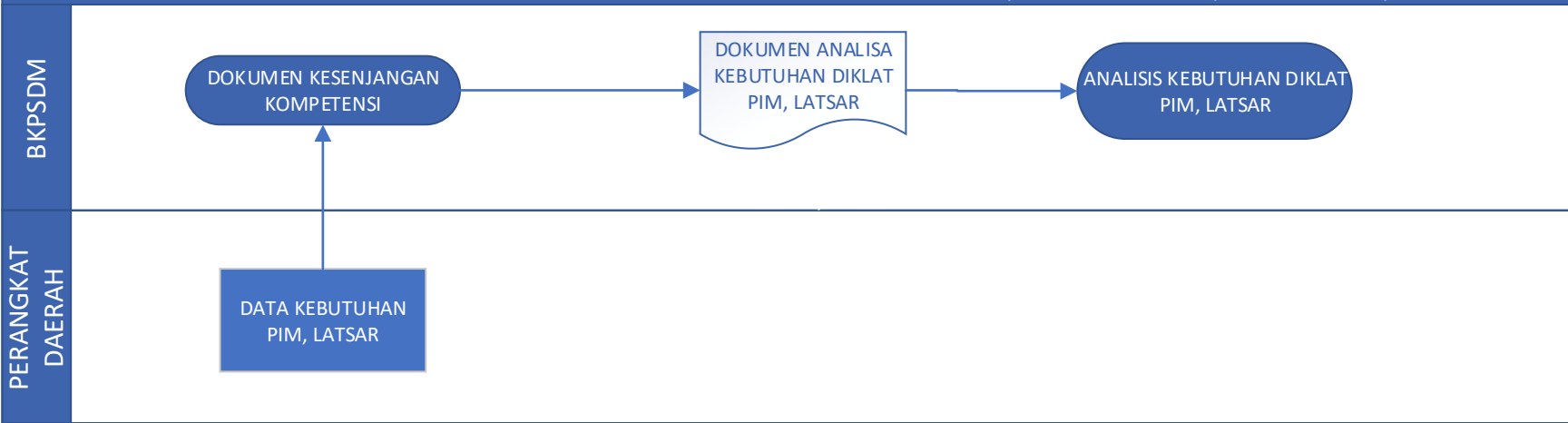
SLW-12.4 CFM 08

PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

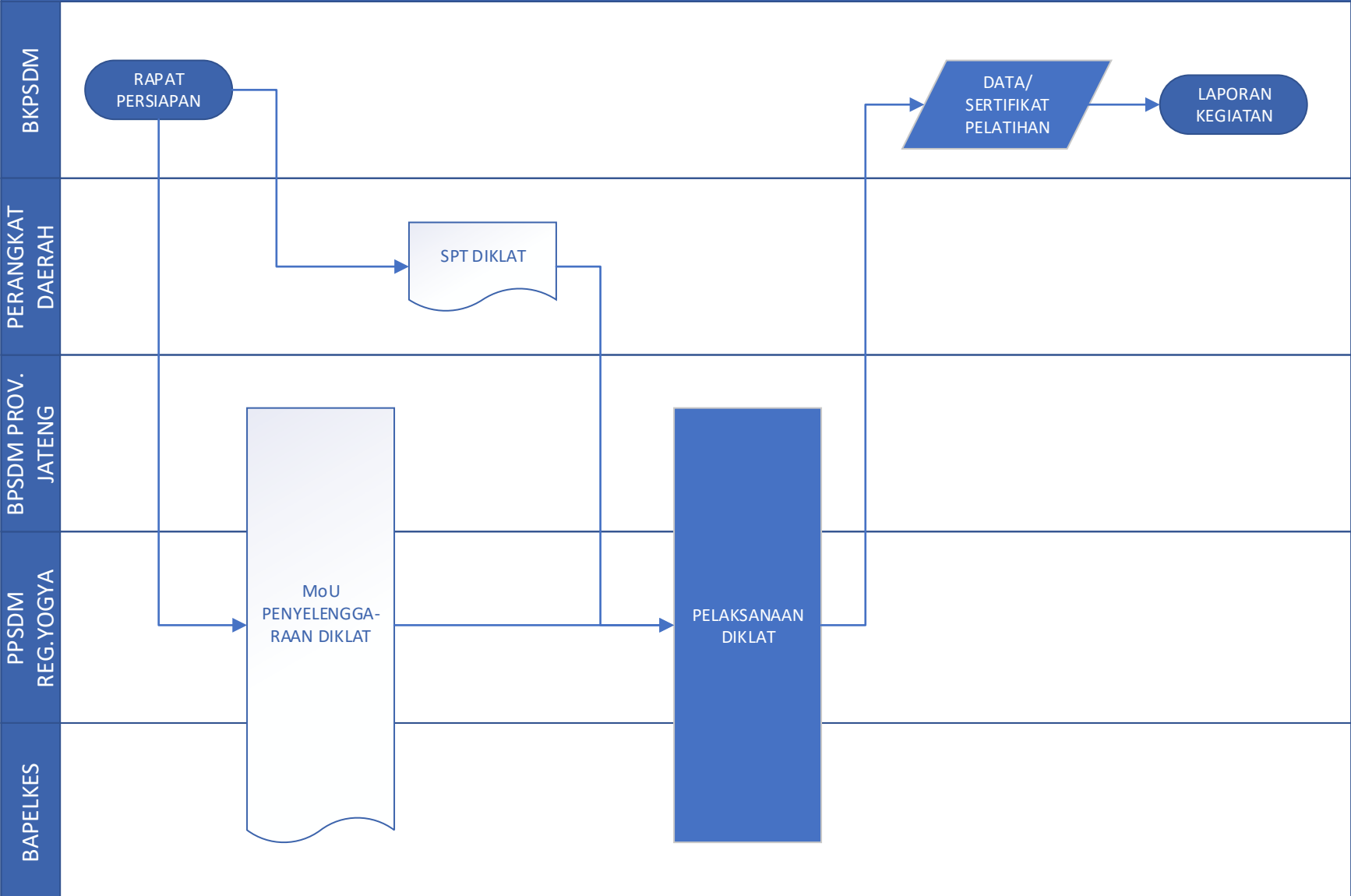


SLW-12.4 CFM 09

PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JPT, KEPEMIMPINAN, PRAJABATAN, SERTA JF

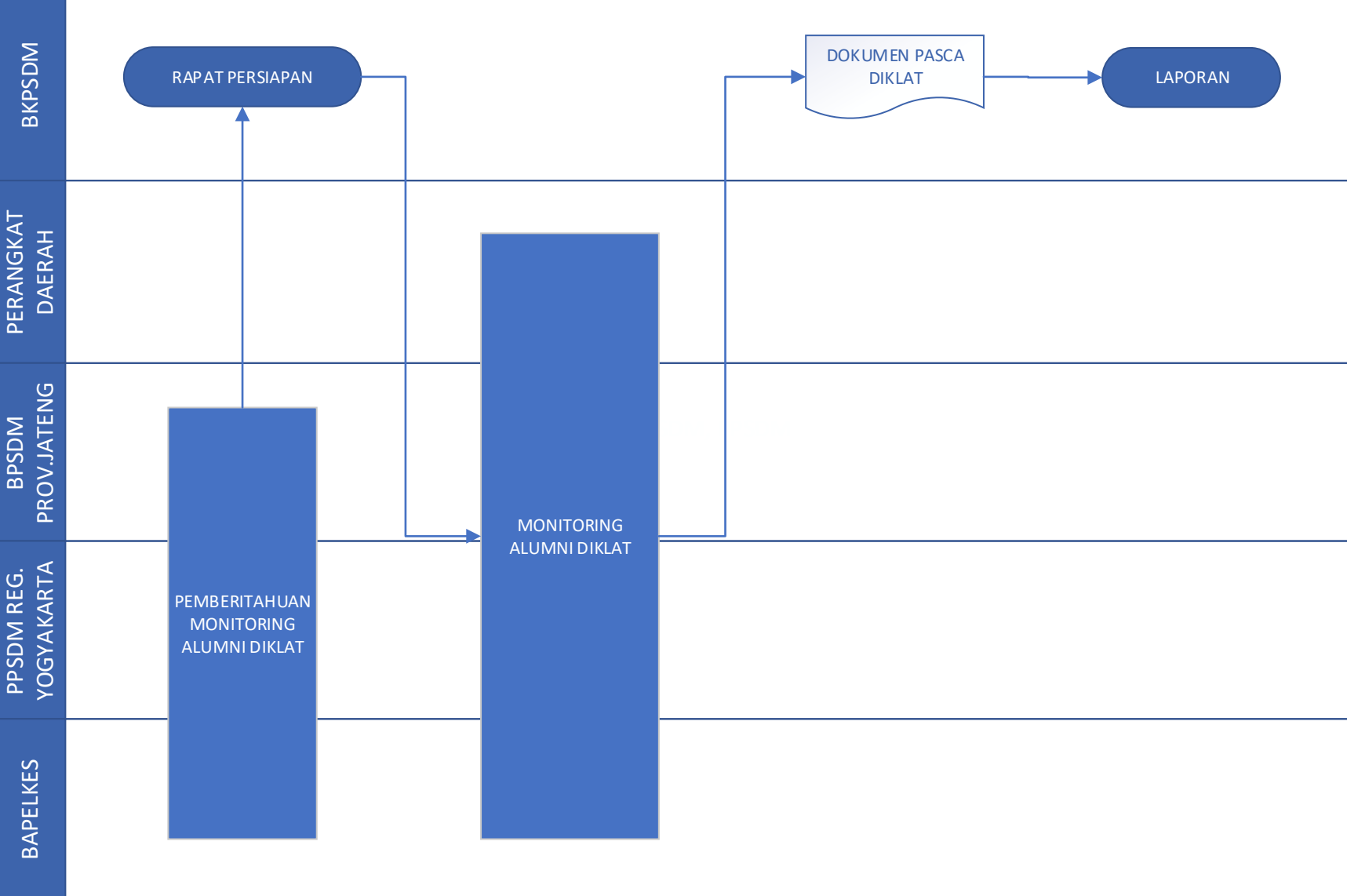


PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI JPT, JF, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN



SLW-12.4 CFM 11

PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN JPT, KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN





PETA RELASI

SLW-13.4

Pengelolaan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

BAPENDA

DINAS PERKIM

DINAS LH

DINAS PMPTSP

DINAS PERIKANAN

DINAS
PERINTRANSNAKER

DINAS PUPR

DINAS PORAPAR

DINAS KOP,UKM,&DAG

DINAS TAN KP

DINAS PERHUBUNGAN

BPKAD

DINAS KESEHATAN

RSUD dr. SOESELO

RSUD SURADADI

DINAS PERKIM

DINAS PUPR

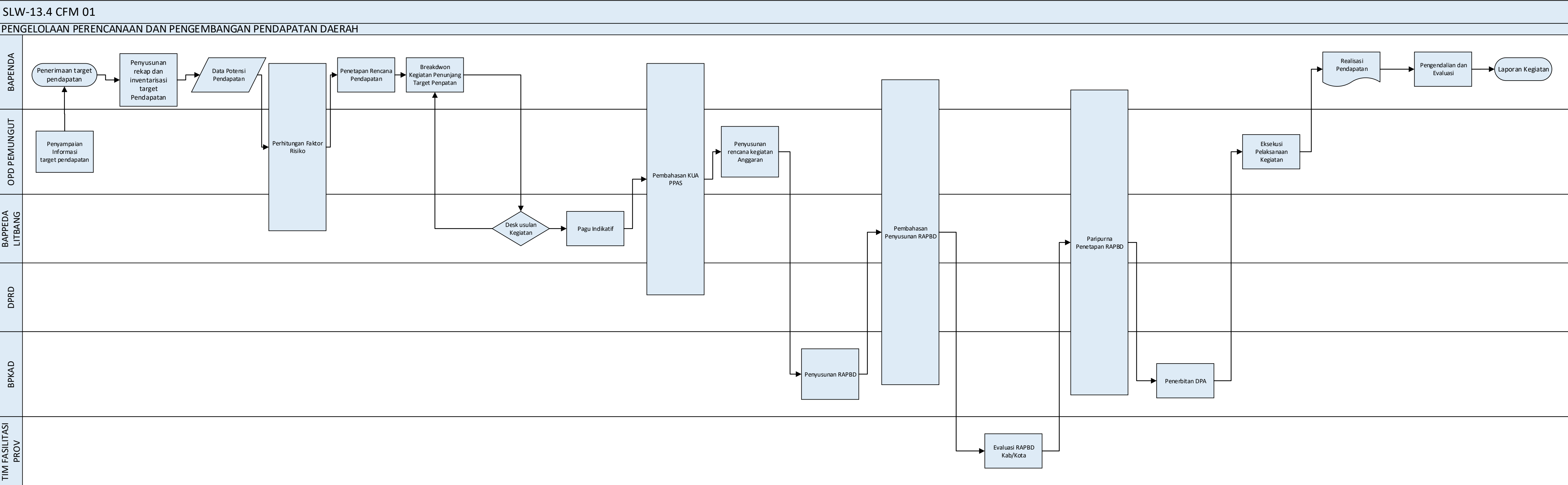
DINAS LH

BAPPEDALITBANG

SATPOL PP

KEC . SLAWI

KEC. KRAMAT



PETA RELASI

SLW-13.5 Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAPENDA

RSUD dr. SOESELO

DINAS KOP,UKM,&DAG

DINAS KPTAN

DINAS PERHUBUNGAN

BPKAD

KEC . SLAWI

DINAS KESEHATAN

DINAS PORPAR

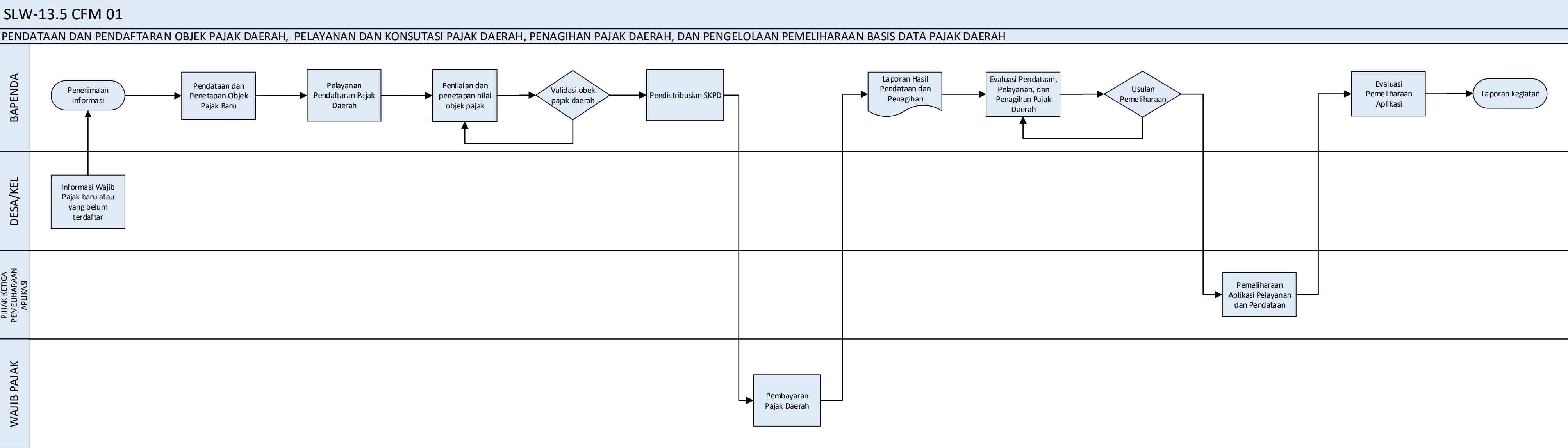
RSUD SURADADI

DINAS PERKIM

DINAS PUPR

DINAS LH

KEC . KRAMAT



PETA RELASI

SLW-13.6

Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

BAPENDA

DINAS PORAPAR

DINAS KOP,UKM&DAG

DINAS PERHUBUNGAN

BPKAD

DINAS KESEHATAN

SETDA

RSUD dr. SOESELO

RSUD SURADADI

DINAS PERKIM

DLH

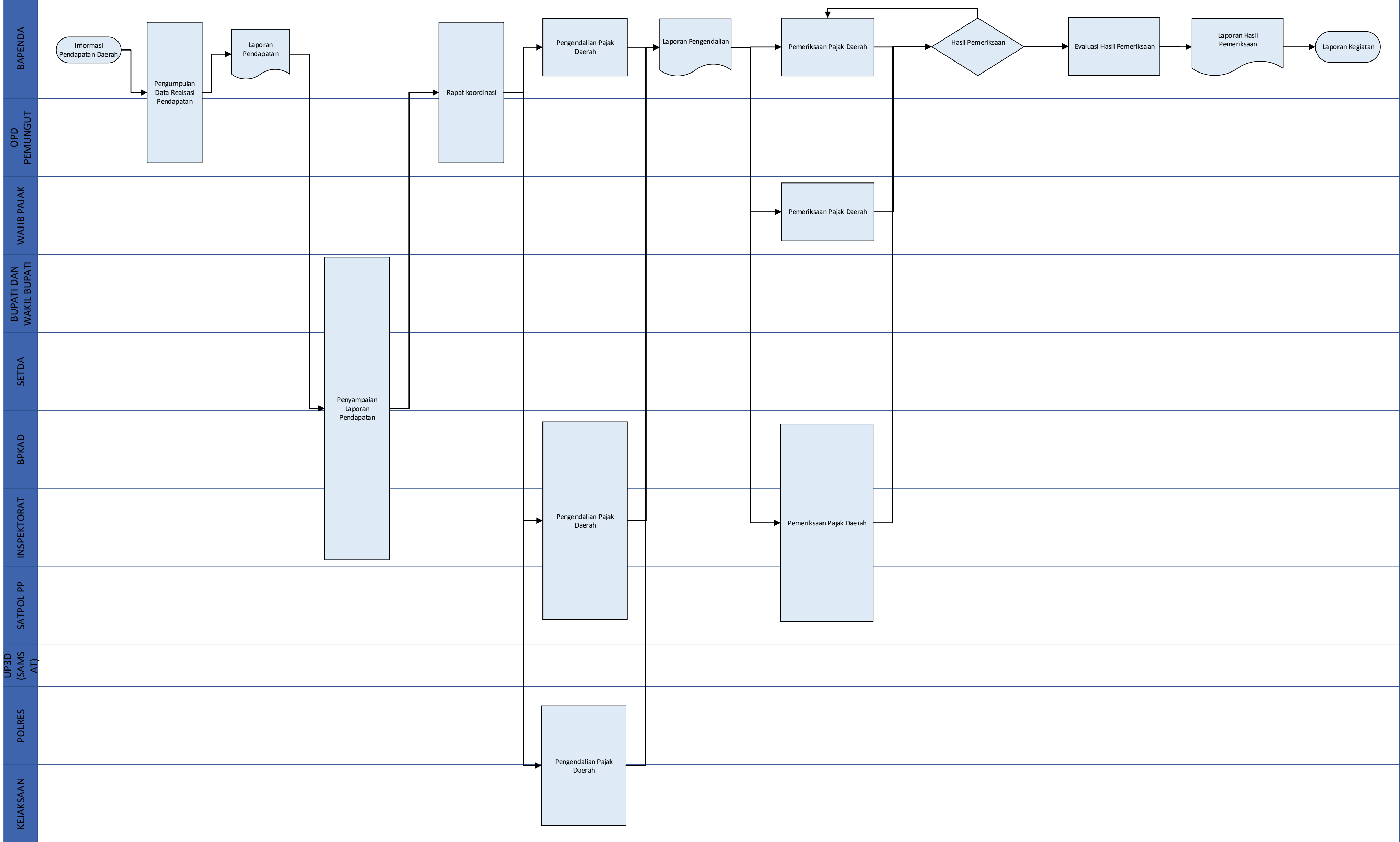
INSEPKTORAT

DINAS KPTAN

DINAS PUPR

KEC . SLAWI

KEC . KRAMAT



PETA RELASI

SPBE SLW – 01.16

Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

DINAS SOSIAL

DINAS KESEHATAN

RSUD Dr. SOESELO

KEMENTERIAN
AGAMA

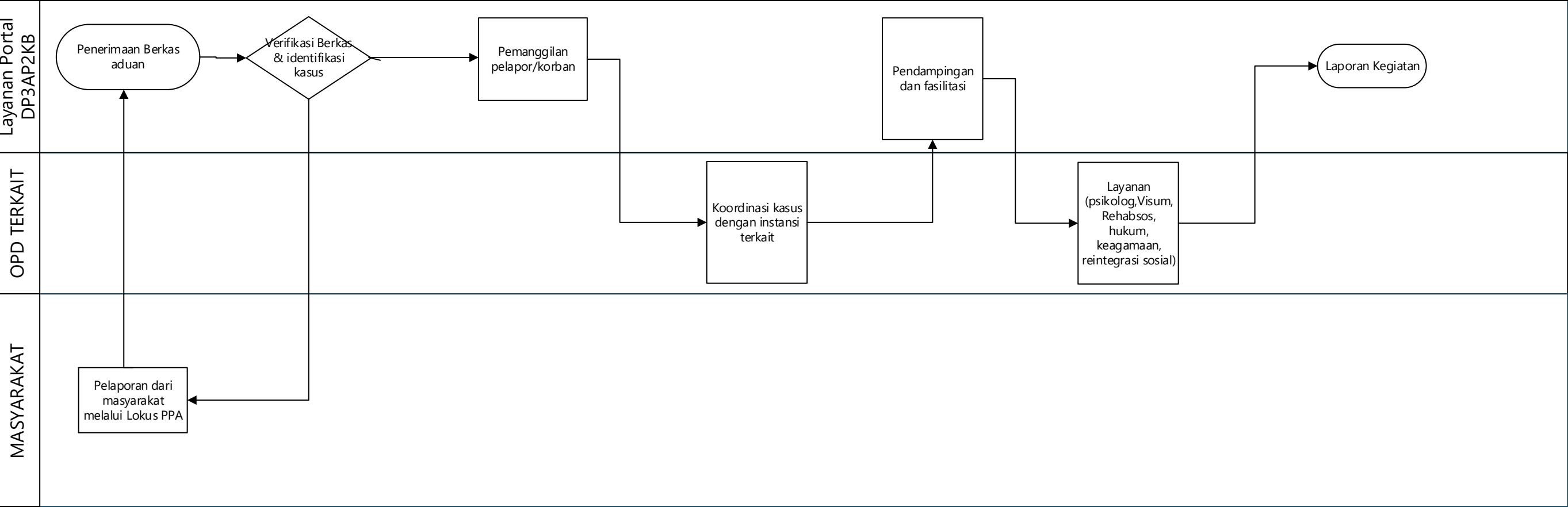
POLRES

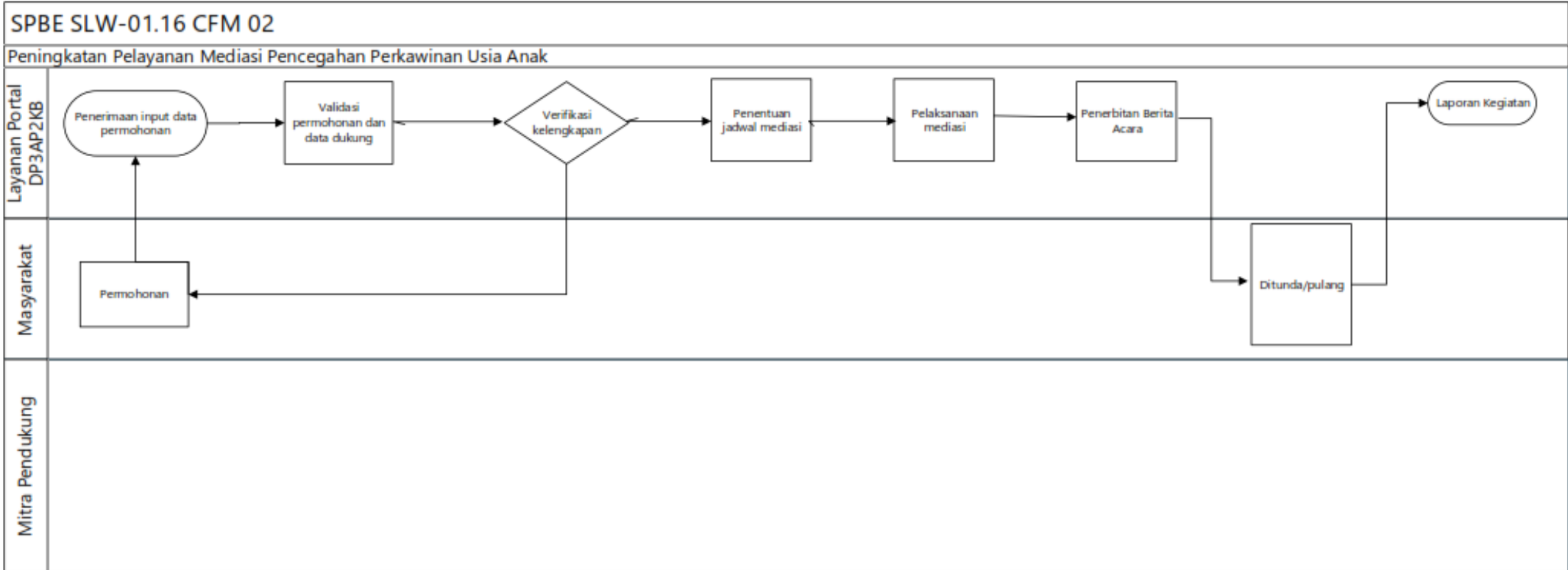
PENGADILAN
NEGERI

KEJAKSAAN NEGERI

SPBE SLW-01.16 CFM 01

Peningkatan Pelayanan Pengaduan Kekerasan pada perempuan dan anak





BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH